

A close-up, high-contrast portrait of Hariqo Wibawa Satria, a man with dark hair and glasses, wearing a dark suit jacket, a light-colored shirt, and a dark tie. The background is a solid dark brown color.

HARIQO WIBAWA SATRIA

Lafiran pane

Jejak Hayat dan Pemikirannya

Pengantar:

DR. Akbar Tandjung

Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul

Drs. Chumaidy Syarif Romas, M.Si.

Hariqo Wibawa Satria, M.HI lahir 8 Oktober 1981 di Bukittinggi, Sumatera Barat, dari pasangan **Syahrial** dan **Khaermenawati**.

Fokusnya pada empat materi: **1)** Sejarah Indonesia dan sejarah HMI, **2)** *Internet and social media*, **3)** *Soft diplomacy and digital diplomacy*, **4)** Pembangunan komunitas dan peningkatan partisipasi publik.

Saat ini sebagai Direktur Eksekutif **Komunikonten**, Institut Media Sosial dan Diplomasi. Alumnus Pondok Modern Gontor ini juga sering menjadi narasumber tentang media sosial, strategi komunikasi di televisi nasional, media, kampus serta berbagai organisasi pemerintahan, organisasi nirlaba dan perusahaan.

Buku ini Lafran Pane; Jejak Hayat dan Pemikirannya Lafran Pane ini ditulisnya selama sepanjang 2007-2010.

Buku terbarunya berjudul: **Seni Mengelola Tim Media Sosial; 200 Tips Ampuh Meningkatkan Performa Organisasi di Internet dengan Anggaran Terbatas** (308 halaman). Instagram: @hariqo81, HP/WA: **081289001636**.
www.komunikonten.com



Lafran Pane Muda
Sumber: Dokumentasi. Muhammad Iqbal Pane

HARIQO WIBAWA SATRIA

LAFRAN PANE

JEJAK HAYAT DAN
PEMIKIRANNYA



LAFRAN PANE
Jejak Hayat dan Pemikirannya

Hak cipta @Hariqo Wibawa Satria, 2010

Penulis: Hariqo Wibawa Satria
Editor: A. Fathoni

Cetakan 1, November 2010
Cetakan 2, Februari 2011

Diterbitkan oleh
Penerbit Lingkar

Lontar Saharjo No. 28 Rt. 008/Rw. 14
Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12960
Tel. 021-8313247
e-mail: penerbit_lingkar@yahoo.co.id

Desain sampul: M. Zahrudin
Tata letak: Priyanto

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Wibawa Satria, Hariqo

LAFRAN PANE: Jejak Hayat dan Pemikirannya

Penulis: Hariqo Wibawa Satria; Editor: A. Fathoni

Cet. 2 — Jakarta: Penerbit Lingkar, Februari 2011

510 hlm. 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-98049-0-4

ISI BUKU

- Catatan Penulis dan Ucapan Terima Kasih XVII
- Pengantar **DR. Akbar Tanjung** XXXI
- Pandangan Visioner Lafran Pane
oleh: **Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul** XXXV
- Perkenalan Hidup dengan Pak Lafran Pane
oleh: **Chumaidy Syarif Romas** XL

BAB I PENDAHULUAN:

LAFRAN PANE DAN INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA 1

- Perumusan Masalah 6
- Harapan dari Penulisan Buku Ini 7
- Ruang Lingkup Studi 7
- Studi-studi Terdahulu mengenai Lafran Pane 8
- Dasar-dasar Analisis 17
- Istilah “Aktor Intelektual” 18
- Metodologi 22
- Pendekatan 23
- Sistematika Pembahasan 28

BAB II SEJARAH HIDUP LAFRAN PANE 35

- Silsilah Lafran Pane 35
- Marga Pane 36
- Kerajaan Pane 38
- Masa Kecil hingga Masa Pencerahan 40
- Keluarga 46
- Keluarga Sastrawan dan Seniman 46

XII • LAFRAN PANE

•Mendirikan HMI	51
•Saat-saat Sebelum Pendirian HMI	55
•Mendirikan PERSAMI	67
•Proklamasi 17 Agustus 1945	68
•Karakteristik Lafran Pane	69
- Teguh Memegang Prinsip	69
- Sabar	71
- Mengayomi Junior	72
- Tidak Silau terhadap Jabatan/Kekuasaan	73
- Sederhana dan Bersahaja	75
- Independen	77
- Nyaman di Yogyakarta	78
•Kisah-kisah Seputar Lafran Pane	78
- Sepeda Seorang Profesor	78
- Lafran Pane (Cerita dari Syafi'i Ma'arif)	79
- Deliar Noer Mengetahui Lafran dan Dahlan Agak Berseberangan	81
- 10 Oktober Kelabu	82
- Tidak Populer di HMI	83
- Kurang Dikenal Di Kampungnya	87
- Riwayat Pekerjaan	88
- Karya Tulis Ilmiah	89
- Orang-orang dan Tempat yang Memengaruhi Pemikiran Lafran Pane	89

BAB III SEJARAH KEHADIRAN INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA

•Kemunculan Istilah Intelektual	109
•Tragedi Dreyfus	111
•Pengertian Intelektual	114
•Pramoedya Ananta Toer	131
•Pengkhianatan Intelektual dan Intelektual Durhaka	136
•Sarjana Indonesia	144
•Intelektual, Organisasi dan Politik: Masalah Orientasi	147

•Kehadiran Istilah “Intelektual” di Indonesia	150
•Kehadiran Istilah “Intelektual Muslim Indonesia”	154
•Lahirnya JIB dan SIS	155
•Studenten Islam Studieclub (SIS)	159
•Intelektual Muslim Indonesia	163

BAB IV PEMIKIRAN LAFRAN PANE TENTANG INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA

•Intelektual Muslim dan Peradaban Agung Indonesia	189
•Ciri-ciri Intelektual Muslim Indonesia	193
1. Keyakinan Intelektual Muslim Indonesia pada Kesempurnaan Ajaran Islam	193
- Dampak Berdirinya HMI	195
2. Keseimbangan Pengetahuan Intelektual Muslim Indonesia	197
- Semangat Keseimbangan 5 Februari 1947	199
3. Intelektual Muslim Indonesia sebagai Pembaharu Pemikiran di Segala Bidang Kehidupan	204
4. Keislaman-Keindonesiaan sebagai Titik Tolak Gerakan Intelektual Muslim Indonesia	222
- Korespondensi antara Ajaran dan Realitas	233
- Nasionalisme	236
- Islam dan Indonesia Bertentangan Adalah Hasil Rekayasa	238
- Tentang Pancasila	239
5. Intelektual Muslim dan Kerukunan Umat Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama	242
- Kemajemukan Fakta yang Harus Direfleksikan	242
- Peran Agama	243
- Fenomena Sekolah Tinggi Islam (STI) 1946	245
- Usaha-usaha menuju Persatuan Umat, Persatuan Bangsa	245
6. Intelektual Muslim Indonesia dan Kewajiban sebagai Pejuang dalam Mengangkat Harkat dan Derajat Rakyat Indonesia	257

- NKRI Harga Mati	258
- Kritik untuk Intelektual Muslim di Zaman Orde Baru	259
- Tanggapan Lafran Pane	261
- Memahami Tulisan Lafran Pane Tahun 1990	262
- Langkah-langkah Perjuangan Lafran Pane	263
•Prinsip Dasar Keindonesiaan Intelektual Muslim	268
•UUD 1945 dan Pancasila	269
•Hukum Tata Negara	270
•Mengenai Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar	271
•Enam Prinsip Dasar	273
•Lafran: Pancasila Bukan Keilmuan	275
•Mengenai MPR dan Sindrom Kekuasaan	275
•Wewenang MPR, Mahkamah Agung	276
•Apakah Sebuah Keputusan MPR Sudah Sesuai dengan Keyakinan Rakyat?	277
•Dewan Perwakilan Rakyat	279
•MPR Dipilih oleh Rakyat	280
•Tentang Dewan Pertimbangan Agung	280
•Sistem Presidensial dan Parlemerter serta Pemilihan Presiden Langsung	281
•Sistem Parlemerter menurut Lafran Pane	282
•Indonesia menurut <i>Founding Fathers</i>	285
•Apa Itu Bangsa Indonesia dan Mana Saja Indonesia?	286
•Indonesia Negara Ber-Tuhan	286
•Makhluk Seperti Apakah Negara Itu?	288
•Setiap Orang Indonesia Harus Ber-Tuhan	288
•Indonesia Bukan Negara Islam	289
•Indonesia Bukan Kerajaan	292
•Soekarno mengenai Harapan untuk Intelektual Muslim	292
•Menghidupkan Kembali Semangat Musyawarah	293
•Hatta, Piagam Jakarta, NKRI Final	298

- Proklamasi 298
- Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Agama Lain 301
- Hubungan Agama dan Negara 306
- Sikap Bangsa Indonesia terhadap Dunia 310
- Modernisasi 311

BAB V PEMBENTUKAN INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA MELALUI HMI 345

- Landasan Pemikiran Lafran Pane tentang Pembentukan Intelektual Muslim 345
 1. Wawasan Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan 345
 2. Kedudukan Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan yang Strategis 348
 3. Hasil Keputusan Kongres I HMI Tanggal 30 November 1947 tentang Usaha 352
 4. Tulisan Lafran Pane: “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia” 353
 5. Tujuan HMI yang Diputuskan pada Kongres IV HMI di Bandung 09–15 Oktober 1955 354
 6. Tujuan HMI yang Diputuskan pada Kongres VIII HMI di Solo 10–17 September 1966 355
 7. Rumusan Tujuan HMI yang Diputuskan pada Kongres IX HMI di Malang 03–10 Mei 1969 356
- Peran HMI dalam Pembentukan Intelektual Muslim 358
 1. Pengertian Kader 360
 2. Arah Perkaderan 361
 3. Wujud Profil yang Diinginkan 363
- Profil Kader HMI 368
- Indonesia Genius 2020 – 2025 377

BAB VI PENUTUP/KESIMPULAN 395

- Saran-saran 411
- Penutup 412

•Wawancara Iqbal Pane	414
•Wawancara Mahadi Sinambela	430
•Wawancara Senopati	434
•Wawancara Baharuddin Aritonang	441
•Makna Himpunan	445
•Lampiran-lampiran	447
•Daftar Pustaka	455
•Tentang Penulis	463

CATATAN PENULIS DAN UCAPAN TERIMA KASIH

...dalam wadah itu....

Kita tuangkan suatu masyarakat tanpa eksploitasi

Suatu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia...

Suatu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis

oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya...

Suatu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi Cerdasss...

Suatu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini, suatu bangsa yang terdiri dari ratusan juta *Insan Kamil* yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Swt....

Ini Tujuan Kita, ini Maksud Kita, ini Tekad Kita dengan meng-ADA-kan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 1945.

(Ir. Soekarno)¹

Kebetulan, catatan ini ditulis pada bulan Agustus, bulan bersejarah bagi dunia. Sebagai pemuda, asyik juga membaca kutipan pidato lama seperti di atas, agar kembali ingat mengapa negeri ini harus ada? (*raison d'etre*). Kata Bung Hatta, pemuda-pemuda murni jiwanya, mereka hanya ingin melihat pelaksanaan secara jujur apa-apa yang telah dijanjikan kepada rakyat.

Di zaman Jepang, bersama pemuda lainnya, Lafran Pane adalah pemuda binaan Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Ketika Jepang menyerah pada Sekutu 14 Agustus 1945, pemuda Indonesia termasuk Lafran mengikrarkan “tidak sudi menerima Kemerdekaan Indonesia dari Jepang”, seperti yang dipersiapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ajakan ini salah satunya dilakukan Sutan Syahrir. Usaha pemuda berhasil, bagian akhir teks proklamasi berbunyi “Atas nama

bangsa Indonesia”, bukan “Atas nama PPKI”.

Jakarta kemudian digempur Sekutu, Desember 1945 Lafran hijrah ke Yogya, tidak lama berselang, 4 Januari 1946 Presiden dan Wapres pindah ke Yogyakarta yang kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Islam (STI) yang berdiri tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta, tanggal 10 April 1946 pindah juga ke Yogyakarta. Maka, mendaftarkanlah “si anak Medan” ini ke STI. Tampaknya, kedekatannya dengan ideologi Syahrir, Sosialisme yang cukup kuat, Lafran mewakili STI menjadi pengurus Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), sebuah organisasi ekstra-kampus berhaluan Sosialis dan berorientasi kepada Partai Sosialis.

Merasa PMY tidak memberikan pendidikan keagamaan bagi anggotanya, Lafran dan kawan-kawannya mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 5 Februari 1947, dengan tujuan: *Pertama*, mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Berdiri juga PMKRI dan GMKI. Ketiga organisasi berdasarkan agama itu tidaklah separatis atau eksklusif, karena ketiganya turut memrakarsai Kongres Mahasiswa Indonesia 8 Juni 1947 di Malang.

Cita-cita Lafran ketika itu adalah menciptakan intelektual-ulama dan ulama-intelektual. Keseimbangan ini lazim disebut *Insan Kamil* (hamba paripurna) sebagaimana pidato Soekarno di atas. Di kalangan anggota HMI sekarang ini, istilah *Insan Kamil* disebut Insan Cita dengan 5 Kualitas, 17 Indikator dan 5 Ciri lainnya yang kemudian disebut Intelektual Muslim Indonesia (Bab V). Lafran Pane, dkk, adalah satu dari sekian banyak nama yang mendedikasikan diri dalam mega proyek pembangunan ratusan juta *Insan Kamil* ini.

Status HMI yang independen sejak berdirinya di STI menjadikannya memiliki daya tarik hebat. Peran pendidikan dan kontrol pemerintahannya cukup menggigit. Di era Orde Lama, Departemen Pendidikan Tinggi saat itu memperkirakan

bahwa 32 persen dari seluruh mahasiswa Indonesia adalah anggota HMI; 40 persennya tidak menjadi anggota organisasi mahasiswa mana pun; dan sisanya, 28 persen masuk ke berbagai organisasi mahasiswa lainnya, di antaranya yang paling penting adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang nasionalis kiri dan Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang Komunis.²

Dalam peringatan Dies Natalis ke-22 HMI Cabang Yogyakarta di Gedung Seni Sono Yogyakarta 5 Februari 1969, Lafran mengatakan: “Bahwa sebenarnya HMI tidak perlu ada. Karena apa yang dilaksanakan HMI dapat dikerjakan Corps Mahasiswa (CM) tahun 1947, oleh PPMI tahun 1960, oleh KAMI 1965. Dapat juga dilakukan oleh organisasi lain. Namun demikian, kenyataannya seperti yang kita saksikan saat ini, bahwa HMI ada. Kalau begitu mengapa demikian?”

Lebih lanjut Lafran Pane mengatakan: “Walaupun CM, PPMI, KAMI dapat melakukan apa yang dilaksanakan, namun ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan organisasi tersebut, dan hanya dapat dilaksanakan HMI, yaitu perkaderan yang merupakan ciri khas HMI, yang tidak dimiliki organisasi lain, di mana kader yang dihasilkan HMI adalah anggota yang berwawasan Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan, dengan 5 kualitas insan cita dan bersifat independen.”

Lafran Pane juga menegaskan 6 (enam) hal yang harus dipertahankan intelektual Muslim Indonesia, yaitu: **1)** Dasar (Filsafat) Negara yaitu Pancasila. **2)** Tujuan Negara, yakni seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pembukaan ini juga tidak boleh diubah, **3)** Asas Negara, yaitu Asas Hukum. Pada 1945, rakyat mendirikan Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan. **4)** Asas Kedaulatan Rakyat. Asas ini tercantum dalam Pembukaan UUD. Negara RI dibentuk di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Pendapat dan keinginan rakyatlah yang harus menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya. **5)** NKRI. **6)** Asas Republik.

SEJARAH PENULISAN BUKU INI

Ketertarikan membaca biografi dimulai saat saya di bangku SD. PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) adalah pelajaran favorit saya. Membaca sejarah Kapitan Pattimura yang digantung kompeni membuat malamnya susah tidur. Saya ingat betul bulat kaca mata Panglima Polim, gurat wajah Tjut Nyak Dien, Tuanku Imam Bonjol, Tjokroaminoto, Rohana Kudus, Soekarno, Hatta, Natsir, Bung Tomo, dan lain-lain, namun yang paling saya hafal ya itu, Pattimura. Saya jadi tahu, kebenaran bisa berakhir di tiang gantungan. Jika nanti menikah, ingin anak saya bernama Sutan Pattimura.

Waktu kelas 3 SD, dalam pelajaran keterampilan bersama kawan-kawan, kami membuat bingkai untuk gambar-gambar para pahlawan yang lalu dipajang mengelilingi dinding kelas. Makanya, awal mula di Yogya, saya sempat bingung melihat seorang kawan memakai baju bersablon orang dan asap. “Itu pahlawan dari mana?” tanya saya, lalu dijawab kawan yang lain, “Itu gambar Kurt Cobain, Nirvana.”

Di rumah, ada *Biografi Hatta* karya Deliar Noer, pernah baca tapi tidak tamat, lagi pula waktu itu kurang paham juga. Belakangan, baru saya tahu Pak Noer diakui sebagai penulis super teliti, datanya tidak main-main, spektrum pembahasannya luas. Penulis senior Daniel Dhakidae dalam bukunya *Cendekiawan dan Kekuasaan*³ mengatakan, “Sedikit sekali jumlah buku yang bisa dikategorikan sebagai biografi intelektual Indonesia, bila biografi intelektual diartikan sebagai karya yang memadukan ide dengan sejarah yang dijalin dalam suatu keutuhan. Satu perkecualian besar yang hampir menjadi satu-satunya yang pantas disebut di sini adalah *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, karya Prof. Dr. Deliar Noer.”

Pembaca yang khatam membaca buku itu saya rasa sepakat, sulit menandingi karya Deliar Noer. Kebetulan, skripsi saya juga tentang biografi tokoh besar: Lafran Pane, pendiri HMI; pembimbingnya juga ahli sejarah HMI, Prof. Dr. H. Agussalim

Sitompul. Lulus S-1 saya berniat membukukannya. Tetapi, membaca karya Deliar Noer saya jadi minder. Akhirnya, pagi, siang, malam saya mendatangi Bang Agus—panggilan Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul.

Sayangnya, data tentang Lafran tidak banyak berubah sejak 1975. Karya tulisnya pun terbatas. Cukup dipahami, Lafran Pane bukanlah politisi, artis yang ramai diberitakan. Dia adalah sosok yang sepi liputan. Saya temui Pak Lafran di makamnya yang kebetulan satu kompleks dengan KH Ahmad Dahlan. Tak ada istimewaanya makan itu, kecil, sempit, bahkan untuk duduk berdoa pun kita terpaksa menginjak makam tetangga. Makin pesimis saya, biasanya seorang tokoh besar makamnya juga besar, karena dimakamkan besar-besaran.

Layar sudah berkembang, walaupun dalam proses penulisan banyak mendapat interupsi dari berbagai pihak, tapi semaksimal mungkin saya upayakan buku ini terwujud. *No reason...* bahan ada, badan pun sehat, tinggal memperbanyak wawancara dan mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya. Kendati saya akui, dibandingkan buku *Biografi Politik Hatta* karya Profesor Deliar Noer, tentu buku ini masih jauh kalah kelas. Dia, Deliar Noer, semoga generasi muda hari ini dan di masa mendatang tidak melupakannya.

KETAKUTAN SAYA

Setelah meneliti tentang Lafran Pane, saya berkesimpulan, ia memang super sederhana, zuhud, tidak ujub. Cukup aneh, pendiri HMI, pensiunan profesor tidak punya rumah sendiri dan hidup terus-terusan di rumah dinas. Meski demikian, dampak dari gerakannya seperti yang kita lihat sekarang dengan berlimpahnya alumni HMI di semua lini jelas tidak sederhana.⁴

Meski begitu, saya khawatir juga buku ini berakibat pengkultusan bagi Lafran Pane, sebab di HMI tidak ada tradisi pemimpin selalu benar. Yang ada justru pemimpin harus “dibantai” saat Laporan Pertanggungjawaban. Bahkan ada

guyon, lebih berat menjadi ketua komisariat di HMI (level fakultas) daripada menjadi gubernur/presiden. Sebab, bisa pingsan karena dihakimi sampai Subuh. Di samping itu, di HMI juga tidak ada *haul-haulan* untuk tokoh HMI.

Satu hal lagi, pernah saya membaca buku tentang seorang tokoh terkenal di negeri ini yang kebetulan masih hidup. Buku itu menuai kritik dari pakar terkemuka, katanya si penulis buku bermental feodal karena semua isi buku hanyalah berisi puji-pujian buat tuannya. Menurut sejarah, orang kalau terlalu banyak dan terus-menerus dipuji bisa jadi tuhan dia.

Dari beberapa sumber yang saya ketahui, buku biografi yang bagus adalah buku yang menyajikan secara utuh kebaikan dan keburukan sang tokoh. Saya temui seorang ahli sejarah di Universitas Kristen Sanata Dharma, namanya Dr. Baskara T. Wardaya, menurutnya: “Biografi yang bagus sebaiknya tidak semua sumbernya dari buku (literatur), namun juga bersumberkan dari orang-orang dekat si tokoh (*oral story*), bahkan musuh-musuhnya juga harus diwawancarai, agar informasinya seimbang.”

Saya patuhi Romo Baskara dengan mewawancarai beberapa orang. Rata-rata kesannya tentang Lafran Pane seragam, Lafran Pane ya sederhana, jujur dan kesan-kesan positif lainnya. Sedangkan untuk mencari musuh-musuh Lafran Pane sulit sekali, karena ia tidak terlibat dalam politik praktis, beliau hanya seorang dosen kampus. Ambisinya pun kecil untuk dirinya. Biasanya orang yang tidak banyak keinginan jadi “ini-itu” sedikit lawannya.

Penasaran, saya ke rumah Lafran Pane menemui istrinya. Sebagai pembuka, saya utarakan maksud kedatangan untuk mendapatkan foto Pak Lafran Pane terbaru. Ibu itu heran, lalu saya disuruh mencari sendiri di rak buku di bawah TV. Satu per satu dokumen saya kupas, hasilnya tidak ketemu. Namun, saya mendapatkan hal penting lain, yakni dokumen yang menyatakan bahwa rumah itu adalah rumah dinas. “Jadi, Pak

Lafran belum mempunyai rumah ya, Bu?” Benar, jawabnya.

Dalam dokumen itu dijelaskan, istri Pak Lafran boleh menempati rumah dinas tersebut meski suaminya sudah tiada, tapi dibatasi hingga masa pensiun berakhir. Sejak itu, saya mulai sadar, cerita orang tentang kesederhanaan Pak Lafran bukan asal bicara. Dokumen tersebut ikut saya lampirkan dalam buku ini.

Jadi, tidak disengaja, jika banyak hal positif tentang Lafran Pane yang dieksplorasi dalam buku ini, karena memang demikianlah data yang saya punya, dengan segala keterbatasan sumber daya yang saya miliki, usaha untuk senantiasa memperbarui data tetap saya lakukan. Makanya, penerbitan buku ini ditunda sampai 2 tahun. Saya yakin, hal ini dapat dipahami pembaca. Tapi, beberapa kritik terhadap Lafran juga ada dalam buku ini.

Sekali lagi, saya tekankan, buku ini tidak sama sekali bermaksud mengkultuskan Lafran Pane, namun sebagai apresiasi dari perjuangan beliau, sebab banyak sekali pemikiran beliau yang relevan untuk saat ini, demikian pula sikap batin beliau yang sangat layak diteladani di tengah kondisi bangsa seperti sekarang ini. Sebuah kondisi ketika banyak orang tidak tahu di mana terminal dan ke mana tujuan. Kondisi ketika sikap jujur dianggap aneh.

TANGGAPAN KELUARGA LAFRAN PANE

Setelah membaca buku Yudi Latif, bahkan hingga dua kali. Sekali lagi, saya minder. Tiba-tiba seorang kawan meyakinkan, “Bukumu pasti ada keunggulannya, karena setiap buku pasti berbeda.” Saya bersemangat lagi. Sebab itu, guna melengkapi data, saya berniat menghubungi keluarga Lafran Pane.

Waktu Halal bi Halal alumni HMI Yogya di Jakarta tahun 2007, saya pernah bertemu Ir. Iqbal Pane, putra Lafran Pane. Waktu itu, saya bertugas sebagai penjual kalender 2008 HMI Yogya sambil pegang kotak infak. Maksudnya, orang setelah

beli kalender juga harus infak. Infak bisa diartikan juga “iuran faksa”. Saat Pak Iqbal Pane keluar, dia membeli kalender 20 kali lipat harga. Mau saya ajak ngobrol, dia langsung pamit jalan. Ingin saya kejar, tidak mungkin, karena saya lagi pegang kotak infak, nanti malah dikira melarikan uang kotak infak. Niat itu pun saya urungkan.

Akhirnya, melalui saudara Tamam dan Hilman, saya mendapatkan nomor kontak pribadi Pak Iqbal. Saya sms tujuan saya, yakni hendak bertemu sekaligus wawancara mengenai Lafran Pane. Harapannya, ketika sudah di-sms, maka ketika ditelepon, beliau bisa langsung memberikan jawaban. Namun, sms saya belum kunjung dibalas, berkali-kali sms tetap sama, ditelepon belum diangkat. Dalam hati ini, mungkin Pak Iqbal Pane tidak setuju. Lalu, niat wawancara saya batalkan. Apalagi saya dengar, Pak Iqbal tidak suka orangtuanya dibesar-besarkan.

Alhamdulillah, ternyata Allah Swt berkehendak lain. Bulan Agustus 2009, saya dapat juga bertemu Pak Iqbal Pane, berkenalan dan mewawancarainya. Menurutnya, “sebelum Anda juga sudah ada yang wawancara tentang Pak Lafran, katanya buat buku juga, tapi sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya.” Banyak sekali informasi yang saya peroleh. Melalui buku ini, saya haturkan terima kasih kepada Pak Iqbal Pane.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas berlimpahnya nikmat dalam proses menerbitkan buku ini. Betapa tidak, umumnya buku yang terbit bertolak dari tesis atau disertasi, sedang buku ini hanya skripsi saya saat menyelesaikan studi dalam Ilmu Perbandingan Agama di sebuah kampus yang sangat saya banggakan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mungkin ini hikmah kenapa saya tidak lulus SPMB dulu. Walaupun dalam penulisan saya lakukan sendiri, namun mustahil rampung tanpa dukungan banyak kalangan.

Saya berterima kasih kepada Prof. Dr. H. Agussalim

Sitompul dan Masrur CHJB M.Si. Bang Agus adalah seorang yang sangat berkobar-kobar dalam memotivasi agar saya terus membaca dan belajar metodologi penelitian. Saya berduka, karena saat wisuda beliau tidak dapat hadir lantaran kecelakaan; mobilnya terbalik, lututnya retak. Selama penulisan, saya bebas meminjam berbagai buku koleksinya, walau baru setahun kemudian saya kembalikan. Semangat saya terjaga setiap pertemuan dengan Bang Agus. Sementara Bang Masrur adalah sosok yang membiarkan saya bebas berkreasi.

Ilmu Perbandingan Agama memang tidak terkenal di masyarakat, apalagi di kalangan siswa SLTA. Sepanjang yang saya alami, ilmu ini sangat berguna agar cara pandang kita menjadi luas terhadap dunia. Saya diajari mengenal sejarah agama-agama di dunia, dan hal ini relevan dengan Indonesia yang secara formal dan tegas memproklamkan diri sebagai bangsa yang ber-Tuhan. Lulusannya diharapkan menjadi seorang yang adil melihat perbedaan.

Terima kasih juga saya haturkan kepada Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag. (Dekan Fakultas Ushuluddin), seorang ibu yang penuh kasih sayang. Tanggal 29 Februari 2009, sebuah sms masuk ke hp saya: “Rico..., selamat yah, tapi saya harap kamu tidak di-DO dari kampus, maka usahakan bisa lulus sebelum Agustus tahun ini, Okey”. Saya pikir ini pasti sms kawan, apalagi nomornya tidak cantik. Saya cek, ternyata sms dari Bu Sekar. Ucapan terima kasih juga untuk semua civitas akademika UIN SUKA, khususnya Prof. Dr. Amin Abdullah, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang genius, sabar, dan rendah hati.

Saya juga berterima kasih kepada Drs. Chumaidy Syarif Romas, M.Si (Ketua Umum PB HMI 1976–1979), dosen saya dalam pelajaran Perkembangan Teologi Kristen Modern (PTKM). Beliau adalah tokoh mahasiswa yang dikenal luas pada era 1965–1980, namun memilih menjadi pendidik dan tinggal di daerah terpencil. Ketegasan dan kesederhanaannya

adalah kekuatannya di mata saya.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dalam penulisan buku ini, antara lain: Prof. Drs. Dochak Latief, Prof. Dr. Syafrî Syairin, Bang Chumaidy, Prof. Dr. Abdul Gafur, Prof. Dr. Suyata, Dr. Ekram Prawiroputro, Dr. Baskara T. Wardaya, Dr. Yudi Latif, Ibu Lafran Pane, Daris Purba, SH, Lukman Hakiem, Mahadi Sinambela, Senopati, Baharuddin Aritonang, Iqbal Pane, Chamad Hojin, dan lain-lain.

Selanjutnya, yang tak mungkin saya lupakan adalah ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Yogyakarta. GMKI: Angga, Immanuel, Ori, Musa, Kresna, dan lain-lain. GMNI: Andre, Andi, Maulana, Gogon, dan lain-lain. HMI Cabang Bulak Sumur: Erwin, Haris, Bayu, Lina, dan lain-lain. PMKRI: Rei, France, dan lain-lain. HMI MPO: Syafi'i, Syamsul, Ozi, dan lain-lain. LMND: Dian, Erik, Ika, dan lain-lain. FPPI: Ferry, Suryo, Faishal, Ical (FPPI), dan lain-lain. KAMMI: Peno, Ardhi, Sari, Sudjatmiko, dan lain-lain. PMII: Jay, Jibril, Sodik, Caesar, Anwar, dan lain-lain. IMM: Edward, Irawan, Anang, Anas, dan lain-lain. Teman PII dan IPNU.

Terima kasih juga pada Ali (AMPERA), teman-teman LSM, Dodo uplink, teman BEM UGM, DEMA UIN, BEM UNS, BEM FEM IPB dan BEM-BEM lainnya, Galuh, PSPN, IKPMD, PIKN, LSFY, SEKBER, FMN, Gani (Maluku Institute) dan lain-lain. Iwan, Bob (PI). Teman-teman TNL, dan banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu per satu.

Thank's banget juga buat Dewan Pembina PSPN: GKR Pembayun, Mas Reza, Mas Hari, Mas Anang, Prof. Edy, dan lain-lain. Oh ya Mas Huda, calon Wapres saya waktu Pemilihan Umum Mahasiswa 2004 dulu, Anda di mana sekarang?

Terima kasih untuk Mas Bima Arya Sugiarto (BAS) yang terus membangkitkan semangat saya. Banyak yang saya serap dari Anda, khususnya ketulusan untuk membesarkan orang lain. Besar harapan dan doa saya, semoga Mas Bima sukses

menggapai cita-cita. Terima kasih atas segala dorongan dan motivasinya. *I'll never forget*. Untuk rekan-rekan di Charta Politika, maju terus pantang mundur.

Thanks a lot juga untuk Bang Iswandi yang terus mendidik saya agar selalu disiplin, jujur, dan membiasakan kerja keras. Saya doakan Bang Is sukses berjuang di KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) demi mewujudkan tayangan bermatabat bagi 250 juta warga NKRI.

Terima kasih juga patut saya ucapkan kepada Saudara Suhardi, Imam Syafi'i, Wahyudin, Swanvri, Tamam wartawan, Sibli, Yazid, Robert, Deman, Nanang, Eka, Hilman, Zamzam, Amin Rauf, Ical dan segenap pengurus HMI Cabang Yogyakarta periode 2007–2008 dan 2008–2009. Adik-adikku di HMI Fakultas Ushuluddin (Kukuh cs), HMI Korkom UIN, kru majalah *Sinergi*: Eboy, Irul, Hurry, Andi, Leo, Fatah dan lain-lain yang telah melatih saya menulis, segenap komisariat HMI di Yogyakarta.

Terima kasih juga Mas Eko dan Mbak Ana di Bogor. Salam sayang juga buat Syaifuddin PO, Yunan, Niam, Arman, Hamdi, Andi, Irwan, Ibin, Nasir, Harjulin, Sidik, Anton, Ya'kub, Mujib Bawean, Uu, Erin, Esti, Erin, Wahyu, Sidik, Clara, Fay, Reza, Binawan, Rofik, Didik, Zul, Lalu, Gofar, Adhim, Muhlis, Sabir, Lala, Yanti, Azmi, Adin, Rika, dan ratusan nama lainnya selama 7 tahun saya di Yogya.

Terima kasih untuk Bang Chamad, Bang Fauzan, Bang Miqdad atas motivasinya. Tidak lupa untuk Bang Toni dan Muslimin yang dengan bersusah payah mengedit dan *all out* membantu penerbitan.

Lebih dari semua pihak yang sudah disebutkan, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada kedua orangtua saya, Papa Syarial, SE dan Mama Khaemenawati. Sejarah hidup saya telah diliputi oleh kasih sayang serta pengertian dari keduanya. Demikian juga adik-adik saya: Ikhsan (KASEI), Indah (FIK UI), Rezqi (FIK UI),

semoga perpisahan kita selama ini kian menambah rasa syukur betapa besar nikmat yang telah diberikan-Nya kepada keluarga kita.

AKHIRNYA

Setuju dengan Pak Dhakidae, sebuah buku pada dasarnya adalah undangan untuk pertandingan diskursif. Karenanya, jika ada yang berguna dalam buku ini, kegunaannya tidak lain dari bentuk ajakan kepada segenap pembaca untuk memeriksa kembali mengenai pemikiran-pemikiran intelektual Muslim Indonesia, lebih utama lagi kontribusinya terhadap Indonesia yang adil dan makmur. Kemungkinan terhadap hadirnya kritik terhadap buku ini, baik berbentuk lisan maupun tulisan, tentu sangat besar. Sebab itu, sedari awal saya telah menyiapkan diri terhadap ombak ataupun tsunami kritik.

Sebagai pemula, saya sangat menyadari akan berbagai keterbatasan. Kendala bahan bacaan, dana dan sebagainya merupakan bagian dari sejarah penulisan buku ini. Allahu Akbar, orang-orang di sekeliling saya tetap memberikan semangat meskipun sekadar bertanya, “Kapan bukunya selesai?” Besar harapan saya, buku ini bisa menjadi bacaan bagi orang-orang yang ingin mengetahui sosok Lafran Pane, pemikirannya tentang intelektual Muslim Indonesia. Semoga yang sedikit dan kecil ini menjadi bermanfaat. Hormat saya untuk segenap pembaca.

Jakarta, 17 Agustus 2010

Hariqo Wibawa Satria

Catatan:

- ¹ Cuplikan pidato Soekarno dalam film dokumenter, *Rediscovery of Our Revolution*, by Riri Prianti. Copyright©_BSI_Broadcasting2008.
- ² Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- ³ Pernah saya mendengar penjelasan dari Bapak Chumaidy Syarief Romas, suatu saat alumni HMI di Jakarta berkeinginan mendirikan Lafran Pane Institute dan Yayasan Lafran Pane, namun hal itu akhirnya dibatalkan karena ada kekhawatiran dengan penggunaan nama Lafran Pane, maksudnya Lafran Pane ‘kan orangnya sederhana, dikhawatirkan Yayasan atau Institut tersebut tidak mencerminkan sosok Lafran Pane.

PENGANTAR AKBAR TANDJUNG

Buku ini membahas sosok dan kiprah Lafran Pane. Judul lengkapnya, *Lafran Pane: Jejak Hayat dan Pemikirannya*. Sosok Lafran Pane diteliti dari kontribusinya bagi pembentukan intelektual Muslim Indonesia, terkait dengan upaya beliau dalam memelopori pendirian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947.

Sejak kelahirannya, HMI menegaskan komitmennya terhadap Keislaman dan Keindonesiaan. Maka, kader HMI adalah kader umat dan kader bangsa. Sebab itulah, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan HMI tidak sekadar Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia.

Buku ini menjelaskan pandangan-pandangan Lafran Pane yang mempertautkan Keislaman dan Keindonesiaan secara proporsional. Lafran telah membangkitkan kesadaran kalangan mahasiswa Muslim untuk memberi warna pada perjuangan bangsa, baik mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan dalam suatu wadah HMI. Apabila melihat perkembangan sejarah HMI, pada dekade 1950-an, tercatat bahwa HMI konsisten dengan prinsip independensinya. HMI tampil sebagai kekuatan lapisan Muslim terpelajar dan terdidik yang diperhitungkan. Masih belum lekang dalam ingatan, ketika Ketua Umum PB HMI Dahlan Ranuwihardjo memberikan masukan pada Presiden Soekarno dan kemudian bergulir wacana Islam kebangsaan. HMI telah memperkenalkan wacana Islam yang moderat, dan komitmen kebangsaannya sejak awal.

HMI merasakan gesekan ideologi yang marak kala itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) memandang HMI sebagai lawan dan mendapat cap kontra-revolusioner, karenanya PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar HMI dibubarkan. Pada awal 1960-an, ketika Presiden Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin, PKI melancarkan tekanan politik yang bertubi-tubi pada HMI. Dalam sebuah rapat akbar, pimpinan PKI D.N. Aidit mengatakan, “Kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja!” Namun, bukan HMI yang dibubarkan, tapi sebaliknya PKI. Bahkan saat ini alumni HMI telah menempati spektrum yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Atas kontribusinya sejak kelahiran HMI, sosok Lafran Pane patut dipelajari, dengan membahas kembali berbagai kiprah dan pemikiran-pemikirannya, yang sangat banyak memengaruhi perjalanan intelektual HMI. Corak Keislaman HMI yang moderat dan inklusif, dalam perkembangannya, tergambar pada Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang dikompilasi Nurcholish Madjid dan rekan-rekannya, mengetengahkan Islam secara substansial, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, antara lain: (1) Tauhid/Keesaan Tuhan; (2) Universalitas Islam; (3) Islam yang inklusif; (4) Islam yang dialogis; (5) Kemanusiaan/persaudaraan/hak asasi manusia (HAM); (6) Islam sejalan dengan modernitas/progresivitas dan demokrasi; (7) Islam yang tidak ekstrem (*ummattan wasathan*/umat yang mampu berdiri di tengah-tengah); dan (8) Islam yang toleran.

Pada awal berdirinya HMI, sebagaimana dicatat dalam buku ini, rumusan tujuannya jelas: (1) Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia; (2) Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dua hal itulah yang merupakan inti dan menjadi *mind set* pemikiran Lafran Pane, selaku pendiri HMI, yang terus dijalkannya secara konsisten, hingga beliau meninggal dunia. Dalam kaitan inilah, upaya mereaktualisasi pemikiran Lafran

Pane, tujuan-tujuan tersebut harus diupayakan terus-menerus, khususnya oleh kader dan alumni HMI.

Sebagai bagian dari umat dan bangsa, HMI harus turut bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini masih demikian kompleks, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya dan sebagainya. Mencermati realitas kebangsaan yang demikian, maka yang harus dilakukan HMI adalah melakukan penguatan perkaderan secara komprehensif dan mempersiapkan sumber daya manusia andal. HMI harus *back to campus*, dalam arti memperkuat basis-basis perkaderannya di perguruan tinggi, dan kembali mewarnai kehidupan dunia kemahasiswaan. HMI harus mempertegas kembali corak intelektualitasnya sebagai organisasi mahasiswa atau kalangan terpelajar yang independen.

Belajar dari Lafran Pane, maka terbetik hikmah mendasar bahwa inti dari organisasi kemahasiswaan adalah perkaderan. Perkaderan ini penting mengingat kontinuitas perjuangan dan implementasi visi dan misi. Di sisi lain, HMI harus tetap menjadi organisasi mahasiswa yang independen, yang harus senantiasa kritis terhadap berbagai perkembangan eksternalnya. Kritisisme merupakan satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, dan memang itulah ciri utama organisasi kemahasiswaan yang mengedepankan idealisme dan memiliki kepentingan jangka panjang.

Jangan sampai para kader HMI terjebak hanya pada permasalahan-permasalahan jangka pendek dan tidak strategis, tidak produktif dan cenderung destruktif; padahal tantangan umat dan bangsa semakin kompleks dan akumulatif. Para kader HMI harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan berbagai jawaban atas tantangan-tantangan yang ada; berorientasi jangka panjang, senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memiliki kualitas iman dan takwa (imtak),

sehingga peran para kader HMI betul-betul mampu dirasakan oleh segenap elemen bangsa yang lain. Para kader HMI harus tetap menjadi “manusia pembelajar”, rendah hati dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menguasai teknologi, senantiasa cerdas dan mampu berbuat—sekecil apa pun bagi masa depan umat dan bangsa Indonesia secara lebih baik.

Di sisi lain, para kader HMI dituntut untuk membawakan Islam yang *rahmatan lil alamin*. Ini penting, karena Islam merupakan agama yang tidak mencela pluralitas atau kemajemukan masyarakat. Dalam konteks Keindonesiaan, maka Islam yang penuh kedamaian dan toleran itulah yang mutlak perlu ditampilkan.

Akhirnya, saya berharap, buku ini dapat memberikan inspirasi kepada tidak saja kader HMI, tapi juga segenap aktivis dan intelektual Muslim di Indonesia, untuk lebih meningkatkan kontribusi dan perannya bagi kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa.

Jakarta, Agustus 2010

PANDANGAN VISIONER LAFRAN PANE

Oleh: Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul

Dalam usaha menuju kesempurnaan sebagai manusia, kita mesti belajar dari yang tersirat serta tersurat. Allah Swt mengingatkan: *wal tanzhur nafsum ma qoddamad lighodin*; perhatikanlah sejarahmu untuk masa depanmu (QS. al-Hasyr/59:18). Pemahaman atas sejarah menjadikan manusia bertindak lebih cepat, cermat dengan tidak kembali mengulang kesalahan serupa. Sejarah laksana laboratorium kearifan.

Belajar dari sejarah organisasi pelajar berbasis Islam yang pernah ada seperti Jong Islamieten Bond (JIB) 1925 dan Studenten Islam Studieclub (SIS) 1934, menjadikan Lafran berpikir jauh ke belakang sebelum mendirikan HMI di Yogyakarta 5 Februari 1947. Jika dirumuskan secara spesifik, fondasi pemikiran berdirinya HMI terfokus pada 8 faktor, yaitu: 1) Penjajahan Belanda atas Indonesia dan tuntutan perang kemerdekaan; 2) Kesenjangan dan kejumudan umat Islam dalam pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta pengamalan agama Islam; 3) Kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan keagamaan; 4) Munculnya polarisasi politik; 5) Berkembangnya faham dan ajaran Komunis; 6) Kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis; 7) Kemajemukan bangsa Indonesia; 8) Tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan. Rumusan tersebut merupakan hasil penelitian kami yang kemudian dituliskan dalam buku *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947–1977* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

Sejak 5 Februari 1947, HMI sudah independen, bukan *underbouw* dari partai politik atau organisasi mana pun. Deklarasi HMI hanya dihadiri 15 orang, semua berstatus mahasiswa (Lafran Pane, Karnoto Zarkasyi, Dahlan Husein, Maisaroh Hilal, Suwali, Yusdi Ghozali, Mansyur, Siti Zainah, M. Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi, Bidron Hadi).

Periode-periode berat dilalui Lafran Pane, dkk. Ketika Yogyakarta diduduki Belanda pada 19 Desember 1948, semua organisasi mahasiswa nyaris menghilang, Lafran tetap menjalankan HMI, meski hanya berdua dengan Dahlan Ranuwiharja. Tatkala PB HMI pindah ke Jakarta tahun 1951 dan suasana sudah kembali membaik, dengan sukarela kembali ia serahkan PB HMI kepada kader-kadernya.

Demikianlah, setiap hal yang menyangkut proses sosial selalu memerlukan *inisiator* dan pionir. Gagasan mendirikan HMI tidak memiliki arti luas, jika masih milik pribadi Lafran Pane. Namun, saat “mulai” disosialisasikan ke rekan se-generasi, gagasan itu manfaatnya berlipat. HMI menjadi wadah strategis yang hingga kini tidak pernah berhenti melahirkan intelektual muslim untuk kemajuan Indonesia. Keutamaan bagi penggagas (*Alfadlu lil Mubtadi*’).

Maka, secara pribadi, kami sangat bersyukur atas hadirnya buku ini. Sejarah tidak bisa dilepaskan dari pelaku yang mewarnainya, baik dalam segala tingkatan, Lafran Pane bisa disebut sebagai “pemimpin mikro yang dampak dari aktivitasnya sangat makro”. Penjelasan dampak makro tersebut diuraikan dengan baik dalam buku ini.

Buku ini tidak sekadar *curriculum vitae* seperti kelahiran, pendidikan, pekerjaan serta kematian, tetapi juga berusaha memotret dan mengeksplorasi pengalaman seorang Lafran Pane dan responsnya terhadap beragam fenomena. Buku ini merupakan biografi pemikiran seorang yang sunyi dari perhatian banyak kalangan. Salah satu kelebihan buku ini, penulisnya telah berusaha semaksimal mungkin menangkap

suasana hati dan pikiran dari aktor yang akan dijelaskan pikirannya serta melakukan interpretasi yang jeli. Hal ini terlihat dalam banyak bagian dalam buku ini, Bab II, IV dan VI terutama. Usaha penulis mewawancarai banyak pihak termasuk saya sebagai pembimbing skripsinya merupakan nilai tambah lainnya.

Lafran Pane sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholish Madjid yang juga dikutip oleh Azyumardi Azra adalah personifikasi dari pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI. Itu terlihat dari keteguhan iman serta amal perbuatan Lafran yang sangat tulus, jujur, tawadhu', independen, visioner, kon-sisten dan demokrat. Lafran tetap menjaga prinsip itu, meski-pun generasi HMI angkatan 1960-an, 1970-an, dan 1980-an sebagai generasi penerusnya telah banyak “menjadi orang”. Dalam taraf tertentu, Lafran bahkan terkesan “menarik diri” dari “prestasi” yang diraih generasi ini. Lafran sedikit pun tidak pernah berniat menancapkan pengaruhnya ke dalam HMI. Lafran bahkan menghindari sebutan sebagai Pendiri HMI.

Buku ini mengandung pelajaran mengenai sikap hidup, sejarah intelektual, pemikiran serta berbagai sisi tentang Lafran Pane. Melihat pembahasannya yang cukup luas, buku ini layak dibaca siapa pun. Akhirnya, saya berpesan kepada penulis buku ini agar tidak berhenti belajar dan belajar serta mempraktikkan ilmu yang didapatkan dan terus mengevaluasi diri.

Manfaatkanlah usia muda sebaik mungkin untuk senantiasa berkarya, mengabdikan menggapai ridho Allah Swt. Buku ini sudah cukup baik dan tentu ditunggu karya-karya selanjutnya. Sekali lagi, jangan pernah berhenti sedetik pun untuk belajar, membaca dan merefleksikan realitas. Semoga Allah Swt memberikan petunjuk-Nya. Amin.

Yogyakarta, 12 Juli 2009

PERKENALAN HIDUP DENGAN PAK LAFRAN PANE

Oleh: Chumaidy Syarif Romas*

PRIBADI PAK LAFRAN PANE

Beliau memiliki ketegasan prinsip-prinsip hidup. Konsisten dalam berpikir, bertindak, sehingga kepribadiannya dikenal kaku. Pendirian hidupnya lurus, jujur, berani, sehingga tampak sangat independen dalam pergaulan sehari-hari dengan rekan kerja, alumni maupun anggota HMI, bahkan penguasa sekalipun.

Dalam tukar pikiran di berbagai waktu, tak segan-segan beliau menyatakan perbedaan dan penyangkalan terhadap lawan bicara meskipun baru berkenalan, umumnya bagi warga Yogya sikap itu kurang tepat. Kuat pendirian ini tecermin dari kesederhanaannya, tidak terpengaruh gaya hidup berlebihan, mewah atau ala priyayi.

Sebagai guru, dosen, Pak Lafran juga tidak pandang bulu dalam pergaulan dengan mahasiswa. Nilai juga diberikan adil, meskipun mahasiswa itu anggota HMI, tidak bisa ya tidak lulus. Ia juga terbuka untuk konsultasi mahasiswa dan berbicara segala hal secara blak-blakan.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Keluarganya yang nasionalistik dan Muslim berkontribusi kuat bagi pemikiran sekaligus kehidupan pribadinya. Kesadaran berjamaah, berorganisasi dan mendirikan HMI berpijak dari sintesa antara “kesantrian” (Muslim) dan “Nasionalisme”. Saat itu, Nasionalisme sebagai sikap “abangan” dan gaya “priyayi”

dengan “kesantrian” dicobanya dikonstruksikan secara ideologis dalam wadah HMI. Sederhananya, kader HMI diharapkan menjadi santri-intelektual dan intelektual-santri dalam dunia kemahasiswaan Indonesia, 5 Februari 1947.

Bangkitnya kesadaran mendirikan HMI didukung kecenderungan orang terpelajar (*Intelectuellen*) menjauhkan diri, bahkan sinis, terhadap kesadaran “santri” (Muslim). Bayangan dan kesan santri pada saat itu adalah “kumuh”, hidup terbelakang dari sudut pandang orang terpelajar, apalagi di perguruan tinggi.

Pak Lafran sendiri adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI), Yogyakarta. Mahasiswa pada umumnya bergaya kebarat-beratan. Pantaslah, Pak Lafran enggan berlama-lama di Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) yang bercorak abangan serta telah terbaratkan. PMY juga tidak menampung idenya agar anggota PMY diajarkan tentang agama, sehingga aspirasi Islam tak memiliki ruang di dalamnya.

Ide Keislaman mulai eksis dalam kehidupan HMI saat itu, namun Keislaman HMI itu masih juga diragukan oleh ormas-ormas Islam yang telah mendahului. Keislaman yang “sintesis” ini menjadi gaya perjuangan HMI tersendiri, yang bebas, independen dari pengaruh-pengaruh partai politik Islam, maupun non-Islam.

Pak Lafran tak pernah belajar Islam di pesantren, kemudian meloncat ke perguruan tinggi. Sebab itu, ilmu Keislamannya diperoleh melalui perkuliahan dengan literatur-literatur bahasa Belanda dan sedikit Inggris pada saat itu. Model pembelajaran Islam saat mengikuti perkuliahan dianggap sebagai perjalanan intelektual tersendiri. Tetapi api Islam dalam dirinya tetap menggambarkan “kesantrian” yang tak pernah padam meski tanpa pesantren. Semua itu merupakan bukti munculnya HMI dengan Pak Lafran yang bukan *nasab* (keturunan) kyai, ulama, sehingga keberadaannya masih dipersoalkan, baik terhadap HMI maupun ketokohnya.

Jujur saja, pemikiran agama Pak Lafran tidak sedalam para ulama ketika itu, karena ia belajar di perguruan tinggi. Namun, secara sadar dan sistematis, pemahaman Islam benar-benar mulai dirumuskan dalam kontak perjuangan bangsa Indonesia. Citanya-citanya ingin mewujudkan ulama-intelelektual serta intelek-ulama, Lafran Pane adalah penggagas yang secara sungguh-sungguh menekuni cita-citanya. Spirit Keislamannya sangat tinggi dan dapat diamati dari keteguhannya mempertahankan eksistensinya semasa Indonesia dalam pergolakan ketidak-pastian jalannya pemerintahan pada masa-masa awal kemerdekaan, meski dengan cara mengambil alih kepengurusan PB HMI yang mengalami kevakuman sebelum periode Dahlan Ranuwiharja. Tindakan itu memiliki motif kuat, agar HMI tetap *survive* guna tetap berkiprah sebagai wadah perkaderan Islam sebagaimana yang dicita-citakannya.

Ketegasan yang kuat dalam pemikiran dan pendirian hidupnya menjadikan orang sekitar bisa berkesimpulan bahwa beliau “berkepala batu”. Di satu sisi bisa disebut “egois”. Perpaduan sikapnya yang demikian, dipadukan dengan sikap hidup sederhana kerap disalah-mengerti sebagai orang yang tinggi hati. Walau sejatinya pendirian hidupnya yang teguh memegang prinsip tidak meniadakan kegemarannya berdiskusi, sekalipun sering dalam suasana panas. Setiap akhir diskusi, pasti beliau masih dapat melempar tawa dengan lawan bicaranya.

PERILAKU YANG DAPAT DITIRU DARINYA

Prinsip-prinsip pemikirannya selalu tampak dalam perilaku hidup sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di depan publik secara lugas dan terang-terangan. Sikap dan perilaku hidupnya yang sederhana akan tampak orang sebagai sosok yang seakan perlu dikasihani. Segala peralatan kerjanya “tidak umum” digunakan oleh seorang guru besar (profesor). Beberapa alumni HMI yang memiliki kelebihan harta memberi perhatian dengan

menawarkan alat-alat kerja yang dianggap pantas untuk seorang guru besar, Pak Lafran menolak dengan tegas. Filosofi hidupnya yang kuat tidak dipahami sebagian besar orang di sekitarnya, karena kesederhanaannya identik dengan ketidak-mampuan secara ekonomi. Bahkan, hingga wafatnya, beliau belum memiliki tempat tinggal pribadi. Hal ini tentu tidak sepadan dengan jabatannya. Sikap ini mencerminkan ke-“zuhudan”-nya.

Perilaku politiknya juga menarik. Sikap percaya diri dan independensi melembaga dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak memasuki kancah politik melalui partai politik apa pun. Pelembagaan sikap dan perilaku ini dapat mengawal sejarah perjuangan HMI hingga kini. Ajakan para alumni HMI semasa Orde Baru untuk ikut menandatangani deklarasi penerimaan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ormas di Indonesia tidak dapat diterimanya. Apakah Lafran menolak Pancasila? Tidak, beliau sangat menerimanya.

Demikian pula pengukuhannya sebagai guru besar dalam Sidang Senat Terbuka IKIP Yogyakarta tahun 1970, beliau berpidato dengan yakin bahwa UUD 1945 dapat diubah. Pidato itu melawan *mainstream* Orde Baru di mana Pancasila dan UUD 1945 dianggap sakral. Hampir-hampir sidang itu tidak boleh terjadi dalam situasi politik saat itu.

Kala itu pula, dalam situasi politik yang demikian, tersebar berbagai gosip siapakah yang sebenarnya pendiri HMI. Melalui serangkaian penelitian, seminar agar dicapai legitimasi yang kuat, maka pada saat PB HMI dipimpin Akbar Tandjung menetapkan Lafran Pane sebagai aktor pemrakarsa berdirinya HMI. Inisiatif ini tidak mudah untuk meminta beliau menerima pendapat tersebut. Ia beralasan pendeklarasian dirinya sebagai pendiri HMI sebagai perbuatan “riya”. Permintaan PB HMI untuk maksud di atas berlangsung panas antara mau dan tidak maunya dirinya ditetapkan sebagai pendiri HMI. Namun, atas dasar kemaslahatan HMI, barulah beliau menyetujui per-

mintaan PB HMI.

Menghadapi perpecahan HMI (DIPO dan MPO), beliau tidak terjebak dalam konflik internal HMI, yang merupakan produk situasi politik Orde Baru di masa lalu, tetapi pada pendirian mendalam beliau menghendaki penyatuan kembali keduanya menjadi satu HMI, agar mahasiswa Islam dapat berkiprah secara terarah sesuai dengan tujuan HMI, kecuali bagi mereka yang mau mendirikan organisasi mahasiswa dengan nama lain. Hingga akhir hayatnya, kepeduliannya terhadap HMI begitu besar, meski demikian ia tidak pernah mencampuri urusan internal HMI.

Demikian sekilas apa yang saya lihat, saya rasakan dan saya alami sendiri selama pergaulan beliau dengan teman-teman dan para alumninya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2009

***Chumaidy Syarif Romas**

(Mantan Ketua Umum PB HMI 1976–1979, sekarang menetap di daerah Bantul, Yogyakarta)

Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Kaum
Itu Sendiri yang Mengubahnya
(QS. Ar-Ra'du -13 :11)

Kalau Keyakinan Sudah Menjadi Pohon Beringin, Robohlah
Segala Pertimbangan yang Lain.
(Armijn Pane dalam novel *Belenggu*, Jakarta:
Dian Rakyat. Cet. I tahun 1940)

TERATAI

Karya : Sanusi Pane

Dalam kebun di tanah airku
Tumbuh sekuntum bunga teratai;
Tersembunyi kembang indah permai,

Tidak terlihat orang yang lalu.
Akarnya tumbuh di hati dunia,
Daun berseri Laksmi mengarang;

Biarpun ia diabaikan orang,
Seroja kembang gemilang mulia.
Teruslah, O Teratai Bahagia
Berseri di kebun Indonesia,

Biar sedikit penjaga taman.
Biarpun engkau tidak dilihat,
Biarpun engkau tidak diminat,
Engkau turut menjaga Zaman

(Buku Sastra Untuk Kelas 6 SD, 1987)

BAB I

PENDAHULUAN: LAFRAN PANE DAN INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA

Dinamika intelektual dapat diukur dari ada atau tidaknya perdebatan kesejarahan, sebab perdebatan kesejarahan sebenarnya tidak lain daripada pantulan dari usaha untuk sekali-kali melihat dan memahami diri kembali.

(Taufiq Abdullah)¹

“Andai dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI 1945 tidak terjadi perdebatan mengenai dasar dan bentuk Negara Indonesia, mungkin Indonesia sudah jauh lebih maju dari saat ini,”² demikian kata Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif. Pengandaian mantan Ketum PP Muhammadiyah ini terdengar janggal. Justru karena namanya sidang, makanya ada perdebatan, apalagi setelah 350 tahun kita dijajah,³ baru saat itulah perwakilan-perwakilan bangsa Indonesia secara mandiri bebas merumuskan segala hal terkait negara yang hendak didirikan. Maka mustahil tanpa perdebatan.⁴

Bahkan, jika kita baca dengan saksama notulensi sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, terdapat himpunan pengetahuan yang luas. Hadir dalam sidang itu putra-putra terbaik Indonesia dengan keahliannya masing-masing, sehingga perdebatan-perdebatan itu sejatinya sangat mencerahkan. Dalam beberapa hal fundamental, tidak jarang mereka berdiri kemudian berdoa bersama sebelum mengambil keputusan. Sampai di sini, pe-nulis masih bertanya, apa gerangan maksud dari pengandaian Syafi’i Ma’arif di atas?

Syafi'i Ma'arif yang juga mantan anggota HMI ini melanjutkan, menurutnya pengandaian itu tidak lebih dari atau memang sekadar berandai-andai saja, sudah terjadi dan tidak mungkin berulang. Generasi yang hidup hari ini harus mengambil pelajaran. Syafi'i menekankan perdebatan mengenai dasar dan bentuk negara sudah final, tidak penting dilanjutkan lagi oleh generasi sekarang, sebab akan memperlambat kemajuan bangsa Indonesia, lebih baik kita berpikir bagaimana menjadikan Indonesia yang sudah compang-camping ini menjadi bangsa yang beradab serta bermartabat. Singkatnya, ia sebenarnya ingin mengatakan NKRI, Pancasila sudah final.

“Kita tentunya juga memiliki kesimpulan demikian?” Namun, tidak diketahui apakah kesimpulan tersebut berdasar-kan pemahaman serta kesadaran, ataukah sekadar ikut-ikutan semata. Hal ini tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Satu hal yang pasti adalah fitrah manusia yang ingin memahami sesuatu sepenuhnya, sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya agar teks Pancasila terasa kian bernyawa.

Sebab itu, menjadi kebutuhan mendasar untuk memahami masa-masa perdebatan pra dan pascaproklamasi kemerdekaan, serta usaha-usaha masing-masing kelompok untuk mempertahankan argumentasinya, dan usaha sebagian kelompok lain untuk mencari jalan tengah. Sebagai pelaku sejarah, manusia tentu merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya memahami setiap peristiwa. Demikian pula dengan seorang Lafran Pane, dia adalah satu dari sekian banyak pemuda yang hidup kala itu, sehingga menarik untuk kita pertanyakan, apa yang dia lakukan saat itu?

* * *

Setelah bangsa Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perdebatan tentang bentuk dan dasar Negara Indonesia masih senantiasa berlangsung sebagai imbas dari perdebatan-perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI dan

PPKI (28 Mei 1945–22 Agustus 1945) antara kelompok Nasionalis-Islam dan Nasionalis sekuler,⁵ tanpa terkecuali di Yogyakarta. Perdebatan ini semakin meruncing setelah tanggal 18 Agustus PPKI menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.⁶

Ideologi-ideologi yang berkembang kala itu seperti Nasionalisme, Islamisme, Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme berusaha menanamkan pengaruhnya, khususnya kepada mahasiswa sebagai pemilik masa depan Indonesia. Berdirinya Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Sarikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Solo tahun 1946 tidak terlepas dari polarisasi politik saat itu.

Namun, beberapa mahasiswa di Yogyakarta meniti jalan sejarahnya sendiri. Tanggal 5 Februari 1947 (18 bulan setelah proklamasi kemerdekaan), 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) atas prakarsa Lafran Pane yang juga masih berstatus sebagai pengurus PMY mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan dua tujuan: *Pertama*, mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.⁷

Lafran Pane berpandangan, dialektika-dialektika antara pendukung ideologi-ideologi besar tersebut merupakan kewajiban, bahkan diperlukan. Namun, menurutnya, yang terpenting pada saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sebab Belanda tidak akan membiarkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.⁸

Selain itu, Lafran Pane juga berkeyakinan, ajaran Islam hanya dapat ditegakkan di alam kemerdekaan. Dia melihat, setelah kemerdekaan Indonesia, generasi muda Islam khususnya mahasiswa sudah kehilangan kebanggaan menjadi seorang Muslim, karena mereka beranggapan agama Islam adalah agama kaum kolot, terbelakang dan miskin.

Di era penjajahan, situasi dunia pendidikan memang tidak menentu di Indo nesia. Saat penjajahan Belanda, sekolah-sekolah diwajibkan berbahasa Belanda. Ketika tahun 1942 Jepang menggantikan Belanda, semua sekolah ditutup, dan tatkala sekolah-sekolah tersebut secara bertahap dibuka kembali, bahasa Belanda tidak boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah tipe apa pun. Karena bahasa Belanda dilarang, sementara untuk menguasai bahasa Jepang butuh waktu, bahasa Indonesia lalu menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Dapat dibayangkan berkecamuknya situasi mental bangsa Indonesia kala itu. Efek paling merusak dari rezim pendidikan yang baru ini terjadi pada level perguruan tinggi. Para pelajar perguruan tinggi merupakan level masyarakat yang paling ter-Barat-kan. Sebuah kenyataan bahwa penjajahan tidak hanya berimbas secara fisik, tapi juga secara mental dan kejiwaan.⁹

Mengenai kondisi mahasiswa Muslim saat itu, Nurcholish Madjid mengatakan, “Maka setelah kemerdekaan tercapai tahun 1945, mereka kaum terpelajar itu muncul sebagai orang yang paling tidak terpelajar. Mereka kaum terpelajar itu mung-kin masih saja mengaku sebagai orang Islam, tapi pengakuan itu hanya berarti “beragama Islam” (statistik) untuk tidak mengatakan beragama lain selain Islam, sedangkan dalam *way of life*-nya, mereka tidak lagi berorientasi pada ajaran-ajaran Islam. Mereka telah kehilangan kepercayaan pada Keislaman, sebab bagi mereka Keislaman adalah kekolotan. Oleh sebab itu, sebagai kaum terpelajar, mereka ingin menempuh kehidupan modern, sedangkan modernisme identik dengan Westernisme, dan Westernisme berlawanan dengan Keislaman.”¹⁰

Menurut Nurcholish Madjid, dalam kondisi ancaman bahaya disintegrasi bangsa pascakemerdekaan dan kondisi umat Islam yang terbelakang dalam bidang pendidikan, Lafran membidani lahirnya sebuah wadah dalam usaha mempersiapkan calon-calon intelektual Muslim Indonesia.¹¹ Lafran Pane

terilhami oleh hasrat intelektual Muslim generasi terdahulu yang telah mendirikan organisasi-organisasi seperti Jong Islamieten Bond (JIB) pada 1925 dan Studenten Islam Studieclub (SIS) pada 1934. Lafran bercita-cita HMI akan membentuk sebuah jaringan inteligensia muda Islam yang baru sekaligus pula berfungsi sebagai lahan persemaian bagi para pemimpin Indonesia masa depan.¹²

Apa yang dilakukan Lafran Pane merupakan kesatuan gagasan yang bermula dari cara pandang terhadap realitas yang dibenturkan dengan teori perjuangan, sekaligus wujud perjuangan, guna membentuk jaringan inteligensia Muslim yang terlembagakan. Lafran kemudian terlihat sebagai seorang intelektual yang berpikiran jauh pada masanya. Sedikitnya, terdapat empat hal mengapa sosok Lafran Pane menarik diteliti:

Pertama, kemunculan HMI dengan independensinya telah dapat meminimalisir polarisasi antara kelompok Nasionalis, Sosialis, Komunis dan Islam di kalangan mahasiswa pasca-proklamasi 1945. HMI menjadi wadah baru bagi mahasiswa untuk dapat mempelajari Islam sekaligus memupuk rasa kebangsaan. Lafran Pane telah menunjukkan bahwa antara Keislaman dan Keindonesiaan tidaklah bertentangan, akan tetapi merupakan dua hal yang dapat bergandengan tangan untuk mengangkat harkat dan derajat seluruh rakyat Indonesia. Poin ini sungguh sangat penting.

Kedua, dasar-dasar pemikiran Lafran Pane yang dikembangkan melalui HMI mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap diberikannya pendidikan agama Islam di kampus-kampus umum, sehingga terjadi proses menuju keseimbangan dalam diri mahasiswa. Dengan segala keterbatasan, peran ini telah dijalankan Lafran Pane dan kawan-kawan di saat imbas politik, budaya, ekonomi, pendidikan akibat kolonialisme sangat dominan. Selanjutnya, penting dilihat bagaimana implikasi pemikiran-pemikiran HMI di kalangan mahasiswa, ilmuwan, cendekiawan, umat Islam dan bangsa Indonesia

termasuk dalam kehidupan HMI sendiri.

Ketiga, HMI yang didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947 telah hidup dalam era revolusi kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan hingga hari ini. HMI juga memiliki jutaan alumni yang tersebar dalam berbagai organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga Lafran Pane serta dasar-dasar pemikirannya tentang intelektual Muslim yang ingin dilahirkan melalui perkaderan HMI sangat penting untuk dituliskan dengan jelas.

Keempat, sebagai pribadi yang sunyi dari pemberitaan, Lafran memang tidak begitu dikenal dibanding yunior-yuniornya (Dahlan Ranuwihardjo, Mintaredja, Deliar Noer, Nurcholish Madjid, dan lain-lain). Sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara, pemikirannya dalam bidang ini juga tidak pernah diangkat. Selain itu, dalam diri Lafran Pane terdapat banyak pelajaran moral yang bisa dijadikan teladan bagi generasi hari ini, tentunya dalam batas-batas tertentu, sebab Lafran Pane hanyalah manusia biasa yang juga banyak sekali salah dan kurangnya.

Maka, tidak berlebihan disebutkan bahwa Lafran Pane adalah salah satu sosok penting di balik kemunculan intelektual-intelektual Muslim Indonesia dan tradisi intelektual di Indonesia. Atas dasar ini, penulis memantapkan diri untuk meneliti ihwal pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Berlandaskan penjelasan di atas, buku ini mencoba menjawab tiga hal utama. *Pertama*, bagaimana sejarah hidup Lafran Pane? *Kedua*, seperti apa sejarah kehadiran intelektual Muslim Indonesia? *Ketiga*, bagaimana pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia? *Keempat*, bagaimana proses pembentukan intelektual Muslim Indonesia?

HARAPAN DARI PENULISAN BUKU INI

Pertama, buku ini diharapkan mampu menceritakan sejarah hidup Lafran Pane berikut pemikiran Keislaman-KeIndonesiaannya khususnya tentang intelektual Muslim Indonesia. *Kedua*, buku ini dapat menjelaskan pengertian-pengertian tentang intelektual serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk lebih memahami sejarah kehadiran intelektual Muslim Indonesia dan cita-citanya. *Ketiga*, pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia dapat dijadikan cermin untuk melihat intelektual Muslim saat ini, Lafran Pane juga dapat dilihat sebagai tokoh alternatif. *Keempat*, buku ini dapat menjelaskan kepada pembaca mengenai proses pembentukan intelektual Muslim Indonesia, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam.

RUANG LINGKUP STUDI

Agar pembahasan ini terfokus pada pokok permasalahan yang sebenarnya, perlu dijelaskan ruang lingkup penelitian dengan menetapkan batasan-batasan secara konkret. Seperti pembatasan waktu dan tempat penelitian berjalan.

1. Penelitian tentang sejarah hidup Lafran Pane dimulai dari 1922–1991. Selama 69 tahun Lafran Pane hidup.
2. Penelitian tentang kehadiran intelektual Muslim Indonesia akan dimulai sejak abad ke-20, sebab pada awal abad ke-20 istilah intelektual mulai dikenal di Indonesia.
3. Penelitian mengenai pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia dimulai sejak tahun 1946, yaitu sejak Lafran Pane memasuki Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta hingga tahun 2009, yakni naskah-naskah yang penulis teliti melalui wawancara-wawancara yang penulis lakukan pada 2009. Penelitian ini akan dipusatkan di Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta dan Jakarta, karena di dua kota inilah dokumen-dokumen perihal Lafran Pane

dan pemikirannya banyak tersimpan. Selain itu, di kota ini pula banyak tinggal orang-orang dekat Lafran Pane yang masih hidup.

STUDI-STUDI TERDAHULU MENGENAI LAFRAN PANE

Studi ini bertujuan melihat sejauh mana masalah ini pernah ditulis orang lain, kemudian ditinjau, apa yang ditulis? Bagaimana pendekatan dan metodologinya? Apakah ada persamaan dan perbedaan? Harapannya, penulis terhindar dari penulisan yang sama. Ada beberapa karya tulis baik berupa buku, skripsi, tesis, maupun penelitian yang membahas atau menyinggung tentang Lafran Pane:

Pertama, buku-buku karya Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul. Agussalim Sitompul dikenal sebagai sosok yang paling telaten mengamati sejarah perjuangan HMI. Hubungannya dengan Lafran Pane juga dekat. Ia telah menulis 13 buku tentang HMI dan KAHMI, penulis membaca 9 dari 13 buku tersebut, yakni:

- (1). *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, tahun 1976.
- (2). *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta, Antara Impian dan Kenyataan*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta, tahun 1982.
- (3). *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta, tahun 1997.
- (4). *Citra HMI*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta, tahun 1997.
- (5). *Historiografi HMI tahun 1947–1993*, Penerbit Intermedia, Jakarta, tahun 1995.
- (6). *HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik* (ed.), Penerbit Aditya Media, Yogyakarta, tahun 1997.
- (7). *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947–1997*, Penerbit LOGOS, Jakarta, 2002.
- (8). *KAHMI Memadukan Langkah menuju Persatuan Membangun Indonesia Baru*, Penerbit Adi Citra Karya Nusantara, Yogyakarta, 2003.
- (9). *44 Indikator Kemunduran HMI: Suatu Kritik dan Koreksi Total untuk Kebangkitan Kembali HMI*, Penerbit Misaka Galiza, Jakarta, 2005.

Di antara 9 buku tersebut, penulis sangat tertarik dengan buku Agussalim Sitompul yang berjudul *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa 1947–1975*. Buku ini kemudian selama bertahun-tahun menjadi buku standar pedoman dan rujukan materi sejarah perjuangan HMI yang disampaikan dalam materi perkaderan HMI di seluruh Indonesia. Buku ini terdiri dari 11 bab, yang meliputi: (1) Latar Belakang Berdirinya HMI, (2) Saat Akan Berdirinya HMI, (3) Reaksi-reaksi terhadap Kelahiran HMI, (4) Fase-fase Perkembangan HMI, (5) Perkembangan HMI dari Periode ke Periode, (6) Tafsir Tujuan HMI, (7) Independensi HMI, (8) Riwayat Hidup dan Perjuangan Prof. Drs. Lafran Pane, (9) Atribut Organisasi, (10) Dan Lain-lain, (11) Penutup. Dari judul buku dan bab-babnya, dapat kita ketahui fokus pembahasan buku ini adalah sejarah perjuangan HMI. Isinya sangat lengkap, sehingga mampu menjelaskan kepada khalayak segala hal sebelum keberadaan HMI maupun setelah lahirnya HMI pada 1947 hingga 1976. Pada bab viii, terdapat riwayat hidup dan perjuangan Lafran Pane, dan 9 judul karya ilmiah Lafran Pane, yaitu pada halaman 157–163.

Namun, buku ini tidak membahas secara spesifik tentang apa dan bagaimana pemikiran Lafran Pane dan intelektual Muslim Indonesia, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis. Untuk saat itu, banyak data mengenai Lafran Pane dapat diungkap oleh sang penulis. Hal yang membedakan buku ini dengan buku tersebut antara lain adalah waktu penelitian, riwayat hidup Lafran Pane yang ditulis Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul diterbitkan pada 1976, atau saat Lafran Pane masih hidup dan berusia 54 tahun.

Sedangkan dalam buku *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947–1997*, Prof. Agussalim sangat baik sekali menjelaskan mengenai Lafran Pane serta hubungannya dengan HMI (hlm. 43). Penulis banyak mengambil manfaat dari buku ini serta

mendapatkan banyak sekali informasi mendasar. Buku ini mencoba secara khusus membahas mengenai Lafran Pane, pemikirannya, dan lain-lain.

Sementara, dalam buku *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, pada halaman 352 paragraf terakhir, Agussalim Sitompul menuliskan:

Tidak berarti apa yang diuraikan, dibahas di sini, itulah gambaran utuh HMI dan pemikiran-pemikirannya. Namun masih memerlukan studi lanjut, yang secara terus-menerus harus dilakukan. Langkah awal ini merupakan permulaan usaha yang akan diikuti untuk masa-masa selanjutnya. Seperti bagaimana implikasi pemikiran-pemikiran HMI di kalangan mahasiswa, ilmuwan, cendekiawan, umat Islam dan bangsa Indonesia termasuk dalam kehidupan HMI sendiri, ini merupakan suatu studi sendiri yang menarik.¹³

Kedua, Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20, karya Yudi Latif. Buku ini sejatinya adalah disertasi doktoral (S3) Yudi Latif di Australian National University (ANU) yang berjudul *The Muslim Intelligensia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century*. Yudi Latif membagi inteligensia Muslim Indonesia menjadi 6 (enam) generasi. Nama-nama yang diungkap di sini tentunya cukup banyak, namun untuk mewakili sesuai dengan kepentingan disertasi Yudi Latif, maka dipilihlah beberapa nama sebagai berikut. Generasi pertama inteligensia Muslim Indonesia seperti Tjokroaminoto, Agus Salim dan sebagainya; generasi kedua inteligensia Muslim Indonesia adalah M. Natsir, M. Roem dan Kasman Singo-dimedjo pada 1950-an; generasi ketiga seperti **Lafran Pane**, A. Tirtosudiro dan Jusdi Ghazali pada 1960-an merupakan anak revolusi kemerdekaan, sehingga cenderung kooperatif; generasi keempat seperti Nurcholish Madjid, Imaduddin Abdurrahim dan Djohan Effendi pada 1970-an; generasi kelima, yakni Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada awal 1990-an dengan Habibie sebagai ikon sentralnya.

Pengunduran diri Soeharto dan digantikan oleh Habibie pada 1998 lantas membuka peluang tokoh ICMI untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik yang besar; dan generasi keenam yang sebagian anggotanya lahir pada 1970-an dan 1980-an seperti Ulil Abshar Abdalla, Fachri Hamzah, dan lain-lain.

Hal pokok yang membedakan buku ini dengan buku Yudi Latif adalah fokus pembahasan. Yudi Latif berusaha melacak sejarah intelektual Muslim di Indonesia beserta tokoh-tokohnya. Karena itu, Yudi Latif hanya menyinggung sekilas perihal Lafran Pane pada halaman 53, 424, dan 427. Sedangkan buku ini memfokuskan pembahasan secara spesifik kepada sosok Lafran Pane serta pemikirannya tentang intelektual Muslim di Indonesia. Namun, buku ini sangat penting karena menunjukkan perbedaan orientasi pemikiran intelektual Muslim dari tahun ke tahun serta sejarah munculnya istilah intelektual di dunia dan proses masuknya ke Indonesia.

Pada halaman 53 dalam bukunya, Yudi menyoroti Prof. Agusssalim Sitompul. Menurutnya, karya Sitompul cenderung melebih-lebihkan pengaruh individu Lafran Pane (bapak pendiri HMI) dalam pembentukan ideologi inklusif HMI, dan mengabaikan dimensi generasional dalam proses pembentukan itu. Masih pada halaman yang sama, Yudi juga mengkritik Bachtiar Effendi yang menurutnya terlalu melebih-lebihkan peran generasi baru intelektual Muslim era 1970-an/1980-an sebagai generasi intelektual Muslim pertama yang menawarkan pendekatan “substansialistik” atas ide-ide politik Islam. Padahal, menurut Yudi, jika pengaruh-pengaruh antargenerasi yang bersifat diakronik itu dipertimbangkan, akan bisa terlihat bahwa ide-ide progresif dari generasi baru tersebut berkembang dari dasar-dasar yang telah dibentangkan oleh para intelektual dari generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga inteligensia Muslim. Generasi ketiga yang dimaksud adalah (**Lafran Pane**, A. Tirtosudiro dan Jusdi Ghazali).

Jadi, kritikan Yudi tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh Yudi sendiri dalam kritiknya terhadap Bachtiar Effendi. Sayangnya, Yudi juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan melebih-lebihkan dalam kaitannya dengan ideologi inklusif HMI. Sebab, sebagaimana yang penulis pelajari, ideologi inklusif HMI sudah ada sejak hari pertama kelahirannya, HMI menerima UUD 1945 berikut Pancasila sejak awal, demikian Abdurrahman Wahid mengatakan.

Agussalim Sitompul sendiri dalam perbincangan dengan penulis mengatakan, Lafran Pane telah meletakkan landasan ideologi inklusif HMI, namun untuk perkaderan itu dilakukan oleh HMI, meski beliau secara fisik dan pikiran masih terlibat hingga akhir hayatnya. Jadi, anggapan kecenderungan melebih-lebihkan tergantung dari mana melihatnya. Bagi Prof. Agussalim tentu wajar mengingat ia bersentuhan langsung dengan Lafran Pane serta keluarganya. Meski demikian, penilaian Yudi ini sebagai bahan evaluasi tentu sangat baik. Bukunya tentang *Inteligensia Muslim dan Kuasa* laris manis, penulis pun hanya bisa beli dari tempat fotokopi. Meski ada juga kritik, namun secara metodologis buku ini sangat bagus.

Ketiga, HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia, karya M. Rusli Karim. Buku ini terdiri dari 6 bab, yaitu: (1) Pendahuluan, (2) Agama, Modernisasi dan Sekularisasi, (3) Aspirasi Politik Umat Islam Indonesia, (4) Peranan HMI dalam Era Orde Baru, (5) HMI MPO dalam Konstelasi Arus Modernisasi Politik Indonesia, (6) Kesimpulan. Buku ini membahas sebab-sebab kehadiran HMI MPO. Karya ini tentu sangat berbeda dengan apa yang akan penulis gariskan dalam buku ini. Namun demikian, buku karya Rusli Karim tersebut juga memuat tentang sosok Lafran Pane selaku pemrakarsa berdirinya HMI pada halaman 97–98. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan pendekatan ideologis.

Dari berbagai literatur yang penulis pelajari, mengenai sosok

dan status Lafran Pane sebagai pendiri HMI, tidak ada pertentangan di antara HMI MPO dan HMI DIPO. HMI MPO sendiri kerap menamai dirinya HMI 47 atau HMI-nya Lafran.

Keempat, *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, editor: Ramli HM Yusuf. Buku ini didedikasikan kepada Prof. Drs. H. Lafran Pane, pemrakarsa berdirinya HMI, juga kepada masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Penulisannya dilakukan selama 6 tahun wafatnya Lafran Pane. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa tokoh nasional seperti: *A.H. Nasution, Abdul Gafur, Abdullah Puteh, Ahmad Tirtosudiro, Ahmad Zacky Siradj, Akbar Tandjung, Albert Hasibuan, B.J. Habibie, Basofi Soedirman, Cyrillus I. Kerong, Eki Syahrudin, Fahmi Idris, Franz Magnis-Suseno, Harmoko, Haryono Isman, Hari Tjan Silalahi, Herman Widyananda, Irman Gusman, Kristiya Hartika, Mar'ie Muhammad, Moerdiono, M. Iqbal Assegaf, Saleh Khalid, Munajat Danuseputro, Nikolas Hasibuan, Nurcholish Madjid, Ridwan Saidi, Rudini, Sayyidiman Suryo - hadiprojo, Sulastomo, Soerjadi, Sofyan Wanandi, Tjahyo Kumolo.*

Dalam catatan editor pada halaman xiii, Ramli HM Yusuf, SH menerangkan tentang sosok Lafran Pane, namun hanya sebatas pengantar menuju inti tulisannya yang berjudul “HMI: Konsistensi Pengabdian kepada Republik”. Berbeda dengan lazimnya penulisan karya ilmiah yang berisi tiga hal pokok, yakni: *Pendahuluan, Isi, dan Kesimpulan*, buku ini meletakkan kesimpulan pada setiap tulisan. Sedangkan kesimpulan pada halaman penutup berisi harapan-harapan agar HMI lebih eksis lagi di masa yang akan datang. Terdapat dua tulisan Lafran Pane dalam buku ini yang berjudul “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia” (1949) dan “Menggugat Eksistensi HMI”, yang diambil dari koran *Jawa Pos* tahun 1990.

Kelima, *Memurnikan Pelaksanaan UUD 1945*, ditulis oleh Lafran Pane. Buku ini merupakan pidato Lafran Pane pada Dies Natalis II IKIP Negeri Yogyakarta pada 30 Mei 1966. Secara garis besar, buku ini merupakan pemikiran Lafran Pane

tentang bagaimana seharusnya UUD 1945 dilaksanakan. Pada halaman terakhir, Lafran Pane menuliskan: “*Pidato kami ini tidak bermaksud sama sekali untuk mendongkel Bung Karno, tetapi sekadar hendak menunjukkan bagaimana seharusnya melaksanakan UUD 1945 secara murni.*”

Tidak terdapat sejarah hidup Lafran Pane di dalamnya. Hal pokok yang membedakan buku tersebut dengan karya penulis adalah pokok permasalahan yang diangkat, buku karya Lafran Pane itu memberikan gagasan tentang bagaimana seharusnya UUD 1945 dijalankan, sedangkan buku ini membahas tentang sejarah hidup Lafran Pane dan pemikiran Lafran Pane perihal intelektual Muslim di Indonesia.

Keenam, Perubahan Konstitusional, ditulis oleh Lafran Pane. Buku ini dicetak untuk dibagikan kepada hadirin dalam rangka pidato peresmian penerimaan jabatan guru besar Lafran Pane dalam mata pelajaran Ilmu Tata Negara pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (sekarang UNY), pada hari kamis tanggal 16 Juli 1970. Sedangkan pengangkatan Lafran Pane sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara pada FKIS-IKIP dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia mulai tanggal 1 Desember 1966. Buku berisi pandangan Lafran Pane tentang bentuk Negara serta 6 pokok konstitusi Negara yang tidak bisa diubah, di antaranya: Tujuan Negara, Asas Negara Hukum dan Asas Kedaulatan Rakyat.

Adapun yang berupa makalah atau artikel adalah sebagai berikut: *Pertama*, Sudjoko Prasodjo dalam *Hubungan HMI dan Lafran Pane*. Artikel ini dimuat dalam majalah *Media* Nomor 7, Thn. III, Rajab 1376 H/Februari 1957, terbitan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Pada halaman 32, beliau menulis:

Sesungguhnya, tahun-tahun permulaan riwayat HMI adalah hampir identik dengan sebagian kehidupan Lafran Pane sendiri. Karena dialah yang punya andil terbanyak pada mula kelahiran HMI, kalau tidak boleh kita katakan sebagai tokoh pendiri utamanya.

Tulisan Sudjoko Prasodjo ini menjadi referensi awal ketika hendak memulai penelitian tentang Lafran Pane. Selanjutnya, tulisan ini disempurnakan oleh Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul dengan melakukan beberapa kali wawancara langsung dengan Lafran Pane, hasilnya dapat kita lihat dalam buku *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 1947–1975*.

Kedua, Prof. Dr. Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam*, disampaikan dalam forum Latihan Kader I, HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat di Bumi Perkemahan Hizbul Wathon, Desa Sorasan, Sleman, pada 02 Desember 2007. Makalah ini isinya cukup lengkap dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Terdiri dari 6 bab yakni: (1) *Pendahuluan*, (2) *Tinjauan Historik HMI*, (3) *Berdirinya HMI*, (4) *Fase-fase Perjuangan dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Indonesia*, (5) *Masa Depan HMI, Tantangan dan Peluang*, (6) *Penutup*. Makalah ini cukup banyak menyinggung sosok Lafran Pane dengan menggunakan pendekatan sejarah.

Adapun karya lain yang ditulis untuk kepentingan skripsi (S-1), tesis (S-2), disertasi (S-3), dan lain-lain di antaranya:

1. Muhammad Mansyur, mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama, menyusun skripsi sarjananya dengan judul *HMI, Asas dan Sifat Perjuangannya*, di bawah bimbingan Dr. A. Mukti Ali dan Drs. H. Syamsuddin Abdullah, berhasil dipertahankan di muka sidang *munaqashah* tahun 1970.
2. Syamsir Salam, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsinya berjudul *Peranan HMI Cabang Yogyakarta dalam Kegiatan-kegiatan Pendidikan*. Sebagai promotor adalah H. Hussein Yahya, seorang dosen STI yang menyaksikan kelahiran HMI tahun 1947. Skripsi ini ditulis dan diuji pada 1972.
3. Alex Syaukani Bustami, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

- Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dengan judul *Partisipasi dalam Organisasi, Suatu Study Tentang HMI Cabang Yogyakarta*, dengan promotor Prof. Supomo. Lulus tahun 1975.
4. Agussalim Sitompul, mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama. Promotor Drs. R. Harith Abdoussalam dan pembantu promotor Drs. Burhanuddin Daja, ditulis dan diuji pada 1976. Judul skripsi *HMI dan Pembangunan*.
 5. Tulisan Halim Mubin dari Ujung Pandang (sekarang Makassar), dengan judul *Fragmen Lintasan Sejarah Perjuangan HMI Periode Yogyakarta*. Sayang penulisan ini tidak selesai.
 6. Saifullah SA, mahasiswa Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini ditulis untuk mendapatkan gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam. Pokok masalah yang dibahas adalah persepsi HMI tentang Nasionalisme, sebagaimana termuat dalam beberapa pidato Dies Natalis HMI yang masih dalam bentuk konsepsional. Bagaimana pengejawantahannya dalam gerakan Angkatan '66 untuk memperjuangkan Orde Baru. Bagaimana pula hubungan antara Islam dan Nasionalisme, Saifullah SA dalam hal ini melakukan pendekatan sejarah dan pendekatan ideologis.

Berdasarkan beberapa karya tulis di atas, nyatalah sudah bahwa karya tulis tentang HMI sudah cukup banyak dengan berbagai latar belakang serta perspektif yang berbeda-beda. Namun, belum satu pun yang secara khusus menjadikan Lafran Pane sebagai fokus kajiannya. Buku ini hadir dalam rangka menyempurnakan data-data yang terdapat pada berbagai buku tersebut dalam satu konsep terpadu atau terkumpul dalam satu naskah utuh. Selanjutnya, akan digali berbagai pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim di Indonesia.

Penulis mengambil obyek lain, untuk diteliti secara khusus, dengan penekanan yang berbeda, baru dan belum pernah

diteliti selama ini secara mendalam. Jadi, penelitian ini mempunyai spesifikasi sendiri. Kiranya penelitian ini dapat menunjukkan sesuatu yang berbeda serta melengkapi berbagai kekurangan penulis-penulis terdahulu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pertama mengenai pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia.

DASAR-DASAR ANALISIS

“Intelektual”, secara bahasa, berarti cendekiawan atau orang yang cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, memiliki daya akal budi serta totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran atau pemahaman.¹⁴ Sedangkan “inteligensia” adalah bentuk jamak dari intelektual yang berarti kaum terpelajar, kaum cerdas pandai, para cendekiawan.¹⁵ Definisi mengenai intelektual sangat berlimpah, sebagaimana akan dijelaskan pada Bab III nanti.

Novelis ternama Pramoedya Ananta Toer malah mempertanyakan:

Apa yang dimaksudkan dengan kaum intelektual bagi saya kurang jelas apakah menurut pengertian kamus ataukah menurut pendapat bebas dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan kata tersebut. Apakah sarjana termasuk intelektual? Apakah setiap orang di antara kita intelektual atau tidak? Apakah kata intelektual itu satu atribut (sifat) dari sebagian kecil bangsa yang merasa diri berpikir lebih daripada sebagian lainnya?¹⁶

Ali Syari’ati dan Antonio Gramsci adalah dua tokoh dunia yang sangat populer dalam berbagai kajian tentang intelektual, sedangkan Imam Zarkasyi dan Deliar Noer merupakan tokoh yang populer dengan konsep intelektual-ulama atau ulama-intelektual. Gramsci mengatakan bahwa setiap orang adalah intelektual, semua orang menggunakan intelektnya dalam tingkatan tertentu, perbedaan terdapat pada derajatnya, bukan jenisnya.¹⁷ Menurut Gramsci, sebagaimana dikutip Yudi Latif, sangatlah problematik jika harus mengidentifikasi para

intelektual sebagai orang-orang yang memiliki kualitas khusus yang bersifat bawaan (*innate*). Dalam pandangannya:

Setiap orang menjalankan beberapa bentuk aktivitas intelektual. Tetapi tidak semua orang dalam masyarakat menjalankan fungsi sebagai intelektual.¹⁸

Karena itu, faktor penentu apakah seseorang itu bisa dikategorisasikan sebagai intelektual atau hanya pekerja manual menurut Gramsci terletak pada “fungsi sosialnya”, berbeda pandangan dengan kaum liberal yang melihat kaum intelektual sebagai sesuatu yang berada “di atas”, “di luar” masyarakat.¹⁹ Sebab itu, ia katakan:

Tidak ada organisasi tanpa intelektual, dengan kata lain, tanpa pengorganisasian dan pemimpin, tanpa aspek teoretis dari kesatuan teori-dan-praktik yang dalam konkretnya terwujud dalam strata orang-orang yang berspesialisasi dalam elaborasi konseptual dan filosofis.²⁰

ISTILAH “AKTOR INTELEKTUAL”

Lahirnya istilah “Aktor Intelektual” dalam ranah publik yang kerap diungkapkan para aktivis, pengamat sosial, inteligen bahkan pemerintah tampaknya terinspirasi dari teori Gramsci di atas. Dalam aksi demonstrasi mahasiswa misalnya, pihak tertentu sering mengatakan, “siapa aktor intelektual di belakang ini?” Padahal, hampir seluruh demonstrasi mahasiswa, mereka aktor intelektualnya mereka juga pelakunya, ibarat sepak bola, mereka merangkap pelatih dan pemain sekaligus, bahkan pemilik saham.

Demikian juga dalam aksi teror, pertanyaan mengenai aktor intelektual di belakangnya selalu menarik. Tentunya dengan pemahaman bahwa pengeboman tersebut adalah kerja kolektif yang melibatkan banyak orang, lebih tegas lagi sebuah kerja yang terorganisir. Kata terorganisir di sini bisa dimaknai dengan melibatkan sebuah organisasi atau kerjasama antara beberapa organisasi.

Akibatnya, istilah intelektual sering juga dicitrakan negatif. Memang harus kita akui juga kejahatan intelektual jauh lebih berbahaya ketimbang kejahatan non-intelektual. Maka, istilah-istilah: pengkhianatan intelektual, intelektual durhaka, intelektual munafik bermunculan sebagai peringatan terhadap penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Pada tingkatan ini dibutuhkan moral intelektual. Tidak ada jaminan dengan semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka ia terhindar dari perilaku menyimpang, di sinilah letak penting agama. Nabi Muhammad Saw tegas mengatakan bahwa kesempurnaan akhlak adalah tujuan dari kehadiran Islam.

Ali Syari'ati

Ali Syari'ati dengan konsep *rausyan fikr* (intelektual yang tercerahkan, pemikir bebas, pemikir modern)²¹ mengatakan, “Para pemikir modern (*rausyan fikr*) yang sadar dan ingin mengabdikan kepada masyarakat dengan gagasan yang cemerlang untuk masanya dapat menempuh seperti apa yang saya lalui. Tidak mempersoalkan agama dalam masyarakat atas dasar perasaan keagamaan. Dengan harapan mendapat dukungan dari para pemikir modern di luar kalangan agama dapat mengikuti pandangan saya, yaitu dukungan untuk mendapat-kan keyakinan dan tanggung jawab sosial.”²²

Bangunan ideologi pembebasan, menurut Syari'ati, tergantung pada kelompok intelektual dalam masyarakat. Karena itulah, seorang intelektual dituntut untuk memiliki pengertian yang jelas mengenai ideologi yang dapat membantunya untuk mengembangkan suatu pola pemikiran yang progresif. Seorang yang mempunyai ideologi berarti mempunyai keyakinan yang kuat tentang bagaimana mengubah *status quo*.²³

Ali Syari'ati menemukan terminologi yang pas dalam hal ini, yaitu *rausyan fikr*,²⁴ pemikir tercerahkan yang mengikuti ideologi yang dipilihnya secara sadar. Ideologi akan membimbingnya kepada perwujudan tujuan ideologi tersebut, ia

akan memimpin gerakan progresif dalam sejarah dan menyadarkan umat terhadap kenyataan kehidupan. Ia akan memrakarsai gerakan revolusioner untuk merombak kevakuman, sebagaimana rasul-rasul selalu muncul untuk mengubah sejarah dan menciptakan sejarah baru, memulai revolusi dan menciptakan revolusi.

Rausyan fikr adalah model manusia yang diidealkan oleh Syari'ati untuk memimpin masyarakat menuju perubahan, ia mengandung makna sebagai berikut: *Pertama*, orang yang sadar akan keadaan manusia di masanya dan memahami *setting* kesejarahannya, kemasyarakatannya, serta menerima rasa tanggung jawab sosial. Ia tidak harus berasal dari kalangan terpelajar maupun intelektual. Para pelopor dalam revolusi gerakan ilmiah yang mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memberi arahan intelektual dan sosial kepada massa atau rakyat.

Kedua, para pemimpin yang mendorong terwujudnya pembenahan-pembenahan struktural yang mendasar di masa lampau sebagaimana dilakukan oleh para nabi besar pembawa agama. Mereka muncul dari kalangan rakyat jelata dan membawa semboyan-semboyan baru, memproyeksikan pandangan-pandangan baru, memulai gerakan baru, dan melahirkan energi baru ke jantung kesadaran masyarakat. Gerakan mereka adalah gerakan revolusioner mendobrak, tetapi konstruktif. Dari masyarakat beku menjadi masyarakat progresif, dan memiliki pandangan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ketiga, golongan ilmuwan yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menghasilkan lompatan besar. Memiliki karakter dalam memahami situasi, menyebarkan gaya hidup moralitas dan anti-*status quo*—konsumeristik-hedonistik dan segala kebuntuan filosofis untuk mengubahnya menjadi masyarakat yang mampu memaknai moralitas hidup (*moral value minded*).²⁵

Ali Syari'ati menegaskan bahwa para pemikir tercerahkan

adalah aktivitas radikal yang meyakini dengan sungguh-sungguh dalam ideologi mereka dan menginginkan syahid demi perjuangan tersebut. Misi yang akan dibangkitkan mereka adalah untuk membangkitkan “massa yang tertidur” dengan mengidentifikasi masalah nyata yang berupa: kemunduran masyarakat dan Islam, juga agama dan keadilan sebagai solusi nasional untuk menguliti masalah yang mencuat dalam masyarakat.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka intelektual Muslim Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Mereka yang meyakini kesempurnaan ajaran Islam, dan menjadi Islam sebagai basis utama solusi perubahan, tanpa mengesampingkan kebenaran-kebenaran lainnya serta mampu hidup dalam perbedaan dan keseimbangan.
2. Mereka yang memiliki pengetahuan (ilmu) tentang *setting* sejarah dari masyarakat Indonesia yang mencakup persatuan bangsa-bangsa di Nusantara menjadi Indonesia, dan lain-lain. Atas dasar ini, mereka memiliki kesadaran konstitusi-onal dengan menjadikan Pancasila sebagai asas berbangsa dan bertanah air.
3. Dengan ilmunya tentang sejarah Nusantara, Hindia-Belanda, Indonesia, ia dapat menemukan sebab-sebab yang sesungguhnya dari keterbelakangan masyarakatnya dan menemukan penyebab sebenarnya dari kemandekan dan kebobrokan rakyat dalam lingkungannya.
4. Mereka yang melakukan (amal) gerakan-gerakan revolusi-oner-konstruktif pembaharuan untuk mendobrak *status quo*. Dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia dengan jalan mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan latar belakangnya.
5. Mereka yang senantiasa sepanjang hidupnya bersikap independen, mudah dan berani menyatakan kebenaran,

serta berusaha memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti adil, kasih sayang, dan lain-lain. Hal ini menjadikan mereka seorang yang memiliki keluhuran akhlak. Akhlak ini menjadi isu penting dalam Islam, mengingat inilah misi utama dakwah Nabi Muhammad Saw. Jika dikontekskan dengan situasi saat ini, orang pintar semakin banyak karena kemudahan informasi, namun masalahnya adalah orang pintar yang berakhlak ini yang kian langka.

METODOLOGI

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan.²⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan memanfaatkan dua sumber yang sepadan dengan obyek penelitian yaitu, primer dan sekunder.

Pertama, sumber primer, yaitu bahasa tertulis yang diperoleh dengan melakukan riset perpustakaan (*library research*). Buku-buku tulisan Lafran Pane dan buku-buku tentang HMI karya Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul merupakan bahan utama dalam hal ini, demikian juga dengan buku-buku kajian tentang intelektual, cendekiawan karya Deliar Noer, Ridwan Saidi, Chumaidy Syarif Romas, Dhaniel Dhakidae, Yudi Latif, dan lain-lain. Bahan utama lainnya yang teramat penting adalah *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945–22 Agustus 1945* terbitan Setneg 1995 yang disusun oleh Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Herawati

Sumber-sumber lain berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, naskah-naskah serta sejumlah literatur yang memuat pemikiran, ide, gagasan Lafran Pane. Data-data itu lebih mengutamakan tulisan-tulisan resmi yang dibuat oleh Lafran Pane, baik berbentuk artikel maupun buku. Sedangkan wawancara dilakukan secara informal dengan orang-orang yang berkompeten dalam kajian intelektual, keluarga Lafran Pane serta orang-orang terdekat semasa hidup almarhum

Lafran Pane.

Kedua, sumber sekunder, berupa keterangan dan informasi yang dibuat oleh orang lain tentang Lafran Pane. Termasuk dalam hal ini adalah artikel di media massa. Data yang berasal dari sumber sekunder tidak akan digunakan apabila data tersebut sudah ada pada sumber primer. Tetapi data tersebut digunakan lebih pada upaya rekonstruksi dan reinterpretasi atas data sekunder yang menyebar di berbagai tempat.

Sebaliknya, untuk memelihara keabsahan dan keotentikan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder akan dikonsultasikan dulu kepada sumber-sumber primer. Sebagai penelitian yang mengutamakan penggalan data dari sumber-sumber yang bersifat dokumen, maka prinsip-prinsip kritik internal dan eksternal akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Deskriptif ialah menuturkan dan menafsirkan yang ada.²⁸ Pada umumnya, deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis,²⁹ sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan mencari kejelasan dari obyek penelitian.³⁰ Sedangkan hasil wawancara bertujuan untuk memperkaya maupun untuk memecahkan suatu data apabila ada keraguan terhadap fakta dari sumber tertulis. Semua bahan tertulis maupun hasil wawancara diklasifikasikan sebagai sumber primer.

PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio-historis*. Pendekatan sejarah adalah suatu pendekatan yang bertujuan menilai dan mencatat arti dan maksud dari berbagai peristiwa penting yang dialami manusia atau yang diperankannya dalam waktu tertentu. Yang dimaksud dengan berbagai peristiwa di sini adalah seluruh rangkaian kejadian yang

mendahului (*prolog*), inti peristiwa sendiri, dan kelanjutan atau akibat-akibat (*epilog*) dari peristiwa sekitar sebelum lahirnya Lafran Pane dan masa hidupnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku di sini adalah sosok Lafran Pane sendiri, atau mereka yang berperan sebagai saksi seputar kejadian-kejadian yang menimpa Lafran Pane serta mereka yang mendengar, melihat, mencatat berbagai perkataan, perbuatan, tulisan Lafran Pane. Setiap hasil pemikiran sebenarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang ada di sekitarnya.³¹ Mengingat Lafran Pane adalah salah satu tokoh utama di balik kemunculan intelektual-intelektual Muslim pascakemerdekaan 17 Agustus 1945, maka hal itulah yang menjadi fokus utama pertemuan. Sebab, sejarah pemikiran berarti studi tentang peran gagasan di dalam peristiwa sejarah dan proses.³²

Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan penelitian tentang pemikiran Lafran Pane ini akan dilakukan kajian teks, kajian konteks sejarah, kajian hubungan teks dengan masyarakatnya. Kajian teks meliputi berbagai sudut, di antaranya genealogi pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan perubahan, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, dan kesinambungan pemikiran. Kajian konteks meliputi konteks sejarah, konteks politik, konteks budaya, dan konteks sosial. Sedangkan kajian hubungan antara teks dan masyarakat meliputi pengaruh pemikirannya, implementasi pemikiran, diseminasi pemikiran dan sosialisasi pemikiran.

Taufiq Abdullah juga mengatakan, “Semakin penting suatu peristiwa dan semakin tinggi nilai simboliknya, maka semakin tinggi pula kemungkinan peristiwa itu akan memancing perdebatan.”³³

Pernyataan ini menarik, karena penulis melakukan penelitian tentang Lafran Pane, pendiri HMI, dan HMI adalah

organisasi mahasiswa yang berdiri hanya berjarak kurang dua tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga banyak peristiwa politik yang tentunya dalam pembahasan secara langsung ataupun tidak akan berkaitan dengan karya tulis ini. Sejarawan lain, Baskara T. Wardaya, mengatakan:

Orang yang tidak memahami sejarah telah mengidap penyakit yang namanya amnesia sejarah, ibarat orang keluar dari rumah, kemudian seseorang bertanya kepadanya, orang tersebut menjawab, “saya tidak tahu dari mana dan hendak ke mana.”³⁴

Dalam karyanya yang lain, Taufiq Abdullah mengungkapkan:

Sejarah intelektual bukan saja suatu ringkasan, atau sintesa dari data demikian, tetapi biasanya juga mencoba mencari kembali dan mengerti penyebaran karya pemimpin-pemimpin kebudayaan, ide-ide mereka pada masyarakat tertentu. Sejarah intelektual mencoba mengerti hubungan antara ide demikian pada satu pihak dan lain pihak kecenderungan (*drives*) dari kepentingan (*interest*) serta faktor-faktor non-intelektual pada umumnya. Sejarah intelektual mencoba menceritakan siapa yang menghasilkan dan bagaimana hasil intelektual dapat mendekati sesuatu dari sosiologi retrospektif yang umum.³⁵

Sejarah intelektual mencoba menilai sifat dan efek suatu kumpulan ide yang menyebabkan manusia harus memberi penilaian terhadap persoalan yang berlangsung di masa lalu. Suatu unsur sejarah intelektual ialah memberi penjelasan kepada masyarakat tentang ide-ide sehingga mampu me-mengaruhi pengertian pikiran mereka tentang apa-apa yang terjadi di masa lalu. Tindakan ini akan memperkaya bahan dan atau interpretasi dalam penulisan sejarah.³⁶

Taufiq Abdullah juga menjelaskan bahwa perdebatan mengenai sejarah, atau jika menggunakan idiom ilmu sejarah, “*tentang hasil rekonstruksi dari peristiwa yang terjadi di masa*

lalu” adalah hal yang lumrah. Maka, kalau mau sedikit bergagah-gagahan, bisalah dikatakan “sejarah adalah perdebatan”, karena itu sudah biasa terlihat ketika beberapa sejarawan menulis tentang peristiwa yang sama. Sejarawan dapat saja memperdebatkan semua hal yang menyangkut masa lalu itu.³⁷

Di kalangan masyarakat luas tentu saja berbeda, sejarah hanyalah peristiwa yang dianggap “besar” dari sudut akibat yang ditimbulkannya, atau “penting” dari sudut kesadaran masyarakat, yang biasanya memancing perdebatan. Kadang-kadang terjadi juga perdebatan yang menyangkut masalah kecil, namun dirasakan sensitif, karena bisa merusak gambaran “masa lalu” yang telah dianggap benar dan otentik.³⁸

Tentu saja, sekian contoh perdebatan kontemporer dalam sejarah Indonesia, baik yang ditanggapi secara emosional maupun dengan *nucher*, masih bisa diberikan. Tetapi tambahan contoh tidak akan mengubah argumen dasar, bahwa perdebatan adalah hal yang biasa ketika manusia dihadapkan dengan apa yang disebut “sejarah”. Bahkan dapat dikatakan bahwa perdebatan kesejarahan yang sehat bukan saja membantu perkembangan ilmu sejarah dan dapat pula memperluas pengetahuan masyarakat tentang sejarah, tetapi juga, dan lebih penting, memperdalam kesadaran sejarah. Kesemuanya memang menunjukkan bahwa sejarah bukanlah milik para sejarawan atau cendekiawan saja, tetapi juga, dan malah terutama kepunyaan masyarakat. Kegoncangan dari gambaran tentang peristiwa masa lampau bisa langsung ataupun tidak memantulkan akibatnya dalam peristiwa sosial.³⁹

Kalau demikian halnya, tampaklah bahwa sejarah bukan sekadar peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga bagian dari kekinian manusia. Karena itu, dapat dipahami, jika sebuah gambaran masa lalu yang sudah dianggap “otentik” digugat atau dipertanyakan, sebagian besar orang merasa seakan-akan kemantapan kekinian merekalah yang dipertanyakan atau

dipermasalahkan. Taufiq Abdullah menegaskan, “Atau, bisa juga masa lalu yang telah dianggap masyarakat atau sebagian masyarakat sebagai benar itu dilihat sebagai sebuah hal yang tidak wajar, maka kitalah, bukan orang lain, yang menggugat gambaran masa lalu itu, apa pun coraknya perdebatan pun terjadi.”⁴⁰

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan, salah satu ciri yang terabaikan dari masyarakat yang sedang mengalami perubahan ialah adanya rasa hayat sejarah. Dalam situasi ini, masyarakat sebangsa seakan-akan terdiri atas berbagai komunitas sejarah, yaitu komunitas yang diikat kesamaan gambaran dan persepsi terhadap masa lalu. Dalam dinamika perubahan sosial-politik, komunitas sejarah yang jamak ini bisa menemukan diri mereka bersentuhan satu dengan yang lainnya.⁴¹

Di saat strategi masa depan harus dirancang dan ketika pemahaman terhadap masa lampau dan hari kini harus kembali diperdalam, maka kemungkinan akan terjadi persentuhan komunitas-sejarah bisa sangat tinggi. Bukankah pengetahuan dan pemahaman tentang corak dan dinamika yang dialami pada masa lalu harus diperdalam? Taufiq lebih tegas mengatakan, “Jika hari ini ingin diberi makna, dan kalau visi ke depan ingin dirumuskan, perdebatan antara komunitas-komunitas sejarah pun tidak terelakkan.”⁴²

Azyumardi Azra mengenai sejarah mengatakan, penyajian cita-cita luhur yang implisit dalam berbagai peristiwa sejarah dan diekspresikan oleh tokoh-tokoh historis merupakan fungsi edukatif terpenting dalam sejarah. Untuk mencapai tujuan edukatif itu, maka sejarah hendaklah ditulis dan dibaca dengan semangat intelektual.⁴³

Sejarah pada dasarnya bisa menjadi sangat berguna untuk membentuk nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan sejarah juga dapat merangsang imajinasi kreatif dan memperkaya perspektif individu, yakni dengan membuatnya sadar tentang eksistensi orang lain. Di

situ, sejarah menghindarkan individu dari perspektif yang berpusat pada diri sendiri dan—sebaliknya—mengembangkan perspektif yang lebih sosial. Azyumardi menjelaskan:

Pendidikan kewargaan—dengan menggunakan pengalaman sejarah—semestinya berorientasi pada upaya memupuk rasa senasib-sepenanggungan yang mendorong tumbuhnya solidaritas. Pada gilirannya nanti, diharapkan tumbuh kesetiaan kepada negara-bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia cukup kaya dengan peristiwa-peristiwa dan figur-figur historis yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi upaya terbentuknya kesadaran bersama tersebut.⁴⁴

Akhirnya, penulis dengan segala kekurangan mencoba memahami bahwa penulisan sejarah tetap akan mengundang perdebatan sebagaimana diingatkan Taufiq Abdullah dan dikhawatirkan Azyumardi Azra. Namun, penulis juga tidak ingin menjadi amnesia sejarah seperti nasihat Baskara T. Wardaya.

Maka, penting dituliskan juga di sini pernyataan Taufiq Abdullah yang penulis namakan “teori perdebatan sejarah”. Taufiq mengatakan:

Perdebatan kesejarahan adalah bagian dari usaha untuk menempatkan bangsa dalam konteks perubahan zaman yang terus berlangsung. Meskipun dalam suasana perdebatan polarisasi dalam pemahaman dan pengetahuan sejarah bisa terjadi, namun perdebatan sejarah tidak bersifat disintegratif. Jika semua telah berakhir, integrasi yang lebih utuh malah bisa diharapkan. Masalah terberat yang dipunyai adalah kalau perdebatan tersebut terjadi di saat sumber sejarah tidak lagi dipunyai.⁴⁵

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar memudahkan pembaca, maka buku ini disekat menjadi enam bagian:

Bagian pertama adalah pendahuluan, membahas niat, hajat serta harapan penulisan buku hingga sistematikanya. *Bagian kedua* akan dibahas sejarah hidup Lafran Pane yang meliputi

segala hal mengenai Lafran, berikut pandangan manusia tentangnya. *Bagian ketiga* menjelaskan sejarah kehadiran intelektual Muslim Indonesia yang diawali dengan sejarah kemunculan istilah intelektual, definisi, peran dan fungsinya. *Bagian keempat* membahas pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia serta prinsip-prinsip dasar Keindonesiaan. *Bagian kelima* adalah pembahasan mengenai proses pembentukan intelektual Muslim Indonesia, sejarah, hambatan, dan lain-lain. *Bagian keenam* adalah penutup, kesimpulan dan saran

Demikian pendahuluan ini, semoga bisa menggambarkan keseluruhan isi buku ini. Akhirnya, semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang jujur. Selamat membaca.

Catatan:

- ¹ Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati (ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. vii. Buku ini merupakan kumpulan notulensi hasil-hasil Sidang BPUPKI dan PPKI. Menuliskan pengantar dalam buku tersebut tentunya sebuah pengakuan terhadap kepakaran seorang Taufiq Abdullah. Seorang pakar hukum Daris Purba, SH (salah satu pendiri LBH Yogya, saat ini sebagai Ketua LBH-KAHMI) kepada penulis di rumahnya mengatakan: “Sulit rasanya berbicara tentang Indonesia, sebelum membaca buku tersebut.” (26 Desember 2008).
- ² Ungkapan ini disampaikan Syafi’i Ma’arif dalam materi “Soekarno dan Islam”, dalam Sekolah Soekarno yang diadakan oleh IMPULSE dan GMNI Yogyakarta pada 29 Juni 2009. Penulis hadir sebagai peserta saat itu. Syafi’i Ma’arif yang sudah berusia 74 tahun berbicara selama dua jam tanpa teks. Soekarno sendiri pernah mengatakan: “*Islam tidak meminta suatu cap resmi seperti ‘Negara Islam’.* Apa yang dikehendaki Islam adalah suatu negara yang betul-betul menyalakan api Keislaman di dalam dada umatnya; inilah sebetulnya yang dimaksud dengan persatuan Islam dan Negara.” Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam 1900–1942*, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm. 308.

- ³ Kalimat “Indonesia dijajah selama 350 tahun” hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Sejarawan Universitas Negeri Medan, Ichwan Azhari, mengatakan tidaklah benar bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Karena jika angka tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran, maka awal mula penjajahan di Indonesia adalah tahun 1592. “Padahal, bangsa Belanda pada 1592 itu belum tiba di Indonesia. Belanda sendiri tiba di Indonesia, yakni di Banten, pada 1552 di bawah pimpinan Cornelius De Houtman untuk menjajaki potensi perdagangan di Indonesia.” Menurut Ichwan, yang benar adalah, Belanda memerlukan waktu selama lebih kurang 300 tahun untuk menaklukkan Indonesia. Hal ini ditandai oleh maraknya penentangan pemerintahan di sejumlah daerah untuk menolak intervensi Belanda seperti Raja Tallo, Iskandar Muda, dan Sultan Agung yang semuanya muncul dari beberapa wilayah di Indonesia. Ia mengatakan, masa penjajahan di Indonesia tidak bisa digeneralisasikan untuk semua kawasan di Indonesia karena setiap daerah memiliki masa waktu berbeda untuk dijajah oleh bangsa asing. Sementara itu, staf peneliti Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Unimed), Erond Damanik, merujuk pada pendapat G.J. Resink tahun 1987 dalam bukunya *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia Tahun 1850–1910*. Disebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1850 hingga 1910, masih banyak daerah di Indonesia yang masih merdeka atau belum diduduki Kolonial Belanda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa Indonesia dijajah Belanda tidak benar selama 350 tahun, karena hingga tahun 1907 masih banyak wilayah yang bebas dari pengaruh Belanda. Misalnya, di Sumatera Utara ada perang Sisingamangaraja (1887–1907), Kiras Bangun (1901–1905), Rondahaim (1870–1889), maupun Datuk Sunggal masih mengobarkan perang terhadap Belanda termasuk wilayah Aceh. “Justru yang benar adalah sebaliknya, yakni Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah di Indonesia. Jadi, mari sama-sama kita luruskan perjalanan bangsa ini. Kita tidak pernah dijajah selama 350 tahun, tapi justru yang terjadi adalah Belanda memerlukan waktu selama 300 tahun untuk menaklukkan kita.” Baca “Indonesia Tidak Pernah Dijajah 350 Tahun”, (*Kompas*, 15 Agustus 2010), sumber: <http://oase.kompas.com>.
- ⁴ Setidaknya ada 3 hal besar yang diperdebatkan saat itu: *Pertama*, persoalan struktur negara, apakah berbentuk Negara Kesatuan atau Negara Federal? *Kedua*, persoalan hubungan antara agama dan negara, apakah negara yang akan didirikan ini berkait erat dengan agama, atau netral dari pengaruh agama? *Ketiga*, apakah Indonesia ini akan menjadi republik atau kerajaan? Persoalan menjadi meruncing ketika membicarakan hubungan antara agama dan negara. Telah banyak sekali berbagai seminar pascareformasi 1998 membahas topik ini, seolah-olah hanya 3 hal ini yang diperdebatkan kala itu, padahal sidang-sidang BPUPKI dan PPKI

juga membahas persoalan ekonomi, pendidikan, budaya, pertahanan, pertanian, sumber daya alam, dan lain-lain.

- 5 Istilah Nasionalis Islam dan Nasionalis sekuler diperkenalkan oleh Endang Saifuddin Anshari dalam tesisnya *The Jakarta Charter of June 1945; A History of Gentlemen's Agreement between the Islamic and the 'Secular' Nationalist In Indonesia*, Kuala Lumpur: Abim, 1979, dalam Fahri Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986, hlm. 78. Lihat juga Sudi Silalahi, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka versi Para Pendiri Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 76. Sementara Soekarno menyebut golongan Nasionalis sekuler dengan “golongan kebangsaan”, dalam pidatonya “...*Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu nationale staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan 'golongan kebangsaan'. Ke sinilah kita semua harus menuju.*” Lihat Saafroedin Bahar (dkk.), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 74.
- 6 Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah*, Jakarta: Direktorat Pers, Publikasi dan Penerbitan LBH-PP-GPI, 2007, hlm. 21–22.
- 7 Agusssalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 1947–1975*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1976, hlm. 20.
- 8 Wawancara penulis dengan Agusssalim Sitompul, di Yogyakarta, 04 April 2009.
- 9 Jepang juga melakukan kontrol yang ketat terhadap pendidikan Islam. Jepang yakin bahwa pendidikan Islam harus mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap perilaku politik masyarakat akar rumput. Karena alasan inilah, pengajaran bahasa Arab pada awal mulanya juga dilarang. Namun, karena desakan dari umat Islam untuk mempertahankan Jawa dari ancaman Sekutu barulah bahasa Arab boleh diajarkan. Meski demikian, Jepang mewajibkan guru-guru Islam untuk melakukan *Saikeirei*, yaitu menunduk ke arah Tokyo yang mirip sikap rukuk dalam shalat. Hal ini semakin menimbulkan sikap antipati terhadap Jepang dan menguatkan hasrat mereka untuk segera merdeka. Lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 331–332.
- 10 Nurcholish Madjid, “20 Tahun HMI Berjuang”, dalam Agusssalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, hlm. 37.
- 11 Ibid, hlm. 37.
- 12 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 425.

- ¹³ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, hlm. 352.
- ¹⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 437. Intelektual diartikan juga sebagai: *cendekiawan; inteligensia; kecendekiawanan; kecerdasan; mengenai akal; menurut pikiran; intelektual; orang terpelajar*. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994, hlm. 264.
- ¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, an English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 326. Terdapat banyak istilah serupa, namun dengan makna yang berbeda seperti intelek, intelektualisme, intelektualistis, intelektualitas, inteligen, inteligensi. Lihat Pius A. Partanto, M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 264, dan Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 437–438. Dalam bahasa Jerman, intelektual disebut *intelligent* berarti cerdas. Lihat Suratman, *Kamus Jerman-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 37.
- ¹⁶ Pramoedy Ananta Toer, “Sikap dan Peran Kaum Intelektual di Dunia Ketiga”, pidato Pramoedy di Universitas Indonesia, dalam www.radix.net, akses 17 Januari 2009.
- ¹⁷ Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, Q. Hoare dan G.N Smith, terj. Lawrence & Wishart (London, 1971), hlm. 8–9. Dikutip dari Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 22.
- ¹⁸ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 22.
- ¹⁹ *Ibid*, hlm. 23.
- ²⁰ *Ibid*, hlm. 36–37.
- ²¹ *Rausyan fikr* adalah bahasa Persia yang artinya “pemikir yang tercerahkan”. Dalam terjemahan Inggris terkadang disebut *intellectual* atau *free thinkers*. *Rausyan fikr* berbeda dengan ilmuwan. Seorang ilmuwan menemukan kenyataan, seorang *rausyan fikr* menemukan kebenaran. Ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya, *rausyan fikr* memberikan penilaian seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal, *rausyan fikr* seperti para Nabi—berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya, *rausyan fikr* harus melibatkan diri pada ideologi. Lihat Jalaluddin Rahmat, “Ali Syari’ati; Panggilan untuk Ulil Albab”, pengantar dalam Ali Syari’ati, *Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam*, terj. Syafiq Bashri dan Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 14–15. Di Indonesia khususnya, istilah *rausyan fikr* mulai dikenal luas baru 5 tahun setelah peristiwa revolusi Islam Iran 1979, yakni setelah terbitnya buku terjemahan karya Ali Syari’ati, *Ideologi Kaum Intelektual...*, Bandung: Mizan, 1984.
- ²² Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*,

- Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 87.
- ²³ Ibid, hlm. 87.
- ²⁵ Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, hlm. 29–29, dikutip dari Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi...*, hlm. 88.
- ²⁶ Eko Supriadi, *Sosialisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 160.
- ²⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 131
- ²⁸ Ibid, hlm. 139.
- ²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 245.
- ³⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 59.
- ³¹ Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, hlm. 105.
- ³² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. 189.
- ³³ Saafroedin Bahar (dkk.), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. xi
- ³⁴ Wawancara langsung penulis dengan Baskara T. Wardaya di ruang kerjanya, 22 Februari 2008.
- ³⁵ Taufiq Abdullah, Abdurrahman Surjomihardjo (ed.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, Jakarta: PT Gramedia, 1985, hlm. 201.
- ³⁶ Ibid, hlm. 207.
- ³⁷ Taufiq Abdullah, “Arti Penerbitan Dokumen Sejarah”, sebuah pengantar dalam buku, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, 1995, hlm. vii.
- ³⁸ Dalam halaman ini, Taufiq Abdullah memberikan contoh penculikan Soekarno dan Mohammad Hatta menjelang Proklamasi Kemerdekaan oleh sekelompok pemuda yang kemudian dikenal dengan “Peristiwa Rangsengklok”. Halaman ini menurut Taufiq tidak terlalu penting untuk diperdebatkan, karena peristiwa sesudahnya telah ”menutupi” arti penculikan Bung Karno dan Bung Hatta itu. Tetapi, justru karena peristiwa ini berkaitan langsung dengan tanggal proklamasi—tanggal yang penting secara historis dan simbolis—maka segala sesuatu mengenai penculikan itu pun menjadi perdebatan. Apakah karena “diculik” oleh sekelompok pemuda itu kedua tokoh tersebut akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa menunggu izin lebih dulu dari tentara pendudukan Jepang yang telah kalah perang? Kalau memang begitu, maka semua unsur dari peristiwa penculikan tersebut perlu diperjelas. Tetapi, bukan tidak mungkin kalau penculikan itu hanya sekadar gangguan, *aberration* belaka dari proses sejarah yang sedang berjalan. “Penculikan” tersebut dengan kata lain justru menyebabkan tanggal proklamasi menjadi terlambat satu hari. Namun, berbeda dengan

Taufiq Abdullah, penulis melihat kalimat **atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta** yang ditulis di bawah naskah proklamasi mampu menjelaskan perdebatan ini, sebab jika kedua pemimpin ini tidak diculik, maka kalimat itu kemungkinan besar akan bertuliskan **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia: Soekarno-Hatta**, artinya kemerdekaan kita nyata sekali hadiah dari Jepang, sebab BPUPKI dan PPKI adalah bentukan Jepang dan berada dalam pengawasan Jepang.

³⁹ Saafroedin Bahar (dkk.), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. viii.

⁴⁰ Ibid, hlm. viii

⁴¹ Ibid, hlm. ix

⁴² Ibid, hlm. ix

⁴³ Azyumardi Azra, “Sejarah Hendaklah Ditulis dengan Semangat Intelektual”, *Kompas*, 2 Maret 2000.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Saafroedin Bahar (dkk.), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. ix.

BAB II

SEJARAH HIDUP LAFRAN PANE

Ketika seorang mahasiswa, Lafran Pane, mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam pada 1947, sebagian besar mahasiswa yang diajaknya untuk ikut serta adalah para mahasiswa di perguruan tinggi “umum”. Mereka mendirikan HMI, antara lain, justru karena ingin belajar “Islam”.

Dan, mungkin sebuah ide yang cemerlang saat mereka merumuskan pendirian HMI.

(Sulastomo)¹

Terkadang pemikiran seorang tokoh lebih luas dari kategorisasi yang kita ciptakan.

(Yudi Latif)²

SILSILAH LAFRAN PANE

Sebelum lebih jauh penjelasan riwayat hidup Prof. Drs. H. Lafran Pane, penting dituliskan di bagian awal ini *tarombo* (bahasa Tapanuli) atau silsilah Lafran Pane. Silsilah ini merupakan hasil penelitian Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul.³ Silsilah tersebut dimulai dari Raja Gulingan Pane di Pangurabaan, Sipirok, Tapanuli Selatan⁴, berikut urutannya:

1. **Raja Gulingan Pane**⁵ punya anak 6 orang:
2. 1) Ugari, 2) Naek, 3) Guru Pamutung, 4) Hima, 5) Mompar, 6) Sopola.
3. 1) Lokkotan, 2) Ramba, 3) Sopadan.
Sopadan punya anak 2 orang:
4. 1) Manobok, 2) Somorot
Manobok punya anak 4 orang:

5. 1) Mangaraja Pamutung, 2) Baginda Manohan,
3) H. Kodir, 4) Faian

6. 1) Enda, 2) Pandapotan, 3) MR Panongano
Enda punya anak 1 orang:
7. Sutan Panehobaan, yang terkenal dengan **Sutan Pangurabaan**.⁶
Sutan Pangurabaan punya anak 8 orang:
8. 1) Ny. Tarip, 2) Sanusi Pane, 3) Armijn Pane,
4) Ny. Bahari Siregar, 5) Ny. Ali Nafiah, 6) **Lafran Pane**,⁷
7) Nilakusuma, 8) Krisnamurti
Lafran Pane punya anak 3 orang:
9. 1) Dr. Toga Fakhrudin Pane (alm.), 2) Ir. Muhammad Iqbal Pane (Jakarta), 3) Dra. Teti Sari Rahmiati (perempuan, Jakarta)
Dr. Toga Fakhrudin Pane punya anak 2 orang:
10. 1) **Tofani Arief Budiman** (Yogyakarta), 2) Emeria Dewi Paramaita (perempuan, Yogyakarta)
Ir. Muhammad Iqbal Pane punya anak 4 orang, semuanya perempuan.
Dra. Teti Sari Rakhmiati Pane punya anak 2 orang, semuanya perempuan.⁸

MARGA PANE

Iniilah Indonesia dengan keragaman suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Sri Murni dalam kertas kerjanya *Malaysia-Indonesia dalam Folklor Sumba* menuliskan bahwa jika diurai sejak zaman dahulu kala asal orang Asli dan orang Melayu Malaysia, terlihatlah adanya benang merah dengan beberapa etnis di Indonesia, antara lain etnis Dayak, Minangkabau, Jawa, Aceh.⁹ Antropolog lain bahkan mengatakan bahwa semua etnis dan suku di Indonesia jika dikaji lebih dalam mempunyai hubungan yang saling terkait.

Bagaimana dengan Batak? Suku yang satu ini memang selalu menarik untuk dipelajari, di samping tampil apa adanya, humoris, suku ini juga memiliki kecintaan yang tinggi akan ilmu pengetahuan dan seni. Jika nama Anda, misalnya Ari Saputra, kemudian dalam penulisannya disingkat “Ari S.”, bisa saja Anda dianggap orang Batak, karena huruf “S” bisa diartikan Siregar, Sitorus, Sitompul, Sinaga, Simatupang, Sianturi, Situmorang, Siagian, Sipahutar dan banyak lainnya. Bagi para pelajar, tentu sangat kenal dengan marga Simanjuntak, karena ada C. Simanjuntak, seorang pencipta lagu-lagu kebangsaan Indonesia terkenal.

Dari sumber-sumber yang penulis baca, marga Pane adalah marga cabang dari Sitorus. Nai Suanon (Tuan Sorbadibanua): Nama (Gelar) Putra Ketiga Tuan Sorimangaraja, Lahir dari Istri Ketiga Tuan Sorimangaraja yang Bernama Nai Suanon. Penjelasan tentu tidak sesederhana ini. Pembaca bisa cari buku-buku terkait, misalnya “Kamus Budaya Batak Toba” karangan M.A. Marbun dan I.M.T. Hutapea, terbitan Balai Pustaka, Jakarta, 1987. Meski setiap marga mempunyai silsilah atau *tarombo* masing-masing, namun semuanya adalah saudara. Dalam sebuah situs dijelaskan:

Dalam masyarakat Batak, sering terjadi ikrar antara suatu marga dengan marga lainnya. Ikrar tersebut pada mulanya terjadi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya atau antara sekelompok keluarga dengan sekelompok keluarga lainnya yang marganya berbeda. Mereka berikrar akan memegang teguh janji tersebut serta memesankan kepada keturunan masing-masing untuk tetap diingat, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan setia. Walaupun berlainan marga, tetapi dalam setiap marga pada umumnya ditetapkan ikatan, agar kedua belah pihak yang berikrar itu saling menganggap sebagai dongan sabutuha (teman semarga). Konsekuensinya, setiap pihak yang berikrar wajib menganggap putra dan putri dari teman ikrarnya sebagai putra dan putrinya sendiri. Kadang-kadang ikatan kekeluargaan karena ikrar atau padan lebih erat daripada ikatan kekeluargaan karena marga. Karena ada perumpamaan Batak mengatakan sebagai berikut: “Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang; Togu nidok ni uhum, toguan

nidok ni padan”, artinya: “Teguh akar bambu, lebih teguh akar rumput; teguh ikatan hukum, lebih teguh ikatan janji”. Masing-masing ikrar tersebut mempunyai riwayat tersendiri.¹⁰

KERAJAAN PANE

Claude Guillot¹¹ menjelaskan bahwa dalam suratnya kepada Jacques I, Iskandar Muda mencatat Pane sebagai jajahan Aceh di Pantai Timur Sumatera. Dalam *Negarakertagama* juga terdapat nama Pane. Prasasti Rajendra I di Tanjavur mencatat “Pannai di Tepi Sungai” di antara kota atau daerah yang diserang tentara Cola pada 1025 M. Lokasi ini diduga kuat di Kuala Panai. Sekarang di bagian selatannya terdapat Pelabuhan Labuhanbilik (Laboean Bilik). Hipotesis lokasi ini, yang sering dirasulkan, diragukan karena di bagian hulu Sungai Barumun di daratan tinggi Padang Padang Lawas terdapat sekumpulan candi dan kebanyakan terletak di tepi sungai yang juga bernama Panai (Batang Pane), anak Sungai Barumun. Berdasarkan epiografi dan tanda-tanda pengaruh Jawa, candi-candi ini diduga dari abad ke-10 hingga abad ke-14 dan peninggalan sebuah kerajaan besar beragama Buddha dan berpusat di daerah pedalaman. Nama pantai juga terdapat di tempat lain, sebuah kota dan sebuah daerah di sebelah timur Danau Toba dan daerah pedalaman kota Tanjung Balai. Sementara itu, Wheatlet berpendapat bahwa nama Panai (Pane) berasal dari bahasa Tamil yang artinya “ladang”, tetapi ini merupakan usulan. Tidak tentu apakah semua tempat ini berkaitan dengan sebuah kerajaan. Pane sekarang juga dipakai untuk nama marga orang Batak di Pantai Barat dan karena Padang Lawas lebih dekat dari pantai ini, R Mulia mengusulkan bahwa pelabuhan tersebut yang berpusat di daerah candi-candi.¹²

Jelas, bahwa dahulu Padang Lawas berhubungan dengan Pantai Barat. Mungkin daerah di selatan Danau Toba, tercatat dalam *Negarakertagama*, berperan juga dalam hubungan ini. Namun, menurut Prasasti Tanjavur, Panai terletak di tepi sungai

dan kurang dari seabad kemudian teks kita mencatat bahwa panai adalah sebuah pelabuhan. Akhirnya, sepucuk surat dari Iskandar Muda menyebut Panai (Pani) dalam daftar tempat di Pantai Timur, di antara Tanjung Balai dan Rokan. Pelabuhan Panai dahulu betul-betul dekat dengan Kuala Sungai Panai dan kemungkinan besar terletak di tempat yang dinamakan Panai sekarang. Hipotesis ini diperkuat oleh keadaan di mana sebuah anak Sungai Barumun di bagian hulu, Sungai Barumun dan kualitasnya dinamakan Panai atau Pane.

Mengenai Padang Lawas tidak ada halangan bahwa ia termasuk dalam sebuah kerajaan yang bernama Pane dan berpusat di pantai atau sebaliknya berpusat di daerah pedalaman dan berpintu di pantai. Tampaknya, sumber-sumber China tidak membawa informasi tambahan mengenai Panai. Seperti yang telah disebutkan Po'lo, Po'lo dan Pu-lo mungkin sama dengan Peurelak, Walaupun Wheatley berpendapat bahwa nama-nama ini mungkin sama dengan Panai. Po'ni yang diduga Panai oleh Gerini sebenarnya Brunei. Dalam daftar Yi Tsing— yang bermula dari Barat—Po'li disebut dalam posisi kelima, jauh sesudah Melayu yang merupakan Kerajaan Sriwijaya sekarang.

Hsu-Yun-Tsiao, merujuk kepada Schnitger dan diikuti oleh Mulia, berpendapat bahwa tempat ini sama dengan Panai. Namun, menurut kebanyakan peneliti, lokasi Po'li lain. Pelliot dan Wheatley berpendapat bahwa Po'li adalah Bali, sedangkan menurut Wolters, Po'li terletak di Bagian Timur Nusantara, di sekitar Chin-Li-p'i-Shih (Vijayapura) yang kemungkinan besar terletak di Borneo.¹³

Sumber lain yang penulis telusuri menjelaskan bahwa Pane merupakan keturunan Kerajaan Pane, yang bermarkas di Portibi di hulu Sungai Batang Pane, Tapanuli Selatan.¹⁴ Pane merupakan kerajaan paling lama dalam peradaban Batak, berlokasi di Pantai Timur Sumatera dan sekarang sudah hilang, berasimilasi menjadi marga Pane di budaya Batak modern.¹⁵

Sementara itu, Pengaduan Lubis dalam artikelnya menjelaskan, dalam Pupuh XIII Kitab *Negarakertagama*, nama Mandailing bersama nama banyak negeri di Sumatera dituliskan oleh Empu Prapanca sebagai negara bawahan Kerajaan Majapahit.

Tidak ada keterangan lain mengenai Mandailing kecuali sebagai salah satu negara bawahan Kerajaan Majapahit. Namun demikian, dengan dituliskan nama Mandailing, terdapatlah bukti sejarah yang otentik bahwa pada abad ke-14 telah diakui keberadaannya sebagai salah satu negara bawahan Kerajaan Majapahit. Pengertian negara bawahan dalam hal ini tidak jelas artinya karena tidak ada keterangan berikutnya. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa negeri Mandailing sudah ada sebelum abad ke-14, karena sebelum keberadaannya dicatat tentunya Mandailing sudah terlebih dahulu ada.

Kapan Negeri Mandailing mulai berdiri tidak diketahui secara persis. Tetapi, karena nama Mandailing dalam kitab ini disebut-sebut bersama nama banyak negeri di Sumatera termasuk Pane dan Padang Lawas, kemungkinan sekali negeri Mandailing sudah mulai ada pada abad ke-5 atau sebelumnya, sebab Kerajaan Pane sudah disebut-sebut dalam catatan China pada abad ke-6. Dugaan yang demikian ini dapat dihubungkan dengan bukti sejarah berupa reruntuhan candi yang terdapat di Simangambat dekat Siabu. Candi tersebut adalah Candi Siwa yang dibangun sekitar abad ke-8.¹⁶ Sedangkan Dinasti Pane yang berhasil diketahui melalui situs internet adalah sebagai berikut: 1790–1813: Raja Sati; 1813–1856: Raja Badiri Sutan Mengedar Alam; 1856–1880: Sutan Gagar Alam; 1880–1907: Sutan Mengedar Alam Syah. 1907–.....: Tengku Sulung Syahmara, Sutan Gagar Alam Rahmatullah.¹⁷

MASA KECIL HINGGA MASA PENCERAHAN

Lafran Pane lahir pada 5 Februari 1922 di Padang Sidempuan. Menurut berbagai tulisan sebelumnya, disebutkan bahwa Lafran Pane lahir pada 12 April 1923 di Kampung

Pangurabaan, Kecamatan Sipirok,¹⁸ sebuah tempat yang terletak di kaki Gunung Sibualbuali, 38 kilometer ke arah utara dari “kota salak” Padang Sidempuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.¹⁹ Lafran adalah anak keenam keluarga Sutan Pangurabaan Pane dari istrinya yang pertama. Ibunda Lafran Pane meninggal 2 tahun setelah kelahirannya. Lafran adalah bungsu dari enam bersaudara, yaitu: Nyonya Tarib, Sanusi Pane,²⁰ Armijn Pane,²¹ Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Ali Hanafiah, Lafran Pane, dan dua orang saudara se-ayah yaitu, Nila Kusuma Pane dan Krisna Murti Pane.²²

Sutan merupakan gelar ketokohan, sedangkan Pangurabaan adalah nama daerah. Basyral Hamidy Harahap dalam bukunya menceritakan bahwa pada 1933 Pemerintah Kolonial mengeluarkan larangan berkumpul untuk menekan gerakan rakyat. Hingga, rumah Sutan Pangurabaan Pane beberapa kali digunakan untuk berkumpul beberapa tokoh di antaranya Adam Malik, dkk.²³ Sutan Pangurabaan Pane juga merupakan tokoh Partai Indonesia (PARTINDO)²⁴ di daerah Sumatera Utara, ia berprofesi sebagai seorang wartawan dan penulis. Selain itu, Sutan Pangurabaan juga seorang pengusaha yang menjabat sebagai Direktur Oto Dinas Pengangkutan (ODP)²⁵ Sibualbuali yang berdiri tahun 1937 berpusat di kota Sipirok. ODP Sibualbuali adalah suatu perusahaan otobis nasional tertua di seluruh Sumatera Utara, yang saat itu mempunyai lebih kurang 250 buah mobil dengan trayek Banda Aceh di ujung utara Pulau Sumatera sampai Panjang, kota yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera.²⁶

Sutan Pangurabaan Pane termasuk salah seorang pendiri Muhammadiyah di Sipirok pada 1921. Sedangkan kakek Lafran Pane seorang ulama bernama Syekh Badurrahman Pane. Karena tidak merasakan kasih sayang ibu kandung sebagaimana mestinya serta tidak puas dengan asuhan ibu tiri, Lafran mengalami kesusahan hidup yang mengakibatkan ia mudah dihinggapi penyakit rasa rendah diri. Hal ini menimbulkan

suatu kompensasi berupa kenakalan yang luar biasa. Jalan pikirannya susah dimengerti banyak orang, termasuk ayahnya.²⁷ Sebelum memasuki bangku sekolah atau pesantren secara formal, jiwa Lafran terlebih dahulu diisi dengan belajar “sifat dua puluh”, seperti: *Wujud, Qidam, Baqo, Mukholafatuhu Lilhawadis*, dan seterusnya, yang diiringi dengan artinya. Lafran Pane juga belajar yang dalam bahasa Tapanuli disebut “ALIF-ALIF”, yakni mempelajari membaca huruf-huruf abjad al-Quran, sebagai satu jenjang untuk dapat membaca al-Quran dengan benar.²⁸

Kedua model pendidikan ini diperolehnya dari guru terkenal di Kampung Pangurabaan, namanya Malim Mahasan. Berkat didikannya, bocah Lafran terisi jiwa keagamaannya, sungguh-pun tidak berjalan lama, namun bekal itu sangat membekas bagi Lafran dalam mengarungi hidup. Sedangkan dalam pendidikan formal yang ditempuh, Lafran tidak menunjukkan garis yang menjurus, hal ini disebabkan karena situasi perang.

Pendidikan di bangku sekolah dimulai dari Pesantren Muhammadiyah Sipirok (kini dilanjutkan oleh Pesantren K.H. A. Dahlan di Kampung Setia dekat Desa Parsorminan-Sipirok),²⁹ kemudian dilanjutkan ke Sekolah Desa 3 (tiga) tahun. Semuanya tidak tamat, lalu pindah ke Sibolga, ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, 126 kilometer dari Sipirok. Di kota ini, Lafran masuk HIS Muhammadiyah. Setelah itu, ia kembali lagi ke kampungnya. Di Sipirok, ia masuk Ibtidaiyah (dasar) diteruskan ke Wustha (menengah). Dari Wustha pindah ke Taman Antara Taman Siswa Sipirok, selanjutnya pindah ke Taman Antara dan Taman Dewasa di Medan.³⁰

Di tanah Deli, kehidupannya kian merosot, belum tamat dari Taman Siswa, ia sudah dikeluarkan, Lafran lantas meninggalkan rumah tinggalnya, yakni rumah kakak kandungnya, Nyonya dr. Tarip. Lafran kemudian menjadi petualang di sepanjang jalan Kesawan di Kota Medan, tidur tidak menentu, kadang-kadang sudah menggeletak di kaki

lima, emperan toko. Pada kesempatan lain, ia bekerja sebagai penjual karcis bioskop, main kartu, menjual es lilin sebagai penyambung hidup.³¹

Pada 1937, Lafran Pane hijrah ke Batavia,³² atas permintaan abang kandungnya, Armijn Pane dan Sanusi Pane. Di Batavia, Lafran memulai sekolah di kelas 7 (*tujuh*) HIS Muhammadiyah, menyambung ke Mulo Muhammadiyah, ke AMS Muhammadiyah, kemudian ke Taman Dewasa Raya Jakarta sampai pecah Perang Dunia II.

Di semua sekolah itu, gurunya mengakui Lafran Pane adalah murid yang cerdas, walaupun nakalnya luar biasa. Kebiasaan buruknya di Medan kembali diulangi di Batavia, Lafran masuk organisasi “BENDE” yang bernama “ZWARTE BENDE”, sebuah “GENG” pemuda-pemuda tanggung kala itu. Daerah operasi kelompok Lafran meliputi sekitar Senen dan Kramat. Sosoknya yang hening tegas menjadikannya seorang yang disegani dalam kelompok itu. Dalam sebuah artikel klasik era tahun 1940-an, dijelaskan bahwa Zwarthe Bende adalah:

Satoe pergerakan ondergrondsche dari 1942–1943, berpahala besar sekali Tjoe Yoek Moy dalam ini hal hingga ia dipersamakan dengan kenpei, dibriken pistool, hak-hak istimewa dan malahan ia dibolehken tembak atawa boenoe sembarang orang sasoekanja!, artinya: Satu pergerakan bawah tanah yang ada antara tahun 1942–1943, Tjoe Yoek Moy sangat berkuasa di sini sehingga ia disamakan dengan tentara Jepang, ia diberikan pistol dan diperbolehkan menembak atau membunuh sembarang orang sesukanya!³³

Karena kelakuannya, Lafran kerap berkenalan dengan meja hijau, dan pernah dituntut untuk membayar denda, tetapi selalu dibela oleh “BENDE”-nya walaupun berat. Bahkan, Mr. Wilopo³⁴ yang menjadi gurunya di MULO Muhammadiyah pernah membayarkan denda karena Lafran Pane tidak punya uang.³⁵ Di sekolah, Lafran pernah memimpin demonstrasi atau pemberontakan. Berkat bantuan Mr. Kasman Singodimedjo,³⁶ yang menjadi Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah

Jakarta, keributan itu dapat diselesaikan. Ketika sekolah di Taman Dewasa Raya Jakarta, Lafran Pane bertemu dengan (*Djakfar Nawawi atau Dipo Nusantara*) Aidit atau lebih dikenal dengan D.N. Aidit, bekas Ketua CC Partai Komunis Indonesia, dan di zaman Belanda sama-sama memasuki Barisan Pemuda GERINDO, dengan Armansyah, Hanafi, Hasan Gayo. L. Hutabarat, yang walaupun akhirnya antara Lafran Pane dengan Aidit masing-masing berlawanan keyakinan. Aidit pernah memimpin aksi menuntut pembubaran HMI yang didirikan Lafran itu.³⁷

Pada 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia, Lafran Pane pulang ke Padang Sidempuan sebagai pokrol,³⁸ tetapi lantas Lafran difitnah, ia dituduh memberontak kepada Jepang. Lafran dituntut hukuman mati. Beruntung pengaruh ayahnya Sutan Pangurabaan Pane cukup kuat di Padang Sidempuan. Namun dengan fitnah itu, Lafran Pane meninggalkan Sumatera, dan tahun 1943 mengembara lagi ke Jakarta.

Sejak keberangkatannya untuk pengembaraan itu, Lafran mengalami proses kejiwaan radikal, *Insan Kamil*-nya mulai tergugah, lalu mencari apa sebenarnya hakikat hidup ini. Ia merindukan sifat-sifat mulia yang dihafalnya di masa kecil, dan menanyakan apa sesungguhnya landasan dari segala sesuatu itu. Ia menyadari betapa pentingnya kembali ke dasar keyakinannya. Lafran sungguh-sungguh merasakan dengan seluruh batinnya tentang kepulangan “si anak hilang”.³⁹

Sejak itu, ia sering merenung, tafakur, berkat dasar pendidikan agama yang diperolehnya dari guru pengajiannya Malim Mahasan di Sipirok, maupun dari Pesantren Muhammadiyah Sipirok, dan juga asuhan orangtuanya dan keadaan masyarakat Sipirok yang taat beragama. Setelah mengalami proses yang dalam, barulah Lafran menjadi pemeluk teguh agama Allah dengan sesungguhnya, sehingga takwa melandasi hidupnya.⁴⁰

Sekembali ke Jawa, Lafran bekerja di kantor statistik Jakarta.

Selanjutnya, karena kecakapannya berbahasa Jepang, Lafran diminta untuk bekerja di perusahaan besar Apotek Bavosta, dan menjadi pemimpin umum apotek tersebut tahun 1945. Setelah tentara sekutu memasuki Jakarta yang menyebabkan berkobarnya api pertempuran, maka pada 4 Januari 1946, Presiden dan Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta, yang kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia.⁴¹

Karena ibu kota pindah ke Yogyakarta. Sekolah Tinggi Islam (STI) yang semula ada di Jakarta juga ikut pindah ke Yogyakarta. STI sendiri didirikan di Jakarta pada 27 Rajab 1364 H, atau 8 Juli 1945. Setelah pindah ke Yogyakarta, STI secara resmi dibuka pada 10 April 1946 dengan beberapa fakultas, di antaranya Fakultas Agama, Hukum, Pendidikan dan Eko-nomi. Pada 10 Maret 1948, STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII).⁴²

Oleh karena kepindahan STI ke Yogyakarta, maka berdatanganlah para mahasiswa ke Yogyakarta untuk meneruskan kuliah. salah seorang di antaranya Lafran Pane yang harus rela meninggalkan pekerjaannya di Jakarta, usia Lafran saat itu 23 tahun. Selain kuliah, untuk memenuhi makan sehari-hari Lafran Pane juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Departemen Sosial.⁴³

Perkembangan wawasan dan intelektual Lafran semakin pesat saat kuliah di STI. Dosen-dosennya antara lain K.H. Abdul Kahar Muzakkir,⁴⁴ Hussein Yahya,⁴⁵ dan H.M. Rasyidi.⁴⁶ Lafran tekun membaca berbagai buku tentang agama Islam, sehingga apa yang dipikirkannya sebelum masa kesadarannya kini telah ia dapatkan dengan pengamatan dan penyelidikan sendiri. Ia bertambah yakin serta pendiriannya kian teguh, bahwa Islam merupakan pedoman hidup yang sempurna.⁴⁷

Semasa di STI⁴⁸, Lafran Pane menjadi Ketua III Senat Mahasiswa STI di samping Janamar Azam dan Amin Syakhri. Di PMY, Lafran Pane juga ikut sebagai pengurus mewakili Mahasiswa STI. Tidak mengherankan apabila Lafran Pane

banyak bergaul dengan mahasiswa dan mengerti seluk-beluk kehidupan mereka sehari-hari.⁴⁹

Sebelum tamat dari STI, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP) pada April 1948.⁵⁰ Setelah Universitas Gajah Mada (UGM) dinegerikan tanggal 19 Desember 1949, dan AIP dimasukkan dalam Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik (HESP), Lafran Pane otomatis menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada dan mendapat tugas belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan⁵¹, dan selanjutnya dari Kementerian Luar.

Tercatat dalam sejarah Universitas Gajah Mada (UGM), Lafran termasuk salah satu mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai gelar sarjana, yaitu tanggal 26 Januari 1953. Dengan sendirinya, Drs. Lafran Pane menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Selanjutnya, Lafran Pane lebih tertarik di lapangan pendidikan dan keluar dari Kementerian Luar Negeri dan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁵²

KELUARGA

Lafran Pane dikaruniai Allah Swt tiga orang anak, yakni dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, dari perkawinannya dengan Ibu Martha Dewi (wafat 12 Januari 1989) asal Bengkulu pada 6 Oktober 1951. Putra-putri beliau adalah: *Pertama*, Toga Fakhruddin Pane (wafat 24 Februari 1981), alumni Fakultas Kedokteran UGM, mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia dan HMI. *Kedua*, Muhammad Iqbal Pane, alumni Fakultas Teknik UGM, aktif di PII dan HMI. Dan *ketiga*, Tetti Sari Rakhmawati Boru Pane (alumni Fakultas Ekonomi UGM dan juga anggota HMI).⁵³

KELUARGA SASTRAWAN DAN SENIMAN

Ayahanda Lafran Pane, Sutan Pangurabaan Pane, adalah seorang guru sekaligus seniman Batak Mandailing di Muara

Sipongi, Mandailing Natal. Pendiri surat kabar *Surya* di Tapanuli dan pengelola kelompok musik tradisional “uning-uningan” ini juga merupakan penulis cerita lokal berjudul *Tolbok Haleoan* (Hati yang Kemarau). Buku ini masih ada di perpustakaan hingga sekarang. Beberapa pengamat sastra menjelaskan, karya tulis berupa cerita yang terbit sebelum kemerdekaan Indonesia semacam *Tolbok Haleoan* terasa unik, kian lama kian bernilai. Umumnya, karya sastra di masa itu berisikan pesan persamaan hak, dampak perang, kebebasan berpikir, kemandirian sikap serta kemerdekaan yang bertanggung jawab.

Limantina Sihalolo, mahasiswa S2 Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menjelaskan, *Tolbok Haleoan* karya Sutan Pangurabaan Pane terbit pertama kali tahun 1933 di Medan, setelah terbit di surat kabar *Poestaha* tahun 1927 (*Kompas*, 03 November 2004). *Tolbok Haleoan* dianggap penting untuk generasi muda, karenanya *Tolbok Haleoan* diterbitkan kembali oleh Balai Pustaka tahun 1978. Artinya, meskipun ditulis 1927, karya Sutan Pangurabaan Pane ini memiliki relevansi kuat hingga saat ini.

Senada dengan Limantina, seorang pegiat sastra asal Sipirok, Budi Hatees, menuliskan bahwa *Tolbok Haleoan* pertama kali terbit 1933 di Medan. Kemudian diterbitkan lagi pada Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah 1982 dalam kategori naskah kuno. Hingga 1980-an, karya ini masih dipakai sebagai bacaan di sekolah. *Tolbok Haleoan* berkisah tentang kehidupan Lilian Lolosan dan Sitti Bajani pada masa kolonial di Tapanuli Selatan. Sutan Pangurabaan Pane tidak bercerita perihal kawin paksa dan pertentangan adat seperti kebanyakan novel yang muncul kala itu, dia bercerita tentang nasib cinta tokohnya yang mesti mengungsi akibat peperangan melawan Belanda (*kompasiana.com*, 13 Januari 2010).

Bakat sastra Sutan Pangurabaan Pane mengalir kepada dua

orang putra kandungnya, Sanusi Pane (1905–1968) dan Armijn Pane (1908–1970), keduanya merupakan kakak kandung Lafran Pane. Dibandingkan bapaknya, Armijn Pane jauh lebih produktif, berikut beberapa karyanya: 1) Kumpulan puisi: *Gamelan Djiwa*, Bagian Bahasa Djawa, Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Jakarta, 1960; *Djiwa Berdjiwa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1939. 2) Dalam bentuk novel: *Belunggu*, Dian Rakyat, Jakarta, Cet. I 1940, Cet. IV 1954, Cet. IX 1977, Cet. XIV 1991. 3) Kumpulan cerpen: *Djinak-Djinak Merpati*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. I 1940; *Kisah antara Manusia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. I 1953, Cet. II 1979; *Drama antara Bumi dan Langit*, 1951.

Sang Abang, Sanusi Pane, tidak kalah produktifnya. Mantan pemimpin surat kabar *Kebangunan* (1936–1941) dan redaktur Balai Pustaka (1941) ini menulis beberapa karya fenomenal, di antaranya: *Pancaran Cinta* (1926), *Prosa Berirama* (1926), *Puspa Mega* (1927), *Kumpulan Sajak* (1927), *Airlangga* (drama berbahasa Belanda (1928), *Eenzame Caroadalueht* (drama berbahasa Belanda, 1929), *Madah Kelana* (1931), *Kertajaya* (drama, 1932), *Sandhyakala Ning Majapahit* (drama, 1933), *Manusia Baru* (drama, 1940), *Kakawin Arjuna Wiwaha* (karya Mpu Kanwa, terjemahan bahasa Jawa Kuno, 1940).

Dalam sejarah sastra Indonesia, Sanusi Pane dan Armijn Pane dikenal sebagai sastrawan pelopor Pujangga Baru bersama Sutan Takdir Alisjahbana dan Amir Hamzah. Selain sebagai sastrawan, Sanusi Pane juga aktif dalam dunia politik, ia ikut menggagas dan aktif di “Jong Bataks Bond”, kemudian menjadi anggota PNI. Akibat keanggotaannya di PNI, ia diberhentikan sebagai guru pada 1934. Namun, sastrawan nasionalis ini tak patah arang. Ia kemudian memimpin sekolah-sekolah Perguruan Rakyat di Bandung dan menjadi guru pada sekolah menengah Perguruan Rakyat di Jakarta. Pada 1936, ia menjadi pemimpin surat kabar Tionghoa-Melayu *Kebangunan* di Jakarta (tokohindonesia.com).

Di era kontemporer saat ini, tradisi menulis sastra masih dilanjutkan oleh keturunan Sutan Pangurabaan Pane, salah satunya yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah penulis novel kontroversial, Andrei Aksana. Ia adalah cucu pujangga Sanusi Pane dan Armijn Pane, dan merupakan anak kedua novelis Nina Pane dan Jopie Boediarso.

Puisi pertama Andrei Aksana dimuat di majalah *Zaman*, sedangkan cerpen perdananya dimuat di majalah *Kawanku*. Selain itu, ia selalu menyabet penghargaan untuk lomba baca puisi dan lomba menyanyi. Andrei Aksana telah melahirkan beberapa novel diantaranya: *Mengukir Mimpi Terlalu Pagi* (Gramedia, 1992), *Abadilah Cinta* (Gramedia, 2003), *Sebagai Pengganti Dirimu* (Gramedia, 2004), *Cinta 24 Jam* (Gramedia, 2005), *Pretty Prita* (Gramedia, 2005), *Karena Aku Mencintaimu* (Gramedia, 2006), *Cinta Penuh Air Mata* (Gramedia, 2007), dan yang terakhir cukup kontroversial, sebuah novel berjudul *Lelaki Terindah* (Gramedia, 2010). Ketika dianggap menjadi penulis hanya bermodalkan faktor keturunan, ia berkomentar dalam blognya, “Buat saya, bakat hanya 1 persen, selebihnya adalah kerja keras dan keringat” (andreiaksana.blogdrive.com).

Bagaimana dengan Lafran Pane?

Dari penelitian sementara penulis, tidak seperti bapak dan kedua abangnya, Lafran Pane tidak pernah tercatat menulis karya sastra, baik berupa puisi, cerita rakyat, naskah drama dan lainnya. Beberapa orang yang diwawancarai hanya mengatakan, Lafran suka sastra atau penikmat saja. Agus Salim Sitompul dalam wawancaranya dengan Lafran Pane mengatakan, Lafran Pane paling suka sajak Wera Vinger yang berbunyi “*Ragaku dapat dipatahkan, tetapi jiwaku terus menyalakan api kemerdekaan*”.

Banyak yang heran serta menyayangkan produktivitas Lafran Pane dalam menulis tertinggal jauh dibanding bapak dan kedua abangnya. Karya non-sastranya pun sangat minim.

Tradisi keluarga yang diwarisi Lafran Pane adalah gemar berorganisasi dan menjadi guru. Kedua hal ini ditekuninya hingga akhir hayatnya. Pilihan Lafran masuk Perserikatan Mahasiswa Yogya (PMY) yang berhaluan Sosialis sebelum mendirikan HMI diduga kuat banyak dipengaruhi budaya keluarga yang egaliter sebagaimana kebanyakan keluarga seniman lainnya.

Lafran juga tidak begitu mahir menganyam realitas menjadi kalimat indah seperti abang-abangnya. Lafran dalam sedikit karyanya jika diperhatikan lebih suka memberikan peng-ibaran atau menjelaskan sebuah peristiwa atau pernyataan dengan peristiwa berbeda sesuai tujuan pesan. Sebagai contoh, orang seperti ini biasanya jika menulis atau berkata kerap mengatakan “ibarat, seperti, laksana, dan lain-lain”.

Lafran juga bukan orator ulung seperti Sanusi Pane. Namun, jiwa seniman begitu melekat padanya. Sosoknya yang pendiam, keras kepala, hidup apa adanya hingga akhir hayatnya menjadikannya seniman tanpa karya sastra. Watak teguh pendirian, jujur, tanpa pamrih serta konsisten hidup sederhana inilah yang membuat dirinya mampu menggerakkan orang-orang yang secara pengetahuan lebih hebat darinya untuk bersama-sama berjuang dalam organisasi.

Dari sini dapat diambil pelajaran mengenai karisma, bahwa pemimpin karismatik yang diikuti oleh banyak orang tidak sekadar membutuhkan kemampuan intelektual mumpuni, melainkan juga kejujuran, sikap tanpa pamrih, serta konsisten hidup sederhana. Tanpa itu, seorang pemimpin hanya dihormati di depannya saja, dan besar potensi pengikut atau anggotanya bakal berkhianat.

Karisma kuat juga dimiliki tokoh lain semacam Jenderal Sudirman, meskipun badannya kurus, tidak berotot seperti layaknya imaji orang tentang pemimpin perang. Sudirman dalam banyak sumber disebutkan sebagai seorang yang zuhud, sesuai perkataan dan perbuatan serta keberaniannya berkorban

di atas rata-rata prajurit di masa itu. Laskar rakyat saat itu rela bergantian mengangkat tandunya, loyalitas prajurit terhadap Sudirman dapat dikatakan loyalitas tanpa pamrih, mengingat Sudirman juga berani berperang di barisan terdepan demi melindungi prajuritnya.

MENDIRIKAN HMI

Sudjoko Prasadjo⁵⁴ sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Agusssalim Sitompul dalam sebuah artikelnya menuliskan mengenai hubungan HMI dan Lafran Pane: “Sesungguhnya, tahun-tahun permulaan riwayat HMI adalah hampir identik dengan sebagian kehidupan Lafran Pane sendiri. Karena dialah yang punya andil terbanyak pada mula kelahiran HMI, kalau tidak boleh kita katakan sebagai tokoh pendiri utamanya.”⁵⁵ Ungkapan tersebut ditulis Sudjoko Prasadjo dalam majalah *Media*, yang diterbitkan PB Himpunan Mahasiswa Islam.⁵⁶

Sementara H.M. Mintaredja yang menggantikan Lafran Pane⁵⁷ sebagai Ketua PB HMI sejak 22 Agustus 1947, dengan tulisan tangan, mengirim surat kepada Lafran Pane, agar mau datang ke Jakarta menyusun sejarah HMI. Dalam surat itu antara lain Mintaredja mengatakan: “Dalam ceramah tersebut saya ceritakan perihal pertemuan pertama saya dengan Saudara dalam kereta api ke Malang, Kongres Mahasiswa I. Saya ceritakan waktu saya masih mewakili PMJ. Baru kemudian saya ikut serta dalam PB HMI, walaupun menjadi ketua dan seterusnya sesudah Kongres HMI terpilih kembali. Walaupun saya termasuk tokoh HMI utama (ketua), namun tentang perjalanan HMI sebelum kongres tersebut saya sungguh tidak mengetahui, dan saya menganjurkan untuk mengobrol dengan Saudara, sebagai pencetus dan pendiri/pendorong HMI, eigenaan/direktur HMI.”⁵⁸

Pada wadah lain, Ahmad Tirtosudiro, yang hidup sezaman dan seangkatan dengan Lafran Pane maupun M.S. Mintaredja, mengemukakan dalam orasinya pada “Malam Kenangan Lafran

Pane”: “Malam kenangan bagi orang yang sudah meninggal termasuk sesuatu yang langka di negeri kita. Hanya orang-orang besar saja yang biasanya diperingati dan dikenang saat yang bersangkutan sudah meninggal. Betulkah Lafran Pane orang besar? Di mana letak kebesaran beliau dibanding orang-orang lainnya? Kita beranggapan Saudara Lafran Pane sebagai orang besar, ia besar jasanya, bukan saja bagi HMI secara khusus, tetapi juga bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Dan kita semua maklum, bahwa kebesaran beliau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini justru mengemuka melalui HMI. Sudah disepakati semua pihak bahwa Pak Lafran Pane-lah penggagas dan pemrakarsa bagi lahirnya HMI, walau Pak Lafran sendiri menyatakan terlalu subyektif dan pribadi sekali menyatakan demikian. Namun, justru dengan pendapat beliau begitu, maka kita jadi lebih hormat padanya. Kekhawatiran beliau bila disebut pribadinya akan membawa efek yang kurang baik terhadap keharuman dan kebesaran HMI, bagi saya sekali lagi menunjukkan kebesaran jiwa beliau.”⁵⁹

Sementara dr. Sulastomo, mantan Ketua Umum PB HMI 1963–1966 dan Koordinator Gerakan Jalan Lurus dalam artikelnya juga menjelaskan: “Ketika seorang mahasiswa, Lafran Pane, mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam pada 1947, sebagian besar mahasiswa yang diajaknya untuk ikut serta adalah para mahasiswa di perguruan tinggi “umum”. Mereka mendirikan HMI, antara lain, justru karena ingin belajar “Islam”. Dan, mungkin sebuah ide yang cemerlang saat mereka merumuskan pendirian HMI”.⁶⁰

Berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku di HMI, maka kesepakatan bahwa Lafran Pane sebagai pemrakarsa dan pendiri HMI tidak diputuskan secara kekeluargaan, melainkan diputuskan secara organisatoris. Karena HMI sebagai sebuah organisasi modern sudah selayaknya mempunyai sejarah terang tentang dirinya. Sejarah HMI telah melalui serangkaian uji materi sebelum disosialisasikan kepada anggota baru HMI

setiap tahunnya. Sebab, akan menjadi aib bagi organisasi jika terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan, di mana, tujuan dan siapa saja yang terlibat dalam pendirian HMI? Sebab hal ini sangatlah mendasar.

Maka, dianggap perlu untuk merumuskan sejarah per-juangan HMI untuk dijadikan buku pegangan yang akan disampaikan pada setiap mahasiswa yang masuk HMI. Sebab, dengan memahami sejarah HMI secara baik akan memudahkan kader HMI dalam merumuskan arah organisasi, karena untuk menggagas HMI di masa yang akan datang membutuhkan dialektika antara masa lalu dan kondisi hari ini.

Terdapat beberapa nama yang aktif dalam menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah yang dilalui oleh HMI, di antaranya Deliar Noer, Ridwan Saidi, Dahlan Ranuwiharjo, Halim Mubin, Sudjoko Prasodjo, Agussalim Sitompul, Nurcholish Madjid, dan lain-lain.⁶¹ Agussalim Sitompul merupakan sosok paling fokus dalam merekam berbagai peristiwa sejarah, terutama yang terkait HMI.

Saat akan menulis sejarah HMI, Agussalim Sitompul telah mengadakan tukar pikiran dengan berbagai tokoh HMI seperti Yusuf Syakir (mantan Ketua HMI Cabang Yogyakarta 1959–1960), di kantornya PN Industri Sandang, Jalan Menteng Raya 7 Jakarta, pada 28 Juli 1971, kemudian dengan tiga orang mantan Ketua Umum PB HMI yaitu, Prof. Deliar Noer, Ismail Hasan Metareum SH, Drs. Oman Komaruddin saat ramah-tamah selesai pembukaan Kongres XI HMI di Gedung Merdeka Bogor pada 23 Mei 1974. Selanjutnya A. Halim Mubin, di sekretariat PB HMI, Jalan Diponegoro 16 Jakarta, pada 23 Mei 1974.⁶²

Kemudian, berdasarkan hasil tukar pikiran tersebut ditemukan beberapa teori tentang sejarah pendiri HMI. *Pertama*, satu-satunya pendiri HMI adalah Lafran Pane. *Kedua*, pemrakarsa pendiri HMI adalah Lafran Pane. *Ketiga*, pendiri HMI adalah mereka yang ikut hadir dalam rapat pendirian

HMI di STI pada 5 Februari 1947. Teori yang pertama tidak dapat diterima, bahkan Lafran Pane sendiri menolak tegas jika ditetapkan sebagai satu-satunya pendiri HMI, sedangkan teori kedua sudah menjadi konsensus nasional di kalangan HMI, bahwa Lafran Pane adalah pemrakarsa berdirinya HMI.⁶³

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian sejarah HMI, Kongres XI HMI di Bogor tanggal 23–30 Mei 1974 menetapkan Lafran Pane sebagai pemrakarsa lahir/berdirinya organisasi dan disebut sebagai pendiri HMI. Secara formal, keputusan itu telah tertuang dalam Ketetapan Kongres XI HMI No. XIII/XI/1974, tanggal 29 Mei 1974.⁶⁴

Setelah itu, PB HMI mengutus Chumaidy Syarif Romas⁶⁵ sebagai MPK (Majelis Pekerja Kongres) PB HMI ke Yogyakarta guna menyampaikan keputusan kongres tersebut. Terjadilah dialog keras antara Chumaidy dengan Ibu Martha Dewi, istrinya Lafran Pane. Wanita asal Bengkulu ini menolak. Kala itu Martha Dewi mengatakan: *“Sangat egois jika Bapak menerima keputusan tersebut, perjuangan tidak akan ada artinya.”* Lafran Pane sendiri tidak memberikan komentar atas ketetapan nasional ini.

Dengan teratur Chumaidy menjelaskan bahwa penetapan Lafran Pane sebagai pendiri HMI telah sesuai bukti-bukti yang ada, dan dimaksudkan demi menyelamatkan HMI, karena sudah ada beberapa orang terang-terangan mengaku sebagai pendiri HMI. Maka, jika tidak cepat ditetapkan, dapat terjadi perdebatan ihwal siapa sesungguhnya yang menggagas pendirian HMI. Intinya, penetapan Lafran Pane sebagai pendiri HMI selain untuk kepastian sejarah juga untuk menyelamatkan HMI.

Lafran Pane kemudian memahami keterangan Chumaidy. Terbukti hingga saat ini tidak ada sanggahan terhadap keputusan kongres itu, terlebih keilmiahannya telah dikaji lewat seminar-seminar sejarah HMI.⁶⁶ Sejatinya, sebelum ketetapan resmi tersebut, di kalangan anggota maupun alumni

HMI telah bersepaham bahwa Lafran Pane adalah pemrakarsa berdirinya HMI. Setelah penetapan itu, tidak ada perubahan dalam diri Lafran, dia tetap bersepeda mengajar di IKIP Yogyakarta.

SAAT-SAAT SEBELUM PENDIRIAN HMI

M. Iqbal Assegaf⁶⁷ menggambarkan kondisi psikologis Lafran Pane saat mendirikan HMI sebagai perwujudan dari komitmen Keislaman. Mengutip pidato pendiri *Studenten Islam Studie-club* (SIS-1934) Jusuf Wibisono, Iqbal Assegaf menjelaskan bahwa keadaan batin seseorang merupakan sumber dari dan landasan bagi tingkah lakunya. Semakin kokoh landasan batin tersebut, semakin mampu ia menghadapi tantangan hidup. Semakin murni jiwa seseorang, semakin ia memancarkan budi luhur dan karya-karya besar darinya, untuk mencapai keadaan batin yang demikian dibutuhkan agama. Agama dapat membuat seseorang menjadi kuat. Setiap bangsa tidak akan hidup selaras tanpa agama. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan (*iman*), agar dapat menjadi kuat dan besar. Islam adalah agama yang bukan saja mengajarkan segi-segi ritual, melainkan juga segi sosial, politik dan kebudayaan. Demikian Jusuf Wibisono dalam pidato pengantar pendirian SIS. Dari namanya jelas, kelahiran HMI (oleh Lafran Pane, dkk) merupakan perwujudan komitmen Keislaman dengan atau tanpa pidato pendiri SIS tersebut.⁶⁸

Rencana pendirian HMI oleh Lafran Pane diawali dengan mengumpulkan sejumlah pemuda di daerah Kauman Yogyakarta.⁶⁹ Lafran kemudian mendiskusikan hajatnya tersebut. Pada November 1946, dengan mengundang beberapa mahasiswa Islam di Yogyakarta, baik yang ada di Sekolah Tinggi Islam (STI), Sekolah Tinggi Teknik (STT) maupun yang di Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada untuk rapat. Rapat ini dihadiri lebih kurang 30 mahasiswa, di antaranya terdapat pengurus PMY (Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta) dan GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia). Rapat-rapat yang telah

berulang dilaksanakan belum melahirkan perkumpulan, karena ditentang oleh PMY⁷⁰ dan GPII, bahkan tidak sedikit pula yang curiga.⁷¹

Meski demikian, betapapun besarnya tantangan, kritikan yang datang dari dalam dan luar Islam, semakin besar pula keinginan Lafran mendirikan HMI. Lafran tidak berkenan mundur. Ia mendapatkan tambahan semangat ketika beberapa mahasiswa STI menyatakan dukungan.

Untuk peninjauan pendapat publik terhadap kemungkinan lahirnya HMI, Lafran bertukar pikiran dengan Prof. Abdul Kahar Muzakkir (Rektor STI saat itu). Prof. Kahar setuju dengan syarat organisasi yang didirikan tersebut tidak terlalu mencampuri urusan politik. Peringatan Prof. Kahar cukup beralasan karena situasi politik saat itu tidak menentu, apalagi STI secara kelembagaan belum kokoh.⁷²

Tidak berselang lama, gagasan Lafran telah menyebar di kalangan mahasiswa STI, Lafran segera menyiapkan Rencana Anggaran Dasar dan nama organisasi yang akan ditawarkan, yakni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).⁷³ Mantan penjual karcis bioskop sepertinya paham sekali, asal tawaran filmnya bagus, karcis tidak susah dijual.

Dengan penuh semangat, Lafran bergerilya mencari mahasiswa di luar STI guna menyamakan visi. Ia berhati-hati sekali demi menjaga kemungkinan adanya penyusupan. Lafran sering duduk di depan serambi Masjid Besar Kauman menjelang Shalat Jumat. Tatkala bertemu mahasiswa yang akan shalat, Lafran segera memperkenalkan diri seraya mengajak masuk ke dalam organisasi yang akan dibentuk. Kapasitasnya sebagai Ketua III Senat Mahasiswa STI urusan kemahasiswaan membuat Lafran mengenal banyak mahasiswa, di samping itu Lafran juga menjadi pengurus PMY seksi STI bersama Amin Syakhri dan Suyono.⁷⁴

Seiring semakin matangnya situasi yang mengiringi kelahiran HMI, kemudian pendukungnya terus bertambah serta makin

solid di awal tahun 1947, Lafran bertekad tidak menyiakan momentum. Namun niat Lafran, dkk ini belum dimengerti banyak pihak, khususnya PMY dan GPII. Lafran bertahan, Ia meyakini kebutuhan sangat mendesak, mengingat belum ada organisasi sejenis, Maka acara kelahiran harus segera dilangsungkan. Lafran menceritakan:

Setelah mengalami berbagai hambatan yang cukup berat selama lebih kurang 3 bulan, detik-detik kelahiran organisasi mahasiswa Islam akhirnya datang juga. Saat itu adalah hari-hari biasa mahasiswa-mahasiswa STI datang sebagaimana biasanya untuk mengikuti kuliah-kuliah, tanpa diduga dan memang sudah takdir Tuhan, mahasiswa-mahasiswa yang selama ini menentang keras kelahiran STI tidak hadir mengikuti perkuliahan.⁷⁵

Saat itu seharusnya jam kuliah Tafsir, dosennya Hussein Yahya, Lafran meminta izin kepada beliau. Mengetahui Lafran Pane selaku Ketua III Senat Mahasiswa STI, Hussein Yahya mengizinkan meskipun ia belum tahu pasti tujuan pertemuan itu, namun ia tertarik menyaksikan peristiwa itu.⁷⁶

Akhirnya, dengan segala persiapan, saat itu hari Rabu Pon 1878, 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, jam 16.00 sore, bertempat di salah satu ruangan kuliah STI, Jalan Setyodiningratan⁷⁷, masuklah mahasiswa Lafran Pane, langsung berdiri di depan kelas dan memimpin rapat. Mengawali prakatanya, Lafran mengatakan:

Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi Islam, karena semua persiapan dan perlengkapan sudah beres. Siapa yang mau menerima berdirinya organisasi mahasiswa Islam ini, itu sajalah yang diajak, dan yang tidak setuju biarkanlah mereka terus menentang.⁷⁸

Selanjutnya, Lafran Pane mempersilakan Bapak Hussein Yahya untuk memberikan sambutannya, namun beliau berkeberatan, karena kurang tahu apa yang harus disampaikan sehubungan dengan tujuan rapat itu, di samping itu beliau juga berpendapat biarlah mahasiswa yang menyelesaikan urusan mereka.

Lafran Pane kemudian selaku pimpinan rapat antara lain mengatakan:

1. Rapat hari ini adalah rapat pembentukan satu organisasi mahasiswa Islam, di mana anggaran dasarnya sudah dipersiapkan.
2. Pada hari ini, bukan lagi mempersoalkan perlu atau tidaknya mendirikan organisasi mahasiswa Islam
3. Di antara saudara-saudara boleh ada yang tidak setuju, boleh juga ada yang setuju, namun demikian walaupun masih ada yang tidak setuju, pada hari ini juga organisasi mahasiswa Islam ini sudah harus berdiri, karena persiapannya sudah matang.⁷⁹

Pertemuan kemudian diselingi pertanyaan serta penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi mahasiswa Islam tersebut. Secara umum, pertemuan berjalan lancar, semua mahasiswa yang hadir menyatakan persetujuannya. Selanjutnya, mengenai nama organisasi, peserta rapat sepakat dengan usulan Lafran Pane, di mana organisasi itu bernama: “Himpunan Mahasiswa Islam” disingkat HMI.

Berikut beberapa keputusan penting rapat hari itu yang kelak menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah bangsa Indonesia:

1. Hari Rabu Pon 1878, 14 Rabiul Awal 1366, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, menetapkan berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI,⁸⁰ yang bertujuan:
 - a. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan Mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
 - b. Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.⁸¹
2. Mengesahkan Anggaran Dasar HMI. Adapun Anggaran Rumah Tangga akan dibuat kemudian.

3. Membentuk pengurus HMI, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Lafran Pane
Wakil Ketua	: Asmin Nasution
Penulis ⁸² I	: Anton Timur Djaelani.
Penulis II	: Karnoto
Bendahara I	: Dahlan Hussein
Bendahara II	: Maisaroh Hilal
Anggota	: Suwali Jusdi Ghozali Mansyur

4. Sekretariat HMI dipusatkan di Asrama Mahasiswa, Jalan Setyodiningratan 5 (Jalan Panembahan Senopati 4, Sekolah Asisten Apoteker—SAA saat itu).⁸³

23 hari setelah HMI berdiri barulah surat kabar *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta memuat berita pada 28 Februari 1947:

Baru-baru ini, di Yogyakarta, telah didirikan Himpunan Mahasiswa Islam, anggota-anggotanya terdiri dari mahasiswa dari seluruh Indonesia yang beragama Islam. Perhimpunan ini akan menjadi anggota Kongres Mahasiswa Indonesia. Sekretariat HMI: Asrama Mahasiswa, Setyodiningratan 5 Yogyakarta.⁸⁴

Sementara Lafran Pane sesaat setelah mendirikan HMI menyatakan:

Keputusan mendirikan HMI, kami tegaskan, karena kebutuhan yang sangat mendesak bagi para cendekiawan Muslim muda untuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Selanjutnya, HMI juga diharapkan mampu melestarikan dan mengamankan ajaran Islam.⁸⁵

Lafran memulai tradisi kepemimpinan organisasi tidak mesti dari anak kyai, bangsawan, tapi dari siapa pun. Pada masa itu, kebanyakan organisasi di awal berdirinya dipimpin anak-anak

priyayi. Sebagai “anak rantau” dari Sumatera Utara yang hidup sendiri di Yogyakarta, tidak banyak yang mengenal Lafran anak dan keturunan ningrat atau bukan. Namun, teman-teman segenerasi memilihnya sebagai juru bicara komunitasnya. Pengalaman ini membentuk independensi pemikiran Lafran Pane, ia merasa percaya diri dalam berhadapan dengan siapa pun, tidak sedikit anak priyayi yang menjadi anggota HMI akhirnya lebur dengan semangat HMI bahwa “kemuliaan, kepemimpinan tidak ditentukan oleh keturunan, namun ditentukan oleh pemikiran dan prestasi kerja”.

Lafran kemudian berinisiatif mencari mahasiswa Islam di luar STI untuk dijadikan pengurus HMI. Langkah ini penting guna memupus stereotip HMI didirikan hanya untuk maha-siswa STI. Bagi Lafran Pane syarat utama menjadi pengurus HMI adalah berjiwa Islam dan komitmen terhadap cita-cita HMI. Ternyata tidak mudah mencari sosok yang sesuai kriteria itu.

Jalan terbuka, Lafran Pane bertemu dengan Muhammad Syafaat Mintaredja di alun-alun utara Yogyakarta saat Shalat Idul Fitri 1366 H. Lafran tahu M.S. Mintaredja adalah mahasiswa Fakultas Hukum BPT Gajah Mada (sekarang UGM), sebelumnya keduanya telah berkenalan di kereta api dalam perjalanan ke Kongres PPMI (Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia) di Malang bulan Maret 1947. Saat itu, M.S. Mintaredja mewakili delegasi PMY. Habis shalat, Lafran Pane berjanji akan bersilaturahmi ke asrama M.S. Mintaredja untuk bertukar pikiran tentang HMI dan dunia kemahasiswa-an.⁸⁶

Lafran menepati, ia mendatangi asrama Mintaredja di Jalan Taman Siswa 11 A.⁸⁷ Setelah bertukar pikiran, Lafran Pane menyampaikan maksud pokoknya pada Mintaredja agar bersedia bergabung dalam kepengurusan HMI yang sebentar lagi di-*reshuffle*. Mintaredja sepaham dengan visi HMI dan setuju bergabung. Usaha Lafran mendekati Mintaredja sejak di kereta api berbuah.

Pada 22 Agustus 1947 atau 6 Bulan setelah HMI berdiri, Lafran mengadakan pergantian dan penyegaran kepengurusan agar posisi HMI semakin kuat dalam dunia kemahasiswaan. Hasil *reshuffle* adalah:

Ketua	: M.S. Mintaredja
Wakil Ketua	: Lafran Pane
Sekretaris I	: Asmin Nasution
Sekretaris II	: Karnoto
Bendahara	: Maisaroh Hilal ⁸⁸

Setelah masa-masa percobaan, tantangan dan pertumbuhan, di saat umur HMI 9 bulan, kedudukannya di tengah masyarakat semakin kokoh. Maka dilangsungkan Kongres I HMI tanggal 30 November 1947 di Yogyakarta yang diikuti 4 Cabang, yakni: Yogyakarta, Solo, Klaten dan Malang. Jumlah anggota HMI saat itu berkisar antara 100 orang dari sebelumnya hanya 15 orang. Adapun acara Kongres I ini adalah:

1. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban PB HMI.
2. Mengesahkan Anggaran Dasar HMI, yang tadinya bersifat sementara. Tentang Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada PB HMI.
3. Penggarisan program perjuangan HMI.
4. Memilih Pengurus Besar HMI.⁸⁹

Anggaran dasar yang disahkan itu, belum ada pembukaannya seperti saat ini. Anggaran dasar tersebut hanya memuat 12 pasal ketentuan yang mengatur segala hal tentang HMI, terdapat juga nama HMI versi Inggris, yaitu: *Indonesian Moslem Students League*.

Tujuan HMI tertera dalam Pasal IV Anggaran Dasar:

1. Mempertegak dan mengembangkan ajaran agama Islam.
2. Mempertinggi derajat rakyat dan Negara Republik Indo-nesia.

Usaha terdapat dalam Pasal V Anggaran Dasar:

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam agama Islam bagi mahasiswa khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.
2. Menghidupkan jiwa Islam dalam hati rakyat.
3. Bekerja bersama-sama dengan lain-lain golongan dalam mengejar maksud dan tujuan, baik dalam maupun luar negeri.

Kongres sebagai kekuasaan tertinggi ditetapkan sedikit-dikitnya diadakan satu kali dalam satu tahun.⁹⁰ Sedangkan program jangka lama dalam negeri antara lain:

Bekerja bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan dan partai-partai lainnya dalam memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, politik rakyat Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya.

Sedangkan luar negeri antara lain:

Bekerja sama bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan mahasiswa Islam khususnya dan lain-lain golongan umumnya di seluruh dunia terutama yang ada di negeri-negeri Islam guna kepentingan agama dan bangsa.

Terpilih dalam Kongres Perdana HMI itu Muhammad Syafaat Mintaredja sebagai Ketua Umum PB HMI 1947–1948, sedangkan Lafran Pane sebagai Sekretaris PB HMI, merangkap menjadi Ketua HMI Cabang Yogyakarta periode 1947–1948. Pascakongres, pengaruh HMI membesar, apalagi dengan aktifnya HMI terjun ke gelanggang medan pertempuran

melawan kolonial Belanda. Periode ini disebut dengan fase pengokohan.⁹¹

Berikut nama-nama pengurus PB HMI yang dipilih secara langsung dalam forum kongres:

Ketua Umum	: M.S. Mintaredja, SH
Wakil Ketua	: Ahmad Tirtosudiro
Penulis I	: Lafran Pane
Penulis II	: ?? masih kosong ??
Bendahara I	: Ir. Sanusi
Anggota	: Ushuluddin Hutagalung, SH Amin Syakhri Anton Timur Jailani

Beberapa hari pascakongres, struktur PB HMI kembali berubah, karena ada usulan agar jabatan penulis I diganti dengan Ushuluddin Hutagalung, dan jabatan penulis II yang masih kosong dipegang oleh Lafran Pane (*lihat struktur*). Lafran menunjukkan kebesaran jiwanya, meski ia yang mendirikan HMI, namun ia ikhlas jabatannya lebih rendah dari kawan lain yang baru bergabung.

Bagi Lafran, asalkan untuk kebaikan HMI, Lafran bersedia digeser dari Penulis I menjadi Penulis II. Selain itu, penulis ditambah satu orang lagi, yakni Saudari Tedjaningsih, berikut susunan PB HMI setelah itu: Ketua: M.S. Mintaredja, SH (mantan Mensos RI dan mantan Ketua Umum PPP), Wakil Ketua: Letjen Ahmad Tirtosudiro (mantan Menteri Koperasi Kabinet Dwikora, mantan Kepala BULOG, mantan Dubes Indonesia di Jerman), Penulis I: Ushuluddin Hutagalung, Penulis II: Lafran Pane (mantan Dekan FKIS IKIP Yogyakarta), Bendahara I: Ir. M. Sanusi (mantan Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat Kabinet Ampera, mantan Ketua PP Muhammadiyah Majelis Ekonomi dan anggota DPR/MPR Fraksi PPP), Bendahara II: Suasti Notoyudo, Anggota: Amin

Syakhri (mantan anggota DPRGR DIY, salah seorang pendiri PII dan mantan Ketua Wilayah Muhammadiyah DIY), Anton Timur Jailani (mantan Inspektur Jenderal DEPAG dan salah seorang pendiri PII), Tedjaningsih (istri Anton Timur Jailani), Siti Baroroh (mantan Ketua PP Aisyiah 1974–1977, mantan Dekan Fakultas Sastra UGM), Usep Ranuwiharja (Sekjen DPP PNI Osa-Usep, mantan anggota DPR/MPR dan Dubes RI di Hanoi).⁹²

Selanjutnya, pada 19 Desember 1948 (masa Perang Kolonial ke-2), Kota Yogyakarta berhasil diduduki Belanda, PB HMI terpecah. Ahmad Tirtosudiro dan M. Sanusi terlibat di medan pertempuran, sedang M.S. Mintaredja dan Ushuluddin Hutagalung meninggalkan Yogyakarta. Untuk menghindari kevakuman, Lafran mengambil inisiatif, maka terbentuklah susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua Umum: Lafran Pane, Sekjen: Dahlan Ranuwiharja.

Pada masa itu, terlihat bahwa apa yang dilakukan Lafran sangat tepat, karena setelah pengakuan kedaulatan rakyat tanggal 27 Desember 1949, tinggal HMI yang masih berjalan di antara semua organisasi mahasiswa meski hanya dijalankan oleh dua orang yakni Lafran dan Dahlan Ranuwiharja, sehingga pimpinan PPMI ditentukan oleh HMI. Dahlan kemudian menjadi Ketua PPMI (1950) di samping tetap sebagai Sekjen HMI.

Ahmad Tirtosudiro melanjutkan kariernya di bidang militer dan berada di KMKB (Komando Militer Kota Besar) Bandung. Tujimah, Tedjaningsih, Siti Baroroh, Janamarajam berada di Jakarta. Sementara itu, dalam tubuh PB HMI terjadi ketegangan ketika Sartono, SH ditunjuk menjadi formatur kabinet. Menurut Lafran Pane, PPMI harus tetap segaris dengan HMI yakni independen, tetapi menurut Dahlan tidak harus selalu demikian. Di sinilah letak perbedaan antara Lafran Pane dan Dahlan Ranuwiharja.

Presiden Soekarno menunjuk Sartono, SH menjadi formatur

kabinet setelah jatuhnya Kabinet Natsir pada 20 Maret 1951. HMI tidak mendukung formatur ini, namun PPMI mengirim Dahlan menghadap Presiden di Jakarta mendukung Sartono, SH. Namun kemudian Sartono juga gagal dalam membentuk kabinet. Akhirnya, Dr. Sukiman (Masyumi) dan Sidik Juyo Sukarto (PNI) ditunjuk sebagai formatur kabinet. Kabinet Sukiman terbentuk 26 April 1951. Pengaruh PNI mulai tertanam dalam pemerintahan. Di sinilah letak perbedaan antara Lafran Pane dan Dahlan Ranuwiharja. Selanjutnya, mengikuti perkembangan saat itu, PB HMI pindah ke Jakarta pada Juni 1951. Perpindahan ini sekaligus dengan melakukan *reshuffle* kepengurusan, sebagai berikut:

Ketua	: Lukman E. Hakim
Wakil Ketua	: Ushuluddin Hutagalung
Sekjen	: Mutiar
Sekret Bag. Luar Negeri	: Ja'far Bin Thalib
Sekret Bag. Publikasi	: Syahbuddin Arifin
Bendahara	: A.S. Broto
Pembantu	: Lafran Pane
	M.S. Mintaredja
	Dahlan Ranuwiharja
	Asmin Nasution

Bagi Lafran Pane, mendirikan HMI bukan sekadar hobi, yang bisa diurus sambil lalu. Menggali dan membangun fondasi bukan hal gampang, sebab jika kurang dalam pasti bangunan akan goyah. Hal ini disadari betul oleh Lafran dan kawan-kawan.

HMI sebagai salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia dan umat Islam harus dibina, dikembangkan dengan ke-sungguhan serta terencana. Karena itu, pada awal berdirinya, dilakukan pembinaan terus-menerus, agar kehidupannya bisa tegak dan kokoh, untuk memperjuangkan cita-cita luhur, yang

melatarbelakangi berdirinya. Maka, pembinaan pengurus menjadi fokus utama saat itu.⁹³

Karenanya, bagi Lafran Pane sebagai Ketua HMI menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam tugas tersebut. Namun demikian, selain sebagai pimpinan di HMI, Lafran juga aktif dalam organisasi mahasiswa intra-kampus, yakni sebagai Ketua III Senat Mahasiswa STI, Pengurus PMY, di samping itu Lafran Pane juga masih bekerja sebagai pegawai negeri Kementerian Sosial RI sehingga harus masuk kantor setiap hari. Maka, atas dasar permintaan Lafran Pane sendiri, dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. D/135/P tanggal 30 April 1947, Lafran Pane diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri Kementerian Sosial. Saat itu, Lafran Pane sudah menjabat sebagai pegawai menengah tingkat II.⁹⁴

Sehingga dengan demikian, Lafran Pane lebih mempunyai banyak waktu mengurus, membina dan mengembangkan HMI. Dalam suka-duka tersebut, ia tetap konsisten dalam mengikuti perkembangan HMI dengan mendatangi berbagai kegiatan, baik diundang maupun tidak. Jika ia dalam keadaan sehat di berbagai acara HMI, biasanya Lafran Pane selalu hadir lebih awal dari yang lainnya.⁹⁵

Ketika HMI hendak dibubarkan oleh PKI dan CGMI, Lafran Pane kena imbasnya. Rumahnya semasa masih di Sidomulyo, Jetis, dicoret-coret oleh CGMI dan Pemuda Rakyat, dengan kata-kata penuh hasutan dan fitnah. Lafran Pane juga diusulkan diberhentikan dari IKIP Yogyakarta, karena Lafran Pane adalah pemrakarsa HMI.

Berdasarkan banyak fakta sejarah tersebut, pada peringatan Dies Natalis Ke-51 HMI tahun 1998, tanggal 22 Februari 1998, Pengurus Besar HMI telah menganugerahkan Piagam Pengabdian kepada almarhum Lafran Pane, sebagai penghargaan atas perjuangan dan pengabdian yang besar bagi eksistensi HMI.⁹⁶

MENDIRIKAN PERSAMI

Selain sebagai tokoh utama pendiri HMI, Lafran juga berperan aktif dalam mendirikan perhimpunan inteligensia lainnya. Saat Ikatan Sarjana Muslimin Indonesia (ISMI) didirikan oleh rekan-rekan seperjuangannya seperti Ir. H.M. Sanusi di Jakarta tanggal 11 Februari 1963, Lafran menjadi anggota, dan mensponsori pembentukan Persami (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia) Cabang Yogyakarta, hingga ISMI (Ikatan Sarjana Muslim Indonesia) melebur ke dalam Persami tahun 1964. Organisasi ini sebagaimana HMI juga bersifat independen.⁹⁷

Persami dibentuk oleh sekitar 100 sarjana Muslim dari berbagai latar belakang organisasi yang lebih dari separuhnya adalah mantan aktivis HMI. Organisasi ini bertujuan menjembatani jurang pemisah antara inteligensia tradisional dan modernis.⁹⁸ Sebelum Persami, sudah ada Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI, berdiri tahun 1958), Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI, berdiri tahun 1963), Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI) yang berhaluan Nasionalis, Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang berhaluan Komunis serta Organisasi Tjendekiawan Indonesia (OTI) yang juga berhaluan Komunis. Tiga organisasi terakhir tersebut didirikan pada bagian pertama tahun 1960-an.⁹⁹

Di tahun-tahun terakhir rezim Soekarno, Persami memainkan peran yang signifikan dalam pergerakan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia). Lafran Pane menjadi salah seorang dari 5 orang Pimpinan Pusat KASI di seluruh Indonesia, sebagai hasil dari MUBES (Musyawarah Besar) KASI di Bandung tahun 1966. Beberapa figur Persami, seperti Bintoro Tjokroamidjoyo,¹⁰⁰ kelak menjadi pelopor proyek Islamisasi birokrasi pada masa Orde Baru.¹⁰¹

Persami pecah pada 1968. Para intelektual Muslim khususnya dari kalangan tradisional mendirikan perhimpunannya sendiri yakni ISII (Ikatan Sarjana Islam Indonesia) di bawah kepemimpinan Subhan Z.E.,¹⁰² seorang alumni HMI. Namun,

setelah Subhan Z.E. wafat pada 1970, ISII lenyap dengan cepat dari ruang publik. Sementara itu, Persami masih terus eksis hingga beberapa tahun kemudian, dengan jumlah anggotanya pada 1974 sekitar 400 orang.¹⁰³

PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Saat Jepang menggantikan peran Belanda, bersama-sama pemuda lainnya, Lafran Pane termasuk dalam golongan pemuda binaan Kaigun (*Angkatan Laut Jepang*). Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, pemuda-pemuda dan mahasiswa Indonesia termasuk Lafran Pane mengikrarkan:

Tidak mau menerima kemerdekaan Indonesia dari Jepang seperti apa yang dipersiapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).¹⁰⁴

Ikrar itu dicetuskan di Jalan Menteng Raya 31 Jakarta (sekarang bernama Gedung Juang). Saat itu aktivitas politik mahasiswa dan pemuda tidak bebas dilakukan terbuka. Karena kondisi yang sangat represif, mahasiswa memilih berdiskusi di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah kemerdekaan adalah, Asrama Menteng Raya, Asrama Kebon Sirih, dan Asrama Cikini. Mereka inilah kemudian menjadi pemuda generasi 45 yang bangkit merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan cara-cara *khas* pemuda.¹⁰⁵

Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan dari Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta ke seluruh dunia oleh Soekarno-Hatta, sesuai dengan ikrar para pemuda di atas.¹⁰⁶

Kepala Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan/Keamanan Brigjen Nugroho Notosusanto mengatakan,¹⁰⁷ kelompok-kelompok yang memegang peranan penting dalam proklamasi 17 Agustus 1945 ada 4 kelompok yaitu: *Pertama*, kelompok tua yang sudah mempunyai riwayat perjuangan sejak

zaman Belanda. *Kedua*, kelompok mahasiswa/pelajar. Tidak semuanya tinggal di Asrama Mahasiswa Kedokteran Jalan Prapatan 10 (sekarang Departemen Kesehatan) dan Asrama Jalan Cikini 71 (sekarang toko barang-barang seni) yang juga menjadi markas BAPERPI (Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia).¹⁰⁸

Ketiga, kelompok Pengusir Tentara Asing (PETA). Meskipun tidak semua anggota PETA masuk dalam kelompok ini. Pemuda Singih yang menculik Bung Karno, Bung Hatta, adalah Shodanco (Komandan Peleton) PETA dari Batalyon (Daidan) Jakarta. *Keempat*, kelompok campur aduk yang bermarkas di Menteng Raya 31. Menurut Nugroho Notosusanto, Menteng Raya 31 baru menonjol setelah terbentuknya “komite van aksi” sesudah proklamasi. Tujuan komite ini adalah meng-himpun unsur-unsur kaum muda. Pimpinannya terdiri dari: Sukarni, N. Nitimihardjo, Adam Malik, Chaerul Saleh, Wikana, Pandu Wiguna, Kusnaeni, Darwis, Johar Nur, Armunanto dan Hanafi.

Jika dihubungkan dengan apa yang dilakukan dan yang diperbuat Lafran Pane beserta pemuda lainnya sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdasarkan keterangan Brigjen Nugroho Notosusanto di atas, maka Lafran Pane termasuk dalam kelompok keempat, sebagai kelompok yang memegang peranan penting dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, cukup tepat Prof. Dr. Lafran Pane dimasukkan sebagai salah seorang pemicu Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana untuk itu beliau diundang pada pertemuan ke-2 pemrakarsa proklamasi, bertempat di Pengangsaan Timur 56 Jakarta, pada Kamis 13 Agustus 1970.¹⁰⁹

KARAKTERISTIK LAFRAN PANE

Teguh Memegang Prinsip

Lafran Pane perawakannya tidak tinggi, badan gemuk, kulit

sawo matang, suka bermain tenis, dulu ia mahir dalam olahraga boxer. Semangat belajarnya sangat tinggi, Lafran betah berlama-lama membaca buku. Belajarnya tidak pernah lebih dari jam 9 malam, kecuali akan maju pada ujian doktoral pernah ia belajar hingga jam 10 malam. Sudah menjadi kebiasaannya setelah jam 9 malam tidur.¹¹⁰

Menurut Prof. Dr. Abdul Gafur,¹¹¹ Lafran Pane adalah dosen dengan ingatan yang sangat kuat terhadap mahasiswanya, ia hafal nama, asal dan kepribadian mahasiswa-mahasiswanya,¹¹² hal ini juga disampaikan oleh Ekram Prawiroputro M.Pd.¹¹³

Sementara Prof. Dr. Suyata mengatakan: “Lafran Pane itu orang yang teguh memegang prinsip hingga akhir hayatnya dan cukup teguh memegang pendiriannya, beliau bukanlah orang yang suka melakukan hal-hal yang menyimpang, melihat konteks ini Lafran Pane juga sama dengan yuniornya Deliar Noer, terbiasa hidup dalam tekanan karena prinsip-prinsipnya.”¹¹⁴

Satu hal yang paling menonjol dari Lafran Pane adalah sikap rendah hatinya. Lafran tidak butuh pengakuan publik akan dirinya, dia juga tidak pernah mau ditokohkan dan memegang teguh prinsip kesetaraan (egaliter). Pada 1985, saat Lukman Hakiem¹¹⁵ menawarkan untuk menuliskan biografinya, Lafran Pane dengan halus menolak keinginan Lukman tersebut.¹¹⁶

Lukman Hakiem juga menjelaskan bahwa Lafran tidak mau menyanggah ketika dalam suatu forum resmi di Yogyakarta, Mintaredja mengakui dirinya sebagai pendiri HMI, Lafran Pane juga pernah ditawari untuk menjadi rektor oleh sebuah IKIP di luar Jawa, dalam surat dari para calon rektor termaktub:¹¹⁷ “Kalau Pak Lafran bersedia, kami semua akan mengundurkan diri dan mendukung Bapak.”¹¹⁸ Namun, Lafran menolak permintaan itu melalui surat balasan. Lukman Hakiem dalam artikelnya juga menjelaskan mengenai keteguhan pendirian Lafran Pane saat dihadapkan pada kepentingan

pribadinya.

Bahkan, menurut Lukman, ketika pihak Universitas Islam Indonesia berencana membangun kampus terpadu UII di Jalan Kaliurang, Yogyakarta¹¹⁹ anggota Badan Wakaf UII, Drs. Syaifulloh Mahyuddin, MA,¹²⁰ bersama anggota lainnya sepakat untuk menggadaikan kampus UII di Jalan Cik Dik Tiro, Yogyakarta, sebagai modal awal (sekarang depan Gramedia Yogya). Pak Lafran yang juga anggota Badan Wakaf UII tidak tanda tangan. Menurutnya, tanah tersebut dari sejarahnya adalah milik umat, jadi tidak boleh digadaikan, apalagi tidak ada jaminan UII akan sanggup membayar kembali.

Namun sayang, Lukman juga tidak mengetahui jelasnya kelanjutan peristiwa tersebut. Dari sejarahnya, UII adalah kampus yang berdiri jauh sebelum berdirinya IAIN, STAIN maupun UIN saat ini. Sebagai kampus swasta, UII bukanlah kampus milik Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, dan lain-lain, melainkan kampus umat dan kampus bangsa yang didirikan oleh segenap tokoh pendiri Republik saat itu.¹²¹

Sabar

Sekitar tahun 1974, kampus IKIP Yogyakarta, tempat Lafran Pane mengabdikan bergolak. Karena hampir semua aktivis mahasiswa adalah anggota HMI, Lafran pun dituduh selaku dalang pergolakan. Lafran dinon-aktifkan dari segala tugas di fakultasnya, meskipun sampai diminta pensiun gaji dan tunjangan guru besarnya tetap dibayar penuh.¹²² Namun, ketika terjadi pergantian Rektor IKIP Yogyakarta, Lafran masih juga menerima perlakuan yang tidak baik. Tunjangan jabatan yang diterimanya selama masa non-aktif harus dikembalikan. Caranya, dengan memotong uang pensiunannya setiap bulan. Lukman menjelaskan posisinya dan sikap Lafran Pane saat itu:

Saya dan teman-teman yang mendengar kabar itu tentu saja ikut terpancing emosi, sebagai Ketua Koordinator Komisariat (Korkom) IKIP Yogyakarta, saya menawarkan untuk memrotos ketidakadilan itu, “Untuk apa?” ujar Lafran

Pane menolak. Dengan hidup begini saja saya sudah bahagia. Lagi pula, nanti HMI yang terkena akibatnya.¹²³

Mantan Asisten Lafran Pane yang masih hidup yakni Ekram Prawiroputro, M.Pd menceritakan kepada penulis:

Saat itu, mahasiswa berdemonstrasi menuntut Rektor Prof. Dr. Sutrisno Hadi mengundurkan diri, Lafran dituding berada di balik aksi besar-besaran tersebut karena memang mayoritas mahasiswa saat itu adalah anggota HMI, Ekram menjelaskan saat dia ke Jakarta menghadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarief Thayyib yang berkantor di Jalan Cilacap, Jakarta. Ekram melihat di papan agenda kegiatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertulis rencana pemanggilan Lafran Pane. Lafran Pane dipanggil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan diberikan peringatan atas aksi demonstrasi yang berlangsung. Lafran akhirnya dipindahkan ke almamaternya Universitas Islam Indonesia (UII).¹²⁴

Mengayomi Yunior

Selanjutnya, di tengah memanasnya suasana soal asas tunggal Pancasila pada Kongres XV HMI di Medan, 1983, Lafran mengatakan: “HMI itu pertama-pertama Nasionalis.”¹²⁵ Pendapat itu dianggap berat sebelah. Kemudian, muncullah anggapan bahwa Lafran Pane telah dibayar oleh Pemerintah untuk pendapatnya itu. Dalam pidato penutupan Kongres, Lafran Pane membantah isu tersebut. Lukman Hakiem menegaskan:

Saya memang tidak selalu sependapat dengan Lafran Pane dalam berbagai hal, namun sebagai aktivis HMI yang satu universitas, satu fakultas, dan hidup bertetangga dengan Pak Lafran, saya bersaksi bahwa Lafran Pane tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemrakarsa berdirinya HMI untuk kepentingan pribadi, walaupun alumni HMI sudah amat banyak yang duduk di posisi strategis di jajaran pemerintahan. Saya juga berani menegaskan, bahwa segala pikiran dan gagasan Lafran Pane, entah itu menguntungkan Pemerintah atau tidak, murni keluar dari hati nurani dan akal sehatnya.¹²⁶

Posisi Lukman Hakiem hingga hari ini memang terbilang unik, ia dikenal memiliki empati dan perhatian seimbang pada HMI MPO dan HMI Dipo, khususnya di Yogyakarta. Lukman juga terus mendorong agar keduanya bergabung bukan sekadar islah. Kebetulan penulis pernah ikut dalam pertemuan menggagas persatuan HMI di Yogyakarta yang dihadiri beliau. Dalam Sidang MPR tahun 1999, Lukman juga tercatat sebagai salah satu anggota DPR yang mendukung pencabutan asas tunggal.

Mengenai asas tunggal ini, Sulastomo juga menjelaskan:

Pada waktu itu, beberapa teman KAHMI sudah sampai pada kesimpulan bahwa persoalan asas tunggal sudah semakin alot. Mas Lafran dengan wawasan kebangsaannya justru bersikap tidak banyak bicara. Mas Lafran lebih bersikap banyak mendengar dan sesekali berbicara. Namun saya yakin, Mas Lafran dapat memahami langkah-langkah teman-teman KAHMI untuk memrakarsai mempercepat proses penerimaan Pancasila. Sikap Mas Lafran yang mahal itu juga memberi manfaat bahwa Mas Lafran menjadi pusat semua orang menyampaikan keluhannya.

Namun di pihak lain, ia pun mengikuti proses penerimaan asas Pancasila itu dengan ikhlas. Demikianlah, ketika KAHMI mengadakan pertemuan khusus mengenai asas Pancasila, Mas Lafran tidak saja hadir dengan tekun, tetapi juga bersifat “ngemong” adik-adiknya yang kadang bertemperamen panas. Sikapnya justru memberi dampak positif, sehingga proses itu berjalan mulus, tidak sampai terjadi perpecahan. Mas Lafran tidak saja tokoh pendiri HMI, tetapi juga pemersatu di antara anggota KAHMI dan HMI. Wawasan kebangsaan dan napas Islam yang dipantulkan dari kehidupan sehari-harinya, semoga saja semua itu memberi inspirasi perjuangan bagi HMI, alumni HMI dan KAHMI. Di sanalah sebenarnya makna khusus dari sifat HMI.¹²⁷

Tidak Silau terhadap Jabatan/Kekuasaan

Sedangkan mengenai kebersahajaan Lafran Pane, dijelaskan oleh Sulastomo dalam tulisannya yang didedikasikan untuk Lafran Pane, Mahmud Yunus dan Soleh Widodo, Sulastomo menceritakan:

Suatu sore, di kantor koran *Pelita*, saya berbincang-bincang dengan Menpora Akbar Tandjung¹²⁸, yang waktu itu menjabat Pemimpin Redaksi Pelita. Seperti biasa, perbincangan seperti itu berwarna-warni, sampai akhirnya tiba pada kemungkinan penyusunan anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Siapa di antara putra terbaik bangsa ini yang pantas diusulkan untuk menjadi anggota DPA? Di antara nama-nama yang keluar, kami berdua sepakat, bahwa Mas Lafran layak untuk menerima tugas itu. Beliau kami anggap cukup senior, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak, serta berwawasan luas. Keanggotaannya dalam DPA Insya Allah dapat memberi manfaat yang banyak bagi lembaga tersebut.¹²⁹

Demikianlah, proses itu berjalan, akhirnya Mas Lafran Pane mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk memangku tugas itu. Akbar Tandjung menceritakan, pada saat syukuran di rumahnya, bahwa proses pengangkatan Mas Lafran juga ada uniknya. Sebelum diangkat, sudah tentu dimintakan riwayat hidup serta perjuangan Mas Lafran. Misalnya, ditanyakan apakah Mas Lafran anggota Golkar? Ternyata tidak, tetapi toh tidak ada masalah. Akhirnya, Mas Lafran mendapatkan kepercayaan untuk memegang tugas itu.

Setelah bertugas sebagai anggota DPA, Mas Lafran juga menampilkan “keluguannya”, masih di kediaman Menpora Akbar Tandjung pada saat syukuran itu, Mas Lafran menceritakan honorarium yang diterimanya ia rasakan terlalu tinggi. “Buat apa uang sebesar itu?” kata Lafran Pane. Mendengar ungkapan Mas Lafran itu, ibu-ibu KAHMI (Korps Alumni HMI) berbisik, “kasihkan *gue* biar habis di Pasar Baru,” kata seorang ibu.

Sampai pada hari-hari terakhir Mas Lafran sebagai dosen IKIP Yogyakarta, ia masih setia dengan sepeda menjalankan tugas sehari-harinya, sedangkan selama di Jakarta, apabila Mas Lafran menghadiri sidang-sidang DPA, ia pun bermalam di hotel yang sederhana, bukan hotel berbintang.¹³⁰

Dalam versi lain diceritakan, atas usaha dan prakarsa Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum PB HMI 1971–1974 dan Wakil Sekretaris DPP Golkar, Lafran Pane diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1990. Ketika akan dilantik, Lafran Pane harus datang ke Jakarta. Kepadanya dipesankan oleh Akbar Tandjung agar Lafran Pane menginap di hotel berbintang guna memudahkan komunikasi. Akan tetapi, Lafran Pane memilih menginap di tempat yang biasa dipakainya jika datang ke Jakarta, yaitu di Penginapan

Perjalanan Haji Indonesia (PHI) di kawasan Kwitang dekat Stasiun Gambir.

Kemudian, kepada Lafran Pane diminta datang ke suatu perusahaan tukang jahit yang telah ditentukan untuk dibuatkan setelan jas yang akan dipakai pada pelantikan. Lafran Pane berkomentar, untuk apa jas baru bagi saya? Saya membawa jas dari Yogyakarta, ini saja sudah cukup. Lafran Pane tetap tidak mau dibuatkan jas baru, walaupun Lafran Pane berhak untuk itu. Akan tetapi, Lafran Pane punya sikap sendiri. Sangat mengagumkan. Lantas Akbar Tandjung memberi tahu bahwa Sidang I DPA nanti, Bapak, ujar Akbar Tandjung, akan memperoleh uang sidang sebesar satu juta rupiah dan uang-uang lainnya. Apa komentar Lafran Pane? Untuk apa uang begitu banyak bagi saya? Akbar Tandjung berhasil meyakinkan Lafran Pane bahwa uang itu adalah uang sidang biasa sebagai anggota DPA. Dan akhirnya Lafran Pane bersedia menerima uang itu.¹³¹

Lukman Hakiem juga menceritakan pengalamannya:

“Pernah suatu ketika, saat selesai Shalat Jumat, Lafran Pane mengajak saya untuk ngobrol di teras masjid. Dia meminta saya tentang kemungkinannya menjadi anggota DPR/MPR. ‘Ada alumni yang menawarkan jabatan itu kepada saya, menurut kau bagaimana?’ Saya kaget, pendiri HMI kok ‘konsultasi’ kepada anak ingusan macam saya. Tetapi saya jawab juga, ‘Menurut saya, lebih baik tawaran itu ditolak saja, Pak. Di fraksi mana pun Bapak didudukkan, mau tidak mau, Bapak akan berhadapan dengan alumni HMI yang duduk di fraksi lain. Masak harus berhadapan dengan kader sendiri.’ Pak Lafran tersenyum manggut-manggut. Benar saja, tawaran tersebut ditolak oleh Lafran Pane.”¹³²

Sederhana dan Bersahaja

Sekitar tahun 1983, alumni-alumni HMI Cabang Yogyakarta yang ada di Jakarta seperti Beddu Amang, Fathi Siregar, Yusuf Syakir, Ahmad Arif, dan lain-lain, bermaksud akan memberi penghargaan kepada Lafran Pane berupa sebuah rumah dilengkapi fasilitas-fasilitas lain seperti telepon dan mobil. Seperti diketahui, sampai saat itu, Lafran Pane belum punya

rumah apalagi kendaraan. Rumah yang ditempatinya di Jalan Mrican 1 E Yogyakarta adalah milik instansi IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) tanpa ada fasilitas telepon, dan sebuah garasi mobil tanpa isi.

Melihat kondisi itu, sebagai rasa hormat dan penghargaan kepada senior mereka, pemrakarsa berdirinya HMI, tanpa tendensi tertentu, mereka bermaksud akan memberikan sebuah rumah lengkap dengan perabotannya dan sebuah mobil. Untuk menyampaikan maksud baik itu, mereka meminta Agussalim Sitompul menyampaikan hal itu kepada Lafran Pane. Amanat itu pun dia laksanakan. Agussalim Sitompul mengatakan antara lain:

Dengan rasa hormat, alumni-alumni HMI Cabang Yogyakarta di Jakarta bermaksud akan memberikan sebuah rumah lengkap dengan perabotannya dan sebuah mobil kepada Bapak. Penghargaan ini mereka berikan karena rasa sayang mereka kepada Bapak dan keluarga.

Mereka mengharap agar Bapak bersedia menerimanya dengan senang hati. Selesai saya mengutarakan hal itu, Bapak Lafran Pane menjawab dengan nada yang agak keras, kalau tidak boleh dikatakan marah, dan mengatakan: "Jangan menghina saya ya, saya tidak butuh itu semua. Walaupun pola hidup saya seperti ini, bukan berarti saya tidak sanggup membuat rumah, membeli mobil dan lain-lain. Berikan saja itu kepada yang membutuhkan. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian itu." Sekali lagi saya berusaha untuk meyakinkan Lafran Pane agar bersedia menerima penghargaan dan penghormatan itu. Akan tetapi, beliau tetap teguh dalam pendiriannya, tidak bersedia menerimanya. Kemudian, hal itu saya laporkan kepada Beddu Amang dan Yusuf Syakir di Jakarta. Dengan rasa kaget, disertai rasa hormat dan kagum, mereka menerima dan memahami sikap Lafran Pane yang terpuji dan sangat tawadhu' itu.

Satu kejadian lagi, menurut penuturan Manimbang Karyadi, mantan Wakil Sekjen PB HMI, setiap kali Lafran Pane diundang PB HMI ke Jakarta, senantiasa diberikan ongkos kereta api pulang-pergi. Akan tetapi, apabila uang pembelian karcis kereta api itu lebih, kelebihan itu selalu ia kembalikan lagi kepada PB HMI. Walaupun PB HMI tidak mau menerimanya, Lafran

Pane tetap bersikeras mengembalikan kelebihan uang itu.¹³³

Independen

Lafran Pane pernah ditawarkan untuk duduk sebagai pimpinan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal yang sama pernah ditawarkan Golkar, baik sebagai pengurus maupun mewakili Golkar di lembaga legislatif. Tawaran serupa pernah juga disampaikan Pengurus Besar Al Jamiatul Wasliyah agar Lafran Pane bersedia menjadi Ketua Umum Al Jamiatul Wasliyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, semua jabatan itu ditolak Lafran Pane. Menurut dia: “Kalau saya masuk salah satu partai atau organisasi, saya sebagai pemrakarsa berdirinya HMI nanti akan timbul anggapan bahwa HMI tidak independen lagi.”

Oleh karena itu, agar sifat independensi HMI yang berhasil ditanamkan hingga saat ini dapat dipertahankan, maka semua jabatan itu ditolak Lafran Pane, walaupun dari segi materi sangat menjanjikan. Begitu pula tatkala proses pengajuan Lafran Pane sebagai anggota DPA, dia diminta untuk mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Golkar untuk mendapatkan NPAG. Drs. Mahadi Sinambela, Ir. H. Senopati dan Drs. Syarif Husein Basnan (ketiganya mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta), yang ditugaskan Akbar Tandjung untuk mengurus hal itu, ternyata gagal meyakinkan Lafran Pane agar bersedia menjadi anggota Golkar sebagai syarat untuk menjadi anggota DPA.

Karena nanti, setelah Lafran Pane resmi menjadi anggota DPA, akan dimasukkan dalam fraksi Golkar. Lafran Pane bersedia menjadi anggota DPA, atas usaha yang dilakukan Akbar Tandjung dan teman-teman, akan tetapi tidak bersedia untuk menjadi anggota Golkar. Lafran Pane tetap ingin independen, dan tidak bersedia menjadi anggota DPA, apabila disyaratkan menjadi anggota Golkar. Akhirnya, Lafran Pane diangkat menjadi anggota DPA tahun 1990 tanpa harus masuk Golkar. Di gedung DPA, Lafran Pane tidak masuk fraksi mana pun. Papan nama Lafran Pane di DPA bertuliskan: **Lafran**

Pane—alumni HMI.¹³⁴ **Nyaman di Yogyakarta**

Banyak tawaran jabatan yang ditawarkan kepada Lafran Pane, di antaranya sebagai Rektor IKIP Medan (sekarang Unimed), Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan, Rektor Universitas Lampung (Unila) di Lampung dan beberapa jabatan lainnya. Semua tawaran itu ditolak Lafran Pane. Kalau Lafran Pane bersedia, konsekuensinya Lafran Pane dan keluarga terpaksa harus meninggalkan Kota Yogyakarta yang telah ditinggalinya sejak tahun 1945. Lafran Pane tetap berkeinginan sampai akhir hayat kecuali Allah Swt berkehendak lain untuk tetap tinggal di Yogyakarta, tempat ia mendirikan HMI, 5 Februari 1947. Lafran Pane hanya pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan II FKIS IKIP Yogyakarta, pada awal berdirinya institut itu. Namun demikian, Lafran juga tidak melupakan daerah asalnya, sehingga Lafran tercatat sebagai salah seorang pendiri Kekeluargaan Tapanuli Siala Sampagul (KTSS) Yogyakarta, tanggal 14 Juli 1953.¹³⁵

KISAH-KISAH SEPUTAR LAFRAN

PANE Sepeda Seorang Profesor

Lafran Pane dan keluarga hidup dalam kesederhanaan. Berkali-kali pindah menyewa rumah, dan terakhir tinggal di Kompleks IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) Jalan Mrican 1 E, Yogyakarta. Perabotan rumah cukup dan dalam kesederhanaan, tidak terbilang banyak, apalagi mewah. Rumah pribadi, kendaraan pribadi, telepon tidak punya. Kalau Lafran Pane ke kampus memberi kuliah atau ke tempat lain selalu memakai sepeda *onthel*. Kisah ini banyak penulis dengar saat riset di Universitas Negeri Yogyakarta.

Suatu waktu, sepeda Lafran Pane dicuri atau diamankan oleh mahasiswanya sendiri di IKIP Yogyakarta, dengan maksud agar Lafran Pane tidak naik sepeda lagi ke kampus. Akan tetapi, Lafran Pane mengganti sepeda yang hilang itu dengan

membeli yang baru. Mahasiswa yang mengambil sepeda itu memberi tahu kepada Lafran Pane bahwa dialah yang mengambil sepeda itu dengan maksud agar Lafran Pane tidak naik sepeda ke kampus.

Lafran tidak marah, ia malah memberikan sepeda itu kepada mahasiswa tersebut, dan Lafran Pane tetap naik sepeda yang baru ia beli ke mana pun pergi. Begitu juga dalam bersikap, berbuat, dan bertindak, Lafran Pane selalu menunjukkan kesederhanaan, tidak mau menonjolkan diri. Dalam ke-sederhanaan itu, Lafran Pane dan Ibu lebih mementingkan kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Biar tidak punya apa-apa, asal anak-anaknya sehat, pintar, tidak pernah tinggal kelas dan lancar studinya. Karena kalau tinggal kelas, biaya sekolah bertambah lagi. Dokter Toga Fahrudin Pane (alm.), Ir. M. Iqbal Pane, Dra. Teti Rahmiati Pane, ketiganya sukses dalam studi, lulus tepat waktu dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan profesinya.¹³⁶

Lafran Pane (Cerita dari Syafi'i Ma'arif)

Mengenai ketegasan Lafran Pane, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif¹³⁷ menuliskan dalam otobiografinya:

Bukankah aku sudah punya ijazah negeri tingkat sarjana muda melalui ujian negara? Sekalipun sudah lengkap dengan ijazah negeri, pada mulanya cukup sulit bagiku untuk mendaftarkan diri pada FKIS-IKIP Yogyakarta Jurusan Pendidikan Sejarah. Drs. Lafran Pane, pendiri HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) pada 5 Februari 1947, adalah Pembantu Dekan I pada fakultas yang akan kumasuki itu tidak mudah menerimaku, entah apa sebabnya?

Berbagai upaya telah kulakukan agar bisa meneruskan kuliah. Maka, bantuan Drs. Wuryanto, Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FKIS (kemudian menjadi profesor dan pernah pula menjadi Rektor IKIP Semarang dan anggota DPR RI) sangat besar untuk memuluskan jalanku memasuki perguruan tinggi ini dengan memberiku surat rekomendasi agar aku diterima. Juga bantuan Komandan Laskar Ampera Padamulia Lubis (alm.) yang mengantarkanku menemui Lafran Pane menguatkan rekomendasi Pak Wuryanto. Jika aku tak salah ingat, Drs. M. Sanusi Latief yang pada saat itu sudah menjadi dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menulis surat kepada Lafran Pane agar

aku dapat diterima.¹³⁸

Namun, situasi berbalik ketika **Lafran Pane** benar-benar telah mengetahui keseriusan Syafi'i Ma'arif serta dedikasinya. Dalam otobiografi tersebut, Syafi'i Ma'arif menuliskan:

Berbeda dengan situasi sewaktu akan masuk IKIP Yogyakarta yang menghadapi banyak sekali kendala, justru sekarang Pak Lafran yang mengusulkanku untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Sejak itu, hubunganku dengan Pak Lafran ibarat hubungan bapak-anak, baik sekali, sampai ia wafat beberapa tahun setelah dikukuhkan menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara pada FKIS-IKIP Yogyakarta. Dengan kenyataan ini, Pak Lafran Pane juga turut melicinkan kariernku sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Rasa terima kasihku kepadanya sungguh besar, sebab jika sikapnya tetap seperti ketika aku mau meneruskan kuliah di FKIS, tentu akan menjadi tidak jelas pula akan ke mana aku setelah gelar sarjana kuperoleh.

Tampaknya perjalanan hidupku ini tidak pernah linear, selalu berliku-liku. Nasib seseorang ternyata tidak bisa dirancang secara pasti. Pak Lafran yang semula begitu ketus terhadapku, kemudian berubah 180 derajat menjadi bapak dan pembimbingku, apalagi aku adalah anggota H.M.I. sejak dari Solo. Lafran Pane adalah pendiri HMI pada 1947 pada saat Indonesia masih dalam era revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan.¹³⁹

Demikian pula, dalam otobiografi itu, Syafi'i menuliskan bahwa ia pernah aktif di kepanduan Hizbul Wathan (hlm. 113) dan HMI (semasa kuliah di Universitas Cokroaminoto, Solo). Ia tuliskan:

Pengalaman Mu'allimin Yogya ini di kemudian hari ternyata menjadi faktor penting bagiku untuk menjadi Ketua PP Muhammadiyah (1998–2005). Bukankah aku dengan demikian adalah tamatan sekolah kader, sekalipun tidak pernah dilatih (ikut) dalam perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apakah aku masih memerlukan itu semua sebagai syarat sekiranya aku pada suatu ketika naik ke puncak pimpinan dalam Persyarikatan (Muhammadiyah)?¹⁴⁰

Dalam penutup otobiografinya, Syafi'i menuliskan, dalam pergulatan pemikirannya, Indonesia dan Islam telah melebur menjadi satu. Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia

tidak boleh mau menang sendiri. Saudara-saudara sebangsa setanah air tetapi berbeda iman haruslah dilindungi dan diperlakukan secara adil dan proporsional. Adapun kelompok kecil Muslim yang mau menang sendiri tidak paham ajaran Islam yang mengajarkan persaudaraan semesta dengan dasar saling menghormati. Tidak untuk saling menggusur, apalagi saling meniadakan. Pihak minoritas juga harus memahami dengan baik peta sosiologis masyarakat Indonesia yang plural agar gesekan-gesekan di akar rumput dapat diiadakan dengan terus membangun budaya saling pengertian. Planet bumi hanya satu untuk tempat kediaman seluruh makhluk. Umat Islam sepertinya menjadi wasit dalam pergaulan antarperadaban. Sekalipun yang berlaku belakangan mereka malah sering diwasiti karena kualitas di bawah standar.¹⁴¹

Kesimpulan Syafi'i Ma'arif ini jika diteliti akan menemukan sambungannya dengan tulisan Lafran Pane "Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia", yang salah satu intinya mengungkap akan pentingnya suatu ajaran untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jika tidak, ajaran tersebut akan menjadi ajaran kolot. Selain itu, sangat penting bagi siapa saja untuk memahami peta sosiologis Masyarakat Indonesia. Syafi'i menganjurkan untuk menilik kembali pikiran-pikiran Agus Salim (SI) dan Hatta. Sedangkan Lafran Pane, mengenai kualitas umat Islam, membaginya menjadi 4 golongan yang kata Syafi'i Ma'arif disebut di bawah standar, selengkapnya akan dijelaskan pada Bab V dalam buku ini.

Deliar Noer Mengetahui Lafran dan Dahlan Agak Berseberangan

Lafran juga memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Prof. Dr. Deliar Noer menceritakan kiprah Lafran pada masa-masa revolusi kemerdekaan:

Apakah, umpamanya Lafran Pane, yang dalam masa revolusi juga turut dalam pimpinan pusat, mengetahui segala macam perkembangan ini? Kami

di Jakarta tahu bahwa perkembangan itu diikuti juga oleh Lafran, karena ada juga di Jakarta berbicara sesama anggota pimpinan pusat itu.¹⁴²

Deliar Noer, Ketua umum PB HMI tahun 1953–1955, menjelaskan tentang situasi Kongres III HMI (1951–1953):

Lafran Pane hadir juga sebagai orang dari Yogyakarta, walau kehadirannya tidak terus-menerus. Aku segera menangkap kesan bahwa ia kurang serasi dalam berbagai hal dengan Dahlan. Yang akhir ini, umpamanya, menyarankan agar kongres mengambil keputusan untuk mendesak Pemerintah mengadakan kursus atau kuliah bahasa Belanda, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang memang memerlukan pengetahuan bahasa Belanda ini untuk studi sebagai ahli hukum. Hukum Indonesia ketika itu, agaknya juga sampai kini, masih sangat dipengaruhi oleh pengertian-pengertian hukum asal Belanda, malah kitab undang-undangnya masih berbahasa Belanda.”¹⁴³

Lafran menolaknya, dan dengan keras pula. Dua hal ia kemukakan sebagai alasan: perlunya kita berusaha lebih mandiri, dan kedua, karena bahasa Belanda termasuk bahasa yang sulit, dan oleh sebab itu akan menyulitkan para mahasiswa, ia lebih suka agar segala bahasa Belanda di dalam hukum diterjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia dan ini bisa dipercepat, katanya.¹⁴⁴

10 Oktober Kelabu

Peristiwa 10 Oktober 1963 terjadi di kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga) pada saat Rapat Senat Terbuka pembukaan kuliah tahun ajaran baru 1963/1964. Kejadian tersebut bermula saat Senat IAIN memasuki ruangan upacara. Tanpa diduga, Dewan Mahasiswa IAIN telah mengambil alih pimpinan sambil membacakan tuntutan Dewan Mahasiswa IAIN terhadap kebijaksanaan Rektor IAIN Sunan Kalijaga. Kejadian yang kurang sopan tersebut diterima pada Rapat Pleno I PB HMI yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 1963. PB HMI di Jakarta menjatuhkan skorsing keanggotaan.

Karena peristiwa tersebut, Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga dibekukan oleh Rektor Prof. R.H.A. Soenarjo, SH, Penyelesaian berikutnya pada November 1963 dengan

ditandatangani piagam di Jakarta oleh Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta saat itu yaitu Beddu Amang, wakil dari PMII Cabang Yogyakarta, dan Rektor IAIN Sunan Kalijaga.

Piagam itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah. Akibat dibekukannya Dewan Mahasiswa yang dibentuk atas dasar pemilihan, maka dibentuklah kabinet berkaki empat yang terdiri dari HMI, PMII, Mahasiswa Ikatan Dinas dan Mahasiswa Tugas Belajar). Lafran Pane sebagai pengajar di kampus sekaligus sebagai pendiri HMI tahun 1947 tentunya berada dalam posisi dilematis.¹⁴⁵ Namun demikian, tidak ada keterangan Lafran Pane mengintervensi segala proses ini.

Tidak Populer di HMI

Kongres VIII HMI di Surakarta tahun 1966 mendapatkan pengawasan dan penjagaan yang sangat ketat, karena dikhawatirkan ada musuh dalam selimut masuk ke arena kongres yang bisa merusak suasana. Penjagaan dan pengawasan ketat dilakukan kepada siapa saja tanpa pandang bulu yang ingin masuk ke arena kongres tidak boleh masuk tanpa undangan ataupun surat keterangan.

Tersebutlah dalam kisah, Lafran Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI ingin masuk ke arena kongres tanpa membawa undangan maupun surat keterangan. Anak-anak HMI yang menjaga pintu masuk arena kongres, tentunya, adalah anak-anak muda yang sama sekali belum kenal Lafran Pane.

Dengan disiplin yang tinggi, anak-anak HMI yang menjadi bagian keamanan tidak membolehkan Lafran Pane masuk, selain tidak membawa undangan atau surat keterangan, anak-anak HMI tidak mengenal Lafran Pane. Kedua belah pihak sama-sama memegang pendirian, yaitu di satu pihak anak-anak HMI tidak membolehkan masuk ke arena kongres, dan di lain pihak Lafran Pane bersikeras pula masuk ke arena kongres. Lafran Pane mengira di pintu gerbang arena kongres ada anak-anak HMI atau Panitia Pelaksana yang mengenalnya,

yang walaupun tanpa undangan boleh masuk ke arena kongres.

Akan tetapi, dugaan itu meleset. Akhirnya, bagian keamanan kewalahan menghadapi Lafran Pane. Lantas mereka men-datangi

Ketua Umum PB HMI, Drs. Med. Sulastomo, me-nyampai kan kasus itu. Sulastomo menanyakan seperti apa orangnya. Dijawab, orangnya gemuk berperawakan pendek dan berkulit putih.

Sesampai di pintu gerbang, begitu Sulastomo melihat orang yang bersikeras ingin masuk ke arena kongres itu adalah Lafran Pane,

pendiri HMI, Sulastomo sangat kaget disertai rasa haru dan hormat. Kalian tidak mengenal Lafran Pane sebagai pemrakarsa

berdirinya HMI. Kalau Lafran Pane tidak ada, HMI pun tidak ada, dan kongres ini pun dengan sendirinya tidak ada. Anak-anak

HMI dengan rasa hormat lalu minta maaf kepada Lafran Pane atas kejadian itu. Dengan rendah hati pula, Lafran Pane tidak

marah kepada anak-anak HMI itu. Dia maklum, banyak generasi baru masuk HMI yang belum tentu kenal dirinya, sebagai pendiri

HMI. Lafran juga bangga karena banyak anak-anak tidak kenal dia. Kalau yang dikenal hanya Sulastomo, Yusuf Syakir, Firdaus

Wajdi, Mar'ie Muhammad, Nazar E. Nasution, berarti tidak ada pertambahan anggota dalam HMI, ujar Lafran Pane

menanggapi kejadian itu.

Bersama Sulastomo dan diiringi bagian keamanan, Lafran Pane masuk ke arena Kongres HMI dan disambut tepuk tangan yang sangat meriah, sebagai tanda hormat dan kecintaan mereka kepada Lafran Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI. Karena dengan HMI yang didirikan Lafran Pane, ber-sama 14 orang mahasiswa STI, mereka bertemu muka, bertemu pikiran di arena Kongres HMI, membicarakan HMI ke depan.

Peristiwa yang sama terjadi pula pada arena Kongres IX HMI di Malang tahun 1969. Di sini, Lafran Pane merendah dan tidak mau menonjolkan diri sebagai pemrakarsa berdirinya HMI untuk diistimewakan. Anak-anak HMI pun melakukan tugasnya dengan penuh disiplin, karena kalau tidak apalagi

salah melaksanakan tugas dapat membawa akibat fatal terhadap Kongres HMI.¹⁴⁶

Kejadian lainnya adalah kisah di arena Konferensi Cabang Ke-27 HMI Cabang Yogyakarta tahun 1974. Pada saat sidang komisi sebelum sidang pleno, Lafran Pane duduk di belakang agak terpisah di belakang peserta. Selain belum mengenal Lafran Pane, peserta Konferensi menduga sosok yang duduk di belakang tersebut adalah seorang mata-mata. Peserta tidak ada yang menggubris Lafran Pane saat itu, namun Lafran justru menikmati situasi tersebut.

Kemudian, datanglah Baharuddin Aritonang—mantan Ketua Umum HMI Komisariat Farmasi UGM dan Ketua Umum Komisariat Dewan Mahasiswa (KODEMA) Farmasi UGM—yang sudah kenal dengan Lafran Pane. Selesai sidang komisi, Baharuddin Aritonang menanyakan kepada teman-temannya, mengapa mereka tidak menegur Bapak Lafran Pane? Jawab mereka, seperti dugaan mereka di atas, mereka mengira Pak Lafran Pane adalah dari pihak kepolisian, sebagai petugas intel, karena biasanya di zaman itu segala kegiatan HMI maupun organisasi kemahasiswaan lainnya selalu diawasi pihak kepolisian.¹⁴⁷

Lalu, Baharuddin Aritonang¹⁴⁸ menemui Pak Lafran, dan memberitahukan bahwa peserta komisi belum mengenal Bapak Lafran Pane, lantas salah pengertian dengan Pak Lafran, seperti disebut di muka, sehingga peserta komisi tidak ada yang menegur Bapak Lafran.

Namun, atas kejadian itu, Lafran Pane sama sekali dan sedikit pun tidak merasa kecil hati, apalagi jengkel dan marah, lantaran tidak diajak bicara oleh peserta Konfercab, sebagai-mana lazimnya perlakuan terhadap seorang senior dalam budaya organisasi. Sebaliknya, Lafran justru menikmatinya dan merasa bangga, bahwa di antara ratusan ribu anggota HMI banyak yang tidak mengenal dirinya, berarti dengan demikian banyak generasi baru di HMI, yang tiap tahun bertambah terus dan akan menentukan estafet perjuangan HMI dari waktu ke

waktu, sehingga wajarlah jika di antara mereka banyak yang tidak mengenalnya.¹⁴⁹

Salah satu sifat yang menonjol dari Lafran Pane lainnya adalah mempunyai pendirian teguh dan keras hati dalam mencapai dan memperjuangkan suatu cita-cita. Jika Lafran telah berniat untuk memutuskan sesuatu karena Allah semata, maka sekuat tenaga ia akan berusaha agar tercapai cita-citanya itu, walau banyak yang merintang. Sepertinya, Lafran mewarisi corak berorganisasi yang dipraktikkan kakaknya, Sanusi Pane,¹⁵⁰ yaitu menekankan pada pembinaan anggota, kader dan pengurus.

Kata-kata mutiara dari Wera Vinger tentang kemerdekaan yang berbunyi: *“Ragaku dapat dipatahkan, tetapi jiwaku terus menyalakan api kemerdekaan”*, sangat membekas dalam perasaan Lafran Pane. Keteguhan hati dapat kita lihat manifestasinya pada pendirian Lafran Pane saat mendirikan HMI, walaupun banyak mendapatkan rintangan dari berbagai pihak, sekalipun dikatakan sebagai pemecah-belah mahasiswa dan diyakini HMI tidak akan berumur panjang.¹⁵¹

Lafran Pane memang dikenal kurang lancar dalam berbicara, tapi keyakinannya dan keteguhan pendiriannya patut di-teladani. Dia merupakan sosok pribadi yang sedikit berbicara, namun banyak memberikan pendidikan melalui contoh-contoh kepeloporan di lapangan. Berkat sifat itu, akhirnya kehadiran HMI bisa diterima oleh semua pihak, dan kini setelah 63 tahun berselang, HMI masih tetap bisa eksis memberikan pendidikan Keislaman-Kebangsaan bagi anggotanya.¹⁵²

Kesederhanaan Lafran Pane juga tergambar jelas dalam kehidupan sehari-harinya, baik di rumah maupun di luar rumah. Dia tidak suka menonjolkan diri, apalagi jika dikatakan sebagai orang yang paling berjasa dalam mendirikan HMI. Lafran Pane sendiri secara pribadi menyatakan tidak bersedia menulis “SEJARAH HMI”. Menurutnya, hal itu terlalu subyektif dan pribadi sifatnya, sehingga bisa mengurangi

kebesaran HMI. Untuk kepentingan ini pula, ia mengubah tanggal lahirnya menjadi 12 April 1923.¹⁵³

KURANG DIKENAL DI KAMPUNGNYA

Menurut sastrawan asal Sipirok, Budi Hatees, kendati Lafran Pane menyejarah, tetapi di kampung kelahirannya, di Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, nama itu hampir tidak pernah disebutkan dalam berbagai kegiatan. Namun, bukan hanya Lafran Pane, tapi juga semua anggota keluarga besar Sutan Pangurabaan Pane.

Berbeda dengan Budi Hatees, seorang mahasiswa asal Sipirok, Darto Siregar, mengatakan, Lafran dan keluarga besar Sutan Pangurabaan Pane dikenal luas di Sipirok maupun di Sidempuan, bahkan keluarga Sutan Pangurabaan Pane mendirikan perpustakaan di Kampung Sipirok. Tapi sayang, perpustakaan itu kini sudah tidak beroperasi lagi, karena letaknya yang terpisah dari rumah, sehingga menjadi tidak terurus. Serupa dengan penuturan Darto Siregar, Andra yang tinggal di Sidempuan menjelaskan, Lafran cukup dikenal di Sipirok. Tak pelak, pada 5 Februari 2010, dia beserta kawan-kawannya mengaku mengadakan refleksi kelahiran HMI di rumah Sutan Pangurabaan Pane di Pangurabaan.

Sebenarnya, warga Kota Sipirok paham kalau Pane berasal dari Desa Pangurabaan. Masyarakat marga Pane konon berasal dari Utara, merantau ke wilayah Selatan melalui jalur Sungai Bila (Aek Bila) di Kecamatan Biru. Dari daerah itu, leluhur marga Pane kemudian menetap di Kecamatan Arse, lantas menyebar ke wilayah Kecamatan Sipirok, tinggal dan beranak pinak di Desa Pangurabaan.

Awalnya, Desa Pangurabaan dominan dihuni masyarakat bermarga Pane. Dalam perkembangannya kemudian, terjadi asimilasi budaya akibat perkawinan dan arus pendatang, Desa Pangurabaan pun tidak lagi identik dengan marga Pane. Desa ini dibelah dua jalur Jalan Lintas Sumatera, sekitar 6 kilometer

dari ibu kota Sipirok ke arah Utara. Bertetangga dengan Desa Bagas Nagodang, sebuah desa yang merupakan salah satu desa pertama di Kecamatan Sipirok. Kehadiran masyarakat marga Pane di Kecamatan Sipirok erat kaitannya dengan tradisi persaudaraan yang dibangun dengan masyarakat marga Siregar, yakni masyarakat yang dominan menghuni Desa Bagas Nagodang. Di pinggir jalan, di salah satu rumah tua bercat hijau yang kurang terawat, di sanalah Lafran Pane pernah tinggal.¹⁵⁴

Riwayat Pekerjaan:

1. Direktur kursus BI dan BII Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan Kementerian P & K, dan kemudian menjadi FKIP UGM. Kemudian, FKIP UGM dengan Institut Pendidikan Guru (IPG) dilebur menjadi IKIP Yogyakarta, kini UNY.
2. Dosen FKIS IKIP Yogyakarta.
3. Dosen Fakultas Sospol UGM, dosen UII, dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen Akademi Tabligh Muhammadiyah (ATM), kemudian menjadi FIAD Muhammadiyah, kini Fakultas Ilmu Agama Islam UMY.
5. Pernah menjadi dosen IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN), hingga terjadinya peristiwa 10 Oktober 1963. Sepuluh tahun kemudian, atas permintaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mulai tahun 1973 Prof. Drs. Lafran Pane mulai kembali mengajar di IAIN Sunan Kalijaga sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara.
6. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, sejak tanggal 1 Desember 1966, Lafran Pane diangkat menjadi guru besar (profesor) dalam mata kuliah Ilmu Tata Negara. Pidato pengukuhan sebagai guru besar disampaikan Drs. Lafran Pane dalam sidang terbuka IKIP Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 1970 dengan judul “Perubahan Konstitusi-

onil”. Senat/Rektor IKIP Yogyakarta telah mengusulkan pengangkatan Lafran Pane menjadi guru besar itu sejak tanggal 1 September 1964. Akhirnya, Prof. Drs. Lafran Pane diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Tata Negara, setelah memelihara pelajaran ini selama lebih kurang 15 tahun lamanya.¹⁵⁵

Karya Tulis Ilmiah:

1. *Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia*
2. *Wewenang MPR*
3. *Kedudukan Dekrit Presiden*
4. *Kedudukan Presiden*

7. *Tujuan Negara*
8. *Kembali ke UUD 1945*
9. *Memurnikan Pelaksanaan UUD 1945*
10. *Perubahan Konstitusional*
11. *Menggugat Eksistensi HMI*

Orang-orang dan Tempat yang Memengaruhi Pemikiran Lafran Pane

Berdasarkan sejarah hidupnya, terdapat beberapa nama yang memengaruhi pemikiran Lafran Pane, di antaranya:

1. Sutan Pangurabaan Pane. Sutan adalah seorang fungsionaris Partindo (Partai Indonesia) yang juga bapak dari Lafran Pane. Dari Sutan, Lafran belajar tentang Nasionalisme dan kepemimpinan.
2. Malim Mahasan, seorang guru yang mengajarnya baca-tulis al-Quran dan dasar-dasar keagamaan lainnya.
3. Armijn Pane, seorang sastrawan pelopor pujangga baru bersama Sutan Takdir Alisjahbana dan Amir Hamzah.

Armijn Pane sekaligus juga kakak kandung Lafran Pane. Dialah yang mengajak Lafran ke Jakarta tahun 1937. Lafran tampaknya belajar tentang kebudayaan Indonesia dari Armijn Pane.

4. Sanusi Pane, seorang sejarawan nasional, bersama Sjahrir, Hatta, Soekarno sering memberikan materi sejarah pergerakan nasional di asrama-asrama mahasiswa di Jakarta, seperti asrama Indonesia merdeka, dan lain-lain. Lafran belajar tentang sejarah dari Sanusi Pane.
5. Nyonya Tarib, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Ali Hanafiah (ketiganya adalah saudara perempuan Lafran Pane).
6. Pesantren Muhammadiyah Sipirok. Di sekolah ini, Lafran mengenal gerakan pembaharuan dalam Islam, meskipun dalam taraf terbatas. Hingga penulisan ini selesai, penulis belum mendapatkan nama-nama guru Lafran saat di pesantren ini.
7. Sekolah-sekolah Taman Siswa. Lafran cukup beruntung bisa menikmati sekolah di Taman Siswa era tahun 1930-an. Wawasan kebangsaan dari sekolah ini kelak membentuk karakter Lafran Pane, khususnya dalam berhadapan dengan sesama kelompok-kelompok secita-cita, namun berbeda metodologi perjuangan.
8. Organisasi-organisasi seperti Gerindo (organisasi kiri); Kelompok Kaigun (kelompok bawah tanah binaan Jepang); dan Zwarte Bende, yaitu nama sebuah “Geng Pemuda” yang beroperasi di Jakarta (khususnya di kawasan Senen dan Kramat). Lafran sempat menjadi anggota kelompok ini. Latar belakang ini menjadikan Lafran sangat antusias terhadap Islam yang menurutnya sejuk.
9. Soekarno, Hatta, Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Aidit, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Kasman Singodimedjo, M. Rasjidi, Fathurrahman Kafrawi, dan lain-lain. Sebagai Generasi muda (usia 17–35 tahun) yang hidup di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, sosok di atas merupa-

kan inspirasi, baik secara langsung maupun tidak. Beruntung Lafran bisa kuliah di STI (Sekolah Tinggi Islam). STI bukanlah perguruan tinggi NU, Muhammadiyah atau organisasi Islam lainnya. STI adalah buah pikiran pemimpin Masyumi, dan Hatta dipercaya menjadi ketua panitia pendiriannya.

10. Teman-temanya semasa di STI, Akademi Ilmu Politik (AIP) dan HMI seperti: M Jusdi Ghazali (lahir 1923), Anwar Harjono (lahir 1923), dan Mukti Ali (lahir 1923), Karnoto Zarkasyi (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Maisaroh Hilal (Singapura), Suwali, Mansyur, Siti Zainah (Palembang), M. Anwar (Malang), Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak (Jakarta), Toha Mashudi, Bidron Hadi (Yogyakarta), Asmin Nasution, Anton Timur Jailani, Mintaredja, Ahmad Tirtosudiro, Dahlan Ranuwihardjo, Sanusi, Suastuti Notoyudo, Amin Syakhri, Ushuluddin Hutagalung, Lukman E. Hakim, Ja'far Bin Thalib, Syahbuddin Arifin, A.S. Broto, dan lain-lain, juga generasi tahun 1950-an seperti Mintaredja, Deliar Noer, dkk.

Catatan:

- ¹ Ketua Umum PB HMI periode 1963–1966.
- ² Kategori yang dimaksud Yudi Latif di sini mengacu pada penggolongan seseorang sebagai Nasionalis, Agamis, Komunis. Contoh yang paling *gablang* bisa dilihat dari sosok Tan Malaka, Natsir, Soekarno, dan banyak tokoh lainnya.
- ³ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947–1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 661.
- ⁴ Sewaktu masih di Porsea (Tapanuli Utara) marga Pane ini disebut Sitorus Pane sebagai cikal bakal marga Pane dan yang tinggal di Porsea 14 keturunan.
- ⁵ Raja Gulingan pindah ke Pangurabaan Sipirok dan memakai marga Pane saja.
- ⁶ Sumber: Yayasan Pendidikan Jenderal Timur Pane, sekretariat Perguruan Gajah Mada, Jl. Durian No. 19 Medan, *tarombo* (silsilah) marga Pane

- (Medan: 1965), hlm. 22.
- 7 Silsilah marga Pane sejak dari Raja Gulingan Pane hingga **Lafran Pane**. Lafran Pane adalah keturunan ke-8.
- 8 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 157.
- 9 Kertas Kerja ini disampaikan dalam “Persidangan 50 Tahun Merdeka: Hubungan Malaysia Indonesia 17–21 Juli 2007”, di Universiti Malaya-Malaysia.
- 10 www.manalu.or.id. Website Resmi Punguan Manalu dohot Boru/Bere/Ibebere.
- 11 Claude Guillot, peneliti asal Prancis. Ia pernah menjadi pembicara kunci dalam seminar bertajuk “Hubungan Longue Duree antara Persia dengan Nusantara; Mozaik Pemikiran Hamzah Fansuri”, di Jakarta, Rabu 28 Maret 2007. Menurutnya, orang Persia punya peran utama dalam hubungan bagian timur dan barat Asia melalui Jalan Sutra. “Pada abad V, terdapat permukiman orang Persia di Semenanjung Melayu.” Di Nusantara, barang-barang seperti mangkok, piring, pecah-belah berglasir, dan benda-benda lain asal Persia dari abad VIII–XV banyak ditemukan di beberapa situs di bagian barat Nusantara. Selain itu, pada abad XV, bahasa Persia juga digunakan oleh golongan terpelajar di kota pelabuhan besar di Sumatera, seperti Pasai dan Barus. “Hubungan dagang, agama, dan budaya yang erat membuat pengaruh Persia tidak dapat diremehkan lantaran ikut menentukan unsur yang mewarnai Melayu.” (*Kompas*, 29/3/2007).
- 12 Claude Guillot (ed.), *Lobu Tua Sejarah Awal Barus, Ecole Francaise d Extreme-Orient Assocation Archipel Pusat Penelitian Arkeologi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002, hlm. 71
- 13 Ibid, hlm. 72.
- 14 www.imbalo.wordpress.com. Akses 25 Juli 2009.
- 15 www.kerajaanpane.blogspot.com. Akses 25 Juli 2009.
- 16 Pengaduan Lubis, “Mandailing dalam Lintasan Sejarah”, di www.mandailing.org.
- 17 www.worldstatemen.org. Akses 25 Juli 2009.
- 18 Sebelum wafatnya Lafran Pane pada 24 Januari 1991, tanggal lahir Lafran Pane selalu dituliskan pada 12 April 1923. Hal ini dilakukan Lafran untuk menghindari berbagai tafsiran, karena bertepatan dengan berdirinya HMI 5 Februari 1947. Rahasia tersebut pertama kali diungkapkan oleh Dra. Tetty Sari Rakhmiati, putri bungsu Lafran Pane yang didampingi abangnya Ir. M. Iqbal Pane dan Bu Lafran Pane pada 25 Januari 1991 ketika jenazah almarhum Lafran Pane akan dimakamkan di Pemakaman Umum Belakang Masjid Karangajen Yogyakarta. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Akbar Tandjung (mantan Ketua DPR RI), Drs.

Musa Ahmad (mantan Ketua Umum HMI Komisariat FKSS IKIP Yogya), Drs. A. Taufiq Dardiri (mantan Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Agussalim Sitompul (mantan Ketua HMI Cabang Yogyakarta), dan beberapa anggota HMI lainnya, lebih lengkap baca Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa....*, hlm. 1, 37.

- 19 Sejarah berdirinya Kota Padang Sidempuan adalah bagian dari kisah keluarga (*family cronical*) Mangaraja Onggang Parlindungan. Tokoh utama dalam sejarah Kota Padang Sidempuan pada masa Perang Padi adalah Idris Nasution gelar Tuanku Lelo (1785–1833), putra seorang hartawan di Pariaman (*sebuah kota sekitar 1 jam dari Kota Padang, Sumatera Barat*) bernama Pagu Nasution (1750–1883) yang berasal dari Hutasiantar. Hartawan ini juga dikenal sebagai Haji Harun Nasution, kemudian Tuanku Kadi Malikul Adil dan lebih populer dengan nama Kali Hasan. Pada 1821, Tuanku Lelo meminta nasihat Tuanku Tambusai yang alim itu untuk membangun benteng kukuh. Tuanku Tambusai menunjuk Desa Padang Sidempuan. Hanya dalam waktu sehari-semalam, lokasi yang ditunjuk itu dikuasai oleh Tuanku Lelo, kelak kemudian didirikan sebuah benteng bernama Benteng Padang Sidempuan. Lebih lengkap baca Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintah Kota Padang Sidempuan Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Pemerintah Kota Padang Sidempuan, 2003, hlm. 26–27.
- 20 Sanusi Pane adalah tokoh pergerakan nasional, sastrawan dan ahli sejarah Indonesia. Pada 1944, terbentuk Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia yang diketuai Soekarno dengan anggota antara lain Ki Hajar Dewantoro, Koesbini, KH Mas Mansur, M. Yamin, Sanusi Pane, C. Simandjuntak, Ahmad Subardjo. Panitia ini pada 8 September 1944 menetapkan: (1) Apabila lagu Indonesia dinyanyikan satu kuplet saja, maka ulangan (*refrain*)-nya dinyanyikan dua. Apabila dinyanyikan tiga kuplet, maka ulangannya satu kali kecuali pada kuplet ketiga sebanyak dua kali. (2) Ketika menaikkan bendera Merah Putih, lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan ukuran cepat 104. (3) Perkataan semua diganti dengan semuanya, not ditambah dengan do. (4) Perkataan refrein diganti ulangan. Pada tanggal itu juga, ditetapkan perubahan lagu Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Hanya saja pada umumnya lagu itu diperdengarkan satu kuplet saja, sehingga orang tidak terbiasa mendengar kuplet kedua dan kuplet ketiga lagu tersebut. Asvi Warman Adam, “Heboh Lagu Indonesia Raya”, dalam www.mediaindonesia.com, diakses tanggal 31 Desember 2007.
- 21 Armijn Pane adalah kakak kandung Lafran Pane, Armijn adalah tokoh sastra terkemuka, lahir pada 18 Agustus 1908, Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (wafat di Jakarta, 17 Februari 1970) ialah seorang penulis yang terkenal keterlibatannya dengan majalah *Pujangga Baru*. Bersama Sutan Takdir Alisjahbana dan Amir Hamzah, Armijn Pane

- mampu mengumpulkan penulis-penulis dan pendukung lainnya dari seluruh penjuru Hindia Belanda untuk memulai sebuah pergerakan modernisme sastra. Selain menulis puisi dan novel, Armijn Pane juga menulis kritik sastra. Tulisan-tulisannya yang terbit pada *Pujangga Baru*, terutama di edisi-edisi awal, menunjukkan wawasannya yang sangat luas dan, dibandingkan dengan beberapa kontributor lainnya seperti Sutan Takdir Alisjahbana dan saudara laki-laki Armijn, Sanusi Pane, kemampuan menilai dan menimbang yang adil dan tidak terlalu terpengaruh oleh suasana pergerakan Nasionalisme yang terutama di periode akhir Pujangga Baru menjadi sangat politis dan dikotomis. Karya sastranya dalam berbagai bentuk telah dibukukan antara lain: Kumpulan Puisi, (1) Armijn Pane, *Gamelan Djiwa*, Jakarta: Bagian Bahasa Djawa, Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, 1960; (2), Armijn Pane, *Djiwa Berdjiwa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1939. Dalam bentuk novel, (1) Armijn Pane, *Belenggu*, Jakarta: Dian Rakyat, Cet. I 1940, IV 1954, Cet. IX 1977, Cet. XIV 1991. Sedangkan kumpulan cerpennya, (1) Armijn Pane, *Djinak-Djinak Merpati*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I 1940; (2) *Kisah antara Manusia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet I 1953, II 1979; (3) *Drama antara Bumi dan Langit*, 1951. Dalam Pedoman, 27 Februari 1951, dalam www.tamanismailmarzuki.com, diakses tanggal 06 Februari 2007.
- 22 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 157.
- 23 Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintah Kota Padang Sidempuan...*, hlm. 46.
- 24 Partindo atau Partai Indonesia adalah partai yang dipimpin oleh Soekarno dan Sartono (PNI Lama), didirikan oleh Sartono pada 1 Mei 1931, sebagai ganti dari bubarnya PNI. Lihat, Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta 1908–1980*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 88.
- 25 Di daerah tertentu untuk “oto” biasa digunakan untuk menyebut bus, mobil, truk. Di Sumatera Barat, untuk truk lazim disebut Oto Prah, sedangkan sedan disebut Oto Sedan.
- 26 Kantor Oto Dinas Pengangkutan (ODP) Sibualbuali ini masih ada hingga sekarang, armadanya juga masih beroperasi. Saat berkunjung ke Palembang, penulis mendapatkan kantornya terletak di belakang Asrama Haji Palembang, atau di depan Hotel Raden, Palembang, Sumatera Selatan.
- 27 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 157.
- 28 Ibid, hlm. 157.
- 29 Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan sekarang adalah Jalaluddin Pane, SH dalam www.tapsel.go.id. Akses 25 Juli 2009.
- 30 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 157.

- ³¹ Ibid, hlm. 157.
- ³² Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir Kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Nama Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942, setelah itu nama kota berubah menjadi Jakarta. Tetapi bentuknya dalam bahasa Melayu, yaitu “Betawi”, masih tetap dipakai sampai sekarang. Nama Batavia berasal dari kata *Batavieren*, salah satu nama Suku Germanik yang bermukim di tepi Sungai Rhein. Orang Belanda dan sebagian orang Jerman adalah keturunan dari suku ini. Dalam www.wikipedia.com dan www.jakarta.go.id, diakses tanggal 17 Januari 2009
- ³³ www.hoedjien74.multiply.com, diakses 10 Januari 2008.
- ³⁴ Mr. Wilopo adalah mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI.
- ³⁵ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 158.
- ³⁶ Kasman Singodimedjo lahir 1908, anak dari seorang *lebai* (juru agama di desa), beliau menjadi Ketua Jong Islamiyeten Bond (JIB) pada 1930– 1935 saat menjadi pelajar bagian persiapan STOVIA. Mirip dengan Natsir, Kasman sejak kecil telah bersentuhan dengan gerakan dakwah kaum reformis dan kemudian memiliki hubungan dekat dengan Djamiat Chair (*Al-Jamiat Al-Chaririyah*) dan Muhammadiyah. Kasman Singo - dimedjo adalah Komandan PETA di Jakarta, sumbangan puncaknya untuk Republik Indonesia adalah sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili PETA. Kasman juga guru senior di Sekolah Tinggi Islam. Lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 234, 310, 312, 344.
- ³⁷ D.N. Aidit pernah menganggap bahwa sebenarnya HMI sudah bubar, yaitu bersamaan dengan dipaksa bubarnya Masyumi pada 13 September 1960, namun anggapan Aidit ternyata salah karena HMI tetap hidup, karena secara organisasi HMI independen tidak mempunyai hubungan secara organisatoris dengan Masyumi. Lihat harian *Suluh Indonesia*, Jakarta 12 Maret 1965. Dipo Nusantara Aidit juga pernah mengatakan, “HMI soal kecil,” pada penutupan Kongres III CGMI di Istora Senayan 29 September 1965. Aidit dalam pidatonya mengatakan, “*Kalau anggota CGMI tidak bisa membubarkan HMI, anggota CGMI yang laki-laki lebih baik pakai kain saja*,” lihat, harian *Suara Islam*, Jakarta, tanggal 1 Oktober 1965. dalam Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 71.
- ³⁸ Pokrol artinya pembela atau wakil orang berperkara (dalam pengadilan); pengacara; advokat; orang yang pandai berbantah atau bersilat lidah, lihat Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 884.

- ³⁹ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 158.
- ⁴⁰ Ibid, hlm. 158.
- ⁴¹ Soekarno dan Hatta pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946, karena ibu kota pindah ke Yogyakarta, sementara jabatan perdana menteri untuk sementara tetap di Jakarta, lihat Osman Raliby, *Dokumenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1953, hlm. 176, dalam Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 158.
- ⁴² Supardi (dkk.), *Setengah Abad UII: Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1994, hlm. 25.
- ⁴³ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 158.
- ⁴⁴ Anggota panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno yang dibentuk untuk mempelajari Islam sebagai Dasar Negara. A. Kahar Muzakkir juga menandatangani “Piagam Jakarta”, lihat Mohammad Natsir, *Politik melalui Jalur Dakwah*, Jakarta: Majelis Dakwah, 2008, hlm. 14.
- ⁴⁵ Hussein Yahya, pernah menjadi Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang Universitas Islam Negeri) pada 1963–1966, dalam buku Agussalim Sitompul (dkk.), *Sejarah Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam; Setengah Abad IAIN Sunan Kalijaga 1951–2004 berkiprah*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004, hlm. 343.
- ⁴⁶ M. Rasjidi (lahir 1915), lulusan Universitas Kairo, Mesir, adalah Menteri Agama Pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 367
- ⁴⁷ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 158.
- ⁴⁸ Versi lain menyebutkan Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan oleh sebuah panitia yang dibentuk pada 1944 dan terdiri dari: Ketua: Moh. Hatta, Wakil Ketua: Kahar Muzakkir, Penulis I: M. Natsir (JIB), Penulis II: Prawoto Mangkusasmito (SIS). Baca Abu Jihan, “Victor Tandja dan ‘Ralat’ Sitompul”, majalah *Panji Masyarakat*, Nomor 289 Tahun Ke-24, 11 Maret 1983, juga sebagai lampiran: 19 dalam. Agussalim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984, hlm. 191.
- ⁴⁹ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 158.
- ⁵⁰ Tidak terdapat data mengenai sebab kepindahan Lafran Pane ke Akademi Ilmu Politik, namun besar kemungkinan hal itu dilakukan Lafran untuk semakin mendekatkan diri dengan mahasiswa UGM sehingga HMI lebih berkembang.

- 51 Setelah reformasi 1998 diganti menjadi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).
- 52 Tercatat Lafran Pane mahasiswa yang memperoleh gelar Sarjana Politik pertama di Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas HESP, Lafran bertugas di FKIP UGM. Tatkala FKIP UGM digabung dengan Institut Pendidikan Guru (IPG) menjadi IKIP Negeri Yogyakarta, Lafran Pane termasuk salah seorang pendirinya. Jabatan sebagai guru besar (profesor) diperoleh dengan Keputusan Presiden 1 Desember 1966, dalam mata kuliah Ilmu Tata Negara. Usul pengangkatan sebagai guru besar disampaikan tanggal 1 September 1964, dan pidato pengukuhan baru dilaksanakan di hadapan Sidang Senat Terbuka IKIP Yogyakarta tanggal 16 Juli 1976, dengan judul “Perubahan Konstitusional”. Lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 159.
- 53 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 162–163.
- 54 Sudjoko Prasojo (almarhum), seorang tokoh dan aktivis HMI Cabang Yogyakarta. Beliau adalah ayah dari Imam B. Prasojo (Sosiolog terkemuka dari Universitas Indonesia).
- 55 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 157–163, dari majalah *Media* Tahun III, Nomor 7, Rajab 1376 H/Februari 1957, terbitan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, hlm. 32.
- 56 Sudjoko Prasadjo, “Drs. Lafran Pane”, dalam majalah *Media*, Tahun III, Nomor 7 (Februari 1957), hlm. 32, dalam Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 43.
- 57 Terkesan seolah-olah HMI itu hanya untuk mahasiswa STI saja, karena semua pendiri dan pengurusnya sebagian besar mahasiswa STI. Untuk menghilangkan anggapan itu, sejak 22 Agustus 1947, Ketua Umum PB HMI Lafran Pane (STI) digantikan H.M.S. Mintaredja (mahasiswa Fakultas Hukum BPT Gadjah Mada Yogyakarta). Untuk itu, lihat Surat PB HMI tertanggal 13 Oktober 1947 kepada Pengurus PPMI di Yogyakarta. Lihat juga Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam 1947–1993*, Jakarta: Penerbit Intermasa, 1995, hlm. 12.
- 58 Lihat surat M.S. Mintaredja, Jakarta, 29 April 1964 yang ditujukan kepada Lafran Pane, dalam Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 277.
- 59 Lihat makalah orasi H. Ahmad Tirtosudiro, “Lafran Pane: Penggagas Besar”, (disampaikan pada Malam Kenangan Prof. Drs. H. Lafran Pane yang diselenggarakan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara di Medan, tanggal 29 Juli 1991), Medan: Pengurus KAHMI Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara, hlm. 1 dan 2.

- ⁶⁰ Sulastomo, “HMI, Dulu, Kini, dan Masa Datang”, *Kompas*, 22 Februari 2006.
- ⁶¹ Dalam penjelasannya, Agussalim Sitompul menuliskan, bahwa yang tergolong sejarawan HMI adalah para anggota HMI maupun yang bukan anggota HMI yang pernah menulis sejarah HMI, mereka itu antara lain: Mahmuddin Sudin (Yogyakarta, tahun 1957), Moch. S. Hartono, B.A. (Yogyakarta, 1957), Sudjoko Prasodjo (Yogyakarta 1957), Nazaruddin Razak (Yogyakarta, 1966), A. Halim Mubin (Ujung Pandang, 1970), Agussalim Sitompul (Yogyakarta, 1975), Abdul Asri Harahap (Jember, 1975), A. Dahlan Ranuwihardja (Jakarta, 1975), Asmin Nasution (Jakarta, 1975), Agusdin Aminuddin (Jakarta, 1975), Oman Komaruddin (Jakarta, 1975), Nazar Effendi Nasution (Jakarta, 1975), Akbar Tandjung (Jakarta, 1975), Ridwan Saidi (Jakarta), Ekky Syahrudin (Jakarta), Endang Saifuddin Anshori (Jakarta), Aniswati M. Kamaluddin (Jakarta), Ida Nazar E. Nasution (Jakarta), Nurhayati Djatman (Jakarta), Nurcholish Madjid (Jakarta), Tarmizi S. Lemarang (Jakarta), Mukhriji Fauzi dan Ade Komaruddin Mohammad (Ciputat), Lukman Harun (Jakarta), Victor Immanuel Tandja (alumni GMKI Jakarta), Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 238–239.
- ⁶² Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 22.
- ⁶³ Ibid, hlm. 22.
- ⁶⁴ Baca *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI XI di Bogor Tanggal 23–30 Mei 1974*, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1974, hlm. 75. Selain ketetapan tersebut, PB HMI telah menganugerahkan piagam yang terbuat dari perunggu yang melukiskan Lafran Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI. Piagam ditandatangani Akbar Tandjung dan Gambar Anom, sebagai Ketua Umum dan Sekjen PB HMI.
- ⁶⁵ Chumaidy Syarif Romas adalah mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta periode 1970–1971 dan Ketua umum PB HMI 1976–1979, mantan Anggota MPR RI utusan golongan dari Yogyakarta, saat ini memilih sebagai dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wawancara penulis dengan Chumaidy Syarif Romas, di Yogyakarta, tanggal 24 Juni 2008.
- ⁶⁶ Ibid.
- ⁶⁷ Muhammad Iqbal Assegaf lahir di Kampung Bajo, Bacan, Maluku Utara, 12 Oktober 1957; Ketua Umum PB PMII 1988–1991, www.gp-ansor.org.
- ⁶⁸ Iqbal Assegaf, “HMI dan Posisinya dalam Tantangan Abad XXI yang Agamis”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 1997, hlm. 235.
- ⁶⁹ Hal ini diceritakan oleh Tabrani Rab atas cerita dari Lafran Pane saat makan pagi bersama di Inderapura Hotel. Cerita ini kemudian dituliskan

dalam sebuah artikel Tabrani Rab, “HMI dari Masa ke Masa”, dalam harian *Riau Pos* Pekanbaru, tanggal 1 dan 2 Desember 1992.

- 70 Pengurus PMY didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa yang berorientasi Sosialis, di antaranya; Milono Ahmad dan Yosef Simanjutak (yang kemudian menjadi Yusuf Aji Torup). Jika para mahasiswa Sosialis berhasil mendominasi PMY dan berhasil memosisikan PMY sebagai pendukung Pemerintah Syahrir, maka potensi mahasiswa akan turut hanyut dalam polarisasi politik waktu itu. Sebab itu, beberapa mahasiswa (Lafran Pane, dkk) yang juga anggota PMY tidak menghendaki potensi mahasiswa turut hanyut dalam memihak salah satu pihak yang bertarung dalam polarisasi politik di Yogyakarta, kelompok mahasiswa tersebut mendirikan organisasi mahasiswa yang dinamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Dahlan Ranuwihardjo, “50 Tahun Sejarah Perjuangan HMI, Turut Menegakkan dan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdi Republik*, hlm. 4.
- 71 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 19.
- 72 Ibid, hlm. 19.
- 73 Ibid, hlm. 19.
- 74 Ibid, hlm. 19.
- 75 Ibid, hlm. 19.
- 76 Ibid, hlm. 20.
- 77 Sekarang Jalan Pangeran Senopati No. 30. Gedung tersebut adalah gedung peninggalan misi penjajah Belanda, yang kini diwarisi Yayasan Marsudi Rini Yogyakarta sebagai tempat sekolah Katolik. Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 20.
- 78 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 20.
- 79 Ibid, hlm. 20.
- 80 Pada saat akan didirikan, terdapat tiga usulan nama, apakah bernama *Gerakan*, *Perhimpunan*, dan *Himpunan Mahasiswa Islam*. Kebetulan di depan Kampus STI (waktu itu di Jl. Setyodiningratan-sekarang Jl. P. Senopati 30, kini milik Yayasan Katolik Marsudi Rini, terdapat kantor Palang Merah Indonesia (PMI). Maka, kalau nama organisasi ini ditetapkan Perhimpunan Mahasiswa Islam singkatannya nanti sama dengan PMI alias Palang Merah Indonesia. Akhirnya, atas kesepakatan pendiri HMI, organisasi tersebut diberi nama *Himpunan Mahasiswa Islam* disingkat HMI.
- 81 Mengenai tujuan dasar HMI yang dirumuskan oleh Lafran Pane, Mahmud Junus menjelaskan bahwa seorang mahasiswa baru sekalipun mudah mencerna rumusan tujuan tersebut. Sederhana namun jelas, cukup

menggugah hati dan menguak intelek mereka yang sedang memekar. Rumusan yang sederhana namun jelas itu tidak saja memaparkan makna yang tersurat, yakni munculnya generasi baru umat Islam yang bertanggung jawab, bukan sekadar mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 melainkan, bahkan mempertegak negara itu yang berarti bertanggung jawab atas kejayaan bangsa dan Negara Indonesia. Tanggung jawab yang demikian bukan pula sekadar karena proklamasi adalah antiklimaks dari perjuangan bangsa Indonesia yang panjang di mana umat Islam bersama umat beragama lainnya dapat menjunjung tinggi agamanya. Kesadaran akan tanggung jawab demikian itulah merupakan modal pokok bagi kesadaran keberadaannya (*eksistensi*). Tentunya, kesadaran demikian masih harus dikembangkan dan dipadukan dengan kesadaran *nilai-nilai* yang lain yang bersumber dari agama Islam setelah diterapkan ke dalam perjuangan bangsa Indonesia, termasuk nilai-nilai yang spesifik bagi suatu generasi penerus yang selalu gandrung akan keterbukaan intelektual dalam menjalankan kebenaran dan keadilan. Walaupun rumusan tujuan tersebut beberapa tahun silam berubah, namun perubahan tersebut harus ditafsirkan sebagai penyempurnaan saja yang tidak mengubah makna bahkan tetap bertumpu pada rumusan dan makna semula. Ungkapan yang masih abstrak ini tentunya perlu dijelaskan dengan ungkapan yang lebih konkret yakni sejarah HMI sejak lahirnya sampai pada masa Orde Baru ini. Mahmud Junus, “HMI Mengacu Kepribadian, Bukan Mitos”, *Kompas*, Jakarta, Februari 1988, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 480–481.

- 82 Penulis sama dengan Sekretaris.
- 83 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 20.
- 84 Ibid, hlm. 21.
- 85 Qomaruddin Ch. Haesy, “Tugas HMI dalam Mengamankan Pancasila”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 310.
- 86 Agussalim Sitompul. *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 31.
- 87 Namanya Asrama Mahasiswa Gajah Mada “Sabena”, Jalan Taman Siswa No. 11 A Yogyakarta.
- 88 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 32, 98.
- 89 Ibid, hlm. 90.
- 90 Pengurus Besar HMI, *Keputusan Kongres HMI di Yogyakarta*, Yogyakarta, 1947, hlm. 1, dalam Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 99.
- 91 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 100. Mengenai hal ini, Agussalim Sitompul menyebutnya sebagai “Akhlaq kepemimpinan Lafran Pane dengan mendahulukan kepentingan

organisasi daripada kepentingan pribadi”. Kongres I HMI di Yogyakarta tanggal 30 November 1947 telah memilih M. Mintaredja sebagai Ketua PB HMI, Ahmad Tirtosudiro sebagai Ketua I PB HMI periode 1947– 1949, sedang Serektaris I-nya adalah Lafran Pane, Sekretaris II *vacant* (kosong). Bayangkan, dari pemrakarsa berdirinya HMI/Ketua Umum PB HMI menjadi Ketua Cabang, lalu menurun menjadi Sekretaris I. Di sini jelas kelihatan jiwa besar Lafran Pane tidak memandang jabatan apa pun yang diberikan, bahkan rela tidak menjadi Ketua PB HMI. Karena menyadari dirinya ada masalah. Maka, demi kebesaran HMI, ia rela dengan ikhlas tidak duduk dalam formasi PB HMI. Selanjutnya, karena dalam berbicara Lafran Pane kurang lancar, maka ada usul supaya Lafran Pane sebagai Sekretaris I diganti Ushuluddin Hutagalung, dan usul ini diterima Lafran Pane dengan ikhlas, *legowo* tanpa tendensi tertentu. Jabatan Sekretaris II yang masih kosong itu diduduki Lafran Pane. Sungguh patut diteladani contoh akhlak kepemimpinan yang ditunjukkan Lafran Pane. (Dialog bersama penulis 08 Juni 2009).

- ⁹² Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 100.
- ⁹³ Ibid, hlm. 161.
- ⁹⁴ Ibid, hlm. 161.
- ⁹⁵ Ibid, hlm. 161.
- ⁹⁶ Ibid, hlm. 22. Lihat surat juga PB HMI No: 0306/B/Sek/X/1418 tanggal 11 Februari 1998 tentang Piagam Pengabdian yang diberikan kepada Lafran Pane sebagai penghargaan atas perjuangan dan pengabdian yang besar bagi eksistensi organisasi. Piagam itu diberikan bersamaan Peringatan Dies Natalis ke-51 HMI di Gedung Graha Insan Cita, Depok, tanggal 22 Februari 1998. Penghargaan yang serupa diberikan kepada semua mantan Ketua Umum PB HMI sejak tahun 1947 sampai tahun 1998. Secara khusus, dengan Surat Keputusan PB HMI No: 070/B/KPTS/10/1418 tanggal 5 Februari 1998 yang ditandatangani Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum dan Zulkifli sebagai Sekretaris Jenderal PB HMI, PB HMI juga memberikan Piagam Penghargaan kepada Drs. H. Agussalim Sitompul atas jasa-jasanya dalam melakukan dokumentasi dan studi sejarah HMI.
- ⁹⁷ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 159.
- ⁹⁸ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 437.
- ⁹⁹ Ibid, hlm. 437.
- ¹⁰⁰ Bintoro Tjokroamidjoyo menduduki posisi yang sangat strategis dalam birokrasi pemerintahan, yakni sebagai Asisten Pribadi Presiden (1966–1967) dan Sekretaris Bappenas (1967–1968). Tjokroamidjoyo mengarahkan Persami untuk mendukung proyek modernisasi Pemerintah. Dalam pandangannya, kaum Muslim harus melibatkan diri dan

- merespons lingkungan sosial-politik mereka secara dinamis agar bisa menyesuaikan diri dengan tepat terhadap perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam lingkungan sosial-politik. Dengan cara ini, Persami dan birokrat santri menjadi eselon atas yang pertama-tama dalam birokrasi Pemerintah Orde Baru seperti: Ahmad Tirtosudiro, Bustanil Arifin, Bintoro T, Deliar Noer. Lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 507.
- 101 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 437.
- 102 Subhan Z.E. (lahir 1931), sebenarnya pada awal berdirinya Persami, untuk menjembatani jurang antara inteligensia tradisional dan modernis, kepemimpinan awal organisasi ini diserahkan kepada Subhan Z.E. dan H.M. Sanusi (lahir 1924, lulusan STT) dari Muhammadiyah sebagai wakil ketua (Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 437). Sebagian besar pemimpin PMII pada pertengahan 1960-an berada di bawah patronase Subchan yang saat itu menjabat Wakil Ketua NU daripada Idham Chalid (Ketua NU), karena Subchan cenderung lebih kritis kepada Soekarno ketimbang Idham Chalid. Subchan dibesarkan dalam keluarga tradisional namun terdidik di sekolah modernis sebagai siswa HIS Muhammadiyah di bawah didikan Mas Mansyur. Di bawah pengaruhnya, hubungan HMI dan PMII sangat harmonis. Rumah Subchan yang pertama-tama di Jalan Wahid Hasyim dan kemudian di Jalan Banyumas merupakan tempat pertemuan para anggota HMI. Dia dianggap oleh para anggota HMI sebagai senior karena kecerdasannya dan dukungan finansialnya. Adik perempuannya, Aniswati, juga menjadi anggota HMI, dalam A.M. Mandan, *Subhan Z.E, Sang Maestro: Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2001.
- 103 Anwar, M.S., *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 252.
- 104 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 159.
- 105 Saidi, *Ridwan*. 1989. *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*. Jakarta: Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia. hlm. 227.
- 106 Ibid, hlm. 159.
- 107 Ibid, hlm. 159.
- 108 Ibid, hlm. 161.
- 109 Ibid, hlm. 161.
- 110 Ibid, hlm. 159.
- 111 Abdul Gafur, lahir di Ngawi 6 Agustus 1944, NIP 130358900, Golongan IV/b (Guru Besar Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Abdul Gafur juga guru besar di University of Southern California (USC), Los Angeles, Amerika dalam bidang teknologi pembelajaran (*educational technology*). Abdul Gafur

- sewaktu mahasiswa pernah diajar oleh Lafran Pane dalam mata kuliah Ilmu Hukum, Ilmu Tata Negara dan Pemikiran Politik. Abdul Gafur juga pernah menjadi asisten Lafran Pane di UNY.
- 112 Wawancara penulis dengan Abdul Gafur, di ruang dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 23 September 2008, jam 11.00–12.00.
- 113 Ekram Prawiroputro M.Pd. lahir di Blora 12 Mei 1948, NIP 130814857, S-2 Jakarta—Lektor Kepala, Gol IV/a. Ekram adalah mahasiswa Lafran Pane dan asisten pribadi Lafran Pane pada 1973–1976, sebelum diganti-kan oleh Abdul Gafur. Wawancara penulis dengan Ekram Prawiroputro, di ruang dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 24 September 2008, jam 11.00–12.00.
- 114 Wawancara penulis dengan Prof. Dr. Suyata, di Yogyakarta, Rabu 24 September 2008.
- 115 Lukman Hakiem, mantan Ketua Umum HMI Korkom IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) 1980–1981 dan Ketum HMI Cabang Yogyakarta periode 1983–1984, juga anggota DPR RI 2004–2009 dari Fraksi PPP.
- 116 Wawancara penulis dengan Lukman Hakiem melalui *email* pada 19 Desember 2007.
- 117 Lukman Hakiem, “Lafran Pane Pahlawan Nasional, Mengapa Tidak?”, dalam Agusssalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 166.
- 118 Ibid.
- 119 Universitas Islam Indonesia, Kampus Terpadu, Jl. Kaliurang Km 14.5 Besi, Sleman, Yogyakarta 55584
- 120 Drs. Syaifullah Mahyudin, MA (Pembantu Rektor I) UII, periode 1973–1978. Saat itu, Rektor UII dijabat oleh **H. GBPH Prabuningrat**. Prabuningrat terpilih sebagai rektor dalam tiga periode berturut-turut (yaitu 1973–1978, 1978–1981, dan 1982–1986). Tetapi, periode yang ketiga hanya sempat dijalaninya tidak sampai satu tahun karena pada akhir tahun 1982 beliau wafat. Sejak periode 1973–1978, Prabuningrat inilah, dalam kepemimpinan di UII, dikenal adanya Pembantu Rektor dan Sekretaris Rektor. Ia juga tergabung dalam “Lingkaran Diskusi *Limited Group*”, forum Jumatan di rumah Mukti Ali, kompleks IAIN Sunan Kalijaga, Demangan. Anggota inti forum ini adalah intelektual yang bersinar: Dawam rahardjo, Djohan Effendi, Syu’bah Asa, Syaifullah Mahyuddin, Djauhari Muslim, Kuntowijoyo, Syamsuddin Abdullah, Simuh, Rendra, Deliar Noer, sampai Nono Anwar Makarim.
- 121 Didirikan pada 27 Rajab 1364 H, STI adalah cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik Belanda (Technische Hoogeschool atau Institut Teknologi Bandung kini, Recht Hoogeschool di Jakarta dan Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor). STI lahir untuk menjadi bukti adanya

kesadaran akan pendidikan pada masyarakat pribumi. Dibidani oleh tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta (Proklamator dan mantan Wakil Presiden RI), Moh. Natsir, Prof. KHA. Muzakkir, Moh. Roem, KH Wahid Hasyim, dan lain-lain, menjadikan STI sebagai basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islamis serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa. Realisasi perubahan STI menjadi UII didahului pembukaan kelas pendahuluan (semacam pra-universitas) yang diresmikan pada Maret 1948 di Pendopo nDalem Purbojo, Ngasem Yogyakarta. Sedangkan pembukaan UII (menggantikan STI) secara resmi diselenggarakan pada 27 Rajab 1367 H (bertepatan dengan tanggal 4 Juni 1948) bertempat di nDalem Kepatihan Yogyakarta dan mendapat kunjungan dari para menteri serta pejabat sipil dan militer lainnya. Dengan demikian, pada 27 Rajab (4 Juni 1948) hadirilah Universitas Islam Indonesia yang merupakan wajah baru STI dan telah resmi beroperasi sejak tiga tahun sebelumnya di Negara Republik Indonesia. Pada saat diresmikan, UII membuka empat fakultas, yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Agama. UII sebagai universitas swasta tertua di Indonesia kemudian berkembang sangat pesat dengan lebih 22 fakultas cabang, tersebar di seluruh Indonesia (Surakarta, Madiun, Purwokerto, Gorontalo, Bangil, Cirebon dan Klaten) dengan pusatnya di Yogyakarta. Namun, seiring dengan kebijaksanaan Pemerintah bahwa cabang universitas harus ditiadakan, maka cabang-cabang ini kemudian tumbuh sebagai perguruan tinggi baru (baik negeri ataupun swasta) atau tergabung dengan perguruan tinggi negeri yang telah ada. Jadi, secara tidak langsung, UII mendorong tumbuh dan berkembangnya perguruan-perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia dan UII secara nyata menjadi bagian dari sejarah pendidikan nasional itu sendiri. Satu misi sederhana dalam kata, namun berat, sangat berat, bahkan dalam kenyataannya yang teremban dalam perjalanan sejarah ini adalah mewujudkan kata-kata Bung Hatta dalam pidato peresmian UII kala itu: “...di Sekolah Tinggi Islam ini akan bertemu agama (religion) dengan ilmu (science) dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat...,” <http://unisys.uui.ac.id>. Akses 11 Agustus 2009.

¹²² Lukman Hakiem, “Lafran Pane Pahlawan Nasional, Mengapa Tidak?”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 167.

¹²³ Ibid, hlm. 167.

¹²⁴ Wawancara penulis dengan Ekram Prawiroputro, di ruang dosen Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta, 24/09/2008.

¹²⁵ Lukman Hakiem, “Lafran Pane Pahlawan Nasional, Mengapa Tidak?”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 167.

¹²⁶ Lukman Hakiem menceritakan: “Pernah suatu ketika, saat selesai Shalat

Jumat, Lafran Pane mengajak saya untuk ngobrol di teras masjid. Dia meminta saya tentang kemungkinannya menjadi anggota DPR/MPR. ‘Ada alumni yang menawarkan jabatan itu kepada saya, menurut kau bagaimana?’ Saya kaget, pendiri HMI kok ‘konsultasi’ kepada anak ingusan macam saya. Tetapi saya jawab juga, ‘Menurut saya, lebih baik tawaran itu ditolak saja, Pak. Di fraksi mana pun Bapak didudukkan, mau tidak mau, Bapak akan berhadapan dengan alumni HMI yang duduk di fraksi lain. Masak harus berhadapan dengan kader sendiri.’ Pak Lafran tersenyum manggut-manggut. Benar saja, tawaran tersebut ditolak oleh Lafran Pane.’ Dalam Lukman Hakiem, “Lafran Pane Pahlawan Nasional, Mengapa Tidak?”, dalam Agusssalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 167.

- ¹²⁷ Sulastomo, “Mengenang Mas Lafran, Mahmud Yunus dan Soleh Widodo”, dalam koran *Pelita*, Jakarta, 4 Februari 1991.
- ¹²⁸ Akbar Tandjung pernah mengecap SD Muhammadiyah di kampungnya, tetapi lantas pindah ke SD Nasrani. SMA-nya Kanisius, dan waktu mahasiswa masuk HMI. Mengapa ia tertarik masuk HMI? Saat SMA ia mendengar Aidit bilang, “Kalau tidak bisa bubarkan HMI, pakai sarung saja.” Waktu Mapram, katanya, banyak organisasi mahasiswa yang gencar mencari pengikut, CGMI, GMNI, hingga HMI. Akbar memilih HMI, dan kariernya menanjak di sana. Konflik ideologis yang mewarnai dinamika kemahasiswaan saat itu terasa betul, dan tampaknya ini berpengaruh pada kepemimpinan akomodatif Akbar—ia tegas, tapi akomodatif, dan pandai berkomunikasi politik. Yang menarik lagi, mengapa Akbar memilih Golkar? Mengapa bukan partai Islam? Akbar mengaku sempat mengalami keraguan. Tetapi, keraguan itu terjawab oleh pandangan-pandangan Nurcholish Madjid, yang seolah memberi “legitimasi teologis” baginya. Berkat hal itu, Akbar tak ragu-ragu lagi masuk Golkar. Akbar juga sempat mendatangi sesepuh sekaligus pendiri HMI, **Lafran Pane**, di Yogyakarta, mengutarakan niatnya aktif di Golkar. Lafran tidak keberatan. Toh HMI tidak hendak mendirikan Negara Islam. HMI didirikan pada 1947, kata Lafran dikutip Akbar, untuk memajukan rakyat Indonesia. Pada 1948, Jenderal Sudirman mengatakan HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Akbar sering menceritakan ini, intinya dia masuk Golkar sudah melalui persetujuan **Lafran Pane**. Dapat dilihat di tulisan Alfian Alfian di koran *Pelita*: <http://www.hupelita.com/baca.php?id=17829>.
- ¹²⁹ Sulastomo “Mengenang Mas Lafran, Mahmud Yunus dan Soleh Widodo”, dalam Agusssalim Sitompul, *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 163
- ¹³⁰ Ibid, hlm. 163.
- ¹³¹ Agusssalim Sitompul, “Prof. Drs. H. Lafran Pane sebagai Panutan dan Simbol HMI tentang Akhlak Kepemimpinan”. Makalah dipresentasikan

- pada Latihan Kader II Tingkat Regional Kalimantan oleh HMI Cabang Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di Aula Anjungan Kotim Palangkaraya, Rabu, 4 Agustus 2004, hlm. 9.
- ¹³³ Agussalim Sitompul, “Prof. Drs. H. Lafran Pane sebagai Panutan dan Simbol HMI tentang Akhlak Kepemimpinan”. Makalah dipresentasikan pada Latihan Kader II Tingkat Regional Kalimantan oleh HMI Cabang Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di Aula Anjungan Kotim Palangkaraya, Rabu, 4 Agustus 2004, hlm. 9.
- ¹³⁴ Ibid, hlm. 10.
- ¹³⁵ Ibid, hlm. 11.
- ¹³⁶ Wawancara penulis dengan Ekram Prawiro di Ruang FKIS UNY (24 September 2008).
- ¹³⁷ Ahmad Syafi’i Ma’arif, lahir di Bumi Calau Sumpur Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muham - madiyah 1998–2005.
- ¹³⁸ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Otobiografi Ahmad Syafi’i Ma’arif; Titik Kisar Perjalananku*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006, hlm. 170–171.
- ¹³⁹ Ibid, hlm. 181.
- ¹⁴⁰ Ibid, hlm. 113.
- ¹⁴¹ Ibid, hlm. 404.
- ¹⁴² LAPMI HMI Denpasar, “Memoar Seorang Mantan Ketua Umum PB HMI”, dalam www.lapmidenpasar.com, diakses hari kamis 17 Juni 2008, jam 19.00.
- ¹⁴³ Ibid.
- ¹⁴⁴ Ibid
- ¹⁴⁵ Naskah ini ditulis oleh Sulastomo dalam makalah setebal 19 halaman dan disampaikan dalam Seminar Sejarah HMI di Malang tanggal 27–29 November 1965, dalam Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 115–116
- ¹⁴⁶ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 161.
- ¹⁴⁷ Ibid, hlm. 162.
- ¹⁴⁸ Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekarang berdomisili di Pejompongan, Jakarta. Penulis sempat juga mewawancari-nya.
- ¹⁴⁹ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 162.
- ¹⁵⁰ Sanusi Pane adalah kakak kandung Lafran Pane. Sanusi Pane seorang pejuang nasional seangkatan dengan Soekarno, Hatta. Pada saat Laksamana Maeda menggulirkan gagasan untuk membentuk asrama

pemuda dengan tujuan agar para pemuda mempunyai pengetahuan politik untuk menghadapi masa depan “Indonesia” di kemudian hari, maka dipilihlah beberapa orang tokoh untuk rutin memberikan pelajaran kepada para pemuda tersebut, di antaranya: Soekarno (Politik), Sjahrir (Sosialisme), R.P. Singgih (Nasionalisme dari Segi Kebudayaan), Sanusi Pane (Sejarah Indonesia), Suwondo (Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia), Iwa Kusumasumantri (Hukum Kriminal), Subardjo (Hukum Internasional), Mohammad Said (Pendidikan dan Kebudayaan). Menurut Subardjo, para pemuda yang telah memperoleh latihan semasa revolusi telah turut dalam berbagai kegiatan, termasuk sebagai laskar rakyat, lebih lengkap baca Subardjo, *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1978, hlm. 255–258, dikutip dalam Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 234.

- ¹⁵¹ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 162.
- ¹⁵² *Ibid*, hlm. 162
- ¹⁵³ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 1, 37.
- ¹⁵⁴ Budi Hatees, “Lafran Pane Tidak Dikenal di Kampung Sendiri”, kompasiana.com, 13 Januari 2010.
- ¹⁵⁵ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 159.

BAB III

SEJARAH KEHADIRAN INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA

Kita bangsa Indonesia pasti akan mampu memberikan sumbangan yang bagus terhadap kebudayaan dunia.

(Hatta, Maklumat Politik Pemerintah RI, 1 Nov 1945)

Barat kepunyaan Tuhan, sebagaimana Timur kepunyaan Tuhan. Kedua-duanya mempunyai sifat-sifat yang baik, keduanya mempunyai beberapa kecelaan yang harus disingkirkan. Barat dan Timur tidak menjadi ukuran kita.

(Mohammad Natsir)¹

Kita kini perlu memikirkan kembali kita punya pengertian tentang Islam, *Mengonderzoek* [=selidiki] kembali. Apakah sudah benar kita punya faham tentang Islam? Dan apakah tidak ada faham-faham yang perlu dikoreksi? [Kita terus terikat pada kebiasaan] seolah-olah *tarikh* (sejarah) tidak menunjukkan bukti-bukti, bahwa selalu ada perubahan dalam pengertian tentang agama-agama itu! Seolah-olah sejarah tidak menunjukkan bukti-bukti bahwa ada kalanya faham tua itu diganti, dikoreksi, oleh faham baru... seolah-olah *tarikh* (sejarah) tidak menunjukkan pengoreksian tentang faham tauhid, faham hijab, faham rente, faham perempuan, faham menerjemahkan al-Quran dan seribu satu faham yang lain-lain. **(Soekarno, Pandji Islam, NO.**

12/25/03/1940).²

KEMUNCULAN ISTILAH INTELEKTUAL

Tidak terbantahkan bahwa kemajuan bangsa-bangsa di Eropa di segala bidang tidak didapatkan dengan melamun. Kerja keras mereka menerjemahkan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya dalam bahasa Arab dan Yunani, menjadikan mereka bangsa unggul sesuai dengan janji Tuhan dalam al-Quran. Hal sama juga terjadi pada bangsa Iran, Jepang,

Malaysia, Venezuela dan lain-lain yang hanya dalam waktu singkat menjadi bangsa yang disegani di atas bumi. Istilah Eropa untuk mereka yang berpikir (intelektual) masuk ke negara-negara jajahannya seperti Indonesia. Istilah intelektual kemudian berkembang pesat menggantikan istilah-istilah yang sebelumnya sudah ada di Indonesia, hingga di sini tidak ada persoalan, sebab hanya menyangkut istilah. Namun, istilah ini menjadi tidak bermanfaat jika kita tidak melacak asal istilah tersebut agar tidak serta-merta menggantikan istilah-istilah semakna yang sebelumnya sudah pernah ada di Nusantara.

Intelektual, sebagaimana seniman, sastrawan dan orang-orang lain yang menggeluti kreativitas, selalu melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh anggota masyarakat yang lain. Kata Arab yang diterjemahkan dengan intelektual ini adalah *al-mutsaqqaf*, yakni orang yang diluruskan, yang dididik, bukan lagi bakal atau bahan yang belum diolah. Karena itu, intelektual memiliki kemampuan melihat dan merasakan hal-hal yang tidak dimiliki orang kebanyakan.³

Apa yang dirasakan sebagai sesuatu yang lazim oleh kebanyakan anggota masyarakat bisa saja ditangkap sebagai ketenangan air sungai yang menyimpan buaya-buaya ganas di dalamnya. Buaya tersebut baru akan menyerang manusia sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang. Karena pandangannya yang menembus kegelapan tradisi atau kegaliban itu, ia dapat mengusulkan perbaikan-perbaikan bagi masyarakatnya dan tindakan-tindakan yang mesti diambil untuk menghindari kecelakaan di masa yang akan datang.⁴

Akan tetapi, seringkali usulan-usulannya mendahului zamannya dan tidak dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Orang memang tidak mudah untuk melihat kekurangan yang ada dalam kebiasaan. Kebiasaan merupakan bagian dari diri manusia dan membuat manusia merasa segalanya telah selesai. Kebiasaan itu sudah dibentuk dalam waktu yang lama, menyertai perkembangan kita sejak awal mula, sehingga

kebanyakan orang sudah tidak lagi menyadari keberadaannya. Bagaimana mungkin seseorang mengkritik atau melihat kekurangan dari sesuatu yang ia tidak sadar?⁵

Usulan intelektual seringkali juga bertentangan dengan kepentingan kekuasaan, baik politik maupun keagamaan. Di antara sifat-sifat kekuasaan yang menonjol adalah pelanggaran terhadap keamanan atau *status quo* yang di atasnya ia terbangun. Perubahan atas keamanan berarti ancaman atas keberadaan kekuasaan yang dapat menjurus kepada kejatuhannya dan datangnya kekuasaan baru di tangan tokoh atau organisasi lain. Apa yang diajukan intelektual justru menggoyang keamanan itu.⁶ Intelektual selalu mencari kemungkinan-kemungkinan baru bagi pemuliaan kehidupan manusia. Keamanan mempunyai kodrat menutup kemungkinan-kemungkinan baru. Keamanan selalu dibangun di atas pilihan tertentu atas beberapa alternatif kehidupan. Pada saat keputusan diambil, bisa jadi, pilihan itu pastilah mempunyai ketepatan, daya guna dan efektivitas bagi perubahan keadaan.

Tetapi, seiring dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia-manusia pendukungnya, pada suatu saat pilihan itu tidak lagi merupakan yang terbaik atau bahkan orang dapat melihat kekurangan-kekurangannya.⁷ Setiap bangsa mempunyai sebutan khusus bagi orang-orang yang dengan hikmah dan ilmunya senantiasa berani menyuarakan kebenaran. Istilah ini pada awal kemunculannya menunjukkan kepada sebuah kelompok dengan misi yang diproklamirkan sendiri, yaitu membela sebuah nurani bersama atas persoalan-persoalan politik yang mendasar.

TRAGEDI DREYFUS

Istilah intelektual lahir dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan “Kasus Dreyfus”.⁸ Kasus tersebut terjadi pada 1896,⁹ berawal ketika Alfred Dreyfus, seorang kapten Yahudi dalam dinas ketenteraan Prancis, dituduh sebagai mata-mata Jerman

yang ditengarai menyampaikan rahasia militer Prancis dalam apa yang disebut *bordeau* atau jadwal kepada Kedutaan Jerman. Bagi Prancis, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada membocorkan rahasia militer Negara oleh seorang opsir. Alfred dicopot dari pangkatnya oleh sebuah pengadilan militer dan mendapat hukuman penjara seumur hidup.

Dalam tulisan lain dijelaskan: Alfred Dreyfus, Yahudis, seorang kapten dalam jajaran militer Prancis ditahan pada 15 Oktober 1894 dengan tuduhan menyelundupkan rahasia kemiliteran Prancis kepada tentara Jerman. Dua bulan kemudian, Dreyfus diadili di hadapan mahkamah militer lalu dibuang ke Guyana. Kasus Dreyfus segera menyita perhatian publik di Prancis. Selanjutnya, dalam kebencian, publik Prancis meneriaki Dreyfus sebagai pengkhianat. Kasus Dreyfus ini menjadi pemantik munculnya kembali rasialisme terhadap Yahudi laksana api dalam sekam dalam sejarah Eropa khusus-nya Eropa Barat yang nanti memuncak dalam tindakan Hitler, yang hendak melenyapkan kaum Yahudi tidak hanya di Jerman.¹⁰

Ternyata, apa yang disebut sebagai pengkhianatan itu adalah palsu belaka dan merupakan hasil penipuan. Akan tetapi, Dreyfus sudah terlanjur diputuskan bersalah sehingga pro-paganda anti-Yahudi muncul begitu kuat di Prancis. Poster-poster Dreyfus bertebaran dan dianggap sebagai pengkhianat di Prancis dengan sebutan “Yudas Yahudi”.¹¹

Sebagai protes atas keputusan pengadilan yang sewenang-wenang itu, Emile Zola, seorang novelis terkenal saat itu, menuliskan sebuah surat terbuka berjudul “*J'accuse*” (*aku mendakwa*) pada halaman muka surat kabar bernama *L'Aurore* yang terbit di Paris. Emile Zola menuduh para anggota dinas ketentaraan Prancis telah merekayasa bukti, memanipulasi dan menutup-nutupi fakta kasus tersebut. Emile Zola akhirnya ditahan dan diadili dengan tuduhan memfitnah dan mencemarkan nama baik. Peristiwa Dreyfus ini begitu mengguncang

Prancis, sehingga Pemerintah yang bertanggung jawab itu jatuh pada pemilihan umum 1899 dan diganti oleh pemerintahan progresif yang akhirnya membebaskan Alfred Dreyfus dari penjara seumur hidupnya.¹² Surat Emile Zola inilah yang kemudian dikenal sebagai *manifeste des intellectuels* (manifesto para intelektual). Surat ini juga membuat perpecahan di kalangan pengarang Prancis menjadi dua kubu: kubu *Dreyfusard* (yang membela Alfred Dreyfus) dan kubu anti-*Dreyfusard* (kubu yang anti-Alfred Dreyfus). Dari polarisasi ini, muncullah istilah intelektual. Pada awalnya, istilah ini merupakan cemoohan yang memiliki konotasi negatif.¹³

Bagi kubu anti-*Dreyfusard*, yang berbicara dari sudut pandang institusi-institusi Negara, istilah intelektual dipakai untuk menunjuk kepada para penulis dan selebritis yang berorientasi pasar yang memiliki keterkaitan dengan kubu *Dreyfusard*. Namun, efek dari pelabelan ini malah semakin memperteguh kubu *Dreyfusard*. Bahkan sebaliknya, sikap anti-pati ini memberikan kepada mereka sebuah nama dan kesadaran akan identitas mereka yang baru. Sejak saat itu, kata intelektual bukan hanya menjadi istilah yang populer, melainkan juga sebuah model baru bagi bentuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan juga bagi peran baru untuk dimainkan.¹⁴

Sehingga, pada tahap-tahap awal kemunculannya, intelektual menunjuk pada sebuah kelompok dengan misi yang diproklamirkan sendiri, yaitu membela sebuah nurani bersama atas persoalan-persoalan politik yang mendasar. Namun, dalam perkembangan berikutnya, kata intelektual memiliki definisi-definisi yang berlimpah. Peristiwa Dreyfus kemudian dianggap sebagai peristiwa yang melahirkan istilah intelektual. Peristiwa Dreyfus juga dianggap sebagai referensi (otoritas) historis politik dan pemikiran di Prancis atas istilah “*les intellectuels*” (*al-mutsaqqafun*). Sebab, untuk pertama kalinya kata tersebut digunakan sebagai “sebutan” (gelar) dalam sebuah deklarasi “*manifeste des intellectuels*”.¹⁵

Istilah intelektual ini kemudian diartikan beragam, Dhakidae mengatakan bahwa definisi cendekiawan (intelektual) pada dasarnya tergantung pada definisi diri setiap penulis dan karena itu berbeda antara penulis satu dengan penulis yang lain hanya menunjukkan subyektivisme epistemologis sambil diiringi eksklusivisme meta-epistemologis. *Genus quaerit genus*, jenis yang sama berkumpul lagi dengan jenisnya sendiri, tidak dapat disangkal bermain di sini.¹⁶

PENGERTIAN INTELEKTUAL

Dalam pemikiran Ali Syari'ati,¹⁷ setiap nabi adalah intelektual dalam pengertian yang sesungguhnya atau pemikir yang tercerahkan. Mereka berasal dari kelompok miskin yang tertindas oleh sistem kapitalistik dan despolitik pada zamannya. Muhammad tidak dilahirkan dari golongan Kapitalis (*mala*) atau penguasa (*mutraf*), tetapi dari kalangan jelata, kelas kaum tertindas (*mustad'afin*). Nabi Musa adalah manusia penggembala yang sebagian besar waktunya dihabiskan bersama ternak-ternak di padang rumput, Nabi Nuh dan Nabi Isa adalah tukang kayu, Nabi Syu'aib dan Hud adalah guru miskin, dan Ibrahim adalah seorang tukang batu.¹⁸

Para nabi dari kalangan miskin tersebut hadir dalam konteks sosial, politik dan kebudayaan masyarakat yang beragam. Ia hadir dalam formasi sosial, seperti pastoral, kesukuan, nomadik, pra-feodal dan feodal. Namun demikian, dasar-dasar dan misi yang mereka usung memiliki persamaan, yaitu menyuarakan kebenaran, membangun keadilan sosial bagi seluruh kaumnya, serta perjuangan melawan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap kaum miskin.¹⁹ Nabi Adam dilahirkan untuk memberantas kebatilan dan kebodohan. Sebagai manusia pertama, ia berjuang melawan kekuatan alam dan kontradiksi-kontradiksi sosial yang muncul dalam generasi manusia awal. Nabi Nuh memimpin kaumnya yang lemah untuk menentang para perampas. Nabi Hud dan pengikutnya

berjuang menyadarkan penguasa yang otokratik. Nabi Saleh memimpin kaumnya untuk menegakkan egalitarianisme sosial. Nabi Ibrahim dengan segenap kesabarannya berjuang melawan penguasa yang kejam sekaligus penyebar pengingkaran terhadap Tuhan.

Nabi Yusuf adalah cerminan kaum yang terpinggirkan dan mengalami diskriminasi. Nabi Syu'aib berjuang membebaskan kaumnya dari ketimpangan ekonomi. Nabi Musa adalah pembebas para budak. Nabi Isa adalah pemimpin kaum *mustad'afin* dalam menegakkan kebenaran. Nabi Muhammad adalah pembebas para budak yang merupakan nabi revolusioner yang terakhir yang berhasil menciptakan sebuah peradaban agung pada masanya. Muhammad terlahir dari kelas bawah, mengalami hidup di tengah masyarakat yang timpang, dan akhirnya memimpin umatnya menegakkan keadilan dan persamaan universal.²⁰ Dalam al-Quran juga disebutkan:

“Bahwa Allah mengutus setiap rasul di antara mereka kepada umatnya dari golongan mereka sendiri.”²¹

Berdasarkan ini, penulis berkeyakinan bahwa istilah apa pun yang digunakan dan dalam peradaban apa pun di-proklamirkan mengenai orang-orang yang dengan ilmunya berjuang untuk mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan pada hakikatnya sama. Seperti istilah intelektual di Eropa, Resi, Pandita, Buya di Indonesia, Ulama, *Mutsaqqaf* di Arab atau istilah-istilah lainnya. Titik tekan yang membedakan adalah karya perubahan apa yang mampu diciptakan oleh pengguna istilah-istilah tersebut. Namun demikian, pernyataan tersebut terkesan *oversimplifikasi*, untuk itu dibutuhkan beberapa pertimbangan yang pernah ditelaah oleh para pakar. Sebab, hingga saat ini, pergulatan tentang definisi, peran dan fungsi intelektual masih terus berjalan. Selanjutnya, penulis akan banyak mengutip dari penulis-penulis senior.

Sejatinya, munculnya perbedaan mengenai definisi intelektual bukanlah sesuatu yang mengherankan. Sedangkan pengertian atau definisi dari yang konkret pun orang sukar se-pendapat, apalagi mengenai hal-hal yang abstrak. Apa definisi meja, rumah, jambu, pohon, baju, mobil, bulan, telepon, air, api? Itu adalah barang-barang yang langsung disentuh oleh panca-indra. Namun, tetap sukar bagi banyak orang untuk memberikan pengertian yang bisa diterima oleh semua kalangan. Apalagi mendefinisikan kata-kata yang hanya ada dalam pikiran kita saja, tidak ada wujudnya seperti agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu, teknologi, seni, filsafat, agama, kebudayaan, termasuk intelektual. Sudah sekian lama berdiri Departemen Agama di Indonesia, namun definisi tentang agama tetap saja menjadi perdebatan.

Tampaknya demikian juga dengan definisi intelektual, sudah sekian lama kata ini lahir, akan tetapi hingga kini tetap saja muncul pengertian-pengertian baru tentang intelektual, semakin banyak pendapat dari para ahli tentang intelektual tentu akan semakin memperluas pengertian kita tentang intelektual serta ruang lingkupnya. Singkatnya, banyaknya pengertian tentang intelektual bukanlah sebuah problem, asalkan tidak menyempitkan maknanya.

Sebagai contoh di Inggris dan Amerika, istilah intelektual mempunyai konotasi negatif. Bagi masyarakat Inggris, intelektual itu sebutan bagi orang-orang yang irasional, egois, sok pintar. Bahkan seorang sekretaris luar negeri di masa PM Margaret Thatcher, Sir Geoffrey Howe, menyifati Salman Rushdie (penulis buku *Ayat-ayat Setan*) sebagai *arrogant, a dangerous opportunist, dan a multiple renegade*. Lebih jauh lagi, Paul Johnson mengutuk kalangan intelektual dengan menyatakan, “*no wises as mentors, or worthier as exemplars, than the witch doctors or priest of old*” atau “tak layak jadi teladan.”²² Dari sini, dapat kita pahami bahwa istilah intelektual juga tergantung di belahan dunia mana ia disebut. Mengenai

definisi tentang intelektual yang sangat berlimpah dan beragam, Zigmunt Bauman mengungkapkan:

Setiap definisi yang mereka ajukan sesungguhnya merupakan sebuah upaya untuk menarik garis batas identitas masing-masing. Setiap batasan membelah wilayah menjadi dua sisi: di sini dan di sana, di dalam dan di luar, kita dan mereka.²³

Sementara itu, Daniel Dhakidae²⁴ mengakui cukup kesusahan untuk menemukan garis yang memisahkan antara seorang cendekiawan (intelektual) dengan yang bukan intelektual, garis itu sedemikian cair sehingga menorehkan garis pemisah menjadi mustahil, bagaikan menggoreskan garis di atas air sungai yang mengalir.²⁵ Lantas, siapa sebenarnya kaum intelektual itu? Kapan, di mana, dan kondisi apa yang bisa ditelusuri untuk menemukan suatu sektor dalam masyarakat yang bisa dan boleh disebut sebagai intelektual. Apakah memang ada dalam masyarakat orang disebut sebagai kaum intelektual tersebut?

Dhakiade menjelaskan, cendekiawan (intelektual) senantiasa terlibat di dalam apa yang disebutnya sebagai *speech community*, yaitu komunitas yang mempergunakan bahasa sebagai alat, modal, medium, untuk mengolah kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan pada umumnya. Menurut Dhakiade, Rusia pada zaman Tsar dengan mudah menunjuk kelompok yang dikirim belajar ke Barat dengan sebutan “*inteligensia*”. Mereka yang mendapatkan pendidikan Barat sekembalinya ke Rusia mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa dalam politik dan administrasi Rusia.²⁶

Menurut Dhakidae, setidaknya ada dua pendapat yang berdebat tentang kriteria intelektual. **Pertama**, pihak yang menetapkan kriteria seorang cendekiawan begitu tinggi, hampir-hampir absolut. Pihak ini diwakili oleh Julian Benda. **Kedua**, pihak yang merelativitaskan semuanya, sehingga siapa pun bisa menjadi intelektual. Dhakidae mengingatkan bahwa

memilih jalan tengah hanya menjadi sesuatu yang menggelikan dan tak banyak manfaatnya.²⁷

Julien Benda (1867–1956), dalam bukunya *La Trashison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Intelektual)*, merumuskan definisi intelektual secara sangat ketat dan terikat pada praktik di Eropa pada saat tertentu dan karena itu hampir tidak dapat diambil alih oleh suatu kebudayaan lain kecuali Eropa, bahkan Amerika Serikat pun tidak.²⁸ Kata itu, *le Clerc*, sengaja di-kembalikan Benda kepada akar latin abad tengah, yaitu *Clerus*, yang juga mengandung beberapa arti, namun arti aslinya adalah golongan rohaniawan yang berawal dari yang paling rendah yaitu mereka yang sudah ditahbiskan dengan menerima *tonsure* di kepalanya dengan ditandai oleh cukuran rambut yang seolah-olah dibuat botak.²⁹

Dalam tradisi gereja Inggris, mereka mendapat suatu hukum sendiri dan tidak bisa diadili oleh hukum sipil biasa. Dalam bahasa Indonesia lebih dekat kepada “alim” dalam bentuk tunggalnya, atau kaum “ulama” dalam bentuk jamaknya, dan dengan demikian sebenarnya *le cleric, clericus, intelektual, cendekiawan* adalah para kyai dalam arti kaum terpelajar dalam bidang agama.³⁰ Pada dasarnya, Benda menganut suatu jenis pandangan atau titik-titik binarium dalam melihat intelektual. Dia membagi ke dalam dua bagian yang bisa dikatakan tidak meyetuh satu dengan yang lain, laksana air dan minyak.

Pertama, adalah masyarakat yang disebutnya *laique, the lay man*, kaum awam, yaitu mereka yang mengejar seluruh urusan hidupnya terikat dalam fungsi “mengejar kepentingan material dan dari hari ke hari menjadi sepenuhnya dan secara sistematis realis; dalam kenyataannya hanya mengerjakan apa yang dituntut darinya. Oleh Julien Benda, masyarakat seperti ini dipandang sangat remeh dan hampir-hampir dengan peng - hinaan. Benda menyebut masyarakat ini sebagai jiwa yang tertunduk-tunduk ke tanah dan hampa dari semua yang bersifat luhur. Kelompok ini terdiri dari suatu gerombolan kaum borjuis

atau proletar, raja-raja, menteri-menteri, pemimpin politik. *Kedua*, adalah masyarakat yang disebutnya sebagai *les clerics*, dengan kriteria:

Mereka yang pada dasarnya tidak mengejar tujuan-tujuan praktis, semua mereka yang mencari kegirangan hidupnya di dalam mengerjakan kesenian atau ilmu pengetahuan atau spekulasi metafisik, pendeknya berusaha memiliki keuntungan non-material, dan dari sana dalam cara-cara tertentu berkata: "Kerajaanku bukan dari dunia ini."³¹

Menurut Yudi Latif,³² buku *La Trahisons des Clercs* karya Benda merupakan contoh *par excellence* dari konsepsi intelektual. Menurut Benda, para intelektual haruslah mereka yang pada dasar aktivitasnya tidak untuk mencapai tujuan-tujuan praktis (Benda, 1959:30).³³ Namun, Daniel Dhakidae menekankan bahwa masyarakat Barat tentu saja tidak hanya diwakili oleh Julien Benda. Karena Julien Benda mungkin hanya mewakili suatu jenis intelektual yang sudah tergusur oleh perkembangan zaman. Menurutnya, Benda mungkin tidak anti-perkembangan zaman, namun ia ingin perkembangan zaman itu dikontrol oleh kaum cendekiawan (intelektual), dan kaum intelektual tidak terbawa arus perkembangan zaman itu.³⁴

Pandangan lain muncul dari Ron Eyerman.³⁵ Menurutnya, beragam definisi tentang intelektual bisa dikelompokkan menjadi dua kategori. *Pertama*, definisi yang menginterpretasikan intelektual dalam karakteristik-karakteristik personal. *Kedua*, definisi yang mengaitkan istilah intelektual dengan suatu struktur dan fungsi sosial tertentu.³⁶

Dengan demikian, teori-teori mengenai fungsi para intelektual pada umumnya bisa juga dibagi dalam dua perspektif yang saling bertentangan. *Pertama*, para teoretisi politik yang terpengaruh oleh Marx dan Lenin memandang bahwa pemikiran-pemikiran para intelektual ditentukan terutama oleh relasi mereka dengan struktur kekuasaan atau ekonomi. *Kedua*, para sosiolog yang terpengaruh oleh ide Webber memandang

pemikiran para intelektual dalam relasinya dengan pengetahuan.

Eksponee paling berpengaruh dari perspektif yang pertama adalah Antonio Gramsci.³⁷ Bagi Gramsci, sangatlah problematik jika harus mengidentifikasi para intelektual sebagai orang-orang yang memiliki kualitas khusus yang bersifat bawaan (*innate*). Dalam pandangannya:

Setiap orang menjalankan beberapa bentuk aktivitas intelektual. Tetapi tidak semua orang dalam masyarakat menjalankan fungsi sebagai intelektual.³⁸

Oleh karena itu, faktor penentu apakah seseorang itu bisa dikategorisasikan sebagai seorang intelektual atau sebagai seorang pekerja manual menurut Gramsci terletak pada “fungsi sosialnya”. Berbeda pandangan dengan kaum liberal yang melihat kaum intelektual sebagai sesuatu yang berada “di atas”, “di luar” masyarakat. Gramsci justru sebaliknya, ia memahami para intelektual sebagai sebuah bagian integral dari materialitas yang konkret dari proses-proses pembentukan masyarakat. Untuk itu, ia membagi intelektual dalam dua kategori: intelektual tradisional dan intelektual organik.

Intelektual organik, menurut Gramsci, merujuk kepada para intelektual yang berfungsi sebagai perumus dan artikulatur dari ideologi-ideologi dan kepentingan-kepentingan kelas yang sedang tumbuh, yakni kelas buruh. Dia berargumen:

Setiap kelompok sosial terlahir dalam medan fungsinya yang pokok, dan bersamaan dengan itu, secara organik melahirkan satu atau lebih strata kaum intelektualnya sendiri yang akan menciptakan homogenitas dan kesadaran akan fungsi dalam diri kelompok sosial tersebut, bukan hanya di medan ekonomi, melainkan juga di medan sosial dan politik (Gramsci, 1971:5).

Sedangkan intelektual tradisional, menurut Gramsci, secara niscaya akan bertindak sebagai antek penguasa, bahkan, saat mereka bersikap kritis terhadap *status quo* sekalipun, mereka

pada dasarnya tetap membiarkan sistem nilai yang dominan menentukan kerangka pemikiran mereka. (Gramsci, 1971: 7– 8, 12).

Ahli lainnya yaitu Rikard Bagun menjelaskan, bahwa sudah menjadi credo, kontribusi kaum intelektual bagi peradaban dan kemanusiaan dalam perjalanan panjang sejarah sangat menentukan sebagai keniscayaan, syarat mutlak, *consine qua non*. Namun, sulit sekali mencari jejak kaum intelektual di Indonesia, lebih-lebih setelah kemerdekaan.³⁹ Sementara itu, Lewis A. Coser⁴⁰ mengatakan, penulis-penulis tertentu memiliki kecenderungan menggolongkan semua orang yang ber pendidikan di universitas ke dalam kelompok intelektual.⁴¹ Rikard Bagun tampaknya merupakan bagian dari ini, ia mengatakan: “Setiap orang yang melek huruf berpotensi menjadi intelektual, apalagi sarjana.”⁴²

Ron Eyerman memilih pandangan yang sama tentang hubungan intelektual dengan latar belakang pendidikannya dengan beberapa penambahan, ia mengatakan:

Kaum intelektual juga sering dihubungkan dengan kaum akademisi. Tetapi, membatasi mereka hanya secara akademis juga kurang benar. Menurut Roberto Michels, orang-orang “yang setengah terdidik”, “sebagai mahasiswa abadi”, atau “otodidak”, dapat juga disebut intelektual selama mereka bisa memahami suatu materi ilmu pengetahuan dan menerapkannya dalam bentuk pemikiran atau ide. Orang-orang yang memiliki gelar akademis, dengan demikian, belum tentu bisa dikatakan sebagai intelektual. Sebaliknya, orang-orang yang tanpa kualifikasi akademis dapat saja disebut intelektual selama bisa memanfaatkan kemampuan berpikir mereka dan memilih pengetahuan yang cukup mengenai pokok bahasan yang diminati. Filosof Inggris, Herbert Spencer, sekalipun tidak memiliki kualifikasi akademis tertentu, tetapi ia adalah seorang intelektual pada zamannya.⁴³

Akhirnya, pertanyaan yang muncul adalah apakah definisi intelektual harus dibatasi? Siswanto Masruri⁴⁴ menyebutkan, bahwa membatasi suatu konsep sedemikian rupa, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, adalah tidak mudah. Menurut Yogendra

K. Malik, istilah intelektual atau inteligensia telah diterapkan secara luas dan diberi batasan yang longgar. Menurut Malik, kaum intelektual juga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok,⁴⁵ yaitu: *Pertama*, kelompok inti, yakni yang menciptakan kebudayaan seperti pengarang atau lazimnya kita kenal konseptor. *Kedua*, kelompok yang bukan inti, yakni yang menerapkan kebudayaan seperti ahli hukum, dokter, dan lain-lain.

Edwar Shills memberikan batasan tentang intelektual, katanya begini:

Kaum intelektual adalah sekelompok orang dalam masyarakat yang dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapat, dan kemampuan yang relatif lebih tinggi dari kebanyakan anggota lainnya, menggunakan simbol-simbol dalam referensi yang umum dan referensi yang abstrak dalam persoalan kemanusiaan, kemasyarakatan dan alam. Penggunaan simbol-simbol tersebut dalam frekuensi yang tinggi. Boleh jadi merupakan sebuah fungsi kecenderungan subyektif mereka atau kewajiban-kewajiban dari peran mereka, karena penampilan mereka membutuhkan simbol-simbol tersebut.⁴⁶

Ciri-ciri definisi Shills di atas menunjukkan bahwa intelektual bukan saja orang-orang yang bergerak dalam lapangan produksi (*kreasi*) dan konsumsi (*resepsi*) karya-karya ilmu pengetahuan, keserjanaan, filsafat, teologi, sastra, seni. Tetapi, mereka juga terlibat dalam peran-peran eksekutif intelektual secara umum. Jadi, menurut Malik,⁴⁷ batasan tersebut memang bisa mencakup seluruh profesi. Sedangkan S.M. Lipset memberikan batasan tiga hal, sehingga seseorang dapat disebut intelektual,⁴⁸ yakni: (1) mereka yang menciptakan, (2) mereka yang mendistribusikan, (3) mereka yang menerapkan kebudayaan, yakni dunia manusia yang simbolik, mencakup seni, ilmu dan agama.

Sekalipun definisi Lipset tampak lebih cermat dan sempit daripada yang dikemukakan oleh Shills, tetapi menurut Malik, keduanya masih terlalu longgar karena mencakup elite budaya dan elite ilmiah. Batasan lain yang perlu dikemukakan di sini

adalah dari Robert Michels. Menurutnya, kaum intelektual adalah orang yang memiliki pengetahuan, atau, dalam arti yang lebih sempit orang yang mendasarkan penilaiannya berdasarkan perenungan dan pengetahuan bukan semata-mata berdasarkan persepsi inderawinya.⁴⁹

Syed Hussein Alatas⁵⁰ mendefinisikan kaum intelektual secara agak terperinci. Kaum intelektual dalam pandangannya adalah orang-orang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah non-material dengan menggunakan kemampuan penalarannya. Mereka itu memiliki ciri-ciri sosial sebagai berikut:

1. Direkrut dari segala lapisan masyarakat dalam proporsi yang berbeda-beda.
2. Memiliki pendukung atau penentang berbagai gerakan budaya atau politik.
3. Pekerjaan mereka pada umumnya bukanlah pekerjaan tangan dan sebagian besar menjadi penulis, dosen, penyair, wartawan.
4. Sampai batas tertentu, mereka menjauhkan diri dari masyarakat, dan selebihnya bergaul di dalam kelompoknya sendiri.
5. Mereka tidak tertarik pada segi pengetahuan teknis dan mekanis semata, ide-ide dan pemikirannya tentang agama, kehidupan yang lebih baik, seni, rasa kebangsaan, ekonomi, kebudayaan dan sejenisnya, termasuk dalam dunianya, berbeda dengan para spesialis. "Kaum intelektual" berusaha melihat hal-hal dalam perspektif yang lebih luas, saling berhubungan dan menyeluruh.
6. Kaum intelektual senantiasa menjadi bagian dari masyarakatnya.⁵¹

Berbeda dengan Syed Hussein Alatas dengan 6 kriterianya di atas, A. Mukti Ali menyebutkan tiga syarat seseorang dapat disebut sebagai intelektual, yakni:⁵² (1) Berpendidikan tinggi,

khususnya universitas; (2) terlibat dalam masalah moral dan politik; (3) mampu mengekspresikan pikiran-pikirannya tentang moral dan politik dalam kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan Prof. Dr. Selo Soemardjan⁵³ mengatakan:

Kaum intelektual adalah orang-orang yang memiliki kemampuan nalar (reasoning power) yang baik, yang tertarik kepada hal-hal rohani (things of mind) seperti kesenian atau ide-ide demi seni atau ide itu sendiri. Sedangkan inteligensia adalah bagian dari komunitas yang memang dapat dipandang sebagai intelektual serta memiliki kemampuan untuk berpikir bebas.⁵⁴

Tetapi, pernyataan Selo Somardjan tidak sepenuhnya disetujui oleh Mochtar Buchori, yang menyatakan bahwa:

Kaum intelektual adalah mereka “yang telah” mengalami pendidikan tinggi dan modern, atau para spesialis yang profesional. Sementara itu, kaum intelektual adalah mereka yang tidak tertarik pada segi pengetahuan semata, karena dunia pemikiran mereka yang luas sekali (agama, seni, sosial, politik). Dengan perkataan lain, kaum inteligensia adalah kaum spesialis, sedangkan kaum intelektual adalah kaum generalis.⁵⁵

Sedangkan Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro⁵⁶ secara sederhana membagi kaum intelektual ke dalam dua bagian, yakni pekerja intelektual (*intellectual worker*) dan intelektual itu sendiri. Seorang pekerja intelektual menurut Widjoyo adalah seorang tukang yang kemampuannya terletak dalam keahlian dan otaknya, sehingga dapat disamakan dengan seorang pekerja atau tukang yang mempunyai keterampilan tangan. Ciri dari pekerja intelektual ini sama dengan tukang yang menghasilkan sesuatu berdasarkan keahlian atau otaknya dan kemudian tidak peduli untuk apa hasil tadi digunakan. Sama seperti tukang panci atau pandai besi yang tidak peduli untuk apa panci dan pisau tersebut digunakan.

Sementara itu, intelektual adalah seorang pengkritik masyarakat, seorang yang pekerjaannya mengidentifikasi,

menganalisa dan dengan jalan demikian membantu mengatasi rintangan-rintangan yang menghambat tercapainya suatu tatanan masyarakat yang lebih baik, lebih berperikemanusiaan dan lebih rasional. Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro menekankan bahwa intelektual adalah hati nurani masyarakat. Intelektual adalah penggugah hati masyarakat, menunjukkan apa yang tidak pada tempatnya, memberi peringatan sebelum terjadi hal-hal yang tidak benar dan membantu menunjukkan arah perkembangan yang benar.⁵⁷

Pandangan selanjutnya datang dari Siswanto Masruri, ia merumuskan, kaum intelektual adalah orang-orang yang dengan atau tanpa latar belakang pendidikan tertentu mampu menciptakan, memahami suatu ilmu pengetahuan dan menerapkannya dalam bentuk pemikiran atau ide, dalam berbagai aspek kehidupan (terutama persoalan moral dan politik) secara simbolik, rasional dan kreatif serta bebas bertanggung jawab atas dasar nilai-nilai esensial pandangan hidup mereka. Kreativitas merupakan hal yang sentral dalam hampir setiap dimensi intelektual.⁵⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan kreatif di sini adalah kelompok yang paling dinamis dalam strata intelektual yang luas karena mereka itu pembaharu, berada di baris depan dalam perkembangan budaya... Karakteristik orientasi kaum intelektual yang umum ini secara kritis merupakan sesuatu yang bernilai, suatu kecenderungan untuk menghargai, dengan istilah umum yang diminati, konsepsi ideal yang diajarkan untuk dipraktikkan secara universal.⁵⁹

Dengan demikian, penekanan pada aspek pembaharuan juga merupakan bidang garapan kaum intelektual. Namun, tidak setiap intelektual adalah pembaharu. Karena banyak juga di antara mereka yang hanya “menyatakan kembali” dan menyebarluaskan aspek-aspek budaya yang pernah ada. Secara relatif, sebenarnya ada beberapa pembaharu yang murni yakni individu-individu yang sebenarnya menggunakan energi

mereka dalam berkreasi.

Dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara, peran kaum intelektual juga seringkali menjadi kajian yang hingga kini tetap relevan. Sehingga perdebatan seputar intelektual dan peran yang harus dimainkan dalam konteks bermasyarakat dan politik memang hampir tidak pernah usai. Dalam sejarah perkembangan sains, seringkali disebutkan bahwa pada abad pertengahan, pernah terjadi perselingkuhan antara penguasa dan ilmuwan.

Fakta sejarah ini menarik diangkat di tengah kondisi ketika tidak sedikit kaum intelektual di negeri ini yang belakangan disinyalir menjadi bagian dari kekuasaan. Karena menjadi bagian dari kekuasaan itu, maka konsekuensinya adalah melakukan pembenaran terhadap tindakan penguasa, meskipun tindakan penguasa itu tidak sejalan dengan kepalanya. Kendati-pun, dalam tataran akademis masih terjadi perdebatan me-nyangkut istilah dan hakikat *the knowers*, seperti intelektual, ilmuwan, dan filosof.⁶⁰

Asumsi umum yang berkembang di kalangan masyarakat adalah bahwa intelektual semestinya tidak terlibat dalam aktivitas politik, terlebih jika aktivitas itu adalah dalam bentuk penciptaan kerangka ilmiah guna mendukung tindakan penguasa. Karena intelektual seringkali didefinisikan sebagai sekelompok manusia pencinta ide dan gagasan. Idealnya, intelektual adalah komunitas *knowers* yang dalam tindakan-tindakan dan refleksinya bermuara pada pemihakan kepada masyarakat.

Pada poin inilah, mesti dibedakan antara kebenaran politik dan kebenaran komunal. Penguasa, di satu sisi, memiliki logika kebenaran politik yang tidak begitu saja bisa diterima oleh masyarakat yang di dalam dirinya terdapat logika kebenaran komunal pada sisi yang lain. Karena logika kebenaran yang berbeda ini, maka ada jarak yang membentang cukup lebar antara kebenaran komunal dan kebenaran politik. Sebuah

kebenaran komunal, ketika dikomunikasikan kepada penguasa, akan dipersepsi secara negatif oleh penguasa, karena dianggap tidak memihak kekuasaan.

Sebaliknya, ketika kebenaran politik disampaikan kepada publik, maka yang terjadi adalah tindakan reaktif dari masyarakat terhadap kebenaran itu. Pada posisi pertentangan antara kedua model kebenaran inilah, kaum intelektual sebenarnya memainkan peran yang sangat penting. Jika diposisikan, kaum intelektual berada di antara kebenaran komunal dan kebenaran politik. Pada gilirannya, peran kaum intelektual adalah memediasi dan menjadi kelompok artikulator yang mengkomunikasikan kebenaran komunal kepada penguasa dan kebenaran politik kepada publik. Karena hakikat kaum intelektual yang tidak berpihak kepada partikularitas kebenaran tertentu, maka ia tidak boleh terlalu condong ke-pada satu kebenaran tertentu

Karena itu, ketika kaum intelektual lebih memihak kepada tindakan penguasa ketimbang tindakan publik, sebenarnya mereka tengah mendukung kebenaran politik, di satu sisi, dengan tidak mempertimbangkan kebenaran komunal di sisi yang lain. Kebenaran dan persepsi tentang kebenaran memang sangat bergantung kepada artikulasi. Sehingga sebuah kebenaran politik yang “benar” bisa menjadi salah karena artikulasi yang salah. Ringkasnya, bukan persoalan apakah kaum intelektual memihak kebenaran politik ataukah kebenaran komunal, sepanjang itu dimaksudkan sebagai tindakan artikulasi, maka kaum intelektual berada pada jalur yang benar.

Dalam perkembangan terbaru, khususnya setelah reformasi 1998 yang dianggap sebagai titik tolak Indonesia menuju negara demokrasi, muncul kecenderungan adanya kesimpang-siuran tujuan dari kalangan ilmuwan, politisi, dan pengusaha. Thee Kian Wie⁶¹ mengatakan:

Tugas cendekiawan seharusnya adalah mencari kebenaran (search the truth) telah bercampur aduk dengan tujuan politisi, yaitu mencari kekuasaan (search the power).⁶²

Thee Kian Wie juga menjelaskan bahwa ilmuwan yang merupakan cendekiawan tujuan utamanya adalah mencari kebenaran. Politisi tujuan utamanya adalah mencari kekuasaan dan pengusaha tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Kalau peranan ini dikaburkan atau diputarbalikkan akan berbahaya sekali.⁶³

Sementara Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri dalam penjelasannya mengenai intelektual dalam kebudayaan Barat memaparkan bahwa individu dalam masyarakat Arab ditentukan dan terformulasi dalam lima unsur, yaitu: (1) ia merupakan salah seorang dari individu-individu rakyat, (2) terafiliasi pada golongan elite atau golongan masyarakat awam, (3) menerima pemberian atau pembayar pajak (*ghanimah*), (4) terlindungi oleh suku atau berlindung pada keyakinan (*aqidah*), (5) hidup di pedesaan (pedalaman) atau dalam perkotaan.

Artinya, bahwa “individu” dalam peradaban Arab-Islam dalam hubungannya dengan “masyarakat, kelompok” tidak masuk sebagai sebuah satu kesatuan, karena yang disebut terakhir (masyarakat) tersebut tidak mengatasi lima unsur pembentuk di atas, tetapi setiap unsur dari kelima unsur tersebut dapat mengganti atau menempati posisi masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Ia mengganti masyarakat dalam memengaruhi individu. Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri mengatakan:

Setelah kami ringkaskan bentuk-bentuk afiliasi sosial yang menjadi penentu persoalan individu di tengah masyarakat, sekarang kita dapat membicarakan “intelektual” yang membentuk individunya memiliki ciri-ciri khasnya dan kelebihan-kelebihannya.

Pertanyaan yang muncul ialah di manakah posisi “intelektual” di antara kelima unsur atau variabel tersebut? Jawabnya jelas bahwa:

1. Intelektual berafiliasi pada rakyat, dengan demikian, khalifah, seorang hakim dan seorang sekretaris negara bukanlah termasuk intelektual meskipun mereka berpengetahuan.
2. Intelektual adalah termasuk kelompok elite (*khash*) karena profesinya di bidang pemikiran atau wacana memberinya suatu kelebihan, kekuatan dan kehormatan, sebab dia mampu menyedot perhatian pendengar, publik dan para pengikut lainnya.
3. Intelektual pada umumnya bekerja dengan pikirannya, karenanya, ia menghidupi diri dari pemberian (honor atau gaji) yang berarti pula ia tidak mengeluarkan pajak.
4. Meskipun senjata intelektual adalah pikiran dan perkataannya, ia berlindung pada akidah, berpegang teguh pada penalaran, bukan pada suku. Hal ini apabila memang dia berasal dari golongan yang sama sekali tidak memiliki suku seperti golongan “mawali” (budak yang telah dimerdekan) atau yang sejenisnya.
5. Terakhir, boleh jadi intelektual karena memiliki pengetahuan maka dia adalah orang kota, bukan orang pedalaman (desa), sebab tumbuhnya berbagai ilmu pengetahuan adalah seiring dengan munculnya berbagai keramaian (pembangunan) dan kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun.

Apabila batasan-batasan ini berlaku pada umumnya para ilmuwan: para ahli fikih, ahli hadits, para ahli nahwu, para sejarawan dan seterusnya, maka intelektual menonjol melebihi yang lain semuanya sebab dia tidak menjadikan akidah semata-mata sebagai kerangka berafiliasi dan berlindung diri, tetapi dia menceburkan individunya di dalamnya, mengatasinya serta mengubahnya menjadi pendapatnya sendiri yang dengannya

dia memiliki kelebihan dan dikenal.

Dengan kata lain, intelektual memandang akidah bukan semata-mata sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai gagasan dan ekspresi dari gagasan itu. Dengan demikian, dia berubah menjadi pembicara dan penyusun makalah, lebih dari itu, dia juga menyampaikan gagasan dan makalahnya itu di hadapan publik, menjadikan struktur sosial yang membentuk publik tersebut sebagai obyek pembicaraannya.

Dia berbicara tentang hubungan pemimpin dengan masyarakat, hubungan kelompok elite dengan khalifah, di satu sisi, dan khalifah dengan masyarakat awam di sisi lain. Terkadang dia juga berbicara tentang pajak, pemberian, suku dan harta rampasan perang (*ghanimah*), tetapi semua itu dia bicarakan melalui akidah, wacananya dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kata lain, intelektual menggumuli kebudayaan (termasuk di dalamnya masalah politik) dengan mediasi akidah, menggunakan ketentuan (keputusan)-nya, konsep-konsepnya dan teknik penyampaiannya.

Mengenai sumber pengetahuan seorang intelektual, Al-Jabiri menjelaskan bahwa intelektual adalah orang, langsung atau tidak, yang berpikinya berangkat dari pemikiran cen-dekiawan sebelumnya yang mengilhaminya, mengikuti metode-nya, mengulangi (pemikirannya), menentangnya, bahkan melampauinya dan seterusnya. Tidak ada seorang intelektual yang berpikir dari nol. Aktivitas berpikir adalah memikirkan suatu obyek (tertentu). Sebuah obyek dapat berupa pemikiran, fakta empirik yang natural, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Apabila yang menjadi obyek (pemikiran) adalah berupa pemikiran, pandangan dan berbagai gagasan yang pernah dimunculkan oleh para cendekiawan di masa lampau atau cendekiawan kontemporer, maka orang yang berpikir tentang obyek tersebut berada dalam otoritas pemikiran itu. Sementara apabila yang menjadi obyek ialah data empiris, maka cara berpikinya juga memanfaatkan konsep-konsep, pandangan-

pandangan dan mekanisme berpikir yang mau tidak mau terkait dengan otoritas pengetahuan tertentu pula.

PRAMOEDYA ANANTA TOER

Sementara itu, Pramoedya Ananta Toer⁶⁴ mencoba melihat kaum intelektual lebih jauh. Seperti Syari'ati, Pramoedya ber-usaha mendefinisikan kaum intelektual dengan rincian-rincian tugas yang harus diembannya sesuai dengan tanah tempat ia berada.⁶⁵ Pram menjelaskan bahwa kaum intelektual bukan sekadar bagian dari bangsanya. Ia adalah nurani bangsanya, karena bukan saja dalam dirinya terdapat gudang ilmu dan pengetahuan, terutama pengalaman kebangsaannya. Dengan isi gudangnya, ia dapat memilih yang baik dan yang terbaik untuk dikembangkan. Sehingga ia memiliki dasar dan alasan paling kuat untuk menjadi tegas dalam memutuskannya atau tidak. Menurut Pram, Hinduisme telah membagi masyarakat dalam kasta-kasta, yang relevansinya masih terasa. Kaum intelektual berada dalam Kasta Brahmin. Hanya bedanya kaum Brahmin modern menempati kedudukan sebagai jembatan pada hari depan. Pramoedya cenderung menempatkan kaum intelektual Indonesia dan Dunia Ketiga dalam pengertian ini.

Mengenai sikap dan peran intelektual, Pram menjelaskan bahwa sikap adalah bicara tentang tempat berdiri, bicara tentang tempat berdiri adalah juga bicara tentang jarak yang telah ditempuh. Tempat berdiri pada gilirannya hanyalah bagian dan medan yang tak terbatas. Dari tempat berdiri, orang meng-hadapi jarak yang masih harus ditempuh. Sikap adalah faktor dalam yang akan menentukan bagaimana jarak di depan akan ditempuh. "Akan" dalam kamus politik diucapkan: "bagaimana sebaiknya?", karena itu soal operasional. Berdasarkan materi yang telah dikedepankan, sikap yang sepatutnya diambil oleh kaum intelektual menurut Pramoedya adalah:

1. Meninggalkan sama sekali budaya kuburan dan mengambil penalaran sebagai satu-satunya jalan membina hari depan, dan dengan demikian secara aktif seorang intelektual akan membangun budaya kebangsaan yang modern.
2. Tetap kritis terhadap potensi pengaruh budaya suku yang kalah dan mengajak kalah. Maksudnya perasaan selalu merasa di bawah bangsa lain, hal ini merupakan penyakit akibat kolonialisme yang biasa terjadi pada negara yang pernah dijajah.
3. Berlatih berani untuk mendapatkan keberanian intelektual. Karena tanpa keberanian intelektual, kaum intelektual sudah lumpuh sebelum memutuskan. Sejalan dengan lahirnya bangsa Indonesia hanya karena keberanian revolusioner, maka tradisi keberanian revolusioner juga merupakan unsur yang menentukan dalam kehidupan kaum intelektual Indonesia.
4. Sebagai intelektual Indonesia, tempatnya adalah pertamanya sebagai manusia Indonesia, sebagaimana budaya Indonesia. Manusia budaya Indonesia berada dalam jajaran Dunia Ketiga, sedang Dunia Ketiga ada karena dihadapkan dengan Barat. Kaum intelektual Indonesia yang terlepas dari hubungan dengan Dunia Ketiga dan tidak berhadapan dengan Barat sebagai produk sejarah akan kehilangan sebagian dari kemampuan penalarannya yang obyektif. Karena tanpa kesadaran, ia akan terlepas dari ikatan sejarah.
5. Barat menjadi bongkak kuasa, bongkak kemajuan dan bongkak kemakmuran sehingga menjadi seperti sekarang ini dengan produk terbaiknya dalam bentuk demokrasi parlementer dan hak asasi adalah atas biaya seluruh Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.
6. Maka dari pengalaman sejarah ini, kita punya hak menuntut dari Barat pertanggungjawaban moral dengan konsekuensinya yang wajar dan manusiawi. Kaum intelektual Indonesia karenanya memilih tanggung jawab kesejarahan.

7. Atas dasar ini, Barat sudah sepatutnya melepaskan pandangan menara-gadingnya yang menganggap Dunia Ketiga harus menjadi pengikutnya. Sebaiknya, Barat merobohkan menara-gadingnya dan menggantinya dengan pengertian yang lebih manusiawi dalam membantu Dunia Ketiga untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan robohnya menara gading itu pula, bisa diharapkan Barat melepaskan pandangan Baratnya dan standar Baratnya dalam menilai Dunia Ketiga dengan perkembangannya.
8. Kaum intelektual Indonesia dalam berlatih memperkuat keberanian intelektual dan keberanian moral juga dituntut untuk selalu membuat perhitungan dengan masa lalunya sebagai bangsa. Belajar untuk menghadapi Barat bukan sebagai superior, tetapi sebagai lembaga yang dalam beberapa abad belakangan ini menerima piutang paksa dari Dunia Ketiga. Kaum intelektual Indonesia, sebagai manusia budaya Indonesia, sudah sepatutnya mempunyai keberanian intelektual dan keberanian moral terhadap Barat untuk menuntut dari Barat segala yang terbaik dan berguna, teknologi dan sains, bukan sebagai hadiah kemanusiaan seperti halnya dengan Van Deventer dengan politik etiknya, tetapi semata-mata karena dengan kebudayaan purbanya, dengan budaya sukunya yang kalah dan dikalahkan, dengan budaya Indonesia yang baru seumur jagung, terutama juga dengan budaya Barat.
9. Praktiknya, terus-menerus yang menjamin lahirnya *kedibyaan* (*genialitas*) sehingga keintelektualan bukan tinggal jadi atribut sosial, tapi *faaliah*, fungsional, dan membikinnya patut jadi penalaran dan nurani kebangsaan.
10. Akibat dari sikap yang diambil terhadap Barat menjadikan kaum intelektual Indonesia tidak bisa lain pada menata kembali dan mengorganisasi secara sadar perasaan pikirannya dalam membangun lebih lanjut budaya Indonesia dalam segala aspeknya. Justru di sini peran yang menentukan

kaum intelektual Indonesia.

11. Kekuatan peradaban Barat yang mampu berkembang serta bertahan berabad dalam sejarah umat manusia sudah sepatutnya dipelajari secara kritis. Pemberiannya pada umat manusia tak terhingga banyaknya. Sebaliknya, kerusakan yang diakibatkannya pada Dunia Ketiga juga tak terhingga banyaknya. Kita tahu bahwa kekuatannya terletak pada kekuatan individu Barat, sedang pada gilirannya individu Barat diasuh oleh demokrasinya dan diayomi (dibantu) oleh hak-hak asasinya, yaitu individu yang oleh Chairil Anwar dinyanyikannya sebagai *aku... yang dari kumpulan - nya terbuang*, karena menolak sikap *membebek* (sifat mengekor). Dari pelajaran Barat, Indonesia juga bisa kuat dengan individu manusia Indonesia yang kuat, sehingga dalam konteks pembicaraan kita menjadilah *aku... yang dengan kumpulannya berpadu*, yang untuk itu telah di-sediakan pegangan dan medan oleh Pancasila.
12. Terhadap Dunia Ketiga sebagai jajaran sendiri, sebagai *seperasaan* (mempunyai nasib sama) dalam sejarah, sebagai rekan seiring dalam memecahkan masalah-masalah yang diwariskan oleh kesamaan historis, menanggalkan sikap tak acuan yang terkunci, sedang pandangan bahwa diri lebih maju dari yang lain adalah suatu kemewahan. Ke-sepakatan antara Dunia Ketiga akan mempercepat lahirnya kesatuan bahasa. Pengalaman berabad dalam praktik *divide et impera* (pecah dan perintah) Barat bukan tidak menjadi watak peradaban dalam menghadapi dunia non-Barat. Karena itu, semangat Dunia Ketiga, atau yang pernah juga disebut semangat Asia-Afrika, kemudian menjadi semangat Asia-Afrika-Amerika Latin, bukan semestinya menjadi semakin pudar untuk kerugian Dunia Ketiga. Soekarno telah melampaui masanya waktu ia—bukan sekadar gagasan—mencoba mewujudkan Ganefo dan Conefo, tetapi dalam situasi dunia sekarang ini dengan masalah

Timur-Barat, Utara-Selatan, Dunia Ketiga—dunia selebihnya yang semakin akut dengan semakin mengecilnya dunia kita, kesediaan Dunia Ketiga jelas merupakan kebutuhan. Sekalipun, ya, sekalipun, perkembangan Dunia Ketiga dalam dasawarsa terakhir memerlukan batasan dan rumus-an baru.⁶⁶

13. Peran kaum intelektual Indonesia sudah jelas. Gagasan perjuangan untuk melahirkan bangsa Indonesia diawali dengan kesadaran akan komitmennya dengan bangsanya, dengan kejelian dan kepiawaiannya tentang peran bangsanya. Gagasan dan praktik terus-menerus melahirkan Indonesia merdeka. Dengan praktik intelektual, keintelektualan menjadi kuat, dengan praktik otot (tenaga), otot menjadi kuat. Seindah-indah gagasan yang tidak dicoba-wujudkan oleh otot dan dengan otot akan berubah menjadi roh-roh yang gontayangan (berkeliaran), roh jahat yang menjadikan orang jadi munafik. Sepertinya, Pram hendak mengatakan mereka yang tahu tapi tidak berbuat adalah munafik, atau intelektual munafik.
14. Kaum intelektual, sebagai nalar dan nurani bangsa adalah berkasta Brahmin. Dalam pengertian modern, kemodernan selalu senyawa dengan demokratis. Dengan demikian kehilangan kedudukannya dari hierarki Hindu dan berpikir dengan inteleknya secara alami, tidak berbeda dari fungsi-fungsi kasta lain dalam masyarakatnya, yakni melakukan proses bio-kimia. Tetapi proses biokimia yang tahu peran. Untuk bisa tahu tentang peran sebelumnya, orang dituntut tahu sangkarnya, tentang asalnya, tentang historisnya.

Pemikir lain, Mochtar Pabottinggi⁶⁷ memberikan beberapa pernyataan menarik yang berhubungan dengan pengertian intelektual yang dikaitkan dengan kebudayaan Bugis. Mochtar Pabottinggi mengatakan tidak pantas dia disebut cendekiawan atau intelektual, dia mengatakan:

Saya melihat, ada masalah dalam istilah cendekiawan. Cendekiawan dalam pemahaman saya adalah orang yang bijak berkata-kata; orang yang pandai bersilat lidah—dalam bahasa Inggris “witty”. Dulu, mereka berada di sekeliling raja.

Begitu pula dengan istilah intelektual. Dalam pemahaman saya, tidaklah tepat orang menyebut saya sebagai cendekiawan atau intelektual. Saya lebih pas menggunakan istilah dari tradisi Bugis. Dalam tradisi Bugis, orang dibagi dalam beberapa kategori. Ada //ata,, yaitu budak. Lalu, //to maradeka//, orang kebanyakan yang merdeka. Dan di atasnya ada //to panrita// yang berasal dari kata Bugis //makkita// atau //marita//, yakni orang yang melihat, bersaksi, dan menyimak keadaan.

Saya merasa, istilah ini lebih dekat dan pas dengan apa yang saya pahami tentang diri saya. Kalau dikatakan bahwa saya menganut romantisme cendekiawan, agaknya itu bernada negatif, seakan saya tidak realistis. Sekali lagi, saya menempatkan diri sebagai //to panrita//. Ini bukan romantisme. Fungsi //to panrita// memang betul.⁶⁸

Mengenai realitas cendekiawan di Indonesia Mochtar Pabottingi berpendapat:

Tak gampang menempatkan mereka. Kalau saya melihat mereka dari khazanah orang Bugis, //to panrita// itu memang masih sedikit. Tapi, sepanjang sejarah orang-orang yang bersedia bersaksi dengan risiko keselamatan mereka sendiri, memang tidak banyak. Itu hukum sejarah. Hukum besi peradaban. Semua orang lebih gampang mencari keselamatan-nya, mempertahankan kesenangannya.⁶⁹

PENGKHIANATAN INTELEKTUAL DAN INTELEKTUAL DURHAKA

Para pengkhianat intelektual biasa dialamatkan kepada mereka yang menggunakan pengetahuannya untuk meraih semua kepentingannya tanpa pernah memedulikan nilai-nilai ke-benaran yang ada di hadapannya. Memang, tantangan terberat seorang intelektual adalah menggunakan ilmunya untuk mengatakan kebenaran. Menurut filosof Goethe, intelektual kadang juga bergerak ke jalan yang salah, hingga di sini masih dapat dimaklumi, namun menjadi tidak lazim lagi jika intelektual dengan kesadaran atau sengaja memilih jalan yang salah.

Sejarah memberi label intelektual seperti ini dengan pengkhianat atau pengkhianatan intelektual. Pengertian ini memang masih umum.

Syafi'i Ma'arif sendiri mengakui bahwa apa yang dimaksud dengan pengkhianatan intelektual memang sulit diformulasikan secara ketat, namun secara umum menurut Syafi'i, pengkhianatan dapat diarahkan bagi mereka yang telah berdosa dan berdusta, serta menyebabkan bangsa ini menjadi rusak dan terpuruk sampai batas yang jauh. Syafi'i menegaskan hal itu dalam pidato kebudayaannya bertajuk "Pengkhianatan Kaum Intelektual Indonesia: Refleksi Kebudayaan" di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (22-11-2005).

Julien Benda dalam bukunya berjudul *Pengkhianatan Intelektual (La trahison des clercs)* membedakan dua tipe intelektual. *Pertama*, intelektual benar yang bekerja untuk dan bagi kebenaran universal, dia tidak menjadi hamba pada kepentingan politik tertentu, apalagi demi hanya untuk makan. Seorang intelektual adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab sebagai pejuang dan penjaga kebenaran. *Kedua*, intelektual palsu yang telah mengkhianati filosofi keintelektualan mereka dan telah melanggar standar-standar keintelektualan serta terlibat dalam politik praktis yang menjadikan kebenaran dan keadilan ditentukan dan dikendalikan oleh asas ke-manfaatan. Intelektual jenis kedua ini banyak dijumpai Julien Benda pada masanya dan melanda kebanyakan intelektual modern. Mereka inilah yang disebut sebagai pengkhianat.⁷⁰

Bagi Julien Benda, politik harus dijauhi oleh kalangan intelektual, sedangkan Karl Manheim tidak mempersoalkan intelektual dalam bidang politik, lalu bagaimana konteks saat ini? Tentunya tidak ada persoalan dengan intelektual yang berpolitik, jadi caleg, pengurus parpol, dan lain-lain asalkan intelektual tersebut tetap berpihak pada kebenaran. Pengabdian pengetahuannya buat kesejahteraan rakyat, bukan demi me-

muaskan kepentingan-kepentingan korup dan segelintir orang yang akhirnya menghancurkan masa depan bangsanya. Kejatuhan Soekarno dan Soeharto, menurut Syafi'i Ma'arif, juga disebabkan oleh para intelektual yang berada di sekitarnya yang memiliki mental ABS (Asal Bapak Senang), mereka takut memperingatkan atasan, sebaliknya mereka selalu memuji atasan.⁷¹

Syafi'i sepertinya hendak mengatakan juga bahwa intelektual yang bersikap ABS juga bagian dari pengkhianatan intelektual. Artinya, para intelektual yang mengikuti kepentingan lembaga donor, padahal hal tersebut menguliti kedaulatan bangsanya juga bagian dari pengkhianatan intelektual. Tambahan pandangan disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X), menurutnya ABS ini bagian dari persoalan kebudayaan, konkretnya menurut HB X telah terjadi tafsir yang salah kaprah terhadap Budaya Jawa yang menyelinap ke segenap kehidupan bangsa. Raja Jawa ini mengatakan:

Pembangunan yang mengesampingkan dimensi kebudayaan akan membawa masyarakat pada tiga kesalahpahaman umum, yaitu: (1) tidak mengetahui, (2) salah asumsi, dan (3) salah penerapan⁷². Akibat dari tidak mengetahui (secara tepat) pemaknaannya, pembangunan tidak tepat sasaran, malahan cenderung terbalik. Misalnya, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya lewat *tepa-sarira*, maknanya jadi jungkir balik seperti disebutkan tadi.

Tidak mengetahui, salah asumsi dan salah penerapan kait-mengait. Misalnya, *mikul dhuwur mendhem jero*, makna ajarannya adalah menghormati leluhur, terlebih kepada orangtua kita yang sudah meninggal. Agar supaya kita tidak perlu mengungkit kekurangan atau kesalahannya selama masih hidup, kecuali hanya mengingat sifat baik dari almarhum atau almarhumah. *Mikul dhuwur mendhem jero* jadi salah kaprah, juga dikenakan bagi orang yang masih hidup, khususnya pemimpin. Kalaupun dia melakukan tindak penyelewengan, hendaknya dimaafkan dan dilupakan. Rakyat dituntut untuk *mikul dhuwur* harkat dan martabat pemimpin dan *mendhem jero* segala tindakan yang tak terpuji yang dilakukan olehnya.⁷³

Pernyataan HB X seirama dengan Mochtar Pabottinggi. Sebagaimana HB X yang orang Jawa, Mochtar yang seorang Bugis juga melihat pengkhianatan intelektual dari sudut pandang dia sebagai orang Bugis. Mochtar mengatakan:

Tergantung bagaimana seseorang memahami istilah cendekiawan. Kalau cendekiawan adalah orang yang selalu hendak mendekati ke istana, itu bukan pengkhianatan. Memang begitulah cendekiawan.⁷⁴

Sedangkan mengenai peran cendekiawan dalam struktur sosial tradisional Indonesia, demikian yang diungkapkan oleh Mochtar Pabottinggi:

Barangkali memang untuk menyenangkan sang raja, sejumlah karya dalam khazanah kebudayaan Jawa yang memuja raja setinggi langit, misalnya, memang merupakan kerja cendekiawan. Ini berbeda dengan khazanah Bugis. Naskah-naskah Bugis sedikit sekali berisi puji-pujian kepada raja. Bahkan tidak ada. Kalau mereka mau mencatat suatu peristiwa kerajaan, //to panrita// menulis apa adanya. Pedomannya sangat sederhana: kita jangan sampai melebihi-lebihkan sesuatu, karena nanti orang akan mengira kita hebat sekali. Padahal tidak. Lalu, kita juga jangan mengurang-ngurangi, merendah-rendahkan, karena generasi yang akan datang mengira kita rendah. Padahal tidak. Jadi, prinsip //to panrita// itu adalah apa adanya. Saya sangat menjiwai itu.⁷⁵

Penjelasan Sultan dan Mochtar Pabottinggi ini kian memperluas pemahaman kita bahwa pengkhianatan intelektual juga disebabkan oleh faktor salah kaprah memahami budaya. Namun intinya, baik HB X maupun Mochtar keduanya telah memberikan catatan bagi intelektual yang berada di sekeliling pemimpin. Karena tidak jarang seorang pemimpin jatuh karena intelektual di belakangnya sungkan (*pakewuh*) memperingat - kan. Nelson Black dalam bukunya yang berjudul *Kapan Sebuah Bangsa Akan Mati* menyatakan bahwa nilai-nilai akhlak, ke-manusiaan, kemakmuran ekonomi, dan kekuatan sosial serta budaya merupakan sederet faktor keunggulan sebuah masya-

rakat yang humanis.

Sebaliknya, kebejatan sosial dan budaya merupakan faktor penyebab kemunduran sebuah peradaban. Ia juga menulis, “Kebejatan sosial akan tampak pada pengingkaran nurani atas konstitusi dan instabilitas ekonomi.” Edward Gibbon menilai bahwa kebobrokan moralitas adalah penyebab dari kehancuran sebuah peradaban. Gibbon menulis, “Menyerahnya para pejabat di hadapan penyelewengan budaya dan penyalahgunaan kekuasaan (lihat kembali pernyataan Sultan HB X di atas) telah menyebabkan sebuah bangsa harus bertekuk lutut di hadapan bangsa lain.” Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pandangan senada juga diungkapkan oleh Fadjroel Rahman, ia mengingatkan para intelektual yang berdiri di belakang Pemerintah untuk kritis. Fadjroel menamai mereka dengan “intelektual istana”, berikut pernyataan Fadroel:

Para intelektual istana seharusnya jujur mengaku berpihak pada kekuatan ekonomi-politik dominan. Pengakuan ini penting sebab pengkhianatan intelektual harus dinilai bukan lagi karena melanggar syarat ideal intelektual Julien Benda (*La Trahison des Clercs*, 1927), tetapi dinilai dari tanggung jawab keberpihakannya secara moral, politik, dan hukum. Publik akan menilai, apakah mereka akan seperti intelektual Orba, selama 32 tahun berpartisipasi menyengsarakan rakyat, tetapi melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab secara moral, politik, dan hukum, ketika Orba runtuh. Karena itu, berani beriklan, berani berpihak, berani bertanggung jawab di kemudian hari.⁷⁶

Pandangan Fadjroel seakan memberikan legitimasi kepada intelektual untuk berpolitik, tentunya dengan berbagai catatannya. Hal inilah yang menjadikan sebagian intelektual seringkali menjadi oposan bagi intelektual yang lain, meminjam istilah Fadjroel Rahman intelektual istana *versus* intelektual di

luar istana. Namun, sejatinya ini adalah upaya untuk memahami intelektual sebagai kelompok oposisi terhadap pengkhianatan, penindasan dan perampokan sosial. Ini menjadi penting untuk kita cermati lebih mendalam, karena proses intelektual akan gagal jika fakta sosial tidak searah dengan cara pandang universal intelektual.

Padahal, seorang intelektual itu, menurut Edward Said dalam *Reith Lectures*-nya di BBC tahun 1993, adalah individu yang dikaruniai bakat untuk merepresentasikan, mengekspresikan dan mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi dan pendapatnya kepada publik. Ia tidak harus dan tidak boleh menjilat kepada siapa pun, karena itu adalah bentuk penghambaan intelektual. Intelektual adalah orang bebas, ia bebas mengapresiasi, mengkritik, menghujat, dan melawan perampokan sosial dalam masyarakat tanpa beban dan rasa takut akan ancaman karier atau kekuasaan.

Sedangkan kejatuhan Soekarno dan Soeharto, yang menurut Syafi'i Ma'arif adalah akibat para intelektual di sekitarnya bermental ABS, harus dijadikan refleksi bagi intelektual hari ini. Sejarah harus dijadikan cermin, karena itulah Syed Husein Alatas mengatakan minat intelektual melibatkan masa lampau, kini, dan masa depan...

Syafi'i juga menekankan agar intelektual, di samping terpelajar, dia harus mempunyai kepekaan dan komitmen terhadap masalah-masalah besar yang menyangkut manusia dan kemanusiaan, tanpa diskriminasi, intelektual wajib resah saat menyaksikan penindasan, pengkhianatan. Dalam ungkapan lain, hati nuraninya harus hidup, peka, dan berfungsi prima. Sekalipun dia misalnya seorang warga suatu negara, wawasan kemanusiaannya haruslah mondial, tidak dibatasi oleh dinding-dinding politik sebuah bangsa dan negara tertentu. Dengan demikian, seorang intelektual sejati

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengkhianatan intelektual hanya dilakukan oleh intelektual karena namanya

adalah pengkhianatan intelektual bukan pengkhianatan politisi atau pengkhianatan pengusaha? Hal ini menarik untuk di-carikan jawabannya. Jika kita merujuk pada teori Gramsci bahwa setiap orang adalah intelektual, maka setiap orang pada hakikatnya berpotensi melakukan pengkhianatan intelektual.

Syafi'i Ma'arif juga mengatakan bahwa pengkhianatan itu bukan hanya dilakukan oleh kaum intelektual, tetapi juga telah merambah pada tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang memiliki signifikansi peran dalam menentukan kemajuan masa depan bangsa, seperti kaum ulama, pemuka agama dan pelaku bisnis, dan para pejabat negara yang bersentuhan langsung dengan proses pengambilan kebijakan publik dan politik.

Pendapat seorang sutradara kondang Indonesia kiranya bisa untuk menjelaskan hal ini, Garin Nugroho mengatakan:

Terjadinya pengkhianatan atas kodrat yang merupakan talenta bangsa diduga kuat sebagai pemicu utama berbagai masalah mendasar yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Kodrat dan talenta bangsa yang "dikhianati" itu, antara lain soal agrikultur dan multikultur. Kodrat agrikultur "dikhianati" dengan pemaksaan pendirian industri-industri, sementara kodrat multikultur "dikhianati" dengan melakukan penyeragaman budaya di berbagai bidang.

Hal ini dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan oleh sebuah pemerintahan tanpa persetujuan rakyat. Garin mencontohkan, penyeragaman penanaman padi di Sumba yang membuat kultur penanaman ilalang menjadi terdesak. Padahal, bagi masyarakat Sumba, ilalang memiliki fungsi amat penting, baik sebagai bahan upacara, bahan atap rumah, maupun seni kerajinan. Begitu ilalang terdesak, masyarakat yang terbiasa dengan kultur itu pun mulai kebingungan.⁷⁷

Sedangkan Pradana Boy memberikan sebuah istilah intelektual durhaka⁷⁸ bagi kaum intelektual yang menuliskan, mengatakan, membenarkan sebuah ketimpangan, dia menuliskan:

Mitos ilmuwan durhaka adalah sebuah konteks di mana para ilmuwan bersatu padu dalam memroduksi gagasan-gagasan yang justru memihak penguasa. Sederhananya, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah melegitimasi setiap tindakan penguasa, sehingga tindakan itu terkesan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan... sehingga Arthur M Melzer dalam *Public Intellectual: Between Politics and Philosophy* (2003) menyimpulkan bahwa berkaitan dengan sikap dan posisinya dalam masyarakat, kaum intelektual sebenarnya memainkan peran yang kontradiktif. Intelektual memainkan peran yang mulia dan sekaligus nista.

Dalam diri seorang intelektual terjadi *inner tension* atau kontradiksi antara isu krusial menyangkut teori dan praktik, kontemplasi dan aksi. Kaum intelektual juga mengklaim pengetahuan nonteknis dan sekuler dari dunia politik dan budaya, yang dengannya kemudian diidentifikasi bahwa kaum intelektual pada saat yang bersamaan bersifat politis dan apolitis. Sehingga dalam diri seorang intelektual melekat apa yang diistilahkan oleh Melzer dengan sifat *detached attach - ment*. Pemihakan kaum intelektual terhadap kebenaran me-mang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

Tetapi, ketika menyangkut kekuasaan dan penguasa, hubungan antara penguasa dan rakyat, maka kebenaran men-jadi sangat ambigu. Dalam struktur masyarakat di mana berlangsung pola politik *rulling bargain* antara masyarakat dan negara, di mana negara menjamin keamanan fisik dan nasion (kebangsaan), penyediaan barang-barang dan jasa (Kamrava, 2005), maka ketergantungan masyarakat pada negara menjadi sangat kuat. Lalu di mana kebenaran? Pradana menjelaskan:

Apakah kebenaran ada di pihak rakyat ataukah di pihak penguasa? Kesan yang berlangsung selama ini adalah masyarakat selalu menjadi representasi dari kebenaran, sementara penguasa selalu menjadi representasi dari kesalahan. Dengan sendirinya, setiap gagasan dan tindakan intelektual yang mendukung keputusan kalangan penguasa, dengan sendirinya, kalangan intelektual itu akan dipersepsi sebagai intelektual durhaka (*bad intellectuals*). Sebaliknya, sebrutal apa pun tindakan masyarakat, dan bahkan ketika

tindakan itu salah, maka kaum intelektual yang berdiri di belakangnya akan dipersepsikan sebagai intelektual luhur (*good intellectuals*).⁷⁹

Sedangkan Sudjatmoko, sebagaimana dikutip Dhakidae, mengatakan mengenai pelacuran intelektual (terjadi ketika) cendekiawan sengaja meninggalkan etika profesi dan etika kemanusiaannya melalui pelacuran ilmu pengetahuan untuk kepentingan jabatan dan keuntungan material pribadi. Mereka tunduk dan menyerah pada kekuasaan politik. Nilai-nilai kebebasan berpikir intelektual, kebenaran dan keadilan terjungkir balik demi untuk menjamin berlangsungnya kekuasaan politik.

Para politisi yang loyal dan pasrah terhadap kehendak atasan lebih disukai daripada intelektual yang terdidik dan terlatih berpikir bebas. Bilamana masyarakat dan struktur politik yang berkuasa tidak memberi tempat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat yang demikian berada dalam keadaan statis. Ilmu pengetahuan sifatnya universal dan dinamis serta tidak terikat pada kotak-kotak ideologi yang sempit.⁸⁰

Peringatan-peringatan ini penting. Pramoedya mengatakan intelektual yang mengetahui secara teori sesuatu itu salah tapi masih diperbuat, maka ia dinamakan intelektual munafik. Pradana Boy menyebut intelektual durhaka untuk mereka yang mendukung keputusan penguasa yang menindas rakyat. Jangan sampai terjadi seperti apa yang dipahami Daniel Dhakidae tentang Julien Benda, terutama mengenai pengkhianatan intelektual. Dhakidae mengatakan, apa yang dianggap di Barat sebagai pengkhianatan intelektual justru di Indonesia dianggap sebagai keutamaan intelektual.⁸¹

SARJANA INDONESIA

Sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai definisi intelektual di atas, terdapat juga ahli yang melihat strata pendidikan sebagai kriteria intelektual, dalam hal ini adalah A. Mukti Ali

yang menyebutkan tiga syarat kriteria intelektual, salah satunya berpendidikan tinggi, khususnya di universitas.

Sejatinya, polemik tentang peran sarjana telah terjadi sejak lama di Indonesia. Khusus di zaman Orde Baru, keluhan-keluhan menyangkut pengkhianatan intelektual sangat tinggi. Dalam arti, ada sarjana yang tidak peka terhadap masyarakat-nya, terhadap perkembangan kesejahteraan rakyat dan pem-bangunan.⁸² Mungkin mereka ini disebut pengkhianat intelek-tual. Karena komitmen kita adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal itu dikemukakan Guru Besar Sosio-logi Hukum, Universitas Diponegoro, Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, menyambut peringatan Hari Sarjana, yang jatuh pada 29 September 1994.⁸³ Satjipto Rahardjo menolak istilah dekadensi moral yang dipergunakan untuk membedah penyimpangan intelektual. Ia lebih cenderung memakai istilah derogasi, yaitu kemerosotan kualitas sarjana, baik yang melanda sarjana strata satu, dua maupun strata tiga.⁸⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, bila terjadi dekadensi itu berarti kemerosotan kualitas dan moral sangat tinggi. Hal ini mestinya perlu diteliti lebih jauh. “Tetapi harus diakui, sudah sejak lama memang terjadi banyak kasus manipulasi yang sangat me-mengaruhi dunia kesarjanaan,” katanya. Malah begitu minor-nya orang terhadap sarjana, sampai-sampai tidak bisa lagi dilihat sebagai elite dalam masyarakat. Situasi ini bertambah parah dengan kesarjanaan yang sudah menjadi massal, bukan lagi milik lapisan tertentu semata. Akan tetapi, ia tidak ingin menyalahkan sarjana massal sebagai kekuatan intelektual.

Karena kalau kita ingin betul-betul mau tinggal landas, harus memenuhi rumus tertentu, yakni jumlah masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi dan menyandang gelar sarjana, harus lebih banyak. Celaknya, menurut Satjipto, massal sering dikonotasikan kurang baik. Banyak lembaga pendidikan berorientasi pada jumlah lulusan, bukan kualitas kesarjanaan. Penyakit ini yang mengakibatkan kita kalah

bersaing dengan luar negeri.

Mengenai pengkhianatan intelektual, Satjipto Rahardjo mengangkat kasus Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja di zaman Orde Lama yang terpelanting gara-gara ia berusaha mengingatkan Bung Karno. Mantan Menlu RI dalam Kabinet Pembangunan era Orde Baru itu melihat bahaya Komunis dengan PKI-nya yang mengancam keselamatan bangsa dan negara waktu itu.

Sebagai seorang sarjana, Mochtar memang berkewajiban untuk ikut *urun rembug* apabila melihat sesuatu yang perlu dibenahi dan ditangani dengan segera. Masalahnya, bagaimana dengan para sarjana yang sedemikian kerasnya mendukung dan masuk dalam birokrasi waktu itu. Akankah mereka balik dituding sebagai pengkhianat intelektual?⁸⁵

Sedangkan Suyanto P.hd⁸⁶ tidak hanya melihat faktor sarjana melainkan juga faktor masyarakat Indonesia, ia menyebutkan bahwa perilaku sarjana yang cenderung kurang memperhatikan etika kesarjanaan itu sebenarnya merupakan hasil dari sistem kemasyarakatan yang ada. “Masyarakatnya sakit, sehingga pemikiran mahasiswa dan para sarjana menjadi tidak jernih.” Menurut Suyanto, langkah-langkah tidak terpuji yang dilakukan para sarjana juga sebetulnya ada kaitannya dengan kondisi mahasiswa yang tidak pernah dilatih mandiri.

Sebagian besar dari mereka bercita-cita menjadi pegawai negeri. Diakui juga oleh Suyanto, manusia itu pada prinsipnya takut gagal, sehingga kalau sudah dalam keadaan terpaksa, tujuan bisa dicapai dengan menghalalkan segala cara. Pola hidup global juga mendorong mahasiswa dan sarjana ikut terseret. Katanya lagi, “kasus-kasus jual-beli skripsi, menempuh ujian dengan menggunakan joki dan lain-lain, walaupun jumlahnya tidak banyak, namun tetap memprihatinkan.”

Sementara itu, kartunis kondang dari Semarang, Jaya Suprana, mengemukakan, sarjana telanjur dianggap sebagai jenis manusia yang istimewa. Maka ia terlanjur pula dituntut

tampil istimewa, nyaris seperti seorang superman. Master musik lulusan Universitas Jerman dengan spesifikasi piano itu mengungkapkan, sarjana tetap manusia biasa yang tidak sempurna. “Ada sarjana yang baik, tapi ada pula sarjana yang buruk,” katanya. Kebrengsekan ini bukan monopoli sarjana Indonesia. Di luar negeri mana pun, ada sarjana semacam itu. Sejak dulu, reputasi sarjana selalu ada yang tercemar akibat perilaku plagiat, menyerobot karya orang lain dan komersialisasi. Malah korupsi ilmu, penjabaran iptek secara destruktif dan merugikan kepentingan umum dan berbagai perilaku amoral, non-etis dan maksiat lainnya.⁸⁷

INTELEKTUAL, ORGANISASI DAN POLITIK: MASALAH ORIENTASI

Pernyataan berikut ditujukan untuk mereka yang aktif dalam organisasi terutama organisasi kemahasiswaan sering disebut dengan organisasi kaum intelektual. Anas Urbaningrum⁸⁸ menyatakan ketika garis politik menjadi *mainstream* (arus utama), maka dinamika akademis-intelektual menjadi menyempit. Sebaliknya, ketika garis intelektual menjadi *main - stream*, terlihat bahwa kecerdasan dan ketajaman politik organisasi tidak pernah tumpul. Melihat gejala ini, Anas mengatakan bahwa tanpa harus mendikotomikan antara garis politik dan intelektual, terlihat beberapa *kelemahan orientasi politik* yang terlalu maju bagi organisasi kemahasiswaan.

Pertama, orientasi politik dapat mendekatkan gerak dinamik organisasi pada sikap dan perilaku pragmatis. Hal ini mengakibatkan menguatnya pertimbangan-pertimbangan praktis dalam dinamika organisasi.

Kedua, orientasi politik cenderung membawa pada kondisi yang biasa disebut sebagai *oligarki organisasi*. Terjadinya kecenderungan elitisme sukar dihindari.

Ketiga, orientasi politik cenderung lebih menguntungkan organisasi dalam arti personal, dan sebaliknya memperkecil

keuntungan dan kemanfaatan organisasi dalam makna institusi.

Keempat, orientasi politik cenderung berlebihan melakukan akomodasi dan penyesuaian terhadap dinamika dan ke-pentingan eksternal. Akibatnya, aktualisasi dari semangat, etos dan nilai-nilai idealisme organisasi untuk ditawarkan kepada masyarakat menjadi terbatas. Pusat perhatian organisasi adalah apa yang terjadi di luar, dan bukan bagaimana potensi internal digali semaksimal mungkin untuk disumbangkan kepada masyarakat.

Dan *kelima*, orientasi pada politik secara internal akan memperluas wajah konflik, yang produksinya adalah *menang* atau *kalah*. Pilihannya sangat terbatas, dan bersifat “hidup-mati”. Hal demikian, kata Anas, akan mengobrol energi organisasi untuk sesuatu yang acapkali menjadi mubazir.⁸⁹

Kemudian, setelah membandingkan tarik-menarik pengaruh antara garis politik dan garis intelektual, Anas mengatakan bahwa orientasi intelektual mempunyai beberapa keuntungan yang cukup mendasar bagi organisasi mahasiswa.

Pertama, orientasi intelektual akan membawa kesadaran para kader untuk berpikir jangka panjang. Hal ini membuka kesempatan bahkan mendorong lahirnya gagasan-gagasan cerdas, bernas, serta visioner. Juga akan mendorong munculnya pemikiran yang intensif, strategis dan mendalam.

Kedua, orientasi intelektual mengajarkan gaya egalitarianisme, dan sikap terbuka, jujur, dan demokratis.

Ketiga, orientasi intelektual akan cenderung membawa keuntungan bagi organisasi secara institusi dan sekaligus secara personal, dan akan membangun kinerja organisasi menjadi lebih dinamis, akademis dan bervisi.

Keempat, orientasi intelektual akan mampu mendorong proses eksplorasi dan aktualisasi semangat, etos dan nilai internal organisasi menjadi gagasan-gagasan cerdas, kemudian ditawarkan kepada masyarakat, umat dan bangsa, sehingga proses reproduksi gagasan dan pemikiran menjadi terpacu.

Dan *kelima*, orientasi intelektual akan cenderung membawa berkonflik-konflik organisasi mahasiswa pada tempat yang bermanfaat.

Ali Syari'ati telah merekonstruksi pandangan banyak orang tentang intelektual. Pada umumnya, seorang disebut intelek manakala hal-hal yang dibincangkannya adalah hal-hal yang tidak lazim di perbincangkan masyarakat awam pada umumnya. Apalagi jika perbincangan itu diikuti dengan berbagai peristilahan yang rumit, maka semakin elite dan khas kelompok sosial tersebut di mata masyarakat.

Syari'ati menandakan secara tegas, bukan intelektual seperti ini yang turut membantu kesadaran masyarakat. Alih-alih dapat mentransformasikan ide dan gagasannya ke tengah masyarakat, keberadaan mereka juga membangun suatu kelas sosial baru yang tidak tersentuh. Tipologi intelektual seperti ini dipersonifikasikan Syari'ati melalui fragmen di sebuah warung teh:

Suatu hari, di warung pojok, orang-orang Bazar tengah berkumpul untuk minum teh mengobrol dan bersenda gurau, atau menghilangkan rasa lelah sehari-hari. Akan tetapi, keriahan dan keriuhan ini terganggu suasana informalnya begitu ia dikunjungi seseorang yang menamakan dirinya intelektual. Begitu si intelektual itu melangkah masuk dan ia pun menampakkan perasaan gusar, mereka berhenti bergurau, tertawa dan kehilangan perasaan hangatnya. Warung teh itu berubah menjadi bisu. Mereka menjadi tidak sabar dan mengharap sang intelektual segera meninggalkan mereka, sementara intelektual itu sendiri merasa resah dan ingin cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut.⁹⁰

Demikianlah, kegagalan seorang intelektual lebih disebabkan karena kesalahan sendiri. Ketidamampuan mereka menjalin komunikasi telah memisahkannya dari masyarakat bahkan menimbulkan hubungan yang tegang. Menurutny, setiap mazhab atau ideologi tertentu yang gagal mendaratkan dirinya di atas infrastruktur kultural masyarakat tidak akan jauh berbeda dengan sebuah buku populer yang disimpan di

perpustakaan untuk bacaan publik. Sarjana, mahasiswa dan pembaca-pembaca tertentu mungkin membaca buku tersebut, atau ribuan naskah dari buku yang mungkin diterbitkan. Namun, massa (masyarakat) tetap saja tidak berubah.

KEHADIRAN ISTILAH “INTELEKTUAL” DI INDONESIA

Jika kita mengikuti pendapat Daniel Dhakidae di atas bahwa intelektual itu senantiasa terlibat dalam komunitas yang mempergunakan bahasa sebagai alat, modal, medium, untuk mengolah kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan pada umumnya,⁹¹ maka ketika muncul pertanyaan kapan boleh dikatakan intelektual itu sudah hadir di dalam masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini tentu dengan mudah dapat dijawab, yaitu ketika “bahasa” ditemukan atau ketika bahasa “menemukan penuturnya”, maka pada saat itulah dengan sendirinya hadir seorang (intelektual) atau sekelompok orang (inteligensia) yang bisa disebut cendekiawan.⁹²

Artinya, sebelum masuknya istilah intelektual ke Indonesia pada hakikatnya di Indonesia sudah ada intelektual. Penulis teringat pepatah Arab yang mengatakan, “Manusia adalah hewan yang berbicara.” Atas dasar pemahaman itulah, judul tulisan pada bagian ini adalah “kehadiran istilah intelektual di Indonesia”, bukan “kehadiran intelektual di Indonesia”.

Istilah pertama dalam bahasa Indonesia (Melayu) yang mengindikasikan lahirnya inteligensia di Hindia Belanda adalah “bangsawan pikiran”. Istilah ini mulai muncul di ruang publik pada dekade pertama abad ke-20. Istilah itu merupakan sebuah kode untuk menamai generasi baru dari orang-orang Hindia Belanda yang terdidik secara modern dan ikut serta dalam gerakan menuju *kemadjoean*.⁹³

Istilah “bangsawan pikiran” diperkenalkan oleh Abdul Rivai,⁹⁴ seorang editor majalah *Bintang Hindia*,⁹⁵ kemudian istilah tersebut segera digemakan oleh para jurnalis Hindia lainnya dan kemudian menjadi istilah di kalangan generasi

pertama inteligensia yang berasosiasi dengan *kemadjoean*.⁹⁶

Ketika *Bintang Hindia* terbit tahun 1902, Abdul Rivai menulis sebuah artikel mengenai “bangsawan pikiran” yang di dalamnya ia mengidentifikasi dua macam bangsawan yang ada dalam masyarakat Eropa, yaitu “bangsawan oesoel” dan “bangsawan pikiran”, Abdul Rivai kemudian menyatakan:

Tak perlu memperpanjang perbincangan kita mengenai “bangsawan oesoel” karena kemunculannya memang telah ditakdirkan. Jika nenek moyang kita terlahir sebagai bangsawan bahkan meskipun pengetahuan dan prestasi kita tak ubahnya seperti pepatah “katak dalam tempurung”... Saat ini, prestasi dan pengetahuanlah yang akan memunculkan posisi seseorang. Inilah situasi yang melahirkan munculnya “bangsawan pikiran”.⁹⁷

Istilah “bangsawan pikiran” berlawanan dengan istilah “bangsawan oesoel” yang dikaitkan dengan istilah bangsawan lama. Istilah “bangsawan pikiran” digunakan baik untuk menunjuk pada individu “intelektual” maupun entitas kolektif “inteligensia” Hindia Belanda. Untuk menegaskan hadirnya komunitas baru inteligensia seperti yang dibayangkan, maka kolektivitas “bangsawan pikiran” itu kemudian diberi nama “kaoem moeda”, sementara kolektivitas “bangsawan oesoel” diberi nama “kaoem tua” atau “kaoem koeno”.⁹⁸

Selanjutnya, pada 1910-an, penentangan para anggota inteligensia terhadap bangsawan tua memunculkan sebuah upaya untuk memisahkan kata “pikiran” dari kata “bangsa-wan”, karena istilah “bangsawan” secara implisit berarti meng-agung-agungkan hak istimewa dari bangsawan lama. Oleh karena itu, kemudian muncullah istilah “kaoem terpeladjar”, “pemoeda-peladjar” atau *Jong* (dalam bahasa Belanda). Istilah-istilah tersebut merujuk kepada sebuah entitas kolektif dari orang-orang yang terdidik secara modern. Istilah intelektual memasuki ruang publik di Indonesia melalui media massa (koran) yang merupakan sarana publikasi yang paling efektif saat itu, terutama di kalangan penjahaj, bangsawan pribumi,

dan lain-lain. Pada 1901–1903, terbit sebuah koran bernama *Pemberita Betawi* di Hindia Belanda. Koran tersebut memberi nama salah satu rubriknya dengan kata “Dreyfusiana”.⁹⁹

Kata “Dreyfusiana” yang dijadikan nama kolom itu tak lain merujuk pada kasus Dreyfus, pahlawan intelektual Eropa Barat Alfred Dreyfus. Pemakaian kata “Dreyfusiana” sebagai nama kolom koran itu dilandasi fakta penyalahgunaan kekuasaan di Hindia, meskipun kata *Intellectueel* (intelektual) sendiri belum lazim dipakai dalam wacana publik di kalangan para “bangsawan pikiran” kala itu. Kolom itu dimaksudkan untuk menjadikan jurnalisme sebagai sebuah senjata baru bagi perjuangan orang-orang terjajah.

Redaktur koran *Pemberita Betawi* saat itu adalah Tirto Adhi Surjo.¹⁰⁰ Sebuah langkah besar juga dilakukan Tirto Adhi Surjo pada 1903 dengan menerbitkan koran *Soenda Berita*¹⁰¹ di Cianjur. Koran mingguan ini merupakan penerbitan pribumi pertama yang dimiliki, dieditori dan dikelola sendiri oleh seorang pribumi. Karena alasan pribadi, koran mingguan ini hanya bertahan 2 tahun.

Tirto Adhi Surjo kemudian mendirikan koran baru ber-bahasa Melayu di Pasar Batavia pada 1907, koran ini bernama *Medan Prijaji*.¹⁰² Koran ini dengan segera menjadi pejuang kesadaran kebangsaan di kalangan orang-orang pribumi Hindia. Rupanya, tentangan dari penguasa politik tidak meredupkan kekokohan Surjo untuk menggelorakan semangat pembebasan dan perlawanan. Menurut Takashi Shiraishi¹⁰³:

Tirto Adhi Surjo telah menciptakan gaya jurnalistiknya sendiri dalam *Medan Prijaji*, yaitu bernada militan dan sarkastik... meskipun nama koran itu *Medan Prijaji*, ia tak hanya menjadi forum priyayi, tetapi juga sebagaimana dikatakan oleh mottonya, sebagai “Soera bagi sekalian radja-radja”.¹⁰⁴

Sekitar tahun 1910-an, penentangan para anggota inteligen-sia terhadap bangsawan tua memunculkan sebuah upaya untuk

memisahkan kata “pikiran” dari kata “bangsawan”, karena istilah “bangsawan” secara implisit berarti mengagung-agungkan hak istimewa dari bangsawan-bangsawan lama. Oleh karena itu, kemudian muncullah istilah “kaoem terpeladjar” atau “pemoeda-peladjar” atau *Jong* (dalam bahasa Belanda). Istilah-istilah ini digunakan untuk merujuk kepada sebuah entitas kolektif dari orang-orang yang terdidik secara modern.¹⁰⁵

Sementara, formasi sosial dari elite berpendidikan modern di Indonesia menyerupai pembentukan inteligensia dalam konteks Eropa Timur. Kerangka kerja intelektual dan konsep dari inteligensia Indonesia sangat dipengaruhi oleh literatur-literatur teoretis Eropa Barat. Ruang Publik yang disediakan melalui koran *Pemberita Betawi* dijadikan ajang sosialisasi gagasan para kaum terpelajar dari kalangan priyayi, tulisan-tulisan dalam kolom “Dreyfusiana” tentu harus menyesuaikan diri dengan karakter Alfred Dreyfus itu sendiri sebagai seorang yang berani mengatakan penolakan atas ketidakadilan.

Istilah intelektual kian mendapatkan tempat pada 1920-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya perhimpunan pertama di Hindia Belanda yang menggunakan kata “*Intellectueelen*”, pada 1923 bernama “*Bond van Intellectueelen*”. Di sisi lain, istilah “Inteligensia” baru mulai diadopsi dalam tulisan-tulisan komunitas inteligensia di Hindia Belanda pada 1930-an dan kemudian lebih sering digunakan dalam wacana intelektual pada era 1940-an, tetapi tidak pernah sepopuler kata “*intellect-tueel (en)*” (baca: intelektuil).¹⁰⁶

Kecenderungan orang Indonesia untuk menggunakan istilah “*intellectueelen*” (dalam ragam ejaannya) secara kecenderungan yang sama di Eropa Barat. Dengan demikian, sesuatu yang umum dalam wacana intelektual Indonesia untuk menggunakan istilah “*intellectueleel (en)*” guna merujuk pada entitas kolektif dari suatu kelompok inteligensia tertentu, atau untuk menggunakan istilah “inteligensia” guna merujuk pada individu

intelektual.¹⁰⁷

Oleh sebab itu, berkaitan dengan perdebatan itu, perlu adanya kehati-hatian yang sama bagi orang Indonesia, karena hampir dalam setiap bacaan sejarah Indonesia sangat jarang terdengar ada kata-kata “intelektual” maupun kata-kata “cen-dekiawan” untuk suatu masa yang panjang sebelum proklamasi kemerdekaan, maupun setelah proklamasi kemerdekaan. Istilah yang populer untuk saat itu adalah kaum pergerakan, kaum terdidik, kaum terpelajar atau malah kaum priyayi terdidik ketimbang istilah intelektual.

Secara nasional, pada Desember 1929, barulah Soekarno memopulerkan istilah intelektual di hadapan “*Openbare Vergadering P.N.I Bandoeng dan Jacatra*”, sebagaimana dilaporkan Soewarsono, Soekarno mengatakan: “*Kaoem intellectueel* adalah kaoem yang akal dan pikirannya telah mendapat didikan dan pengajaran, *kaoem intellectueel* merupakan produk sosial suatu *onderwij*.”¹⁰⁸ Sementara itu, Bung Hatta memopulerkan istilah intelektual dalam pidato bersejarahnya di hadapan sivitas akademika Universitas Indonesia pada 11 Juni 1957 yang berjudul “Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia”. Hatta menafsirkan inteligensia sebagai sinonim dari intelektual.¹⁰⁹

KEHADIRAN ISTILAH “INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA”

Yudi Latif menjelaskan, politik etis pada awal abad ke-19 memberikan kesempatan bagi ningrat priyayi Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun, sebagian mereka yang berlatar belakang Muslim merasa kecewa dengan upaya-upaya pihak penjajah menjauhkan mereka dari Islam melalui sistem pendidikan modern dengan nilai dan prinsip sekulernya. Karena itu, mereka mulai memperkaya pengetahuan keagamaannya, sehingga muncullah apa yang kemudian disebut sebagai intelektual (inteligensia yang melek pengetahuan agama).¹¹⁰

Selain itu, promosi pendidikan Barat oleh Pemerintah Kolonial telah menciptakan hierarki-hierarki pengetahuan dan

nilai-nilai kolonial yang mematikan. Edward Said menyebut ini sebagai “pengkelasduaan yang mengerikan” (*dreadful secundariness*) terhadap beberapa lapisan masyarakat dan kebudayaan. Pada gilirannya, hal ini mendorong hasrat serang-an balik pengetahuan-pengetahuan “tersisihkan” (*subjugated knowledges*) lewat jalan, di samping cara-cara lainnya.¹¹¹

Strategi peniruan (*mimicry*) dan apropriasi (*appropriation*). Komunitas epistemik Islam, misalnya, berusaha sekuat tenaga untuk mengadopsi aparatus, metode-metode, dan kurikulum pendidikan modern sebagai sarana untuk merevitalisasi ajaran-ajaran dan daya tahan Islam. Upaya ini kemudian melahirkan sistem pendidikan madrasah yang di dalamnya aparatus dan metode-metode modern diperkenalkan dan mata pelajaran agama diajarkan berdampingan dengan mata pelajaran sekuler. Hal ini melahirkan sejenis *clerical-inteligensia* (inteligensia-klerikus) yang dikenal dengan sebutan *ulama-intelek* (ulama yang melek pengetahuan modern).¹¹²

LAHIRNYA JIB DAN SIS

Usaha-usaha untuk mengenalkan kalangan intelektual dengan Islam pada abad ke-20 telah dirintis melalui pendirian beberapa organisasi, di antaranya yang terpenting adalah Jong Islamieten Bond (JIB) dan Studenten Islam Studieclub (SIS). Dapat dikatakan, tidak mungkin mengkaji proses lahirnya intelektual Muslim Indonesia tanpa memahami sepenuhnya tentang JIB dan SIS.

JIB didirikan di Jakarta 1 Januari 1925 oleh Syamsurizal, alias Sam (Wali Kota Jakarta Raya 1951–1953). Ia dilahirkan di Karang Anyar, Jawa Tengah, tahun 1901. Putra penghulu ini mendapat pendidikan (akhir) di *Rechtschool*, Sekolah Hukum. Darah perjuangan yang mengalir dalam dirinya agaknya ikut dipompa oleh pamannya yang bernama Surjo-pranoto. Tokoh Sarekat Islam yang populer disebut “Raja Mogok”. Ia berperan besar dalam mengorganisasikan gerakan

pemogokan buruh di Jawa sebagai protes kepada Pemerintah Belanda.

Pengalaman pertama berorganisasi ditempuhnya dalam Jong Java. Inilah menariknya Syamsurizal, meski ayahnya tokoh Sarekat Islam, tapi ia masuk Jong Java. Pada Kongres Jong Java ke-6 tahun 1923, Sam terpilih sebagai ketua. Sam melihat ada ketimpangan dalam organisasi yang dipimpinya itu. Sejak beberapa tahun, Sam merasakan terjadi “diskriminasi” terhadap anggota yang beragama Islam dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan Jong Java. Anggota-anggota beragama Kristen mendapat layanan kursus agama Kristen dari Jong Java. Tetapi, Jong Java tidak mengadakan kursus agama Islam. Dalam kongres ke-7 yang diadakan di Yogyakarta, Desember 1924, Sam mencoba mengubah, atau menambah, program kegiatan organisasi dengan penyelenggaraan kursus agama Islam bagi anggota-anggota Muslim.

Sam merasakan perlunya “menambah program tersebut”, karena anggota-anggota yang Muslim itu umumnya bersekolah di lembaga pendidikan Barat. Jam sekolah lama dan ketat. Mustahil kemungkinan mereka belajar agama di rumah. Karena itu, Jong Java merupakan forum yang tepat untuk pelayanan kursus-kursus agama bagi anggotanya yang memeluk berbagai agama. Usul Sam ditolak lewat pungutan suara. Menurut Mohammad Roem, penolakan ini merupakan *blessing in disguise*. Karena dengan begitu, Sam dan teman-temannya yang sepaham terdorong untuk membentuk sebuah wadah kaum terpelajar Islam guna mendalami agamanya. Sebagai orang muda yang masih kekurangan pengalaman, para pemuda itu mengangkat seorang tokoh senior Islam, Haji Agus Salim, selaku penasihatnya.

Proses berdirinya JIB tersebut menimbulkan anggapan bahwa JIB pemecah persatuan, melakukan kegiatan politik praktis, dan antek Sarekat Islam. Namun, anggapan tersebut semata-mata didasarkan atas penafsiran yang sempit terhadap

proses berdirinya JIB. Diangkatnya Haji Agus Salim selaku penasihat semata-mata karena kapasitas intelektualnya dalam menerangkan Islam kepada kalangan muda terpelajar.¹¹³ Tuduhan bahwa JIB antek Sarekat Islam tidak mempunyai dasar yang kuat, karena Sarekat Islam sendiri sudah membentuk ormas pemuda yang bernama Pemuda Muslimin.¹¹⁴

Sejak awal berdirinya, JIB menunjukkan cita-cita yang sangat maju, perhatikan rumusan tujuan JIB berikut ini:

Mengkaji dan memajukan amal Islam; mengembangkannya dan memajukan sikap simpati terhadap Islam dan penganutnya, serta memberi toleransi positif terhadap mereka yang mempunyai pemikiran yang berbeda; mengembangkan dan memajukan kontak-kontak di antara *Intellectueelen* dan rakyat lewat Islam; dan memajukan perkembangan jasmaniyah dan ruhaniyah para anggotanya lewat pelatihan diri dan aktivitas sendiri (majalah JIB, *Het Licht*. No. 1/1925, hlm. 7).¹¹⁵

Asas dan tujuan itu diusahakan dengan jalan: 1) Menerbitkan majalah berkala, brosur-brosur dan lain-lain penerbitan, 2) Mengadakan kursus, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain sebagainya, 3) Mengadakan kunjungan ke tempat yang berarti.¹¹⁶ Dalam statuta yang lain juga dinyatakan tentang gagasan solidaritas Islam: “Tak ada orang yang bisa sepenuh hati bekerja demi memajukan kesejahteraan sosial secara umum tanpa menghormati dan bersimpati terhadap agamanya mayoritas masyarakat.”¹¹⁷

Namun perlu diingat, gagasan JIB tentang solidaritas Islam bagi para anggotanya tidak bertentangan dengan ide mengenai solidaritas nasional dan tidak mengurangi keterikatan mereka pada tujuan pembentukan sebuah blok historis nasional. Mohammad Roem salah satu pemimpin JIB mengatakan, “Seseorang harus mencintai tanah airnya, karena itu merupakan bagian hakiki dari keyakinan Islam.”¹¹⁸

Pandangan ini tecermin dari nama yang dipilih bagi organisasi kepanduan JIB yang didirikan pada 1926, yaitu

National Indonesische Padvinderij (*Gerakan Pandu Nasional Indonesia*), yang merupakan organisasi pertama yang pernah ada yang menggunakan kata-kata “**Nasional Indonesia**”. Bahkan, JIB juga memperlihatkan keterlibatan aktifnya dalam Kongres Pemuda Indonesia II pada Oktober 1928.¹¹⁹ Jadi, solidaritas Islam dalam konteks ini disuarakan sebagai cara untuk mendukung identitas kolektif di tengah-tengah maraknya persaingan ideo-politik di antara beragam aliran intelektual.¹²⁰

Pada tahap selanjutnya, agar kaum terpelajar bisa lebih mengenal JIB dan Islam, maka dibutuhkan modernisasi dalam mengekspresikan Islam dalam konteks historis saat itu. Tolak ukur utama dalam ukuran modernitas di kalangan pelajar di masa itu adalah bahasa Belanda. Inilah mengapa majalah JIB diberi nama dalam bahasa Belanda yaitu, *Het Licht*. Dalam pengajaran, training maupun pelatihannya JIB menggunakan pendekatan-pendekatan modern serta rasionalisme.¹²¹

Agar pengajaran Islam menarik buat para pelajar dari sekolah-sekolah sekuler, banyak mentor Islam JIB yang berasal dari ulama-intelekt reformis dan intelek-ulama-modernis. Pola ini sangat kontras dengan metode pengajaran tradisional yang cenderung bersifat dogmatis yang hanya memberi sedikit ruang untuk bertanya. Metode pengajaran intelek-ulama dan ulama-intelekt itu lebih terbuka terhadap diskusi dan lebih bisa mengaitkan tema-tema Islam dengan kenyataan-kenyataan kontemporer.¹²²

Semua ini diiringi dengan kenyataan bahwa JIB terutama dibentuk di kota-kota besar, menjadikan organisasi ini lebih dekat dengan tradisi intelektual reformis-modernis ketimbang dengan tradisi intelektual tradisional. Selain Agus Salim, Tjokroaminoto (dari PSI), Ahmad Hasan (Persis), Ahmad Dahlan dan H. Fakhruddin merupakan di antara mentor terkemuka di organisasi ini. Di antara para anggota senior JIB pada 1920-an yang akan menjadi pemimpin gerakan politik Muslim di masa depan ialah Syamsurizal (ketua pertama, 1925–

1926, seorang lulusan *Rechtsschool*), Wiwoho Purbohadidjojo (ketua kedua, 1926–1930, seorang lulusan HBS), Kasman Singodimedjo (ketua ketiga, 1930–1935, seorang pelajar bagian persiapan STOVIA), Mohammad Roem (seorang pelajar bagian persiapan STOVIA), Mohammad Natsir, Jusuf Wibisono, Prawoto Mangkusasmito (ketiganya pelajar AMS).¹²³

STUDENTEN ISLAM STUDIECLUB (SIS)

Pada awal-awal 1930-an, beberapa aktivis pimpinan JIB yang telah menjadi mahasiswa menyadari bahwa JIB tidak lagi cocok untuk perkembangan intelektual mahasiswa. Jusuf Wibisono dan Mohammad Roem (telah menjadi mahasiswa RHS). Keduanya mengusulkan pendirian sebuah perhimpunan Islam bagi mahasiswa sebagai kelanjutan dari JIB di lingkungan perguruan tinggi. Usulan ini diwujudkan pada Desember 1934 dengan didirikannya *Studenten Islam Studieclub (SIS)* di Jakarta, disingkat SIS.¹²⁴

Sebab lain berdirinya SIS adalah menurunnya kegiatan JIB setelah berusia 6 tahun. Karena kemunduran itu, JIB mendapat kritikan dari berbagai pihak, yang menaruh perhatian pada pembinaan pelajar dan mahasiswa. Syamsurizal melalui majalah *Mustika* yang terbit tahun 1931 menulis artikel dengan judul “*Quo Vadis JIB*”. Dalam tulisan itu, Syamsurizal mengkritik keras kepengurusan Kasman Singodimedjo, yang dianggap sebagai penyebab kemunduran JIB.¹²⁵

Seperti ditulis Ridwan Saidi, di atas realitas kemunduran JIB itu, berdirilah SIS, dengan latar belakang:

Dua orang mahasiswa *Rechts Hogeschool (RH)*, Jusuf Wibisono (lahir 1909) dan Mohammad Roem (lahir 1908), memasuki pendidikan tinggi (RHS). Kedua mahasiswa tersebut sama-sama pemuka JIB, dan keduanya adalah pengagum bahkan dapat dikatakan murid H. Agus Salim. Keduanya mengikuti dengan langsung kurva “*naik dan landai*”-nya JIB, dan keduanya menyadari betapa di lingkungan pendidikan tinggi (kampus) tidak terdapat wadah khusus untuk pengembangan intelektualitas para mahasiswa Islam. Keduanya

menyadari bahwa JIB tak dapat diandalkan untuk “menjamah” kampus, JIB dapat dikatakan sebagai organisasi di luar kampus sebagaimana halnya *Indonesia Muda*.

Mereka bersepakat untuk membentuk wadah, “yang dapat menampung hasrat debat ilmiah yang tak tertampung lagi pada JIB,” kata Jusuf Wibisono. Adapun menurut Moh. Roem, wadah tersebut adalah “untuk melanjutkan JIB di universitas.”

Tampaknya, friksi dalam tubuh JIB menimbulkan rangsangan dinamika bagi kedua mahasiswa tersebut untuk membangun “wadah” baru bagi kepentingan mahasiswa. Friksi yang mereka alami itu justru menimbulkan kegiatan-kegiatan positif yang kelak ternyata memberikan manfaat bagi perjuangan Islam.

Pada Desember 1934, wadah baru itu diproklamkan dalam suatu kesempatan yang sangat sederhana. Wadah itu diberi nama “Studenten Islam Studieclub” disingkat SIS. Semula, “Studieclub” ditulis “Studie Club”, beberapa bulan kemudian berubah menjadi “Studieclub”. Untuk seterusnya, penulisan itu dipakai sampai dengan bubarnya organisasi SIS karena Jepang masuk pada 7 Maret 1942.¹²⁶

Jusuf Wibisono dalam sambutannya pada pembukaan SIS menggambarkan suasana kebatinan saat itu:

Intelektual dari masyarakat kita kebanyakan tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai Islam..., kendatipun fakta bahwa mereka tidak memiliki pemahaman tentang Islam dan meskipun menyadari arti penting Islam bagi kebanyakan orang, mereka tidak tertarik untuk mempelajari Islam..., mereka sering mengasosiasikan Islam dengan gambaran yang negatif dari pengikut- pengikutnya... Sayangnya, literatur mengenai Islam yang tersedia buat kaum terpelajar kebanyakan ditulis oleh para sarjana Non-Muslim yang tak bebas dari niat-niat buruk.¹²⁷

Tujuan SIS juga ditegaskan oleh A. Karim (Ketua SIS 1937–1938) dalam pidatonya tanggal 8 Oktober 1938:

Hasrat terbesar kita adalah mengislamkan kaum intelektual, terutama mereka yang semakin asing dengan agamanya sendiri (Islam).¹²⁸ Titik berat kegiatan SIS mempersiapkan secara tertib penerbitan majalah bulanan yang mulai terbit tahun 1935. Ketika penerbitan ke-5 muncul, namanya berubah menjadi

Moslimse Reveil (Kebangkitan Jiwa Muslim). Isinya memuat berita-berita organisasi, juga berisikan tulisan-tulisan/pemikiran tentang Islam.

Kegiatan SIS yang lain, yaitu memperbanyak anggota pada awal tahun ajaran baru secara kuantitatif, sehingga berkembang di berbagai akademi dan fakultas. SIS terdapat di Akademi Kepamongprajaan, Fakultas Sastra, Sekolah Tinggi Pertanian, Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Orientasi SIS mengarah kepada pengembangan intelektual, seperti membangun “Perpustakaan Islam” di Jakarta. Tahun 1946, perpustakaan itu pindah ke Yogyakarta. Pada masa liburan, SIS menyelenggarakan kursus bahasa Arab untuk para anggotanya, supaya dapat mempelajari agama Islam langsung dari sumbernya.¹²⁹

Membandingkan HMI dengan SIS, tokoh SIS Prawoto Mangkusasmito menulis:

Menurut keterangan yang saya peroleh, pada waktu sekarang ini HMI termasuk organisasi yang terbesar di kalangan organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia. Sebaliknya, di zaman penjajahan Belanda dulu, organisasi mahasiswa yang berorientasi kepada Islam (yang dimaksud adalah SIS—penulis) merupakan organisasi terkecil. Sifatnya pun baru merupakan satu *study club* Islam di kalangan mahasiswa, belum merupakan *study club* mahasiswa Islam.”¹³⁰

Untuk lebih menarik minat mahasiswa agar masuk SIS, SIS melonggarkan syarat keanggotaannya. Dalam Pasal 5 statuta-nya, disebutkan bahwa “semua mahasiswa, apa pun kebangsa-annya dan ideologinya, bisa diterima menjadi anggota per-himpunan ini”. Dengan usaha rintisannya untuk membentuk suatu gugus inteligensia yang ramah Islam di kalangan maha-siswa, pendirian SIS merupakan titik menentukan bagi per-kembangan inteligensia Muslim di universitas pada masa depan.

Pembentukan JIB dan SIS menghadirkan sebuah tema sentral dalam perkembangan gerakan-gerakan intelektual Muslim sepanjang abad ke-20, yaitu Islamisasi Inteligensia. Selama masa pendudukan Jepang pada 1942, kedua organisasi tersebut lenyap dari ruangan publik. Namun, ideologi dan jaringannya

mereka masih bertahan dalam ingatan para mantan anggotanya dan dipertahankan lewat upacara peringatan dan kontak-kontak informal antarmantan aktivisnya ataupun ditransfor-masikan ke dalam bentuk aksi kolektif yang baru.¹³¹ Berikut perbandingan JIB dan SIS:

Nama Organisasi:	Jong Islamieten Bond , didirikan oleh Raden Syamsurizal, dkk di Jakarta tanggal 1 Januari 1925.
Tujuan:	Kemerdekaan Indonesia dengan mengkaji dan memajukan amal Islam; mengembangkannya dan memajukan sikap simpati terhadap Islam dan penganutnya, serta memberi toleransi positif terhadap mereka yang mempunyai pemikiran berbeda; mengembangkan dan memajukan kontak-kontak di antara <i>Intellectueelen</i> dan rakyat lewat Islam; dan memajukan perkembangan jasmaniyah dan ruhaniyah para anggotanya lewat pelatihan diri dan aktivitas sendiri.
Anggota:	Secara umum anggota JIB adalah pelajar dan mantan pelajar dari sekolah-sekolah menengah, termasuk lulusan Sekolah Dasar. Jika dikontekskan dengan kondisi saat ini, anggota JIB dari (SD-SLTA). Dari 5.692 orang Indonesia yang berpendidikan Barat tahun 1927 (Kahin, 1970:31), JIB mampu menarik anggota sebanyak 1.700 dan tidak semuanya berasal dari sekolah menengah (Alfian, 1989: 124). ¹³²
Strategi Gerakan:	1) Menerbitkan majalah berkala, brosur-brosur dan lain- lain penerbitan, 2) Mengadakan kursus, pertemuan- pertemuan, dan lain-lain sebagainya, 3) Mengadakan kunjungan ke tempat yang berarti. 4) Membuat Badan Inti kelompok pemikir— <i>brain trust</i> , JIB adalah salah satu deklarator Sumpah Pemuda 1928.

Nama Organisasi:	Studenten Islam Studieclub (SIS) , didirikan oleh Jusuf Wibisono dan Mohammad Roem pada Desember 1934.
Tujuan:	Jika JIB bertujuan untuk mengenalkan, mengkaji dan menumbuhkan simpati terhadap Islam, SIS lebih kepada pendalaman ajaran Islam. Karena sifatnya studi klub (kelompok belajar), tujuan SIS lebih kepada penguatan

	karakter keilmuan anggotanya.
Anggota:	Tidak seketat JIB. Peraturan keanggotaan SIS cukup longgar yakni “semua mahasiswa, apa pun kebangsaan-nya dan ideologinya, bisa diterima menjadi anggota perhimpunan ini”. Hal ini menjadikan iklim intelektual SIS sangat hidup. Jumlah anggota SIS sangat terbatas. Dari sekitar 1.246 mahasiswa pada 1940 (Thomas, 1973:12) yang ikut SIS berdasarkan estimasi Prawoto Mangkusamito hanya 100 orang (Saidi, 1990:39). ¹³³ SIS berbasis di kampus.
Strategi Gerakan:	1) Penerbitan majalah bulanan sejak tahun 1935, 2) Diskusi rutin, ¹³⁴ 3) Mendirikan perpustakaan Islam, 4) Mengadakan kursus bahasa Arab. ¹³⁵

INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA

Kemunculan istilah intelektual Muslim juga dapat dilacak ketika para anggota dari komunitas inteligensia Indonesia merumuskan suatu respons ideologi atas negara kolonial yang represif, pluralitas latar sosio-kultural mereka melahirkan perbedaan-perbedaan dalam ideologi. Sebagai konsekuensinya, para intelektual Indonesia terbelah ke dalam beberapa tradisi politik dan intelektual. Karena itu, lahirlah kelompok intelektual Muslim, intelektual Komunis, intelektual Nasionalis, intelektual Sosialis, intelektual Kristen dan seterusnya. Dalam konflik di antara tradisi-tradisi intelektual ini, setiap kelompok berupaya untuk memperbanyak pengikutnya dengan jalan menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok status (*status groups*) yang telah mapan, yaitu kelompok-kelompok solidaritas kultural.¹³⁶

Karena situasi demikian, inteligensia Indonesia menjadi strata sosial yang retak, sehingga sulit diidentifikasi sebagai sebuah strata sosial tersendiri yang menyatu. Meski demikian, mereka tetap menunjukkan kesamaan-kesamaan dalam keistimewaan sosial (*social privilege*), bahasa, kebiasaan, latar pendidikan, dan orientasi pekerjaan. Dengan kata lain, inteligensia Indonesia merefleksikan suatu ekspresi kolektif

dalam arti “suatu kesamaan identitas dalam perbedaan” (*identity in difference*) dan “keberagaman dalam kebersamaan identitas” (*difference in identity*).¹³⁷

Jika Yudi Latif berusaha memperlihatkan sejarah kemunculan, Jalaluddin Rahmat berusaha menjelaskan pandangan idealnya mengenai intelektual Muslim. Menurut Jalaluddin Rakhmat, intelektual lebih tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan cendekiawan. Orang yang terlibat dalam data dan gagasan analitis adalah ilmuwan; orang yang bergelut dalam penerapan praktis adalah teknokrat; orang yang berjuang untuk menyebarkan dan menegakkan gagasan normatif adalah moralis. Sedangkan cendekiawan adalah orang yang menggabungkan ketiganya. Cendekiawan Muslim yaitu gabungan antara ilmuwan, teknokrat, moralis dan filosofis yang berlandas dan bertolak dari al-Quran dan Sunnah. Kaitannya dengan peran-peran kenabian, maka seorang cendekiawan atau intelektual memiliki nilai lebih yang bersifat transenden dan berdampak profan. Istilah yang tepat untuk intelektual profetik dalam al-Quran adalah Ulil Albab. Jalaluddin menerjemahkannya dengan istilah intelektual plus, yakni plus ketakwaan, plus keimanan, dan plus nilai-nilai perjuangan yang menjadi kewajiban agama akan hal itu.¹³⁸

Syamsuddin Arif¹³⁹ mengingatkan bahwa penggabungan antara istilah intelektual dan Muslim menjadi “intelektual Muslim” tidak dapat diterima begitu saja, karena istilah “intelektual” dikenal baru-baru ini saja di dunia Islam. Istilah ini mengimpor dari peradaban lain, seperti halnya “falsafah”. Karena itu, mesin *worldview* Islam bermain di sini. Istilah intelektual dengan konteks masyarakat Barat tidak boleh dipindah begitu saja ke dalam Islam. Selama ini, orang Indonesia sangat memaksakan penggunaan istilah itu dengan segala motifnya. Sebagai contoh, ketika muncul kasus Ahmadiyah, tampillah pembela Ahmadiyah atas nama kaum intelektual dan membela atas nama HAM. Nah, itu baru contoh kecil peng-

gunaan istilah itu yang sangat dipaksakan.¹⁴⁰ Syamsuddin Arif menekankan dengan sebuah contoh:

Ketika kalangan modernis atau liberalis dengan lantangnya menggugat otoritas al-Quran, hadits, ulama, dan lain-lain, mereka mengatasnamakan intelektual. Nah, itu sikap yang sangat Barat dan tidak bijak serta terburu-buru menggunakan istilah asing. Kalau diperhatikan, ada makna universal dalam istilah intelektual, seperti “memperjuangkan keadilan dan kebenaran”, “pendirian kuat”, “tidak mudah terbawa arus”, dan lainnya. Makna universal ini ada di mana-mana, tidak saja di Barat. Masalahnya adalah ketika makna universal diterapkan ke dalam partikuler, seperti menentang arus dalam konteks di dunia Kristen tidak akan sama kasusnya dengan menentang arus dalam konteks di dunia Islam.¹⁴¹

Mengenai Tragedi Dreyfus yang dianggap sebagai titik tolak berkembangnya istilah intelektual, Syamsuddin berpendapat:

Membela kebenaran dalam konteks dunia Barat tidak sama dengan membela kebenaran dalam konteks dunia Islam. Dengan demikian, dengan melepaskan makna partikulernya dan mengambil makna universalnya, mari kita melihat makna-makna universal itu dalam Islam. “Ternyata, cendekiawan dan intelektual sejati itu dalam Islam adalah para nabi dan penerusnya, *waratsat al-Anbiya'* (pewaris para nabi) dan penerus risalah profetis,” imbuhnya.¹⁴²

Sebab itu, Syamsuddin membagi intelektual menjadi dua: *Pertama*, intelektual profetik. *Kedua* intelektual diabolik. Intelektual profetik adalah para nabi dan pewarisnya. Merekalah para pembela kebenaran, sebagaimana kebenaran yang terkonsep dalam al-Quran. Sedangkan intelektual diabolik adalah seperti setan dan pengikutnya atau lebih tegasnya intelektual diabolik cerdas namun menyesatkan.¹⁴³

Intelektual Barat tidak mau terikat dengan aturan Allah (*non-committal, independent*), tidak mau menyerah (*non-conformis*), memberontak (*rebellion*), menentang arus (*oppositional*), dan lain-lain. Yang menyatu dalam kata “takabbur”. Contoh-contoh cendekiawan diabolik ini sangat

banyak sekali dalam sejarah, seperti Kan'an, putra Nabi Nuh, yang menolak naik ke atas perahu; Haman sebagai *the intellectual in the service of tyrant*; Fir'aun; Musa Samiri sebagai cendekiawan yang membuat tuhan dari patung lembu; kaum kafir dari ahli kitab di zaman Nabi Muhammad sebagai para-pakar yang kafir, dan lain sebagainya.

Sedangkan contoh intelektual profetik adalah seperti para nabi, sahabat, ulama. Dari para nabi sebut saja Nabi Ibrahim yang menentang kuasa Namrudz. Nabi Luth juga intelektual yang menentang arus kaumnya yang mayoritas lesbi dan gay. Dari kalangan sahabat, Abu Darda' disebut sebagai intelektual yang berani mengatakan kebenaran dengan lantang di depan Muawiyah, penguasa waktu itu. Dari kalangan ulama, seperti Hasan al-Basri, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal, dan lain-lain, dan di Indonesia seperti Hamka, Syekh Yusuf Al-Makassari, Mohammad Natsir, di mana mereka berani mengeraskan suara kebenaran dan merelakan risiko yang terus mengancam.

Berdasarkan pengalaman sejarah, intelektual dalam Islam cukup dikenali dengan tiga cirinya. *Pertama*, ia tidak ada rasa takut menyuarakan kebenaran (*la khaufun alaihim wa la hum yahzanun*). *Kedua*, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, partai dan lain-lain (*la yas alukum alaihi ajran wahum muhtadun*). Ia hanya ditunggangi kepentingan misi Tuhannya. *Ketiga*, ia adalah *agent of change*/agen perubahan, dan bukan *subject of change*/yang diubah oleh lingkungannya.
144

Pandangan yang berbeda sama sekali dilontarkan oleh Ruslan Abdulgani.¹⁴⁵ Mengenai penggabungan istilah intelek-tual dengan kata Muslim, Nasionalis dan Kristen, dan lain-lain, Ruslan Abdulgani menyatakan: “Bahwa kelompok cendekiawan itu adalah golongan karya (bukan Golkar atau Partai Golkar). Fungsi mereka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, syogyanya mereka dikelompokkan berdasarkan

profesinya masing-masing. Bukan berdasarkan agamanya.¹⁴⁶ Umpamanya intelektual ahli hukum, intelektual ahli ekonomi, intelektual ahli teknik, dan sebagainya. Jika ada salah satu yang mengelompok atas dasar agama, akan muncul intelektual-intelektual yang juga mendasarkan aktivitasnya pada agamanya masing-masing. Hal ini merupakan *set back* (kemunduran) bagi konsensus terdahulu. Sewaktu fungsi golongan karya ditetapkan. Lebih *set back* lagi jika di balik pengelompokan itu ada maksud politik di dalamnya.”¹⁴⁷

Menurut Ruslan Abdulgani, seharusnya para intelektual jangan mengelompokkan diri berdasarkan agama. Karena yang bisa mengelompokkan diri berdasarkan agama adalah kaum alim-ulama. Karena, fungsi alim-ulama adalah menyuburkan kehidupan beragama dan menyuburkan kerukunan antarumat beragama, sesuai Pancasila. Secara lebih tegas, Ruslan Abdulgani mengatakan: “Ulama itu mengandung arti *warasat al-anbiya*, yaitu pewaris ajaran nabi, wajar ada kelompok alim-ulama Islam, Kristen, Buddha dan Hindu Dharma. Itu sumbangan pikiran saya dalam masalah ini, terutama dalam rangka pe-ningkatan wawasan kebangsaan kita memasuki abad ke-21 dan dalam era pembangunan jangka panjang tahap II.”¹⁴⁸

Pendapat Ruslan ini berbeda dengan fakta lapangan seiring dengan bermunculannya kelompok-kelompok intelektual berbasis agama yang diformalkan seperti Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI). Hal ini tidak bisa langsung diberikan citra negatif.

Sebab, justru di sinilah keunikan kelompok-kelompok inteligensia di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Selama kelompok-kelompok inteligensia itu bermanfaat dalam peningkatan tradisi intelektual bagi agamanya masing-masing dan bermanfaat bagi kerukunan antarumat beragama, maka kelompok-kelompok

keagamaan tersebut sangat layak untuk diberikan apresiasi untuk semakin dimunculkan keberadaannya. Bukankah di Indonesia belum pernah terjadi konflik antarumat beragama dalam artian yang sesungguhnya.

Sedangkan perkembangan terbaru yang paling penting dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia, adalah lahirnya suatu tipe baru pemikir keagamaan, yang secara kolektif disebut sebagai kaum intelektual Muslim atau cendekiawan Muslim.¹⁴⁹ Martin van Bruinessen¹⁵⁰ mendefinisikan kaum intelektual Muslim ini dengan cara membandingkannya terhadap kaum ulama di satu pihak, dan kaum intelektual sekuler di pihak lain. Berbeda dengan kaum intelektual sekuler, cendekiawan Muslim memiliki perhatian yang kuat terhadap Islam dan komitmen yang kuat terhadap umat Islam.

Namun, sebagaimana kaum intelektual sekuler, kaum intelektual Muslim menaruh perhatian pada persoalan-persoalan penting bagi masyarakatnya dan mendukung pembentukan opini publik dengan turut serta dalam perdebatan-perdebatan di bidang publik. Hal ini membedakannya dengan para ulama, yang umumnya cenderung hanya memperhatikan persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan permasalahan keagamaan. Karena sebagai penerjemah ajaran Islam, cendekiawan Muslim melibatkan diri dengan realitas sosial dan politik dari masyarakat kontemporer, serta implikasi-implikasi filosofis dan moral dari modernitas.

Selain itu, pendekatan terhadap ayat-ayat suci dan metode-metode penafsiran yang digunakan kaum intelektual Muslim lebih berwawasan aliran-aliran modern dalam filsafat dan hermeneutik. Hal tersebut disebabkan karena mereka pada umumnya mendapat pendidikan di luar lembaga pendidikan keagamaan tradisional, walaupun banyak pula yang juga cukup menguasai studi Islam klasik, yang salah satu di antaranya terdapat di Indonesia, yakni Nurcholish Madjid.¹⁵¹

Sedangkan M. Dawam Raharjo membagi cendekiawan

Muslim ke dalam tiga tipe. *Pertama* adalah ulama-cendekiawan, yakni cendekiawan yang berbasis pada pendidikan agama, dan pengetahuan umum mereka bisa diperoleh melalui proses otodidak, atau memang menjalani pendidikan umum lanjutan. *Kedua* adalah cendekiawan-ulama, yakni kaum cendekiawan yang berbasis pada pendidikan umum, dan pengetahuan agama mereka biasanya diperoleh dari pendidikan keluarga yang mendalam, pendidikan agama tingkat menengah atau otodidak.

Ketiga adalah tipe cendekiawan yang berbasis pada pendidikan umum, tetapi pengetahuan agama mereka relatif minim dibandingkan kedua tipe cendekiawan di atas. Sungguhpun dasar pengetahuan agama mereka minim, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan diri sebagai seorang cendekiawan dengan akhlak Islami, dan komitmen perjuangan yang tinggi untuk mengembangkan Islam dan Kemusliman bagi diri sendiri maupun orang lain, baik di bidang yang berkaitan dengan perkembangan agama maupun perubahan sosial pada umumnya.¹⁵²

Sikap responsif yang sangat tinggi terhadap perubahan sosial memang merupakan hal yang membedakan kaum cendekiawan Muslim tersebut, daripada para ulama yang dalam banyak hal ternyata kurang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari proses modernisasi dan globalisasi. Walaupun demikian, kaum intelektual Muslim tersebut tidak menunjukkan suatu sikap umum, baik dalam urusan-urusan keagamaan, kehidupan budaya, ataupun kehidupan politik. Mereka kerap kali mengambil posisi yang berbeda dalam perdebatan-perdebatan yang sangat penting, dan wacana mereka bukanlah satu-satunya wacana.

Kadang-kadang, di antara mereka ada yang menjalin hubungan erat dengan gerakan-gerakan oposisi Islam, sementara yang lainnya lebih dekat dengan pemikiran yang resmi. Tetapi disebabkan oleh pemikirannya yang “merdeka”, maka baik pemerintah maupun gerakan-gerakan Islam sering-

kali mencurigai (tidak memercayai) mereka. Kemungkinan pengaruhnya yang besar di kalangan generasi terdidik merupakan suatu alasan tambahan untuk kecurigaan. Walaupun demikian, hingga kini tampaknya mereka belum memperoleh derajat legitimasi keagamaan yang sama dengan kaum ulama di mata publik.¹⁵³

Hal ini tentu sangat berbeda dengan pandangan Julien Benda yang melihat kaum intelektual sebagai sesuatu yang bukan saja terpisah dari, akan tetapi harus berdiri di atas malah di luar perkembangan ekonomi, politik. Sehingga seorang intelektual adalah seorang yang hidup di atas kerajaan roh, “*Qui Vit Dans le Royaume d’esprit*”. Sivilisasi, perkembangan ekonomi, teknologi, modal semata-mata dianggapnya sebagai akibat adanya nafsu yang mendapatkan saluran sambil menekan nilai-nilai intelektual.¹⁵⁴

Hal ini mirip dengan **konsep nafsu, libido Freudian** yang melihat kebudayaan sebagai hasil dari perpaduan antara penindasan nafsu seksual dan kesenangan sesaat serta kekerasan yang dijalankan oleh institusi, yang mendapatkan dukungan dari kekuasaan negara.¹⁵⁵ Karena itu, satu-satunya ukuran absolut yang dipakai dalam karya intelektual, baik itu intelek-tual Barat maupun Muslim, adalah keabsolutan moral yang harus dipegang, yakni: *Pertama*, keadilan. *Kedua*, kebenaran. *Ketiga*, akal. Ketiga hal ini muncul dalam tiga karakter utama yakni: (1) seimbang, (2) lepas kepentingan dan (3) rasional. Tanpa moral itu semuanya tidak lebih dari sekadar “peng-khianatan intelektual” yang tidak hidup menurut hidupnya.¹⁵⁶

Dari banyaknya penjelasan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa intelektual Muslim itu bermakna universal yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dengan menjadikan Islam sebagai landasan pijak utama. Sedangkan intelektual Muslim Indonesia tentunya harus berjuang. Kemudian, dapatkah intelektual Muslim Indonesia melakukannya? Inilah yang harus direkayasa dengan berbagai peng-

organisasian, pendidikan, dan perjuangan.

Azyumardi Azra menjelaskan, intelektual Muslim Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Maka, sejarah golongan intelektual di dunia Islam lebih panjang lagi. Terlepas dari sejarah mereka yang berbeda di sana-sini, tetapi satu hal sudah pasti adalah intelektual Muslim memiliki posisi dan tugas yang relatif *distingtif*, tidak hanya di masa silam, apalagi di masa modern yang menghadirkan banyak tantangan baru.¹⁵⁷ Azyumardi menegaskan: “Periwayatan sejarah tentang pertumbuhan dan wacana kaum intelektual Muslim di Dunia Islam belum lagi tersedia secara memadai. Memang ada monografi-monografi tentang kaum intelektual Muslim di wilayah atau negara tertentu. Tetapi, sekali lagi, sejarah yang relatif lengkap dan komprehensif tentang kaum intelektual di Dunia Muslim secara keseluruhan sangat sulit ditemukan.”¹⁵⁸

Padahal, kaum intelektual Muslim yang terpencar-pencar dalam berbagai lingkungan geografis terpisah yang sangat jauh juga terhubung bukan hanya secara keimanan, tetapi juga secara intelektual. Bahkan, ketika kekuatan-kekuatan Eropa semakin mencengkeramkan kekuasaannya atas banyak wilayah Dunia Muslim sejak akhir abad ke-19 sampai Perang Dunia II, kaum intelektual Muslim yang terpencar-pencar itu justru semakin terkait dalam kepedulian yang sama; membebaskan kaum Muslimin dari penjajahan. Dan penjajahan itu bukan hanya berlangsung secara fisik, bahkan juga sangat boleh jadi juga secara intelektual.¹⁵⁹

Dari penjelasan Azyumardi tersebut dapat disimpulkan bahwa intelektual Muslim di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak awal mula datangnya Islam itu sendiri ke Indonesia. Sebagaimana telah banyak dijelaskan Islam melalui para ulama terdahulu secara perlahan telah mengubah cara pandang terhadap Tuhan, manusia dan alam. Sementara itu, Yudi Latif setelah melalui penelitian panjang bahwa tentang inteligensia Muslim Indonesia pada abad ke-20 menyimpulkan setidaknya

ada enam generasi inteligensia Muslim Indonesia sejak akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, yaitu:

1. Generasi pertama inteligensia Muslim Indonesia seperti Tjokroaminoto, Agus Salim dan sebagainya.
2. Generasi kedua inteligensia Muslim Indonesia adalah M. Natsir, M. Roem dan K. Singodimedjo pada 1950-an
3. Generasi ketiga seperti **Lafran Pane**,¹⁶⁰ A. Tirtosudiro dan Jusdi Ghazali pada 1960-an merupakan anak revolusi kemerdekaan sehingga cenderung kooperatif.
4. Generasi keempat seperti Nurcholish Madjid, Imaduddin Abdurrahim dan Djohan Effendi pada 1970-an.
5. Generasi kelima, yakni Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada awal 1990-an dengan Habibie sebagai ikon sentralnya. Pengunduran diri Soeharto dan diganti Habibie pada 1998 lantas membuka peluang tokoh ICMI untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik yang besar.
6. Generasi keenam yang sebagian anggotanya lahir pada 1970-an dan 1980-an seperti Ulil Abshar Abdalla, Fachri Hamzah, dan lain-lain.¹⁶¹

Catatan:

- ¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 310.
- ² Ibid, hlm. 301.
- ³ Machasin, “Perjuangan Intelektual demi Keyakinan yang Mencerahkan”, dalam Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Al-Mutsaqqafuna fi al-Hadharah al-Arabiyah: Mihnah Ibn Hanbal wa Nahqah wa Naqbah Ibn Rusyd*, terj. Zamzam Afandi Abdullah, *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003, hlm. 5.
- ⁴ Ibid, hlm. 5.
- ⁵ Ibid, hlm. 6.
- ⁶ Ibid, hlm. 6. Mengenai sifat-sifat kekuasaan dapat dibaca juga dalam Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik; Perbincangan mengenai*

- Kepemimpinan dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 239– 283, sepanjang halaman ini si penulis menjelaskan mengenai kekuasaan.
- 7 Ibid, hlm. 6.
- 8 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 20.
- 9 Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun terjadinya kasus Dreyfus ini, Yudi Latif menuliskan pada 1896, lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 20, sedangkan Daniel Dhakidae menyebutnya tahun 1898, lihat Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 197, sementara Muhammad Abid Aljabiri menuliskan tahun 1894, dalam Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Al-Mutsaqqafuna fi al-Hadharah al-Arabiyyah: Mihnah Ibn Hanbal wa Nahqah wa Naqbah Ibn Rusyd*, terj. Zamzam Afandi Abdillah, *Tragedi Intelektual...*, hlm. 42–43.
- 10 Limantina Sihaloho, “Dalam Barisan Para Pengkhianat”, dalam www.acehinstitute.org 22 Oktober 2007, akses 20 Juli 2007. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai pelenyapan kaum Yahudi (*Holocaust*), apakah hal itu benar-benar seperti yang diberitakan melalui media dan film-film ataukah tidak seekstrem yang diceritakan dan difilmkan tersebut. Presiden Iran, Ahmadinejad, dan Presiden Israel sepanjang 2006–2009 terlibat perdebatan panjang mengenai hal ini.
- 11 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 197–199.
- 12 Dalam pengadilan pertama, 1894, Dreyfus dijatuhi hukuman seumur hidup. Pangkatnya diturunkan dan dia dibuang ke Pulau Setan. Dua tahun setelah pengadilan Letkol George Picquart, yang pada waktu itu menjadi Kepala Intelejen Militer Prancis menemukan bukti-bukti yang mengatakan bahwa bukan Dreyfus akan tetapi Mayor Marie Charles Esterhazy penulis jadwal rahasia tersebut. Picquart dipaksa diam oleh atasannya dan dikeluarkan dari dinas intelejen. Akan tetapi, pada saat yang sama, bukti-bukti ketidakterlibatan Dreyfus ditemukan juga oleh keluarga dan sahabat-sahabat serta simpatisan Dreyfus. Maka, untuk menyelamatkan mukanya, Angkatan Darat menyelenggarakan mahkamah militer darurat dan menghukum Esterhazy. Namun, tidak lama setelah itu, Esterhazy dibebaskan lagi. Pada Agustus 1898, Letnan Kolonel Hubert Joseph Henry, pengganti Picquart sebagai kepala dinas intelejen, mengakui bahwa dialah yang memalsukan dokumen yang melibatkan Dreyfus. Dia ditangkap, namun ia bunuh diri di sel tahanan. Pada 1899, Dreyfus diadili lagi di tingkat kasasi, namun di sana lagi-lagi Dreyfus dinyatakan bersalah, hukuman diturunkan dari penjara seumur hidup menjadi 10 tahun penjara. Akhirnya, Prancis diguncang krisis politik yang hebat karena protes masyarakat yang akhirnya pada Pemilihan Umum 1899 Pemerintah yang berkuasa jatuh dan digantikan oleh pemerintahan baru yang progresif dengan Perdana Menteri Pierre

- Waldeck Rousseau dan Presiden Emile Loubet. Pemerintah menganulir seluruh perkara Dreyfus dan namanya direhabilitasi dan dinaikan pangkatnya menjadi Mayor, dan diberikan penghargaan *The Legion of Honor*. Baca Eberhard Hungerbuhler, *Alfred Dreyfus mencari keadilan*, (terj.) bahasa Indonesia dari versi Jerman, *Ein Kampf ums Recht, Die Affaire Alfred Dreyfus*, Jakarta: Pradjnya Paramita, 1987. Penjelasan ini diambil dalam, Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 197–199.
- 13 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 21. Limantina Sihalolo menuliskan sebagai berikut: “Salah satu dari kalangan intelektual yang berjuang membela Alfred Dreyfus adalah Emile Zola (1840–1902), novelis dan kritikus terkemuka Prancis keturunan Italia. Zola menulis surat terbuka kepada Félix Faure yang saat itu menjabat sebagai presiden. Surat ini dipublikasikan pada 13 Januari 1898 di *L’Aurore* dengan judul yang sekaligus menjadi *headline*, “J’ACCUSE...!”. Akibat surat terbuka itu, Emile Zola digiring ke pengadilan lalu diusir dari Prancis. Emile Zola meninggal pada 1902 akibat keracunan karbon monoksida saat tidur; cerobong asap di rumahnya disumbat dari atas, diperkirakan oleh mereka yang tidak menyukainya. Anatole France, yang juga mendukung Lucie and Mathieu Dreyfus dalam usaha mereka mencari kebenaran atas apa yang terjadi pada Alfred Dreyfus, menyampaikan eulogi pada penguburan Emile Zola, “*He was a moment of the human conscience*”. Dua hari setelah surat terbuka Zola terbit, pada 15 Januari 1898, tulisan Benda berkaitan dengan kasus Dreyfus terbit di *Le Siècle*. Seperti Zola, Benda tampil sebagai seorang pembela Dreyfus. Kasus Dreyfus menjadi salah satu titik tolak penting dalam perkembangan karier Benda sebagai seorang intelektual. Walau ada pembelaan dari wakil pimpinan senat dan kalangan intelektual seperti Emile Zola dan kawan-kawan bahwa Dreyfus tidak bersalah, sikap anti-judaisme yang identik dengan anti-Dreyfus di Prancis tidak dapat dihempang lagi. Benda kecewa dengan para intelektual di negaranya yang gagal menjadi penjaga gawang kebenaran. Dari Limantina Sihaloho, “Dalam Barisan Para Pengkhianat”, dalam www.acehinstitute.org 22 oktober 2007, akses 20 Juli 2007.
- 14 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 21.
- 15 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Al-Mutsaqqafuna fi al-Hadharah...*, hlm. 43.
- 16 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. xxiv.
- 17 Ali Syari’ati lahir pada 24 November 1933. Ia meraih gelar doktornya di bidang sastra pada 1963 dari Universitas Sorbonne, Prancis. Selama hidupnya, ia mengabdikan dirinya untuk membangunkan masyarakat Islam dari belenggu kezaliman. Ia syahid di London, Inggris, pada 19 Juni 1977.
- 18 Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, Yogyakarta: Pilar Media 2005, hlm. 82.

- 19 Ibid, hlm. 83.
- 20 Ibid, hlm. 84–85.
- 21 Q.S. Ali Imran (03): 163.
- 22 Syamsuddin Arif, “Intelektual dan Intelektualisme: Perspektif Barat dan Islam”, Kuala Lumpur, 23 September 2007. dalam www.eraMuslim.com, diakses pada Selasa, 25 Maret 2008, jam 14.00 WIB.
- 23 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 21 dari buku Bauman, Z. 1989, *Legislators and Interpreters: On Modernity, Post Modernity an Intellectuals*, Polity Press, Oxford, hlm. 8.
- 24 **Daniel Dhakidae** lahir di Toto-Wolowae. Ngada, Flores, 22 Agustus 1945. Studi S-3 di Cornell University, di *Department of Government*, Ilmu Politik, Ithaca, New York, dengan mengambil spesialisasi di Bidang *Comparative Politics*, Ilmu Perbandingan Politik, sebagai major, dan mengambil *Political Thought* (Filsafat Politik) dan *Southeast Asian Studies* sebagai minor. Mendapat *Master of Arts*, M.A., di Bidang Ilmu Politik, tahun 1987, dan mendapat *Philosophy Doctor*, Ph.D., dalam Ilmu Politik dengan menulis disertasi “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry” tahun 1991. Disertasi tersebut mendapat penghargaan *The Lauriston Sharp Prize* tahun 1991 karena telah memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu (...has contributed most outstandingly to scholarship). www.bukabuku.com.
- 25 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 1.
- 26 Ibid, hlm. 9. Menurut Dhakidae, kasus penyebutan intelektual bagi orang Rusia yang belajar di Barat sama halnya dengan di Indonesia, ketika dengan mudah sebuah kelompok mengaku sebagai kaum cendekiawan atau kaum intelektual. Di masa colonial, mereka yang berbicara dengan bahasa Belanda disebut kaum intelektual, bahasa Belanda sendiri dijuluki bahasa intelektual, sedangkan mereka yang berbicara dengan bahasa Melayu atau bahasa daerah dianggap bukan intelektual.
- 27 Ibid, hlm. 9
- 28 Ibid, hlm. 32.
- 29 Ibid, hlm. 32.
- 30 Ibid, hlm. 33. Penulis sedikit menanggapi analisis Dhakidae di sini yang terkesan menyamakan *Clerc* dengan Alim. Bahwa kata “alim” bukanlah bahasa Indonesia (Melayu). Kata ini adalah bahasa Arab yang berasal dari kata ilmu (*ilmun*), maka alim artinya adalah orang yang berilmu pengetahuan. Dalam tradisi Islam, seorang alim sangat mengetahui hukum-hukum Islam, dan tidak ada pengistimewaan kepada seorang alim yang melanggar hukum. Dalam Islam, semua manusia sama di hadapan hukum Allah. Siapa pun yang melanggar harus dihukum tanpa pengecualian, meskipun ia nabi apalagi hanya keturunan nabi.

- ³¹ Ibid, hlm. 34, dari Julien Benda, *La Trahisons des Clercs*, hlm. 131 f, dan bandingkan juga dengan *The Betrayal of the Intellectuals*, hlm. 29 f.
- ³² Yudi Latif lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 26 Agustus 1964.
- ³³ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 25.
- ³⁴ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 32. Dalam keterangan di bukunya, Dhakidae menjelaskan tentang siapa Julien Benda, sang penulis buku *Pengkhianatan Intelektual*. Oleh Herbert Read, filosof Amerika, dia disebut sebagai: *a philosopher who has been opposed to most of the fashionable trends in literature an politics, and still today a solitary and embittered representative of values that are neither shlmlovely progressive nor obsutely reactionary*, “Dia melawan banyak hal yang berkembang dalam filsafat kesusastraan dan dalam arti itu ia adalah seorang filosof yang sepi sendiri dalam pribadi soliter”. Dia menolak faham intuisi yang dikembangkan dalam filosofi Bergsonian. Namun, buku itu dianggap buku yang tidak sepenuhnya murahan, tapi sama sekali tidak mengguncangkan filosofi Bergson tentang intuisi dan vitalitas. Dia menulis lagi sebuah buku yang dianggap berhasil yaitu *Belphegocr* yang mengkritik praktik seni di Prancis pada saat sebelum Perang Dunia I, 1914, yang menurut Benda hanya membangkitkan emosi dan sensasi; karya sastra tidak mampu memahami cara memancarkan kegirangan intelektual. Semua ini bisa dibaca dalam Herbert Read, *Julien Benda an the New Humanism*, pengantar ditulis untuk edisi berbahasa Inggris, *The Betrayal of Intellectuals*, the Beacon Press, London, 1955, hlm. xiii-xxxii (kata bercetak miring tambahan dari Dhakidae)
- ³⁵ Ron Eyerman adalah Profesor Ilmu Sosiologi, diterimanya dari BA Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial, sebuah Magister Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dari University of Oregon, dan Doktor di University of Lund, Swedia. Dia adalah penulis beberapa buku baru, termasuk *Musik dan Gerakan Sosial* dan *Budaya Trauma* baik dari Cambridge University Press dan *Budaya dan Trauma Collective Identity* dari University of California Press. Dia tertarik pada persoalan budaya dan teori gerakan sosial, teori kritis, studi budaya dan seni dari sosiologi. Dia adalah Co-Direktur Pusat Kebudayaan Sosiologi (CCS) dengan Jeffrey C. Alexander, pada 2007–2008, www.yale.edu.
- ³⁶ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 21.
- ³⁷ Gramsci lahir pada 22 Januari 1891 di Ales di Provinsi Cagliari di Sardinia, sebuah pulau yang terletak di sebelah barat semenanjung Italia. Pada malam 8 November 1926, Gramsci ditangkap di Roma dan sejalan dengan serangkaian Undang-Undang Eksepsional yang diberlakukan oleh pembuat undang-undang Italia yang didominasi oleh kelompok fasis, ia dimasukkan ke dalam tahanan soliter di Penjara Regina Coeli. Peristiwa ini menjadi awal dari periode penjara sepuluh tahun pada kematiannya karena pendarahan otak pada 27 April 1937. Yang menarik justru dalam

- periode penjara inilah Gramsci justru menghasilkan sumbangan terbesarnya terhadap baik khazanah pemikiran Marxisme maupun teori atas peristiwa ekonomi, politik dan budaya Italia serta perjuangan Partai Komunis Italia. Catatan-catatan ini ia sembunyikan di berbagai sel. Setelah divonis 20 tahun 4 bulan dan 5 hari di penjara pada 4 Juni 1928 bersama dengan pemimpin-pemimpin komunis Italia lainnya, Gramsci dikirim ke sebuah penjara di Turi yang terletak di Provinsi Bari. Setelah masa-masa ini, ia ada dalam pengawasan polisi di sebuah klinik di Formia. Pada Agustus 1935, ia dipindahkan ke Rumah Sakit Quisisana di Roma. Di sanalah, ia menghabiskan dua tahun terakhir dalam hidupnya. Robert H. Imam, “Civil Society dalam Pemikiran Antonio Gramsci”, dikutip dari www.adhiyul.wordpress.com, 10 januari 2008
- 38 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 22.
- 39 Rikard Bagun, “Kaum Cerdik Pandai, Antara Ilmu dan Ngelmu”, *Kompas*, 14 Juli 2008, hlm. 1 bersambung ke hlm. 15.
- 40 Lewis A. Coser lahir di Berlin-Jerman pada 1913 dan memperoleh gelar Ph.D. dari Universitas Columbia. Kemudian, selama beberapa waktu, dia mengajar di Universitas Chicago. Sebagian besar karier akademisnya dihabiskan di Universitas Brandeis. Sejak tahun 1968, Coser menjadi profesor luar biasa untuk Bidang Sosiologi di Universitas Negeri New York dan Stony Brook. Bukunya yang fenomenal adalah *The Functions of Social Conflict*.
- 41 Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama dan Kepemimpinan al-Quran di Indonesia”, dalam Abdurrahman, Burhanuddin Daja, Djam’annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993, hlm. 433, dari Lewis A. Coser, *Man of Ideas*, New York: The Free Press, 1965.
- 42 Rikard Bagun, “Kaum Cerdik Pandai...”.
- 43 Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama...”, hlm. 434.
- 44 Siswanto Masruri lahir di Solo, 27 Juli 1953, adalah Guru Besar Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 45 Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama...”, hlm. 435, dari buku Yogendra K Malik, *Intoduction*, dalam Yogendra K Malik (ed.), *South Asean Intelektual and Sosial Change*, New Delhi: Heritage Publisher, 1982.
- 46 Ibid, hlm. 433, dalam Edwards Shills, *The Intellectual and the Power and Other Essays*, Chicago: Chicago University Press, 1972.
- 47 Ibid, hlm. 433.
- 48 S.M. Lipset, “American Intellectuals: Their Politics and Status”, *Daedalus*, Vol 88, No 3, Summer 1989.
- 49 Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama...”, hlm. 435.
- 50 Syed Hussein Alatas seorang intelektual dalam bidang sosiologi yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Syed Hussein merupakan warga

- negara Malaysia, namun lahir di Bogor pada 17 September 1928. Dia kakak Prof Naquib Alatas, yang juga terkenal sebagai intelektual di Bidang Peradaban Islam dan Dunia Melayu. Prof Hussein terkenal sebagai intelektual yang tekun dalam berkarya. Salah satu karya terkenalnya, termasuk di Indonesia, adalah *Mitos Pribumi Malas*. Karya lainnya mengenai korupsi di Asia Tenggara juga menjadi rujukan penting di kalangan peneliti. Karier akademik Syed Hussein bermula ketika dia bekerja sebagai ketua di jabatan penelitian di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada 1958. Dia juga pernah menjabat Ketua Jabatan Pengajian Melayu di National University of Singapore (1967 hingga 1968). (ant-26). Koran *Suara Merdeka*, Kamis, 25 Januari 2007
- 51 Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama...”, hlm. 435.
- 52 Ibid, hlm. 436.
- 53 Prof. Dr. Selo Soemardjan lahir di Yogyakarta 23 Mei 1915. Sosok yang sederhana ini dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia setelah tahun 1959—seusai meraih gelar doktornya di Cornell University, AS—mengajar sosiologi di Universitas Indonesia (UI). Dialah pendiri sekaligus dekan pertama (10 tahun) Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (sekarang FISIP) UI. Kemudian, tanggal 17 Agustus 1994, ia menerima Bintang Mahaputra Utama dari Pemerintah dan pada 30 Agustus menerima gelar ilmuwan utama sosiologi. Ia dibesarkan di lingkungan abdi dalem Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kakeknya, Kanjeng Raden Tumenggung Padmonegoro, adalah pejabat tinggi di kantor Kasultanan Yogyakarta. Berkat jasa sang Kakek, Soemardjan—begitu nama aslinya—mendapat pendidikan Belanda. Dikutip seperlunya dari www.tokoh-indonesia.com.
- 54 Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama...”, hlm. 436.
- 55 Mochtar Buchori “Menggugat Dikotomi Ulama-Intelektual”, *Ta’dib*, No. 36. Th. III, Januari 1989.
- 56 Namanya sering dikaitkan dengan kelompok Barkeley di Indonesia.
- 57 Disampaikan dalam seminar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Januari 1966 dengan tema, *Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan yang Tidak Bijaksana*, Widjono mengawali pembicaraannya dengan mengangkat komitmen kaum intelektual, kutipan ini dapat dilihat dalam artikel Albert Hasibuan, “Posisi dan Peran Pemuda Indonesia dalam Perjuangan Hak-Hak Asasi Manusia Memasuki Abad XXI”, dalam Ramli Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, hlm. 203.
- 58 Mochtar Buchori “Menggugat Dikotomi...”, hlm. 436.
- 59 Ibid
- 60 Sidi Gazalba menjelaskan, dalam pembangunan sebuah rumah tentu ada arsitek dan ada tukang. Filosof merupakan seorang arsitek, sementara ilmuwan adalah tukang karena ia memiliki spesifikasi. Artinya, filosof adalah orang yang mengetahui pengetahuan tentang bagian rumah,

meskipun ia tidak bisa mengerjakannya. Lihat Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 47.

- 61 Thee Kian Wee merupakan peraih gelar *Doctor Honoris Causa* dari Australian National University. Pada 2008 berusia 73 tahun.
- 62 Kecenderungan tersebut diungkapkan cendekiawan Thee Kian Wie saat memberikan kesan dan pesan di tengah acara penyampaian penghargaan *Kompas* untuk cendekiawan berprestasi yang berlangsung di Yan Palace, Hotel Santika, Jakarta, *Kompas* (28 Juni 2008).
- 63 Dalam hal ini, Thee Kian Wie mencontohkan keputusan Pemerintah Amerika Serikat pada 1960-an untuk melibatkan diri pada Perang Vietnam tanpa mendengarkan suara para ilmuwan. Kemudian memakan korban jiwa hingga 50 ribuan pemuda Amerika dan tiga jutaan orang Vietnam tanpa ada perlunya. “Search for the Truth and Search for the Power” itu adalah dua tujuan yang pada dasarnya tidak *compatible* (cocok) katanya. Dalam *Kompas* (28 Juni 2008)
- 64 Pramoedya Ananta Toer lahir pada 1925 di Bora, Jawa Tengah. Hampir separuh hidupnya dihabiskan dalam penjara—sebuah wajah semesta yang paling purba bagi manusia-manusia bermartabat: 3 tahun dalam penjara Kolonial, 1 tahun di Orde Lama, dan 14 tahun yang melelahkan di Orde Baru (13 Oktober 1965–Juli 1969, Pulau Nusa-Kambangan Juli 1969–16 Agustus 1969, Pulau Buru Agustus 1969–12 November 1979, Magelang/Banyumanik November–Desember 1979) tanpa proses pengadilan. Pada 21 Desember 1979, Pramoedya Ananta Toer mendapat surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G30S/PKI, tetapi masih dikenakan tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara sampai tahun 1999 dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur satu kali seminggu selama kurang lebih 2 tahun. Beberapa karyanya lahir dari tempat purba ini, di antaranya Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca). Penjara tak membuatnya berhenti sejengkal pun menulis. Baginya, menulis adalah tugas pribadi dan nasion(kebangsaan)al. Dan ia konsekuen terhadap semua akibat yang ia peroleh. Berkali-kali karyanya dilarang dan dibakar. Dari tangannya yang dingin telah lahir lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Karena kiprahnya di gelanggang sastra dan kebudayaan, Pramoedya Ananta Toer dianugerahi pelbagai penghargaan internasional(kebangsaan)al, di antaranya: *The PEN Freedom-to-write Award* pada 1988, *Ramon Magsaysay Award* pada 1995, *Fukuoka Cultur Grand Price*, Jepang pada 2000, tahun 2003 mendapatkan penghargaan *The Norwegian Authors Union* dan tahun 2004 *Pablo Neruda* dari Presiden Republik Chile Senor Ricardo Lagos Escobar. Sampai akhir hidupnya, ia adalah satu-satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar Kandidat Pemenang Nobel Sastra. Mengenai Pramoedya dapat dibaca dalam buku A. Teeuw, *Citra*

- Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer*, Cet-1, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1997, dan Rudolf Mrazek, *Pramoedya Ananta Toer dan Kenangan Buru*, Yogyakarta: Cermin, 2000, hlm. 4.
- 65 Halaman ini disampaikan ketika pada 1981 Pram memberikan ceramah di Fakultas Sastra UI atas undangan Senat Mahasiswa, tentang “Sikap dan Peranan Kaum Intelektual di Dunia Ketiga, Khususnya di Indonesia” (<http://www.radix.net/~bardsley/sikap.htm>). Pram diusir dengan tertulis oleh Dekan. Diinterogasi oleh Satgas Intel selama seminggu, anggota Senat yang dianggap bertanggung jawab dipecat dan dipenjarakan. Lihat A. Teeuw, *Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya...*, hlm. 51.
- 66 Soekarno memang sering disebut sebagai pemimpin 3 A: Asia, Afrika, Amerika Latin. Pramoedya sendiri sangat mengagumi Soekarno.
- 67 Mochtar Pabottingi lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan, 17 Juli 1945. Buku kumpulan puisinya berjudul *Dalam Rimba Bayang-bayang* (2003).
- 68 Disarikan dari wawancara majalah *Ummat* dengan Mochtar Pabottingi bertajuk “Insya Allah, Saya Takkan Tiarap”, diambil dari www.library.ohion.edu/indopubs/1996/09/21/0051. Akses 20 Juni 2009.
- 69 Majalah *Ummat* (21/09/1996).
- 70 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 33. Penulis tidak mengutip sebagaimana bahasa buku, melainkan adaptasi tanpa menghilangkan makna hakiki dari tulisan tersebut.
- 71 Syafi’i mengatakan ini saat memberi materi berjudul “Soekarno dan Islam” dalam Sekolah Soekarno di Yayasan Kanisius Yogyakarta tanggal 29 Juni 2009. Penulis sebagai peserta dalam acara tersebut. Syafi’i sendiri tidak membuat makalah dalam acara ini.
- 72 J.C. Tukiman Taruna, “Korupsi Kebudayaan”, 1997 (dikutip dari *Glynn Corchrane*, 1989).
- 73 Hamengkubuwono X, “Meluruskan Kembali Makna Nilai-Nilai Budaya Jawa”, Pidato Kebudayaan Mangayubagya Peringatan 34 Tahun Pusat Kesenian Jakarta—Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 5 November 2002, hlm. 7. Mengenai pemilihan judul pidato “Meluruskan Kembali”, Sultan HB X mengatakan karena selama ini pihak penguasa telah dengan sengaja dan sistematis memasukkan nilai-nilai budaya Jawa secara keliru sebagai budaya politik Orde Baru. Generasi yang lahir di zaman informasi pasti kurang mengenal lagi *Babad Tanah Jawi*, *Wulangrèh*, *Wêdhâtâmâ*, *Sabdâ Pandhitâ Ratu*. Juga jujur saja, sebenarnya banyak dari kita yang kurang paham apa yang dimaksud dengan “*lengser kêprabon*, *madêg pandhitâ*” dan idiom-idiom dengan sederet manipulasi makna, atau setidaknya, interpretasi subyektif terhadap simbol-simbol budaya Jawa yang selama ini telah meresap menjadi semacam budaya politik bangsa. Proses ini berlangsung cukup lama di luar kesadaran masyarakat melalui media TV, radio, dan koran-koran yang berafiliasi dengan Pemerintah. Misalnya

program-program pembangunan, kesenian, ekonomi dan berbagai sajian acara atau berita lainnya lebih banyak didominasi oleh Jawa, sehingga bagi pemirsa, pembaca, dan pendengar lebih banyak mengetahui informasi atau berita tentang berbagai hal yang bernuansa Jawa ketimbang daerahnya sendiri. Proses ini memang terkait langsung dengan sistem kekuasaan yang sentralistik di Jawa, sehingga persoalan birokrasi dan kebijakan pemerintahan daerah selalu diproses di pusat (Jakarta). Akibatnya, pendistribusian pegawai atau pejabat ke daerah, terutama pada bidang-bidang yang strategis, lebih banyak ditempati orang-orang Jakarta (Jawa). Pada halaman terpisah, HB X mengatakan: “Dari aspek-aspek yang menunjukkan dominasi Jawa, kelihatan bahwa dominasi yang dibangun melalui kosa kata bahasa Jawa jauh lebih kentara. Pengaruh Jawanisasi yang demikian kuat kemudian menimbulkan apa yang disebut Magnis-Suseno sebagai *Jawanisasi tatakrama komunikasi nasional*. Fenomena pen-Jawa-an istilah dapat kita lihat dari nama-nama lembaga dan usaha, seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Karang Taruna, nama gedung-gedung seperti Sasana Wiratama, Graha Saba Pramana, dan lain sebagainya. Di luar Jawa pun, tidak jarang juga menggunakan kosa kata bahasa Jawa. Ada pula semboyan-semboyan yang dihafal oleh anak-anak di luar Jawa, seperti misalnya: *gemah-ripah loh jinawi, tata-titi tentrem karta-raharja*, padahal tanah di sana tidak subur seperti di Jawa.” Menurut HB X, agenda yang mendesak sekarang ini adalah suatu bentuk *counter culture* yang mirip renaissance budaya—kebangunan kembali kebudayaan. Gerakannya berupa pemurnian makna terhadap idiom-idiom budaya Jawa, yang selama ini dimanipulasi-tafsirkan, dan telah melekat menjadi wacana politik dan budaya politik.

⁷⁴ Majalah *Ummat* (21/09/1996).

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Fadjroel Rahman, “Dunia Intelektual dan Dagang”, *Kompas*, 7 Maret 2005. Dalam artikel ini, Fadjroel Rahman mengkritik 36 intelektual yang mendukung kenaikan BBM pada pemerintahan SBY-Kalla. Intelektual Istana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mereka yang dekat dengan Presiden dan Wapres. Intelektual Istana mengatakan bahwa kenaikan Subsidi BBM dapat mengurangi kemiskinan sementara Fadjroel Rahman berpendapat bahwa kemiskinan karena pengelolaan Negara yang tidak benar.

⁷⁷ Garin Nugroho, “Wacana Demokrasi dalam Perspektif Budaya”, Forum Diskusi, Kerjasama Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa dan harian *Nusa Tenggara*, *Kompas*, 30 April 1999.

⁷⁸ Istilah intelektual durhaka merupakan perluasan makna dari peng-khianatan intelektual. Di Indonesia, istilah ini sudah banyak disuarakan oleh Soekarno, Hatta, Mochtar Lubis, Pramoedya, dan lain-lain. Belakangan, istilah pengkhianatan intelektual jarang terdengar.

- 79 Pradana Boy, “Myth of the Bad Scientists—Dilema Peran Kaum Intelektual”, www.icmi.or.id/ind. 23 Juni 2008.
- 80 Kalimat dalam kurung adalah tambahan dari penulis. Tulisan Sudjatmoko yang dikutip Dhakidae ini intinya membandingkan tipikal intelektual di masa demokrasi terpimpin Orde Lama dengan intelektual di masa Orde Baru. Penulis hanya mengambil inti dari apa yang dimaksud dengan Sudjatmoko dengan pelacuran intelektual saja. Sebab, bukan kajian ini tidak fokus untuk membandingkan tipikal intelektual di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 314.
- 81 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 35.
- 82 Kenapa ada kata “pembangunan”, karena berita ini diturunkan tahun 1994 di masa Orde Baru masih berkuasa sebelum jatuh pada 12 Mei 1998. Satu hal penting lagi yaitu, mayoritas berita di media di zaman Orde Baru jarang yang berani mengkritik Soeharto secara terang-terangan, termasuk narasumber.
- 83 Di era reformasi sudah jarang terdengar peringatan Hari Sarjana. Sejatinnya, tradisi ini menarik juga dihidupkan kembali untuk me-refleksikan sejauh mana peran sarjana-sarjana Indonesia bagi kemajuan Indonesia. Penulis belum mendapatkan data sejak kapan tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Sarjana di Indonesia.
- 84 *Suara Pembaruan*, “Menyambut Hari Sarjana: Pengkhianatan Intelektual Terjadi Bila Sarjana Tak Peka terhadap Masyarakat”, Jumat, 30 September 1994.
- 85 Dalam banyak tulisan dan artikel yang kami periksa, ada kecenderungan intelektual di era Orde Baru menyebut intelektual pada masa Orde Lama sebagai pengkhianat intelektual, demikian juga sebaliknya.
- 86 Saat itu Suyanto sebagai dosen Pascasarjana IKIP Yogyakarta (sekarang UNY), sebelum pada akhirnya menjadi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- 87 *Suara Pembaruan*, “Menyambut Hari Sarjana...”.
- 88 Ketua Umum PB HMI 1997–1999, sekarang Ketua Umum Partai Demokrat 2010–2015.
- 89 Anas Urbaningrum, “Tradisi Intelektual vs Tradisi Politik Perlunya Reorientasi”, dalam *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*, Jakarta: Penerbit Majelis Nasional KAHMI, 1997, hlm. 114.
- 90 Kiki Fardiansyah Wijaya “Tugas`Rausyan Fikr untuk Aksi Perubahan Sosial: Sebuah Risalah Pemikiran Ali Syari`ati”, dalam Muhiddin M. Dahlan (ed.), *Sosialisme Religius*, hlm. 213–214.
- 91 Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 28.
- 92 *Ibid*, hlm. 28.

- ⁹³ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 32.
- ⁹⁴ Abdul Rivai dianggap oleh banyak orang di Sumatera sebagai orang Indonesia dalam masa Indonesia modern yang berjuang untuk menghapuskan ketidakadilan Pemerintah Belanda. Untuk itu, ia mempergunakan majalah *Bintang Hindia*, yang terbit pada permulaan abad ini. Lihat Parada Harahap, *Riwayat Dr. A. Rivai* (Medan: Indische Drukkerij, 1939). Tetapi, Rivai sendiri menjadi asing terhadap familinya dilihat dari sudut pandang adat ataupun dari aturan agama. Rivai kawin dengan seorang wanita Belanda beragama Kristen. Tentang pertikaian antara mereka yang berpendidikan Barat di satu pihak dengan golongan tradisi (adat atau agama), dalam Abdoel Moeis, *Salah Asuhan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1935, Abdoel Moeis menuliskan dalam bentuk novel.
- ⁹⁵ Majalah ini milik seorang Belanda yang idealis-romantik, Henri Constant Claude Clockener Brousson, dan dieditori oleh Abdul Rivai, majalah *Vernakular* ini diterbitkan di Amsterdam dan diedarkan di Hindia pada 1902–1907. Majalah ini menjadi corong bagi inteligensia baru.
- ⁹⁶ Mengenai bukti bahwa istilah “bangsawan pikiran” ini telah digemakan oleh para jurnalis dan generasi muda lainnya pada masa itu, kita bisa melihat tulisan seorang komentator mengenai masyarakat Jawa Kontemporer di majalah *Sinar Djawa*, No. 52 (4 Maret 1914) yang mengatakan: “*Dengan berubahnya, sebuah tipe baru bangsawan telah muncul, yaitu bangsawan pikiran.*” (dikutip oleh Adam, 1995: 173), dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 151.
- ⁹⁷ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 151.
- ⁹⁸ Ibid, hlm. 32.
- ⁹⁹ Ibid, hlm. 164.
- ¹⁰⁰ Tirta Adhi Surjo lahir di Blora (Jawa Tengah) 1880 dari keluarga keturunan priyayi tinggi (bupati). Setelah lulus dari ELS pada 1894, ia melanjutkan studinya ke sekolah Dokter-Jawa (STOVIA). Dengan begitu, ia memisahkan dirinya dengan arus utama kecenderungan pendidikan anak-anak priyayi pada masa itu. Tirta Adhi Surjo dikeluarkan dari STOVIA karena terbukti memberikan resep obat secara ilegal kepada seorang keturunan China yang amat membutuhkan. Dalam Pramodya Ananta Toer, *Sang Pemuda*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985, hlm. 11–21.
- ¹⁰¹ Koran *Soenda Berita* mendapat bantuan finansial dari Bupati Cianjur, yaitu R.A.A. Prawiradiedja, dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 165.
- ¹⁰² Koran *Medan Prijaji* mendapat dukungan finansial dari Kepala Jaksa Cirebon, Raden Mas Tumenggung Pandji Arjodinoto, dan juga dari seorang pedagang Muslim taat, yaitu Haji Muhammad Arsjad. Mingguan ini juga mendapat perlindungan politik dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Heutsz, dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 165.

- ¹⁰³ Takashi Shiraisi adalah penulis buku terkenal, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912–1926*, New York: Cornell University Press, 1990, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hilmar Farid, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–126*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997. Mengenai Tirtoadhisoeerjo, lihat hlm. 43–47, 51, 53, 56–58, 60–61, 65, 81, 108, 110, 470, 474.
- ¹⁰⁴ T. Shirashi, *An Age in Motion...*, hlm. 34.
- ¹⁰⁵ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 32.
- ¹⁰⁶ Ibid, hlm. 33.
- ¹⁰⁷ Ibid, hlm. 33.
- ¹⁰⁸ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 49–50
- ¹⁰⁹ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 15.
- ¹¹⁰ Ibid, hlm. 30. Penjelasan Yudi ini menurut penulis ada sisi lemahnya juga, karena sebelum penerapan politik etis, sebenarnya pendidikan keagamaan justru sudah berlangsung di pesantren-pesantren meskipun tekanan tinggi Pemerintah Kolonial.
- ¹¹¹ Sebagaimana dikutip Yudi Latif dari Edward Said, “Representing the Colonized: Antropology’s Interlocutors”, *Critical Inquiry*, Vol 12, No. 2, hlm. 207.
- ¹¹² Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 30.
- ¹¹³ Menurut Nurcholish Madjid, sebagai seorang bapak intelektualisme Islam Indonesia, Haji Agus Salim adalah seorang Muslim dengan simpati Sosialis, seorang dengan prinsip tinggi yang tidak sudi mengorbankan keyakinan-keyakinannya untuk kelayakan (*expediency*). Agus Salim termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap penanaman semangat demokratis dan sikap terbuka di hati kaum muda Muslim, yang kemudian tampil menganjurkan pikiran liberal dan Sosialis Barat, dan mendukung kemajuan, stabilitas dan toleransi. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 90.
- ¹¹⁴ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 123, dalam Ridwan Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995, hlm. 1–3.
- ¹¹⁵ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 307. Agussalim Sitompul menuliskan dua tujuan JIB, yaitu: (1). *Bestudering van de Islam et bevordering van de naleving van zijn voorschriften* (mempelajari agama Islam dan mengajarkan agar ajaran-ajarannya diamalkan). (2) *Het opwekken van sympathic voor de Islam en zijn beleiders, naast positieve verdraagzaamheid voor andersdenken* (menumbuhkan simpati terhadap Islam dan pengikutnya, di samping toleransi yang positif terhadap orang-orang yang berlainan agamanya), dalam Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 124. Perbedaan redaksi

- ini bukan pada substansi, lebih disebabkan perbedaan referensi. Agussalim Sitompul mengambil dari Mohammad Roem “Jong Islamieten Bond yang Saya Alami” dalam *Kertas Kerja Diskusi Mengenang Hari Lahirnya Jong Islamieten Bond (JIB)* diadakan PB HMI di Jakarta 3 Januari 1982, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1982, hlm. 14, sedangkan Yudi Latif dari majalah JIB, *Het Licht*. No. 1/1925, hlm. 7. Dari rumusan tujuan ini sudah sangat jelas bahwa sikap toleransi sudah dikembangkan oleh JIB sejak awal berdirinya.
- 116 Mohammad Roem, “Jong Islamieten Bond yang Saya Alami” dalam *Kertas Kerja Diskusi Mengenang Hari Lahirnya Jong Islamieten Bond (JIB)* diadakan PB HMI di Jakarta 3 Januari 1982, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1982, hlm. 14
- 117 Majalah JIB, *Het Licht* (cahaya), No 10/1925, hlm. 3–10, dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 307.
- 118 Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 131.
- 119 Berikut nama-nama organisasi yang tercantum dalam peristiwa paling bersejarah bagi kelahiran bangsa Indonesia Deklarasi Sumpah Pemuda 1928: Perkumpulan Pemuda Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia. *Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air: Indonesia*.
- 120 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 309.
- 121 Ibid, hlm. 310.
- 122 Ibid, hlm. 310.
- 123 Ibid, hlm. 310–311.
- 124 Ibid, hlm. 312.
- 125 Ridwan Saidi, *Kebangkitan Islam Era Orde Baru: Studi Kepeloporan Cendekiawan Islam sejak Zaman Belanda sampai ICMI*, Jakarta: Penerbit LSIP, 1993, hlm. 39, dalam Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 125.
- 126 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 125.
- 127 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 312–312.
- 128 A. Karim, *Studenten Islam Studieclub: Moslemse Reveil*, Vol. 3, No. 5, November 1938. Diterbitkan kembali dalam lampiran buku, Ridwan Saidi, *Cendekiawan Islam...*, 1990, hlm. 89.
- 129 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 126. Untuk mewujudkan cita-cita ini, SIS mendirikan majalah *Organ van Studenten Islam Studieclub* pada Maret 1935. Pada edisi kelimanya, majalah ini berganti nama menjadi *Moeslimse Reveil* (Kebangkitan Muslim). Untuk memberikan sebuah interpretasi rasional terhadap kitab

- suci, majalah ini seringkali menggunakan tafsir al-Quran dari Ahmadiyah yang terkenal dalam penalarannya yang rasional dan saintifik, namun perlu ditegaskan SIS bukanlah Ahmadiyah, dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 313.
- ¹³⁰ S.U. Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Prawoto Mangkusasmito*, Surabaya: Penerbit Documenta, 1972, hlm. 340. Lihat Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 126.
- ¹³¹ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 313–314.
- ¹³² Ibid, hlm. 310.
- ¹³³ Ibid, hlm. 314.
- ¹³⁴ Yudi Latif mencatat bahwa SIS pernah melahirkan sebuah artikel berjudul “Dante Islam” yang dimuat dalam majalah *Organ Van de Studenten Islam Studieclub*. Artikel tersebut memberi interpretasi rasional terhadap kitab suci, majalah SIS ini sering menggunakan tafsir al-Quran dari Ahmadiyah yang terkenal karena penalarannya yang rasional dan saintifik, lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, hlm. 313.
- ¹³⁵ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 126.
- ¹³⁶ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, hlm. 31.
- ¹³⁷ Ibid, hlm. 31
- ¹³⁸ Rijalul Imam, “Profil Intelektual Profetik (1)”, dalam www.kammi.or.id, diakses tanggal 28/11/2008, 22.00 .
- ¹³⁹ Syamsuddin Arif, doktor lulusan Universitas Frankfurt-Jerman, Peneliti INSISTS sekaligus dosen di Universitas Islam Antarbangsa, Malaysia, dalam www.eraMuslim.com, diakses tanggal 25 Maret 2008.
- ¹⁴⁰ Syamsuddin Arif, “Intelektual dan Intelektualisme: Perspektif Barat dan Islam”, makalah disampaikan dalam sebuah diskusi di Kuala Lumpur, 23 September 2007, dalam www.eraMuslim.com, diakses tanggal 25 Maret 2008.
- ¹⁴¹ Maksud Syamsudin Arif, Islam tidak pernah menentang kemajuan ilmu pengetahuan sejak awal kemunculannya, jangan disamakan dengan tradisi gereja terdahulu yang tidak segan-segan menghukum kalangan ilmuwan dengan hukuman yang berat. Artinya, proses pembaharuan pemikiran Islam jangan serta-merta menggugat otoritas al-Quran.
- ¹⁴² Syamsuddin Arif, “Intelektual dan Intelektualisme...”.
- ¹⁴³ Ibid.
- ¹⁴⁴ Ibid.
- ¹⁴⁵ Ruslan Abdulgani adalah sesepuh Angkatan 1945, panggilan akrabnya “Cak Roes”, dia dikenal sebagai Jubir Usman singkatan dari Juru Bicara Usdek Manipol, pernah menjadi Konsultan Badan Penasihat Presiden tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), dalam majalah *Forum Keadilan*, Nomor 10, Tahun III, 1 September 1994, hlm. 84.

- ¹⁴⁶ Ruslan Abdulgani, “Kenapa Sih Cendekiawan Diikat menurut Agama”, majalah *Forum Keadilan*, Nomor 10, Tahun III, 1 September 1994, hlm. 84.
- ¹⁴⁷ Ibid, hlm. 85.
- ¹⁴⁸ Pernyataan Ruslan Abdulgani ini ditujukan pada Seminar Nasional Sumber Daya Manusia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia Ke-49. Seminar tersebut dihadiri oleh kelompok-kelompok cendekiawan yaitu: Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), sumber majalah *Forum Keadilan*, Nomor10, Tahun III, 1 September 1994, hlm. 12–18.
- ¹⁴⁹ Cendekiawan (intelektual) ialah orang yang karena pendidikannya— baik formal, informal, maupun nonformal—mempunyai perilaku cendekia, yang tecermin dalam kemampuannya menatap, menafsirkan, dan merespons lingkungan sekitarnya dengan sifat: kritis, kreatif, obyektif, analitis, dan bertanggung jawab. Karena sifat-sifat tersebut menjadikan cendekiawan memiliki wawasan dan pandangan yang luas, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Lihat Ahmad W. Pratikno, “Anatomi Cendekiawan Muslim, Potret Indonesia”, dalam Amien Rais (ed.), *Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 3.
- ¹⁵⁰ Martin van Bruinessen meraih gelar Ph.D. dalam Antropologi Sosial di *Utrecht University* pada 1978. Selama tahun 1978–1981, ia melakukan perjalanan ekstensif di Turki, Iran, dan Afghanistan. Selama itu, ia melakukan riset tentang sejarah Dinasti Turki Usmani dan mengajar bahasa Turki di *Department of Turkish Studies Utrecht University*, Negeri Belanda. Pada 1982, Martin van Bruinessen memilih Indonesia sebagai wilayah riset keduanya setelah Turki. Ia menghabiskan waktu selama 9 tahun penelitian dan mengajar berbagai aspek Islam Indonesia. Sejak tahun 1994, ia mengajar *Kurdish and Turkish Studies* di *Department of Arabic an Turkish Languages an Cultures, Utrecht University*. Selama tahun ajaran 1996–1997, ia menjadi profesor tamu dalam *Kurdish Studies* pada *Institute of Ethnology* di *Free University*, Berlin. Ia juga memberi kuliah di *Institute Nasional Languages at Civiltation Orientalles* di Paris. Pada 1999, ia diangkat menjadi guru besar dalam *Comparative Studies of Modern Muslim Societes* di Utrecht University dan di International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) Leiden. Dalam <http://books.google.co.id/books>, diakses tanggal 10 Januari 2009.
- ¹⁵¹ Martin van Bruinessen, Kata Pengantar untuk Farish A. Noor, “Suara Baru tentang Islam”, dalam Dick Van Der Meij (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: INIS, 2003, hlm. 159.
- ¹⁵² M. Dawam Raharjo, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 41.
- ¹⁵³ Bruinessen, dalam Van der Meij (ed.), *Dinamika Kontemporer...*, hlm. 160.

- ¹⁵⁴ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 37–38.
- ¹⁵⁵ Ibid, hlm. 38.
- ¹⁵⁶ Ibid, hlm. 38.
- ¹⁵⁷ Azyumardi Azra, “Intelektual Muslim di Dunia Islam”, *Republika*, 19 Oktober 2006.
- ¹⁵⁸ Ibid.
- ¹⁵⁹ Ibid.
- ¹⁶⁰ Lafran Pane adalah tokoh yang diteliti dalam buku ini.
- ¹⁶¹ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 664.

BAB IV

PEMIKIRAN LAFRAN PANE TENTANG INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang pembaharu (*mujaddid*) untuk umat Islam setiap penghujung seratus tahun supaya memperbarui (ajaran) agama mereka.”

(HR. Abu Dawud)¹

Alangkah baiknya jika perpustakaan-perpustakaan yang selama ini umumnya dipenuhi oleh hasil-hasil dari para sarjana Barat, kini juga dilengkapi dengan buah tangan para sarjana Islam. Tidak hanya di lingkungan *book research* ini kita bergerak, tetapi kita perlu mengembangkan *research* tersebut menjadi suatu *field research* (riset lapangan), menembus pagar-pagar kampung dan desa-desa di mana berdiam sebagian besar umat Islam. Di sanalah kita menemui unsur-unsur Islam dan pokok-pokok persoalan dari umat yang dibentuk di dalam kenyataan. Di dalam “*zoziale wirklichkeit*”-nya, *book research* dan *field research* semacam ini tidak saja berarti suatu perluasan dari dasar intelektual (*widening of intellectual bases*) yang kita cita-citakan, akan tetapi di sini pulalah tersimpul unsur abdi, bakti dan cinta. Pengabdian diri pada ilmu pengetahuan dalam Islam sesuai dengan alam kehidupan mahasiswa.

(Bintoro Cokroamijoyo)²

Islam janganlah dihayati sebagai ideologi alternatif. Ia harus dilihat sebagai hanya salah satu elemen ideologis yang melengkapi bangunan Keindonesiaan yang telah terbentuk.

(Abdurrahman Wahid)

INTELEKTUAL MUSLIM DAN PERADABAN AGUNG INDONESIA

Apakah tanda-tanda akan terwujudnya sebuah peradaban? Ibnu Khaldun menjelaskan, tanda wujudnya peradaban adalah

berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optik, kedokteran, dan lain sebagainya. Bahkan, maju-mundurnya suatu peradaban ter-gantung atau berkaitan dengan maju-mundurnya ilmu pengetahuan. Jadi, substansi peradaban yang terpenting dalam teori Ibnu Khaldun adalah ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup tanpa adanya komunitas yang aktif mengembangkannya.³

Karena itu, suatu peradaban atau suatu *umr'Én* harus dimulai dari suatu “komunitas kecil” dan ketika komunitas itu membesar maka akan lahir *umr'Én* besar. Komunitas itu biasanya muncul di perkotaan atau bahkan membentuk suatu kota. Dari kota itulah akan terbentuk masyarakat yang memiliki berbagai kegiatan kehidupan yang darinya timbul suatu sistem kemasyarakatan dan akhirnya lahirlah suatu negara. Kota Madinah, Kota Kordova, Kota Baghdad, Kota Samara, Kota Kairo dan lain-lain adalah sedikit contoh dari kota yang berasal dari komunitas yang kemudian melahirkan negara.

Tanda-tanda lahir dan hidupnya suatu *umr'Én* bagi Ibnu Khaldun di antaranya adalah berkembangnya teknologi (tekstil, pangan, dan papan/arsitektur), kegiatan ekonomi, tumbuhnya praktik kedokteran, kesenian (kaligrafi, musik, sastra, dan lain sebagainya). Di balik tanda-tanda lahirnya suatu peradaban itu terdapat komunitas yang aktif dan kreatif menghasilkan ilmu pengetahuan.

Namun, di balik faktor aktivitas dan kreativitas masyarakat masih terdapat faktor lain yaitu agama, spiritualitas atau kepercayaan. Para sarjana Muslim kontemporer umumnya menerima pendapat bahwa agama adalah asas peradaban, menolak agama adalah kebiadaban. Sayyid Qutb menyatakan bahwa keimanan adalah sumber peradaban. Meskipun dalam peradaban Islam struktur organisasi dan bentuknya secara material berbeda-beda, namun prinsip-prinsip dan nilai-nilai asasinya adalah satu dan permanen.

Prinsip-prinsip itu adalah ketakwaan kepada Tuhan (*taqwa*), keyakinan kepada keesaan Tuhan (*tawĪĒd*), supremasi kemanusiaan di atas segala sesuatu yang bersifat material, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan penjagaan dari keinginan hewani, penghormatan terhadap keluarga, me-nyadari fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi berdasarkan petunjuk dan perintah-Nya.

Sejalan dengan Sayyid Qutb, Syeikh Muhammad Abduh menekankan bahwa agama atau keyakinan adalah asas segala peradaban. Bangsa-bangsa purbakala seperti Yunani, Mesir, India, dan lain-lain, membangun peradaban mereka dari sebuah agama, keyakinan atau kepercayaan. Arnold Toynbee juga mengakui bahwa kekuatan spiritual (*batiniyah*) adalah ke-kuatan yang memungkinkan seseorang melahirkan manifestasi lahiriyah (*outward manifestation*) yang kemudian disebut sebagai peradaban itu.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 3 hal penting yang menopang sebuah peradaban, yakni: ilmu pengetahuan, komunitas yang mengembangkannya serta keyakinan atau agama sebagai asas peradaban. Jika kita kontekskan dengan situasi di Indonesia, hal ini sudah berjalan ratusan tahun silam. Agaknya, terlalu jauh jika kembali ke zaman Syailendra, Sriwijaya, Majapahit, dan ratusan kerajaan di Nusantara, mari kita mulai saja dari tahun 1900-an. Berbagai kelompok belajar tumbuh dengan pesat, tentunya bukan semata karena politik etis, melainkan fitrah manusia yang ditakdirkan selalu ingin mencari kebenaran, keadilan. Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sesungguhnya adalah kemenangan ilmu pengetahuan.

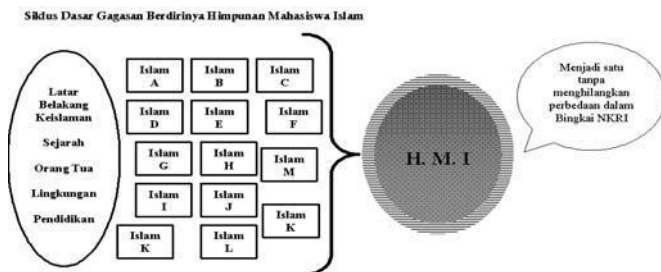
Bahkan, sumpah pemuda 1928 yang menjadi landasan pacu bagi kemerdekaan Indonesia dibangun beralaskan ilmu pengetahuan. Terdapat ilmu geografi dalam sumpah pemuda, ilmu bahasa (linguistik), ilmu pertanian, sosiologi, antropologi, teknik, astronomi dan lain sebagainya. Sehingga bersyukurlah kita ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia yang

dibangun dengan ilmu pengetahuan. Tidak berlebihan jika Anies Baswedan menyebut pergerakan pada periode 1900– 1930 diarsiteki oleh para intelektual.⁵

Pada 18 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih dan UUD 1945 ditetapkan, sehingga resmiah bangsa Indonesia membentuk negara, dan itu dibangun di atas ilmu pengetahuan. Masalah selanjutnya adalah terbatasnya sumber daya manusia untuk membesarkan Indo-nesia yang baru saja lahir. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menggalang konsolidasi nasional, sebab ancaman kolonialisme semakin nyata. Kedua masalah pasca-kemerdekaan ini sangat menentukan apakah peradaban Indonesia akan terwujud atau sebaliknya Indonesia menjadi salah satu provinsi dari Belanda.

Tanpa menutup mata akan peran-peran kelompok lainnya dan sesuai dengan kajian dalam buku ini, maka akan kita lihat peran Lafran Pane dan kawan-kawannya melalui HMI dalam rangka membangun peradaban agung Indonesia dengan solusi nyata untuk menyelesaikan dua persoalan di atas. Jika kita kembali kepada teori Ibnu Khaldun bahwa peradaban dibangun dengan ilmu pengetahuan, sesungguhnya gagasan Lafran Pane mendirikan HMI di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 merupakan aktualisasi dari pemikiran tersebut, terlepas dari apakah Lafran Pane pernah membaca buku Ibnu Khaldun atau tidak.

Gagasan pendirian HMI oleh Lafran Pane bermula dari komunitas kecil yang memiliki wawasan Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan, sehingga lahirah dua Tujuan HMI: *mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam*. Lafran bercita-cita ingin menghidupkan potensi-potensi mahasiswa Muslim untuk kejayaan NKRI dengan jalan menciptakan intelektual-intelektual Muslim.



CIRI-CIRI INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA

Berdasarkan berbagai sumber yang diteliti dari perkataan dan perbuatan Lafran Pane, maka terdapat 6 (enam) pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia:

1. Keyakinan Intelektual Muslim Indonesia pada Kesempurnaan Ajaran Islam

Lafran Pane meyakini Islam merupakan ajaran yang sempurna. Pada Bab II telah dijelaskan mengenai proses Lafran Pane hingga sampai pada kesimpulan ini. Pernyataan ini adalah pernyataan yang penuh dengan kesadaran, bukan suatu polesan apalagi paksaan. Lafran Pane mengatakan:

Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia lain, satu masyarakat dengan masyarakat lain, dari yang paling kecil, yaitu masyarakat keluarga, sampai masyarakat yang besar, seperti masyarakat negara. Islam juga berisi peraturan-peraturan dan tuntunan-tuntunan untuk segala lapangan hidup. Maka, dapatlah disebut bahwa agama Islam itu berupa satu kebudayaan yang sempurna yang tidak timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat dan bukan hasil ciptaan manusia pada satu waktu, akan tetapi adalah kebudayaan yang diturunkan Tuhan, langsung kepada masyarakat Arab dan juga berlaku untuk seluruh dunia. Adanya bermacam-macam bangsa yang berbeda-beda masyarakatnya, yang tergantung pada faktor-faktor alam, kebiasaan dan lain-lain, maka kebudayaan Islam hendaknya dapat diselaraskan dengan masing-masing masyarakat itu. Dalam masyarakat,

segala sesuatu saling memengaruhi, manusia memengaruhi manusia lain, masyarakat dipengaruhi oleh manusia dan sebaliknya. Begitu pula hasil kebudayaan (*culture product*). Yang satu memengaruhi yang lain dan selanjutnya memengaruhi masyarakat yang lain.⁶

Menurut Lafran Pane, setelah kemerdekaan, dampak kolonialisme Belanda tidak serta-merta lenyap, khususnya dari mereka yang semata-mata menerima pengajaran di lembaga-lembaga kolonial. Contoh sederhana dari dampak tersebut adalah perasaan yang menganggap seolah-olah bangsa Barat dalam hal apa pun lebih dari kita,⁷ Lafran mengatakan:

Jika ajaran Islam dipraktikkan oleh rakyat Indonesia dalam segala lapangan hidup dengan sebaik-baiknya, tidak akan mungkin Belanda bisa menjajah dan mengeksploitasi bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Penjajah sangat memahami potensi lemahnya pendidikan Islam pada mayoritas masyarakat Indonesia.⁸

Mengenai penghambaan diri terhadap Barat, Prof. Dr. A. Mukti Ali pernah mengatakan: “Namun, arus gelombang perang kemerdekaan dari bangsa-bangsa di dunia, khususnya dunia Islam, yang sejak abad kedelapan belas dilanda oleh banjir kolonialisme dan imperialisme, sekaligus telah melanda bangsa-bangsa Asia-Afrika, telah membuat perubahan yang radikal terhadap jalannya sejarah dunia yang diilhami oleh aspirasi dan potensi perjuangan Islam pada bangsa-bangsa tersebut, dan dalam abad-abad berikutnya sampai sekarang, segala tenaga, biaya dan perhatian dikerahkan untuk mem-bebasan diri dari penghambaan Barat itu.”⁹

Agus Salim, tokoh Sarekat Islam, juga sudah menjelaskan bahwa dunia Barat harusnya berterima kasih kepada Islam karena sumbangsihnya yang besar terhadap peradaban Barat. Sayangnya, banyak sarjana Barat dan misionaris Kristen yang secara tak kenal lelah mempromosikan citra negatif Islam. Sedangkan umat Islam hari ini karena kurangnya intelek-

tualisme dan kurangnya pemahaman akan Islam menerima begitu saja definisi negatif atas Islam tersebut.¹⁰

Islam datang untuk perbaikan akhlak, manusia berakhlak adalah manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Islam mendoktrin umatnya bahwa semua manusia itu sama, Islam menentang perbudakan serta mendorong kemerdekaan setiap jiwa. Ajaran ini relevan untuk memunculkan kesadaran bahwa bangsa Belanda tidak lebih tinggi derajatnya dari bangsa Indonesia.¹¹ Lafran kemudian mendirikan HMI sebagai aktualisasi dari keyakinannya tersebut. Nurcholish Madjid menguatkan hal ini dengan mengatakan: “Inilah sesungguhnya latar belakang yang lebih jauh dan fundamental dari gagasan Lafran Pane mendirikan HMI. HMI tidak lahir sebagai sekadar suatu reaksi terhadap keadaan temporer di depan mata, tetapi berakar ke dalam aspirasi umat Islam yang dikandung selama berabad-abad lamanya. HMI adalah suatu cetusan dari tekad mulia, suatu manifestasi dari ‘kalimat thoyyibah’ (pernyataan baik). Kalimat thoyyibah itu diumpamakan dalam al-Quran sebagai pohon yang baik, uratnya menghunjam ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Tuhan.”¹²

Dampak Berdirinya HMI

Prof. Dr. Syafri Syairin¹³ menjelaskan dua hal telah dilakukan Lafran Pane pada awal pendirian HMI. *Pertama*, Lafran Pane telah menunjukkan suatu upaya mengangkat Islam sebagai sesuatu yang lebih tinggi di mata mahasiswa. Islam bukanlah sekumpulan *kaum sarungan* yang kumal serta hanya mengetahui shalat, pengajian. Sehingga Islam tidak perlu disingkirkan dari kehidupan sehari-hari. Lafran Pane juga dengan segala upaya berusaha menanamkan rasa percaya diri sebagai orang Islam kepada segenap mahasiswa yang beragama Islam. Syafri Syairin juga mengatakan: “Dulu perdebatan di HMI adalah, apakah HMI melambangkan kesantrian? Karena

jika dilihat dari foto-foto lama HMI bisa dikatakan mayoritas anggota HMI tidak memakai kerudung, kebanyakan memakai rok biasa, bahkan rok mini. Namun, dengan mengaku Islam saja, sudah satu pencerahan yang baru.”

Kedua, Lafran telah melakukan misi pencerahan, bahwa Islam itu satu dan kelompok-kelompok apa pun dalam Islam itu tidak menjadi persoalan. Hal ini dilakukan dengan penekanan terhadap independensi HMI yang mengikis fanatisme kelompok di kalangan anggota HMI. HMI yang digagas Lafran Pane menekankan pada persatuan umat Islam.¹⁴

Ridwan Saidi¹⁵ mengatakan: “Lafran Pane sangat menganggap pentingnya ceramah-ceramah, diskusi-diskusi tentang agama Islam di kalangan terpelajar seperti kelak diakuinya di depan Kongres Muslimin Indonesia 20–25 Desember 1949. Demikianlah Lafran Pane, dengan HMI yang didirikannya ia bermaksud menanamkan nilai-nilai Islam pada diri anggotanya, seraya memperluas cakrawala keilmuan mereka. Melalui HMI, Lafran membina cendekiawan Muslim muda.”¹⁶

Lafran Pane menginginkan semua mahasiswa yang beragama Islam mengenal dan menghayati ajaran agamanya, serta mengamalkannya di mana pun ia berada. Tentunya peng-hayatan dan pengenalan agama tersebut disesuaikan dengan atribut kemahasiswaannya yang menekankan pada etos kecendekiawanan, bukan sekadar mengikuti. Harapan yang ingin diperoleh dari ini adalah terciptanya insan akademis yang beragama dan memiliki wawasan serta kepekaan politik. Dengan etos kecendekiawanan Islam, akan terasa lebih berbunyi. Islam akan lebih sejuk, damai jika diamalkan dengan ilmu pengetahuan.¹⁷

Lafran mengatakan: “Inilah tekad yang menyertai didirikannya HMI, yang menjadikan ia selalu ingin eksis dalam setiap kurun waktu dan setiap perjalanan sejarah. Kalau tekad tersebut belum tercapai, apa pun tantangan harus dihadapi. Dengan kata lain, dalam situasi-situasi sosial-politik yang

bagaimanapun, selama usaha menciptakan insan akademis yang Islami dan memiliki kepekaan sosial-politik ini belum berhasil, tidak ada alasan untuk meniadakan organisasi ini. Paling tidak, itu menjadi keinginan saya sebagai pendiri organisasi tersebut.”¹⁸

Kemudian, apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Lafran menjawab: “...Untuk menjawab pertanyaan ini agak sulit. Tetapi kalau sekarang kita melihat banyak mahasiswa yang mempunyai kebanggaan terhadap Islam, masjid-masjid di kampus penuh dengan kegiatan keagamaan, bisa dikatakan ada arahan ke sana. Ini bukan berarti mengklaim bahwa kecenderungan tersebut semata-mata sebagai hasil usaha HMI. Tetapi yang lebih penting adalah HMI memiliki peranan di dalamnya. Sebab sejarah mengatakan, kalau dulu untuk mencari mahasiswa yang shalat saja sulit, walaupun memang belum tentu bahwa perubahan-perubahan tersebut semata-mata karena andil HMI, tapi hal seperti itulah yang kami inginkan dari HMI.”¹⁹

Rentang waktu dari tahun 1947–1960-an, sekitar 13 tahun HMI sudah hampir ada di semua kampus di seluruh Indonesia, *Booming* mahasiswa pada era tahun 1960-an menjadikan iklim Indonesia semakin dinamis meskipun suasana politik memanas. Deliar Noer mengatakan: “Mulai tahun 1966, Indonesia memasuki masa-masa seminar dan ceramah, seakan apa saja diseminarkan, dari masalah politik, ekonomi, ilmu dan tekno-logi sampai akhirnya, belakangan ini, mengenai kehidupan seks orang-orang tua.”²⁰ Maraknya tradisi ilmiah ini tentunya dipelopori oleh berbagai organisasi kemahasiswaan, salah satunya HMI sebagai organisasi mahasiswa terbesar ketika itu.”

2. Keseimbangan Pengetahuan Intelektual Muslim Indonesia

Komitmen Mohamad Hatta²¹ sebagai seorang Negarawan tidak perlu diragukan lagi. Selain sebagai salah seorang

Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Hatta juga dipercaya menjadi Ketua Pembangunan Sekolah Tinggi Islam (STI). Saat peresmian berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) pada 10 April 1946, Hatta mengatakan: "...Di Sekolah Tinggi Islam ini akan bertemu agama (*religion*) dengan ilmu (*science*) dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat...."²²

Sedangkan mengenai tujuan berdirinya STI, Hatta mengatakan: "Membentuk ulama yang mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan dan berpendirian luas, serta mempunyai semangat yang dinamis. Hanya ulama seperti itulah yang dapat menjadi pendidik dalam masyarakat."²³

Lafran Pane merupakan mahasiswa angkatan pertama Sekolah Tinggi Islam (STI). Ia menimba banyak inspirasi dari pertemuannya dengan tokoh-tokoh terkemuka yang mengajar di STI, semangat Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan merupakan napas dari STI. Sejarah mencatat, dari ruang STI inilah HMI lahir. Pendirian HMI merupakan satu usaha mempertemukan berbagai mahasiswa dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu agar dapat menyatukan kekuatan dalam upaya mengangkat harkat dan derajat seluruh rakyat Indonesia.

Prof. Dr. Deliar Noer mengatakan: "Himpunan Mahasiswa Islam (yang berdiri 5 Februari 1947) bertanggung jawab kepada generasi yang lalu dan akan datang. Ia menjadi penghubung antara dua golongan penting masyarakat Indonesia: golongan intelektual dan golongan ulama. Kedua golongan ini pada akhirnya harus bertemu dan berasimilasi sehingga hanya terdapat satu tipe manusia kelak yang berpengetahuan dan tahu serta akan kehidupan beragama."²⁴

Langkah-langkah yang ditempuh oleh generasi terdahulu sungguh tepat mengingat saat dikotomi antara ilmu umum dan agama sangatlah tinggi. Padahal secara teoretis, ajaran dasar agama Islam tidak memberikan tempat terhadap pola pikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Ke-

cenderung pemisahan tersebut lebih merupakan *mainstream historis* yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan kebenaran, misi, serta substansi ajaran Islam yang universal, *rahmatan lil alamin*, tentu tidak mengenal sekat-sekat ke-kinihan dan ke-di sinian.²⁵

Semangat Keseimbangan 5 Februari 1947

Bintoro Cokroamijoyo mengenai pentingnya peristiwa 5 Februari 1947 mengatakan: “(bahwa pada saat itu) 5 Februari 1945 di sebuah ruangan sederhana di Jalan Surjodiningratan, Yogyakarta, berkumpul beberapa mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), mereka sepaham untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa se-aliran dalam satu organisasi. Lahirlah HMI di atas landasan pikiran serta keyakinan, bahwa perkembangan intelektual harus disertai oleh perkembangan yang bersifat rohaniyah, keseimbangan di antara penunaian tugas dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani, kalbu dan akal. Kepercayaan dan ilmu pengetahuan, suatu perkembangan intelektual tidak dapat dipisahkan, perjalinan ilmu pengetahuan dalam rangka *lebensanschaung* (pemahaman) Islam.”²⁶

Menurut Bintoro, esensi dari semangat 5 Februari inilah yang kini menjadi sendi dasar yang kemudian dicantumkan dalam mukaddimah serta tujuan organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Keyakinan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa kehidupan manusia terutama pada abad ke-19 dan ke-20 menjadikan rasionalisme, intelektual murni, liberalisme dan teknik hendak menguasai segala-galanya.²⁷

Bintoro menegaskan: “Seolah-olah timbul semacam *over-confidence* terhadap segala sesuatu yang serba a-rasionil. Kaum terpelajar seringkali lupa akan kenyataan bahwa kehidupan manusia itu diliputi sebagian juga oleh *dasa-rational* bahkan tidak bisa dipisah-uraikan satu sama lain. Saat ini, kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan bahwa tidak saja timbul suatu *cultural lag* seperti yang sudah sering kita dengar,

yaitu suatu *deisperance* antara perkembangan rohaniyah di Barat. Bahkan menurut kami timbul suatu *cultural dispute*, suatu pertumbuhan antara hasil ilmiah dan rohaniyah, antara dua sains atau intelektualisme murni dengan dogmatis *lebensanschauung*. Pendamba-pendamba rasionalisme buta tadi dengan alat *critische zin*-nya tidak mengenal dogma dan sebagainya yang bersikeras menembus segala rahasia alam hingga sampai pada *zarrah*-nya sekalipun, kerap kali pada hakikatnya ia sendiri sudah mendogmatisir dirinya.

“Sebab itu, HMI sebagai organisasi mahasiswa yang dataran Bergeraknya juga tidak terlepas dari pengulangan sebagai pencari ilmu tidak lupa membangun dasar pribadinya dengan sendi-sendi kerohanian dan kehidupan Islam, sebab yang menjadi cita-cita kita bukan hanya manusia-manusia yang hanya berpengetahuan tinggi maupun manusia-manusia yang mempunyai pengetahuan yang banyak tentang Islam, melainkan adalah pemikir-pemikir yang bertakwa, pengabdian yang yakin akan hidup beragama.

“Menempatkan tempat ilmu dalam pengabdian agama, sains dan moral. Perluasan sendi moral itu hendaknya dengan meletakkan/memperkuat dasar kerohanian (*morele grondslag*) dari dunia mahasiswa dan perguruan tinggi, kita dapat menyirami nilai-nilai kerohanian yang baru di tengah kekeringan masyarakat yang kini serba kehausan dan kehilangan pegangan. Sedangkan pengabdian diri dengan ilmu pengetahuan haruslah ditanamkan kesadaran bahwa di luar apa yang kita terima masih ada pengetahuan-pengetahuan lain atau sedikit-sedikitnya masih ada kebenaran yang lain. Di dalam Islam, perbendaharaan Islam masih banyak postulat-postulat dan *stelling-stelling* yang sewajarnya harus kita selami pula.”²⁸

Bintoro Cokroamijoyo dalam semangat 5 Februari menganjurkan: “Alangkah baiknya jika perpustakaan-perpustakaan yang selama ini umumnya diisi oleh hasil-hasil dari para sarjana Barat, kini juga diperlengkapi dengan buah tangan para sarjana-

sarjana Islam. Tidak hanya di lingkungan *book research* ini kita bergerak, tetapi kita perlu mengembangkan *research* tersebut menjadi suatu *field research*, kita menembus pagar kampung dan desa di mana berdiam sebagian besar umat Islam. Di sanalah kita menemui unsur-unsur Islam dan pokok-pokok persoalan dari umat yang dibentuk di dalam kenyataan. Di dalam *zoziale wircklichkeit*-nya, *book research* dan *field research* semacam ini tidak saja berarti suatu perluasan dari dasar intelektual (*widening of intellectual bases*) yang kita cita-citakan, akan tetapi di sini pulalah tersimpul unsur abdi, bakti dan cinta. Pengabdian diri dengan ilmu pengetahuan dalam Islam sesuai dengan alam kehidupan mahasiswa.”²⁹

Pandangan lain dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Ia menjelaskan, ketika Lafran Pane mengadakan sebuah kegiatan yang kelak diberi nama Himpunan Mahasiswa Islam, mungkin ia berpikir tentang dua hal yang sederhana saja. *Pertama*, sebagai seorang Muslim yang saleh, ia tampaknya merasa prihatin dengan tipisnya pengetahuan, pemahaman keagamaan di lingkungan perguruan tinggi. *Kedua*, Lafran Pane juga sangat merisaukan kurangnya pengetahuan umum di kalangan mahasiswa yang secara khusus ingin mendalami masalah-masalah keagamaan pada lembaga tinggi keagamaan Islam.³⁰

Karena itu, hal yang segera tampak menurut Lafran adalah perlunya suatu kegiatan di mana kedua kelompok mahasiswa ini dapat saling bertemu untuk saling melengkapi.³¹ Studi keagamaan bersama adalah suatu yang logis, yang notabene sudah ada contohnya pada kegiatan-kegiatan JIB (*Jong Islamiten Bond*) sebelumnya. Tetapi berbeda dengan JIB, HMI yang dirintis oleh Lafran Pane bagaikan benih yang ditanam di ladang semangat kemerdekaan yang subur, sehingga cepat tumbuh dan berkembang, bahkan menjalar ke mana-mana.³²

Demikianlah, dalam diri Lafran Pane dan setiap manusia sebenarnya telah diciptakan dimensi-dimensi universal. Aspek tersebut adalah aspek biologis, mental-spiritual, dan aspek

sosial. Ketiganya merupakan satu kesatuan utuh dalam diri manusia. Sehingga bila satu mengalami gangguan maka akan berdampak pada keseimbangan kepribadiannya. Mengenai keseimbangan ini, Lafran Pane dalam tulisannya menegaskan: “Islam tidak akan pernah sempurna, kalau dirinya masih terjajah pendidikannya, spiritualnya, maupun materialnya.”³³

Sedangkan untuk membebaskan Islam dari penjajahan itu, Lafran mengatakan: “Untuk membebaskan keterjajahan itu dibutuhkan profesionalisme dari para anggota dan alumni HMI dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang dilakukan oleh anggota HMI sekarang ini, menurut saya, sudah mengarah kepada aktivitas yang mengantisipasi perkembangan tersebut.”³⁴

Nurcholish Madjid dalam hal ini mengomentari bahwa: “HMI yang didirikan oleh Lafran Pane, dkk bertujuan untuk mengatasi adanya jurang pemisah antara mahasiswa ‘agama’ dan mahasiswa ‘umum’. Mayoritas mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) berasal dari madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren, sehingga mereka mengetahui banyak hal tentang masalah keagamaan. Sedangkan mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), kebanyakan mahasiswanya berasal dari sekolah umum dan pada umumnya pengetahuan mereka tentang agama juga kurang.”³⁵

HMI yang dirintis pendiriannya oleh Lafran Pane sejak November 1946 menjadi jawaban lugas terhadap pola pikir masyarakat saat itu. Lafran menginginkan keseimbangan dalam setiap pribadi intelektual Muslim Indonesia, sebuah kepribadian yang integral dan konsisten, yaitu pribadi ulama-intelektual dan intelek-ulama sekaligus, sehingga mampu beramal ilmiah dan berilmu amaliyah.³⁶ Keseimbangan yang dimaksud di sini lebih jelasnya adalah:

- a. Keseimbangan antara tugas duniawi dan ukhrawi, karena di antara keduanya merupakan sebuah kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.

- b. Keseimbangan antara kerja ilmu dan kerja iman.
- c. Keseimbangan antara kewajiban intelektual dan ulama.³⁷

Sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh (*complete integration*) yang tak terpisahkan antara satu dan yang lainnya dalam suatu pribadi yang integral. Dalam rangka menuju tujuan di atas, maka dibutuhkan suatu pendekatan terbaru, sesuai dengan perkembangan pemikiran sekarang.

Rumusan keseimbangan ini merupakan jawaban Lafran terhadap berbagai upaya untuk memisahkan antara ulama dan intelektual. Bagi Lafran, ulama sekaligus juga harus intelektual, demikian pula sebaliknya. Hal ini berbeda dengan pendapat umum yang berkembang di kalangan masyarakat yang cenderung menyebutkan bahwa ulama adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan madrasah, sedangkan intelektual adalah mereka yang berasal dari pendidikan model sekolah.³⁸

Lafran Pane sendiri tidak banyak memberikan pernyataan-nya tentang intelektual dan ulama, akan tetapi ia membuktikan dengan tindakan nyata. Lafran Pane dengan ikhlas menyerahkan kepemimpinan (HMI) kepada seorang mahasiswa UGM, yakni Muhammad Syafaat Mintaredja (mantan Menteri Sosial RI, Duta Besar RI untuk Turki dan Ketua Umum DPP PPP).³⁹ Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Lafran Pane untuk menghilangkan anggapan bahwa HMI hanya milik mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI).⁴⁰

Persentase keseimbangan ini selain diketahui melalui bimbingan wahyu, juga melalui fitrah manusia yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Kesalahan penggunaan fitrah adalah pengingkaran hati yang paling dalam, hingga menyebabkan hidup tanpa keseimbangan, kemudiaan jatuh pada kenistaan (*saafilin*). Senada dengan hal tersebut, Quraish Shihab membagi sasaran akhlak (*moral*) agama mencakup dua aspek, dimulai dengan akhlak kepada Allah,

dan sesama makhluk,⁴¹ manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tidak bernyawa. Dengan pola tipe keseimbangan, maka seorang individu atau masyarakat akan mencapai kesejahteraan.

Dalam konteks pendirian HMI, Chumaidy menjelaskan harapan yang ingin diperoleh dari ini adalah terciptanya insan akademis yang beragama dan memiliki wawasan serta kepekaan politik dalam rangka menciptakan masyarakat adil-makmur. Lafran Pane sudah menjelaskan hal ini dalam ungkapannya saat Kongres Umat Islam pada 1949, bahwa HMI yang didirikannya salah satunya adalah dalam rangka menciptakan santri yang intelektual serta intelektual yang santri.⁴²

Harapan besar dari segala usaha ini tentunya pada masa yang akan datang tidak ada lagi istilah santri *versus* non-santri, modernis versus tradisional di Indonesia. Hingga saat ini, masih terasa ada kesan bahwa santri adalah mereka yang mendalami ilmu agama, sedangkan yang belajar ilmu-ilmu “sekuler” adalah mereka yang notabene non-santri. Bahkan, dalam masyarakat tertentu sampai saat ini, dikotomi ini masih menajam.

3. Intelektual Muslim Indonesia sebagai Pembaharu Pemikiran di Segala Bidang Kehidupan

Untuk bisa mempertahankan peran HMI sebagai pabrik intelektual Muslim tidak ada jalan lain kecuali lebih peka terhadap perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi.⁴³

(Lafran Pane)

Proses pembaharuan tidak akan berhenti, apalagi ketika umat membutuhkan hadirnya sebuah agama yang mampu merespons masalah-masalah modern. Gerakan pembaharuan tidak hanya muncul dalam Islam, melainkan dalam setiap ajaran. Dalam taraf tertentu, gerakan pembaharuan dapat juga dilihat sebagai kerja-kerja kebudayaan. Untuk konteks Indonesia, secara detail

gerakan pembaharuan ini bisa dilihat sejak tahun 1900-an, sejak kemunculan SDI, SI, Muhammadiyah, NU dan Jam'iyah lainnya.

Setiap pembaharuan di mana pun dan kapan pun munculnya yang akan menjadi sasaran adalah tiga hal. *Pertama*, organisasi. *Kedua*, pemikiran, *Ketiga*, ijtihad.⁴⁴ Sasaran pertama sudah dilaksanakan dengan baik oleh Lafran Pane dengan mendirikan HMI, sebagai alat untuk melakukan pembaharuan. Jika usaha untuk melakukan pembaharuan bersifat wajib, alatnya pun wajib ada. Sebab tanpa alat, tujuan pembaharuan akan lebih mudah terpenuhi.

Selanjutnya, bertolak dari konfigurasi politik pasca-kemerdekaan Indonesia yang telah menyebabkan polarisasi di kalangan elite-elite manusia Indonesia sebelum kelahiran HMI, maka dirumuskan ide dasar dan pemikiran sebagai dasar yang pertama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi situasi politik yang setiap saat dapat berubah.

Menurut Lafran Pane, pembaharuan pemikiran Keislaman harus dimulai dengan meniadakan kesenjangan dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam soal pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam. Dalam tulisannya tahun 1949, Lafran membagi umat Islam ke dalam 4 golongan, yaitu: golongan awam, golongan mistik, golongan alim-ulama, golongan terpelajar.⁴⁵

a. Golongan awam. Golongan ini merupakan bagian terbesar, yaitu mereka yang mengamalkan ajaran Islam itu sebagai kewajiban yang diadatkan seperti upacara kawin, mati dan selamatan. (Kondisi ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengingat proses masuknya Islam ke Indonesia secara damai dan menyatu dengan budaya masyarakat setempat. Sebagian ahli mengatakan tidak ada Islam yang seunik di Indonesia, seperti tradisi mudik lebaran, bisa dikatakan, jika ingin merayakan Idul Fitri yang paling berkesan, Indonesialah tempatnya, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah ke-

sadaran masyarakat akan setiap proses yang dilakukan pada hakikatnya adalah dalam rangka menjaga hubungan baik antarsesama manusia dan hubungan dengan sang Pen-cipta).⁴⁶

- b. Golongan alim-ulama.** Golongan dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktikkan agama Islam sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw seperti tersebut di dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat. Golongan ini tidak hanya mencontoh Nabi sebagai Rasul, tetapi juga sifat dan kebiasaannya, yang tidak bisa lepas dari masyarakat Arab, yang mempunyai sifat-sifat khusus dan berlainan dengan masyarakat Indonesia. Mereka masih menganggap masyarakat Arab lebih tinggi derajatnya. Sampai sekarang, masih banyak masyarakat Indonesia yang ingin hidup seperti orang Arab. Tentang lagu mereka menganggap hanya lagu Qasidah dan Gambuslah yang tidak haram. Setelah masuknya pengaruh dan kebudayaan Arab, hidup alim-ulama ini sangat tertutup. Perubahan-perubahan dalam rangka kemajuan yang mereka alami sedikit sekali dikarenakan kurangnya hubungan dengan dunia luar. Sehingga masih ada orang yang beralam pikiran dan berjiwa seperti orang-orang yang hidup pada masa lalu. Golongan pertama ini umumnya berpendapat agar Islam dipraktikkan seperti yang dipraktikkan di negeri Arab 13 abad silam, dengan tidak memperhatikan tempat dan waktu.
- c. Golongan alim-ulama dan pengikutnya yang terpengaruh oleh mistik.** Pengaruh mistik ini menyebabkan mereka berpandangan bahwa hidup hanyalah untuk akhirat semata. Mereka tidak begitu memikirkan lagi kehidupan dunia (ekonomi, politik, pendidikan), apalagi untuk memperhatikan pengaruh perubahan sosial yang ada dalam masyarakat dan dunia sekarang. Mereka ini berpendirian, bahwa kemiskinan dan penderitaan adalah satu jalan untuk bersatu dengan Tuhan.

d. Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemauan zaman selaras dengan wujud dan hakikat agama Islam. Mereka berusaha, supaya agama itu benar-benar dapat dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Dari ketiga golongan di atas, golongan kesatu dan kedualah yang paling besar pengaruhnya dalam masyarakat Islam. Lafran berkeyakinan bahwa golongan I dan II belum benar-benar memahami agama Islam lebih dalam. Mereka menolak kemodernan. Mereka umumnya mempelajari agama Islam melalui doktrin tanpa ditindaklanjuti dengan bacaan dan diskusi kebudayaan. Padahal, agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan manusia lainnya, satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dari yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai kepada masyarakat besar seperti negara.

Lafran Pane menyadari, jika kesenjangan pemahaman Keislaman tersebut dibiarkan, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan agama Islam di Indonesia. Karena itu, pembaharuan pemikiran merupakan satu keharusan bagi umat Islam. Lafran meyakini pemahaman yang baik tentang Islam akan mempercepat kemajuan Indonesia sebagaimana dia meyakini bahwa Islam merupakan ajaran yang sempurna. Inilah latar belakang dari perumusan 4 golongan dalam umat Islam sebagaimana termaktub di atas.⁴⁷

Situasi sebelum maupun sesudah Lafran Pane mendirikan sebuah perkumpulan bernama HMI diterangkan sebagai berikut oleh Amir Radjab Batubara.⁴⁸ Amir menjelaskan bahwa pada saat-saat revolusi telah selesai, masyarakat dihadapkan pada perubahan yang segera hadir di tengah-tengah mereka, sehingga sering terjadi perombakan-perombakan nilai-nilai untuk beralih kepada nilai-nilai yang baru. Banyak hal-hal di mana masyarakat itu belum sempat menemui nilai baru, ia

memegang apa saja yang dapat dipegangnya menurut kebutuhan-kebutuhan monumental, sekadar melepaskan diri dari ketidaktentuan dan kegelisahan-kegelisahan.⁴⁹

Nilai-nilai dari apa yang baik semakin lama semakin ditempati ukuran-ukuran untung-guna dan untung-rugi. Falsafah-falsafah utilitarianisme kian mendesak nilai-nilai moral-keagamaan. Munculnya istilah-istilah baru seperti: krisis, kebejatan, korupsi, demokrasi, dan lain-lain, menjadi istilah yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan merupakan tulisan yang setiap hari muncul di koran-koran. Gejala-gejala ini telah hampir memperlihatkan mukanya hampir di seluruh bagian tubuh masyarakat Indonesia.⁵⁰ Amir mengatakan: “Kalau kita tidak hati-hati, ia akan memukul-mukul pintu dunia kehidupan mahasiswa dan perguruan tinggi kita. Padahal, mahasiswa dan perguruan tinggi adalah benteng pertahanan terakhir (*front-vlak*) yang harus kita selamatkan. Malahan, kita bertugas memberikan balasan-balasan (*ofensif*) dengan nilai-nilai baru sesuai dengan fungsi kita sebagai *the system of vital ideals*... (Hanya dengan memperkuat dasar kerohanian [*morele grond-slag*] dari dunia mahasiswa dan perguruan tinggi, kita dapat memberi nilai-nilai kerohanian baru, menegakkan norma-norma hidup dan sendi-sendi budaya baru dan dapat kita buktikan bahwa dunia perguruan tinggi itu betul-betul merupakan *verstand* dan *gezindheid* masyarakat. Harus kita akui, bahwa kaum terpelajar kita pada umumnya disinari oleh teori-teori dan alat-alat pemikir yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana Barat. Akibatnya, kadang kita terpesona begitu rupa olehnya. Sehingga, kita terlibat dalam anggapan tidak terbatasnya kebenaran-kebenaran yang dikandungnya. Kita lupa bahwa segala ilmu pengetahuan itu bersifat *relative*. Bukankah Socrates mengatakan: ‘*scio nescio* saya hanya mengetahui bahwa saya tidak mengetahui....’

Pembangunan
jangan dipaksakan dari atas, tetapi pembangunan itu harus betul-betul dari desa-desa dengan dekonstruksi-dekonstruksi

yang diubah di atas sendi-sendi kenyataan yang ada, yaitu hidup dan kehidupan Islam yang berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia).”⁵¹

Pernyataan Amir Radjab Batubara di atas semakin menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia yang diserang oleh berbagai pemikiran pascaproklamasi, di sinilah letak pentingnya pembaharuan. Gagasan pembaharuan pemikiran Keislaman oleh Lafran Pane dirumuskan dengan baik dalam redaksi Tujuan HMI yang pertama kali dirumuskan oleh Lafran Pane dengan redaksi: “Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam”.⁵²

Agussalim Sitompul menjelaskan: “Rumusan tujuan ini mengandung tiga wawasan dengan sembilan pemikiran awal. *Pertama, Wawasan Keindonesiaan*, yang terlihat dari rumusan Tujuan HMI yang pertama, yaitu mempertahankan Negara Republik Indonesia, dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, yang memuat lima pemikiran: 1). Aspek politik, membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan; 2). Aspek pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa; 3). Aspek ekonomi, menyejahterakan kehidupan rakyat; 4). Aspek budaya, membangun budaya-budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia; 5). Aspek hukum, membangun hukum yang sesuai dengan kepentingan pribumi. *Kedua, Wawasan Keislaman*, memuat tiga pemikiran: 1). Pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan benar sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Hadits; 2). Keharusan pembaharuan pemikiran dalam Islam; 3). Pelaksanaan dan pengembangan dakwah Islam. *Ketiga, Wawasan Kemahasiswaan*, yang berorientasi keilmuan, dengan kewajiban menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemajuan, bagi terwujudnya intelektual Islam. Pembangunan Indonesia merdeka jauh lebih berat daripada sekadar merebut kemerdekaan. Karena itu, perlu dibina dan

dikembangkan calon cendekiawan yang memiliki pengetahuan luas di segala bidang dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Swt, bagi kepentingan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk tercapainya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.⁵³

(1). **Aspek Politik-Pemerintahan.** Agama Islam tidak dapat dikembangkan dan disiarkan dengan baik dan sempurna. Kalau Negara Republik Indonesia masih dijajah oleh Belanda.⁵⁴ Karena itu, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasi-kan 17 Agustus 1945 harus dipertahankan, sehingga negara, rakyat dan bangsa Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah, berdaulat penuh, sejajar dengan bangsa-bangsa lain.⁵⁵

Oleh sebab itu, segala pemikiran lama warisan kolonial yang senantiasa bertujuan untuk mengadu domba sesama bangsa Indonesia harus disingkirkan jauh-jauh. Demikian juga dengan perdebatan antara berbagai kelompok sesama bangsa Indonesia agar tidak mengarah pada kemungkinan-kemungkinan semakin melemahnya bangsa Indonesia, sebab setelah tahun 1945 bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka, namun masih berhadapan dengan pihak Belanda dan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Maka itu, Lafran Pane sejak awal pendirian HMI sudah menegaskan bahwa status HMI adalah independen dan akan senantiasa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lafran Pane mendirikan HMI bertujuan untuk melakukan pembaharuan di bidang politik pemerintahan dengan upaya tidak menoleril setiap pemikiran yang berupaya memecah Negara Republik Indonesia.

Pembaharuan pemikiran di bidang politik juga terlihat dalam pernyataan Wakil Ketua PB HMI, Ahmad Tirtosudiro:

Bahwa didasarkan atas ilmu pengetahuan sejarah kemasyarakatan untuk akhirnya mengambil kesimpulan bahwa bagi suatu negara atau masyarakat hanyalah satu bentuk yang tepat, yaitu bentuk dan susunan negara serta masyarakat yang sesuai dengan sifat keadaan dan jiwa masyarakat itu. Maka,

bagi Negara Republik Indonesia perlu dipikirkan sedalam-dalamnya, dapatkah teori-teori atau dogma-dogma yang bersifat *wetenschappelijk* pun, akan tetapi tidak berasal dari Indonesia atau sesuai dengan jiwa dan kepercayaan bangsa Indonesia, tumbuh dan nantinya mengubah bentuk serta susunan masyarakat dan Negara Indonesia, yang sudah merdeka? Dapatkah orang-orang konservatif akan menahan aliran-aliran biarpun yang tidak berasal dari Indonesia, akan tetapi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Mahasiswa Indonesia diharap memperhatikan *sosial functie* sebagai *student* dan menceburkan diri dalam masyarakat dengan berpedoman. Seorang politikus yang tidak mengetahui sosiologi, serupa nakhoda yang buta mengemudikan kapal dengan tiada mengetahui jalannya ombak dan adanya karang-karang hingga menjadi korban. Harus diperhatikan sepenuhnya: Sejarah dengan tidak berilmu pengetahuan politik tidak berbuah, sedangkan pengetahuan politik tidak berdasarkan sejarah tidak berakar.⁵⁶

Pernyataan Ahmad Tirtosudiro ini menekankan pada pentingnya memahami suasana batin masyarakat Indonesia, sehingga segala hal yang menyangkut konsep, baik itu pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan haruslah benar-benar berakar, tidak boleh lepas dari akar kebudayaan Indo-nesia atau jati diri bangsa Indonesia merupakan kecenderungan umum tokoh-tokoh HMI generasi awal seperti Lafran Pane, Dahlan, Mintaredja, dan lain-lain. Pernyataan ini mirip dengan prinsip-prinsip *founding father* Indonesia (Soekarno, Hatta, Soepomo, Yamin, dan lain-lain). Perhatikan pernyataan Soepomo berikut ini:

Contoh dari kegagalan bangsa lain harus dijadikan peringatan bagi negara yang akan kita bangun, agar tidak mengalami kegagalan yang sama... Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*Rechtsgeschiedte*) dan lembaga sosial (*social structure*) dari negara itu, berhubungan dengan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik atau adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. Tiap-tiap negara mempunyai corak keistimewannya sendiri-sendiri terhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan sosial-struktur masyarakat Indonesia....⁵⁷

Pernyataan Soepomo jelas membawa pesan, bahwa kita bangsa Indonesia boleh saja mengikuti cara bangsa dan negara lain mengatur rumah tangganya, namun jangan pula kita melupakan bahwa kita bangsa Indonesia juga mempunyai “ilmu sendiri” untuk mengatur bangsa dan negara ini. Dalam sebuah bait pidatonya, pemuda Soepomo yang saat itu berusia 42 tahun mengatakan:

Dengan mengingat ini, marilah kita melihat contoh-contoh dari negara-negara lain. Dasar susunan Eropa Barat ialah perseorangan dan liberalisme. Sifat perseorangan ini, yang mengenai segala lapangan hidup (sistem undang-undang ekonomi, kesenian, dan lain-lain), memisah-misahkan manusia seorang diri dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari pergaulan yang lain. Seorang manusia dan negara yang dianggap seorang pula, selalu segala-galanya itu menimbulkan I M P E R I A L I S M E dan sistem yang memeras (*unbuiltings system*), membikin kacau dunia lahir-batin.

Tuan-tuan (anggota BPUPKI) telah mengerti sendiri bahwa sifat demikian (individualisme dan liberalisme) harus kita jauhkan dari pembangunan Negara Indonesia. Bahkan Eropa sendiri pada waktu sekarang sudah mengalami “K R I S I S R O H A N I” yang mahahebat yang berhubungan dengan jiwa rakyat Eropa telah jemu kepada keangkaramurkaan, sebagai akibat dari perseorangan (individualisme) tersebut.⁵⁸

Soepomo meyakini bahwa sifat kekeluargaan sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, wajar saja bangsa Indonesia menyebut negara-negara lain dengan istilah “negara tetangga”. Budaya kekeluargaan adalah budaya asli masyarakat Indonesia. Struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah buah pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.

Soekarno mengatakan mengenai penolakannya akan paham liberalisme dan individualisme:

Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat, alhamdulillah kemerdekaan kita, sebagaimana tadi saya katakan, diadakan, dilahirkan di dalam perang, alhamdulillah digembleng dengan palu-godamnya perang. Kita mendapat

kemerdekaan bukan di dalam sinar bulan purnama, tapi kemerdekaan yang ditempa dalam api peperangan dan dengan palu godamnya peperangan. Kemerdekaan yang demikian akan lebih ketimbang kemerdekaan yang diperoleh dalam sinar bulan purnama. Tapi ada lagi satu syarat mutlak untuk memberikan kekuatan pada dasar filsafat, ialah filsafat dasar yang benar.

Jikalau kita mengadakan kemerdekaan, mengadakan undang-undang yang berdasar kepada filsafat Eropa dan Amerika itu, Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat, yakinlah, bahwa kalbu kita akan penuh dengan konflik, bukan saja konflik di dalam negeri, konflik antara kaum buruh dan majikan, konflik antara golongan ini dan itu, konflik antara faham dengan faham, tetapi pula konflik ke luar negeri.

Jikalau semua bangsa Asia Timur satu per satunya mengikuti faham individualisme Amerika dan Eropa, maka jikalau semua bangsa Asia Timur mengadakan dasar filsafat yang sesuai dengan dasar filsafat Eropa dan Amerika. Maka yakinlah, kendati sepuluh, seratus, seribu kali tiap-tiap hari semboyan itu dipekirakan semboyan kekeluargaan Asia Timur.

Kendati sepuluh, seratus, seribu kali tiap-tiap hari semboyan itu dipekirakan persaudaraan bangsa-bangsa Asia, dengan faham yang seperti itu, Asia dalam tempo yang tidak lebih dari sepuluh tahun akan menyala-nyala dengan api peperangan. Bukan lagi peperangan antara sekutu dan kita, akan tetapi peperangan di antara kita.⁵⁹

Sehingga, cukup dapat dipahami jika dikontekskan dengan kondisi Indonesia pascareformasi 1998, seorang yang benar-benar memahami Pancasila niscaya akan sedih dengan demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia saat ini sebab terdapat banyak kontradiksi khususnya dengan sila keempat dari Pancasila. Tulisan ini memang terkesan agak melebar, namun penting untuk tercantum dalam buku ini untuk mengingatkan kita bahwa pembaharuan pemikiran di bidang politik hingga saat ini masih harus terus berjalan. Kutipan-kutipan dari Soepomo dan Soekarno diambil dari buku *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI*, sebuah buku yang jika dihayati dengan cermat cukup ampuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan generasi sekarang tentang apa itu Nasionalisme, hubungan agama dan negara, jati diri bangsa, dan lain-lain.

Sudah menjadi rahasia umum, kedekatan generasi awal HMI dengan Soekarno telah menjadi buah bibir banyak kalangan. Kuatnya tuntutan pembubaran HMI oleh PKI dibalas Soekarno dengan mengatakan “HMI jalan terus”. Yudi Latif mengatakan:

Dalam semangat Keislaman-Keindonesiaan yang terumuskan dalam Tujuan HMI, para generasi awal HMI lebih bersedia menerima Pancasila, Dahlan Ranuwihardjo (Ketum PB HMI 1951–1953) bahkan sangat dekat dengan Soekarno, Dahlan bahkan sangat antusias mendukung Pancasila.⁶⁰

Dahlan sendiri mengatakan bahwa Lafran Pane sudah sangat Pancasila-lais seperti terlihat dalam Konferensi Pendidikan Nasional November 1949.⁶¹ Status HMI sebagai anak kandung revolusi kemerdekaan Indonesia memang menjadikan HMI harus bercita-cita sesuai dengan cita-cita didirikannya Negara Indonesia.

(2). Aspek Ekonomi. Inti pembaharuan pemikiran di bidang ekonomi adalah kesadaran penuh bahwa 350 tahun penjajahan bangsa Indonesia sudah dikeruk segala harta kekayaannya untuk kepentingan penjajah. 350 tahun bukan waktu yang sebentar, sudah cukup lama bangsa Indonesia berjuang untuk mendapatkan haknya. Oleh sebab itu, bahwa segala yang terkandung dalam bumi Indonesia, baik di darat maupun di lautan serta segala yang tumbuh di atas bumi Indonesia harus diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab kegiatan ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Karena itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Jika produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan yang tidak

paham dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, rakyat banyak-lah yang akan tertindas. Sekali lagi, 350 tahun penjajahan sudah terlalu lama, apalagi akan diulangi lagi pada era kemerdekaan ini. Penjajahan di bidang ekonomi sama artinya dengan penjajahan secara fisik. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh berada di tangan orang per orang.

Maka, tugas sebagai generasi muda atau mahasiswa sebagai kaum yang terdidik, khususnya yang hidup setelah kemerdekaan Indonesia, adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebab, tanpa kemerdekaan, Indonesia akan kembali menjadi negara jajahan dan keinginan segenap bangsa Indonesia agar terwujud keadilan ekonomi pasti tidak akan terlaksana. Kesimpulan pembaharuan di bidang ekonomi ini merupakan kesimpulan dari dua hal. *Pertama*, tujuan diadakannya Negara Indonesia dan UUD 1945 Pasal 33. *Kedua*, tujuan didirikannya HMI, khususnya tujuan yang pertama.

Bangsa Indonesia harus dimajukan dalam bidang ekonomi, karena kemiskinan secara ekonomi seringkali mengarah kepada kekufuran. Sebagai makhluk fisiologis-biologis (*basyar*), manusia membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penjagaan dimensi insaniyah berhubungan dengan aspek mental-spiritual. Semakin baik dan kuat ekonomi orang Islam, tentunya akan membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di semua bidang.⁶²

(3). **Aspek Pendidikan.** Inti pembaharuan pemikiran di bidang pendidikan adalah kesadaran perbedaan situasi antara zaman penjajahan dengan zaman kemerdekaan. Di zaman penjajahan, pendidikan sangat diskriminatif dan hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya.⁶³ Pendidikan di zaman kolonial berorientasi untuk melanggengkan kolonialisme. Sedangkan di zaman kemerdekaan, pendidikan adalah hak setiap warga Negara dari Sabang–Merauke. Sedangkan

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak masyarakat yang sudah 350 tahun hilang yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana negara-negara merdeka lainnya. Selain itu, masyarakat juga harus disadarkan bahwa modal hidup yang paling penting adalah pendidikan. Dengan semakin banyak orang yang berpendidikan, maka cita-cita dan tujuan kita bernegara akan semakin cepat tercapai. Mengenai biaya pendidikan, apabila negara dalam kondisi yang benar-benar susah, biaya pendidikan haruslah yang serendah-rendahnya. Sementara untuk orang yang tidak mampu, biaya pendidikan harus digratiskan atau tidak boleh dipungut biaya sepeser pun.

Islam juga telah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan sejak dari lahir hingga kematian. Sebab, ilmu itu harus dicari dengan usaha, karena tidak ada ilmu turunan sebagaimana tidak ada dosa turunan dalam Islam. Maka, dalam Islam, belajar itu hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak belajar, maka ia berdosa. Lafran Pane mengatakan bahwa agama Islam tidak bisa maju dan berkembang dengan baik dan sempurna, kalau rakyat Indonesia masih dalam kebodohan, karena agama Islam sendiri diturunkan untuk orang-orang yang berakal; mengubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis. Pemuda dan Pemudi Islam yang sudah mendapatkan pendidikan harus sanggup menjadi kader penerus perjuangan bangsa di segala bidang.⁶⁴

Pendidikan itu sendiri adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi mencakup pula yang nonformal. Intelektual Muslim bergerak dalam pendidikan formal dan nonformal.

Bagi intelektual Muslim Indonesia, agama Islam merupakan fondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan.

Karena ajaran-ajaran Islam bersifat universal yang mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diatur dalam ubudiyah, juga dalam hubungannya dengan sesamanya yang diatur dalam muamalah, masalah berpakaian, jual-beli, aturan budi pekerti yang baik, dan sebagainya.

Apalagi tujuan pendidikan yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai yang bersifat fundamental, seperti: nilai-nilai sosial, nilai ilmiah, nilai moral dan nilai agama. Di sini, kiranya orang berkeyakinan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup masa depan dunia, serta membantu anak-anak didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan. Intelektual Muslim harus terlibat dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Cita-cita pendidikan nasional haruslah berakar dari kebudayaan nasional. Pembaharuan dalam bidang pendidikan merupakan tugas utama dari segenap intelektual Muslim. Pada sisi lain, intelektual Muslim haruslah menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya.

(4). Aspek Hukum. Inti pembaharuan pemikiran dalam bidang hukum adalah kesadaran perbedaan cara hidup di zaman kolonial dan hidup di zaman kemerdekaan. Di zaman kolonial, kekuasaan bersifat absolut dan hukum bersifat diskriminatif. Oleh sebab itu, hukum yang dibuat haruslah berpihak kepada rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sementara hukum-hukum warisan Belanda yang sarat dengan ketidakadilan dan persamaan manusia haruslah ditinggalkan. Lafran Pane sebagai seorang ahli Ilmu Tata Negara dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan agar segala sesuatu diletakkan pada tempatnya serta sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Lafran mengatakan: “Hukum (Tata Negara) itu tergantung kepada **penilaian rakyat**, apa yang seharusnya,

dan apa yang tidak seharusnya. Sedangkan penilaian rakyat tergantung kepada **keyakinan rakyat**. Selanjutnya, keyakinan rakyat tergantung kepada faktor alam, agama, politik, ekonomi, psikologi, budaya, dan lain-lain.”⁶⁵

Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa Lafran Pane mendorong agar hukum-hukum yang berlaku di Indonesia diperbarui sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam, budaya, dan lain-lain. Hukum yang diambil dari tempat lain, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut justru akan berpeluang menciptakan ketidakseimbangan.

(5). Aspek Budaya. Inti pembaharuan pemikiran dalam bidang kebudayaan adalah kesadaran bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang lahir dari buah usaha budinya rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, bisa dilihat dari pertemuan Islam dengan budaya asli bangsa Indonesia.

Islam masuk ke Indonesia telah bertemu dengan berbagai aliran kebudayaan, dan sejarah mencatat bahwa terjadi perdamaian antara Islam dengan beragam aliran. Lafran meyakini bahwa agama Islam dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia pada segala waktu dan tempat, artinya dapat menyelaraskan diri dengan keadaan dan keperluan masyarakat di mana pun juga. Adanya bermacam-macam bangsa yang berbeda-beda masyarakatnya, yang tergantung pada faktor alam, kebiasaan, dan lain-lain, maka kebudayaan Islam dapat diselaraskan dengan masyarakat masing-masing.⁶⁶

Intelektual Muslim harus terlibat dalam mewujudkan visi

kebudayaan nasional bangsa-Negara Indonesia. Sebab, visi kebudayaan nasional sebagai arah ideal yang didambakan bangsa Indonesia mestinya memuat semangat kunci: “integrasi nasional”. Untuk mencapai visi ini, misi kebudayaan nasional harus sangat menghargai segala komponen dan elemen kebudayaan lokal dan kebudayaan etnis untuk disulam erat dalam wujud kebudayaan Indonesia.

Karena dalam masyarakat, segala sesuatu saling memengaruhi, manusia memengaruhi manusia lainnya, masyarakat dipengaruhi oleh manusia dan juga sebaliknya. Begitu pula dengan hasil kebudayaan (*culture product*), yang satu memengaruhi yang lain, dan selanjutnya memengaruhi manusia dan masyarakatnya.⁶⁷

Lafran Pane melihat, dalam satu masyarakat, terdapat bermacam-macam aliran kebudayaan, sesuatu yang sering terjadi adalah timbulnya perjuangan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya berlomba-lomba mencari penganut. Aliran kebudayaan yang lemah akan dikalahkan oleh kebudayaan yang kuat. Pada umumnya, manusia lebih senang memihak yang kuat dan menang hingga yang menang mendapatkan lebih banyak penganut.

Menurutnya, selain Islam, terdapat 4 kebudayaan lain yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu: (1) Aliran kebudayaan Barat, yang diwakili Amerika, Belanda dan lain-lain; (2) Komunisme dan Sosialisme; (3) Agama Kristen Protestan dan Katolik; (4) Aliran kebudayaan kebangsaan yang cenderung kepada Sosialisme dan Marxisme dan diwarnai aliran kebatinan-kesusilaan (Hindia-Jawa).⁶⁸

(6). Aspek Pembaharuan Pemikiran Islam. Inti pembaharuan pemikiran Islam yang dilakukan oleh Lafran Pane bertujuan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, memahami bahwa nilai-nilai dari ajaran Islam dapat diterapkan dalam setiap lini kehidupan, Islam bukan sekadar shalat, puasa, haji, dan lain-

lain. Pembaharuan pemikiran Islam dimaksudkan juga untuk menjawab kebutuhan manusia kontemporer.

Zuly Qodir menuliskan bahwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama*, faktor internal umat Islam, yakni terjadinya modernisasi dan sekularisasi pendidikan Islam di kalangan santri, dan sekularisasi kaum santri dalam hal pekerjaan. Hal ini berakibat pada model-model dunia pendidikan serta pengajaran di perguruan-perguruan tinggi, khususnya per - guruan tinggi Islam. *Kedua*, terjadinya perubahan global akibat semakin berkembangnya teknologi dan informasi.⁶⁹

Dua faktor yang diajukan Zuly Qodir di atas digunakan untuk menelaah pembaharuan pemikiran Islam pada 1980-an–1990-an yang digawangi oleh Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Dawam Raharjo, Abdurrahman Wahid, Ahmad Wahib, dkk. Namun, jika dilihat konteks sejarah pendirian HMI pada 1947, terdapat faktor lain, yakni keinginan Lafran Pane dan kawan-kawannya untuk menjadikan Islam sebagai ajaran yang lebih bernyawa setelah kemerdekaan Indonesia. Sehingga, menjadi penting untuk menghayati suasana batin masyarakat pada 1945–1946.

Tantangan pembaharuan pemikiran Islam yang dihadapi oleh generasi HMI awal seperti Lafran Pane, Mintaredja, dan lain-lain cukup menarik, sebab saat itu semua diskursus ideologi sangat dibebaskan. Semua orang bebas berbicara Sosialisme, Marxisme, Komunisme. Sedangkan pembaharuan pemikiran Islam pada 1980-an–1990-an tidak lagi secara langsung berhadapan dengan aneka ideologi tersebut.

Perbedaan lainnya adalah, generasi awal HMI lebih disibukkan dengan suasana revolusi kemerdekaan yang menuntut peran-peran fisik, sehingga kesempatan untuk duduk manis di perpustakaan, belajar ke luar negeri tidaklah semaksimal yang didapatkan oleh generasi-generasi HMI yang melakukan pembaharuan pemikiran Islam pada 1980-an–1990-an.

Lafran Pane meyakini bahwa pembaharuan pemikiran Islam merupakan solusi untuk memajukan Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan prinsip-prinsip ajaran Islam menyediakan konsep dan kemampuan untuk melakukan perubahan sekaligus perbaikan dalam masyarakat guna memenuhi tuntutan zaman.

Rendah dan minimnya ilmu yang dimiliki orang-orang Islam atau kemiskinan intelektual membawa konsekuensi rendahnya kemampuan umat Islam memberi respons pada tantangan zaman secara kreatif dan bermanfaat, yang mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat.⁷⁰ Apabila orang-orang Islam memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan benar, serta menyadari bahwa al-Quran dan Sunnah adalah referensi tertinggi umat Islam, kesalahpahaman tentang Islam tidak perlu terjadi.

Al-Quran dalam Surat Ar-Ra'ad Ayat 11 menyebutkan: "Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

Keyakinan diri dan kemampuan menghadapi masa depan sangat tergantung pada bagaimana cara berpikir seseorang atau sebuah bangsa. Maka, perubahan cara berpikir merupakan sebuah langkah awal yang paling menentukan. Oleh karena itu, mutlak adanya pembaharuan pemikiran Islam di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga, agama Islam dapat menampilkan wajahnya yang hakiki di mata masyarakat.⁷¹ Kesalahan berpikir pada masyarakat awam dalam memahami agama Islam sesungguhnya merupakan kesalahan kaum intelektual yang tidak memberikan pemahaman bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya.

(7). Aspek Dakwah Islam. Landasan dari dakwah Islam adalah Tujuan HMI yang kedua, yakni menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dakwah merupakan kewajiban setiap intelektual Muslim yang bertujuan menciptakan

rahmat bagi sekalian alam. Lafran Pane telah mengenalkan Islam melalui HMI di STI maupun di UGM. Ajaran agama Islam harus didakwahkan kepada semua mahasiswa Islam, baik yang belajar di STI apalagi di kampus-kampus umum. Sebab, para mahasiswa Muslim yang belajar di STI sudah pasti mendapatkan pelajaran tentang agama Islam, sementara mahasiswa Muslim yang belajar di kampus-kampus umum belum tentu mendapatkan pendidikan tentang agama Islam. Maka, HMI yang didirikan oleh Lafran Pane mengambil perannya dalam konteks ini.

(8). Aspek Pengamalan Ajaran Agama Islam. Agama Islam harus diamalkan secara utuh dan benar sesuai dengan tuntutan al-Quran. Sebelum HMI berdiri Islam hanyalah sebatas identitas bagi mahasiswa kebanyakan pada saat itu tanpa disertai pengamalan. Pembaharuan pemikiran dalam bidang ini menekankan Islam tidak hanya hidup teksnya, melainkan juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berorganisasi serta bermasyarakat.

(9). Aspek Keilmuan. Pembaharuan pemikiran dalam bidang ini menekankan pentingnya kesadaran baru bagi mahasiswa Muslim akan peran ilmu pengetahuan dalam mempercepat kemajuan bangsa Indonesia. Masa perjuangan fisik telah berakhir, namun perjuangan hingga kapan pun tidak akan pernah berakhir. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mempelajari, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Orientasi keilmuan juga ditunjukkan dengan mengarusutamakan ilmu pengetahuan dalam setiap gerakan sosial, sehingga setiap tindakan senantiasa dapat dievaluasi, sebab berlandaskan ilmu.

4. Keislaman-Keindonesiaan sebagai Titik Tolak Gerakan Intelektual Muslim Indonesia

“Jika sebuah ajaran tidak mau memperhatikan budaya masyarakat setempat dan masih menjalankan peraturan-peraturan

dan tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan keadaan, dapatlah dinamakan ajaran itu adalah ajaran yang kolot. Adat istiadat yang berlaku sekarang belum tentu akan dituruti oleh orang-orang beberapa tahun kemudian, begitu pula dengan peraturan-peraturan yang diancam dengan hukuman sekarang, akan tetapi kebenaran (tauhid) tidak bergantung kepada ruang dan waktu.” (Lafran Pane—Ketua Umum HMI Pertama).⁷²

“Seseorang harus mencintai Tanah Air-nya, karena itu merupakan bagian hakiki dari keyakinan Islam.”

(Mohammad Roem—Pemimpin Jong Islamieten Bond).⁷³

Pengertian yang spesifik mengenai Keislaman-Keindonesiaan, Nurcholish Madjid dalam salah satu tulisannya mengatakan: “Dalam HMI, Keislaman-Keindonesiaan telah terpadu secara utuh, sehingga dalam mengekspresikan Keislamannya, HMI telah sekaligus menyatakan Keindonesiaannya. Dalam pandangan HMI, komitmen kepada Keindonesiaan merupakan kelanjutan dari sistem keimanannya. HMI meng-Indonesia karena hendak mengejawantahkan nilai-nilai luhur yang diserapnya dari ajaran-ajaran Islam. Maka, dalam meng-Islam, HMI meng-Islam dalam wadah yang dikaruniakan Tuhan kepadanya yaitu Tanah Air Indonesia. Keislaman-Keindonesiaan bagi HMI bukan masalah alternatif satu sama lain, tetapi dua sisi dari sekeping mata uang.”⁷⁴

Dalam tulisan lain, Nurcholish Madjid mengatakan: “Selain Keindonesiaan atau Kebangsaan dan Kemahasiswaan, kualifikasi HMI sebagai gerakan pemuda adalah Keislaman. Maka, selain harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai Keindonesiaan dan Kemahasiswaan, HMI juga harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai Keislaman. Sekalipun dukungan pada nilai-nilai Keislaman itu tetap dalam format yang tidak dapat dipisahkan dari Keindonesiaan dan Kemahasiswaan. Artinya, penghayatan HMI pada nilai-nilai Keislaman tentu tidak dapat

lepas dari lingkungan Keindonesiaan, dan juga tidak lepas dari nilai Kemahasiswaan. Karena Keindonesiaannya itu, HMI tampil sebagai organisasi Islam dalam format dan citra yang sedikit banyak berbeda dari organisasi Islam dalam kawasan lingkungan budaya besar Arab.”⁷⁵

Sementara itu, Deden Ridwan menuliskan: “Konsep independensi melahirkan visi Keislaman yang intelektualistik, ... Bila Prof. Drs. H. Lafran Pane dikenang kembali, maka agaknya terasa paling menonjol hendaknya ditanamkan Almarhum kepada organisasi yang didirikannya itu adalah mengembangkan visi Keislaman dan Keindonesiaan mahasiswa Muslim secara intelektual.”⁷⁶

Lahirnya beberapa pandangan di atas tentu merupakan refleksi dari sejarah panjang bangsa Indonesia, khususnya sejak kemunculan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi, M. Asmodimedjo, M. Sumowerdodjo dan M.H. Abdul Rajak pada 16 Oktober 1905 di Solo dan dipandang sebagai awal dari pergerakan Islam Indonesia. Kongres Muballigh Islam Indonesia di Medan 1956 meng - usulkan kepada Pemerintah agar hari berdirinya SDI ditetapkan sebagai Hari Pergerakan Nasional.⁷⁷

SDI dianggap sebagai organisasi pertama yang bergerak di bidang politik. Sebelumnya, sudah ada organisasi lain di bidang sosial-ekonomi. SDI yang semula bergerak di lapangan sosial-ekonomi, setelah berubah menjadi Sarekat Islam (SI) lantas secara terang-terangan bergerak di lapangan politik radikal.⁷⁸ Melihat betapa Islam sebagai tali pengikat di antara bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa Sarekat Islam sebagai pergerakan Nasionalisme, bukan pergerakan agama, hanya Islam yang dapat menjadi pengikat bagi seluruh penduduk Hindia Timur saat itu.⁷⁹

Pada kongresnya di Surabaya bulan Januari 1913, SI memutuskan bahwa kegiatannya bersifat menyeluruh untuk segenap pelosok Tanah Air. Kongres pertama SI ini membagi

wilayah organisasi menjadi tiga bagian:

- a. **Bagian I**, meliputi Jawa Barat dengan wilayah (Jawa Barat dan Pulau Sumatera beserta seluruh pulau-pulau di sekitar Pulau Sumatera). Bagian I ini dipimpin oleh Raden Gunawan
- b. **Bagian II**, meliputi Jawa Tengah, segenap Pulau Kalimantan. Bagian II ini dipimpin oleh Samanhudi
- c. **Bagian III**, meliputi Jawa Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan segenap pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Bagian III ini dipimpin oleh Tjokroaminoto

Ketiga wilayah tersebut beserta cabang-cabang Sarekat Islam berada di bawah pengawasan Pengurus Pusat di Surakarta yang dipimpin oleh Haji Samanhudi. Untuk membentuk kerjasama yang baik dengan SI setempat (*SI local*), maka dalam satu pertemuan di Yogyakarta pada 18 Februari 1914, mereka memutuskan untuk membentuk SI pusat yang terdiri dari Haji Samanhudi sebagai Ketua Kehormatan, Tjokroaminoto sebagai Ketua dan Raden Gunawan sebagai Wakil Ketua. Akhirnya, setelah melalui berbagai diplomasi, Pengurus Pusat SI ini diakui juga oleh Pemerintah Kolonial tanggal 18 Maret 1916.⁸⁰



Tjokroaminoto dalam kongres nasional pertama Sarekat Islam di Bandung tahun 1916 mengatakan: “Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya, dan pada saat itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya, terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik, yang menyangkut nasib dirinya sendiri. Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa partisipasi kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita.”⁸¹

Deliar Noer mencatat, pada 1920-an, Sarekat Islam mendisiplinkan anggota-anggotanya yang melenceng dari garis-garis kebijakan organisasi. Dalam tahun-tahun tersebut, banyak orang Islam yang terkena “*emansipasi*”, yaitu keterasingan (*alienasi*) dari agamanya sendiri karena hasil dari pendidikan Belanda. Sebagian lagi juga merasa asing dengan kalangan rakyat dan masih menganut kebudayaan lama dalam iman dan kepercayaan, mereka tidak memilih Sarekat Islam sebagai tempat mereka berkecimpung dalam pergerakan. Sebagai orang-orang yang bertahun-tahun mendapatkan pendidikan Belanda, mereka lebih tertarik kepada dasar organisasi lain dalam pergerakan. Padahal sebelumnya, kecenderungan orang bergabung dengan Sarekat Islam.⁸²

Sejak masa-masa awal berdirinya SI, perjuangan antara Islam dan Nasionalisme (*dengan sifat Jawa*) dicerminkan oleh peristiwa Djawi Hisworo yang menghasilkan Panitia Nasionalisme Jawa (*Committee Voor Het Javaansche Nationalisme*). Nasionalisme yang lain dari Islam mulai diperkenalkan oleh para intelektual Muslim didikan Tjokroaminoto oleh pemimpin-pemimpin seperti Soekarno, Iskak dan Sutomo yang sebenarnya masih disertai Nasionalisme Jawa. Tokoh-tokoh

tersebut mempropagandakan seakan-akan Islam berlawanan dengan Nasionalisme. sehingga Tjokro menjelaskan pada 1925: “Islam sepertujuh bagian rambut pun tak menghalangi dan merintangai kejadian dan kemajuan Nasionalisme ‘yang sejati’, tetapi memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukan Nasionalisme yang sempit dan berbahaya, tetapi menuntut kepada Sosialisme berdasarkan Islam, yakni Sosialisme yang menghendaki mono-humanisme (persatuan manusia) dikuasai oleh satu Yang Mahakuasa, Allah Swt, melalui hukum-hukum yang sudah dipermaklumkan kepada utusannya, Nabi Muhammad Saw.”⁸³

Sedangkan dalam dokumen Sarekat Islam lainnya juga ditemukan tentang *mosi central*. *Mosi* ini berpendapat bahwa ketahanan Indonesia hanya dapat direalisasikan dengan “menghilangkan kesakitan hati” rakyat yang disebabkan oleh penjajahan: “Rupa-rupa perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan atas mereka itu, baik yang dilakukan oleh *ambtenaar* (pejabat), maupun oleh beberapa *prang particulier* (swasta) bangsa Eropa, karena begitu seringkali orang-orang bangsa Eropa menganggap rendah dan hina kepada orang-orang Bumiputra... lantaran dari begitu kurangnya keyakinan hukum (*rechtzekerheid*) sehingga rakyat Bumiputra pada umumnya kurang merasa dilindungi oleh *wet*.”⁸⁴

SDI dan SI telah memberi inspirasi terhadap pendirian organisasi Islam. Pada 1912 di Yogyakarta berdiri Muhammadiyah, Al-Irsyad (1914), Persis berdiri di Bandung (1923). Nahdatul Ulama berdiri di Surabaya (1926), Al-Wasliyah berdiri di Medan (1930), PUI berdiri di Majelengka (1917), GPII berdiri di Jakarta (1945), Masyumi didirikan di Yogyakarta (1945), HMI berdiri di Yogyakarta (1947) dan PII didirikan di Yogyakarta (1947).⁸⁵

Ketika Lafran Pane mendirikan HMI, Islam juga dijadikan sebagai simbol perjuangannya, sekaligus menjadi simbol solidaritas di kalangan mahasiswa Islam saat itu. Hubungan

historis dan aspiratif antara SDI, SI dan HMI secara langsung maupun tidak langsung terlihat dari saat pendirian masing-masing organisasi tersebut. Wawasan Keislaman sebagai asas yang diyakini sebagai kekuatan perubahan sekaligus simbol perjuangan kemudian secara alami diintegrasikan dengan wawasan kebangsaan.

HMI pun demikian halnya, ketika berdiri, Islam telah menjadi “simbol perjuangannya”, dan sekaligus menjadi simbol solidaritas di kalangan mahasiswa Islam. Kemudian, wawasan Islam sebagai simbol perjuangan dan simbol solidaritas diintegrasikan dengan wawasan kebangsaan yang baru berusia 2 tahun, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Perpaduan antara wawasan Keislaman dan Keindonesiaan telah membentuk pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI, seperti terlihat pada rumusan awal Tujuan HMI yang pertama. Wawasan Keislaman dan Keindonesiaan tidak perlu dipertentangkan. Antara keduanya bukan aspek yang saling berhadapan, tetapi justru saling mengisi satu sama lain.

Sejatinya, memang sejak awal pendirian HMI, pembinaan semangat jiwa Nasionalisme atau Kebangsaan sudah dilakukan. Berita di surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, bahwa di Yogyakarta telah berdiri HMI. Berita itu menyebutkan bahwa anggota organisasi ini terdiri dari mahasiswa seluruh Indonesia yang beragama Islam, bukan organisasi lokal, akan tetapi organisasi yang bersifat nasional dan akan menjadi anggota Kongres Mahasiswa Indonesia.⁸⁶

Lafran Pane sendiri memang tidak pernah mempertentangkan antara wawasan Keislaman dan Keindonesiaan tidak perlu dipertentangkan lagi, keduanya bukanlah aspek yang saling berhadapan, tetapi justru saling mengisi satu sama lain. Munculnya dua rumusan Tujuan HMI semakin mengokohkan hal ini dua rumusan tersebut adalah: *Pertama*, mempertahankan - kan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat

rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Tujuan HMI tersebut cukup berbeda dengan tujuan organisasi Islam yang ada saat itu, khususnya partai-partai politik Islam. Sebagai perbandingan, akan dipaparkan juga tujuan Partai-Partai Islam setelah kemerdekaan Indonesia.

NAMA DAN JENIS ORGANISASI	DASAR DAN TUJUAN
<p>Masyumi/Partai Politik/dibubarkan pada 1960</p>	<p>Tahun 1945 Dasar : Islam</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam. 2. Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan (Pasal II).⁸⁷ <p>Tahun 1949 Asas : Partai berdasarkan Islam (Pasal II)</p> <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan partai adalah terlaksananya ajaran Islam dan hukum Islam di dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia, menuju keridhaan ilahi (Pasal III)⁸⁸</p>
<p>Nahdatul Ulama/ Partai Politik pecahan Masyumi</p>	<p>Tahun 1945 Asas dan Tujuan: NU berdasar agama Islam dan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan Syariat Islam, dengan berhaluan salah satu dari empat mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. 2. Melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat.⁸⁹ <p>Tahun 1960 Menegakkan Syariat Islam, dengan berhaluan salah satu dari empat mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali.</p>

	<p>Mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat dengan ketentuan bahwa asas dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Negara, dan programnya tidak bermaksud merombak asas dan tujuan Negara.⁹⁰</p>
<p>Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)</p>	<p>Tahun 1947</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun persatuan yang tersusun rapat di kalangan umat Islam yang teratur dengan aturan mencukupi perintah-perintah Allah dan Rasulullah dalam segala hal ihwal kehidupan, pencaharian dan pergaulan, dan dengan jalan itu membangunkan dan mendidik syarat dan sifat serta kekuatan dan kecakapan yang perlu-perlu untuk memperdapat dan menyentosaikan hak menguasai dan kewajiban menyelamatkan negeri tumpah-darah dan bangsa sendiri dan dengan ikhtiar itu menjadi suatu bagian yang bertambah-tambah kuat di dalam persatuan umat Islam sedunia. 2. Menjaga keselamatan perhubungan umat Islam itu dengan segala golongan sebangsa dan lain-lain penduduk negeri tumpah-darah kita Indonesia ini, dan memperhubungkan atau mempersatukan usaha dengan sesuatu atau segala golongan itu atas tiap-tiap perkara yang ada faidahnya persatuan itu bagi keperluan bersama (umum). (Pasal II).⁹¹ <p>Tahun 1954 (sama dengan tahun 1947).⁹²</p> <p>Tahun 1960</p> <p>Asas dan Tujuan:</p> <p>Partai ini menerima dan mempertahankan asas dan tujuan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar-dasar Negara bertujuan untuk membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia serta mendasarkan programnya atas manifesto politik Presiden</p>

	<p>tanggal 17 Agustus 1959 sebagai haluan Negara. (Pasal 2)⁹³</p>
<p>PERTI/Partai Politik</p>	<p>Tahun 1945 Asas: Asas partai ini ialah agama Islam dalam syariat dan ibadat menurut Mazhab Syafi'i <i>Radiyahallahu'anhu</i> dan dalam l'tiqad menuju Mazhab "Ahlussunah Waljamaah". (Pasal II).⁹⁴</p> <p>Tahun 1955 Asas: Asas partai ini adalah agama Islam dalam l'tiqad menurut Mazhab Ahlussunah Waljamaah dan dalam syariat dan ibadat menurut Mazhab Syafi'i (pasal II).⁹⁵</p> <p>Tujuan partai: sama dengan tahun 1954</p> <p>Tahun 1960: Asas: sama dengan tahun 1955 hanya ditambahkan "<i>Rahimallu Ta'la</i>" di belakang nama Syafi'i.⁹⁶</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan partai ini ialah ketinggian Allah (<i>litakuna kalimatullah hiyal 'ulya</i>) dengan arti seluas-luasnya dan membangun masyarakat adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia. 2. Partai ini menerima dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dasar Negara, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Peri-Kemanusiaan dan Keadilan Sosial.⁹⁷
<p>HMI/Organisasi untuk mahasiswa Islam</p>	<p>Tahun 1947 (5 Februari 1947) Dasar: Islam dengan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. 2. Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.⁹⁸

Tahun 1947 (30 November 1947)

Dasar : Islam

Tujuan:

1. Mempertegak dan mengembangkan agama Islam
1. Mempertinggi derajat rakyat dan Negara Republik Indonesia.⁹⁹

Tahun 1953 (5 Agustus 1953)

Dasar: Islam, sedangkan Tujuan kembali kepada Kongres Kedua.

*HMI menyatakan tetap sebagai organisasi yang independen seperti awal lahirnya dan menyatakan HMI bukan underbouw Partai Masyumi.*¹⁰⁰

Tahun 1955

Dasar : Islam

Tujuan:

Ikut mengusahakan terbentuknya manusia akademis, pencipta, pengabdikan yang bernapaskan Islam.¹⁰¹

Tahun 1966

Dasar : Islam

Tujuan:

Membina Insan Akademis Pencipta dan Pengabdikan yang bernapaskan Islam menuju terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.¹⁰²

Tahun 1969

Dasar : Islam

Tujuan:

Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdikan yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.¹⁰³

Tahun 1986¹⁰⁴

Asas : Pancasila¹⁰⁵

	<p>Tujuan :</p> <p>Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.¹⁰⁶</p> <p>Tahun 1999</p> <p>Asas : Islam</p> <p>Tujuan:</p> <p>Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.</p>
--	---

Korespondensi antara Ajaran dan Realitas

Kesempurnaan Islam akan semakin tampak ketika ia mampu memasuki ruang-ruang masyarakat Indonesia yang telah terbentuk dari sejarah yang panjang, bahkan sebelum kehadiran Islam itu sendiri. Bagi Lafran Pane, lapangan kebudayaan adalah medan kajian yang terhampar luas untuk dipelajari oleh calon-calon intelektual Muslim Indonesia. Lafran mengatakan:

Jika sebuah ajaran tidak mau memperhatikan budaya masyarakat setempat dan masih menjalankan peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan keadaan, dapatlah dinamakan ajaran itu adalah ajaran yang kolot. Adat istiadat yang berlaku sekarang belum tentu akan dituruti oleh orang-orang beberapa tahun kemudian, begitu pula dengan peraturan-peraturan yang diancam dengan hukuman sekarang, akan tetapi kebenaran (tauhid) tidak bergantung kepada ruang dan waktu.¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Lafran Pane mendirikan HMI atas dasar pemahaman sejarah Islam dan sejarah Indonesia. Lafran Pane juga merancang HMI agar dapat mengontekstualisasikan dirinya dengan keberagaman dan geografis Indonesia. Dengan itu, tidak heran jika HMI bergumul dengan sejarahnya mengalami dinamisasi ideologi

dan corak gerakan. Lafran Pane menyadari, Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia. Akan tetapi, Indonesia bukanlah Negara Arab dan tidak mengikuti seluruh kebudayaan yang ada di negeri minyak tersebut. Demikian pula bangsa Indonesia tidak hidup pada masa Rasul, dengan dinamika yang sangat berbeda dari bermacam sudut pandang.

Karena itu, secara logis, bangsa Indonesia tidak dapat begitu saja meniru sistem kehidupan masyarakat Arab pada umumnya. Artinya, bangsa Indonesia haruslah melakukan rekonstruksi pemikiran keagamaan Islam yang sesuai dengan perkembangan budaya dan masyarakat Indonesia berdasarkan semangat al-Quran sebagai hidayah dan standar akhlak (moral). Lafran Pane memformulasikan dan mengembangkan proses dialogis antara al-Quran dan bangsa Indonesia, lewat perasaan, penalaran, dan konstitusi budayanya. Dengan demikian, al-Quran dan Sunnah tetap relevan dengan perkembangan bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Selanjutnya, HMI merupakan rumah produksi intelektual-intelektual Muslim yang senantiasa menularkan kesadaran kepada masyarakat untuk berijtihad atau memperbaharui pemikiran Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebagaimana ulama-ulama di Iran membangun kejayaan Islam tanpa menghilangkan budaya-budaya luhur Persia. Ahmad Tirtosudiro menuliskan:

Keislaman-Keindonesiaan telah memberi napas bagi gerakan-gerakan HMI dan menjadi garis perjuangan HMI semenjak berdiri hingga hari ini dan ke masa yang akan datang... Kalau saja kita mau menjadi *underbouw* Masyumi misalnya, barangkali waktu itu untuk mendapatkan dana amatlah mudah, apalagi waktu itu Masyumi masih di pemerintahan, tentu amatlah gampang, tetapi kita bilang tidak. HMI tetap sebagai wadah kemahasiswaan yang independen. HMI adalah organisasi independen. Independen bukan berarti eksklusif, tetapi ia memiliki sikap kooperatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia, bangsa dan negara melalui program-programnya.¹⁰⁸

Victor Immanuel Tandja menjelaskan:

Bahwa HMI didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947, saat situasi Tanah Air diliputi oleh semangat rakyat dalam perjuangan senjata secara politik untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi persada, Sejarah pun mencatat Lafran Pane, salah seorang tokoh pendiri HMI, merupakan tokoh yang taat dan sadar akan ajaran agamanya. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Muhammadiyah, dan ini bagi saya menunjukkan bahwa tahap awal pemikiran keagamaan HMI lebih dekat dengan alur berpikir kaum reformis-modernis sekaligus menggambarkan adanya sekelompok pemuda/mahasiswa penghuni kota yang merupakan kelompok yang dominan dalam tubuh HMI di masa itu. Beberapa tujuan yang melatarbelakangi didirikannya HMI, ialah untuk menjamin kesatuan umat yang dalam hal ini juga sebagai kesatuan bangsa. Selain itu, HMI juga didirikan untuk menggantikan peranan kaum cendekiawan Muslim dengan bubarnya Jong Islamieten Bond (JIB) dan Studenten Islam Studieclub (SIS) telah menjadi faktor penting yang mendorong didirikannya HMI. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah pernyataan Lafran Pane sendiri, HMI didirikan untuk menghimpun kekuatan para mahasiswa Muslim dalam berjuang melawan penjajah dan aktif dalam menghantar bangsa dan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Syafi'i Ma'arif:

Victor Tandja telah memberikan interpretasi yang cukup adil terhadap sejarah HMI. Sejarah HMI terjalin dengan sangat sempurna dengan sejarah Indonesia modern pada umumnya dan sejarah modern Islam pada khususnya; sehingga setiap orang akan gagal untuk menimbanginya secara adil jika dilihat sebagai sebuah tuntutan belaka dari gerakan pembaharuan Muslim di dunia Arab atau anak benua India lainnya. Di tengah-tengah kemelut ini. Sebagai putra Indonesia dan Muslim sejati sejak awal mula telah berusaha menemukan jawabannya dengan caranya sendiri agar dengan demikian dapat membangun identitas di dalam kerangka Indonesia.¹¹⁰

Lafran Pane mengukuhkan pendapatnya dalam dua rumusan Tujuan HMI yang diciptakannya pada 1947, dua rumusan dasar tersebut adalah: *Pertama*, mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.¹¹¹

Yudi Latif menilai, pandangan nasionalistik dalam rumusan tujuan tersebut barangkali tidak tampak luar biasa jika dilihat dari perspektif hari ini. Namun, jika ditinjau dari standar tujuan organisasi-organisasi Islam pada masa itu,¹¹² tujuan nasionalistik organisasi yang dirumuskan Lafran Pane menandai sebuah pengakuan bahwa Keislaman dan Keindonesiaan tidaklah berlawanan, akan tetapi berjalani-berkelindan.¹¹³

Berlandaskan semangat keseimbangan itulah, Lafran Pane mendirikan HMI untuk menyatukan potensi segenap pemuda dan mahasiswa Muslim dalam rangka mendekati segenap rakyat Indonesia kepada tujuan dasar dibentuknya sebuah negara. Lafran menegaskan:

Negara Republik Indonesia didirikan oleh rakyat dan untuk rakyat yang ingin hidupnya bahagia, yang ingin terpenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan spiritualnya.¹¹⁴

Menurut Lafran, tujuan tersebut hanya bisa tercapai dalam masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itulah, masyarakat adil-makmur merupakan tujuan Negara Republik Indonesia. Lafran menegaskan:

Kita anti-penjajahan, karena kita sudah mengalami hidup dalam alam penjajahan. Dan tidak bisa terbentuk masyarakat adil dan makmur dalam penjajahan. Kita ingin agar senantiasa ada perdamaian di dunia ini, ingin agar seluruh hidup manusia dalam ketenangan. Tidak ada satu bangsa yang mengeksploitatif bangsa lain. Tidak ada orang lain yang mengisap orang lain, pendeknya kita menginginkan agar seluruh manusia¹¹⁵ hidup dalam keadilan dan kemakmuran.¹¹⁶

Nasionalisme

Bagi seorang Muslim, menurut Kasman Singodimedjo, Nasionalisme merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Berjuang untuk nusa dan bangsa sungguh termasuk kewajiban agama. Seorang Muslim yang tidak mau berjuang

untuk nusa dan bangsanya sesungguhnya telah melalaikan salah satu kewajiban agama. Seorang Muslim harus menjadi seorang Nasionalis yang berpartisipasi aktif demi kemajuan nusa dan bangsa. Kesadaran yang demikian, menurut Kasman, akan membawa kemajuan bagi seluruh umat manusia.¹¹⁷

Sedangkan Dahlan Ranuwihardjo,¹¹⁸ sebagai orang yang hidup sezaman dengan Lafran Pane, menekankan bahwa wawasan kebangsaan di HMI telah ditanamkan oleh Lafran Pane sejak awal pendiriannya. Hal tersebut juga telah diimplementasikan secara nyata, khususnya dalam wadah PPMI (Perserikatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia)¹¹⁹ dan CM (Compi Mahasiswa).¹²⁰

Sehingga, walaupun tanpa banyak dibicarakan, namun secara nyata HMI dalam kiprah praktiknya itu telah membina Muslim-Muslim Nasionalis. Antara Muslim-Nasionalis dan Nasionalis-Muslim sebenarnya tidak ada perbedaan, walaupun ada hanya mengenai prosesnya saja. Untuk anggota HMI mungkin lebih tepat disebut Muslim-Nasionalis, karena sejak kecil mereka sudah Muslim dan setelah dewasa mereka baru berkiprah sebagai Nasionalis.

Oleh sebab itu, dalam bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang “berwarna” lain, anggota-anggota HMI meskipun tanpa banyak retorika telah membiasakan diri hidup dalam alam kemajemukan dan sekaligus mengimplementasikan secara nyata semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Sebagai Muslim-Nasionalis, para anggota HMI dan tentu saja para alumninya menyatu dan berintegrasi dengan kehidupan nasional, yaitu:

- a. Dengan kehidupan bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
- b. Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dengan ideologi nasional, Pancasila dan UUD 1945.
- d. Dengan Pemerintah Nasional.¹²¹

Islam dan Indonesia Bertentangan Adalah Hasil Rekayasa

Apa yang dilakukan oleh para anggota HMI tersebut telah memutus pemahaman bahwa di Indonesia antara Islam dan Indonesia saling berlawanan. Padahal, peristiwa-peristiwa tersebut lebih kepada motif politik. Hal ini sudah ada sejak awal abad ke-20. Beberapa peristiwa penting yang meng-gambarkan Islam dan Indonesia berseberangan antara lain:

- a. Saat panitia (komite) untuk kebangsaan Jawa yang biasa disebut *Jawi Hisworo* menuntut agar Sarekat Islam (SI) memisahkan agama dari politik, tetapi ditolak oleh Sarekat Islam.¹²²
- b. Polemik antara Soekarno dan Natsir tentang Negara Islam versus Negara sekuler (kesatuan) di majalah *Pandji Islam* dari bulan Mei 1940–1941.¹²³ Hal ini terlalu didramatisir, sehingga masyarakat terpola, ditambah lagi dengan budaya membaca yang lemah di kalangan masyarakat kita, padahal kita baca perdebatannya, sungguh merupakan sebuah perdebatan yang mencerahkan.
- c. Konflik antara kelompok Nasionalis (*pro-Pancasila*) dengan kelompok Islam (*pro Islam*) saat perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI-PPKI 1945. Konflik tersebut muncul kembali ketika diadakan Sidang Konstituante, ketika kelompok Islam melalui partai-partai Islam menghendaki kembali supaya Islam menjadi Dasar Negara Indonesia, akan tetapi ditolak kembali oleh kelompok Nasionalis.¹²⁴
- d. Munculnya serangkaian keinginan di beberapa daerah dengan mengusung keinginan membentuk Negara Islam dengan tokoh Sukarmadji Marijan Kartosuwiryo¹²⁵ di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949, Daud Beureuh di Aceh pada 21 September 1953, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan 1953. Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan.¹²⁶
- e. Fitnah yang dilakukan oleh Ali Murtopo¹²⁷ pada Juni 1977 yang selalu menghubungkan kelompok Muslim taat dengan

sebuah pemberontakan fiktif “komando jihad”. Upaya pemfitnahan seperti seringkali dilakukan menjelang pemilu, dalam rangka mendiskreditkan partai politik Muslim, yaitu PPP.¹²⁸

- f. Munculnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mewajibkan semua organisasi sosial-kemasyarakatan berasaskan Pancasila.
- g. Munculnya kerusuhan-kerusuhan di zaman Orde Baru yang mengesankan Islam dengan Negara bertentangan seperti peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, tragedi Lampung (Waijepara), Bima, dan lain-lain.
- h. Dalam momentum-momentum tertentu, sejarah Piagam Jakarta seringkali dibicarakan, sehingga menimbulkan kesan umat Islam masih tidak rela dengan Pancasila sebagai Asas Negara.

Setelah melihat fakta historis tersebut dapat dipahami bahwa Islam dan Indonesia maupun Islam dan Pancasila bukanlah dua hal yang berlawanan, namun jangan juga dialternatifkan.¹²⁹ Peristiwa-peristiwa yang diorientasikan untuk menimbulkan kesan bahwa Islam dan Indonesia berlawanan tidak lebih dari sekadar kepentingan politik-ekonomi semata, seperti isu pemberontakan fiktif yang bernama “Komando Jihad” pada Juni 1977. Isu ini digunakan untuk mendiskreditkan partai politik Muslim yaitu PPP.¹³⁰

Tentang Pancasila

Seorang intelektual Muslim Indonesia harus memahami berbagai isu-isu Islam dan Pancasila ini secara menyeluruh dengan senantiasa memahami fakta-fakta sejarah dan kepentingan-kepentingan politik yang menyusup di dalamnya. Kelompok-kelompok Muslim yang terlihat kritis terhadap Pemerintah senantiasa akan mendapatkan cap sebagai ke-lompok ekstrem yang anti-Pancasila. Lafran Pane menegaskan

sikap tentang pro-kontra mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia:

Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Pemerintah atau MPR mengadakan interpretasi yang tegas mengenai Pancasila ini, karena dengan demikian terikatlah Pancasila dengan waktu. Biarkan saja setiap golongan mempunyai interpretasi sendiri-sendiri mengenai Pancasila ini. Dan interpretasi golongan tersebut mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya interpretasi yang berbeda-beda menunjukkan kemampuan Pancasila ini untuk selama-lamanya sebagai Dasar (Filsafat) Negara.¹³¹

Lafran bahkan menegaskan:

Berpedoman pada sejarah kelahirannya 39 tahun yang lalu, yang secara tegas menyatakan sebagai sebuah organisasi yang independen yang membina insan akademis bernapaskan Islam dan yang mengutamakan kepentingan nasional atau faham kebangsaan, maka dalam HMI tidak boleh ada dominasi- dominasian.¹³²

Sementara itu, Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul yang telah melakukan penelitian terhadap sumber-sumber pemikiran Keislaman-Keindonesiaan di HMI sejak tahun 1947–1997 menjelaskan bahwa terdapat 13 sumber utama pemikiran Keislaman-Keindonesiaan di HMI,¹³³ yakni:

Pertama, Tujuan HMI yang dirumuskan oleh Lafran Pane, dan diproklamirkan pada rapat pembentukan HMI, 5 Februari 1947 di Yogyakarta: a) Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, b) Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.¹³⁴

Kedua, Tujuan HMI, hasil Kongres I HMI di Yogyakarta 30 November 1947, yaitu: a) Mempertegak dan mengembangkan agama Islam, b) Mempertinggi derajat rakyat dan Negara Republik Indonesia.¹³⁵

Ketiga, Tujuan HMI, hasil Kongres III HMI di Jakarta, pada 30 Agustus–5 September 1953, yaitu perkembangan rohani

dan jasmani dari mahasiswa dalam memenuhi fungsi universitas dan kemasyarakatan.¹³⁶

Keempat, Tujuan HMI, hasil Kongres IV HMI di Bandung 5–15 Oktober 1955, yaitu ikut mengusahakan terbentuknya insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bernapaskan Islam.¹³⁷

Kelima, tulisan Lafran Pane yang berjudul “Kebudayaan dan Kemungkinan Islam di Indonesia”, tulisan ini dibuat dalam rangka menyambut Kongres Muslimin Indonesia II di Yogyakarta 1949.

Keenam, Tafsir Asas HMI.¹³⁸ *Ketujuh*, keputusan Kongres V HMI di Medan 1957, bahwa Komunisme bertentangan dengan Islam.¹³⁹ *Kedelapan*, keputusan Kongres V HMI di Medan tahun 1957, tentang tuntutan agar Islam dijadikan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁴⁰ *Kesembilan*, pernyataan PB HMI tahun 1958 tentang bahaya Komunis.¹⁴¹

Kesepuluh, Kepribadian HMI, yang dirumuskan pada Musyawarah Nasional HMI di Pekajangan Pekalongan 23–28 Desember 1962, dan disahkan pada Kongres VII HMI di Jakarta 1963. Kepribadian HMI meliputi enam esensi dasar, yakni: Tauhid, Keseimbangan, Kreatif, Dinamis, Pemersatu dan Progresif Revolusioner.¹⁴²

Kesebelas, pidato Dies Natalis HMI sebanyak delapan buah, yang meliputi Pidato Dies Natalis tahun I (1948), Pidato Dies Natalis VII (1954), Pidato Dies Natalis VIII (1955), Pidato Dies Natalis IX (1956), Pidato Dies Natalis X (1957), Pidato Dies Natalis XI (1958), Pidato Dies Natalis XII (1959), Pidato Dies Natalis XVII (1964).¹⁴³

Kedua Belas, hasil Simposium Nasional bertema, *Peranan Agama dalam Pembangunan*. Simposium ini diselenggarakan dalam rangka acara Kongres VI HMI di Makassar 14–20 Juli 1960.¹⁴⁴ *Ketiga Belas*, dua buah buku yang terbit pada 1947–1965, masing-masing: *Pedoman Lengkap Kongres Muslimin Indonesia 20–25 Desember 1949 di Yogyakarta* dan

Kepribadian HMI yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan PB HMI.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dasar HMI yang dirumuskan oleh Lafran Pane, dkk merupakan sumber utama pemikiran Keislaman-Keindonesiaan bagi HMI. Tujuan HMI tersebut juga menjelaskan hasil pergulatan pemikiran Lafran Pane dalam pencarian titik terang di tengah kegelapan problem Keindonesiaan dan Keislaman.

5. Intelektual Muslim, Kerukunan Umat Islam dan Kerukunan Antar-Umat Beragama

Menurut saya, perbedaan faham hanyalah kesalahpahaman yang sifatnya temporer. Dan perbedaan faham itu diperlukan. Karena, sebuah organisasi hanya bisa maju dan dinamis kalau ada perbedaan faham di antara para anggotanya.

(Lafran Pane)

Kemajemukan: Fakta yang Harus Direfleksikan

Menurut Nurcholish Madjid sebagai orang yang berusaha mengejawantahkan pemikiran Lafran Pane, kemajemukan adalah karakteristik hampir semua negara di dunia. Fakta menunjukkan, Indonesia adalah bangsa campuran dari beragam ras, suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Cak Nur menegaskan:

Salah satu ciri menonjol negeri kita ialah keanekaragaman, baik secara fisik maupun sosial-budaya... demikian juga secara keagamaan. Sekalipun Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, namun ia mengenal perbedaan intensitas pemahaman dan pelaksanaan yang besar dari daerah ke daerah. Selain Islam, empat di antara agama-agama besar di dunia diwakili di negeri kita: Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.¹⁴⁵

Indonesia dengan masyarakatnya yang begitu majemuk memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya konflik-konflik. Meskipun gejala konflik pada hakikatnya merupakan

bagian dari dinamika sejarah, demikian pula sebaliknya gejala konsensus atau akomodasi dan integrasi merupakan sisi lain dari sejarah umat manusia.

Peran Agama

Agama dapat menjadi alat pemersatu, namun dalam beberapa hal agama juga dapat dijadikan sebagai pemecah-belah. Secara garis besar, antagonisme atau konflik yang berkembang di kalangan di seputar agama terjadi dalam dua tingkat: (1) ketegangan yang terjadi di antara umat satu agama, (2) ketegangan yang terjadi antarumat beragama. Menurut Prof. Dr. Amin Abdullah:

Cepat atau lambat, wilayah-wilayah internal umat beragama juga membutuhkan kajian-kajian agama yang bersifat akademik kritis, lantaran berbagai persoalan internal umat beragama, pada hakikatnya, adalah merupakan tantangan yang tidak mudah dipecahkan hanya dengan pendekatan teologis semata.¹⁴⁶

Beberapa potensi konflik di kalangan internal umat Islam pada tingkatan masyarakat lebih disebabkan karena faktor perbedaan memahami agama Islam itu sendiri, seperti pemahaman mengenai konsep *bid'ah*, prinsip toleransi dalam Islam, konsep tentang syirik dan lain-lain. Banyak para pakar beranggapan, bahwa akar ketegangan bersumber dari lingkup teologis atau perbedaan pandangan dalam memahami norma-norma agama. Sampai pada tingkatan tertentu, mengingat agama mempunyai identitas bersifat eksklusif, partikularis dan primordial, anggapan ini mempunyai logika yang sulit di-bantah.

Namun, dalam banyak hal, realitas menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi antarumat beragama berkaitan erat dengan hal-hal yang berada di ruang lingkup agama. Utamanya, faktor kepentingan individu, kolektif, baik yang bersifat sosial,

budaya, ekonomi maupun politik. Sebab itu, keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman keagamaan yang ada di dalam tubuh umat Islam, merupakan suatu kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis.¹⁴⁷

Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan Nusantara, hanya agama Hindu dan Buddha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah saksi sejarah yang paling otentik. Kenyataan demikian tidak menepikan tumbuh berkembangnya budaya animisme dan dinamisme, baik di luar maupun di dalam Pulau Jawa.

Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di Kepulauan Nusantara, maka proses perubahan pemeluk (konversi) agama secara bertahap berlangsung. Proses penyebaran dan pemeluk agama Islam di Kepulauan Nusantara yang berlangsung secara masif dan damai tersebut merupakan suatu hal yang menakjubkan. Marshall Hodgson mengatakannya sebagai sebuah prestasi sejarah dan budaya yang sangat mengagumkan.¹⁴⁸

Salah satu keunikan yang membedakan kesadaran pluralitas agama yang dihayati oleh umat Islam Indonesia dan mayoritas umat Islam di negara-negara Timur Tengah adalah keberadaan agama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini relatif tidak berkembang di kawasan Timur Tengah, baik ditinjau dari sudut telaah sosiologis, psikologis maupun kultural. Hal demikian sudah cukup membedakan “muatan” pengalaman dan penghayatan kehidupan pluralitas agama.¹⁴⁹

Pengalaman umat Islam Indonesia secara kolektif dalam hubungannya dengan penghayatan pluralitas agama ini juga tidak dapat dihayati oleh umat Islam Turki yang menganut paham kenegaraan sekuler. Turki modern yang sekuler

berpenduduk mayoritas Muslim, namun agama-agama lain sama sekali tidak berkembang. Predikat sekuler di sini memang tidak mempunyai konotasi dengan pluralitas agama seperti yang dihayati oleh umat Islam Indonesia.

Fenomena Sekolah Tinggi Islam 1946

Tidak seperti era tahun 1890–1945, saat pendidikan untuk mencerdaskan bangsa senantiasa dihalang-halangi oleh pihak kolonial, sehingga memunculkan persatuan perjuangan di mana-mana. Maka, setelah kemerdekaan, para pelajar dan mahasiswa di samping menghadapi tantangan penjajahan jilid II, mereka juga mendapatkan imbas dari polarisasi politik, bahkan polarisasi di antara mereka sendiri.

Mahasiswa Muslim yang menimba ilmu di Sekolah Tinggi Islam merupakan generasi awal kalangan terdidik yang mendapatkan pendidikan dari tokoh-tokoh intelektual Muslim terbaik pada zamannya dari beragam aliran. Sehingga mahasiswa Sekolah Tinggi Islam memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kemajemukan umat Islam.¹⁵⁰ Lafran Pane melalui HMI-nya berusaha memberikan sebuah wadah bagi kalangan mahasiswa Muslim untuk melakukan kajian-kajian Keislaman yang bersifat akademis-kritis-historis untuk memunculkan kesadaran di kalangan pelajar Muslim bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Setiap kader HMI adalah orang yang diciptakan sebagai pemersatu umat.

Usaha-usaha menuju Persatuan Umat, Persatuan Bangsa

Akbar Tandjung berpandangan, ketika HMI didirikan di Yogyakarta tanggal 5 Februari 1947 yang dipelopori Lafran Pane, kondisi saat itu memang belum ada organisasi mahasiswa beridentitas Islam. Lafran Pane melihat, dibutuhkan suatu organisasi beridentitas Islam guna mengisi kemerdekaan. Kelahiran HMI pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan Tujuan HMI ini sejalan

dengan tujuan nasional Indonesia. Akbar menambahkan, HMI memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi Keislaman, Keindonesiaan dan Kemahasiswaan. Kita harus membuka diri dalam mengembangkan HMI. Kita juga harus mampu memperlihatkan nilai-nilai intelektual, sehingga orientasi HMI adalah mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat terutama pada kemajuan bangsa.¹⁵¹

Sedangkan menurut Chumaidy Syarif Romas, Lafran Pane mempunyai potensi dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama dilihat dari latar belakang keluarga yang sangat plural. Di PMY pun, dia bergaul dengan pemuda dari berbagai aliran. Di masa Lafran Pane, segala hal mengenai agama tidak dilembagakan di HMI, karena sudah menjadi spirit Lafran Pane sejak awal. Berikut penulis coba merangkum beberapa usaha langsung maupun tidak langsung yang diupayakan Lafran Pane untuk menjaga kerukunan di antara umat Islam dan kerukunan antarumat beragama, antara lain:

Pertama, HMI yang didirikan Lafran Pane hanya menerapkan dua syarat untuk menjadi anggotanya, hal ini berlaku sejak awal kemunculan hingga saat ini: 1) Beragama Islam, 2) Berstatus mahasiswa. Sebab, salah satu tujuan berdirinya HMI, agar mahasiswa yang beragama Islam bangga sebagai orang Islam. Syarat pertama yang beragama Islam ini diterjemahkan secara luas sejak HMI didirikan. Artinya, HMI tidak pernah mempertanyakan model, aliran, serta jenis Islam seperti apa yang dianut oleh anggotanya. Jika harus dikatakan standarisasi Islam, dapatlah dikatakan Syahadatain.¹⁵² HMI juga tidak pernah mempersoalkan status kemahasiswaan calon anggota didapat dari perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi agama. Kita bisa melihat ini saat HMI berdiri hingga saat ini.

Hal ini menjadi pilihan HMI sejak awal berdirinya karena corak Islam di Indonesia yang sangat beragam. Sehingga, HMI menjadi sebuah wadah tempat berkumpulnya mahasiswa Islam dari berbagai aliran dan kelompok Islam, seperti NU,

Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Syiah, Sunni, Sarekat Islam, Persis, Perti, Jamaah Tabligh, dan lain-lain. Tidak mengherankan, dalam tubuh HMI terdapat bermacam tafsiran tentang Islam.

Setiap mahasiswa yang masuk HMI dengan corak pemikiran keagamaan masing-masing menjadikan HMI sebagai organisasi yang kaya akan wawasan. Energi besar inilah sejatinya yang ingin diarahkan oleh Lafran Pane, dkk untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mengangkat harkat dan derajat rakyat Indonesia. Tujuan perantara dari penggabungan semua aliran Islam dalam tubuh HMI ini adalah agar para mahasiswa Islam yang merupakan calon-calon intelektual Muslim masa depan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa di dalam tubuh umat Islam Indonesia itu sendiri juga terdapat pemahaman yang berbeda-beda tentang Islam yang hanya dapat diikat dengan Islam itu sendiri. Sehingga, sesungguhnya seruan HMI tentang persatuan umat telah dimulai sejak awal mula berdirinya. Lafran Pane mengatakan:

Menurut saya, perbedaan faham hanyalah kesalahpahaman yang sifatnya temporer. Dan perbedaan faham itu diperlukan. Karena, sebuah organisasi hanya bisa maju dan dinamis kalau ada perbedaan faham di antara para anggotanya.¹⁵³

Sebagai sebuah organisasi yang mengusahakan kerukunan progresif di kalangan para mahasiswa Muslim, HMI sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi berbagai usaha untuk memecah-belah organisasi ini, sejak masa era revolusi, masa Orde Lama. Akan tetapi, Orde Baru dengan asas tunggalnya berhasil memecah HMI menjadi dua kelompok, yakni kubu HMI DIPO dan HMI MPO. Syafi'i Ma'arif menyebut ini sebagai kegagalan HMI dalam sejarah persatuan umat.¹⁵⁴

Namun, Lafran Pane menyikapi perpecahan ini dengan mengatakan:

Memang, akhir-akhir ini kita sering melihat seolah-olah di dalam tubuh HMI ada kesan perpecahan, yakni adanya Pengurus Besar (PB) dan ada HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang mengklaim dirinya sebagai pelurus HMI yang telah dianggapnya melenceng dari tujuan semula. Dan seandainya sekarang ada kubu PB HMI dan PB HMI MPO, asalkan mereka masih setia pada cita-cita semula, sebetulnya bukanlah suatu masalah.¹⁵⁵

Gagasan persatuan ini sebenarnya sudah diucapkan dalam sebuah pidato Lafran Pane di Ponorogo. Ia mengatakan:

HMI didirikan bukan untuk memecah-belah umat dan pemuda Islam, tetapi malah untuk mempersatukannya.¹⁵⁶

Kedua, sejak awal, Lafran sudah menegaskan bahwa satu tujuan utama dari HMI yang didirikannya adalah untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa-mahasiswa tentang Islam secara menyeluruh, bukan Islam yang sempit. Diharapkan, dari pemahaman ini, mahasiswa Muslim yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin umat dan bangsa mampu memberikan kebenaran-kebenangan pemikiran dari setiap masalah yang muncul di internal umat Islam.

Pemahaman yang baik dan komprehensif tentang Islam akan semakin memudahkan seorang intelektual untuk menjaga kerukunan di antara umat beragama. Prof. Dr. Amin Abdullah¹⁵⁷ menjelaskan, hanya lewat pemahaman al-Quran secara komprehensif dan utuh akan ditemukan pokok-pokok ajaran yang berkaitan dengan pluralisme keberagamaan manusia lantaran dari semula al-Quran telah berdialog dengan berbagai nilai-nilai paling dasar (*fundamental values*) yang dianut oleh berbagai kelompok agama dan non-agama yang tumbuh berkembang sebelum hadirnya tawaran Islam.¹⁵⁸

Prof. Dr. Amin Abdullah menjelaskan, sumber rujukan pertama dalam Islam adalah al-Quran dan sumber rujukan kedua adalah sejarah hidup Nabi Muhammad Saw. Keduanya menunjukkan pada dimensi historisitas kenabian dan dimensi normativitas wahyu. Maka, bagi umat Islam, kedua dimensi

tersebut ibarat sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ada hubungan tarik-menarik yang kuat di antara dua sisi tersebut, sehingga membentuk dinamika kehidupan beragama yang kokoh tetapi juga lentur.¹⁵⁹ Di sinilah

letaknya pentingnya keberadaan organisasi mahasiswa di luar perguruan tinggi yang seringkali mengem-bangkan gagasan-gagasan baru yang belum bergulir di per-guruan tinggi. Biasanya, di kampus ada pembatasan-pembatas-an dalam referensi dan kajian. Lebih luas, Lafran Pane memunculkan HMI di saat yang tepat, yakni di saat bangsa Indonesia membutuhkan persatuan umat Islam sebagai agama yang dianut hampir 90 persen rakyat Indonesia, membuktikan kedewasaannya dalam menghadapi segala perbedaan di dalam internal umat Islam maupun dalam menjaga kerukunan di antara umat beragama di Indonesia.

Seorang pendeta, Victor Tandja, mengatakan: “HMI menginginkan Islam tampil sejuk dan modern.”¹⁶⁰ Lafran Pane

sendiri mengatakan dalam pidatonya:

Walaupun dalam Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) ada urusan kemahasiswaan di mana Ketua III-nya kebetulan saya, dan di Perserikatan Mahasiswa Yogya (PMY) seksi STI telah duduk Amin Syakhri pendiri PII, dan Suyanto, toh semuanya itu masih kurang sekali sebagai alat untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa mempelajari, mendalami ajaran Islam, agar mereka kelak sebagai calon sarjana, tokoh masyarakat maupun negarawan, terdapat keseimbangan pemenuhan tugas dunia dan akhirat, akal dan kalbu, iman dan ilmu pengetahuan. Sekarang ini keadaan kemahasiswaan di Indonesia diancam krisis keseimbangan yang sangat membahayakan, karena sistem pendidikan Barat. Islam harus dikembangkan serta disebarluaskan di kalangan masyarakat Indonesia dan di luar STI. Apalagi PMY, secara tegas menyatakan berdasarkan non-agama. Inilah antara lain maksud dan tujuan serta latar belakang sejarah didirikannya HMI.¹⁶¹

Ketiga, nama organisasi yakni HMI yang merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Menunjukkan bahwa HMI adalah tempat berhimpun semua mahasiswa Islam

dari semua golongan, tarekat apa pun. Tidak ada tambahan kata Indonesia dalam nama organisasi ini, menjelaskan bahwa kalimat Islam sudah menunjukkan Indonesia sebagaimana Sarekat Dagang Islam (SDI) dan Sarekat Islam (SI) pada zaman prakemerdekaan. Kata Indonesia tidak dicantumkan dalam nama organisasi, akan tetapi kata Indonesia dipertegas sebagai *platform* perjuangan organisasi yang dituliskan dalam Tujuan HMI, yakni: *Pertama*, mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.¹⁶² Lambang dan segala macam identitas organisasi pun diciptakan secara mandiri tanpa ada sisi kemiripan dengan organisasi-organisasi umat Islam sebelumnya. Singkatnya, sejarah membuktikan bahwa HMI adalah anak kandungnya umat Islam Indonesia, bukan organisasi umat Islam.

Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra¹⁶³, posisi sebagai anak kandung umat dipertegas oleh Lafran Pane dan kawan-kawan dengan meninggalkan sekat-sekat parokialisme dan sektarianisme yang saat itu menyelimuti umat Islam pada umumnya. Dengan demikian, sama dengan Masyumi, HMI ingin memiliki basis dan sumber dukungan dari umat Islam secara keseluruhan. Nurcholish Madjid menduga bahwa dalam diri Lafran Pane dan kawan-kawan, yang kemudian ditularkan kepada HMI, terdapat suatu kearifan (*wisdom*) yang tersembunyi dan *latent*, yaitu kesadaran keberagamaan yang inklusifistik.¹⁶⁴

Pandangan ini jauh lebih luas dan bersifat melampaui primordialisme keagamaan konservatif. Karena tumbuh dari kalangan keluarga terpelajar, menurut Cak Nur, Lafran telah terbiasa dengan wawasan keagamaan dan Keindonesiaan modern dengan pandangan sosial-politik-religius yang serba meliputi. Jika kita berspekulasi lebih lanjut, patut diduga bahwa kosmopolitanisme pandangan Lafran Pane tidak hanya karena ia adalah anak seorang Sutan Pangurabaan Pane—tokoh pergerakan nasional dari Sipirok, Tapanuli Selatan, tetapi lebih

dari pergulatan hidup Lafran Pane kecil, remaja, hingga menginjak dewasa yang tidak “normal”. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pencarian identitas HMI sebenarnya dimulai dari diri Lafran Pane sendiri.¹⁶⁵

Keempat, HMI bersifat independen, HMI merupakan organisasi yang berdiri sendiri, tidak di bawah partai politik apa pun (Masyumi, PKI, PNI, NU, PSI, dan lain-lain). Watak ini sangat ampuh untuk menangkal demoralisasi gerakan HMI, karena sangat mudah bagi kebanyakan orang untuk memberikan stigma bahwa setiap gerakan HMI adalah pesanan dari “induk semangnya” jika HMI tidak independen. Sejak awal perkembangannya, HMI bukan merupakan organisasi yang berada di bawah ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PERTI, dan lain-lain. Independensi ini bukan wacana Pemilu 1955,¹⁶⁶ HMI memberi bukti semangat awal Lafran Pane dengan independensi HMI. Azhari Akmal Tarigan¹⁶⁷ menjelaskan:

Kelebihan dari organisasi warisan ayahanda Lafran Pane ini adalah watak dan sifatnya yang independen (hanif). Sebagaimana yang telah disebut di muka, HMI tidak bergerak dalam politik praktis dan tidak pula partisan. HMI tidak memiliki organisasi induk sebagaimana organisasi mahasiswa lainnya. Kendatipun sepanjang sejarahnya HMI telah ditarik ke kanan dan ke kiri oleh kepentingan politik tertentu, namun tetap saja tidak mampu mengubah watak independennya. Independensi HMI inilah yang membuatnya tidak memiliki beban apa pun (psikologis dan historis) untuk menyerukan kebenaran kepada siapa pun. HMI hanya tunduk pada kebenaran.¹⁶⁸

Independensi Lafran Pane tidak terletak pada netralitas keilmuannya, tidak pula pada pandangan keagamaannya, tetapi pada sikap etis dan kritisnya dalam mencari kebenaran. Sebagai seorang figur pencari sejati, independensi Lafran cukup terasah, terbentuk dan teruji di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak ia lalui dengan normal dan lurus. Dari perjalanan hidup Lafran Pane, dapat diketahui bahwa struktur fundamental independensi dalam diri Lafran Pane terletak pada kesediaan

dan keteguhan dia untuk terus secara kritis mencari tanpa kenal lelah, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja.

Sehingga, dapat dipahami jika dengan sendirinya wawasan Lafran Pane sangat mewarnai struktur fundamental HMI. Dalam konteks ini, independensi HMI adalah institusionalisasi sikap, pandangan hidup dan karakter pribadi Lafran. Karena itu, tidak aneh jika sejak semula HMI menunjukkan sikap independensinya yang tinggi, yang menolak untuk dikooptasi sebagai bawahan kelompok politik mana pun. Independensi HMI adalah sebuah pemberontakan terhadap arus pandangan keagamaan dan politik umat Islam yang primordial, *parochial*, dan sektarianis pada waktu itu. Karakter independensi seperti ini sama persis dengan sejarah hidup Lafran Pane yang penuh pemberontakan terhadap pola-pola pencarian kehidupan yang “lazim” dan “biasa” pada perempatan awal hidupnya. Dengan independensi ini, HMI bebas memberikan sikap terhadap berbagai problem internal umat Islam dengan mengatasnama-kan mahasiswa Islam, demikian juga bebas memberikan pemikiran tentang kerukunan antarumat beragama dengan mengatasnamakan mahasiswa Islam. Aspianor Sahbass¹⁶⁹ mengatakan:

Independensi itu ada dua: *Pertama*, independensi organisatoris. Independensi organisatoris ini menegaskan bahwa HMI ini bukan *onderbouw* salah satu kekuatan politik. Jadi, ia tidak di bawah Golkar, tidak di bawah PPP, dan tidak di bawah PDI, juga tidak di bawah ormas lain. *Kedua*, independensi etis. Independensi etis ini merupakan kebebasan HMI untuk mempertahankan suatu sikap terhadap kebenaran yang ingin diperjuangkan. Karena itu, HMI tidak akan apriori terhadap sesuatu masalah, juga tidak akan terlalu berpihak. Sepanjang itu untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran akan berpihak ke sana.¹⁷⁰

Karena independensinya, anggota HMI sangat heterogen, terdiri dari beragam asal-usul mazhab yang berbeda, ada yang berasal dari kalangan NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti, SI, bahkan golongan Nasionalis sekuler. Akan tetapi, setelah

mereka di HMI, perbincangan, permasalahan, tentang “mazhab” nyaris tidak pernah diperbincangkan atau diper-masalahkan dalam HMI. Mereka rukun. Seandainya HMI menganut mazhab tertentu yang dianut oleh suatu organisasi, maka suasana “cair” dalam soal mazhab tidak akan tercipta dalam tubuh HMI.

Victor Tandja, seorang pendeta asal Pulau Sawu, Nusa Tenggara Timur,¹⁷¹ mengatakan:

HMI adalah satu-satunya organisasi mahasiswa yang didirikan untuk menegakkan kemerdekaan. Mereka (organisasi mahasiswa non-HMI) latar belakangnya dibentuk bukan pada masa perjuangan kemerdekaan, tapi pascaperang kemerdekaan. Dan mereka dibentuk untuk berafiliasi dengan partai politik dan ormas yang ada pada saat itu, seperti PMII dengan NU, IMM dengan Muhammadiyah, GMNI dengan PNI, GMKI ada hubungannya dengan gereja, dan organisasi lainnya. Tapi HMI, sangat independen dalam sikap politiknya. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa HMI berafiliasi dengan Masyumi, itu adalah penilaian yang salah. Hal ini dapat dilihat pada saat perundingan Linggarjati, Masyumi menolak, tapi HMI menerimanya. Ini salah satu bukti bahwa HMI bukan *onderbouw*-nya Masyumi.¹⁷²

Kelima, Lafran Pane dalam periode awal berdirinya HMI berusaha mengomunikasikan gagasannya kepada ormas-ormas dan organisasi kepemudaan Islam yang sudah berdiri sebelumnya. Sehingga, umat Islam memahami bahwa HMI tidak akan merusak kerukunan di internal umat Islam. Reaksi keras terhadap kelahiran HMI justru muncul dari kalangan umat Islam, antara lain dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia. GPII menganggap bahwa kelahiran HMI merupakan satu kerugian bagi GPII dan Masyumi, karena Masyumi dan GPII akan kehilangan massa pendukung dari golongan mahasiswa. Namun, Lafran Pane menegaskan bahwa:

Persoalannya, bukan karena saya tidak setuju dengan Masyumi, yang telah berhasil mengkoordinir seluruh kekuatan umat Islam di bawah Masyumi, tetapi yang penting bahwa organisasi mahasiswa Islam yang akan didirikan itu (HMI) harus independen.¹⁷³

Sedangkan di hadapan peserta Konferensi Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) di Ponorogo tanggal 4–6 November 1947, Lafran Pane menjelaskan:

Kemahasiswaan adalah suatu lapangan perjuangan yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Karenanya harus ada lembaga perjuangan yang khusus mengurus masalah kemahasiswaan ini. Islam mengajarkan harus ada pembagian lapangan kerja dari berbagai aspek kemasyarakatan. GPII dan PII tidak bisa menggarap kemahasiswaan ini, karena bukan lapangannya. GPII menggarap di lapangan pemuda, PII menggarap di lapangan pelajar dan HMI mengurus kemahasiswaan, yang memiliki ciri lain dari bidang pemuda maupun pelajar. Apa yang digarap GPII, PII dan HMI satu sama lain tidak ada persaingan, apalagi pertentangan, satu dengan yang lain saling mengisi, sama-sama bertujuan untuk syiar, kemuliaan, ketinggian agama Islam menuju: *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Gafur*. Demi kepentingan agama, bangsa dan Negara Republik Indonesia.¹⁷⁴

Keenam, Lafran Pane tidak terlibat dalam partai politik mana pun.¹⁷⁵ Poin kelima ini penting sekali untuk menjaga sikap generasi HMI selanjutnya. Sehingga tidak ada cerita sumbang hari ini yang menyebut “Lafran itu dulu PPP, Golkar, PDI-P, dan lain-lain”. Lafran mewujudkan komitmen kebangsaannya tanpa melalui partai politik.¹⁷⁶ Anggota HMI memang dilarang merangkap menjadi anggota partai politik, kecuali setelah habis masa keanggotaannya.¹⁷⁷

Lafran juga tidak memanfaatkan karismanya sebagai pendiri HMI untuk mengatur kebijakan organisasi. Lafran Pane telah memberikan landasan kebebasan bagi HMI untuk memilih partai politik. Periode tahun 1947–1966 adalah masa di mana kerukunan di antara umat Islam diuji karena berbagai kepentingan ideologi maupun tujuan politik sewaktu-waktu bisa saja membuyarkan persatuan umat Islam. Lafran Pane telah membangun fondasi awal HMI sehingga mampu memosisikan diri dengan baik di antara kepentingan politik-ideologi kaum Islam abangan, Masyumi, NU, tentara hijau, dan lain-lain. Saat PKI dan *underbouw*-nya bekerja keras untuk

membubarkan HMI, tercatat semua elemen umat Islam menolak rencana PKI tersebut. Bagi PKI, HMI mungkin *underbouw*-nya Masyumi.¹⁷⁸

Sehingga, ketika Soekarno atas desakan PKI bisa membubarkan Masyumi tahun 1960 dan GPII tahun 1963, maka target selanjutnya adalah HMI. Namun, hal ini gagal. Sehingga kegagalan membubarkan HMI justru menimbulkan persatuan di kalangan umat Islam untuk menumpas PKI.¹⁷⁹ Saat itu, HMI tanpa peduli harus memikul pukulan berat serangan yang dilancarkan kekuatan anti-Islam sayap kiri. Situasi ini, kata Greg Barton, menunjukkan keberanian HMI untuk menderita demi Islam.¹⁸⁰

Soekarno, sebagai presiden saat itu, memang sama sekali tidak berniat membubarkan HMI, sebaliknya ia mengatakan: “*Ban... HMI jalan terus. Bicarakan dengan Dahlan tentang Kursus Kader Revolusi untuk anak-anak HMI.*”¹⁸¹

Ketujuh, hingga saat ini, dalam kerukunan di internal umat Islam dalam polemik wacana berbangsa dan bernegara, HMI tercatat mampu masuk dan berinteraksi dengan semua kelompok karena watak independensi yang diwariskan sejak kelahirannya. HMI mempunyai komunikasi yang baik dengan NU, Muhammadiyah, PERTI, Majelis Mujahiddin Indonesia, dan lain-lain. Dalam berbagai momen perkaderan pada tingkat regional, nasional, HMI menunjukkan keberagaman Islam Indonesia dengan menampilkan pembicara maupun nara-sumber dari berbagai organisasi umat Islam. Lafran Pane melalui HMI-nya telah menciptakan suatu formulasi baru dalam menggagas kerukunan di internal umat Islam dengan mendirikan sebuah organisasi mahasiswa Islam yang tidak berafiliasi dengan partai maupun ormas mana pun. HMI tidak terjebak pada tarik ulur pengelompokan umat Islam yang cenderung mempertentangkan mazhab dan aliran.

Karena itu, HMI menjadi dinamis dan lahan subur bagi tumbuhnya gagasan-gagasan Islam yang mewakili kemodernan

zaman. Dalam Musyawarah Nasional Generasi Muda Islam (GEMUIS) di Jakarta tanggal 16–26 Desember 1964 yang dihadiri segenap organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa Islam serta utusan dari Daerah Tingkat I se-Indonesia dalam pernyataan yang ke-3 mengenai HMI memutuskan: *Pertama*, HMI bukan *underbouw* dan tidak pernah mempunyai hubungan organisatoris dengan partai/organisasi mana pun. *Kedua*, masalah yang dihadapi oleh HMI saat ini tidak dapat dipisahkan dari masalah keseluruhan umat Islam.¹⁸²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan:

- a. Lafran Pane mendirikan HMI, mahasiswa-mahasiswa Islam dengan kadar dan faham yang beragam terhadap Islam masuk ke dalam HMI. Kemudian diperkenalkan dengan wawasan Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan *plus* sikap independen.
- b. Mereka kemudian memahami bahwa Islam Indonesia terdiri dari berbagai corak hasil dari dialektika sejarah dunia dan sejarah Indonesia, namun Islam itu tetap satu. Kemudian sebagian mereka mengatakan “saya ini Islam saja” sebagian lain mengatakan “saya ini Islam *ala* Indonesia”, “saya lebih suka Syiah”, corak Keislaman di HMI sangat beragam, dapat dikatakan HMI adalah laboratorium Keislaman mahasiswa.¹⁸³ Sikap ini banyak ditemui pada setiap anggota HMI, faktor lain yang memunculkan ini adalah adanya kebebasan berpikir bagi kader-kader HMI, umumnya mereka menolak hegemoni pemikiran. Sebab itu, tidak heran saat asas tunggal diberlakukan Pemerintah pada 1985, pergolakan hebat justru terjadi di HMI dan PII, bukan Muhammadiyah, NU, dan lain-lain.
- c. Kader HMI berpotensi besar untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia, karena sejak di HMI mereka sudah dihadapkan pada perbedaan dari beragam aliran yang ada dalam Islam itu sendiri. Artinya, sulit bagi seorang Muslim untuk hidup rukun dengan penganut agama

lain, jika dengan saudaranya sesama Muslim saja dia tidak rukun. Suasana perkaderan di HMI yang sarat dengan perbedaan pendapat bahkan konflik telah menciptakan karakter yang terbiasa dengan warna-warni Indonesia.

- d. Sejak kelahirannya, HMI sudah mendukung Pancasila. Lafran Pane menginginkan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang sepanjang zaman terbuka untuk ditafsirkan. Seorang teolog Kristen, TB Simatupang, mengatakan:

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diakui oleh masyarakat Indonesia. Namun, sejarah dari masa ke masa menunjukkan, bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi dasar dan memberikan warna terhadap semua segi kehidupan bangsa.¹⁸⁴ Menurut pandangan Kristen Protestan, Pancasila telah banyak memberi inspirasi. Sebab itu, tidak ada masalah untuk menerima Pancasila, selama pemahaman tentang kelima sila dari Pancasila tetap terbuka dan Pancasila tidak kemudian menjadi doktrin yang tertutup. Orang-orang Kristen Protestan dapat memahami sila pertama, dengan menyatakan bahwa di dalam kerangka kepercayaan kepada yang transenden, orang-orang yang sudah memiliki agama dapatlah terus melakukan dialog berdasarkan sikap saling menghargai demi tanggung jawab bersama.¹⁸⁵

6. Intelektual Muslim Indonesia dan Kewajiban sebagai Pejuang dalam Mengangkat Harkat dan Derajat Rakyat Indonesia

HMI lahir untuk kepentingan nasional dan kepentingan Islam, HMI merupakan manifestasi dari kepedulian mahasiswa saat itu untuk ikut berperan dalam menegakkan Republik Indonesia sekaligus mempertahankan dan menyiarkan Islam. Hal ini bisa dibuktikan dari kiprah HMI dalam setiap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. (Lafran Pane)¹⁸⁶

Ahmad Tirtosudiro mengatakan, semenjak tahun 1947, anggota HMI telah banyak yang ikut terjun dalam perjuangan fisik, sehingga tidak dapat dibenarkan bahwa HMI lahir hanya untuk perjuangan intelektual atau kepentingan diplomasi. Anggota HMI tersebar, baik yang secara langsung bergabung di dalam angkatan bersenjata sekarang ini maupun melalui laskar-laskar yang terjun langsung ke kancah peperangan dulu,

sekalipun kemudian laskar-laskar tersebut dibubarkan karena rasionalisasi.¹⁸⁷ Lafran Pane dengan segala kebulatan tekad mencita-citakan intelektual Muslim Indonesia sebagai manusia-manusia yang berdiri di barisan terdepan dalam membela Negara Republik Indonesia serta sepanjang umurnya dihabiskan untuk mengangkat harkat dan derajat rakyat Indonesia secara keseluruhan.

NKRI Harga Mati

Ahmad Tirtosudiro juga menjelaskan bahwa HMI berjuang bukan untuk mendirikan negara bermotif lain, tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah motivasi utamanya, sehingga sejak awal jelas-jelas HMI ingin menghasilkan intelektual yang bertakwa dan beramal bakti dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, budaya dan sebagainya serta bertanggung jawab atas kesinambungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸⁸

Kondisi seperti itu terjadi karena HMI mempunyai musuh-musuh yang mampu diinternalisasikan kepada intelektual-intelektual HMI saat itu. Musuh-musuh tersebut adalah: *Pertama*, penjajah Belanda dan Sekutu yang senantiasa ingin merampas kemerdekaan Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai negara boneka. *Kedua*, pihak-pihak dari dalam yang ingin atau sedang melaksanakan pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia. *Ketiga*, kemiskinan dan kebodohan yang menyelimuti segenap bangsa Indonesia.

Mengenai pentingnya mengangkat harkat dan derajat segenap rakyat Indonesia, Lafran Pane telah menegaskan ini sejak awal kelahiran HMI dan sudah menjadi pembicaraan umum di HMI. Dalam setiap perkaderan juga telah ditekankan. Namun kenyataannya, setelah seorang kader terjun ke masyarakat, entah khusus dalam dunia politik, seringkali mereka berkompromi dengan keadaan, sehingga nilai-nilai

intelektual (moral), independensi, agama kerap kali diabaikan. Banyaknya kader HMI yang menjadi pejabat, anggota legislatif seharusnya mampu menjadikan Indonesia lebih maju. Singkatnya, sungguh tidak wajar seorang yang dijuluki intelektual Muslim Indonesia melakukan korupsi, penggadaian sumber daya alam Indonesia kepada pihak-pihak asing. Sebab itulah, berikutnya penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pada praktik-praktik intelektual yang mesti kita koreksi.

Kritik untuk Intelektual Muslim di Zaman Orde Baru

Dahlan Ranuwiharjo¹⁸⁹ mencatat beberapa hal yang menjadi kelemahan para intelektual Muslim yang menjadi politisi di zaman Orde Baru:

- a. Penggarapan sistem demokrasi disertai hadiah-hadiah kedudukan dan jabatan. Soeharto telah berhasil *menjinak-lembeukkan* para pemimpin politik. Sehingga para pemimpin politik tidak lagi mandiri. Karena itu, mereka disebut para pemimpin politik dalam tanda kutip.
- b. Para “pemimpin politik” yang jinak dan lembek itu lalu tidak mampu melaksanakan tugas melakukan kontrol sosial terhadap rezim Soeharto, sehingga di bawah rezim Soeharto dari pusat sampai ke tingkatan paling bawah merajalela KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan SSK (saudara-saudara kandung)-nya yaitu komersialisasi jabatan, pungli-isme, mumpung-isme, serakah-isme kekuasaan dan harta, manipulasi hukum, kesewenang-wenangan, penggusuran tanah milik rakyat, pengrusakan lingkungan hidup, hedonisme, maksiatisme, munafikisme, *ndableg*-isme (tidak tahu malu) serta kemungkaran dan kezaliman lainnya.
- c. Setelah terkooptasinya para pemimpin Islam Indonesia berikut para ulama dan intelektual Muslim, maka ketiga komponen itu akhirnya tidak melaksanakan perintah *nahi mungkar*, sehingga mereka pun tidak melakukan kontrol sosial terhadap rezim Soeharto. Sebab itu, para pemimpin

Islam dan para intelektual Muslim ikut berdosa dan bertanggung jawab atas terjadinya KKN dan SSK selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa.

- d. Sejak tahun 1989, mereka para “pemimpin Islam” itu terbius, terbuai dan terlena oleh rangkulan Soeharto yang terasa sejuk bagaikan angin sepoi-sepoi basah dalam alam *ijo royo-royo*, padahal motivasi Soeharto merangkul umat Islam dengan simbol “mukul bedug dan takbir” adalah:
- Untuk menetralsisir/menggagalkan skenario ABS (Asal Bukan Soeharto) yang akan dilancarkan menjelang Pemilu 1992/ Sidang Umum MPR 1993.
 - Untuk menetralsisir perlawanan umat Islam Indonesia dan untuk menutup-nutupi kemungkaran dan kezaliman Soeharto dengan KKN dan SSK-nya.¹⁹⁰

Dahlan bahkan dengan cukup keras menuliskan:

Sebaik-baiknya sikap politik dan strategi para intelektual Muslim dan pemimpin Islam adalah yang tetap berlandaskan ajaran Islam, yaitu melakukan *nahi mungkar* terhadap segala bentuk kezaliman (penindasan). Kebijakan-kebijaksanaan jangan senantiasa diartikan menghindari segala bentuk risiko. Berjuang adalah berkorban menempuh risiko meskipun itu semua harus diperhitungkan dengan saksama dan cermat. Tanpa berkorban dan menempuh risiko bukanlah jihad, bukanlah berjuang. Dalih “dengan kebijaksanaan” dan “bersembunyi” di belakang ajaran *bil-Hikmah*, hanyalah menutup-nutupi sikap takut kehilangan atau tidak memperoleh kedudukan, kehilangan harta, reputasi, pencekalan atau kehidupan kebebasan. Kalau takut, ya tidak usahlah berjuang dan berlagak sok sebagai pemimpin politik.¹⁹¹

Sebab itu, tidak dapat dimungkiri, sebagai organisasi yang mengaku sebagai tempat berkumpulnya para intelektual-intelektual Muslim, HMI banyak mendapatkan penilaian yang kurang simpatik dari berbagai kalangan, khususnya selama Orde Baru berkuasa.

Mar’ie Muhammad pernah menuliskan sebuah kritikan dalam hal ini:

Di atas diam

Di bawah diam

Di tengah diam

Beramai-ramai diam

Berkhianat kita dalam diam¹⁹²

Penilaian ini muncul dari kalangan luar maupun dalam tubuh HMI itu sendiri. Penulis melihat, HMI pada zaman Orde Lama sangatlah kuat sehingga Presiden Soekarno tidak membubarkan HMI.¹⁹³ Namun, Soeharto berhasil memecah HMI atau dengan kata lain menjinakkan HMI.¹⁹⁴

Tanggapan Lafran Pane

Mengenai komitmen perjuangan intelektual Muslim untuk kejayaan bangsa Indonesia, Lafran menegaskan: “Kalau tekad tersebut belum tercapai, apa pun tantangannya harus dihadapi.”¹⁹⁵ Lafran juga mengatakan: “HMI menginginkan semua mahasiswa yang beragama Islam (1) mengenal dan (2) menghayati agamanya serta (3) mengamalkannya di mana pun dia berada. Ketiga hal tersebut harus disesuaikan dengan atribut kemahasiswaan yang lebih menekankan pada etos kecendekiawanan. Harapan yang ingin dicapai dari semua ini adalah terciptanya (1) insan akademis yang (2) beragama, yang memiliki (3) wawasan dan (4) kepekaan sosial-politik.”¹⁹⁶

Etos (etika) kecendekiawanan dan kepekaan sosial-politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, sekaligus menjadi inti dari tulisan Lafran tersebut. Sehingga seseorang dapat dibagi dalam dua ketegori:

- a. Seorang yang memiliki moral yang tinggi, namun tidak memiliki kepekaan sosial-politik.
- b. Seorang yang memiliki kepekaan sosial-politik, namun tidak memiliki moral-intelektual.

Donny Gahril Adian melukiskan hal ini dengan sangat baik, ia menuliskan:

Berapa gelintir intelektual yang berani bersuara keras terhadap rezim otoriter Orde Baru (Orba). Sebaliknya, berapa banyak yang melakukan kompromi politik. Atau fenomena teror belakangan ini. Para provokator-konseptor berbagai kerusuhan dan teror yang terjadi di Indonesia mestinya sosok-sosok intelektual. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka membangun jaringan dan mekanisme teror yang begitu rapi-rumit-tersembunyi.

Melihat itu semua, timbul segudang pertanyaan. Apa akar semua kebusukan itu? Apa yang mencengkeram nalar hingga lumpuh total. Apa yang memacetkan kerja budi dalam struktur akal manusia. Para pakar psikologi dengan mudah menunjukkan akar-akar psikis dari semua itu. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Faktor-faktor psikis diakui berperan. Masalahnya, individu tidak berkubang di ruang hampa. Aristoteles menegaskan, kodrat manusia adalah makhluk politik. Baik-buruk manusia sepenuhnya ditentukan bulat-lonjong komunitas politiknya.

Nalar tidak selalu senapas dengan moral. Ini jelas. Seorang koruptor bisa dengan amat cerdas menyembunyikan perbuatannya, mulai dari menyewa pengacara tangguh, mengalihkan isu, menunjuk kambing hitam, sampai mencari legitimasi moral-religius. Semuanya dilakukan dengan kalkulasi matematis-logis tingkat tinggi. Perilaku amoral tidak berangkat dari rendahnya tingkat inteligensia, tetapi dari absennya kegiatan berpikir dan pengambilan keputusan (Maurizio, 1994: 12), dua kerja benak manusia yang saling bertalian. Berpikir harus dipahami secara berbeda dengan inteligensia. Bukan semata kegiatan kognitif yang diarahkan pada obyek tertentu. Berpikir adalah dialog diam-diam antara saya dan diri sendiri, sebuah kegiatan yang berfungsi menggoyahkan struktur pikiran dan konvensi-konvensi sosial yang tertanam kuat. Goncangan yang akan menyiapkan pengambilan keputusan nyata tanpa kerangka-pandu universal dan abstrak.¹⁹⁷

Memahami Tulisan Lafran Pane Tahun 1990

Artikel Lafran Pane tahun 1990 berjudul “Menggugat Eksistensi HMI” yang sebagian sudah penulis kutip di atas pantas kita kaji kembali. Artikel tersebut satu tahun sebelum wafatnya dan 7 tahun sebelum reformasi 1998 terjadi. Sesuai dengan judulnya, tulisan tersebut cukup mempertanyakan posisi HMI dalam situasi dan kondisi politik saat itu.

Pernyataan ini juga dapat diartikan bahwa Lafran Pane melihat HMI sudah tidak lagi memainkan fungsinya sebagai intelektual Muslim dalam pengertian yang hakiki. Dalam interpretasi penulis, ketika seorang pendiri sebuah organisasi sudah menggugat keberadaan organisasi yang didirikannya, tentunya hal ini berangkat dari keprihatinan yang cukup keras ketika tulisan tersebut diberi judul “Menggugat Eksistensi (Keberadaan) HMI (Intelektual Muslim)”.

Penulis berkeyakinan bahwa pernyataan Lafran Pane satu tahun sebelum wafatnya yang menyatakan dirinya menggugat HMI merupakan pernyataan yang lahir dari perenungan yang dalam. Hal ini tidak dimaksudkan untuk melebih-lebihkan, melainkan sesuatu hal yang patut dicermati dengan beberapa alasan. *Pertama*, Lafran Pane dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam¹⁹⁸. *Kedua*, Lafran Pane tidak pernah mencampuri urusan internal HMI, kecuali memberikan materi dalam pelatihan-pelatihan HMI.¹⁹⁹ *Ketiga*, Lafran Pane merupakan orang yang jarang untuk tidak dikatakan tidak pernah menulis di media-media nasional.²⁰⁰ Maka, ketika seorang Lafran Pane sebagai pendiri HMI menulis tentang HMI di sebuah media nasional tentunya layak untuk dicermati dengan saksama.

Lafran Pane dalam tulisannya menilai intelektual-intelektual Muslim sudah mulai kehilangan kepekaan sosial-politik. Ia mengatakan:

Dalam situasi politik apa pun, usaha-usaha untuk menciptakan (1) Insan akademis yang (2) Islami dan (3) memiliki kepekaan sosial-politik ini belum berhasil. Maka, tidak ada alasan untuk meniadakan HMI. Paling tidak, itulah keinginan saya sebagai pendiri organisasi ini.²⁰¹

Langkah-langkah Perjuangan Lafran Pane

Ali Syari'ati menjelaskan bahwa intelektual Muslim adalah orang yang memiliki pengetahuan yang mendasarkan penilaiannya berdasarkan perenungan dan pengetahuan, bukan

semata-mata berdasarkan persepsi inderawinya.²⁰² Ali Syari'ati secara tegas menyatakan bahwa orang yang tercerahkan (*rausyan fikr*) itulah yang harus memulai langkah-langkah strategis menuju perubahan sosial:

Although not a prophet, an enlightened soul should play the role of the prophet for his society. He should preach the call for awareness, freedom and salvation to the deaf and unhearing ears of the people, inflame the fire of a new faith in their hearts, and show them the social direction in their stagnant society. This is not a job for the scientists, because they have a clear-cut responsibility: understanding the status quo and discovering and employing the forces of nature and of man for the betterment of the material life of the people. Scientists, technicians, and artists provide scientific assistance to their nations, or to the human race, in order to help them to improve their lot and be better at what "they are". Enlightened souls, on the other hand, teach their society how to "change" and toward what direction. They foster a mission of "becoming" and pave the way by providing an answer to the question, "What should we become?" (Meskipun bukan nabi, pemikir yang tercerahkan harus memainkan peranan sebagai nabi bagi masyarakatnya. Dia harus menyerukan kesadaran, kebebasan dan keselamatan bagi telinga rakyat yang tuli dan tersumbat, menggelorakan suatu keyakinan baru di dalam hati mereka, dan menunjukkan kepada mereka arah sosial dalam masyarakat mereka yang mandek. Ini bukanlah tugas para ilmuwan, sebab mereka mempunyai tanggung jawab yang pasti: memahami *status quo* dan menemukan serta memanfaatkan kekuatan-kekuatan alam dan daya manusia untuk memperbaiki kehidupan material rakyat. Para ilmuwan, teknisi, dan seniman memberikan bantuan ilmiah kepada bangsa mereka, atau kepada umat manusia, untuk memperbaiki nasib mereka agar keadaannya menjadi lebih baik. Orang-orang yang tercerahkan, sebaliknya, mengajarkan kepada masyarakat mereka bagaimana caranya "berubah" dan akan mengarah ke mana perubahan itu. Mereka menjalankan misi "menjadi" dan merintis jalan dengan memberi jawaban kepada pertanyaan, "Akan menjadi apa kita ini?").²⁰³

Orang-orang yang tercerahkan (*rausyan fikr*) itu, kata Syari'ati, mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu mencari sebab-sebab yang sesungguhnya dari keterbelakangan masyarakatnya dan menemukan penyebab sebenarnya dari

kemandekan dan kebobrokan rakyat dalam lingkungannya. Lebih dari itu, lanjut Syari'ati, ia harus mendidik masyarakatnya yang bodoh dan masih tertidur, mengenai alasan-alasan dasar bagi nasib sosio-historis mereka yang tragis. Kemudian, dengan berpijak pada sumber-sumber tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan dan penderitaan masyarakatnya, ia harus menentukan pemecahan-pemecahan rasional yang akan memungkinkan rakyatnya membebaskan diri mereka dari *status quo*. Berdasarkan pemanfaatan yang tepat atas sumber-sumber daya terpendam di dalam masyarakatnya dan diagnosis yang tepat pula atas penderitaan masyarakat itu, orang yang tercerahkan, masih menurut Syari'ati, harus berusaha untuk menemukan hubungan sebab-akibat sesungguhnya antara kesengsaraan, penyakit sosial, dan kelainan-kelainan, serta faktor internal dan eksternal.²⁰⁴

Ali Syari'ati menjelaskan tentang tugas intelektual Muslim atau dalam bahasanya *rausyan fikr*²⁰⁵ (pemikir yang tercerahkan) sebagai berikut:

Tanggung jawab paling besar orang-orang yang tercerahkan ada 5 (lima):

- a. Menentukan sebab-sebab yang sesungguhnya dari keterbelakangan masyarakatnya dan menemukan penyebab sebenarnya dari kemandekan dan kebobrokan rakyat dalam lingkungannya.
- b. Ia harus mendidik masyarakatnya yang bodoh dan masih tertidur, mengenai alasan-alasan dasar bagi nasib sosio-historis yang tragis.
- c. Lalu, dengan berpijak pada sumber-sumber, tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan dan penderitaan masyarakatnya, ia dituntut menentukan pemecahan-pemecahan rasional yang memungkinkan pemanfaatan yang tepat atas sumber-sumber daya terpendam di dalam masyarakatnya dan diagnosis yang tepat pula atas penderitaan masyarakat itu.
- d. Orang yang tercerahkan akan berusaha untuk menemukan

hubungan sebab-akibat sesungguhnya antara kesengsaraan, penyakit sosial, dan kelainan-kelainan serta berbagai faktor internal dan eksternal.

- e. Akhirnya, orang yang tercerahkan harus mengalihkan pemahaman di luar kelompok teman-temannya yang terbatas ini kepada masyarakat secara keseluruhan.²⁰⁶

Jika hal ini dikaitkan dengan tugas intelektual Muslim Indonesia, Lafran Pane mencoba merumuskan beberapa masalah yang berbasis pada kondisi zamannya. Karena setiap gerakan intelektual Muslim haruslah berbasis data dan analisis yang komprehensif. Intelektual bukanlah seorang paranormal yang mampu bergerak tanpa data dan hanya menggunakan insting serta beragama pertanda. Untuk itu, Lafran melakukan beberapa kerja intelektual, antara lain:

- a. Melakukan kontemplasi untuk memahami berbagai persoalan umat Islam dan Negara Indonesia. Lafran Pane melakukan pertobatan batin yang kelak memberinya sebuah dorongan untuk membentuk sebuah jaringan inteligensia Nusantara.²⁰⁷ Sebelumnya, Lafran Pane juga sudah meng-alami beberapa fase, yakni:
- 1) Mengalami konversi kejiwaan radikal.
 - 2) Talenta insal kamil mulai tergugah.
 - 3) Terdorong untuk mencari hakikat hidup.
 - 4) Keinginan untuk kembali kepada keyakinan mendasar.
 - 5) Sering tafakkur. (lampiran)
- b. Hasil dari perenungan Lafran Pane membuahkan sebuah gagasan perlu dibentuk sebuah wadah yang akan menyatukan pemuda-mahasiswa Muslim di Indonesia, ia memulai menyebarkan pamflet berisikan ajakan untuk berkumpul setelah Jumatan di Masjid Kauman Yogyakarta, November 1946. Lafran Pane juga mengadakan pembicaraan dengan mahasiswa STI, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, Sekolah Tinggi Teknik (STT) seputar pendirian sebuah

organisasi bagi mahasiswa Muslim Indonesia. Rapat tersebut dihadiri sekitar 30 orang mahasiswa. Namun, gagasan Lafran Pane untuk membentuk sebuah organisasi bagi mahasiswa Islam mendapat tantangan keras dari mahasiswa, terutama dari mereka yang aktif di PMY.²⁰⁸

- c. Lafran Pane merumuskan tujuan organisasi sesuai dengan konteks zamannya saat itu dan sesuai untuk masa yang akan datang, rumusan tersebut adalah: *Pertama*, mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.²⁰⁹
- d. Lafran mendirikan HMI 5 Februari 1947 sebagai hasil refleksi total seorang Lafran Pane yang mencita-citakan masa depan Indonesia dalam genggaman darma bakti HMI, yaitu Indonesia yang Islami dan Islam yang Indonesia. Pandangan ini menerangkan bahwa Lafran Pane muda di kala itu adalah seorang visioner yang mencoba merumuskan harapannya tentang masa depan Islam di Indonesia, Islam yang total dengan kesadaran masyarakat Indonesia.²¹⁰ Karena itu, dibutuhkan kader-kader terbaik organisasi yang akan dididik menjadi intelektual Muslim yang mengabdikan kepada umat dan bangsa melalui HMI.
- e. Setelah HMI berdiri, Lafran mulai berdakwah ke luar dengan mensosialisasikan pemikiran Keislaman dan Keindonesiaannya sebagai alasan utama kenapa HMI harus ada. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
 - Hadir di Kongres Mahasiswa Indonesia (KMI) di Malang pada 8 Maret 1947 (31 hari setelah berdirinya HMI 5 Februari 1947).²¹¹ Kongres Mahasiswa Indonesia di Malang diikuti oleh beberapa organisasi mahasiswa yaitu, PMKRI, PMKI, PMI, PMY, SMI, Masyarakat Mahasiswa Kedokteran (Jakarta-RI), Mahasiswa Kedokteran Hewan (Bogor-RI) dan HMI yang diwakili oleh Lafran Pane.

Hasil kedatangan Lafran Pane pada KMI di Malang cukup signifikan, beberapa waktu kemudian HMI Cabang Malang berdiri.²¹²

- Hadir di Konferensi Besar PII di Pondok Pesantren Walisongo-Ngabar-Ponorogo pada 4–6 November 1947. Pada forum itu, Lafran menjelaskan tentang latar belakang berdirinya HMI di depan Kader PII dan GPII.²¹³ Sebelumnya, GPII dan PII menolak kehadiran HMI bahkan melarang Lafran Pane untuk menjelaskan kehadiran HMI pada Kongres I PII di Surakarta 14–16 Juli 1947.
- Setelah menuntaskan sosialisasi gagasannya tentang Islam dan Indonesia pada level pelajar, pemuda dan mahasiswa, Lafran Pane mulai mensosialisasikan gagasan HMI kepada umat Iskam, untuk itu Lafran Pane menuliskan artikel pada Kongres Muslimin Indonesia 20–25 Desember 1949. Artikel tersebut berjudul “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia”, dan dimuat dalam pedoman lengkap Kongres Muslimin Indonesia 20–25 Desember 1949.
- HMI mendapatkan pengakuan dari umat Islam secara keseluruhan 2 tahun setelah berdirinya, tepatnya pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) tahun 1949 yang salah satu butir deklarasinya menyebutkan bahwa HMI/ PII adalah satu-satunya organisasi mahasiswa dan pelajar bagi umat Islam.²¹⁴

PRINSIP DASAR KEINDONESIAAN INTELEKTUAL MUSLIM

Menulis tentang dasar-dasar Keindonesiaan tentu tidak bisa lepas dari sejarah, khususnya pemikiran para pendiri Indonesia. Bagian ini merupakan bagian yang cukup penting dalam buku ini, sebab memuat dasar-dasar Keindonesiaan seorang intelektual Muslim. Pemikiran Lafran Pane sebagai seorang Guru Besar Ilmu Tata Negara akan dihubungkan dengan landasan-landasan yang telah dirajut oleh tokoh-tokoh pendiri

Republik seperti Hatta, Soepomo, Yamin, Kahar Muzakkir, dan lain-lain. Terdapat pula kutipan Pidato Soekarno dalam upacara penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Ushuluddin Bidang Dakwah, gelar Guru Besar Kehormatan serta gelar Pendidik Agung oleh IAIN, di Istana Negara, Jakarta 2 Desember 1964. Pidato tersebut berjudul “Negara Harus Ber-Tuhan”, demikian juga dengan hubungan Agama dan Negara menurut Natsir. Semua hal tentu sangat terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan oleh pembaca. Gagasan Lafran Pane sendiri terbilang cukup berani ketika ia meng-usulkan pemilihan Presiden secara langsung pada 1970 atau 3 tahun setelah Orde Baru berkuasa atau lebih tepatnya 1 tahun sebelum pemilu pertama tahun 1971 di era Orde Baru akan dilangsungkan.

UUD 1945 DAN PANCASILA

Menurut Lafran Pane, negara adalah sebuah organisasi, dan organisasi haruslah mempunyai tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang pasti. Organisasi ini tergambar dalam UUD 1945.²¹⁵ UUD telah menetapkan adanya jabatan dan setiap jabatan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi.²¹⁶ Jika seorang pejabat bertindak tidak sesuai dengan wewenang dan jabatan yang ia wakili, tindakannya dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, atau bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku. UUD adalah sumber hukum tertinggi pada Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat.²¹⁷

Bagi Lafran Pane, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Kehendak dan pendapat rakyatlah yang menjadi pedoman tindakan-tindakan penguasa. Isi UUD harus sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Kesadaran hukum rakyat ini berubah-ubah sesuai dengan pengaruh-pengaruh yang dialaminya. Mengenai

kesadaran hukum, Lafran Pane menyebutkan dua faktor yang memengaruhi kesadaran hukum dalam masyarakat.²¹⁸

Pertama, kesadaran hukum rakyat, yaitu kesadaran mengenai apa saja yang seharusnya dan apa saja yang tidak seharusnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor agama, budaya, alam, ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain. *Kedua*, kesadaran hukum rakyat diketahui melalui partai-partai politik, organisasi massa, dan lain-lain. Dalam Negara Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan Angkatan Perang Republik Indonesia yang tumbuh dari rakyat diduga adalah saluran kesadaran hukum rakyat.²¹⁹

Lafran menegaskan, faktor politik sangat memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Jika dalam masyarakat timbul bermacam-macam pendapat, maka yang menentukan satu peraturan atau baik-tidaknya suatu tindakan tergantung pada pendapat yang paling kuat dukungannya. Sehingga dengan sendirinya pendapat-pendapat ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia.²²⁰

HUKUM TATA NEGARA

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mempunyai hukum tata negara. Lafran berpendapat, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur susunan negara tertentu. Hukum Tata Negara Republik Indonesia mengatur susunan Negara Republik Indonesia. Hukum adalah himpunan (kumpulan) norma-norma yang mengandung apa yang seharusnya ditetapkan atau yang diakui pemerintah tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum tata negara adalah himpunan norma-norma yang mengandung apa yang seharusnya dan apa yang tidak mengenai susunan negara. Isi hukum tata negara dapat kita lihat pada UUD 1945.²²¹

Jika hukum tata negara berubah, berarti peraturan-peraturan tersebut juga berubah terlepas dari apa pun isinya. Dengan

kata lain, dengan berubahnya hukum tata negara berarti harus berubah pula peraturan-peraturan tersebut. Sekalipun redaksi peraturan-peraturan tersebut tidak berubah, peraturan-peraturan tersebut tidak memuat lagi hukum tata negara seperti yang berlaku semula. Atau dengan perkataan lain, peraturan tersebut tidak lagi mencerminkan hukum tata negara yang berlaku.²²²

MENGENAI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG DASAR

Penjelasan tentang UUD 1945 pada Bagian Umum No. 1 Alinea II menyebutkan bahwa hukum dasar adalah sama dengan *droit konstitunelle* dalam bahasa Prancis, *constitutional law* dalam bahasa Inggris dan hukum tata negara dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada bagian lain (Alinea I Bagian Umum No. 1) disebut bahwa hukum dasar tertulis sama dengan UUD. Selanjutnya, pada Bagian Umum No. 4 dijelaskan, bahwa dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok dan selanjutnya penyelenggaraan aturan-aturan pokok ini diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan, bahwa penjelasan tentang UUD mengenal dua pengertian terhadap perkataan hukum dasar.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam Rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar mempergunakan perkataan Hukum Dasar yang kemudian diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan perkataan UUD. Andai saja tidak diganti, maka bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menyusun Negara Republik Indonesia. Karena dengan demikian, kita menyamakan UUD dengan Hukum Dasar. Sehingga dengan mempergunakan pengertian pertama mengenai Hukum Dasar, maka seolah-olah susunan Negara Republik Indonesia akan bertemu hanya pada Hukum Dasar.²²³

Menyikapi polemik ini, Lafran Pane tidak setuju dengan pendapat yang menyamakan UU dengan Hukum dan UUD

dengan Hukum Dasar. Menurut Lafran, UU pada waktu tertentu dapat memuat hukum, tetapi beberapa waktu sesudah itu dapat tidak memuat hukum lagi. Begitu juga dengan UUD pada waktu tertentu memuat Hukum Dasar, tetapi beberapa waktu setelah itu dapat tidak memuat hukum dasar lagi.²²⁴

Tegasnya, pada waktu tertentu, suatu undang-undang dapat menggambarkan hukum, tetapi jika keadaan berubah mungkin undang-undang itu tidak menggambarkan hukum lagi. Mungkin suatu peraturan tak tertulis telah menggantikannya dengan menggambarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Lafran berpendapat peraturan harus senantiasa diubah dengan berubahnya hukum, sesuai dengan berubahnya penilaian tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Sebab itu, Lafran mengatakan:

Jangan sekali-kali sesuatu yang menggambarkan sesuatu kita samakan dengan sesuatu yang digambar tersebut, atau jangan kita samakan gambar orang dengan orangnya. Gambar seseorang 50 tahun yang lalu sudah pasti berbeda dengan gambarnya hari ini. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara *a Law* dengan *law*, atau antara *Law* dengan huruf besar dengan *law* dengan huruf kecil. Dalam bahasa Jerman antara *Gesetz* dengan *Recht*, dalam bahasa Uni Soviet (sekarang Rusia) antara *Zakon* dengan *Pravo* serta di negeri Belanda antara *wet* dengan *recht*.²²⁵

Mengenai kemungkinan perubahan UUD, beberapa negara mengadakan ketentuan dalam UUD-nya masing-masing. Ada beberapa hal yang tidak bisa diubah seperti terlihat dalam UUD Negara Prancis. Italia, Turki. Begitu pun konstitusi Amerika Serikat menentukan dalam artikel V, bahwa tidak boleh diadakan amandemen sebelum tahun 1808, mengenai artikel I sesi kesembilan ayat kesatu dan ayat keempat dan tidak boleh mengadakan perubahan pada Konstitusi. Hal ini bisa mengakibatkan sebuah partai kehilangan haknya untuk mempunyai perwakilan dalam Senat.²²⁶

ENAM PRINSIP DASAR

Lafran Pane berpendapat, walaupun dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan mengenai adanya larangan untuk mengubah (amandemen)²²⁷ beberapa hal dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, akan tetapi memang ada beberapa hal yang tidak boleh berubah, yaitu:

1. **Dasar (Filsafat) Negara yaitu Pancasila.** Dasar Negara ini adalah hasil persetujuan di antara semua golongan dalam BPUPKI-PPKI yang menetapkan Pembukaan UUD 1945.
2. **Tujuan Negara,** seperti yang dikatakan Lafran, bahwa negara seperti sebuah organisasi. Organisasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Negara RI didirikan oleh rakyat untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD.²²⁸ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengenai tujuan bernegara menuliskan: Kita mendirikan negara Republik Indonesia untuk maksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, bangsa kita telah pula bersepakat membangun kemerdekaan ke-bangsaan dalam susunan organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan sebagai Negara Demokrasi Konstitusional (*constitutional democracy*) berdasarkan Pancasila.²²⁹
3. **Asas Negara,** yaitu Asas Hukum. Pada 1945, rakyat mendirikan Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan.
4. **Asas Kedaulatan Rakyat.** Asas ini tercantum dalam Pembukaan UUD. Negara RI dibentuk di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Pendapat dan keinginan rakyatlah yang harus menjadi pedoman penguasa dalam

- melakukan tugasnya. Rakyatlah yang berhak menentukan wakil dan pemimpinnya, baik di legislatif maupun eksekutif.
5. **Asas Kesatuan.** Pada 1945, sebelum Proklamasi Kemerdekaan, pada Sidang BPUPKI maupun dalam masyarakat kebanyakan dipersoalkan apakah negara yang akan dibentuk adalah Negara Kesatuan atau Negara Federal. Akhirnya, tercapai satu persetujuan bahwa yang diinginkan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 6. **Asas Republik.** Persoalan bahwa Indonesia harus berbentuk kerajaan atau republik sudah selesai dibahas dalam berbagai rapat BPUPKI. Seandainya hari ini atau di masa yang akan datang masih ada sebagian masyarakat yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara kerajaan, maka akan kesulitan untuk mendapatkan seorang raja. Lafran memberikan pandangan bahwa ke depan semua negara akan beralih dari bentuk kerajaan ke bentuk yang lain. Sesuatu yang sudah pasti adalah negara dengan bentuk kerajaan tidak akan bertambah lagi di dunia ini.²³⁰

Mengenai enam poin tersebut, Lafran Pane mengingatkan: “Jika salah satu dari enam tersebut berubah, Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan negara yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* Indonesia... Sekiranya Dasar (Filsafat) Negara dan Tujuan Negara berubah dapat dikatakan bahwa kita sudah menyimpang dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, bahkan dari sejarah pertemuan hingga perkawinan Islam dan Indonesia di masa lalu. Hal ini juga berlaku bagi organisasi mana pun. Tujuan dan dasar suatu organisasi menentukan eksistensi organisasi tersebut. Menurut Lafran Pane, apatah Negara Republik Indonesia menganut sistem presidensial atau parlementer bukanlah merupakan suatu persoalan yang prinsipil.”²³¹

LAFRAN: PANCASILA BUKAN KEILMUAN

Pernyataan Lafran Pane tersebut bukanlah sebuah pernyataan yang didapatkan sesaat, melainkan sejak tahun 1949 atau sekitar 20 tahun sebelum pernyataan itu dinyatakan, Lafran sudah membela Pancasila sebagai Filsafat Negara Republik Indonesia. Dahlan Ranuwiharjo, seorang sahabat Lafran Pane, mengisahkan:

Dalam konferensi pendidikan se-Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta pada November 1949, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dan organisasi pendidikan dari RI dan daerah "federal", Lafran Pane dan saya yang mewakili PPMI dalam konferensi tersebut menghendaki dasar pendidikan adalah Pancasila, sedangkan beberapa delegasi termasuk beberapa guru besar menghendaki dasar pendidikan adalah keilmuan dan kebenaran. Ini sekadar membuktikan betapa pada 1949, Pancasila sudah sangat dihayati oleh HMI. ²³²

MENGENAI MPR DAN SINDROM KEKUASAAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang dimaksud dengan rakyat dalam pasal ini tentu rakyat yang hidup pada masa jabatan MPR yang bersangkutan. Walaupun dalam undang-undang tidak disebutkan tentang masa jabatan MPR, tetapi analogi dengan interpretasi otentik mengenai Pasal 3 UUD 1945 tentang penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus dilakukan setiap lima tahun dan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masa jabatan MPR juga 5 tahun. ²³³

Lafran berpendapat, oleh sebab itu, MPR mempunyai mandat dari rakyat yang hidup pada masa jabatan lima tahun itu. MPR harus dapat menggambarkan keinginan dan kepentingan rakyat yang ia wakili. MPR harus dapat mengetahui keyakinan rakyat mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya pada waktu itu, dengan menilai segala sesuatu berdasarkan keyakinan itu. Lafran kemudian

merumuskan masa idealnya peran DPR hingga tahun 1981. Ia mengatakan:

Dengan demikian, keputusan MPR pada masa jabatan 1971–1976 mungkin lain dengan keputusan MPR masa jabatan 1976–1981. Mengenai materi yang sama, MPR periode 1971–1976 tidak berhak mendikte atau mengintervensi MPR periode 1976–1981. Tegasnya, rakyat yang hidup pada periode 1971–1976 tidak berhak mengintervensi rakyat yang hidup pada periode 1976–1981 dan tahun-tahun selanjutnya. Jika yang berlaku sebaliknya, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Tindakan ini merupakan tindakan diktator yang dilakukan oleh rakyat kepada rakyat lainnya yang hidup pada masa yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan rakyat yang diwakili oleh MPR yang masa jabatan 1971–1976 itu ingin agar rakyat sesudah masa jabatan MPR ini menjadi konservatif, terutama MPRS yang sekarang ini sekali-kali tidak boleh mendikte MPR yang akan datang.²³⁴

Memahami pendapat Lafran Pane di atas, bisa ditafsirkan dengan beragam. *Pertama*, bisa saja Lafran Pane memang tidak setuju dengan Orde Baru atau menginginkan pada Pemilu 1971 nantinya akan terpilih presiden baru. *Kedua*, Lafran menginginkan lembaga negara benar-benar independen sebagai cermin dari rakyat itu sendiri. *Ketiga*, Lafran ingin mengikis penyakit sindrom kekuasaan yang biasanya dialami oleh orang-orang yang pernah menjabat seperti yang ia katakan, “jangan sampai MPR yang menjabat pada periode sebelumnya men-dikte MPR yang menjabat hari ini, hal ini berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang.”

WEWENANG MPR, MAHKAMAH AGUNG

Tentang wewenang MPR, Lafran mengatakan:

Sampai sekarang ini (1970) pendirian saya mengenai wewenang MPR masih tetap seperti yang saya ajukan pada Januari 1960, yaitu: (1) Menetapkan UUD, (2) Mengubah UUD, (3) Memilih presiden dan wakil presiden, (4) Menetapkan GBHN.²³⁵

Wewenang/kekuasaan melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya adalah wewenang yang bersifat umum dan empat wewenang yang tersebut di atas

adalah wewenang yang bersifat khusus, sesuai dengan penjelasan tentang UUD Negara Indonesia. Akibat dengan dipilihnya presiden dan wakil presiden oleh MPR, maka sangat logis jika presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR juga berhak mengoreksi presiden jika keputusannya bertentangan dengan UUD. Selain itu, MPR juga harus teliti untuk melihat apakah sebuah UU bertentangan dengan UUD. Baru-baru ini, dalam DPRGR, ada anggota-anggota yang mengatakan bahwa beberapa pasal dalam rencana UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD. Benar-tidaknya pendapat ini tergantung pada MPRS yang sekarang melakukan tugas MPR.²³⁶

Mengenai Mahkamah Agung, Lafran Pane tidak sependapat bahwa MA memiliki wewenang untuk menguji suatu UU secara material. Namun, MPR-lah yang paling mengetahui apakah suatu UU bertentangan dengan UUD. MPR dapat saja membentuk suatu Panitia Penguji Hukum yang ditugaskan untuk tujuan ini. Panitia ini dengan sendirinya memerlukan bantuan dari ahli-ahli hukum dan panitia ini sepenuhnya bertanggung jawab kepada MPR. Lebih tegas, Lafran mengatakan:

Jangan disamakan *Supreme Court of Justice* Amerika Serikat dengan Mahkamah Agung kita. Biarpun sistem pemerintahan kita sama-sama presidensial, tetapi Amerika Serikat adalah suatu Negara Federal di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pusat dan Negara-negara Bagian. Bahkan, secara konstitusi, Pusat tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kekuasaan Negara-negara Bagian.²³⁷

APAKAH SEBUAH KEPUTUSAN MPR SUDAH SESUAI DENGAN KEYAKINAN RAKYAT?

Bagaimana menilai sebuah keputusan MPR sesuai dengan keyakinan dan keinginan rakyat? Bukankah bidang ini anggota-anggotanya adalah wakil rakyat. Untuk mengujinya secara material adalah sulit karena harus kita uji dulu dengan keyakinan tiap-tiap warga Negara Republik Indonesia. Atau diuji dengan satu ukuran yang menggambarkan keyakinan rakyat. Dalam hal ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah memiliki sebuah kriterium hukum, suatu *rechtsidee*, satu cita hukum (berbeda dengan penjelasan

tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Bagian Umum No. III yang menyalin *rechtsidee* dengan cita-cita hukum). Lafran kemudian mengambil kesimpulan:²³⁸

Bahwa pokok-pokok pikiran yang dimaksud dengan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Bagian Umum No. III yang merupakan perwujudan daripada *rechtsidee* itu adalah Dasar Negara, yaitu Pancasila. Dengan demikian, hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis senantiasa harus dinilai, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak? Jika tidak sesuai, hukum tersebut harus diubah.²³⁹

Sederhananya, sebuah UU, Kebijakan, Peraturan, dan lain-lain harus dinilai dengan:

1. Apakah sudah memiliki nilai-nilai Ketuhanan, atau sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan?
2. Apakah sudah memenuhi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, moral, sehingga tidak merusak cita-cita peradaban luhur?
3. Apakah sudah memenuhi rasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia?
4. Apakah mekanisme pengambilan keputusan sudah sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan yang menjadi nilai-nilai dasar dari bangsa Indonesia, yakni gotong-royong dan musyawarah?
5. Apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, atau hanya memenuhi kepentingan segelintir orang saja?

Lima penilaian di atas merupakan interpretasi penulis dari pemikiran Lafran Pane. Hal ini bisa dilakukan oleh semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan pemikiran Lafran Pane, bahwa siapa pun berhak menafsirkan Pancasila. Pemerintah tidak berhak memonopoli tafsiran atas Pancasila, tidak menutup kemungkinan tafsiran Pancasila akan berkembang seiring dengan semakin cepatnya gerak zaman.

Adanya perbedaan-perbedaan interpretasi ini menunjukkan kemampuan hidup Pancasila ini untuk selama-lamanya sebagai Dasar (Filsafat) Negara.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Lafran berpendapat, jika kita berpegang teguh pada 6 hal yang tidak bisa berubah di atas, kita dapat mengadakan perubahan pada Tata Negara Indonesia. Kedaulatan rakyat haruslah yang melaksanakannya MPR atau suatu majelis dengan nama lain. Menurut Lafran, tidak harus dipersoalkan mengapa hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat. Jika dilihat dari namanya dan cara pembentukannya, apakah DPR tidak pantas disebut suatu majelis yang melakukan kedaulatan rakyat?

Dalam pandangan Lafran, hingga saat ini, pengertian MPR melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 masih menjadi persoalan. Tugas melaksanakan kedaulatan rakyat adalah tugas yang bersifat umum, sedangkan tugas khusus dari MPR ada 4 hal, sebagaimana yang tertulis di atas. Sesuai dengan UUD 1945, MPR tidak memiliki wewenang untuk memilih anggota DPR, selain dengan sendirinya anggota DPR menjadi anggota MPR. Hal ini harus ditetapkan oleh presiden dan DPR melalui undang-undang.²⁴⁰

Memang, ada ahli yang mengatakan: “bahwa ini adalah kehendak MPR, karena yang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR. Jadi, MPR mengikatkan dirinya dengan sukarela pada keputusan presiden dan DPR, begitu pun mengadili adalah wewenang Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnya, MPR tidak memiliki hak, hal ini pun melalui kerelaan dari MPR.”

Dengan demikian, andai pada suatu waktu MPR tidak mau terikat dengan Keputusan Presiden dan DPR atau Mahkamah Agung, MPR dapat saja melakukannya dengan mengubah keputusan tersebut. Hal ini mencakup pengertian bahwa

presiden, DPR dan Mahkamah Agung sesungguhnya bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi Negara.²⁴¹

MPR DIPILIH OLEH RAKYAT

Jika memang pengertian mengenai kedaulatan rakyat adalah demikian, Lafran berpendapat, sebaiknya yang dipilih oleh rakyat secara langsung adalah MPR. Sedangkan DPR sebaiknya ditiadakan atau dihilangkan saja dan diganti dengan Badan Pekerja MPR yang memiliki tugas sebagai Badan Pekerja MPRS, ditambah dengan tugas membuat undang-undang dan tugas sebagaimana yang dimiliki oleh DPR sekarang ini. Dalam UUDS 1950, kita kenal pada Pasal 138 Badan Pekerja Konstituan yang melakukan tugas kerja DPR sebelum Badan ini terbentuk. Memang, Badan Pekerja seperti yang dimaksud oleh pasal itu tidak pernah terbentuk. Hal ini disebabkan karena DPR lebih dulu dibentuk oleh Konstituan. Banyaknya anggota Badan Pekerja MPR ditetapkan, misalnya 2/5 dari seluruh anggota-anggota MPR, dipilih dari dan oleh MPR.²⁴²

TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Ketua Mahkamah Agung dan anggota-anggotanya diangkat oleh presiden atas persetujuan DPR, sementara Dewan Pertimbangan Agung (sekarang disebut Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres) sebaiknya ditiadakan dan diganti dengan Panitia yang dipilih oleh MPR. Dengan demikian, nasihat yang diberikan oleh Panitia ini kepada Pemerintah akan mempunyai kewibawaan, mengingat MPR dipilih langsung oleh rakyat dan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Tentu saja sama dengan Panitia Penguji Hukum yang telah disebut di atas, Panitia ini juga harus didampingi oleh ahli-ahli sesuai dengan bidangnya.

SISTEM PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER SERTA PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG

Menurut Lafran Pane, jika bangsa Indonesia ingin menganut sistem presidensial secara tegas lebih baik diubah saja cara pemilihan presiden. Presiden tidak dipilih lagi oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR secara luas, tentunya akan ada perubahan pada konstitusi kita (Lafran: 1970).²⁴³

Sementara itu, Maswadi Rauf mengatakan bahwa sistem presidensial, dengan beberapa pengecualian, telah digunakan pada sebagian besar masa kemerdekaan Indonesia. Pengecuali-an tersebut adalah digunakannya sistem parlementer pada beberapa periode masa berlakunya UUD 1945 antara tahun 1945 hingga 1949; masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950), dan masa Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (1950–1959).²⁴⁴

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 yang memberi kesempatan sekali lagi bagi penggunaan sistem presidensial. Setelah itu sistem presidensial tetap digunakan seiring dengan penggunaan UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali tahun 1999–2002 tidak mengubah sistem pemerintahan yang berlaku, sehingga sistem presidensial tetap digunakan oleh UUD 1945 hasil amandemen tersebut.²⁴⁵

Perkenalan bangsa Indonesia dengan sistem presidensial dimulai sejak awal pula karena *founding fathers* yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan lembaga penerusnya yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersepakat untuk menggunakan sistem presidensial bagi Republik Indonesia yang nantinya akan dibentuk. Sistem parlementer kelihatannya

bukan merupakan pilihan utama para bapak bangsa tersebut. Karena tokoh-tokoh berpengaruh yang dipimpin oleh Soekarno tidak menyukai sistem parlementer seperti yang digunakan oleh banyak negara di Eropa. Mengenai alasan pemilihan sistem presidensial di Indonesia, Maswadi Rauf memperkirakan bahwa peranan besar presiden dalam sistem presidensial dianggap lebih sesuai dengan budaya paternalistis yang dianut kuat oleh bangsa Indonesia.²⁴⁶

Kelompok Soekarno menganggap bahwa sistem presidensial akan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden untuk berperan. Sedangkan kelompok Hatta beranggapan bahwa sistem presidensial adalah salah satu sistem pemerintahan yang biasa digunakan dalam demokrasi, sehingga penggunaannya di Indonesia akan membuat Indonesia tetap berada dalam jalur demokrasi.²⁴⁷

Selanjutnya, Soekarno sendiri menuduh sistem parlementer sebagai penyebab utama ketidakstabilan politik dan konflik politik yang hebat. Kegagalan sistem parlementer telah dimanfaatkan oleh Soekarno untuk memperkuat pandangannya tentang perlunya meninggalkan demokrasi Barat dan kembali ke nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang tecermin dalam demokrasi terpimpin.²⁴⁸

Pemikiran Soekarno itu telah membentuk budaya politik Indonesia berupa sikap anti-sistem parlementer. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh Soekarno dan para pengikutnya tentang sikap anti-demokrasi Barat (termasuk sistem parlementer) telah berhasil, karena sikap tersebut telah dianut oleh bangsa Indonesia, bahkan hingga saat ini.²⁴⁹

SISTEM PARLEMENTER MENURUT LAFRAN PANE

Lafran mengatakan: “Kita kembali ke UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959, karena isi UUDS 1950 tidak memuat norma-norma hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat dalam

lapangan ketatanegaraan. Pendapat ini ternyata disepakati banyak golongan dalam Konstituante tahun 1959, waktu itu Presiden RI menganjurkan kepada Konstituante agar menerima UUD 1945 sebagai UUD seperti tersebut dalam UUDS 1950 Pasal 134.”²⁵⁰

Pada waktu itu, tidak ada golongan yang ingin agar UUDS dipertahankan, semua setuju kembali ke UUD 1945. Perbedaan paham waktu itu hanyalah mengenai penempatan Piagam Jakarta di dalam tubuh UUD 1945 atau di luar UUD 1945. Satu golongan menghendaki di dalam tubuh UUD, artinya khusus mengenai penempatan Piagam Jakarta harus diadakan perubahan pada UUD, yaitu penempatan perkataan: hukum syariat Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluknya sesudah perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa pada pembukaan UUD dan Pasal 29. Sementara, golongan lain menghendaki jangan diadakan sama sekali perubahan pada UUD. Golongan ini menginginkan agar Piagam Jakarta ditempatkan di luar UUD, misalnya sebagai lampiran UUD. Karena tidak ada kesepaham-an di antara dua golongan ini, maka gagallah Konstituante menyetujui anjuran Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Akibatnya, terjadilah ketidakstabilan dalam pemerintahan, karena UUDS 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 kembali dijalankan. Menurut Lafran, hal ini terjadi terutama karena diberlakukannya sistem kabinet parlementer.²⁵¹

Dampak lainnya adalah kabinet harus terdiri dari beberapa partai yang mempunyai program yang berbeda dan mungkin mengenai beberapa hal bertentangan. Program kabinet merupakan perpaduan dari beberapa program partai tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya masing-masing menteri biasanya bertindak sesuai dengan pendapat partainya yang seringkali berbeda dengan pendapat kabinet. Duduk perkara-nya adalah karena menteri-menteri ini harus memperhatikan juga keinginan partainya. Jika tidak, mereka terancam ditarik dari kabinet, atau sebaliknya partainya tidak akan memberikan

dukungan di kabinet. Hal ini bisa menyebabkan kabinet tersebut jatuh. Walaupun dalam sejarah UUDS 1950 belum pernah ada satu kabinet yang jatuh karena mosi tidak percaya dari DPR, karena satu kenyataan bahwa tiap-tiap kabinet yang mengembalikan mandatnya kepada presiden selalu akibat khawatir atas tidak cukupnya dukungan di DPR, dengan ditariknya beberapa menteri oleh satu atau beberapa partai dalam kabinet. Sebuah pengecualian adalah, saat Kabinet Ali-Arifin dijatuhkan, karena kurangnya kewibawaan lantaran KSAD baru yang diangkat oleh kabinet ini tidak dapat melakukan tugasnya, lalu diboikot oleh Angkatan Darat.²⁵²

Seperti kita ketahui, DPR sebelum bulan Maret 1956 masih bersifat sementara, karena belum dibentuk berdasarkan pemilihan umum, namun DPR ini memiliki wewenang yang sama dengan DPR yang dibentuk oleh pemilihan umum. Di antara wewenangnya adalah membuat undang-undang bersama dengan Pemerintah. Pemerintah juga bertanggung jawab kepada DPR, dan jika kebijaksanaannya tidak disetujui oleh DPR, Pemerintah harus meletakkan jabatan.²⁵³

Akibat dari sistem parlementer ini harus diadakan tawar-menawar antara beberapa partai dalam membentuk kabinet sehubungan dengan tidak adanya satu partai yang memiliki anggota lebih dari setengah jumlah anggota. Malahan, sebelum bulan Maret 1956, baru terdapat satu kabinet terbentuk, jika didukung oleh paling sedikit 4 partai politik/fraksi dalam DPR, sehingga 1 kursi dalam DPR bisa menghasilkan 1 kursi dalam kabinet. Tawar-menawar dalam kabinet antara partai politik ini tidak hanya mengenai kursi-kursi dalam kabinet, tetapi juga tawar-menawar mengenai jabatan-jabatan lain di dalam maupun di luar negeri, malah sampai ada tawar-menawar mengenai lisensi-lisensi istimewa untuk mengimpor barang-barang.

Menurut Lafran, melihat sistem kabinet parlementer sangat merugikan rakyat, pada periode 1954–1955, pernah satu partai

politik yang tidak duduk dalam kabinet mengusulkan kepada Presiden agar mengambil alih kekuasaan. Artinya, Presiden kembali menjadi kepala negara dan sistem presidensial kembali diterapkan.²⁵⁴

INDONESIA MENURUT *FOUNDING FATHERS*

Enam prinsip dasar yang tidak boleh berubah yakni (Pancasila, Tujuan Negara, Negara Hukum, Asas Kedaulatan Rakyat, Negara Kesatuan, Republik). Ungkapan Lafran Pane tersebut coba penulis komparasikan dengan pernyataan salah seorang *founding fathers* Indonesia. Terdapat beberapa persamaan, sebagaimana yang diucapkan oleh **Muhammad Yamin** dalam 6 Faham Negara Indonesia:

1. Negara Rakyat Indonesia menolak segala tata negara atau bagian-bagiannya yang melanggar dasar permusyawaratan, perwakilan dan pikiran.
2. Negara Rakyat Indonesia menolak segala faham seperti: Federalisme (persekutuan), Feodalisme (susunan lama), Monarki (kepala negara berketurunan), Liberalisme, otokrasi dan birokrasi dan demokrasi Barat.
3. Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan Portugis, Inggris, Amerika dan Belanda yang semata-mata dibentuk untuk menguatkan Kerajaan Belanda atau Peradaban Barat. Negara Republik Indonesia ialah suatu negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat penuh.
4. Negara Republik Indonesia menolak segala faham pemerintahan *istib dai* seperti pemerintahan Fir'aun dan Namruz, menolak faham pemerintahan Khilafah, kekuasaan kerakyatan atas golongan yang berilmu dan berkhidmat, menolak faham pemerintah filsafatiah, yaitu pemerintahan kekuasaan cerdik pandai atas rakyat jelata.
5. Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara.

6. Negara Rakyat Indonesia menolak segala tindakan yang akan mengecewakan kedaulatan negara dengan menjalankan kebonekaan.²⁵⁵

APA ITU BANGSA INDONESIA DAN MANA SAJA INDONESIA?

Pertanyaan ini pernah penulis diskusikan dalam *studi club* di Yogyakarta. Untuk menjawabnya, kita mulai dengan narasi berikut ini: Siapa saya? Saya adalah bangsa Indonesia. Saya menyadari, kenyataan bahwa saya lahir dan dilahirkan di Indonesia dan oleh orang Indonesia sudah merupakan takdir-Nya yang tidak mungkin bisa saya tolak. Artinya, *saya ini 'kan lemah dan Yang Maha Perkasa adalah Tuhan, dan saya tidak bisa meminta ingin dilahirkan sebagai bangsa apa? Dari rahim siapa?* Satu hal yang membuat saya kuat adalah, ketika saya mengimani bahwa takdir ini adalah yang terbaik dan wajib disyukuri. Saya meyakini bahwa bangsa adalah ciptaan (*kodrat*) dan negara adalah buatan (*iradah*). Atas dasar keyakinan ini, penulis katakan bahwa 28 Oktober 1928 adalah hari lahirnya bangsa Indonesia (HLBI), 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia (HKBI), dan 18 Agustus adalah hari berdirinya Negara Indonesia (HBNI).²⁵⁶

Sedangkan mengenai batas Indonesia, penulis mengimani kepercayaan Soekarno dalam pernyataannya: “Maka, manakah yang dinamakan Tanah Tumpah Darah kita? Tanah Air kita? Menurut geopolitik, Indonesialah Tanah Air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatra saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Swt menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudra, itulah Tanah Air kita (Indonesia)!”²⁵⁷

INDONESIA NEGARA BER-TUHAN

Muhammad Yamin menjelaskan telah ada tiga Indonesia sepanjang sejarah dunia:

1. Indonesia pertama, yakni pada era Syailendra-Sriwijaya (600–1400). Negara Indonesia pertama dibentuk dan di-junjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar kedatuan yang selaras dengan kepercayaan purbakala (kesaktian magis) agama Buddha Mahayana.
2. Negara Indonesia kedua, yakni Kerajaan Majapahit (1293–1525). Negara Indonesia kedua disusun atas paham keperabuan, dan bersandar kepada paduan agama Syiwa dan Buddha, menjadi agama Tantrayana.
3. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan dan ber-Ketuhanan.²⁵⁸

Jika kita ikuti alur konsep Yamin tersebut, Indonesia satu hingga Indonesia tiga pada hakikatnya adalah satu. Satu kesatuan, satu kesempurnaan. Bukan berarti Indonesia satu atau Indonesia dua tidak ber-Tuhan, justru sebaliknya Indonesia satu dan Indonesia yang memberi landasan, sebab tanpa ada Indonesia satu dan dua tentu tidak ada Indonesia yang sekarang ini. Yamin juga berpendapat, rakyat Indonesia saat ini tidak dapat lagi diikat dengan dasar dan bentuk tata negara ter-dahulu, sebab perubahan aspirasi sekarang jauh berlainan daripada zaman yang dahulu, dunia pikiran dan susunan dunia sudah berubah.

Soekarno dalam pidatonya sebelum menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara yang ber-Tuhan, sebagaimana kebiasaannya ia memancing pendengarnya untuk berpikir terlebih dahulu, ia mengatakan:

Jika saudara bertanya apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan? Saya menjawab, ya saya percaya kepada Tuhan, malahan sebagaimana sering kukatakan berulang-ulang, saya diberi hidup oleh Tuhan dan untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa...

Ia adalah Tuhan Seru Sekalian Alam, bukan Tuhan Seru Soebandrio, ia adalah Tuhan dari binatang-binatang, Tuhan daripada awan mega putih yang berarak di angkasa, Tuhan dari gunung-gunung yang membiru, Tuhan dari

lautan yang menggelora membanting pantai, Tuhan dari rumput-rumput kecil, Tuhan daripada kerikil-kerikil yang kita injak-injak, Tuhan dari matahari, Tuhan dari bulan, Tuhan dari planet-planet dan bintang-bintang yang tidak bisa kita lihat, **Tuhan dari negara, sebab itu pun berada di alam ini.**²⁵⁹

MAKHLUK SEPERTI APAKAH NEGARA ITU?

Negara harus ber-Tuhan, dan negara adalah satu zat yang ber-Tuhan, artinya yang dibuat oleh Tuhan; makhluk Tuhan. Bukan saja manusia ataupun binatang makhluk buatan Sang Khaliq, gunung-gunung juga makhluk, sungai-sungai adalah makhluk, rumput adalah makhluk, awan adalah makhluk, maka negara adalah makhluk pula, bikinan Allah Swt. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Swt: “Aku membuat segala hal untuk menyembah kepada-Ku.”

Karena itu, manusia harus menyembah Tuhan, binatang harus menyembah Tuhan, sungai harus menyembah Tuhan, laut harus menyembah Tuhan, gunung harus menyembah Tuhan, **dan negara harus jugalah menyembah Tuhan.** Untuk itu, Soekarno mengingatkan:

Negara yang tidak menyembah kepada Tuhan, negara yang tidak ber-Tuhan akhirnya akan celaka dan lenyap dari muka bumi ini.²⁶⁰

SETIAP ORANG INDONESIA HARUS BER-TUHAN

Soekarno dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI mengatakan:

Prinsip Ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut Isa Al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? lalah hormat-

menghormati satu sama lain (tepek tangan sebagian hadirin). Nabi Muhammad telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!²⁶¹

INDONESIA BUKAN NEGARA ISLAM

Prof. Mr. Soepomo tentang negara persatuan mengatakan:

Oleh anggota yang terhormat Tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang-lebar, bahwa dalam Negara Persatuan Indonesia hendaknya dipisahkan urusan negara dan urusan agama. Memang, di sini terlihat ada dua faham, ialah: faham dari keanggotaan ahli agama, yang menganjurkan supaya di Indonesia didirikan Negara Islam, dan anjuran lain, sebagaimana telah dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan Negara Islam.²⁶²

Apakah sebabnya di sini saya mengatakan “bukan Negara Islam?” Perkataan: “Negara Islam”, lain artinya daripada perkataan “Negara berdasarkan atas cita-cita luhur dari agama Islam”. Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai “Negara Islam”, negara tidak bisa dipisahkan dari agama, negara dan agama adalah satu, bersatu padu. Islam, sebagaimana Tuan-tuan telah mengetahui, ialah suatu sistem agama, sosial dan politik, yang bersandar atas al-Quran sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia dalam Islam.

Mendirikan Negara Islam Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan Negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal “*minderheden*”, soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain.

Meskipun Negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan lain itu, akan tetapi golongan-golongan agama-agama kecil itu tentu tidak dapat mempersatukan dirinya dengan negara. Oleh karena itu, cita-cita Negara Islam tentu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya

dan juga yang telah dianjurkan oleh pemerintah balatentara.

Oleh karena itu, saya menganjurkan dan mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti, totaliter seperti yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan yang akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik dari golongan terbesar dan yang kecil.

Dengan sendirinya, dalam negeri nasional yang bersatu itu, urusan agama akan dipisah dari urusan negara, dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan- golongan agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya, dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama yang disukainya. Baik golongan agama yang besar maupun golongan agama yang terkecil. Tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa asing "*zal zich thuis voelen*" dalam negaranya).

Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu akan bersifat "a-religieus". Itu bukan. Negara nasional yang bersatu ini akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka, negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.

Sebagai contoh, dalam Negara Indonesia hendaknya dianjurkan supaya warga negara cinta kepada Tanah Air, ikhlas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada Tanah Air; supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin negara; supaya takluk kepada Tuhan. Supaya tiap-tiap waktu selalu ingat kepada Tuhan. Itu semua harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari negara nasional yang bersatu itu. Dan saya yakin, bahwa dasar- dasar itu dianjurkan oleh agama Islam.²⁶³

Mohammad Natsir mengenai negara mengatakan: "Bahwa Indonesia merupakan Negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam adalah agama Negara." Baginya, secara *de facto* sudah pasti menunjukkan bahwa Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia. Bahkan, lebih dari itu, persoalan kenegaraan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama.²⁶⁴

Menurut A. Muchlis, M. Natsir beranggapan bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam,

yang di dalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, Fasis atau Komunisme.²⁶⁵ Jadi, ia berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang Muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, agar mendapat kejayaan dunia dan akhirat kelak.²⁶⁶ Namun demikian, untuk mencapai kejayaan tersebut, menurut M. Natsir, Allah telah memberikan aturan-aturan kepada manusia, yakni:

Aturan atau cara kita berlaku berhubungan dengan Tuhan yang menjadikan kita, dan cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya, aturan-aturan yang berhubungan dengan sesama manusia, yang kemudian di antara aturan-aturan yang berhubungan dengan muamalah sesama makhluk itu, diberikan garis-garis besarnya seseorang terhadap masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang, yang saat ini diistilahkan dengan Urusan Kenegaraan.²⁶⁷

Natsir juga pernah mengatakan bahwa negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk menyiarkan ajaran Islam. Penulis memahami sesungguhnya Natsir adalah seorang yang sangat memahami substansi ajaran Islam.

Soekarno juga mengatakan:

Bangsa Indonesia, *natie* Indonesia, bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan "*le desir d'être ensemble*" di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, Bugis, tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia Indonesia—manusia yang menurut geopolitik, yang telah ditentukan oleh Allah Swt, tinggal di kesatuannya semua pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70 juta ini sudah ada "*le desir d'être ensemble*", sudah terjadi "*character gemeinschaft*" *natie* Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlahnya adalah 70 juta, tetapi 70 juta yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!.²⁶⁸ Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu *nationale staat*, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin, tidak ada satu golongan di antara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita semua harus menuju.²⁶⁹

INDONESIA BUKAN KERAJAAN

Dalam Sidang BPUPKI yang membahas tentang bentuk negara, Kahar Moezakkir mengusulkan agar segenap anggota BPUPKI berdoa sebelum memutuskan tentang bentuk Negara Indonesia. Usulan ini disetujui, kemudian Ki Bagoes Hadikoesoemo memimpin doa dengan membacakan al-Fatihah:

Saya mohon dari Tuan-tuan sekalian! Oleh karena yang kita hadapi sekarang adalah saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita tidak dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka Tuan-tuan sekalian, sukalah Tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Swt untuk meminta doa.²⁷⁰

Setelah itu, diputuskan bahwa Negara Indonesia tidak berbentuk kerajaan, akan tetapi berbentuk republik. Kahar Moezakkir mengimbau kepada segenap anggota BPUPKI agar berdoa sebelum mengambil keputusan-keputusan penting dalam sidang-sidang BPUPKI.

SOEKARNO MENGENAI HARAPAN UNTUK PARA INTELEKTUAL MUSLIM

Dalam Sidang BPUPKI tersebut, Soekarno juga mengatakan:

Paduka Tuan Ketua yang mulia! Sebenarnya, apa yang akan saya katakan di sini sebagai jawab atas anjuran anggota yang terhormat Kiai Masjkoer, sudah diucapkan beberapa kali oleh anggota yang terhormat Soepomo, dan saya sendiri. Saya mengerti, apa yang dikatakan oleh Kiai Masjkoer tadi. Memang, jikalau negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan yang menjadi kepala negara atau presiden itu misalnya orang yang tidak kenal kepada agama Islam, sudah barang tentu apa yang tertulis di dalam Ayat 1 daripada Pasal 28 itu tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Tetapi, seperti yang telah dikatakan beberapa kali oleh Prof. Soepomo, kami anggota-anggota Panitia berkepercayaan penuh kepada kebijaksanaan

rakyat Indonesia. Kami berkepercayaan bahwa yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang bisa menjalankan Ayat 1 dalam Pasal 28. Kalau Tuan Haji Masjkoer menanyakan hal itu kepada diri saya sebagai person Soekarno, saya seyakini-yakinnya bahwa Presiden Indonesia tentu orang Islam.

Tak lain dan tidak bukan ialah oleh karena saya melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam, bahkan dalam pidato saya dalam sidang yang pertama, saya telah menganjurkan sebagai orang Islam, menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, supaya bekerja keras untuk memropagandakan agama Islam sehebat-hebatnya dalam kalangan rakyat Indonesia.

Sehingga, jikalau betul sebagian besar daripada rakyat Indonesia itu jiwanya berkobar dengan api Islam, rohnya menyala-nyala dengan ruh Islam, tidak boleh tidak, bukan saja Presiden Indonesia nanti orang Islam, bahkan— saya berkata—tiap-tiap undang-undang yang keluar daripada Badan Perwakilan Rakyat adalah bercorak Islam pula.

Marilah kita menerima apa yang beberapa hari lalu saya namakan *fairplay* ini. Mari kita bekerja keras; saya sebagai seorang Islam, saya pun senang jikalau Islam itu berkembang dengan sehebat-hebatnya. Saya kira, jikalau Kiai Haji Masjkoer sudah merenungkan hal ini di dalam arti seperti yang saya terangkan seperti saat sekarang ini, tidak akan timbul sedikit pun syak- wasangka di dalam hati anggota yang terhormat Kiai Masjkoer itu.

Maka, oleh karena itu, saya menguatkan pendirian panitia perancang, bahwa inilah yang sebijaksana-bijaksananya, yang memperdamaikan kita dengan kita, yang menghindari tiap-tiap perselisihan antara dua pihak yang bertentangan. Kita telah membikin *gentlement-agreement*. Rancangan Undang-Undang Dasar ini adalah suatu penghormatan kepada *gentlement-agreement* itu.²⁷¹

MENGHIDUPKAN KEMBALI SEMANGAT MUSYAWARAH

Mohammad Noor Syam menjelaskan dalam makalahnya tentang kondisi wajah sosial-politik Indonesia, berwujud:

1. Degradasi wawasan nasional dan harga diri sebagai manusia (bermoral: Pancasila dan agama), sehingga cenderung tidak berdisiplin, tidak memiliki etos kerja (berkat cuti bersama); konflik horizontal, tidak rukun dalam organisasi (konflik internal).

2. Praktik demokrasi liberal menjadi budaya oligarki, *Pluto-cracy*²⁷² ...bahkan anarki. Sehingga budaya dan moral politik nasional mengalami degradasi... yang dapat bermuara sebagai disintegrasi nasional.
3. Kepemimpinan yang mewakili kelembagaan negara bahkan juga mengalami kontroversial, baik sebagai akibat kontroversial-normatif-institusional, maupun kontroversial kebijaksanaan Pemerintah (baca: Perpres RI No. 76 dan 77 tahun 2007 tentang: PMDN dan PMA yang Tertutup dan Terbuka). Dapat dikaji lebih mendalam... dan diantisipasi dampaknya bagi bangsa (generasi muda dididik sesuai dengan nilai penanam modal; dan dapat kehilangan nilai dasar bangsa serta jatidiri bangsa!
4. Berkembangnya budaya praktik pejabat yang tidak taat asas, sehingga “budaya korupsi” makin berkembang.
5. Kebebasan dan keterbukaan menjadi budaya untuk memecahkan masalah dengan cara demokrasi liberal; bukan mengembangkan musyawarah dan mufakat atau kelembagaan negara sesuai amanat Pembukaan UUD 45.²⁷³

Jika kita kembali kepada sejarah Republik ini, sesungguhnya 63 (enam puluh tiga) tahun silam, tepatnya pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin (42 tahun) mendapat kehormatan untuk berpidato di depan 68 anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tim penyunting buku *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI, PPKI* mencatat di antara 68 orang anggota BPUPKI hanya empat anggota yang mendapat kesempatan berpidato selama satu jam lebih, yaitu Ir. Soekarno (44 tahun), Drs. Mohammad Hatta (43 tahun), Prof. Mr. Muhammad Yamin dan Prof. Mr. Soepomo (42 tahun) (*Risalah BPUPKI, PPKI: 1997:xxviii*).

Jatuhnya pilihan kepada empat pemuda tersebut tentunya sebuah pilihan sadar berdasarkan modal sosial-intelektual mereka. Yamin (sejarawan, budayawan dan ahli hukum),

Soekarno (ahli strategi, taktik dan ideologi), Hatta (ahli filsafat sosial-ekonomi) dan Soepomo (ahli tata negara). Cukup disesali hingga hari ini naskah pidato Hatta tentang Bidang Ekonomi selama satu jam pada 30 Mei 1945, seperti yang diberitakan oleh surat kabar *Asia Raya*, 31 Mei 1945, tidak atau belum dapat ditemukan.

Dengan tanpa menghilangkan rasa penghargaan terhadap 64 anggota BPUPKI lainnya, pidato-pidato keempat orang tersebut sarat mengandung hal-hal fundamental dalam pendirian sebuah rumah bernama Indonesia dengan luas dari Sabang–Merauke. Apalagi pidato tersebut disampaikan dalam sebuah forum yang sangat dinanti-nantikan selama 350 tahun. Almarhum Deliar Noer, penulis buku *Biografi Politik M. Hatta*, mengatakan: “Untuk pertama kali dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia, dasar-dasar negara dikaji, badan perlengkapan yang diperlukan dibahas, hubungan antara kepala negara, kabinet, dan parlemen ditelaah.”

Dalam kesempatan itu, M. Yamin mendapat kesempatan pertama untuk berpidato dalam sidang yang kerap dibahasakan oleh Soekarno *laksana* sidang *keramat* (suci). Dalam pidato panjangnya, penulis buku *Gajah Mada* ini menjelaskan bahwa sejak zaman purbakala masyarakat Nusantara sudah mem-bentuk suatu susunan desa, susunan masyarakat, susunan hak tanah yang bersandar atas dasar keputusan bersama (permusyawatan). Hal ini, menurut Yamin, dapat disebut “kebulatan-kebulatan bersama atas masyarakat”.

Dasar kebulatan tersebut sama tuanya dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain. Dasar mufakat itulah yang menghilangkan dasar perseorangan yang menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dalam tata negara desa yang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun-temurun.

Menurut Yamin, dasar mufakat tidaklah runtuh atau rusak binasa oleh pengaruh agama Buddha atau agama Hindu, sampai

pada abad ke-16, waktu Kerajaan Majapahit runtuh. Dasar mufakat sangat kuat tenaganya, sehingga umurnya lebih panjang daripada agama Buddha dan Hindu di tanah Indonesia.

Muhammad Yamin menjelaskan tiga hal, kenapa harus musyawarah? *Pertama*, karena dengan dasar musyawarah manusia memperhalus perjuangan dan bekerja di atas jalan Ketuhanan dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan sesama manusia. *Kedua*, oleh permusyawaratan, maka negara tidak akan dipikul oleh seorang manusia atau pikiran yang hanya berputar-putar dalam otak sebuah kepala, melainkan dipangku oleh segala golongan. Sehingga, negara tidak berpusing di sekeliling seorang insan, melainkan sama-sama membentuk sebuah negara sebagai suatu batang tubuh, yang satu sel mengerjakan kewajiban atas permufakatan yang menimbulkan perlainan atau perbedaan kerja, tetapi untuk kesempurnaan seluruh badan. *Ketiga*, permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan kekhilafan pendirian atau kelakuan orang-seorang. Permusyawaratan membawa negara kepada tindakan yang benar dan menghilangkan segala macam kesesatan.

Pidato panjang M. Yamin tersebut tentu harus diresapi dalam-dalam. Penulis berusaha tetap melihatnya secara obyektif, dan tanpa memandang kebesaran beliau sebagai perumus Sumpah Pemuda 1928 maupun riwayat luhur perjuangannya. Artinya, penulis tidak terjebak serta-merta mengamini pemikiran tersebut hanya karena Yamin *is the founding fathers of Indonesia*. Akan tetapi, pemikiran tersebut harus dilihat sebagai sebuah gagasan dari seorang anak bangsa bernama Yamin.

Namun, gagasan M. Yamin tentang pentingnya musyawarah sebagai landasan berbangsa dan bernegara disadari atau tidak semakin relevan untuk kembali dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sebuah kondisi ketika masyarakat di bawah arahan kaum intelektual memaknai demokrasi secara

liar, sehingga siapa pun yang tidak bicara demokrasi dianggap tidak reformis. Musyawarah cenderung dianggap kuno, sedangkan pemilihan diidentikan dengan kemodernan, walau pun sebenarnya pemilihan umum juga tidak identik dengan demokrasi.

Dampaknya, tidak jarang terjadi keributan di antara sesama tetangga hanya karena pemilihan kepala desa, lurah, camat, bupati. Tidak dapat dibayangkan, jika suatu saat dengan dalih demokrasi untuk pemilihan ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) sekalipun harus dilakukan dengan jalan voting alias menggunakan kotak suara. Bukan suatu hal yang mustahil jika seorang ayah/bapak tidak serta-merta dianggap sebagai kepala/ketua keluarga oleh anak-anak dan istrinya, namun harus melalui mekanisme pemilihan keluarga dengan alasan demokrasi. Kemudian, di mana kerukunan dan kekeluargaan? Akankah musyawarah kita museumkan?

Jika benar analisis Yamin bahwa musyawarah sudah ada sebelum kedatangan agama-agama resmi hari ini, tidak berlebihan sekiranya hal ini dijadikan sebuah pandangan kebangsaan yang bersumber dari kebudayaan asli Indonesia yang harus kembali dilestarikan dan dijaga. Namun demikian, Yamin tetap melihat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan ber-Tuhan, sehingga musyawarah juga harus dipadukan dengan karakter tersebut.

Maka, perpaduan dasar tata negara itu dengan sangat istimewa memberi corak terhadap rasa ketatanegaraan Indonesia, karena di dalamnya tersimpan Ketuhanan dan kesaktian adat pusaka yang memberi *cap* kepada jiwa rakyat Indonesia. Musyawarah keluarga, musyawarah RT, RW bahkan pada tingkatan yang paling tinggi haruslah kembali menjadi tradisi nasional. Sistem kepartaian dan politik juga harus senantiasa dikoreksi dengan mendalami sepenuhnya sila pertama dan keempat Pancasila.

Selanjutnya, penerapan musyawarah dapat dilihat sebagai

sebuah solusi di tengah kian menularnya virus individualisme di era transisi seperti hari ini. Penulis sendiri lebih gemar menyebutnya dengan era mencari bentuk (EMB). *Pertama*, bentuk yang diimpor dari luar dengan segala isi dan pernak-pernik liberalnya. *Kedua*, bentuk yang pernah ada di Nusantara dengan segala kelangkaan semangat untuk menggantinya. Sedangkan bentuk ketiga merupakan tugas kita bersama untuk merumuskannya, khususnya generasi muda.

HATTA, PIAGAM JAKARTA, NKRI FINAL

Pada 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56, sekitar jam 10-an, upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilangsungkan. Acara diawali dengan pembacaan Pembukaan UUD²⁷⁴ oleh Dr. Moewardi,²⁷⁵ kemudian Ketua Panitia Suwirjo menyampaikan sambutan, baru setelah itu Ir. Soekarno didampingi Mohammad Hatta membaca teks Proklamasi yang diawali dengan pidato singkat, kemudian kata-kata penutup setelah membaca teks proklamasi.²⁷⁶ Berikut teks proklamasi:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas Nama Bangsa Indonesia²⁷⁷
Soekarno-Hatta²⁷⁸

Sore harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Hatta mendapat informasi dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang²⁷⁹ bahwa pencatuman kata “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” menyebabkan mereka yang beragama Kristen dan Protestan di daerah Kaigun di Indonesia

Timur mengalami diskriminasi dalam Negara Indonesia yang baru terbentuk, jika tujuh kata itu tetap tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Sebab, menurut perwira tersebut, kalangan Kristen lebih suka berdiri di luar wilayah Republik Indonesia seandainya kata-kata tersebut tetap dipertahankan.²⁸⁰ Hatta merespons informasi tersebut. Kalau benar demikian, ia melihat usahanya dan kaum pergerakan lainnya untuk mempersatukan Indonesia sejak tahun 1920-an akan porak-poranda kembali, meskipun ia menyadari bahwa A.A. Maramis yang berasal dari Manado dan beragama Kristen telah menyetujui rumusan tersebut.²⁸¹

Pada 18 Agustus 1945, pada pagi harinya, Hatta memanggil anggota PPKI yang dapat dianggap wakil dari umat Islam untuk membicarakan masalah ini kembali. Mereka yang hadir adalah: Ki Bagoes Hadikoesumo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo (PETA), Teuku Muhammad Hassan (Sumatera), dan Wahid Hasyim,²⁸² tetapi sumber lain mengatakan bahwa Wahid Hasyim tidak hadir dalam pertemuan itu.²⁸³

Namun, Hatta sangat yakin bahwa Wahid Hasyim hadir dalam pertemuan itu, karena ia teringat dengan komentarnya Wahid Hasyim tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menurutnya berarti tauhid dan tauhid adalah Islam. Seandainya sumber itu benar, maka komentar Wahid Hasyim ini bisa terjadi hanya saja setelah ia kembali dari Jakarta.²⁸⁴ Pertemuan dilangsungkan dan melahirkan keputusan bahwa kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” akhirnya disepakati untuk dihapuskan dan yang tersisa adalah empat kata di awal: “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti tauhid.²⁸⁵ Dan jika diamati secara saksama, Ketuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya merupakan konsep tauhidnya Islam.²⁸⁶ Tauhid juga yang membedakan antara Islam dengan ajaran maupun agama lainnya.²⁸⁷

Berikut beberapa alasan pihak Islam menerima alasan perubahan isi tersebut:

Pertama, dihilangkannya kalimat, (1) dengan (2) kewajiban (3) menjalankan (4) syariat (5) Islam (6) bagi (7) pemeluk-pemeluknya, menurut Wahid Hasyim: “Pergantian ini akan memuaskan kalangan Islam, karena hanya Islam yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁸⁸ Secara umum, pandangan para wakil Islam tentang hal ini adalah sama, hanya Islam di antara agama-agama di dunia yang menegakkan tauhid dalam arti yang sebenar-benarnya. Agama lain seperti Kristen memang termasuk agama monoteisme, tetapi ajaran trinitas telah mengaburkan sifat monoteisme itu. Para wakil umat Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak membayangkan ketika itu bahwa semua orang Indonesia termasuk Kristen, Hindu, Buddha, malah Komunis, pada suatu masa kemudian mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, sekurang-kurangnya secara resmi.²⁸⁹ Pernyataan Wahid Hasyim ini tentu tidak salah, akan tetapi pengertian tentang Pancasila juga tidak tunggal sebagaimana dikatakan oleh Lafran Pane di atas, artinya agama apa pun juga boleh memberi tafsiran mengenai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai Pancasila, Mohammad Natsir membandingkan dengan tiap sila dari Pancasila itu dengan ajaran al-Quran, Natsir bertanya secara retorika bagaimana mungkin al-Quran:

1. ...yang memancarkan tauhid, dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. ...yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan *Ijtimayyah* bisa apriori bertentangan dengan keadilan sosial?
3. ...yang justru memberantas sistem feodal dan pemerintah *istibdad* [diktator] sewenang-wenang serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, dapat apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan dengan kedaulatan rakyat?
4. ...yang menegakkan *islahu baina al-nas* [damai antara manusia]... dapat apriori bertentangan dengan apa yang

disebut perikemanusiaan.

5. ...yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan?

KETUHANAN YANG MAHA ESA MENURUT AGAMA LAIN

Pendeta Oktavianus misalnya mengenai Pancasila menuliskan butir demi butir dari kelima sila Pancasila, dalam penjelasannya, jelas tidak bertentangan dengan Alkitab, dalam pelaksanaannya secara keseluruhan dapat mendukung pengembangan kegiatan setiap agama yang ada di Indonesia.²⁹⁰ Misalnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini dapat memberikan suatu kebebasan ruang gerak bagi kemerdekaan beragama, setiap orang harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Penjelasan Alkitab: Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Mahakuasa, sebagaimana jelas dalam tindakannya menciptakan langit dan bumi (Kejadian 1:1–27). Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Mahakasih (1 Yohanes 4:8), Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Penolong, Tuhan Khalik Langit dan Bumi beserta segala isinya (Mazmur. 121:1–2). Dengan demikian, menurut orang Kristen, sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Alkitab, bahkan dalam pelaksanaannya secara konsekuen/mendukung apa yang terdapat dalam Alkitab.²⁹¹ Penjelasan di atas semakin dipertegas oleh T.B. Simatupang. Menurutnya, Pancasila adalah lebih dari sekadar payung, Pancasila mempunyai daya tarik emosionalnya tersendiri. Pancasila sebuah ideologi dan sebuah pandangan hidup.²⁹²

I Made Titib²⁹³ menjelaskan, dalam pandangan Hindu, ada istilah Yoga yang artinya adalah penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan Yoga membawa menuju penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun titik awalnya, akhir yang dicapai adalah sama, berikut 5 jalan menuju

Ketuhanan Yang Maha Esa: 1) *Karmayogamarga* (kewajiban demi kewajiban), 2) *Bhaktiyogamarga* (mengasihi demi untuk kasih sayang itu sendiri), 3) *Jnanayogyamarga* (jalan pemahaman spiritual), 4) *Rajayogamarga* (jalan psikologis), 5) *Vibhutiogamarga* (jalan penghayatan terhadap keagungan-Nya).²⁹⁴

Masih mengenai Pancasila, seorang pemimpin Muslim moderat, Sjafruddin Prawiranegara,²⁹⁵ menerima Pancasila sebagai landasan bernegara dengan alasan konstitusi. Namun, Sjafruddin menolak Pancasila sebagai satu-satunya dasar/prinsip dari organisasi sosial dan politik. Dalam surat pribadinya kepada Presiden Soeharto tanggal 7 Juli 1983, dia pada intinya menyatakan bahwa meskipun Pancasila dimaksudkan untuk menjadi Dasar Negara dan landasan UUD 1945, tetapi Pancasila tidaklah digagas untuk menjadi dasar organisasi-organisasi politik, sosial atau lainnya.

Sjafruddin mendasarkan argumennya itu pada kata-kata Soekarno dalam pidato kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 bahwa: “Negara Indonesia yang kita dirikan ini adalah negara gotong-royong.” Gagasan “gotong-royong” ini, menurut Sjafruddin, secara implisit bahwa setiap orang yang ikut bergotong-royong mempertahankan identitas dan keperibadian sendiri. Bagi yang Muslim tetap Muslim, yang Hindu tetap Hindu, yang Kristen tetap Kristen, yang Katolik tetap Katolik, yang Buddha tetap Buddha, dan sebagainya. Sjafruddin menutup suratnya mengenai asas tunggal sebagai berikut:

Namun, jika yang Kristen tak lagi diperbolehkan untuk membentuk organisasi-organisasi atas dasar prinsip-prinsip Kristen, ...dan jika yang Muslim tak bisa mendirikan organisasi-organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dan hal yang sama terjadi pada warga negara yang lain yang menganut agama-agama atau ideologi-ideologi yang lain dan dilarang mendirikan organisasi-organisasi yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan atau ideologi-ideologi mereka masing-masing, tetapi hanya diperbolehkan mendirikan organisasi-organisasi yang didasarkan pada Pancasila, maka Indonesia negeri yang subur dan makmur ini, dengan banyak gunung dan

lembahnya, pastilah menjadi padang pasir sahara yang tandus, yang hanya terdiri dari batu-batu dan pasir-pasir yang zatnya sama.²⁹⁶

Kedua, meningkatnya suhu politik saat itu, sehubungan dengan kemerdekaan yang baru diproklamirkan, rakyat umumnya penuh harapan bahwa kemerdekaan akan membawa kedamaian, ketenangan, ketertiban, dan kemakmuran. Tetapi, mereka juga sadar akan situasi abnormal yang dihadapi sebagai akibat perang serta proklamasi, yang sebenarnya merupakan suatu perebutan kekuasaan dari pihak Jepang maupun Sekutu.²⁹⁷ Oleh sebab itu, segenap Nasionalis Indonesia, termasuk kalangan Islam, tidak dapat membayangkan dengan tepat apa sebenarnya yang ingin mereka hadapi. Mereka yakin bahwa Belanda ingin dan akan berusaha kembali menjajah Indonesia. Mereka tentu akan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai, dengan kesediaan menerima segala akibat-nya. Merdeka bersedia mati, dan memang ucapan yang tenar saat itu adalah *Merdeka atau Mati*. Suasana serba panas, dan para pemimpin Islam tidak mau menambah ketidaktentuan.

Ketiga, para wakil Islam, khususnya Ki Bagoes Hadikusumo, yakin bahwa enam bulan lagi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan diadakan sebuah sesi khusus untuk membahas Piagam Jakarta, atau pemilihan umum untuk menegakkan suatu pemerintahan yang sah dalam arti mewakili rakyat. Optimisme semua kalangan saat itu sangat tinggi, semua kalangan membayangkan bahwa ketenangan, kedamaian, ketertiban, dan gangguan terhadap kemerdekaan akan segera dihapus. Dengan pemilihan umum, suatu konstitusi baru akan disusun, seperti yang ditetapkan oleh UUD 1945.²⁹⁸

Pihak Islam sangat yakin bahwa pada pemilu yang akan datang mereka akan keluar sebagai pemenang. Optimisme ini pula yang menyebabkan Kasman Singodimedjo berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo saat pulang ke Yogyakarta setelah Sidang PPKI di Jakarta, di

hadapan Sidang Majelis Tanwir Muhammadiyah mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap kalangan Nasionalis dan mengimbau kepada umat Islam bahwa perjuangan belum selesai dan umat Islam masih perlu bersiap-siap menghadapi masa berikutnya.²⁹⁹

Pada hari yang sama, 18 Agustus 1945, sementara Hatta bertemu dengan wakil umat Islam, Soekarno bertemu dengan wakil pemuda. Sehingga rapat PPKI yang telah dijadwalkan dimulai pada pukul 09.30 diundur hingga pukul 11.30. Hal ini disebabkan karena Soekarno terlibat perdebatan dengan tokoh-tokoh pemuda mengenai susunan keanggotaan PPKI.³⁰⁰ Soekarno menambahkan enam orang anggota baru pada Panitia Persiapan Kemerdekaan yang berjumlah 21 orang itu “atas tanggungannya sendiri”.³⁰¹ Enam orang itu adalah: Wiranatakusuma, Ki Hajar Dewantoro, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajoeti Melik, Iwa Koesoma Soemantri, dan Mr. Ahmad Subardjo.

Setelah selesai pertemuan antara Hatta dengan empat wakil dari pemimpin Islam dan Soekarno juga telah menyelesaikan perdebatannya, maka PPKI memulai sidang yang memutuskan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. PPKI juga menyetujui draf UUD yang sebelumnya yang disusun sebelum BPUPKI dan “tujuh kata” Piagam Jakarta—yang acapkali disebut Soekarno sebagai kompromi optimal dan yang telah memunculkan kontroversi terpanas dalam sesi terakhir persidangan BPUPKI, tujuh kata tersebut dicoret.³⁰²

Sehingga, dalam sejarah, Hatta dikenal sebagai orang yang memrakarsai perubahan rumusan tujuh kata yang kontroversial tersebut, dan ini diterima dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sehingga memunculkan pertanyaan, apa sebabnya Hatta melakukan hal tersebut? Mengapa ia begitu terpengaruh oleh informasi yang diterima dari seorang perwira Jepang, tanpa selidik terlebih dahulu.³⁰³

Deliar Noer menduga, sebelum memanggil keempat orang

wakil umat Islam pada pagi hari 18 Agustus 1945, Hatta sendiri telah mengambil pendirian bahwa ketujuh kata-kata itu harus hilang atau diganti, sehingga saat Hatta membicarakan masalah tersebut dengan keempat tokoh Islam tersebut, Hatta pada hakikatnya sudah tidak netral lagi. Hatta memang mengusulkan pada mereka agar ketujuh kata tersebut dihapuskan.³⁰⁴ Hatta melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan.³⁰⁵

Pertama, Hatta tidak menginginkan Indonesia pecah kembali. *Kedua*, Indonesia yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya satu hari yang lalu harus dipertahankan dengan segala kekuatan yang ada. Oleh sebab itu, segala perhatian hendaklah ditujukan kepada hal ini, sehingga hal yang memungkinkan untuk memunculkan pertikaian perlu dilenyapkan. Rumusan tujuh kata tersebut dalam pandangan Hatta termasuk dalam kategori ini.

Ketiga, Hatta sejak semula memang menganut konsep pemisahan agama dan negara. Ia melihat, di India pertikaian seringkali dipicu oleh faktor agama. Golongan Hindu yang merupakan mayoritas sering memandang rendah kelompok agama lain, bahkan piring-piring yang dipergunakan oleh seorang Muslim di restoran Hindu harus dibayar, karena piring serta gelas tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi.³⁰⁶ Sedangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya ber-agama Islam hal-hal tersebut tidak pernah dijumpai. Di Maluku umpamanya, dikenal dengan adat *pela*,³⁰⁷ yang mewajibkan penganut Islam dan Kristen saling membantu dalam membangun masjid dan gereja. Kemungkinan pertikaian bukan tidak ada, akan tetapi hal ini sangat kecil sekali. Pertikaian umumnya dimulai dengan persoalan sopan santun, bukan karena prinsip agama-agama yang bersangkutan seperti di - jumpai di zaman Hindia Belanda, kalangan Islam sebagai mayoritas tidak pernah memulai.³⁰⁸

Hatta melihat, sifat umat Islam Indonesia yang sangat toleran ini, sebab itu dia merasa kurang perlu untuk menekan-

kan pada tingkat Undang-Undang Dasar hal-hal yang Islami sebagaimana tujuh kata dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, dengan hal tersebut tidak berarti ajaran Islam tidak perlu disebarkan. Tanggung jawab penyebaran ajaran Islam adalah tugas masyarakat dan bukan tanggung jawab negara. Deliar Noer melihat pandangan Hatta tersebut pada akhirnya akan berubah lagi.³⁰⁹

Pada saat itu, Hatta memang tidak menginginkan agar rancangan UUD ditambah dengan hal-hal yang detail, ia membandingkan dengan beberapa UUD negeri lain yang juga pendek. Hatta berpendapat bahwa “dengan pokok yang termuat dalam UUD ini kita sudah bisa bekerja.” Namun, Hatta juga menegaskan bahwa UUD di kemudian hari tetap bisa diubah dan ditambah. Dengan pendapat Hatta ini, jalannya sidang yang sangat bersejarah ini berjalan dengan lancar. Pada hari itu juga, resmiah Indonesia mempunyai UUD 1945 dan hari itu juga Soekarno dan Hatta terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang dikenal dengan istilah dwitunggal.³¹⁰

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Nasir menduga ada ketakutan bagi sebagian kalangan, jika Partai Islam menang dalam pemilu, Pancasila akan diganti. Ia mengingatkan:

Mengenai kekhawatiran bahwa kalau orang Islam menang dalam pemilihan umum, Pancasila akan hilang, dikatakannya bahwa semuanya itu sangat ganjil (aneh). Negara Islam yang diperjuangkan Masyumi bukan untuk orang Islam saja, tetapi kemakmuran untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk binatang sekalipun. Didasarkannya Negara Republik Indonesia saat ini dengan Pancasila sebenarnya adalah pengambilan dari beribu-ribu sila yang terdapat dalam Islam. Dan kalau terbentuk Negara Islam, Pancasila akan dapat dipelihara dan akan dapat dipupuk bersama sila-sila yang lain. Sementara itu, dikhawatirkannya Pancasila itu akan layu apabila diserahkan kepada PKI yang jelas kalau PKI menang dalam pemilihan umum dan PKI berkuasa, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa akan dipotongnya, sehingga layulah Pancasila yang diharapkan.³¹¹

Menurut Natsir, ketidakpahaman terhadap Negara Islam, negara yang menyatukan agama dan politik, pada dasarnya bersumber dari kekeliruan memahami gambaran pemerintahan Islam. Natsir menegaskan:

Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negara harus bersatu, terbayang sudah di mata, seorang bahlul (*bloody fool*) duduk di atas singgasana, dikelilingi oleh “haremnya” menonton tari “dayang-dayang”. Terbayang olehnya yang duduk mengepalai “kementerian kerajaan”, beberapa orang tua bangka memegang hoga. Sebab memang beginilah gambaran ‘pemerintahan Islam’ yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa Barat selama ini. Sebab umumnya (kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa: Khalifah = Harem; Islam = poligami.³¹²

Natsir mengingatkan, bila ingin memahami agama dan negara dalam Islam secara jernih, hendaknya kita mampu menghapuskan gambaran keliru tentang Negara Islam di atas. Secara implisit, Natsir menilai bahwa gambaran “Negara Islam” seperti inilah yang terdapat dalam pandangan Soekarno maupun Kemal. Turki pada masa pemerintahan para sultan dan kekhalifahan Usmaniyah terakhir bukanlah negara atau pemerintahan Islam, sebab para pemimpinnya menindas dan membiarkan rakyatnya bodoh dengan memakai Islam dan segala bentuk ibadah-ibadahnya sebagai tameng belaka. Jadi, Islam memang tidak pernah bersatu dengan negara sebagaimana diduga Soekarno maupun Kemal. Dengan logika seperti ini, Natsir menilai bahwa sikap mendukung Soekarno terhadap gagasan pemisahan agama dari negara tidak tepat. Kata Natsir lebih lanjut:

Maka sekarang, kalau ada pemerintahan yang zalim yang bobrok seperti yang ada di Turki di zaman Bani Usman itu, bukanlah yang demikian itu yang kita jadikan contoh bila kita berkata, bahwa agama dan negara haruslah bersatu. Pemerintahan yang semacam itu tidaklah akan dapat diperbaiki dengan “memisahkan agama” daripadanya seperti dikatakan Ir. Soekarno, sebab memang agama sudah lama terpisah dari negara yang semacam itu.³¹³

Sedangkan terhadap penguasa negara terpilih, Natsir menjelaskan bahwa umat mempunyai kewajiban mengikutinya selama ia benar dalam menjalankan kekuasaannya. Bila menyimpang, umat berhak melakukan koreksi atau meng-ingkari penguasa negara. Dalam masalah ini, Islam menekankan kewajiban musyawarah tentang hak dan kewajiban antara penguasa dan yang dikuasai.

Prinsip musyawarah dalam Islam, menurut Natsir, tampaknya tidak selalu identik dengan asas demokrasi. Hal ini terlihat saat Natsir menanggapi pernyataan Soekarno yang menghendaki agar demokrasi dijadikan alternatif bila timbul persoalan tentang berpisahannya agama dan negara. Natsir mengemukakan bahwa Islam anti-*istibdad* (despotisme), anti-absolutisme dan kesewenang-wenangan. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa dalam pemerintahan Islam itu semua urusan diserahkan kepada keputusan musyawarah Majelis Syura. Dalam parlemen Negara Islam, yang hanya boleh dimusyawarahkan adalah tata cara pelaksanaan hukum Islam (syariat Islam), tetapi bukan dasar pemerintahannya.³¹⁴

Natsir mengakui demokrasi itu baik, tetapi sistem Kenegaraan Islam tidaklah mengandalkan semua urusannya kepada instrumen demokrasi, sebab demokrasi tidak kosong dari berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya. Ia menyatakan bahwa perjalanan demokrasi dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi, demokrasi juga melekat pada dirinya pelbagai sifat-sifat berbahaya. Dengan tegas pula, Natsir mengemukakan bahwa Islam adalah suatu faham yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tak usah demokrasi 100 persen, bukan pula otokrasi 100 persen, Islam itu... ya Islam.³¹⁵

Berbeda dengan Soekarno yang menganggap Turki demokratis pada masa pemerintahan Kemal, Natsir justru berpendapat Turki masa Kemal sebagai diktator. Pada masa pemerintahan Kemal, kata Natsir, tidak ada kemerdekaan pers,

kemerdekaan berpikir, dan kebebasan membentuk partai oposisi.

Juga, Islam hanya ditoleransi untuk berkembang sejauh menyangkut aspek-aspek tertentu saja, *Islam Im Schutzschahft*.

Tidak ada kemerdekaan bagi Islam di tanah Turki merdeka.³¹⁶

Pada Sidang Konstituante 1957, Natsir memperkenalkan konsep demokrasi yang ia maksudkan, *Theistic Democracy*, yaitu demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan.³¹⁷

Maksudnya, keputusan mayoritas yang berpedoman kepada nilai-nilai Ketuhanan, yang kemudian ia anggap sebagai *ijma'* yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu. Oleh sebab itu, berangkat dari pandangan-pandangan Natsir di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa hubungan Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, dan secara tersurat ia mendukung Islam dijadikan ideologi negara. kesimpulan tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa:

Fungsi agama dalam negara sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan sama sekali, lebih lanjut ia mendefinisikan persatuan agama dan negara. Bagi kita kaum Muslimin, negara bukanlah suatu badan tersendiri yang menjadi tujuan, melainkan sebuah alat. Persatuan tersebut bukanlah dimaksudkan bahwa agama itu cukup dimasuk-masukkan saja di sana-sini kepada negara, bukan begitu!

Dan urusan kenegaraan pada dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisahkan, satu *intergreerend deel* dari Islam. Yang menjadi tujuan adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sendiri (individu), ataupun sebagai masyarakat.³¹⁸

Dan pada intinya: *Pertama*, sistem ketatanegaraan dalam pandangan Natsir boleh meniru bentuk mana saja (Barat), asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, menurutnya, hubungan agama dan negara dalam politik Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab Islam tidak seperti agama yang lain. Islam baginya telah menyediakan perangkat dasar yang dapat diterapkan sesuai zamannya. *Ketiga*, berdasarkan fakta di atas, Natsir sebagai tokoh Muslim tampak ingin sekali menjadikan Islam sebagai Dasar Negara Indonesia.

Kemudian, Natsir juga mengimbau kepada kaum Muslimin agar dalam masalah persatuan atau pemisahan agama dan negara ini tidak menjadikan “sejarah sebagai ukuran” ke-benaran terakhir.³¹⁹

Natsir sendiri dalam perkembangannya justru memelopori sebuah mosi yang dikenal dengan “Mosi Integral Natsir”, yaitu pada 3 April 1950. Mohammad Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi di DPR mengajukan mosi integral kepada DPR, yang menuntut agar semua Negara Bagian itu bersatu dan melebur ke dalam Negara Kesatuan. Mosi ini disambut hangat anggota DPR saat itu, maka pada HUT RI ke-5 pada 17 Agustus 1950, RIS diganti oleh Republik Indonesia dengan konstitusi UUDS 1950.³²⁰ Inilah prestasi Natsir yang tidak boleh dilupakan oleh generasi hari ini. Singkatnya, komitmen Natsir terhadap NKRI sungguh terlalu naif jika masih diragukan kembali.

SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP DUNIA

Salah satu tujuan kemerdekaan adalah mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi di dunia. Hatta mengatakan: “Jika Indonesia merdeka, hubungan kita dengan negara lain tidak hanya sebatas tukar-menukar barang, melainkan juga tukar-menukar ilmu dan kebudayaan. Tukar-menukar ke-budayaan ini terutama akan kita lakukan dengan negara-negara tetangga Indonesia, khususnya dengan bangsa yang sedarah dengan kita seperti Filipina.” Hatta bahkan sangat yakin, dia mengatakan: **“Kita bangsa Indonesia pasti akan mampu memberikan sumbangan yang bagus terhadap kebudayaan dunia.”** Mengenai sikap terhadap Belanda, Hatta mengatakan: “Kita orang Indonesia, di dalam usaha untuk menyempurnakan kedudukan bangsa kita, tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Jika ada kekerasan terjadi, itu tak lain karena pihak Belandalah yang memerlukan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya atas kita.”³²¹

MODERNISASI

Mohammad Natsir sebagaimana dikutip Endang Saifuddin Anshori menjelaskan:

Ciri-ciri modernisasi yang esensi adalah adanya kemampuan dan keberanian seseorang untuk melepaskan diri dari cara berpikir dan bertindak tradisional. Seorang modernis berarti seorang yang berpikir tanpa apriori, tanpa *prejudice* (prasangka) dan tidak dogmatis dengan istilah apa pun juga. Karena itu, modernisasi itu berarti kita tidak mengambil neo-dogmatisme, setelah kita membuang dogma kuno... bahwa apa yang ada ini bisa diubah, tapi yang satu yang tak bisa diubah yaitu fitrah manusia, kepercayaan seseorang. Fitrah ini berasal dari Ilahi, karena itu tidak bisa diganggu oleh modernisasi. Hanya dengan menghargai fitrah manusia, identitas seseorang, modernisasi dapat dilaksanakan dengan *platform* yang sama-sama disetujui, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta rencana pembangunan yang ada.³²²

Sejarah memang harus sering-sering kita refleksikan dengan senantiasa sekuat tenaga berupaya memahami suasana alam, suasana batin yang terjadi pada aktor-aktor yang terdapat di dalamnya, sebagaimana kita juga ingin dipahami suasana hati kita oleh orang lain yang mengkritik kita. NKRI sudah dibentuk di atas landasan beragam ideologi dan ilmu pengetahuan. Secara pribadi, penulis berpendapat, landasannya sudah sangat kuat. Tugas kita adalah menjaganya dengan ilmu pengetahuan. Tegasnya, Indonesia tidak cukup hanya ditata kembali, tapi harus digerakkan untuk maju, tentunya dengan ilmu pengetahuan. Sebagai penutup, salah satu inti utama dari berbagai penjelasan di atas adalah terwujudnya kesadaran konstitusional intelektual Muslim Indonesia. Sehingga, setiap perjuangannya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, sebaliknya intelektual Muslim Indonesia harus berteriak jujur, lantang, berani jika terdapat peraturan, undang-undang dan segala hal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Catatan:

- ¹ *Innallaha Yub'atsu Lihazihil Ummati 'ala Ra'si Kulli Miati Sanah Man Yujaddidu laha Dinuha*. Dikutip dari buku Dr. Abd. Abdul Salam Arief, MA, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hlm. 3.
- ² Bintoro Cokroamijoyo adalah Wakil Ketua Umum PB HMI 1955–1957. Menurut M. Syafi'i Anwar, di antara alumni HMI yang masuk dalam posisi kedua lingkaran teknokrat itu adalah Deliar Noer, Bintoro Cokroamijoyo, Barli Halim, Madjid Ibrahim, Zainul Zasni, Omar Tusin, Bustanul Arifin Kana dan lain-lain. Sikap mereka terhadap Orde Baru jelas. Menurut Dawam Raharjo, mereka langsung masuk ke birokrasi, secara tegas mendukung modernisasi, tidak melalui diskusi ilmiah, tetapi langsung terjun pada kegiatan pembangunan. Lihat M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi...*, hlm. 25. Mengenai ungkapan di atas, lihat Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 99–100.
- ³ Muhammad Abdul Jabbar Beg, *The Muslim World League Journal*, edisi November-Desember, 1983, hlm. 38–42. Adaptasi dari makalah Hamid Fahmy Zarkasyi, “Membangun Peradaban Islam”, disampaikan dalam Workshop Pemikiran Ideologis Forum Ukhuwwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, 15 April 2007, hlm. 5.
- ⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, “Membangun Peradaban Islam”, hlm. 5.
- ⁵ Anies Baswedan, “Siapakah *Rulling Elite*” Indonesia, *Kompas*, 31 Oktober 2006.
- ⁶ Lafran Pane, “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia”, dalam *Pedoman Lengkap Kongres Muslimin Indonesia 20– 25 Desember 1949 di Yogyakarta*, Yogyakarta: Panitia Pusat KMI Bagian Penerangan, 1949, hlm. 56, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 3–4.
- ⁷ Di era reformasi saat ini, bahkan ada iklan yang kebetulan penulis saksikan, pesannya “*Bule aja makan, masa kita gak? Ayo beli*”. Hamid Fahmy Zarkasyi (putra ke-9 KH Imam Zarkasyi, Pendiri Pondok Modern Gontor) menjelaskan bahwa anggapan bahwa kebudayaan Barat lebih unggul dibanding peradaban Islam telah lama ada dalam benak sebagian umat Islam, dan akhir-akhir ini anggapan itu terasa semakin kuat sehingga mereka menganggap Islam perlu belajar dari Barat dalam segala hal, bahkan termasuk dalam memahami Islam. Sementara itu, terdapat pula kalangan umat Islam yang bersikap sebaliknya, yaitu menganggap kebudayaan Barat tidak sesuai dengan peradaban Islam dan segala sesuatu yang berasal dari Barat harus ditolak, padahal pada saat yang sama

mereka sedang menikmati hasil kepesatan teknologi Barat yang dimanfaatkan oleh hampir seluruh negara di dunia. Kedua anggapan di atas sama ekstremnya dan sudah dapat diduga bahwa keduanya tidak berangkat dari pemahaman yang akurat tentang peradaban Islam dan kebudayaan Barat. lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, “Problem Peradaban Islam dan Barat”, dalam www.student.eepis-its.edu. Akses 25 Desember 2008. 20.00 WIB.

- 8 Lafran Pane, “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam...”, hlm. 3–4.
- 9 A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970, hlm. 14.
- 10 Agussalim dalam majalah milik Jong Islamieten Bond bernama *Het Licht* (cahaya), terbit pada Maret 1925, dalam Yudi Latif, *Inteligenia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 308.
- 11 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 56.
- 12 Nurcholish Madjid, “20 Tahun HMI Berjuang”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 38.
- 13 Syafri Sairin, mantan Ketua HMI Cabang Yogyakarta, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Direktur Pusat Kebudayaan UGM.
- 14 Wawancara penulis dengan Syafri Syairin, Selasa 23 September 2008, jam 12.30–13.30 di Yogyakarta.
- 15 Ridwan Saidi, lahir di Jakarta, 2 Juli 1942, adalah mantan anggota DPR dan seorang budayawan Betawi. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1977–1987. Dia juga adalah mantan Ketua Umum PB HMI 1974–1976 dan Sekretaris Jenderal Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, 1973–1975.
- 16 Ridwan Saidi, “Akar Sejarah Cendekiawan Muslim”, harian *Suara Pempublikan*, Jakarta, Jumat, 24 Juni 1988.
- 17 Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMI”, *Jawa Pos*, 18 September 1990, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 503.
- 18 Ibid, hlm. 503
- 19 Ibid, hlm. 504
- 20 Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 608.
- 21 Mengenai hubungan Hatta dan Lafran Pane, lihat artikel penulis dengan

- judul “Hatta, Lafran Pane dan Independensi HMI”, majalah *Sinergia* Vol. XIV/No. 01/April-Mei 2008, hlm. 42–44.
- 22 Universitas Islam Indonesia, “Sejarah UII”, dalam www.uui.co.id, diakses tanggal 19 Januari 2009. Lihat juga Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 195.
- 23 Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 195.
- 24 Deliar Noer, “HMI Tidak Akan Lupa Panggilan Zaman serta Kehendak Masa”, disampaikan dalam pidato Dies Natalis HMI Ke-7 Pada 5 Februari 1954, lihat Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 79.
- 25 Abdurrahman Mas’ud, “Umat Islam dan Permasalahannya”, dalam www.mentaritimur.com, diakses 25 Desember 2008 .
- 26 Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 98.
- 27 Ibid, hlm. 98.
- 28 Ibid, hlm. 98.
- 29 Ibid, hlm. 99–100.
- 30 Ibid, hlm. 99–100.
- 31 Ibid, hlm. 99–100.
- 32 Nurcholish Madjid, “HMI; Dari Anak Umat ke Anak Bangsa”, hlm. 112.
- 33 Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMP”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm.
- 34 Ibid.
- 35 Nurcholish Madjid, “20 Tahun HMI Berjuang”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm.
- 36 Ibid.
- 37 Ibid.
- 38 Karel A. Steenbrink menjelaskan bahwa intelektual (Muslim) pada dasarnya adalah orang-orang Islam yang memiliki latar belakang pendidikan model “sekolah”, sedangkan “ulama” adalah mereka yang mempunyai basis pendidikan “pesantren”. Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama dan Kepemimpinan al-Quran di Indonesia”, dalam Abdurrahman (dkk.), *70 Tahun H. A. Mukti Ali...*, hlm. 433.
- 39 Lukman Hakiem, “Lafran Pane Pahlawan Nasional, Mengapa Tidak?”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 165.
- 40 HMI didirikan pada 5 Februari 1947. Sembilan bulan kemudian, pada 9 November 1947, di Yogyakarta, HMI mengadakan Kongres I (Pertama). Ditinjau dari sudut pandang organisasi, waktu 9 bulan sungguh tidak

- lazim dalam sebuah kepengurusan. Namun, hal itu harus dilakukan karena Lafran melihat adanya kecenderungan mahasiswa saat itu mengidentikkan HMI dengan STI. Hasil Kongres I PB HMI (periode 1947–1948) memutuskan M.S. Mintaredja (UGM) sebagai Ketua Umum PB HMI dan Lafran Pane (STI) sebagai Wakil Ketua Umum. Kombinasi ini terbukti ampuh dalam rangka mencitrakan bahwa HMI sebagai organisasi mahasiswa berlabelkan Islam tetap memberikan tempat bagi mahasiswa umum. Lihat Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 246.
- 41 Akhlak sesama makhluk, terutama dengan sesama manusia, berarti Islam sangat mengakui hak orang lain (kemanusiaan). Sebagaimana diungkap-kan Syekh M.A. Zaki Badawi dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan *Ulumul Quran*, Vol III, No. 1, 1992, hlm. 77. “Islam adalah agama yang mengakui agama-agama lain, mengakui keabsahannya, eksistensinya, dan kemanusiaan umumnya, Islam siap bekerja sama berlandaskan kemanusiaan.”
- 42 Wawancara penulis dengan Chumaidy Syarif Romas (24 Juni 2008).
- 43 Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMI”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm.
- 44 Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 3.
- 45 Lafran Pane, “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam...”, hlm. 56
- 46 Kalimat dalam kurung adalah tambahan dari penulis.
- 47 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 425.
- 48 Amir Radjab Batubara adalah Ketua Umum PB HMI 1955–1957.
- 49 Amir Radjab Batubara, “Mengisi Pembangunan Negara dan Bangsa dengan Nilai-nilai Islam”, disampaikan dalam pidato hari lahirnya HMI 5 Februari 1956, lihat Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 89.
- 50 Ibid, hlm. 89.
- 51 Ibid, hlm. 90
- 52 Agussalim Sitompul, *Citra HMI*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, hlm. 6–7.
- 53 Agussalim Sitompul, “Memacu Peran HMI; Menghadapi Perubahan Zaman di Era Milenium Ketiga menuju Indonesia Baru”, dipresentasikan pada Latihan Kader III Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus HMI Badan Koordinasi Jawa Tengah-DIY, di Wisma PSDA II, Pedurungan, Semarang, Senin 22 Juni 2009, hlm. 12

- 54 Hegemoni kekuasaan kolonial dilakukan melalui kebijakan militer. Berbagai kekuasaan besar atau kecil ditindas. Lebih agresif lagi, Belanda ikut campur tangan secara langsung dalam urusan dalam negeri beberapa negara di Indonesia. Dengan demikian, diletakkan dan terciptalah dasar-dasar *Kerajaan Belanda yang pertama di Indonesia*. Para Gubernur Jenderal yang memerintah pada tahap pertama terdapat Antonio van Diemen (1636–1645), Johan Maitsuyeher (1653–1678), Rej Goens (1678–1681), dan Cornelis Janszoon Spelman (1681–1684), dalam Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1996, hlm. 51.
- 55 Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 58.
- 56 Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan Dies Natalis I HMI di Bangsal Kepatihan Yogyakarta tanggal 6 Februari 1948. Lihat Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 69, sebagaimana dikutip Agussalim Sitompul, “HMI Jangan Menyendiri: 1 Tahun HMI”, dalam harian *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, tanggal 9 Februari 1948 Nomor 100 Tahun III, hlm. 2.
- 57 Saafroedin Bahar (dkk.), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 34.
- 58 Ibid, hlm. 35
- 59 Ibid, hlm. 258.
- 60 Wawancara Yudi Latif dengan Dahlan (29/12/1999), dalam Yudi Latif, *Inteligenia Muslim...*, hlm. 426.
- 61 Dahlan Ranuwihardjo, “50 Tahun Sejarah Perjuangan HMI Turut Menegakkan dan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdi Republik*, hlm. 5.
- 62 Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 58.
- 63 Tidak terpelajarnya mayoritas pribumi bukanlah sesuatu yang alami, melainkan karena segala kebijakan Belanda dalam pendidikan. Segala kebijakan yang menguntungkan Belanda senantiasa menomorakirkan pribumi. Sejarawan Rusdi Hussein menjelaskan pengelompokan masyarakat saat itu: **1) Kulit putih** adalah bangsa Belanda, Inggris, Amerika dan bangsa Eropa lainnya. **2) Indo** adalah bangsa lain yang tinggal di Indonesia seperti peranakan Arab, China, Pakistan, India, dan lain-lain. **3) Ningrat pribumi** adalah bangsawan pribumi yang ditentukan menurut selera dan kepentingan penjajah. **4) Pribumi** adalah mayoritas penduduk asli Indonesia yang terikat atas tanah dan adat istiadat.⁶⁴ Disampaikan Rusdi Hussein dalam film dokumenter, *Redescovery of Our Revolution*, karya Riri, 2008.

- ⁶⁵ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 58.
- ⁶⁶ Lafran Pane, “Perubahan Konstitusional”, pidato pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Ilmu Tata Negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta—UNY), pada Kamis, 16 Juli 1970, hlm. 3
- ⁶⁷ Lafran Pane, “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam...”, hlm. 6.
- ⁶⁸ Ibid, hlm. 6.
- ⁶⁹ Ibid, hlm. 6.
- ⁷⁰ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia: Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 3.
- ⁷¹ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 72, lihat juga Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 45.
- ⁷² Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 58.
- ⁷³ Lafran Pane, “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam...”, hlm. 426.
- ⁷⁴ Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 131.
- ⁷⁵ Lihat Nurcholish Madjid, “HMI Sebuah Gejala Keislaman-Keindonesiaan” (kata pengantar), dalam Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. iv.
- ⁷⁶ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya...*, hlm. 89.
- ⁷⁷ M. Deden Ridwan, “Mempertegas Visi Keislaman HMI”, harian *Republika*, 19 Januari 1995.
- ⁷⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 115.
- ⁷⁹ Ibid, hlm. 11.
- ⁸⁰ Ridwan Saidi, *Kebangkitan Islam Era Orde Baru...*, hlm. 67.
- ⁸¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 118–119.
- ⁸² Ibid, hlm. 126.
- ⁸³ Fakta sejarah menjelaskan bahwa SDI, kemudian Sarekat Islam, merupakan organisasi terbesar di Indonesia hingga tahun 1930-an. Sarekat Islam (SI) tidak sebatas pergerakan Islam melainkan pergerakan nasional yang terbuka, terbukti SI mewadahi berbagai latar belakang ideologi termasuk bergabungnya beberapa anggota yang berideologi radikal seperti Semaun, Darsono dan Alimin yang kemudian dikenal sebagai SI Merah. Sebagai Bapak Pergerakan Nasional, rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Gang Peneleh 7 Surabaya menjadi tempat indekos

bagi tokoh-tokoh pergerakan, di sanalah tempat diskusi politik dan kebangsaan lintas ideologi. 3 orang tokoh pergerakan yang berguru dan indekos di rumah H.O.S. Tjokroamnito adalah Ir. Soekarno, Kartosuwiryo dan Semaun. Ketiganya dikenal lantaran banyak memberikan warna bagi perjalanan pergerakan nasional. Bung Karno kemudian hijrah ke Bandung dan mendirikan partai nasional yang menjadi cikal bakal lahirnya PNI, Semaun dan kawan-kawannya kemudian mendirikan Partai Komunis Hindia Belanda pada 1920 dan tidak lama berselang berubah menjadi Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Semaun, sementara Kartosuwiryo kemudian dikenal sebagai tokoh Islam yang berpengaruh luas dan sempat memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Sehingga wajar, banyak kalangan mempertanyakan kepantasan tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang berasosiasi dengan pendirian Budi Utomo, padahal Budi Utomo secara terang mengadopsi semangat kedaerahan yang kental karena tujuan organisasi ini adalah menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan bangsa Madura secara harmonis. Budi Utomo menitikberatkan pada perbaikan taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Ratu Belanda. Sebaliknya, Sarekat Islam patut dikedepankan bukan saja karena keanggotaannya yang bersifat terbuka, melainkan karena sesungguhnya Selaah cikal bakal lahirnya pergerakan kebangsaan modern. Hasan basri, “Islam dan Kebangkitan Nasional: Sebuah Refleksi Sejarah Kebangkitan Nasional”, <http://www.pontianakpost.com/>, *Pontianak Post*, Jumat, 19 Mei 2006.

84 Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 268.

85 Ibid, hlm. 132.

86 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 122.

87 Lihat harian *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 28 Februari 1947, dan Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 8. Lihat pula Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 11.

88 Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965*, Bandung: Mizan, 2000, hlm. 493.

89 Ibid, hlm. 493.

90 Ibid, hlm. 494.

91 Ibid, hlm. 494.

- ⁹² Ibid, hlm. 494–495.
- ⁹³ Ibid, hlm. 494–495.
- ⁹⁴ Ibid, hlm. 494–495.
- ⁹⁵ Ibid, hlm. 494–495.
- ⁹⁶ Ibid, hlm. 494–495.
- ⁹⁷ Ibid, hlm. 494–495.
- ⁹⁸ Ibid, hlm. 494–495.
- ⁹⁹ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 20.
- ¹⁰⁰ Ibid, hlm. 99.
- ¹⁰¹ Ibid, hlm. 103.
- ¹⁰² Ibid, hlm. 107.
- ¹⁰³ Ibid, hlm. 125.
- ¹⁰⁴ Ibid, hlm. 131.
- ¹⁰⁵ Tahun 1986, HMI menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Jika dilihat dari sejarahnya, sejatinya Pancasila bukanlah hal baru bagi HMI sebagaimana dijelaskan dalam salah satu pernyataan Lafran Pane dalam Kongres Pendidikan di bagian akhir tulisan ini. Berdasarkan fakta sejarah, komitmen HMI tentang NKRI setidaknya tercatat dalam dua peristiwa penting: *Pertama*, HMI ikut serta menumpas pemberontakan PKI, baik di Madiun tahun 1948 maupun G30S/PKI 1965 yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Komunis. *Kedua*, ketika muncul keinginan sekelompok umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai Dasar Negara, dan Gerakan DI/TII untuk mendirikan Negara Islam. HMI menyatakan tidak setuju terhadap Islam sebagai Dasar Negara maupun Negara Islam. Hal ini terjadi dalam masa kepemimpinan Dahlan Ranuwihardjo sebagai Ketua PB HMI 1953–1955. Gagasan ini kemudian dilanjutkan lagi pada Oktober 1968 dalam pertemuan HMI se-Badko (Badan Koordinasi) Jawa Tengah di Solo. Baca Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993, hlm. 180. Lihat juga Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam; Catatan Harian*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 147.
- ¹⁰⁶ HMI terpecah menjadi dua, satu berasaskan Pancasila dan satu lagi berasaskan Islam, untuk lebih jelasnya bisa dibaca setidaknya dalam 3 karya tulis, yakni buku Kholis Malik, *Konflik Ideologis; Kemelut Asas Tunggal di Tubuh HMI*, Yogyakarta: Insani Press, 2002; Agussalim Sitompul, *44 Indikator Kemunduran HMI: Suatu Kritik untuk Kebangkitan HMI*, Yogyakarta: Misaka Galiza, 2005, hlm. 156–165; dan Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik*

- Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997.
- ¹⁰⁷ Kongres XVI HMI berlangsung di Padang, 24–31 Maret 1986. Melalui perdebatan panjang dan seru, akhirnya secara aklamasi kongres mengesahkan penetapan Pancasila sebagai asas HMI, yang dicantumkan pada Pasal 4 AD HMI. Pada Pasal 3 ditambah identitas; organisasi ini menghimpun mahasiswa Islam yang beridentitas Islam dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah. Lihat PB HMI, *Hasil-Hasil Ketetapan Kongres XVI HMI di Padang*, (Jakarta, 1986), hlm. 24, Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 200, dan Agussalim Sitompul, *44 Indikator...*, hlm. 156–165.
- ¹⁰⁸ Lafran Pane, “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam...”, hlm. 426.
- ¹⁰⁹ Ahmad Tirtosudiro, “HMI dalam Pergerakan Mempertahankan Kemerdekaan”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, hlm. 31.
- ¹¹⁰ Victor Immanuel Tandja, “HMI dalam Dialog Antar-Umat Beragama”, *Republika*, 6 Februari 1997.
- ¹¹¹ Syafi’i Ma’arif, “Wawasan Keindonesiaan HMI”, harian *Pelita*, Jakarta 9 April 1990.
- ¹¹² Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 20.
- ¹¹³ Pendapat Yudi Latif ini senada dengan Nurcholish Madjid yang mengatakan bahwa Lafran Pane di samping sebagai Muslim juga sebagai Nasionalis, yang mempunyai wawasan sendiri, berbeda dengan partai politik yang ada pada waktu itu. Perbedaan itu tampak, karena Lafran Pane ketika mendirikan HMI lebih mengutamakan semangat kebangsaan. Lihat Agussalim Sitompul, *Menyatu dan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 422.
- ¹¹⁴ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 426.
- ¹¹⁵ Pernyataan ini sangat filosofis dengan mengemukakan konsep keseimbangan dalam hidup. Bahagia merupakan tujuan dari semua aktivitas manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dan kebahagiaan hanya bisa diraih dengan terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual. Lebih lengkap lihat, Lafran Pane, *Memurnikan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Pidato Dies Natalis II IKIP (Sekarang UNY), 30 Mei 1966*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Ilmu Sosial (FKIS) IKIP Yogyakarta. 1966, hlm. 1.
- ¹¹⁶ Sebagai penekanan, seluruh manusia yang dimaksud Lafran Pane adalah semua manusia di atas bumi tanpa memandang latar belakang agama,

ras, bangsa, dan lain-lain.

- ¹¹⁷ Lafran Pane, *Memurnikan Pelaksanaan UUD 1945...*, hlm. 1.
- ¹¹⁸ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 20
- ¹¹⁹ Dahlan Ranuwihardjo lahir di Pekalongan, 13 Desember 1925. Berbagai jabatan akademik dan politik pernah diamanatkan kepada mantan Ketua Umum PB HMI 1951–1953 ini, di antaranya: anggota DPR-GR/MPRS 1960–1968, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional 1996, Ketua Tim Ahli Hukum PKBI Pusat 1966, anggota Dewan Pertimbangan Nasional KAHMI tahun 1990-an, anggota Dewan Pertimbangan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Pusat tahun 1996, anggota Dewan Pertimbangan YKPK (Yayasan Kerukunan Persatuan Kebangsaan).
- ¹²⁰ Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) lahir setelah Kongres Mahasiswa Indonesia di Malang bulan Juni tahun 1947, Lafran Pane mewakili HMI dalam kongres tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa HMI yang didirikannya merupakan organisasi yang terbuka beraliansi dengan kelompok mahasiswa mana pun. PPMI menolak Perjanjian Renville 1948, karena dianggap merugikan RI karena harus mengosongkan kantong-kantong TNI dari Jawa Barat dan Jawa Timur yang diduduki Belanda. PPMI mendesak Soekarno mencabut mandat Amir Syarifuddin, terbentuklah kemudian pemerintahan baru di bawah pimpinan Wakil Presiden atau Perdana Menteri Hatta. Setelah pecah pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948, PPMI di bawah pimpinan Pejabat Ketua Umum Ahmad Tirtosudiro yang juga anggota HMI mengerahkan mahasiswa untuk berangkat ke daerah-daerah dengan tugas menetralsir propaganda-propaganda beracun yang telah disebar PKI. Dahlan menceritakan, “Dalam kampanye menetralsir keadaan tersebut, para mahasiswa termasuk diri saya berbicara dengan bahasa Jawa di depan rakyat sambil membawa foto-foto besar Bung Karno dan Bung Hatta yang disediakan oleh Departemen Penerangan agar rakyat tetap berada di belakang Bung Karno dan Bung Hatta. Dahlan sendiri dalam Kongres PPMI di Yogyakarta pada Maret 1950 terpilih menjadi Ketua Umum PPMI dan pada Kongres Pemuda Indonesia Seluruh Indonesia II di Surabaya bulan Juni 1950 (Kongres I Bulan November 1945 di Yogyakarta) menghasilkan federasi baru dari organisasi-organisasi pemuda yang bernama FPI (Front Pemuda Indonesia). Dahlan mewakili PPMI dalam kongres tersebut untuk kemudian Dahlan juga terpilih menjadi Ketua Front Pemuda Indonesia yang pertama. Dahlan mengakui wawasan kebangsaan yang diperolehnya di HMI memudahkan dia dalam menjalankan berbagai fungsi di PPMI dan FPI. Mengenai aksi-aksi PPMI

- dan FPI dapat dilihat dalam tulisan Dahlan Ranuwihardjo, “50 Tahun Sejarah Perjuangan HMI Turut Menegakkan dan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, hlm. 4–6.
- ¹²¹ Setelah Belanda pada 21 Juli 1947 (lima bulan setelah HMI berdiri) melancarkan aksi militer I, para mahasiswa segera mengikuti latihan militer kilat selama satu minggu bertempat di bekas benteng Belanda Vredenburg Yogyakarta. Mereka yang telah mengikuti latihan militer tersebut kemudian dimasukkan dalam Compi Mahasiswa (CM) yang merupakan Batalyon Mobil di bawah Komando MBT (Markas Besar Tentara), kemudian para anggota CM dikirim ke pelbagai front garis depan. Sejumlah anggota HMI yang ikut dalam CM tersebut adalah: Ahmad Tirtosudiro sebagai Wakil Komandan CM dan Dahlan sebagai Komandan Regu yang dikirim ke Front Ronggolawe I (Resimen 31 Divisi Ronggolawe) di Desa Deket beberapa kilometer sebelah timur kota Lamongan. Dahlan mencatat beberapa anggota HMI yang melanjutkan karier di perwira-perwira tinggi di TNI AD adalah Mayor Sukendro (alm. Brigjen), Kapten Ahmad Tirtosudiro (alm. Letjen Pur.), Kapten Anas Karim (alm. Brigjen), Abdul Firman (alm. Mayjen, jabatan terakhir anggota Fraksi ABRI di DPR), Usman Abdullah (alm. Kolonel Siliwangi), Lettu Husodo (pengurus HMI Jakarta tahun 1952), Letda Dahlan Ranuwihardjo, Mayjen dr. Hariadi Darmawan. Dahlan Ranuwihardjo, “50 Tahun Sejarah Perjuangan HMI...”, hlm. 4, 14.
- ¹²² Dahlan Ranuwihardjo, “50 Tahun Sejarah Perjuangan...”, hlm. 10
- ¹²³ Deliar Noer, *Pengantar Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 186.
- ¹²⁴ Natsir menolak ide bahwa politik sekuler Barat merupakan satu-satunya model yang harus diikuti. Dia berargumen bahwa menurut Islam, negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Sebaliknya, Soekarno menyatakan, dengan Nasionalisme yang diusungnya bukanlah sepenuhnya mengadopsi dari Barat. Menurutnya, Nasionalisme ketimuran ini telah memberi inspirasi kepada berbagai pemimpin Asia seperti Mahatma Gandhi, C.R. Das, Arabin Ghose dari India, Mustafa Kamil dari Mesir dan Sun Yat Sen dari China. Nasionalisme ini, katanya, telah membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat kita hidup di alam roh (*Fadjar Asia*, 18 dan 20 Agustus 1928). Keterlibatan Natsir dalam kancan politik dimulai saat ia menjadi Ketua PII (Partai Islam Indonesia) Cabang Bandung pada 1940, lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 316–317.
- ¹²⁵ Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi...*, hlm. 23–24.

- 126 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir di Cepu, Jawa Tengah, 7 Januari 1905 dan meninggal dunia pada September 1962, adalah seorang ulama karismatik. Sejarah Indonesia mencatat nama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai Proklamator Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. Kartosoewirjo sempat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Kedokteran (*Nederlands Indische Artsen School*). Kiprah politiknya berawal saat ia menjadi murid sekaligus sekretaris pribadi tokoh Sarekat Islam H.O.S. Tjokroaminoto. Kariernya kemudian melejit menjadi Sekretaris Jenderal Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). PSII merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam. Kartosoewirjo kemudian bercita-cita untuk mendirikan Negara Islam (*Daulah Islamiyah*). Di PSII, ia menemukan jodohnya. Ia menikah dengan Umi Kalsum, anak seorang tokoh PSII di Malangbong. Ia kemudian keluar dari PSII dan mendirikan Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia (KPKPSII). www.wikipedia.org.
- 127 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 295.
- 128 Ali Murtopo (Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924–15 Mei 1984) adalah pemikir, tokoh intelijen, dan politikus yang berperan penting terutama pada masa Orde Baru di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia (1978–1983) serta Deputy Kepala (1969–1974) dan Wakil Kepala (1974–1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara. www.wikipedia.org. Diakses tanggal 19 Januari 2009.
- 129 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 494.
- 130 Wawancara penulis dengan Lukman Hakiem, anggota DPR RI periode 2004–2009 dari Fraksi PPP, 24 Maret 2008, 09 Maret 2008.
- 131 Ibid.
- 132 Lafran Pane, “Perubahan Konstitusional”.
- 133 Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 16.
- 134 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 290–291.
- 135 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 20.
- 136 Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 246.
- 137 Agussalim Sitompul, “Sejarah Perjuangan HMI”, makalah pada Latihan Kader Dasar HMI, dalam Pedoman Latihan Dasar HMI Yogyakarta, Penerbit Panitia Latihan Kader Dasar HMI di Kaliurang, Yogyakarta, 1975, hlm. 3.

- ¹³⁸ Majalah *Media*, No 4 Tahun II, Yogyakarta, Penerbit PB HMI, 1956, hlm. 11
- ¹³⁹ Panitia Perumus Tafsir Asas HMI adalah Amir Radjab Batubara dan Ismail Hasan Metareum, lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI*, hlm. 11.
- ¹⁴⁰ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI*, Yogyakarta: Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, 1966, hlm. 22.
- ¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 22.
- ¹⁴² Pernyataan PB HMI Nomor: 219/B/Sek/1918 tanggal 26 Juni 1958, yang ditandatangani oleh Ismail Hasan Metareum dan Ibrahim Madylao, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PB HMI periode 1957–1960.
- ¹⁴³ *Enam Esensi Dasar Kepribadian HMI*, diterbitkan oleh Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, 1964, hlm. 6–10.
- ¹⁴⁴ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 69–133.
- ¹⁴⁵ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI...*, hlm. 24.
- ¹⁴⁶ Dalam kenyataan, tidak ada suatu masyarakat yang benar-benar tunggal, *unitar (unitary)*, tanpa ada unsur-unsur perbedaan di dalamnya... persatuan dapat terjadi dan justru kebanyakan terjadi dalam keadaan berbeda-beda (*Unity in Diversity, E Pluribus Unum, Bhinneka Tunggal Ika*). Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hlm. 159.
- ¹⁴⁷ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Histirositas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 8.
- ¹⁴⁸ Dalam tulisannya berjudul “Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience”, Nurcholish mengatakan bahwa “komunitas agama, baik Islam, Kristen maupun Yahudi, tidak banyak memiliki pengalaman dalam pluralitas kehidupan. Secara historis, komunitas agama relatif hidup dalam satuan-satuan homogen yang terpisah dari komunitas agama lain, bahkan seringkali, komunitas agama satu berada di bawah otoritas komunitas agama lain. Kehidupan yang benar-benar sejajar antara komunitas agama tidak banyak terjadi dalam sejarah manusia. Akibatnya, keharusan toleransi menjadi masalah yang cukup sulit bagi komunitas agama,” dalam Nurcholish Madjid, “Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experiences”, IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, *Jurnal Islamica*, 1994, hlm. 55.
- ¹⁴⁹ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas...*, hlm. 5.
- ¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 5.
- ¹⁵¹ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sekolah Tinggi Islam adalah sekolah yang didirikan oleh tokoh-tokoh intelektual Muslim terbaik

- yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti Wahid Hasyim (NU), Hatta (PNI), Natsir (Masyumi), Kasman Singodimedjo (PETA), Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah). Dapat dikatakan, STI bukanlah kampus yang berafiliasi dengan NU atau Muhammadiyah, dan lain-lain, melainkan kampus umat Islam yang didirikan dalam rangka memberikan pendidikan kepada pemuda-pemuda Muslim apa pun latar belakang keagamaannya. Wawancara dengan Daris Purba (Pengacara, Ketua LBH KAHMI Yogyakarta dan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Rabu 25 September 2008.
- 152 Ungkapan ini disampaikan Akbar Tandjung saat memberi sambutan pada pelantikan pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Bagian Selatan di Hotel Carissima Palembang (12/7/06). www.sumeks.co.id. Akses 13 Juli 2008.
- 153 Dua kalimat syahadat yang berbunyi: “Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah dan Aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Rasul Allah Swt”.
- 154 Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMI”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 504.
- 155 Wawancara penulis dengan Agussalim Sitompul, 19 Desember 2009.
- 156 Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMI”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 504.
- 157 Pidato Lafran Pane di depan Kongres PII di Ponorogo 4–6 November 1947, lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI...*, hlm. 30.
- 158 Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000–2004, 2004–2009, alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo, mantan pengurus HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga.
- 159 Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas...*, hlm. 63.
- 160 Ibid, hlm. 64.
- 161 Wawancara Ali Nur Yasin dari TEMPO Interaktif dengan Victor Tandja, di Gereja Effatha, Jakarta, Selasa 25 Maret 1997, dimuat dalam majalah *Tempo*. Kolom Analisa dan Peristiwa.
- 162 Pidato Lafran Pane di depan Konferensi Besar PII di Ponorogo 4–6 November 1947, lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 30.
- 163 Wawancara penulis dengan Agussalim Sitompul, 24 Juni 2008.
- 164 Azyumardi Azra, mantan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat 1981– 1982. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 periode.
- 165 Azyumardi Azra, “Mengabdikan Republik, Memberdayakan Umat”, dalam

- Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. XV.
- ¹⁶⁶ Ibid.
- ¹⁶⁷ Pada Pemilu 1955, HMI tidak memberikan dukungan kepada salah satu Partai Islam, melainkan melalui Keputusan Kongres HMI di Kaliurang Yogyakarta 1951, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Kaliurang, HMI memberikan dukungan yang sama kepada keempat partai politik umat Islam, yakni Masyumi, NU, PSII dan PERTI, untuk berlaga pada Pemilu 1955. Keputusan ini membuat hubungan HMI dengan Masyumi memburuk, namun HMI menjelaskan bahwa dirinya adalah “anak dari semua umat Islam”, lihat Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, Djohan Effendi dan Ismet Nasir (ed.), Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 144–145.
- ¹⁶⁸ Azhari Akmal Tarigan adalah penulis buku *Islam Mazhab HMI*.
- ¹⁶⁹ Azhari Akmal Tarigan, “HMI: Harapan Masyarakat Indonesia? Catatan 60 Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (1947–2007)”, www.waspada-online.com.
- ¹⁷⁰ Ketua Pembinaan Aparat Organisasi PB HMI 1997–1999. Alumni FKIP Universitas Negeri Lampung. Sumber lain mengatakan, Lafran Pane, seorang pendiri HMI, mempertegas pernyataan beliau pada acara penutupan Kongres XIV HMI pada 1984 di Bandung: “*Sampai hari ini, tidak orang yang meragukan bahwa HMI adalah kader-kader bangsa. HMI sejak semula mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme. Bahkan, almarhum Jenderal Soedirman pernah mengatakan, HMI berarti ‘Harapan Masyarakat Indonesia’ umumnya dan ‘Harapan Masyarakat Islam’ khususnya.*” Lafran Pane juga menekankan, agar independensi HMI tetap dipelihara dan dikembangkan. Adapun setelah menjadi alumni HMI untuk masuk ke partai mana pun dipersilakan. Lihat Syafi’il Anam, “Independensi HMI”, data dalam tulisannya dari *Panji Masyarakat* No. 324 dan diedit seperlunya, selengkapnya lihat www.hmistainkdr.blog-spot.com
- ¹⁷¹ Kepada Hani Pudjiarti dan Mustafa Ismail dari TEMPO Interaktif yang mewawancarainya Kamis pagi (27/3) lalu di Kantor PB HMI Jalan Diponegoro, Jakarta, dimuat di majalah *Tempo*, kolom Analisa dan Peristiwa edisi 04/02, 29 Maret 1997.
- ¹⁷² Pendeta ini menulis disertasi yang berjudul *HMI: Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu*, di Hartford Seminary Foundation America, 1979.
- ¹⁷³ Wawancara Ali Nur Yasin dari TEMPO Interaktif dengan Victor Tandja,

- di Gereja Effatha, Jakarta, Selasa 25 Maret 1997, dimuat dalam majalah *Tempo*, kolom Analisa dan Peristiwa.
- 174 Wawancara Agussalim Sitompul dengan Lafran Pane pada 12 Desember 1969, dalam Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 28.
- 175 Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 30.
- 176 Lafran Pane pernah ditawarkan menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah, namun Lafran menolaknya karena tidak ingin HMI diidentikkan dengan Muhammadiyah, wawancara dengan Daris Purba (Pengacara, Ketua LBH KAHMI Yogyakarta dan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Rabu 25 September 2008. Lafran menolak menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah meskipun istrinya adalah aktivis Aisyiah, wawancara dengan Syafri Syairin (mantan Dekan FISIPOL UGM), Selasa 24 Maret 2008.
- 177 Wawancara penulis dengan Chumaidy Syarif Romas, 24 Juni 2008.
- 178 Masa keanggotaan di dalam HMI juga mempunyai aturan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) HMI sebagai berikut:
 a) Masa keanggotaan anggota muda berakhir 6 (enam) bulan sejak Maperca, b) Masa keanggotaan anggota biasa adalah sejak dinyatakan lulus LK I (*Basic Training*) hingga 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa studi S0 dan S1, dan hingga 1 tahun untuk S2 dan S3, c) Anggota biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi, d) Anggota biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat c) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir). Sedangkan masa keanggotaan dianggap berakhir apabila: 1) Telah berakhir masa keanggotaannya, 2) Meninggal dunia, 3) Mengundurkan diri, 4) Menjadi anggota partai politik, 5) Diberhentikan atau dipecat. Sumber PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI Ke-26, Makassar 20–26 Februari 2006*, PB HMI, Bab ART. 2006, diakses dari situs www.pbhmi.com, tanggal 13 Februari 2007, jam 19.00 WIB.
- 179 Dalam wawancara majalah *Tempo* dengan Dahlan Ranuwiharjo dijelaskan: Mengapa HMI menolak berada di bawah naungan partai? *Pada waktu itu keras polarisasi politik antara partai pemerintah dan oposisi. Partai pemerintah (Partai Sosialis Indonesia—PSI) dipimpin Sjahrir*

dan ormas-ormasnya. Oposisinya adalah Masyumi, ada juga Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, Nah, gaya PSI itu memang suka nyaplok, Jadi, motivasi kemandirian HMI antara lain untuk mencegah pencaplokan Persatuan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) oleh para mahasiswa Sosialis. Apakah **Lafran Pane**, pencetus HMI, sudah memikirkan soal kemandirian saat membentuk organisasi ini pada 5 Februari 1847? Hal itu belum terpikirkan oleh Mas Lafran, konsep independensi baru belakangan muncul, saya yang pertama kali memakainya, motivasinya adalah agar mahasiswa yang dipelopori HMI jangan ikut polarisasi politik. Dan jangan dipengaruhi partai-partai politik. Masyumi memang meminta kami bergabung. Saat itu, tidak ada organisasi Islam yang tidak di bawah Masyumi. Mereka bilang, “Kenapa HMI menyendiri?” Nanti akan didirikan seksi mahasiswa di Masyumi. Tapi Mas Lafran menjawab dengan diplomatis, “Waktu mendirikan HMI, itu tidak saya pikirkan.” Jadi apa yang terpikir? Yang terpikir adalah agar mahasiswa Islam jangan menyendiri, tapi berintegrasi dengan kehidupan bangsa. Dari situ, kemudian muncul doktrin Muslim Nasionalis. Dalam bahasa populernya, tunjukkan ke masyarakat bahwa yang namanya Islam itu bukan santri teklek (bakiak). Dan kalau sudah menjadi mahasiswa, jangan lupa Islamnya. **Bukankah sempat muncul tuduhan separatisme terhadap HMI**

pada masa itu? Tuduhan separatis dilancarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Sosialis. Tapi, kalau separatis dalam arti ingin keluar dari Negara Republik Proklamasi, itu tidak benar. Bagaimana dengan persoalan fanatisme? Itu juga tidak benar, Anda tahu, mahasiswa HMI zaman Belanda itu termasuk anak-anak “bergaul”. Dahlan juga mengatakan, “Sejak awal, HMI sudah berada di belakang Soekarno....” Dikutip seperlunya dari wawancara wartawan *Tempo*, Dwi Arianto, Hermien Y Kleden, Sistem Proporsional dan 100..., wawancara No. 28/XXVIII/13–19 September 1999, di Kompleks Pesangrahan Permai, Pertukangan, Jakarta Selatan.

180 Saat HMI ditegaskan untuk dibubarkan paksa oleh PKI dan antek-anteknya pada 1960-an, seluruh umat Islam dari berbagai kalangan bersatu padu menyuarakan menolak pembubaran HMI. Di antara yang menolak pembubaran HMI adalah: Dul Arnowo, Rektor Universitas Brawijaya (harian *Berita Indonesia*, 29 Mei 1964); Drs. Hudiono—Kepala Humas Dewan Pertimbangan Agung (harian *Bintang Timur*, Jakarta 21 Mei 1964); Prof. Dr. Sumantri Harjoprakoso—pembantu Menteri PTIP (harian *Berita Indonesia*, Jakarta 23 Mei 1964); Ketua DPGR (*Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta 24 Mei 1964); Forum Umat Islam Jember yang terdiri dari 2 partai dan 17 organisasi massa (harian

Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 23 Juni 1964); Menteri Agama RI, Syaifuddin Zuhri (harian *Nasional*, Yogyakarta 16 Juni 1964); Ketua Umum PBNU—Idham Cholid (Siaran Khusus HMI Cabang Surabaya 23 Juni 1964); Presiden RI—Soekarno (harian *Berita Indonesia*, Jakarta, 24 Juli 1964, harian *Karyawan*, Jakarta, 19 Agustus 1964 dan harian *Suara Islam*, Jakarta, 17 September 1965, harian *Mercusuar*, Jakarta, 29 September 1965); Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Surat Pengurus HMI Cabang Yogyakarta No. 41/B/Sek/64, tanggal 4 Juli 1964, kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu UGM tahun 1964); Ketua PSII, H. Anwar Cokroaminoto (harian *Berita Indonesia*, Jakarta, 29 Juni 1964); GEMUIS (Gerakan Muda Islam) Yogyakarta (surat pernyataan 14 organisasi pemuda pelajar, mahasiswa Islam 27 Juni 1964); NU, PERTI, PSII, Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Muslim Indonesia, PMII, SEMMI, IMM, IPNU, IPPNU, SEPMI, IPM, PII, PUI, PPUI, MUSLIMAT NU, FATAYAT NU, GERWAPSII ISLAM, SARBUMUSI, PERTANU, GERBUMI, BOGSII, GERTASI dan GERTAMI; Ketua Umum PP Muhammadiyah KH. Ahmad Baidawi (harian *Mercusuar*, Jakarta 29 September 1964); PP PMII (harian *Duta Masyarakat*, Jakarta, 27 Oktober 1964); Sekretaris Umum Majelis Pembantu Pimpinan Revolusi—MPPR, Kolonel Sucipto (harian *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 27 Januari 1965); Jenderal Nasution (harian *Tanjung Karang Jaya*, Tanjungkarang, 11 November 1964); Ketua Mahkamah Agung, Wiryono Projodikoro (harian *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 7 Juli 1964); Panca Tunggal Lampung (harian *Bintang Timur*, Jakarta, 27 Oktober 1964); Pangdam XIV Hasanuddin (harian *Duta Masyarakat*, Jakarta 25 Januari 1965); MENDAGRI, Drs. Sumarno (Surat Menteri Dalam Negeri, kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Maret 1965); Deklarasi Umat Islam Bandung yang ditandatangani oleh KH Idham Cholid, Subhan Z.E. (NU), Aruji Kartawinata, H. Anwar Cokroaminoto (PSII); KH Ahmad Baidawi, Prof. Dr. Farid Ma'ruf (dari Muhammadiyah); KH A. Aziz, M.J. Zainuddin (Al Jami'iyul Wasliyah); Wartono Dwijoyuwono (GASBIINDO); Sekjen DEPAG RI Bahrum Rangkuti; Koordinator Kongres Wanita Indonesia, Dr. Hurustiati Subandrio (harian *Suara Islam*, Jakarta, 30 Agustus 1965); Dewan Guru Universitas Nasional (harian *Suara Islam*, Jakarta 16 September 1965); Ketua PMKRI Pusat, Cosmas Batubara (harian *Suara Islam*, Jakarta, 23 September 1965); Presidium Majelis Nasional Generasi Muda Islam atas nama 25 organisasi di bawahnya (harian *Mercusuar*, Jakarta, 21 September 1965); PP Muhammadiyah-KH Idham Cholid (harian *Suara Islam*, Jakarta, 30 September 1965); PP GP Al Wasliyah (harian *Suara*

Islam, Jakarta, 25 September 1965); PP HSBI (Himpunan Seni Budayawan Islam) di (harian *Suara Islam*, Jakarta, 25 September 1965); Gerakan Buruh Bank Berjuang, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, di (harian *Suara Islam*, Jakarta, 27 September 1965); Subhan Z.E. PB NU (harian *Suara Islam*, Jakarta, 1 Oktober 1965); Pemuda Al-Irsjad di (harian *Suara Islam*, Jakarta, 1 Oktober 1965); PANGAD Jenderal Ahmad Yani, di (harian *Suara Islam*, Jakarta, 14 Agustus 1965); Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, di (harian *Suara Islam*, Jakarta, 23 Juli 1965) dan lain-lain. Data semuanya dapat dibaca di Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 1947–1975*, Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1976, hlm. 57–67. Sedangkan klip-kliping koran terkait dengan pembelaan umat Islam dan rakyat Indonesia terhadap upaya pembubaran HMI hingga saat ini masih ada di rumah Agussalim Sitompul, Condongcatur Yogyakarta.

¹⁸¹ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina-Pustaka Ankara, 1999, hlm. 6.

¹⁸² Ban yang dimaksud oleh Soekarno adalah dr. Subandrio (Wakil Perdana Menteri I), sedangkan Dahlan adalah Dahlan Ranuwihardjo (mantan Ketum PB HMI 1951–1953), dalam A. Dahlan Ranuwihardjo, *Bung Karno dan HMI dalam Pergulatan Sejarah: Mengapa Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?*, Jakarta: IntranS: 2002, hlm. 80–83.

¹⁸³ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 61.

¹⁸⁴ Tahun 1986, HMI pecah menjadi HMI MPO yang berasaskan Islam dan HMI DIPO yang berasaskan Pancasila. Menurut Sudirman Tebba, perpecahan ini mengakibatkan HMI kehilangan sebagian kader intelektualnya. Sebelum perpecahan, setidaknya di HMI ada dua kutub utama pemikiran, yakni pemikiran yang berbasis dari kutub pesantren dan pemikiran umum. Pergumulan pemikiran di antara dua kutub tersebut telah menghasilkan dialog-dialog yang mencerahkan dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan segar. Dalam Kholis Malik, *Konflik Ideologi*, hlm. 75.

¹⁸⁵ T.B. Simatupang (dkk.), *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun*, Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia, 1996, hlm. 92.

¹⁸⁶ T.B. Simatupang, *Iman Kristen dan Pancasila*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1984, hlm. 12–13.

¹⁸⁷ Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMI”, dalam Agussalim Sitompul

- (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm.
- 188 Ahmad Tirtosudiro, “HMI dalam Pergerakan Mempertahankan Kemerdekaan”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, hlm. 32.
- 189 Ibid.
- 190 Ketua Umum PB HMI 1951–1953.
- 191 Dahlan Ranuwiharjo, *Menuju Pejuang Paripurna: Aspek Ideologi dari Islam menuju Terbinanya Insan Pejuang Paripurna Leadership Strategi dan Taktik dalam Perjuangan Politik* (Anjas Taher, ed.), Ternate: Penerbit KAHMI Wilayah Maluku Utara, 2000, hlm. 111–112.
- 192 Ibid, hlm. 112.
- 193 Mar’ie Muhammad, “HMI di Tengah-tengah Arus globalisasi Abad XXI”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, hlm. 111
- 194 Dahlan Ranuwihardjo mengatakan: “Menurut pengamatan saya, ketidakberhasilan PKI membubarkan HMI disebabkan oleh berbagai faktor, tanpa mengurangi sedikit pun arti dan sikap politik dari berbagai kekuatan Pancasila yang turut membela HMI terhadap serangan-serangan PKI sehingga HMI tetap eksis hingga sekarang. Menurut saya, faktor yang amat menentukan (*the most decisive factor*) adalah karena Bung Karno sendiri tidak mempunyai niat untuk membubarkan HMI, ini pun dapat saja disebabkan oleh berbagai faktor. Tetapi menurut saya, faktor yang menentukan mengapa Bung Karno tidak membubarkan HMI adalah karena sikap-sikap politik yang ditunjukkan PB HMI pada 1964– 1965 itu,” selengkapnya dalam A. Dahlan Ranuwihardjo, *Bung Karno dan HMI...*, hlm. xvi-xvii.
- 195 Penting kiranya untuk memahami sejarah perpindahan Orde Lama ke Orde Baru dalam kaitannya dengan politik Islam. A.H. Nasution dalam tulisannya menyambut 50 tahun HMI menjelaskan, “Pada Sidang Umum V MPRS 1968 membawakan polarisasi dalam barisan Orde Baru, persimpangan semakin jelas tergambar, menurut kesimpulan saya kemudian, *decision making* politik telah berada di luar lembaga-lembaga konstitusi, semakin nyata memproses. Dapur politik bersama Jenderal Soeharto yang dulunya di MBAD telah berada di Raden Saleh 52 (OPSUS) yang kemudian menjadi lembaga CSIS di Tanah Abang. Posisi staf pribadi pejabat presiden, Kolonel Ali Murtopo di bidang politik dan intel, sementara Kolonel Sujono Humardhani di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam konteks demikian, saya melihat para petani politik dan ormas serta lembaga-lembaga konstitusional (DPR, MPR, Kabinet)

khususnya menteri-menteri, kami lihat semakin berada di posisi ‘ditukangi’ dan ‘mobilisasi’ guna pengamanan politik pemerintah (26)...

Tokoh-tokoh Angkatan '66 yang dulunya bersama ABRI sebagai partner untuk menumbangkan benteng Orde Lama, lambat laun setelah kekuasaan dimantapkan, mulailah dikembangkan isu. Sebagaimana biasanya dalam suatu masa transisi, maka pra-aventuris menampilkan diri sebagai seorang pahlawan... Strategi baru yang mulai ditanamkan setelah tumbanganya Orde Lama mulailah beredar isu-isu akan bahaya Islam dan seterusnya, dan nama saya suka dikait-kaitkan dengan gerakan Islam yang ekstrem. Padahal, pergolakan DI/TII diselesaikan di masa pimpinan saya. Dalam suatu rapat Hankam pada waktu itu, saya mendapatkan laporan, ada seorang jenderal yang menyebutkan mengenai bahaya Islam sehingga ia mengatakan ‘setelah hancurnya PKI, maka musuh kita selanjutnya adalah Islam...’ Dan sejak saat itulah, umat Islam

direkayasa, dibuat *Killing Ground*, dengan berbagai tipu daya dengan tujuan agar muncul *image* bahwa Islam itu berbahaya (27–28). A.H. Nasution, “Hubungan HMI dan ABRI dalam Pergulatan Politik Orde Lama dan *Setting* Lahirnya Orde Baru”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, hlm. 26–28.

196 Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMI”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm.

197 Ibid.

198 Donny Gahral Adian, “Moral, Politik dan Ruang Publik”, *Kompas*, 18 Maret 2002.

199 Wawancara dengan Agussalim Sitompul, di Yogyakarta 28 Mei 2009.

200 Wawancara penulis dengan Chumaidy Syarif Romas, di Yogyakarta 13 September 2008

201 Wawancara penulis dengan Syafri Syairin, di Yogyakarta, 23 September 2009.

202 Lafran Pane, “Menggugat Eksistensi HMI”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm.

203 Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama dan Kepemimpinan al-Quran di Indonesia”, dalam Abdurrahman, Burhanuddin Daja, Djam’annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali...*, hlm. 435.

204 Eko Supriyadi, “Memahami Islam sebagai Sebuah Gerakan Ideologis yang Mencerahkan dan Membebaskan”, *Book Review Digital Journal Al-Manär*, I, 2004, dari buku Ali Syari’ati, *Ideologi Kaum Intelektual*, Bandung: Mizan, 1993, dan Ali Syari’ati, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, terj. Rahmani Astuti,

- Bandung: Mizan, 1998, hlm. 42.
- 205 Ali Syari'ati, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1998, cet. VI, hlm. 42
- 206 *Rausyan fikr* adalah bahasa Persia yang artinya “pemikir yang tercerahkan”. Dalam terjemahan Inggris terkadang disebut *intellectual* atau *free thinkers*. *Rausyan fikr* berbeda dengan ilmuwan. Seorang ilmuwan menemukan kenyataan, seorang *rausyan fikr* menemukan kebenaran. Ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya, *rausyan fikr* memberikan penilaian seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal, *rausyan fikr* seperti para nabi—berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya, *rausyan fikr* harus melibatkan diri pada ideologi. Lihat Jalaluddin Rahmat, “Ali Syari’ati; panggilan untuk Ulil Albab”, Pengantar dalam Ali Syari’ati, *Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam*, Syafiq Bashri dan Haidar Baqir (penerjemah), Mizan, Bandung, 1994, hlm. 14–15.
- 207 Eko Supriyadi, “Memahami Islam sebagai Sebuah Gerakan Ideologis yang Mencerahkan dan Membebaskan”, *Book Review Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004*, dari Buku Ali Syari’ati, *Ideologi Kaum Intelektual*, Cet V, Dzukhijjah 1413, Bandung, Mizan, 1993.
- 208 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 425.
- 209 Agussalim Sitompul, “Sejarah Perjuangan HMI”, makalah dipresentasikan dalam Latihan Kader I HMI Korkom UIN SUKA, 23 September, 2004, hlm. 17
- 210 Ibid, hlm. 20.
- 211 Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi...*, hlm. 15.
- 212 Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 218.
- 213 Dahlan Ranuwiharjo, “Latar Belakang Berdirinya HMI”, makalah pada Seminar Sejarah HMI di Malang tanggal 27–30 November 1975, dalam Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam...*, hlm. 89.
- 214 Agussalim, Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI...*, hlm. 29.
- 215 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 432.
- 216 UUD 1945 yang dimaksud Lafran Pane di sini adalah UUD 1945 sebelum amandemen.
- 217 Lafran Pane, *Memurnikan Pelaksanaan UUD 1945*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit FKIS-IKIP Yogya, 1966, hlm. 1
- 218 Ibid, hlm. 1.
- 219 Ibid, hlm. 2.

220 Ibid, hlm. 2

221 Ibid, hlm. 2

222 Lafran Pane, “Perubahan Konstitusional”, hlm. 2

223 Ibid, hlm. 4.

224 Ibid, hlm. 4.

225 Ibid, hlm. 4.

226 Ibid, hlm. 4.

227 Ibid, hlm. 5.

228 Pada 16 Juli 1970, Lafran Pane menyampaikan pidato dalam rangka pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta—UNY) dalam sidang terbuka. Tahun itu adalah tahun yang sangat solid kekuasaan Orde Baru. Soeharto mempunyai kontrol penuh terhadap Angkatan Darat dan kepolisian. UUD 1945 dan Pancasila merupakan sesuatu yang sangat sakral saat itu. Namun, Lafran Pane menyatakan saat itu bahwa UUD 1945 bisa diubah. Pidato pengukuhan saat itu menimbulkan tanggapan keras dari hadirin, khususnya dari kalangan Tentara dan Korem. Pihak keamanan saat itu mulai berjaga-jaga untuk mengantisipasi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Pidato dipending, sempat muncul usulan pengukuhan Lafran Pane sebagai profesor dibatalkan. Rektor IKIP saat itu adalah Soetrisno Hadi. Terjadi perdebatan apakah sidang pengukuhan guru besar dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Akhirnya, Rektor UNY Soetrisno Hadi memutuskan bahwa pidato Lafran dilaksanakan tertutup. Wawancara penulis dengan Chumaidy Syarif Romas, 24 Juni 2008, di ruang dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jam 09.30–11.00 WIB.

229 Mengenai tujuan berbangsa dan bernegara ini, semuanya termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dahlan Thaib (Guru Besar Ilmu Tata Negara UII) mengatakan, “*Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, diamandemen, tapi batang tubuh boleh.*” Dalam diskusi bertajuk “Capres Independen”, 20 Januari 2009 di Aula Kahar Muzakir, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pernyataan ini sudah dinyatakan oleh Lafran Pane 39 tahun silam.

230 Jimly Asshiddiqie, “Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, Optimisme menuju Pencerahan Masa Depan Bangsa”. Bahan disampaikan pada acara Konferensi Mahasiswa Indonesia dengan tema “Kondisi, Harapan dan Kontribusi Nyata dari Pemuda”—BEM KM UGM. Makalah tidak bertanggal.

231 Lafran Pane, “Perubahan Konstitusional”, hlm. 13.

- 232 Ibid, hlm. 4.
- 233 Dahlan Ranuwihardjo, “50 Tahun Sejarah Perjuangan HMI Turut Menegakkan dan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, hlm. 5.
- 234 Lafran Pane, “Perubahan Konstitusional”, hlm. 4–5.
- 235 Ibid, hlm. 5.
- 236 Ibid, hlm. 5.
- 237 Ibid, hlm. 5.
- 238 Ibid, hlm. 6.
- 239 Ibid, hlm. 6.
- 240 Ibid, hlm. 6
- 241 Ibid, hlm. 15.
- 242 Ibid, hlm. 15.
- 243 Ibid, hlm. 15
- 244 Ibid, hlm. 16.
- 245 Maswadi Rauf, “Evaluasi Sistem Presidensial”, dalam Moh. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bakti, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2009, hlm. 23 Mengenai kelebihan dan kekurangan sistem presidensial dan sistem parlementer juga dapat dibaca dalam buku yang memuat tulisan para ahli Ilmu Politik dan Ilmu Tata Negara terkemuka ini.
- 246 Ibid, hlm. 24.
- 247 Ibid, hlm. 24.
- 248 Ibid, hlm. 24.
- 249 Ibid, hlm. 27
- 250 Ibid, hlm. 28
- 251 Lafran Pane, *Memurnikan Pelaksanaan UUD 1945*, hlm. 2.
- 252 Ibid, hlm. 2.
- 253 Ibid, hlm. 3.
- 254 Ibid, hlm. 3.
- 255 Ibid, hlm. 3.
- 256 Saafroedin Bahar (dkk), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 20–21.
- 257 Diskusi dengan saudara Ali, di Yogyakarta 07 Januari 2009.
- 258 Saafroedin Bahar (dkk.), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 73
- 259 Ibid, hlm. 11.
- 260 Soekarno, “Negara Harus Ber-Tuhan”, pidato dalam upacara

- penganugerahan Gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Ushuluddin Bidang Dakwah dan Gelar Guru Besar Kehormatan, gelar Pendidik Agung oleh IAIN, di Istana Negara, Jakarta 2 Desember 1964, diterbitkan oleh Departemen Agama RI, 1964, hlm. 28. Dalam banyak kesempatan, jika berbicara tentang Islam, Soekarno memang menekankan agar setiap Muslim memperluas cakrawala pemikirannya, tidak boleh sempit, pengetahuan tentang kebudayaan harus mendalam. Ia bahkan menantang, "Jika Islam benar-benar agama yang universal dan bisa diterapkan untuk setiap suku di dunia, maka seharusnya Islam juga bisa diterapkan di Amerika," hlm. 35. Prinsipnya, Soekarno ingin agar Islam itu ditunjukkan wajah universalnya, bukan sempit, apalagi menempatkan agama lain sebagai musuh yang harus diperangi.
- 261 Ibid, hlm. 29.
- 262 Saafroedin Bahar (dkk.), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 80– 81.
- 263 Dalam Debat Cawapres 2009 yang menghadirkan Wiranto, Prabowo Subianto, Boediono dengan tema "Pembangunan Jati Diri Bangsa". Wiranto mengatakan: "Nilai-nilai dari agama harus menjadi nilai dalam kehidupan berpolitik, agar kehidupan politik lebih bermoral dan berwibawa." Acara ini disiarkan secara langsung oleh Metro Tv dan Tv one, pada 23 Juni 2009.
- 264 Saafroedin Bahar (dkk), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 38–40
- 265 Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2001, hlm. 128.
- 266 Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir*, Bandung: Teraju, 2002, hlm. 87.
- 267 Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 436.
- 268 Ibid, hlm. 436.
- 269 Saafroedin Bahar (dkk), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 74.
- 270 Ibid, hlm. 74.
- 271 Ibid, hlm. 126.
- 272 Ibid, hlm. 345.
- 273 Mengenai apa yang dimaksud dengan Plutokrasi baca tulisan **Sudar D. Atmanto** (Wakil Direktur LP3ES) "**Ancaman Plutokrasi**", ia menjelaskan: "Robert Dahl dalam *Demokrasi dan Para Pengritiknya* mengatakan, sistem demokrasi seharusnya memberikan ruang kepada semua warga untuk berpartisipasi politik, tetapi kenyataannya sering dikuasai kelompok berkemampuan (plutokrasi). Ancaman plutokrasi di Indonesia disebabkan beberapa hal. *Pertama*, partai politik pascareformasi gagal

mengembangkan paradigma demokrasi model Indonesia. Yang berkembang adalah pemahaman demokrasi liberal atau demokrasi pasar. *Kedua*, Pemerintah dan elite parpol gagal membangun sistem demokrasi politik nasional yang memberi peluang (*affirmative action*) wakil masyarakat bawah di lembaga perwakilan politik. *Ketiga*, tidak berkembangnya kekuatan masyarakat dan *civil society organization* pascareformasi dalam mendesak sistem demokrasi politik yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat menengah-bawah. Sebentar lagi, pemilu presiden-wakil presiden dilaksanakan. Presiden terpilih nanti diharapkan mampu menyusun sistem demokrasi politik yang mempunyai ciri Keindonesiaan, yaitu yang mengakomodasi sistem keterwakilan politik semua komponen masyarakat, bukan bangunan demokrasi pasar liberal yang menyisihkan si lemah. Hasil pemilu legislatif yang menghasilkan wakil rakyat dari kelompok sosial tertentu harus direspons dengan melakukan komunikasi politik yang substansial antara presiden terpilih dan pimpinan parpol dengan agenda utama membangun demokrasi politik yang berorientasi kerakyatan, bukan *liberal-market oriented*. Tulisan ini untuk menanggapi proses Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009, dalam *Kompas*, 26 Juni 2009.

- * Makalah masukan dalam Rakertas Wantannas, 20–22 Februari 2008, di Jakarta.
- ²⁷⁴ Pembukaan UUD 1945 yang dibacakan adalah rumusan panitia sembilan tanggal 22 Juni 1945, yang telah disetujui pada Rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Naskah tersebut masih memuat tujuh kata yang pada 18 Agustus akan menjadi polemik hebat. Tujuh kata itu adalah (*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*).
- ²⁷⁵ Dr. Moewardi yang membacakan Pembukaan UUD 1945 adalah tokoh Nasionalis yang menjadi Ketua Barisan Pelopor, terbunuh secara misterius di Solo tahun 1947, tidak diketahui pihak mana yang melakukannya. Pihak komunis yang dituding pun tidak bisa dibuktikan, Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta*, hlm. 11
- ²⁷⁶ Dalam banyak referensi sejarah saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hanya dituliskan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Tanpa menjelaskan adanya sambutan Suwirjo sebagai ketua panitia dan Dr. Moewardi sebagai pembaca Pembukaan UUD. Sudi Silalahi dalam bukunya, *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka...*, hlm. 193–194, yang menceritakan tentang detik-detik menjelang proklamasi juga tidak menjelaskan hal tersebut. Lihat Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta*, hlm. 11.
- ²⁷⁷ Kalimat “**Atas Nama Bangsa Indonesia**” menunjukkan bahwa Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia bukan dirumuskan oleh PPKI, melainkan dirumuskan oleh segenap tokoh dari berbagai kalangan, termasuk pemuda. Sejak awal, kelompok pemuda menolak kemerdekaan diproklamkan atas nama PPKI, sebab BPUPKI dan PPKI adalah bentukan Jepang, sehingga ditakutkan ada kesan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang, hal ini tentu akan menjadi beban bagi generasi selanjutnya.

- 278 Nama Soekarno dan Mohammad Hatta yang ditulis (Soekarno-Hatta) juga tanpa mencantumkan jabatan keduanya sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Penulisan Soekarno-Hatta menggunakan tanda (-) dan bukan/menunjukkan kesatuan pikiran di antara kedua tokoh ini.
- 279 Ridwan Saidi dalam keterangannya menyangsikan bahwa yang datang kepada Hatta itu adalah perwira Jepang, melainkan adalah mahasiswa Prapatan 10 Piet Mamahit dan Iman Slamet yang disuruh oleh Latuharhary. Sehingga, cerita tentang “opsir” Jepang menjadi bahan lelucon Dr. Sujono Martosewojo, dkk yang dalam bukunya *Mahasiswa'45 Prapatan 10* mengungkapkan bahwa orang yang disangka opsir Jepang oleh Hatta itu tidak lain adalah Iman Slamet yang menemui Hatta bersama rekan seasramanya Piet Mamahit. Sujono ingin mengatakan bahwa tidak ada pertemuan Hatta dengan opsir Jepang tersebut, melainkan dengan Iman Slamet yang berpenampilan seperti opsir Jepang. Ridwan Saidi mengatakan, menghadapi dua kesaksian yang berbeda ini, sekali lagi tanpa menyudutkan siapa pun, kita berhadapan dengan pilihan di antara dua kesaksian itu, satu di antaranya pasti palsu. Siapa pun yang memberi kesaksian itu. Ini kenyataan pahit yang harus kita terima. Dua kesaksian itu berbeda diametral sehingga tidak dapat dipadukan, melainkan dipilih salah satu. Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta*, hlm. 45–46, sedangkan gerakan Latuharhary pada hlm. 44.
- 280 Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 253.
- 281 Ibid, hlm. 254. Pada wawancara Deliar Noer dengan Abdul Kahar Muzakkir (Desember 1956). Abdul Kahar Muzakkir mengatakan: “Maramis malah setuju 200 persen dengan tujuh kata tersebut.”
- 282 Ibid, hlm. 254.
- 283 Sumber lain itu didapatkan Deliar Noer dari buku Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, Jakarta: Hudaya, 1970, hlm. 38–39, dan Endang Saifuddin Anshari, *The Jakarta Charter 1945; The Struggle for an Islamic Constitution in Indonesia*, Kuala Lumpur, ABIM, 1979, hlm. 33.
- 284 Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 255. Perlu diingat bahwa Perubahan kata **Ketuhanan** menjadi **Ketuhanan Yang Maha Esa** diubah

pada pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 pada pertemuan informal yang dihadiri oleh (Hatta, Ki Bagoes Hadikoesumo, Kiai Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, Tengku Mohammad Hassan). Dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, ...*, hlm. 43. Ridwan Saidi dalam bukunya, *Status Piagam Jakarta*, hlm. 22 menambahkan bahwa Hatta menyarankan agar golongan Islam memperjuangkan syariat Islam melalui undang-undang saja. Maka, setelah rapat tersebut, rumusan Pancasila menjadi

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa, **menurut dasar** (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan (3) Persatuan Indonesia, dan (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Ki Bagoes Hadikoesumo meminta agar kata menurut dasar pada sila yang pertama dihapuskan, sehingga akhirnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab..., lihat Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta*, hlm. 18.

285 Fahri Ali, Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, hlm. 83.

286 Amien Rais mengatakan: “Tauhid dalam Islam adalah paling sentral dan paling esensial,” Amin Rais, *Arti dan Fungsi Tauhid*, Kumpulan Ceramah Terpilih Ramadhan dan Khotbah Jumat, *Menelan Cakrawala*, Yogyakarta: Shaladuddin Press, 1985, hlm. 9.

287 Amin Rais mengatakan, “Yang membedakan Islam dengan agama besar lainnya Kristen dan Buddhisme adalah sentralitas dan universalisme bagi pemeluknya. Menurut para pemeluk Kristen, agama yang diajarkan Yesus Kristus adalah universal, tetapi tidak bersifat sentral, dalam arti bahwa, seluruh dimensi kehidupan manusia Kristiani harus ditumpukan kepada Kristen. Kristen menerima dikotomi kehidupan temporal dan kehidupan spiritual berdasarkan doktrin dan praktik Kristiani yang terkenal *Render unto Ceasar the things which are Ceasar’s, and render unto God the things which are Gods*. Sementara Buddhisme tidak menunjukkan universalisme. Bagi para pengikut Buddha, agama Buddha juga dapat menerima dikotomi kehidupan dan dalam sejarah modern memang tidak terdapat contoh usaha pembentukan Negara Buddhis oleh para penganut agama Buddha. Lihat Fahri Ali, Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan baru Islam*, hlm. 256.

288 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, hlm. 66. Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI ke-3) yang juga putra dari Wahid Hasyim mengatakan, tanpa Pancasila Indonesia akan bubar (Wahid via Ramage, 2002: 80). Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ada beberapa alasan mengapa NU menerima Pancasila sebagai asas oganisasi. Salah satunya karena permintaan Soekarno pada ayahnya tahun 1945 di mana

dikatakan tidak ada pertentangan antara Islam dan Nasionalisme. Islam bisa berkembang dalam suatu negara Nasionalisme yang tidak didasarkan kepada Islam secara resmi (Wahid via Ramage, 2002: 95). Dengan wawasan nasional seperti itu, angkatan bersenjata dan mereka bersimpati dan menghargai posisi NU yang inklusif. Gus Dur juga mengatakan, NU menganut konsepsi Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945. NU telah menjadi perintis dalam masalah-masalah ideologi. Inilah kenyataan walau di seluruh dunia Islam masih ada masalah antara Nasionalisme dan Islam. Semua penulis Yahudi menganggap Nasionalisme semacam Sekularisme. Mereka masih belum mengerti bahwa Nasionalisme seperti yang ada di Indonesia tidak sekuler, melainkan menghormati peran agama (Wahid via Ramage, 2002: 95), dalam Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 76–77.

- 289 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, hlm. 66.
- 290 P. Oktavianus, *Mengapa Umat Kristen Menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal dalam Hidup Berbangsa, Bernegara, Bermasyarakat* (Malang: Departemen Literatur Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, 1985), hlm. 13.
- 291 Ibid, hlm. 16–20.
- 292 T.B. Simatupang, *Iman Kristen dan Pancasila*, hlm. 10
- 293 I Made Titib adalah alumni pendidikan doktor *Vedic Department*, Gurukula Kangri University, Haridwar, Utarancala, India (1993). Direktur Urusan Agama Hindu, Ditjen Bimas Hindu dan Buddha Depag RI (2002– 2004). Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Denpasar, Bali (2000–2002). Dekan Fakultas Brahma Vidya, Institut Hindu Darma Negeri Denpasar (2005–2009).
- 294 I Made Titib, “Peran Berbagai Metode, Media, dan Lokasi Spiritual dalam Menapak Suluk menuju Tuhan Yang Maha Esa dalam Perspektif Agama Hindu”, makalah dalam Seminar Nasional “Pencerahan Spiritual dan Kearifan Budaya sebagai Keniscayaan Perbaikan Sikap Mental dan Kesehatan Jasmani dalam Kerangka Keharmonisan Hubungan antara Manusia, Alam dan Tuhan”, di Jogja Expo Center, Yogyakarta 29 Desember 2005, hlm. 1–7. Penulis tidak menjabarkan 5 cara menuju Tuhan Yang Maha Esa di atas.
- 295 Syafruddin Prawiranegara, atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara (Banten, 28 Februari 1911–15 Februari 1989) adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda

saat Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Di masa kecilnya, ia akrab dengan panggilan “Kuding”. Dalam tubuh Syafruddin, mengalir darah campuran Banten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Menikah dengan putri bangsawan Banten, lahirlah kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama R. Arsyad Prawiraatmadja. Itulah ayah Kuding yang, walaupun bekerja sebagai jaksa, cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang Belanda ke Jawa Timur. www.wikipedia.org, lihat juga www.ranah-minang.net.

- 296 Surat Sjafruddin Prawiranegara kepada Soeharto, dalam Yudi Latif, *Inteligenia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 493.
- 297 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, hlm. 66.
- 298 Ibid, hlm. 45
- 299 Ibid, hlm. 45.
- 300 Ridwan Saidi, *Status Piagam*, hlm. 16
- 301 Pidato Radio Hatta 29 Agustus 1945, koran *Asia Raya*, 31 Agustus 1945, dalam buku Deliar Noer, *Partai-Partai Islam...*, hlm. 41.
- 302 Adapun strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut: Soekarno dan Hatta mendekati Teuku Mohammad Hassan (wakil Aceh) dan Wahid Hasyim untuk bersedia membujuk pendukung terkuat posisi Islam dalam PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Meskipun dari keluarga bangsawan, ikatan Hassan dengan masyarakat Aceh yang terkenal sebagai pembela Islam yang kuat diharapkan efektif membujuk Hadikusumo. Ternyata, baik Hasyim maupun Hassan tak bisa meyakinkan Hadikusumo. Upaya terakhir dilakukan oleh Kasman Singodimedjo yang mengajukan argumen situasi sangat kritis, yakni persatuan Islam sedemikian penting untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia yang terancam oleh kedatangan pasukan Sekutu, posisi Islam haruslah bersedia mengalah. Dalam draf UUD, dikatakan bahwa dalam waktu enam bulan, sebuah sesi khusus akan dilakukan untuk menyusun UUD yang lebih komprehensif. Karena percaya bahwa posisi Islam akan diajukan pada sesi berikutnya tersebut, Ki Bagoes Hadikoesumo akhirnya menerima pencoretan “tujuh kata” Piagam Jakarta. Namun, sesi khusus itu ternyata tak pernah diadakan karena adanya gelombang besar revolusi kemerdekaan (Panitia Peringatan Kasman, 1982: 128–130).
- 303 Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 255.
- 304 Ibid, hlm. 256.
- 305 Ibid, hlm. 256.
- 306 Terkait hubungan antara agama dan negara, Hatta mengulas Konferensi

- Meja Bundar antara Inggris dan kalangan Pergerakan Nasional (termasuk Muslim) India. Hatta mengatakan: “Partai Kongres India jangan buta saja melihat badannya sebagai wakil seluruh rakyat India, dan Partai Muslim India (yaitu Indian Muslim League) jangan buta saja pada Keislamannya,” dalam Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 152
- ³⁰⁷ Penulis berkesempatan mengunjungi Maluku selama 1 minggu antara 30 Mei–6 Juni 2009, dalam pidato Wakil Gubernur Maluku Said Assegaf di Aula Universitas Pattimura, Ambon, ia mengatakan bahwa “Masyarakat Islam dan Kristen di Maluku sudah sejak lama hidup bergotong-royong, saling bersaudara, saling membantu dalam membangun rumah ibadah.” (30 Mei 2009).
- ³⁰⁸ Menurut Deliar, pertikaian tersebut disebabkan oleh sikap Non-Muslim: seperti menghina Nabi Muhammad Saw, tahun 1918 dan 1931, serta masuknya para aktivis Bala Keselamatan ke dalam masjid tahun 1938. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 127, 131 dan 190. Lihat juga M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, Bandung, Pelajar Bulan Sabit, 1969.
- ³⁰⁹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 257. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud oleh Deliar Noer dengan akan berubahnya kembali pandangan Hatta, namun penulis menduga dalam hal keterpisahan antara hubungan agama dan negara. Sebab, pada akhirnya, Hatta justru sering menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu umum dan agama dalam diri setiap manusia Indonesia. Tentu, hal yang demikian juga berlaku bagi negara, asas negara tetap peradaban dan agama. Sebab, sekali lagi, Indonesia adalah negara yang ber-Tuhan.
- ³¹⁰ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 259. Penamaan Dwitunggal berasal dari Sukardjo Wirjopranoto, bekas pemimpin Parindra dan pemimpin harian *Asia Raya* di masa Jepang. Pada permulaan kemerdekaan, ia menjadi anggota PPKI.
- ³¹¹ Mohammad Natsir, *Capita Selecta 2...*, hlm. 293.
- ³¹² *Ibid*, hlm. 438.
- ³¹³ *Ibid*, hlm. 440.
- ³¹⁴ *Ibid*, hlm. 452.
- ³¹⁵ *Ibid*, hlm. 453.
- ³¹⁶ *Ibid*, hlm. 456–470.
- ³¹⁷ Muhammad Natsir, *Capita Selecta*, dalam Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Islam*, hlm. 79.
- ³¹⁸ *Ibid*, hlm. 442.
- ³¹⁹ *Ibid*, hlm. 489.

- ³²⁰ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, hlm. 388. Dengan Mosi Integral ini, Natsir berhasil mempersatukan Negara-Negara Bagian yang dibentuk oleh Van Mook ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Natsir juga mencetuskan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif seperti yang dikenal sekarang ini. Komitmen dan kesetiaan terhadap NKRI yang pertama kali dirumuskan oleh Natsir melalui *mosi integralnya*, kemudian oleh Pimpinan TNI dijadikan salah satu doktrin dalam *Sapta Marga TNI* yang masih diikrarkan hingga hari ini. Lihat wawancara Agus Basri dengan Mohammad Natsir dalam, *Mohammad Natsir: Politik melalui Jalur Dakwah*, Panitia Peringatan Seabad Mohammad Natsir; *Pemikiran dan perjuangannya*, Media Dakwah, Jakarta, 2008, hlm. iv.
- ³²¹ Maklumat Politik Pemerintah Indonesia, Jakarta 1 November 1945. Maklumat ini ditulis dan ditandatangani oleh Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, lihat Saafroedin Bahar (dkk), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI...*, hlm. 643–645.
- ³²² Endang Saifuddin Anshori, *Wawasan Islam*, hlm. 196.

Bab V

PEMBENTUKAN INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA MELALUI HMI

Persoalannya, bukan karena saya tidak setuju dengan Masyumi, yang telah berhasil mengkoordinir seluruh kekuatan umat Islam di bawah Masyumi, tetapi yang penting bahwa organisasi mahasiswa Islam yang akan didirikan itu (HMI) harus independen. (Lafran Pane)

LANDASAN PEMIKIRAN LAFRAN PANE TENTANG PEMBENTUKAN INTELEKTUAL MUSLIM

Pemikiran Lafran Pane dalam rangka pembentukan intelektual Muslim Indonesia muncul sewaktu akan mendirikan HMI tanggal 5 Februari 1947. Untuk merealisasikan gagasannya tersebut, dibutuhkan organisasi sebagai sarana atau alat untuk mencapainya. Terdapat beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran Lafran Pane dalam pembentukan intelektual Muslim Indonesia, yakni:

1. Wawasan Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan

Tatkala HMI didirikan tanggal 5 Februari 1947, HMI memiliki wawasan Keislaman, Keindonesiaan dan Kemahasiswaan dengan sembilan pemikiran awal, berikut penjelasan ketiga wawasan tersebut:

Pertama, Wawasan Keindonesiaan. Wawasan ini terlihat dari rumusan Tujuan HMI yang pertama, yaitu *mempertahankan negara Republik Indonesia, dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia*, yang memuat lima pemikiran: 1) Aspek politik, membebaskan bangsa Indonesia dari belunggu

penjajahan; 2) Aspek pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa; 3) Aspek ekonomi, menyejahterakan kehidupan rakyat; 4) Aspek budaya, membangun budaya-budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia; 5) Aspek hukum, membangun hukum yang sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.¹

Kedua, Wawasan Keislaman. Wawasan ini terlihat dari rumusan Tujuan HMI yang kedua, yaitu *menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam*, yang mengandung tiga pemikiran: 1) Pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan benar sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Hadits; 2) Keharusan pembaharuan pemikiran dalam Islam; 3) Pelaksanaan dan pengembangan dakwah Islam.²

Ketiga, Wawasan Kemahasiswaan. Wawasan ini menekankan bahwa HMI adalah organisasi kemahasiswaan yang berorientasi keilmuan, dengan kewajiban menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemajuan, bagi terwujudnya intelektual Islam. Pembangunan Indonesia merdeka jauh lebih berat daripada sekadar merebut kemerdekaan. Karena itu, perlu dibina dan dikembangkan calon cendekiawan yang memiliki pengetahuan luas di segala bidang dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Swt, bagi kepentingan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk tercapainya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.³

Wawasan Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Nurcholish Madjid mengatakan:

Karena **Keindonesiaannya**, maka para anggota HMI sebagai **insan akademis** yang harus pertama kali diharapkan untuk berkembang dan mengembangkan diri dengan meng-Indonesia secara penuh. Bagi para anggota HMI dan alumninya, tidak ada pilihan lain selain meng-Indonesia, begitu pula sebaliknya tidak ada pilihan bagi Indonesia selain menerima kehadiran HMI dan alumninya. **HMI adalah suatu gejala yang bertakwa kepada Allah**, malah

mungkin gejala Indonesia paling penting dengan dampak kesejarahan yang paling panjang bagi negara, bangsa dan tanah air.⁴

Ketiga wawasan ini terlihat sejak awal pendirian HMI. HMI menegaskan jati dirinya sebagai organisasi mahasiswa yang berasaskan Islam dan siap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mengangkat derajat dan martabat segenap bangsa Indonesia. Sebab itu, setiap kader HMI memiliki kewajiban menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemajuan.

Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip Agussalim Sitompul mengatakan:

Selain **Keindonesiaan** dan **Kemahasiswaan**, kualifikasi HMI sebagai gerakan pemuda adalah **Keislaman**. Maka, selain harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai Keindonesiaan dan Kemahasiswaan, HMI juga harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai Keislaman. Sekalipun dukungan pada nilai-nilai Keislaman itu tetap dalam format yang tidak dapat dipisahkan dari Keindonesiaan dan Kemahasiswaan. Artinya, penghayatan HMI pada nilai-nilai Keislaman tentu tidak dapat lepas dari lingkungan Keindonesiaan. Dan juga tidak lepas dari nilai Kemahasiswaan. Karena Keindonesiaannya itu, HMI tampil sebagai organisasi Islam dalam format dan citra yang sedikit banyak berbeda dari organisasi Islam dalam kawasan lingkungan budaya besar Arab.⁵

Ungkapan ini semakin menegaskan bahwa bagi HMI tidak ada dikotomi antara Keislaman, Keindonesiaan dan Kemahasiswaan. Keislaman dan Keindonesiaan HMI keluar dari tarikan napas yang satu. Hal ini juga diabadikan untuk *Wawasan Asasi Yayasan Wakaf Paramadina*, sebuah lembaga yang didirikan Nurcholish Madjid. Substansi yang ditulisnya untuk HMI dengan yang ditorehkannya di Yayasan Wakaf Paramadina adalah sama, perbedaannya hanya formulasi kata-kata saja, seperti dikutip berikut ini:

Sebanding dengan kesejajaran manunggal antara Keislaman dan Keindonesiaan, wawasan Keislaman pada hakikatnya menyatu dengan

wawasan asasi Keindonesiaan berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila, yang telah mantap sebagai nilai-nilai kesepakatan luhur bangsa Indonesia itu. Kesejajaran itu menyatakan diri dalam bentuk hubungan saling menopang antara keduanya, yaitu bahwa ajaran-ajaran agama menyediakan bahan yang kaya dan tak habis-habisnya untuk pengisian nyata nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila memberi kerangka konstitusional bagi pelaksanaan Keislaman di Indonesia sehingga semakin relevan dengan masalah bangsa dan negara. Lebih dari itu, orang-orang Muslim meyakini bahwa agamanya dapat menjadi sumber pengembangan pelestarian kelembagaan nilai-nilai Pancasila itu melalui berbagai pranata-pranata keagamaan dalam masyarakat. Karena itu Pancasila, khususnya dari segi nilai-nilai yang dikandungnya, akan lebih kukuh dan lestari melalui pelaksanaan ajaran-ajaran agama, secara benar, tepat, dan otentik, khususnya ajaran-ajaran Islam.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa HMI lahir dengan tujuan mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, kemudian Islam harus diposisikan sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi dan sumber nilai yang harus ditegakkan dalam diri setiap kader HMI dalam mencapai tujuan tersebut, sedangkan etos keintelektualan sebagai seorang mahasiswa menjadikan kader HMI sebagai sosok yang independen yang bebas dari kepentingan golongan. Atas dasar itu, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, ia mampu mewarnai serta memberikan sumbangan untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak berlebihan jika Jenderal Sudirman mengatakan, HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia.⁷ Inilah sesungguhnya landasan fundamental dari bangunan intelektual Muslim yang hendak dibentuk melalui HMI.

2. Kedudukan Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan yang Strategis⁸

Pendidikan tingkat universitas di Indonesia baru dibuka tahun 1920, yakni dengan berdirinya *Technise Hoogschool* (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Tahun 1924 menyusul berdiri *Rechts Hoogschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia, dan

tahun 1927 dibuka Stovia yang diubah menjadi *Geneeskundige Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Kedokteran di Batavia).⁹ Menyadari betapa strategisnya kedudukan perguruan tinggi, oleh badan-badan swasta di Yogyakarta didirikanlah Sekolah Tinggi Teknik Bandung di Yogyakarta, tanggal 17 Februari 1946. Kemudian Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra didirikan oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi “Gadiah Mada” tanggal 3 Maret 1946. Kemudian di Klaten dan Solo terdapat Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Hewan didirikan tahun 1946.¹⁰ Di Yogyakarta berdiri pula Akademi Ilmu Kepolisian.¹¹

Sejalan pertumbuhan perguruan tinggi maupun perkembangan situasi sosial-budaya, politik dan pendidikan, berdirilah organisasi mahasiswa lokal, seperti Persatuan Mahasiswa Indonesia Djakarta (PMID), Himpunan Mahasiswa Djakarta (HMD), Masyarakat Mahasiswa Bogor (MMB), Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS), Gerakan Mahasiswa Makassar (GMM), keenamnya berasal dari daerah federal (pendudukan Belanda), Persatuan Mahasiswa Djakarta (PMD—*Republikein*), Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan (PMKH) semula di Bogor lalu pindah ke Yogyakarta.¹² Bulan Oktober 1946 berdiri Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa di Yogyakarta waktu itu yang anggotanya meliputi mahasiswa BPT Gadiah Mada, STT, STI. Di Solo, tahun 1946, berdiri Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Baik PMY maupun SMI, keduanya berhaluan Komunis. Tidak satu pun di antara organisasi mahasiswa itu yang memberikan pendidikan agama Islam.

Letak strategis dari kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. **Pertama**, secara akademik, perguruan tinggi akan mencetak para sarjana, intelektual, calon-calon pemimpin bangsa, calon dosen, guru, para praktisi dan calon para pejabat. **Kedua**, dari

segi kelembagaannya, perguruan tinggi merupakan pusat kebudayaan dan sentrumnya pembaharuan dan kemajuan yang terus berkembang dalam masyarakat tanpa berhenti sesaat pun guna memenuhi kebutuhan kontemporer. *Ketiga*, dari segi kegiatan intra dan ekstra kemahasiswaan, dalam dunia kemahasiswaan di perguruan tinggi akan menjadi ajang pembentukan kader di kalangan mahasiswa, sesuai dengan kepentingan orientasi dari organisasi mahasiswa atau organisasi dan partai politik yang berada di belakangnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan menjadi ajang perebutan untuk menguasainya, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan golongan. Karena hal itu akan menentukan wajah Indonesia di masa mendatang. Ini adalah suatu keniscayaan. Menguasai perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan serta generasi muda, akan dapat menguasai masa depan suatu bangsa.¹³

Sebelum HMI berdiri tahun 1947, ada dua faktor yang sangat dominan telah menguasai dan mewarnai perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. *Pertama*, bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di dunia pendidikan umumnya dan perguruan tinggi khususnya adalah *sistem pendidikan Barat*, yang mengarah kepada sekularisme dengan mengabaikan peran agama dalam setiap aspek kehidupan. *Kedua*, adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Solo, yang keduanya ber-orientasi kepada Komunis¹⁴ Dalam konstelasi sosial-budaya dan politik tersebut, aspirasi Islam tidak kelihatan dalam kancah dunia perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Fahaman Komunisme telah mengepung perguruan tinggi/dunia kemahasiswaan dari dua arah. Realitas sosial-budaya dan politik tersebut telah: 1) menyebabkan timbulnya *krisis keseimbangan* yang sangat tajam di kalangan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan, yakni tidak adanya keselarasan, keseimbangan, keserasian antara akal dan kalbu, antara jasmani dan rohani,

serta antara pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat; 2) dilihat dari strategi perjuangan, hal itu sangat serius, masalah besar, mendasar, dan fundamental, dan sekaligus merupakan ancaman akan keberadaan Islam dan umat Islam di masa depan. Realitas sosial-budaya dan politik ini secara prinsip sangat bertentangan dengan Islam.

Melihat kenyataan di atas, atas prakarsa Lafran Pane, didirikanlah HMI tahun 1947. Kehadiran HMI sebagai organisasi Islam di tengah-tengah perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan merupakan satu fenomena baru dalam pergerakan Islam kontemporer di Indonesia. Selama itu, keanggotaan organisasi-organisasi Islam berasal dari desa dan kota, yang tingkat pendidikannya sangat beragam, bahkan ada yang tidak sekolah. Lain halnya dengan HMI yang tampil beda, dan baru pertama kali terjadi, organisasi Islam muncul di lingkungan perguruan tinggi dengan anggota terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang berbasis di kampus-kampus. Di tengah realitas sosial, budaya, dan politik seperti diungkap di muka, HMI yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa memainkan perannya yang sangat strategis, yaitu *pembentukan dan pembinaan mahasiswa kelas menengah masyarakat yang tinggal di kota, terdiri dari mahasiswa-mahasiswa sebagai calon cendekiawan dan pemimpin di masa mendatang, yang sehari-hari bergumul dan akrab dengan ilmu pengetahuan & teknologi sebagai penggerak modernisasi, yang didasari agama Islam dan dibingkai dengan ideologi Keislaman-Keindonesiaan.*¹⁵

Kedudukan itu terkait erat dengan HMI yang *berfungsi* sebagai organisasi kader, dan *berperan* sebagai organisasi perjuangan yang akan melakukan perubahan terhadap tatanan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kontemporer kini dan di sini, menuju masyarakat Indonesia Baru, yang bercorak khas Indonesia.

Pembentukan, pembinaan kelas menengah masyarakat kota yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, mempunyai pengaruh

yang sangat luas dan dalam terhadap proses modernisasi di Indonesia. Di kampus-kampus, mahasiswa aktif menimba dan menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk pengembangan dan pengabdian selanjutnya di tengah-tengah masyarakat modern.¹⁶

3. Hasil Keputusan Kongres I HMI

Tanggal 30 November 1947 tentang Usaha

Kongres I HMI tanggal 30 November 1947 diikuti oleh 4 Cabang yakni: Yogyakarta, Solo, Klaten dan Malang. Jumlah anggota HMI saat itu berkisar antara 100 orang dari yang sebelumnya hanya 15 orang. Salah satu agenda utama dalam kongres tersebut adalah pengesahan Anggaran Dasar HMI, yang tadinya bersifat sementara. Tentang Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada PB HMI. Anggaran dasar yang disahkan itu belum ada muqaddimahnya sebagaimana Anggaran Dasar HMI saat ini. Anggaran dasar itu hanya memuat 12 pasal ketentuan yang mengatur segala hal tentang HMI, terdapat juga nama HMI versi Inggris, yaitu: *Indonesian Moslem Students League*. Mengenai Usaha terdapat dalam Pasal V Anggaran Dasar yang berisikan tiga hal:

- a. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam agama Islam bagi mahasiswa khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.
- b. Menghidupkan jiwa Islam dalam hati rakyat.
- c. Bekerja bersama-sama dengan lain-lain golongan dalam mengejar maksud dan tujuan, baik dalam maupun luar negeri.¹⁷

Jika dilihat dari makalah Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul, maka tanggal 30 November termasuk dalam fase berdiri dan pengokohan HMI (5 Februari–30 November 1947).¹⁸ Tiga poin di atas menunjukkan usaha HMI untuk memperkokoh

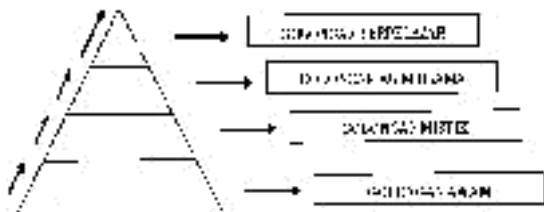
eksistensinya sebagai organisasi mahasiswa berasaskan Islam. Hal ini sangat penting mengingat saat itu pemahaman keagamaan di kalangan anggota HMI maupun masyarakat masih sangat kurang. Selain itu, usaha di atas juga untuk memperkokoh posisi HMI di tengah polarisasi politik, baik polarisasi politik di antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, maupun polarisasi politik di antara golongan Islam itu sendiri.

Sementara usaha ketiga yang berbunyi “*Bekerja bersama-sama dengan lain-lain golongan dalam mengejar maksud dan tujuan, baik dalam maupun luar negeri*”, menjelaskan bahwa HMI siap bekerja sama dengan kelompok mana pun asalkan untuk kepentingan nasional, yakni mempertahankan kemerdekaan serta mengangkat harkat dan derajat rakyat Indonesia. HMI juga siap bekerja sama dengan pihak mana pun untuk tujuan menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Berdasarkan landasan ini, dapat dipahami bahwa HMI lahir untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok. Sebab, yang dibutuhkan saat itu adalah persatuan antar-kelompok untuk mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan itulah yang seharusnya menjadi tujuan bersama. Dalam konteks ini, HMI mengambil peran dengan berusaha menciptakan intelektual-intelektual Muslim yang nantinya akan berperan sebagai pemersatu umat dan bangsa.

4. Tulisan Lafran Pane: “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia”

Tulisan Lafran Pane tersebut membagi masyarakat Islam Indonesia ke dalam 4 (empat) golongan:¹⁹



Melalui pendekatan piramidal ini, terlihat bagaimana kondisi riil umat Islam Indonesia dalam pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama Islam ketika HMI belum berdiri. Pendekatan ini pula menunjukkan bagaimana umat Islam Indonesia bergerak dari suatu tingkatan pemahaman ke tingkat pemahaman berikutnya. Adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Islam, Lafran Pane berpendapat bahwa di dalam masyarakat segala sesuatu saling memengaruhi, antara satu kelompok manusia memengaruhi manusia lain. Masyarakat dipengaruhi manusia, begitu pula sebaliknya.²⁰

Berdasarkan landasan ini, terlihat jelas cita-cita Lafran Pane agar umat Islam dapat menjadi golongan intelektual. Lafran Pane melalui HMI ingin membentuk intelektual-intelektual Muslim yang siap berjuang untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dalam masyarakat Islam.

5. Tujuan HMI yang Diputuskan pada Kongres IV HMI di Bandung 09–15 Oktober 1955

Kongres tersebut telah menetapkan Tujuan HMI dengan redaksi sebagai berikut: *Ikut mengusahakan terbentuknya manusia akademis, pencipta, pengabdian yang bernapaskan Islam.*²¹

Kongres IV HMI di Bandung tanggal 09–15 Oktober 1955 berlangsung hanya dalam hitungan hari setelah pemilu pertama di Indonesia berlangsung tanggal 29 September 1955.²² Sehingga dapat dibayangkan tingginya konstelasi politik yang melingkarinya. Posisi HMI saat itu sudah cukup matang, sebab sejak tahun 1950-an telah dilaksanakanlah usaha-usaha konsolidasi organisasi, di samping itu dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Yogyakarta 20–25 Desember 1949, HMI telah diikrarkan sebagai satu-satunya organisasi bagi mahasiswa Islam Indonesia.²³

Oleh sebab itu, Kongres IV HMI tersebut juga banyak

menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas, di antaranya rumusan tujuan organisasi sebagaimana tertulis di atas. Inilah Tujuan HMI yang jiwanya hingga sekarang masih terus bertahan dalam formulasi Tujuan HMI dari kongres ke kongres.²⁴ Sebuah tujuan yang menginginkan pembentukan mahasiswa menjadi manusia seutuhnya (*insan kamil*), yakni akademis, pencipta, pengabdian dan bernapaskan Islam. Inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam pembentuk-an intelektual-intelektual Muslim melalui perkaderan di HMI.

6. Tujuan HMI yang Diputuskan pada Kongres VIII HMI di Solo 10–17 September 1966

Kongres VIII HMI di Solo 10-17 September 1966 telah menetapkan Tujuan HMI dengan redaksi sebagai berikut: *Membina Insan Akademis Pencipta dan Pengabdian yang bernapaskan Islam menuju terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.*²⁵ Tujuan ini melengkapi Tujuan HMI yang diputuskan pada Kongres IV HMI di Bandung 09–15 Oktober 1955 dengan perubahan kata “Ikut mengusahakan terbentuknya manusia akademis” menjadi “Membina Insan Akademis”. Kemudian, pada bagian akhir ditegaskan visi perjuangan HMI “menuju terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt”.

Semestinya, menurut konstitusi, Kongres VIII HMI dilaksanakan pada September 1965. Namun, karena situasi saat itu tidak memungkinkan, lantaran HMI tengah menghadapi tuntutan pembubaran oleh PKI cs, maka kongres tersebut diundur hingga setahun kemudian, pada September 1966. Kongres VIII ini merupakan kongres yang paling meriah dari kongres sebelumnya. Kongres ini dihadiri oleh 84 Cabang dari 90 Cabang HMI di seluruh Indonesia. Saat penutupan, semua terharu, termasuk masyarakat Kota Solo, karena para peserta kongres menginap di rumah-rumah warga di Solo.²⁶

Sebagaimana dijelaskan di atas, kongres ini merevisi

AD/ART HMI. Tambahan kalimat di ujung redaksi “menuju terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt” mengisyaratkan HMI melalui perkaderannya siap menciptakan intelektual-intelektual untuk mewujudkan masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt, lepas dari Orde Lama menuju Orde Baru.

7. Rumusan Tujuan HMI yang Diputuskan pada Kongres IX HMI di Malang 03–10 Mei 1969

Kongres tersebut telah menetapkan rumusan Tujuan HMI sebagai berikut: *Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.*²⁷

Menurut penulis, ditambahkannya kata “bertanggung jawab atas terwujudnya” dalam rumusan Tujuan HMI di atas merupakan konsekuensi dari semakin dewasanya usia HMI dan semakin banyaknya alumni HMI yang berperan di berbagai lapangan pengabdian. Kemudian, status sebagai orang terdidik yang memiliki ilmu serta kemampuan organisatoris menuntut kader HMI untuk ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt. Hal ini bisa dilihat dari kolom berikut ini:

TAHUN	USIA	MASA
1947 – 1955	Usia anggota HMI saat itu berkisar antara 25–33 tahun	Pendidikan, Perkaderan
1969	Usia anggota/alumni HMI saat itu berkisar antara 47–50 tahun	Pengabdian. Artinya, dalam tempo 22 tahun, HMI tentu sudah banyak menghasilkan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, dan telah menduduki pos-pos penting di Pemerintah Pusat dan Daerah, baik sebagai intelektual, pengusaha, kyai maupun politisi, dan lain-lain. Sebagai contoh, Ir. Sanusi (alumni HMI) telah menjadi Menteri Perindustrian, bahkan dia juga yang menutup Kongres VIII HMI di Solo. ²⁸

Tujuan ini semakin menyempurnakan dua tujuan sebelumnya dengan penekanan pada kata-kata “bertanggung jawab atas terwujudnya”. Landasan-landasan yang telah disebut di atas tentu mengalami proses perkembangan dari kongres ke kongres, namun substansi tetap sama.

Jika kita telaah secara saksama, akan sangat terlihat dari berbagai landasan tersebut cita-cita besar HMI untuk mengupayakan pembentukan intelektual Muslim Indonesia yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt. Tanggung jawab ini bisa dilihat dalam tiga hal:

- a. Bagi alumni HMI yang sudah berkiprah dalam berbagai medan pengabdian dituntut untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.
- b. Bagi HMI secara organisasi dan anggota-anggotanya juga bertanggung jawab untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah, khususnya alumni HMI dalam rangka terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.
- c. HMI bertanggung jawab untuk terus melaksanakan kaderisasi guna menciptakan intelektual-intelektual Muslim Indonesia, bahkan senantiasa mengevaluasi *output* dari perkaderan HMI dengan terus becermim dari kualitas serta kiprah alumni yang dihasilkan oleh HMI.

Pada era tahun 1960-an ini sudah dapat dirasakan kiprah alumni-alumni HMI di berbagai medan perjuangan. Jika kita hayati dengan saksama, ingatan kita akan kembali pada 5 Februari 1947, yakni saat-saat Lafran Pane dan kawan-kawannya mendirikan HMI di Yogyakarta. Dalam konteks ini, Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul dalam sebuah kesempatan menjelaskan:

Lafran Pane memang telah mendirikan HMI, ia juga telah memberikan dasar-dasar pegangan bagi generasi selanjutnya, namun dalam proses pembentukan intelektual Muslim sepenuhnya dilaksanakan oleh HMI melalui sistem perkaderan, bukan oleh Lafran Pane sendiri. Namun, Lafran Pane merupakan sosok yang sepanjang hayatnya senantiasa terlibat dalam proses-proses perkaderan dalam rangka pembentukan intelektual Muslim tersebut.²⁹

PERAN HMI DALAM PEMBENTUKAN INTELEKTUAL MUSLIM

Pemikiran Lafran Pane tentang pembentukan intelektual Muslim Indonesia sudah barang tentu merupakan pemikiran HMI, sebab antara Lafran Pane dan HMI tentu tidak bisa dipisahkan. Pembentukan intelektual Muslim Indonesia tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Lafran Pane seorang diri. Sebab itulah, Lafran Pane mendirikan HMI agar usaha untuk mencapai gagasan tersebut dapat terlaksana secara organisatoris dan teratur.

HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Pembentukan kader di HMI dilakukan melalui lembaga pendidikan perkaderan. Untuk mewujudkan target-target perkaderan yang ingin dicapai, maka dirumuskanlah pola perkaderan di HMI. Oleh sebab itu, penting untuk diketahui sejarah perumusan pola perkaderan di HMI dalam rangka pembentukan intelektual Muslim Indonesia.

Sampai tahun 1958, pelaksanaan perkaderan di HMI seperti sekarang ini belum dijamah. Mengapa demikian? Alasannya sederhana, karena dalam usia HMI 11 tahun, anggota HMI belum banyak. Akan tetapi, memasuki tahun 1959, Ismail Hassan Metareum (almarhum) sebagai Ketua Umum PB HMI 1957–1960 menyadari bahwa di masa mendatang, di samping anggota HMI pasti akan tambah banyak, juga HMI harus mempunyai anggota yang terdidik, sehingga merupakan SDM yang handal. Pembicaraan awal tentang perkaderan di HMI dimulai pada Konferensi HMI di Taruan Giri Puncak tanggal 20–24 Juli 1959, yang dipimpin Ismail Hassan Metareum sebagai ketua dan Murtadha Makmur sebagai sekretaris.

Konferensi Taruna Giri melahirkan konsep pendidikan kader di HMI, yang waktu itu disebut Pendidikan Dasar. Berdasarkan data yang dapat dihimpun, menghasilkan fakta bahwa konsep pendidikan dasar hasil Konferensi Taruna Giri itulah yang dikembangkan sehingga terbentuk pola dan sistem perkaderan HMI seperti yang sekarang.³⁰

Setelah pelatihan ALOKA di India, diperoleh masukan-masukan untuk mengembangkan pendidikan dasar di HMI. Konsultasi yang dilaksanakan PB HMI di Gunung Leutik Bogor bulan Oktober 1961 diadakan penyempurnaan konsepsi training HMI. Bersamaan dengan perumusan *Kepribadian HMI* pada Musyawarah Nasional HMI di Pekajangan-Pekalongan pada 23–28 Desember 1962, dirumuskan pula *Metode Training HMI*. Acuan ini memuat tentang pengertian kader, tujuan pendidikan/latihan, sistem/metode training, klasifikasi kader, waktu dan penyelenggaraan training, tingkatan-tingkatan training yaitu *Basic Training*, *Intermediate Training*, dan *Advanced Training*.³¹

Perkaderan HMI berkembang terus yang ditandai dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan seperti Seminar Nasional Metode Training di Kaliurang tahun 1963. Tahun 1967 di Pekalongan, diselenggarakan Seminar Nasional Perkaderan. Juga di Pekalongan berlangsung tahun 1970 berlangsung Senior Course Nasional. Seminar Kader Nasional diadakan di Jakarta tahun 1973. Lokakarya Perkaderan digelar di Kaliurang tahun 1975. Tahun 1981, di Jatiwaringin diadakan Seminar Perkaderan HMI, disusul dengan Lokakarya Perkaderan HMI di Surabaya tahun 1983, di Mataram tahun 1986. Kembali ke Surabaya tahun 1988 diselenggarakan Sarasehan dan Lokakarya (Saloka) Perkaderan. Lokakarya Perkaderan diadakan di Jakarta tahun 1997. Perkembangan Perkaderan HMI menjadi wacana sejak Kongres VIII HMI tahun 1966 sampai Kongres XXI HMI tahun 1997. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa perkembangan, penyempurnaan per -

kaderan HMI terus berlanjut. Strategi ini diperlukan karena perubahan situasi, ruang, waktu serta tantangan yang terus berubah dengan cepat sesuai dengan tuntutan zaman.³²

Untuk memahami dan melaksanakan perkaderan di HMI, telah dirumuskan berbagai aspek sebagai pedoman melaksanakan perkaderan di HMI, yaitu: 1) Pengertian Kader, 2) Arah Perkaderan, 3) Training, 4) Jenjang Training, 5) Kurikulum Training, 6) Instruktur Training, 7) Metode Training, 8) Organisasi Training, 9) LPL, 10) Evaluasi Perkaderan, 11) *Follow Up* Training, 12) Wujud profil kader yang diinginkan. Tiga dari 12 aspek tersebut, di sini akan diuraikan secara singkat:

1. Pengertian Kader

Terlihat dalam tubuh organisasi, kader memiliki fungsi tersendiri yaitu sebagai tenaga penggerak organisasi, sebagai calon pemimpin, dan sebagai benteng organisasi. Secara kualitatif, kader mempunyai mutu, kesanggupan bekerja dan berkorban yang lebih besar daripada anggota biasa. Kader itu adalah anggota inti. Kader merupakan benteng dari “serangan” luar serta penyelewengan dari dalam. Ke dalam tubuh organisasi, kader merupakan pembina yang tidak berfungsi pimpinan. Kader adalah tenaga penggerak organisasi, yang memahami sepenuhnya dasar dan ideologi perjuangan. Ia mampu melaksanakan program perjuangan secara konsekuen di setiap waktu, situasi, dan tempat. Terbawa oleh fungsinya itu, untuk menjadi kader organisasi yang berkualitas, anggota harus menjalani pendidikan, latihan, dan praktikum. Pendidikan kader harus dilaksanakan secara terus-menerus dan teratur, rapi dan berencana, yang diatur dalam pedoman perkaderan.³³ Kongres VIII HMI tahun 1966 merumuskan pengertian kader adalah tulang punggung organisasi, pelopor, penggerak, pelaksana, penyelamat cita-cita HMI masa kini dan yang akan datang di mana pun berada, tetap berorientasi kepada asas dan syariat Islam.³⁴

Definisi dan pengertian di atas setidaknya terdapat tiga ciri yang terintegrasi dalam diri seorang kader. *Pertama*, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi. Kader mengenal aturan permainan organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti NDP dalam pemahaman yang integralistik dengan Pancasila maupun UUD 1945. Dari segi operasionalisasi organisasi, kader selalu berpegang dan mematuhi AD/ART HMI, pedoman perkaderan, dan ketentuan lain. *Kedua*, seorang kader mempunyai komitmen yang tinggi secara terus-menerus, konsisten dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. *Ketiga*, seorang kader memiliki bakat dan kualitas sebagai tulang punggung yang mampu menyangga kesatuan kumpulan manusia yang lebih besar. Jadi, fokus seorang kader terletak pada kualitas. Kader HMI adalah anggota HMI yang telah menjalani proses perkaderan sehingga memiliki ciri kader, dengan integritas kepribadian yang utuh, beriman, berilmu, dan beramal saleh sehingga siap mengemban tugas dan amanah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁵

2. Arah Perkaderan

Mengingat fungsi HMI sebagai organisasi kader, maka seluruh aktivitasnya harus dapat memberi kesempatan berkembang bagi kualitas-kualitas pribadi anggota-anggotanya. Sifat ke-kaderan HMI dipertegas dengan Tujuan HMI dalam Pasal 5 Anggaran Dasar HMI. Tujuan HMI ini telah memberi tuntun-an, ke mana perkaderan HMI diarahkan. Anggota HMI, yang merupakan *human material* yang dihadapi HMI untuk dibina dan dikembangkan menjadi kader HMI, adalah mereka yang memiliki kualitas-kualitas sebagai: a) *mahasiswa*, yaitu mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan intelektual tertentu, calon sarjana, dan potensial menjadi inteligensia, b) *kader* yaitu mereka yang memiliki kesediaan untuk berlatih dan mengembangkan kualitas-kualitas pribadinya guna menyong-

song tugas masa depan umat dan bangsa Indonesia, c) *pejuang*, yaitu mereka yang ikhlas, bersedia berbuat dan berkorban guna mencapai cita-cita umat Islam dan bangsa Indonesia pada waktu sekarang dan yang akan datang.³⁶

Inilah yang dijadikan landasan, bahan, bagaimana pendidikan kader di lingkungan HMI dilaksanakan dan diarahkan. Hakikatnya, tugas pokok HMI adalah tugas perkaderan. Semua kegiatan HMI hendaklah menggambarkan fungsi kekaderan-nya. Arti strategis bagi pembinaan kader HMI adalah memberikan wawasan kepemimpinan bagi kader-kader HMI sesuai dengan fungsi dan peranannya. Guna melaksanakan fungsi kekaderan HMI, maka diperlukan media sebagai instansi perkaderan, yang dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu *training* dan *aktivitas*.

Berarti, kegiatan HMI adalah merupakan *pendidikan kader* dengan sasaran anggota-anggota HMI dalam hal:

- a. *Watak dan kepribadiannya*, yaitu dengan memberi kesadaran beragama, akhlak dan watak. Itu berarti harus menjelmakan seorang individu yang beriman, berakhlak luhur, memiliki watak yang otentik serta memiliki pengabdian dalam arti yang paling hakiki.
- b. *Kemampuan ilmiahnya*, yaitu dengan membina sese-orang hingga memiliki pengetahuan (*knowledge*) serta kecerdasan (*intelligence*) dan kebijaksanaan (*wisdom*).
- c. *Keterampilannya*, yakni kepandaian menerjemahkan ide dan pikiran dalam praktik.³⁷

Dengan terbinanya tiga sasaran tersebut, maka terbinalah insan cita HMI yang beriman, berilmu dan beramal. Tujuan HMI telah memberikan gambaran tentang insan cita HMI.

Tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai oleh HMI menjadi garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan dan aktivitas perkaderan HMI. Konsekuensi dari tujuan itu,

maka dengan sendirinya tujuan merupakan ukuran/norma dari semua kegiatan HMI. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan HMI benar-benar relevan dengan tujuannya. Bagi anggota, tujuan organisasi merupakan titik pertemuan persamaan kepentingan yang paling pokok dari seluruh anggota. Oleh karena itu, peranan anggota dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar dan menentukan.

Untuk terbinanya insan yang berkualitas lima tersebut sebagai tujuan arah perkaderan HMI, maka kegiatan HMI dapat dikelompokkan ke dalam dua macam kegiatan, yaitu: a) kegiatan kampus perguruan tinggi, b) Kegiatan non-kampus perguruan tinggi. Peranan HMI untuk selalu berpartisipasi dan selalu berusaha membina dan menjadikan suatu perguruan tinggi yang benar-benar mampu menciptakan manusia akademis yang *qualified* terletak dalam aspek ini. Aktivitas perguruan tinggi diusahakan untuk mampu menopang tercapainya Tujuan HMI. Oleh karena itu, penguasaan kampus dalam arti positif dan konstruktif adalah termasuk perjuangan HMI. Berarti, antara HMI dan perguruan tinggi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara ideal, adalah bagaimana usaha HMI agar perguruan tinggi menjadi “sekolah HMI”, dalam arti mampu mencetak insan yang dicita-citakan HMI. Selama perguruan tinggi yang ideal yang dimaksudkan belum bisa tercapai, maka kegiatan training sebagai “sekolah HMI” adalah tugas/kegiatan yang paling pokok untuk mencapai Tujuan HMI, seperti tersebut dan dirumuskan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar tentang usaha. Dalam bentuk operasional usaha-usaha tersebut, lebih lanjut dijabarkan dalam Program Kerja Nasional (PKN).³⁸

3. Wujud Profil yang Diinginkan

Bertolak dari landasan-landasan, arah dan tujuan perkaderan HMI, maka akhir kegiatan perkaderan diarahkan dalam rangka membentuk profil kader yang ideal, yaitu Muslim intelektual

profesional. Tiga aspek yang ditekankan dalam usaha pelaksanaan kaderisasi yaitu pembentukan integritas watak dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektualitas atau kemampuan ilmiahnya, pengembangan kemampuan profesional atau keterampilannya, harus terintegrasi secara utuh.³⁹ Secara spesifik, wujud profil kader HMI adalah seperti tergambar dalam Tujuan HMI, yaitu 5 kualitas insan cita HMI. Lima kualitas insan cita tersebut seperti diterangkan dalam *Tafsir Tujuan HMI*. Kelima kualitas insan cita itu semuanya mengandung 17 butir indikator, sebagai wujud profil seorang kader HMI, sebagaimana yang dicita-citakan.⁴⁰ Lima kualitas insan cita HMI sebagai kelompok inteligensia atau intelektual kader HMI dapat digambarkan dengan: a) tipe konseptor, b) tipe *solidarity maker*, c) tipe *problem solving*, d) tipe administrator atau pelaksana, dan e) tipe negarawan. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan tipe-tipe kader yang dibutuhkan pada masa kini dan masa mendatang. Hal ini sebagai petunjuk pada penentuan arah dan sistem perkaderan HMI. Untuk itu, harus diperhatikan potensi-potensi pribadi anggota untuk mendapatkan penyaluran bimbingan, peningkatan dan pengembangan yang efektif.⁴¹

HMI adalah organisasi kader, dan sifat kekaderan HMI dapat dipahami dari status HMI sebagai organisasi mahasiswa, yang dipertegas dalam Tujuan HMI. Terikat fungsi HMI sebagai organisasi kader dan dengan rumusan Tujuan HMI, HMI bukanlah organisasi massa, tetapi sebaliknya HMI adalah lembaga pendidikan. Anggota HMI selain mendapatkan ilmu di perguruan tinggi sebagai “almamater pertama” anggota HMI, juga mendapatkan ilmu di lembaga pendidikan HMI sebagai “almamater kedua”. Ilmu-ilmu yang diperoleh di HMI, seperti keorganisasian, ke HMI-an, strategi taktik, tidak dipelajari di perguruan tinggi. Ada dua ciri yang membedakan latihan kader HMI dengan organisasi lain. Dua ciri yang dimaksud adalah ditinjau dari materi latihan kader HMI, yaitu

Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan Sejarah HMI. “Kedua materi ini sangat khas dan memberi warna tersendiri di HMI,” kata Berliana Kartakusumah tatkala diwawancarai di Bandung.⁴² Pendapat yang sama dikemukakan Sakib Mahmud, salah seorang perumus NDP tahun 1969 yang hingga kini masih aktif memberi materi pada training-training HMI.⁴³ Perkaderan HMI ditempatkan sebagai unggulan dari organisasi HMI yang dinilai besar pengaruhnya dalam sejarah pembentukan cendekiawan Muslim di Indonesia. Ditunjukkan baik orang dalam maupun luar HMI bahwa kader-kader HMI telah menyebar ke berbagai lapisan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dinilai hal ini terjadi karena *output* HMI berupa alumni relatif besar jumlahnya. Mereka tergabung dalam Keluarga Alumni HMI (KAHMI). Meski begitu, antara HMI dengan KAHMI tidak ada hubungan organisatoris. Hubungan aspiratiflah yang menautkan kedua organisasi ini. Apabila diamati jumlah alumni HMI yang menyebar ke berbagai lapisan kehidupan masyarakat, barangkali ini bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan perkaderan HMI. Akan tetapi, teori ini masih perlu diuji lebih lanjut.

Selain hal-hal yang bersifat keorganisasian dan teknis operasional, perkaderan HMI pun telah merumuskan hal-hal yang bersifat filosofis dan ideologis, untuk menciptakan dan memperkuat terbentuknya profil kader HMI, sehingga setiap kader HMI memiliki kualitas tertentu serta memiliki kelebihan dari kader organisasi lain, sebagai garansi obyektif untuk mampu menjalankan misi perjuangannya di tengah-tengah dinamika kehidupan bangsa.

Hal-hal yang bersifat filosofis dan ideologis itu adalah: Selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI sejak tahun 1957 hingga tahun 2004, HMI memiliki 12 naskah atau doktrin perjuangan, yang meliputi: 1) *Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI* (tahun 1947)⁴⁴ yang juga disebut sebagai ideologi HMI, 2) *Tafsir Asas* (tahun 1957),⁴⁵

3) *Kepribadian HMI* (tahun 1962),⁴⁶ 4) *Garis-Garis Pokok Perjuangan* (tahun 1966),⁴⁷ 5) *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan* (NDP) (tahun 1969),⁴⁸ 6) *Gambaran Insan Cita HMI* (penjelasan Tujuan HMI) tahun 1969,⁴⁹ 7) kemudian disempurnakan menjadi *Tafsir Tujuan* (tahun 1971),⁵⁰ 8) *Tafsir Independensi* (tahun 1971),⁵¹ 9) *Nilai Identitas Kader* (NIK) sebagai pengganti NDP (tahun 1986),⁵² 10) *Memori Penjelasan tentang Pancasila sebagai Dasar Organisasi HMI* (tahun 1986),⁵³ 11) *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan* (NDP) sebagai pengganti nama NIK (1999),⁵⁴ dan 12) *Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Asas HMI* (tahun 1999).⁵⁵

12 landasan perjuangan ini lazim disebut sebagai ideologi HMI. Seperti ditulis A. Dahlan Ranuwihardjo, SH, ideologi adalah: “Seperangkat ajaran atau gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara masyarakat di dalam segi-seginya serta yang disusun di dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya.”⁵⁶ Maka,

dari keterangan-keterangan di atas terlihat dengan jelas, betapa besar peran dan andil HMI dalam usaha pembentukan profil kader HMI sejak dulu, sekarang dan bahkan untuk masa mendatang sesuai dengan perkembangan masa. Sebagian dari hasil tersebut bisa kita lihat dalam laporan majalah *Madina* tentang 25 Tokoh Islam Damai Indonesia. Dari 25 tersebut, HMI menyumbang 13 nama (*bercetak tebal*), berikut 25 nama tokoh tersebut berdasarkan abjad: AA Gym, **Ahmad Syafi’i Ma’arif**, **Amien Rais**, **Anies Baswedan**, Ary Ginanjar, **Arifin Ilham**, **Arief Rahman**, **Azymardi Azra**, Deddy Mizwar, **Djohan Effendi**, Emha Ainun Najib, Haidar Bagir, Helvy Tiana Rosa, **Imam Prasodjo**, **Jalaluddin Rahmat**, **Jilmly Asshiddiqie**, **Komaruddin Hidayat**, **M. Dawam Rahardjo**, **M. Syafi’i Anwar**, Masdar Farid Mas’udi, Mochtar Pabottinggi, Musthafa Bisri, M. Quraish Shihab, Siti Musdah Mulia, Ulil Abshar Abdalla.⁵⁷ Dalam catatan redaksi majalah ini dikatakan:

Dari 25 nama yang tersusun ini, tentu orang bisa tidak setuju sepenuhnya. Tentu bisa ada kesalahan di sana-sini, tapi kami percaya sebagai potret umum ini sudah cukup memadai.... Bila pembaca berkeberatan silakan berkomentar...

Penulis sendiri berpendapat nama-nama yang muncul di atas terlalu Jakarta *centris*, nama-nama lain seperti Amin Abdullah, Abdul Munir Mul Khan, Machasin, Yudian Effendi, Hamim Ilyas, Syamsul Anwar, Dochak Latief, Damarjati Supadjar, Chumaidy Syarif Romas, Agussalim Sitompul, Zuly Qodir, Hairus Salim, dan lain-lain secara karya juga layak. Mungkin ada baiknya tajuknya bukan 25 Tokoh Islam Damai, tapi 500 Tokoh Islam Damai. Dari sisi domisili memang Jakarta masih menjadi pusat segala hal. Satu hal yang patut kita renungi mengapa yang bertransmigrasi hanya masyarakat kecil yang kurang lahan? Ada baiknya juga ada transmigrasi kaum intelektual ke daerah-daerah agar pencerahan merata. Dalam konteks ini, penghargaan layak kita ajukan kepada mereka-mereka yang berdakwah hingga ke pelosok dan pedalaman, meski sama sekali tidak terekam oleh media.

Sebagai bagian akhir dari sub-bab ini, perlu kita renungkan ungkapan Nanang Tahqiq, Dosen IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, alumni McGill Kanada, memulai kritiknya kepada HMI dengan mengatakan:

Ada tiga kekuatan kunci saling bertaut telah menciptakan HMI begitu memukau, masing-masing **Latihan Kader (LK)**, **tradisi intelektual**, dan **independensi**. Ketiga kekuatan itu merupakan kesatuan tidak tercerai dan utuh, elemen-elemen pokok yang saling menunjang dalam membangun basis perkaderan yang tangguh. Lewat bahasa HMI, ketiga unsur tersebut ditujukan demi meraih Tujuan HMI. Demikian lewat ketiga unsur itu, HMI kemudian dipertimbangkan sebagai gerakan pembaharu. Setelah 49 tahun sejak HMI didirikan 5 Februari 1947, ada baiknya dukungan HMI ditimbang-timbang lagi, sembari mengukur apresiasi maupun prestasi, mengingat banyak perubahan terjadi. Teristimewa ketiga kunci kekuatan itu sudah lagi tidak efektif.⁵⁸

PROFIL KADER HMI

Pembentukan intelektual Muslim Indonesia yang dilakukan melalui perkaderan di HMI merupakan suatu proses panjang yang dilaksanakan berdasarkan landasan-landasan seperti disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Sesungguhnya, perkaderan diarahkan kepada pencapaian Tujuan HMI. Tujuan HMI merupakan suatu cita-cita dan idealisme yang harus dicapai, sehingga seluruh gerak langkah organisasi diarahkan guna tercapainya Tujuan HMI. Maka, untuk menggambarkan pembentukan intelektual Muslim, dimulai dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, dengan melihat Tujuan HMI, yaitu: “*Terbinanya insan akademis pencipta, pengabdian yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt*”.⁵⁹ Dengan Tujuan HMI tersebut, Lafran Pane dan teman-temannya ketika mendirikan HMI menyadari betapa pentingnya sumber daya manusia dalam kehidupan suatu bangsa.

Kedua, Tafsir Tujuan HMI. Tujuan HMI di atas setelah ditafsirkan disebut “Tafsir Tujuan”. Tafsir Tujuan memiliki lima kualitas Insan Cita. Bertolak dari landasan-landasan, arah dan tujuan perkaderan HMI, maka akhir kegiatan perkaderan diarahkan dalam rangka membentuk profil kader yang ideal, yaitu Muslim intelektual profesional. Tiga aspek yang ditekankan dalam usaha pelaksanaan kaderisasi yaitu pembentukan integritas watak dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektualitas atau kemampuan ilmiahnya, dan pengembangan kemampuan profesional atau keterampilannya, harus ter-integrasi secara utuh.⁶⁰ Secara spesifik, wujud profil kader HMI adalah seperti tergambar dalam Tujuan HMI, yaitu 5 kualitas insan cita HMI. Lima kualitas insan cita tersebut seperti diterangkan dalam *Tafsir Tujuan HMI*. Kelima kualitas insan cita itu semuanya mengandung 17 indikator, sebagai wujud profil seorang kader HMI, sebagaimana yang dicita-citakan⁶¹.

Ketiga, Lima Kualitas Insan Cita mengandung tujuh belas indikator adalah sebagai berikut:

1. *Kualitas Insan Akademis*

- Berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, berpikir rasional, obyektif, dan kritis.
- Memiliki kemampuan teoretis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.
- Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoretis maupun teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.

2. *Kualitas Insan Pencipta: Insan Akademis, Pencipta*

- Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekadar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
- Bersifat independen dan terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian, potensi kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah.
- Dengan ditopang kemampuan akademisnya, dia mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran Islam.

3. *Kualitas Insan Pengabdian: Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian*

- Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau untuk sesama umat.
- Sadar membawa tugas insan pengabdian, bukannya hanya

membuat dirinya baik, tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik.

- Insan akademis, pencipta dan pengabdian adalah yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesamanya.
4. *Kualitas Insan yang bernapaskan Islam: Insan Akademis, pencipta dan pengabdian yang bernapaskan Islam*
- Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian, Islam telah menapasi dan menjiwai karyanya.
 - Ajaran Islam telah berhasil membentuk *unity personality* dalam dirinya. Napas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari *split personality*, tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai Muslim. Insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya dalam pembangunan nasional bangsa ke dalam suksesnya perjuangan umat Islam Indonesia dan sebaliknya.
5. *Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur diridhoi Allah Swt:*
- Insan akademis, pencipta dan pengabdian yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur diridhoi Allah Swt.
 - Berwatak sanggup memikul akibat-akibat yang dari perbuatannya sadar bahwa menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
 - Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis.

- Rasa tanggung jawab, takwa kepada Allah Swt, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Swt.
- Korektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “*khalifah fil ard*” yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.⁶²

Pada pokoknya, insan cita HMI merupakan *man of future*, insan pelopor, yaitu insan yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Ideal tipe dari hasil perkaderan HMI adalah *man of inovator* (duta-duta pem - baharu). Penyuaran *idea of progress* insan yang berkepribadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan bertakwa kepada Allah Swt. Mereka itu manusia-manusia yang beriman, berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (*insan kamil*).

Keempat, ciri Kader HMI, selain 17 indikator yang terdapat dalam 5 kualitas insan cita yang harus dijadikan cermin bagi setiap anggota HMI, HMI juga memiliki 5 ciri yang sekaligus menjadi kualifikasi dari kader-kader HMI. Kualifikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kader HMI merupakan hamba Allah yang juhud dan tawadhu’, taat beribadah, sehingga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik secara individual, komunal ataupun secara organisasi.
2. Sebagai pemuda, kader HMI memiliki sifat kejuangan yang senantiasa peka dan militan menjawab kehidupan lingkungan sekitarnya, sehingga mampu tampil dalam usaha

- amar ma'ruf nahi munkar* secara ikhlas.
3. Sebagai warga masyarakat, kader HMI adalah seorang warga negara yang memiliki *akhlakul karimah* dalam ke-hidupan sehari-hari, sehingga menjadi panutan masyarakat sekitarnya.
 4. Sebagai mahasiswa, kader HMI adalah seorang yang berpendidikan tinggi, tekun belajar, sehingga dapat me-ngem-bangkan kemampuan ilmiahnya yang selalu didaya-gunakan bagi lingkungannya.
 5. Sebagai pemimpin, kader HMI adalah seorang yang bersifat amanah, adil, benar, jujur, tanpa pamrih serta penyeru, pengayom, penyantun, sekaligus cerdas, berilmu dan terampil.⁶³

Kelima, potensi dan profil seorang kader HMI adalah sebagai *pemuda*, sebagai *mahasiswa*, sebagai *calon sarjana*, sebagai *calon intelektual* dan sebagai *calon pemimpin bangsa*. Potensi ini menjadikan HMI sebagai organisasi yang kuat karena senantiasa tanpa henti memproduksi calon-calon intelektual Muslim Indonesia.

Keenam, anggota HMI adalah *moral force* atau kekuatan moral, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* guna menciptakan lingkungan sendiri sesuai dengan ajaran Islam dan tuntutan moral.

HMI secara institusi dan segenap anggota maupun alumni HMI merupakan *moral force* atau kekuatan moral dalam masyarakat. Anas Urbaningrum⁶⁴ memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud HMI sebagai *moral force*. Anas menuliskan:

Sebagai organisasi mahasiswa, HMI bukan dibentuk sebagai organisasi politik, dan karena itu tidak berorientasi pada politik. Perjuangan HMI adalah perjuangan kebenaran, atau nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, maka HMI tepat disebut sebagai kekuatan moral dan pantulan suara nurani masyarakat. Akan tetapi, sebagai organisasi yang telah mengalami perkembangan sedemikian rupa, termasuk persentuhannya dengan dinamika

politik bangsa, maka setiap sikap dan perilaku HMI akan tetap mempunyai nilai dan resonansi politis. HMI yang postur awalnya sebagai moral force mau tidak mau juga dihitung sebagai political force. Kondisi demikian menuntut HMI untuk mengaktualisasi potensinya itu, baik moral force maupun political force. Tanpa aktualisasi keduanya, bukan hanya akan mubazir, tetapi juga akan menyebabkan proses pembusukan secara internal. Aktualisasi potensi tersebut tentunya bersifat outward looking, sehingga akan meminimalisir terjadinya konflik internal atau menumpuk kolesterol institusi yang akan membuat kinerja dan kerja-kerja organisasi menjadi lamban. Akan tetapi, yang harus ditegaskan bahwa awal keberangkatan HMI adalah sebagai kekuatan moral. Ini yang tidak boleh luntur atau hilang. Artinya, setiap bentuk aktualisasi kekuatan politiknya harus tetap dalam kerangka moralitas itu. Bahkan, parameter perjuangan HMI tetap pada etika, moralitas dan nilai-nilai kebenaran. Aktualisasi kekuatan politik yang lepas dari kerangka moralitas tidak dapat dibenarkan.⁶⁵

Sebab itulah, Imam Ghazali sejalan dengan pendapat filsuf-filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Mereka berpendapat, antara moral dan politik tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan dua saudara kembar. Moral sangat dibutuhkan untuk menilai baik dan salah dari suatu tindakan dan keinginan seseorang dalam masyarakat. Sementara, politik juga dibutuhkan untuk mengatur masyarakat sesuai dengan aturan-aturan moral yang diterima dan disepakati masyarakat. Imam Ghazali tidak menyebutkan antara moral dan politik secara terpisah, tetapi secara konsekuen dia mengemukakan satu padan kata, *siyasatul-akhlaq*. Hingga tercapai suatu moral politik dalam wujud politik moral.⁶⁶ Untuk itu, kesempurnaan moral menjadi tugas yang paling substansial. Moral agama tidak hanya mengatur hubungan sesama manusia, tapi juga hubungan dengan Pencipta, yang keduanya harus memiliki keseimbangan. Keseimbangan seperti ini sering dilupakan hingga manusia terjebak pada rutinitas spiritual, atau sebaliknya rutinitas duniawi. Rutinitas yang menyimpang tadi pada awalnya bersifat pribadi. Selanjutnya, akan menjadi persoalan besar manakala berada pada seseorang yang dipercaya menjadi

wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif maupun sebagai eksekutif.

Karena itu, HMI, termasuk anggota dan alumni sebagai *moral force*, senantiasa harus bersikap kritis terhadap lingkungan di mana pun berada. HMI harus dapat menciptakan kondisi, atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan jangan malah turut serta hanyut terhadap kondisi yang tidak baik. Komitmen HMI adalah kepada kebenaran, keadilan, serta kejujuran. Hal ini sangat penting bagi seorang calon intelektual, sebab kekuatan pikiran saja tidak cukup tanpa didukung oleh kekuatan moral. Justru sangat berbahaya jika seseorang memiliki ilmu pengetahuan tanpa moral.

Ketujuh, anggota HMI adalah *avant garde* atau kader pelopor yang dapat mengambil inisiatif, prakarsa pertama dalam setiap situasi dan kondisi, untuk memenuhi tuntutan yang senantiasa terus berubah.

Kepeloporan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tiga persyaratan: 1) Memiliki ilmu pengetahuan (intelektual), 2) Memahami masalah secara menyeluruh hingga ke akarnya, 3) Memiliki kemauan, keinginan untuk melaksanakan.

Kepeloporan tidak akan efektif jika dilakukan seorang diri. Sebaliknya, kepeloporan akan memiliki daya dorong yang sangat kuat dan cepat jika dilakukan secara bersama-sama melalui organisasi. Di sinilah keuntungan dari anggota HMI, sebab mereka memiliki organisasi, sehingga setiap usulan bisa dijadikan kebijakan, tentunya melalui serangkaian perdebatan dan uji materi. Namun, saat itulah, seorang pelopor sejati akan diuji kekuatan intelektual sekaligus keteguhan mentalnya, maka seorang kader HMI haruslah kuat dan matang secara intelektual dan mental.

Sebab, posisi HMI sebagai agen perubahan terletak pada kedudukannya sebagai pemikir, pelopor yang siap dengan segala pemikiran, konsep disertai dengan pelaksanaannya untuk

menjawab dan mengantisipasi segala persoalan yang timbul dalam masyarakat yang datang silih berganti tanpa berhenti. Maka, terbawa kepada arus HMI sebagai kader pelopor, kader HMI harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas dirinya secara berkesinambungan. Karena dengan kualitas diri itulah salah satu penyangga yang kokoh dapat terus mengemban tugasnya sebagai agen perubahan. Karena masyarakat yang dihadapi senantiasa tumbuh dan berkembang serta mengalami perubahan dan berbagai problem kemasyarakatan. Di sini, diperlukan kesiapan kader HMI yang selalu prima. Kader adalah ujung tombak dalam satu organisasi, terlebih-lebih HMI yang berperan sebagai organisasi perjuangan.⁶⁷

Kedelapan, anggota HMI adalah ulama intelektual dan intelektual ulama, yaitu anggota HMI yang memiliki pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum bagi sarjana umum, dan sebaliknya memiliki pengetahuan yang seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama bagi sarjana agama.⁶⁸

Secara substansi, intelektual dan ulama memiliki makna yang sama. Intelektual berasal dari bahasa Prancis, *intellect - tuels*.⁶⁹ dan Ulama merupakan jamak dari kata arab 'alim-'aalimaani-'ulamaa, keduanya memiliki arti sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Namun, bagi kebanyakan orang, intelektual diartikan sebagai orang yang lulus dari sekolah umum dan belajar ilmu-ilmu umum, sedangkan ulama adalah mereka yang lulusan madrasah, pesantren. Akan tetapi, pemahaman tersebut juga tidak salah mengingat dalam masyarakat kita memang masih ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, bahkan ada juga yang lebih mementingkan salah satu di antara keduanya. Sebagai contoh sederhana, antara madrasah dan sekolah sebenarnya artinya sama secara bahasa, yaitu tempat orang belajar. Namun, yang satu berbahasa Arab dan satunya berbahasa Indonesia, jadi hanya perbedaan istilah saja.

Siswanto Masruri menjelaskan: “Ada beberapa penulis (Barat) seperti Karel A. Steenbrink, dan lain-lain yang berpendapat bahwa predikat intelektual memiliki hubungan yang erat dengan lembaga pendidikannya. Ini misalnya diakui oleh seorang sosiolog. Lewis A. Coser dalam sebuah karyanya menyatakan bahwa penulis-penulis tertentu memiliki kecenderungan menggolongkan semua orang yang berpendidikan universitas ke dalam kelompok intelektual.”⁷⁰

Prof. Dr. Deliar Noer sangat memahami arah pikiran masyarakat Indonesia tersebut, sehingga ia mengatakan:

Himpunan Mahasiswa Islam (yang berdiri 5 Februari 1947) bertanggung jawab kepada generasi yang lalu dan akan datang. Ia menjadi penghubung antara dua golongan penting masyarakat Indonesia, golongan intelektual dan golongan ulama. Kedua golongan ini pada akhirnya harus bertemu dan berasimilasi sehingga hanya terdapat satu tipe manusia kelak yang berpengetahuan dan tahu akan kehidupan beragama.⁷¹

Berdasarkan pernyataan genius Deliar Noer ini, semakin teranglah visi HMI untuk senantiasa melaksanakan perkaderan demi terbentuknya intelektual-intelektual Muslim Indonesia. Sebab, waktu terus berjalan, tantangan tidak semakin ringan, sementara waktu kian terbatas. HMI dituntut untuk semakin tajam membaca keadaan dan senantiasa menginternalisasi nilai-nilai Keindonesiaan, Keislaman, Kemahasiswaan ke dalam jiwa kader-kadernya.

Apabila Tujuan HMI yakni “*Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernapaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt*” dengan 5 kualitas insan cita serta 17 indikator ditambah dengan 5 ciri kader HMI sudah tercapai dalam diri setiap anggota, aktivis, dan kader HMI, maka terciptalah profil kader HMI yang utuh, sehingga setiap anggota, aktivis, dan kader HMI menjadi seorang yang memiliki kapasitas sebagai *intelektual ulama* dan *ulama intelektual* sekaligus menjadi *moral force* atau kekuatan moral yang berperan sebagai *avant*

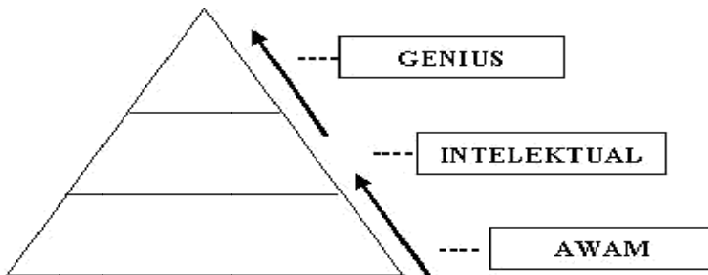
garde atau kader pelopor, yang dapat mengambil setiap inisiatif, prakarsa pertama, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, untuk menjawab berbagai tantangan yang terus mengalami perubahan, datang silih berganti tanpa berhenti.⁷²

Dengan profil kader HMI seperti tergambar di atas, maka diharapkan setiap anggota, kader, aktivis, dan pengurus HMI akan dapat melaksanakan peran HMI sebagai organisasi perjuangan, yaitu suatu usaha yang teratur, tertib, dan terencana, untuk mengubah suatu kondisi yang buruk ke kondisi yang baik, sesuai dengan tuntutan kontemporer, sehingga tercipta suasana baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang di-lakukan sepanjang masa, sehingga tercapailah tujuan akhir HMI.

Oleh sebab itu, semua indikator yang ada dalam 8 *item* di atas adalah materi yang harus diterapkan dalam diri seorang kader HMI dalam rangka mencapai tujuan. Maka, jika semua indikator tersebut sudah dimiliki oleh semua kader HMI, dengan sendirinya pembentukan intelektual Muslim Indonesia akan terpenuhi, atau dengan kata lain berdasarkan berbagai keterangan dan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa profil kader HMI sebangun dengan profil intelektual Muslim Indonesia.

INDONESIA GENIUS 2020–2025

Ali Syari'ati, ahli Sosiologi Islam⁷³ mengemukakan teori *Piramida Sosiologi Kebudayaan*. Disebut teori Piramida, karena jenjang pemikiran manusia itu digambarkannya secara piramidal biasa.



Bagaimana gambaran dan pemahaman Piramida Sosiologi Kebudayaan ini, Syari'ati melukiskannya sebagai berikut: Pertama-tama, marilah kita arahkan piramida kita ke Zaman Pertengahan Barat pada abad ke-11, 12, 13, 14, 15 dan 16—yaitu abad-abad sebelum zaman modern—dan membahas tiga lapisan pokok piramida itu dari puncak sampai ke dasar yang mewakili lokasi tiga kelas sosial fundamental dari masyarakat Barat dalam sejarah.

Bagian bawah piramida, yang merupakan bagian terbesar dan paling tebal, mewakili massa rakyat. Lapisan tipis yang terletak di atas lapisan bawah mewakili kaum cendekiawan dalam setiap zaman dalam sejarah. Lapisan di atas lapisan kaum cendekiawan adalah lapisan bintang-bintang dalam masyarakat Barat. Kita namakan mereka bintang-bintang karena dua alasan. *Pertama*, jumlah mereka di dalam masyarakat terlalu sedikit untuk dapat membuat suatu kelas sosial. Berada di puncak piramida, mereka adalah manusia-manusia unik, pemikir-pemikir unik, genius-genius unik dalam masyarakat, yang harus kelap-kelip secara sporadis, sebelum mereka dapat membentuk suatu kelompok dalam hierarki sosial. *Kedua*, sejarah menunjukkan bahwa cara berpikir mereka senantiasa berbeda dari cara berpikir massa yang awam maupun cara berpikir kaum intelektual.⁷⁴

Dengan jalan mengungkapkan pikiran-pikiran baru, serta membangun kerangka masyarakat yang tidur dengan gebrakan-gebrakan baru, berbagai motivasi, pandangan dan semangat baru, mereka bermaksud memperkenalkan cara berpikir baru pada zaman mereka. Mereka juga individu-individu yang menyebabkan masyarakat mengalami perubahan-perubahan transisional dalam pandangan hidup, moralitas, kebudayaan, sains, dan kehidupan sosial; memancar di atas lapisan-lapisan lainnya, terutama sekali pada akhir suatu periode sejarah, mereka akan membicarakan datangnya suatu era baru.

Pemikiran-pemikiran, ideologi dan visi mereka semuanya meramalkan kehadiran suatu periode sejarah yang baru. Betapapun terasingnya mereka dilihat dari zaman mereka sendiri, namun kemunculan mereka, perjuangan, dan misi mereka, bersamaan dengan kebutuhan akan perubahan sosial dan revolusi, disertai gagasan-gagasan mereka yang telah meluas—semua ini mau tidak mau akan—menjuruskan masyarakat ke arah zaman yang telah diramalkan.

Akan tetapi, dalam waktu seratus atau dua ratus tahun mereka bakal membentuk kelas intelektual dari periode baru. Para bintang yang semula pernah melawan dan memberontak pada pendirian awam dan kecenderungan-kecenderungan intelektual di zamannya, yang dikejar-kejar, dikutuk dan dihukum karena keyakinan-keyakinan mereka yang asing kemudian membentuk kelas intelektual yang mapan pada periode sejarah yang baru. Dan ini merupakan suatu pertanda bahwa periode lama segera berakhir, karena masyarakat telah memasuki suatu periode peralihan baru.

Suatu periode sejarah tertentu terdiri dari gabungan antara semangat dan kehidupan. Ketika periode yang baru tumbuh, ia akan menumbuhkan piramidanya sendiri yang baru. Bila periode tersebut mencapai pertumbuhannya yang sempurna, ia akan memungkinkan munculnya bintang-bintang di puncak piramida. Berbeda dengan kaum cendekiawan yang sudah mapan, bintang-bintang itu akan bergerak memperkenalkan pemikiran dan manusia periode berikutnya yang segera datang. Sebagai akibatnya, akan terjadi perjuangan baru antara para bintang baru dan kaum cendekiawan yang sudah mapan pada waktu itu.

Perjuangan ini akan berakhir bagi kemenangan para bintang yang menandai turunnya zaman baru yang akan berkembang. Sebagaimana biasanya, mereka nantinya akan membentuk lapisan cendekiawan atau lapisan intelektual dari periode yang telah mereka ramalkan sebelumnya. Seperti inilah cara

piramida itu mengulangi dirinya dalam setiap periode sejarah.⁷⁵

Tingkat yang *paling tinggi* adalah orang atau manusia genial, yang lahir atau muncul satu abad mendahului zamannya, karena pemikirannya sangat cemerlang atau genial. Apa yang belum terpikirkan manusia 100 tahun sebelumnya, orang genial ini berkat kecerdasan pikirannya yang luar biasa, dia sudah dapat menangkapnya, sehingga dapat menjanjikan masa depan lebih dini, sebelum ada orang yang mampu memprediksi-kannya. Kemampuan dan kapasitasnya untuk menjangkau masa depan sangat luar biasa. Orang yang berprofil seperti ini sangat terbatas sebagai *pribadi unggul*, yang punya potensi. Kedudukan dan posisi orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi oleh Allah Swt secara khusus disebutkan dalam al-Quran bahwa “*Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, yaitu mereka yang menuntut ilmu beberapa derajat.*” Kedudukan maupun posisi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan yang tidak memiliki ilmu akan berbeda, kapan dan di mana pun berada, dan tidak bisa akan sejajar. Karena orang yang berilmu itu mempunyai kelebihan dan keistimewaan, yaitu berupa kecerdasan yang akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola dan mengubah dunia ini untuk kemaslahatan umat manusia. Di sini, pentingnya pembangunan kultur kader intelektual HMI sebagai kader bangsa, bagaimana dengan berkat ilmunya akan memimpin suatu bangsa yang besar menuju masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt guna menghadapi tantangan global yang sangat kompetitif.

Sejalan dengan teori Syari’ati, Max Weber menganggap bahwa keunggulan personal sangat menentukan, dan akan menampilkan ketokohan, yang memiliki *kekuatan nilai (religious)* dan *kekuatan intelektual*. Weber memandang agama adalah suatu penerimaan total manusia, yang meliputi aspek *kepercayaan (belief)*, *upacara keagamaan (ritual)*, *pengalaman ke - agama an (experience)*, dan pencipta tatanan masyarakat

(*community*).⁷⁶

Sedang Emile Durkheim memandang bahwa agama adalah sebagai pengungkapan ikatan-ikatan sosial (fungsional). Bentuk pengungkapannya berupa *kekuatan sosial*, dan masyarakat yang ideal. Agama merupakan inti bagi masyarakat, juga sebagai *perilaku kolektif* yang bisa menimbulkan/mendorong terciptanya hubungan baik antarindividu maupun antargrup/ kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁷⁷

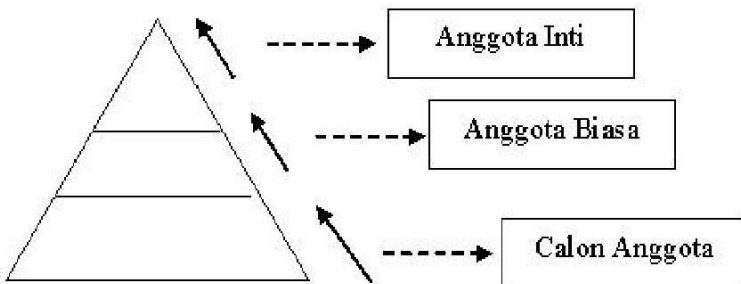
Lapisan kedua dari piramida tersebut adalah *intelektual*, yang dapat merumuskan masalah-masalah bangsa sekaligus, serta dapat memberikan pemikiran yang bersifat *solutif, teknis, dan strategis*. Adapun *lapisan ketiga* merupakan bagian terbesar dan paling tebal mewakili massa rakyat,⁷⁸ atau golongan awam, yang tidak memiliki kemampuan yang berarti, karena lapisan ini tidak memiliki basis keilmuan yang memadai bahkan kosong sama sekali. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan mereka terbatas dalam segala hal, atau rezim yang zalim membuat mereka tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri.

Menurut Ali Syari'ati, bagi tercapainya individu yang genial, diperlukan suatu *proses transendensi*, yaitu *pendakian Piramida Pemikiran*. Pendakian *tahap pertama* dilakukan dengan meningkatkan keilmuan golongan awam secara gradual, sehingga mencapai seperti kapasitas golongan intelektual. Pendakian *berikutnya*, jika memungkinkan dapat ditingkatkan menjadi individu yang genial yang terdapat pada posisi puncak. Begitu pula golongan intelektual yang sudah memiliki potensi, memiliki kesempatan pertama untuk dapat menjadi individu yang genius. Pendakian gradual tersebut akan mampu meng-angkat golongan awam, terlebih-lebih golongan intelektual, menjadi individu-individu yang unggul, yang punya potensi menjadi pribadi-pribadi yang genius.

Proses transendensi tidak cukup hanya dengan sikap mantap, dan juga perubahan yang diharapkan bukan saja

perubahan *mental-spiritual*, tetapi juga *perubahan intelektual*. Inilah tuntutan *Rekayasa Sosial* atau perencanaan yang direncanakan secara signifikan, sehingga individu-individu yang genial dapat muncul di setiap zamannya, untuk dapat memberikan responsi terhadap berbagai problematika bangsa *di sini dan kini*, atau suatu jawaban kontemporer. Berarti pula proses transendensi adalah untuk menimbulkan *etos atau semangat intelektualisme*. Di sini, pendidikan mempunyai posisi yang strategis. Jika “Rekayasa Sosial” *proses transendensi* atau *pendakian Piramida Pemikiran* ini diterapkan di HMI, sangat memungkinkan, karena baik ditinjau dari persyaratan administrasi maupun akademik sangat mendukung.

HMI memiliki potensi besar untuk menciptakan iklim *intelektualisme*, dengan melihat indikator-indikator pen-dukung: (1) Anggota HMI memiliki dasar keilmuan dan sejarah intelektual, sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa, (2) Anggota HMI semuanya adalah mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan sebagai calon sarjana dan intelektual, (3) HMI sejak awal memiliki wawasan keintelektualan, dengan ke-sadaran bahwa pembaharuan pemikiran sebagai keharusan sejarah, (4) HMI telah memiliki pola perkaderan yang relatif memenuhi syarat. Dalam kaitan ini, patut dipikirkan, untuk kepentingan perhitungan kekuatan dan memudahkan pem-binaan anggota, perlu diadakan klasifikasi anggota atas dasar fungsi, ketaatan pada disiplin organisasi dan mutu serta pengabdian pada usaha organisasi.



Dengan penggolongan ini, maka *proses transendensi* yang akan dilaksanakan HMI, arah pembinaannya tampak jelas, sehingga munculnya pribadi-pribadi unggul dapat dilakukan melalui “Rekayasa Sosial”. Seperti halnya disebutkan di atas, maka anggota-anggota HMI pun, dalam *proses transendensi*, tidak sekadar mantap melaksanakannya, tetapi juga terjadinya *perubahan intelektual* yang semakin tinggi.

Seperti dikatakan Nurcholish Madjid, sebagai umat yang relatif masih muda, maka kaum Muslimin Indonesia hanya memiliki tradisi intelektual yang relatif muda pula, jika tidak disebut lemah. Sebagai konsekuensi dari adanya kemiskinan intelektual ini adalah rendahnya kemampuan kita dalam memberi respons pada tantangan zaman itu secara kreatif dan bermanfaat. Kita dituntut memiliki kesuburan intelektual. Kekayaan dan kesuburan intelektual inilah yang disebut suatu “tradisi intelektual”.⁷⁹

Maka, “tradisi intelektual” di kalangan HMI harus diciptakan, agar mampu memberi respons pada setiap tantangan zaman yang datang secara terus-menerus, silih berganti. Pembentukan “tradisi intelektual” termasuk di tubuh HMI tidak akan terwujud seketika, melainkan tumbuh dan berkembang dalam waktu yang panjang. Selama masa pertumbuhan dan perkembangan itu, terjadi proses penumpukan dan akumulasi pengalaman masa lampau. Suatu “tradisi intelektual” tidak akan memiliki cukup vitalitas jika tidak memiliki keotentikan sampai batas-batas tertentu. Sedangkan keotentikan itu antara lain dapat diperoleh dari adanya akar dalam sejarah. Berdasarkan analisis ini, tradisi intelektual Islam di negeri ini (termasuk di kalangan HMI) tidak akan, atau sulit sekali, memiliki vitalitas, jika tidak memiliki kesinambungan dengan pemikiran masa lampau.⁸⁰

Pemikiran masa lampau yang dimaksudkan di HMI adalah kesadaran akan *keterbelakangan*, *kelemahan* dan *kekurangan* umat Islam Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan yang

menimbulkan tekad HMI melakukan pembaharuan etos intelektualisme dalam menghadapi tantangan bangsa dan umat Islam ke depan untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Kesadaran inilah yang kemudian menjelma dalam tubuh HMI, sehingga HMI memiliki “wawasan keintelektualan” di samping wawasan Keislaman dan wawasan Keindonesiaan.

Keyakinan diri dan kemampuan dalam menghadapi masa depan sangat tergantung pada bagaimana cara berpikir kita. Jika Islam mengajarkan bahwa Allah Swt tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, maka tafsir yang paling sesuai ialah bahwa perubahan nasib sangat tergantung pada perubahan *cara berpikir*. Sebab, cara berpikir merupakan salah satu yang paling substantif dalam diri kita.⁸¹

HMI sangat potensial untuk menciptakan iklim intelektualisme, yang dapat dilakukan lewat dua jalur: *Pertama*, jalur pendidikan formal di perguruan tinggi (universitas I dalam arti yang sesungguhnya). *Kedua*, jalur pendidikan informal (yaitu HMI sebagai universitas II bukan dalam arti yang sebenarnya walaupun di HMI anggota mendapatkan pendidikan lewat Latihan Kader, baik umum maupun profesi).

Di sini tampak, bahwa pendidikan adalah *suatu keniscayaan*, berarti sangat strategis. Perguruan tinggi menempati posisi sebagai sentra *pembaharuan* dan *kemajuan*, sesuai dengan tuntutan zaman yang selalu berubah. Lewat jalur pendidikan, generasi muda memperoleh pendidikan sebagai calon cendekiawan/intelektual, dan pemimpin bangsa. Di HMI pun, mahasiswa dapat dilatih dan memperoleh tambahan ilmu yang hanya diperoleh di HMI, berupa pengetahuan di bidang *organisasi, pembentukan integritas watak dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektual, pengembangan kemampuan profesional*.⁸²

Menyahuti dua bentuk pendidikan yang dilalui setiap anggota HMI, maka di kalangan HMI harus dipupuk dan

diciptakan suasana agar anggota *memiliki kesadaran akademik* yang tinggi. Visi ini hendaknya tertanam dalam setiap pribadi insan HMI di mana pun berada. Kesadaran ini bertumpu, bagaimana memperoleh kualitas yang prima, masing-masing memiliki nilai plus sebagaimana tergambar dalam *Lima Kualitas Insan Cita HMI*, yang mampu menjadi insan *genial, unggul*, memiliki kapasitas mampu *menjangkau masa depan*, memberikan pemikiran yang bersifat solutif *di sini dan kini*.

Kesadaran itu juga menunjukkan adanya kepentingan menuntut ilmu, bahwa setelah selesai *Sarjana strata 1*, harus segera diikuti *jenjang Master*, dan akhirnya *program Doktor*, dan memperoleh jenjang akademik tertinggi *Guru Besar (Profesor)*. Kesadaran dan etos intelektualitas yang tinggi perlu dimiliki semua anggota HMI untuk menghadapi dan mengantisipasi era globalisasi maupun abad kompetitif yang keras dan ketat, untuk menuju masa depan. Setiap insan cita HMI mampu berkompetisi dalam berbagai aspek, yang jika tidak dimiliki, pasti akan terpuruk yang implikasinya sangat jauh.

Gelombang kebangkitan Intelektualisme Islam I, yang sudah terjadi tahun 1970 dari kaum *santri modernis*, segera akan diikuti gelombang kebangkitan Intelektualisme Islam II, yang diperkirakan terjadi tahun 2010 dari kaum *santri tradisional*, seandainya semua proses berjalan tanpa hambatan besar. Mereka terdiri dari kalangan dengan latar belakang budaya yang lebih dalam dan solid, juga mempunyai tingkat otentisitas yang lebih tinggi dari yang lainnya. Otentisitas diperlukan sebagai landasan kepercayaan diri, sebagai syarat bagi kreativitas intelektual dan kultural.⁸³

Jika kebangkitan gelombang pertama itu muncul dari kaum terpelajar modernis (HMI-KAHMI-ICMI), dan kebangkitan gelombang II muncul dari kaum *terpelajar tradisional*, di sini HMI ditantang untuk mampu berkompetisi untuk memikirkan visi HMI ke depan, sehingga dapat *menghunjam di petala bumi Indonesia*, yang sangat luas dan kaya ini sebagai arena

perjuangan, yang tidak kenal menyerah dan puas.

Pendakian Piramida pemikiran di HMI hendaknya diikuti dengan memberikan perhatian terhadap pembenahan sumber daya manusia. Kekayaan tidak selamanya menjadi jaminan bagi kemakmuran. Faktor manusia (apalagi yang genius) jauh lebih menentukan dari sumber faktor alam, (ambil contoh nyata Negara Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Singapura yang miskin sumber daya alam, namun kaya dengan SDM yang berkualitas tinggi). Karena itu, pendidikan keterampilan dipandang dan telah dibuktikan sangat menentukan. Jadi, etos ilmiah Islam yang menjadi pangkal etos intelektualisme modern sekarang ini berawal dari sikap-sikap memperhatikan dan mempelajari lingkungan dan manusia sendiri, serta kehidupannya. Kehidupan individual dan sosialnya.

Berbeda dengan etos ilmiah Barat sekarang ini, *etos intelektualisme Islam* bertolak dari rasa keimanan dan takwa. Lebih lanjut diungkapkan Nurcholish, bahwa etos intelektualisme (keilmuan Islam) adalah sejajar dengan *etos ijtihad*, suatu ungkapan yang menggambarkan usaha sungguh-sungguh dalam segala bidang untuk mencapai kemajuan ijtihad, selaras dengan ide untuk mengikuti suatu jalan pikiran yang tidak hanya terbatas pada *pendapat-pendapat saja*, melainkan lebih terfokus kepada metodologinya. Metode berpikir seperti ini akan menghasilkan *dinamika* intelektual yang sangat *kreatif, bebas, dinamis, terbuka*, dan *responsif* terhadap tantangan zaman.

Lantas, berdasarkan nalar di atas, pengembangan etos keintelektualan di negeri kita dapat mengacu sepenuhnya kepada etos keintelektualan (keilmuan) yang diajarkan Islam. Perlu diingat bahwa masa kejayaan Islam dahulu dua tiga kali lipat lebih panjang dari masa kejayaan Barat modern sekarang ini (ini bukan apologi—Pen.). Oleh karena itu, lanjut Cak Nur, menurut dinamika etos keilmuan Islam, untuk membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan zaman dan meresponsnya,

kita harus mampu dengan cermat mendeteksi gejala perkembangan sosial yang terjadi, baik yang *kuantitatif* maupun yang ditekankan dari segi *kualitatif*, kemudian kita paham kecenderungan dasar yang melandasi dan melatarbelakangi-nya.⁸⁴

Apabila *proses transendensi* yang dilakukan HMI, dengan segenap penahapan strategis yang dilakukan, dapat berjalan sesuai dengan rencana, yaitu berhasil menciptakan manusia-manusia yang memiliki *etos intelektualisme*, diharapkan akan melahirkan profil-profil yang *genius, unggul*. Profil seperti itu adalah manusia yang lahir *satu abad mendahului zamannya*, mampu menjangkau masa depan, merumuskan pemikiran-pemikiran secara rasional tentang masalah-masalah bangsa, sekaligus memberi pemikiran yang bersifat solutif.

Kelahiran HMI dan proses perjalanan sejarahnya selama 63 tahun merupakan *artikulasi* dan *akumulasi* dari sejumlah tahapan, termasuk *Pendakian Piramida Pemikiran*, yang menjadi fokus bahasan saat ini dapat berjalan seandainya semua proses berjalan tanpa hambatan besar, diprediksi sekitar tahun 2020–2025 akan terjadi perubahan sosial yang mendasar. Indonesia akan sampai pada titik pertumbuhan dan perkembangan sosial-budaya-politik yang boleh disebut final, ketika umat Islam Indonesia secara keseluruhan telah menjadi “dewasa penuh”. Kedewasaan itu akan berimbas penuh kepada seluruh sektor kehidupan bangsa, termasuk pada pemerintahan. Hal demikian dapat dipandang sebagai tujuan hakiki perjuangan mengakhiri penjajahan merebut kemerdekaan bagi rakyat.⁸⁵

Agung Baskoro,⁸⁶ mengenai 2025, dalam tulisannya *Partai Politik dan Regenerasi Kepemimpinan di Indonesia*, menjelaskan, peluang memperbaiki negeri ini “cukup besar” saat mencermati dinamika yang mewarnai reformasi dalam satu dekade. Banyak perubahan telah terjadi, namun masyarakat masih menantikan ‘**perubahan**’ sesungguhnya hadir. Fase di mana **substansi demokrasi** tentang kesejahteraan dapat

terealisasi utuh. Perjuangan untuk itu tentu membutuhkan waktu, sehingga **memerlukan desain yang cukup konkret.** Selain itu, aktor yang menjalankan desain menjadi vital agar kita tidak mengulang sejarah di masa lalu. Aktor yang dimaksud tentu memiliki kriteria yang **‘lebih sempurna’**, agar roda perubahan mampu terakselerasi dan segera terwujud.

Di sisi lain, harus diakui bahwa **Parpol bukan satu-satunya** wadah kaderisasi pemimpin. Militer, swasta, ormas keagamaan, dan kampus juga alternatif yang secara rutin menelurkan **generasi-generasi terbaiknya.** Namun, bila keadaan ini tidak disikapi dengan arif oleh para ‘golongan tua’, bukan tidak mungkin generasi muda Indonesia ‘akan habis’. Upaya-upaya untuk mengakomodasi kepentingan generasi muda ini menjadi solusi atas krisis kepemimpinan. **Sekaligus pembuktian, bahwa bangsa ini harus dibangun dalam sinergi lintas generasi.**

Kedua, keadaan lebih baik mutlak terjadi untuk menyongsong kejayaan Indonesia di tahun **2025.** Ketika kita melihat sejarah dan realitas hari ini, maka sejarah dengan cukup bangga mencatat lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa, sedangkan realitas menghantarkan dunia pada perubahan dramatis yang memunculkan pemimpin-pemimpin muda tingkat dunia. Satu hal yang perlu diperhatikan, pemimpin muda di sini adalah figur yang mampu bertindak progresif, sensitif, aspiratif, dan solutif. Artinya, umur dan pengalaman menjadi bagian holistik yang tidak dapat dipisahkan.

Catatan:

¹ Agussalim Sitompul, “Memacu Peran HMI; Menghadapi Perubahan Zaman di Era Milenium Ketiga menuju Indonesia Baru”. Makalah ini dipresentasikan pada Latihan Kader III Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus HMI Badan Koordinasi Jawa Tengah-DIY, di Wisma PSDA II, Pedurungan, Semarang, Senin 22 Juni 2009, hlm. 12. Penjelasan tentang kelima pemikiran ini dapat dibaca pada Bab IV dalam

- buku ini.
- 2 Ibid, hlm. 12. Penjelasan tentang ketiga dapat dibaca pada Bab IV dalam buku ini.
 - 3 Ibid, hlm. 12
 - 4 Lihat Nurcholish Madjid, “Kata Pengantar”, dalam Agusssalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya....*, hlm. vi.
 - 5 Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya....*, hlm. 89, dalam Agusssalim Sitompul, *Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan*, hlm. 6.
 - 6 Lihat Nurcholish Madjid, “Integrasi Keislaman dalam Keindonesiaan untuk Menatap Masa Depan Bangsa Indonesia”, dalam Serie KKA 01. Tahun I/1986, *Keislaman dan Keindonesiaan: Menatap Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, 1986, hlm. 1–23, dalam Agusssalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa....*, hlm. 414.
 - 7 Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika datang pada Dies Natalis HMI di Yogyakarta tanggal 6 Februari 1948 dalam sambutannya mengatakan HMI bukan saja Himpunan Mahasiswa Islam, akan tetapi juga harus menjadi Harapan Masyarakat Indonesia. Dalam Agusssalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh....*, hlm. 9.
 - 8 Poin kedua ini merupakan poin ke-6 dari latar belakang pemikiran HMI, yakni 1). Penjajahan Belanda atas Indonesia dan tuntutan perang kemerdekaan, 2). Kesenjangan dan Kejumudan umat Islam dalam pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta pengamalan agama Islam, 3). Kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan keagamaan, 4). Munculnya polarisasi politik, 5). Berkembangnya faham dan ajaran Komunis, **6). Kedudukan Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan yang strategis**, 7). Kemajemukan bangsa Indonesia, 8). Tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan. Penjelasan dalam Agusssalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa....*, hlm. 49–104.
 - 9 Agusssalim Sitompul, “Sejarah Perjuangan HMI”, makalah dipresentasikan pada Latihan Kader I yang diselenggarakan HMI Komisariat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Pondok Pesantren Al-Qodir, Cangkringan, Sleman, Sabtu, 9 Mei 2009, hlm. 12, dari Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, hal. 240.
 - 10 Tim Penyusun Buku Panduan Akademik 1996 Universitas Gadjah Mada, *Panduan Akademik Universitas Gadjah Mada 1996*, (Yogyakarta, 1996), hlm. 8. Agusssalim Sitompul, “Sejarah Perjuangan HMI” (makalah), hlm. 12.
 - 11 Agusssalim Sitompul, “Sejarah Perjuangan HMI”, hlm. 15.
 - 12 Ibid, hlm. 12
 - 13 Ibid, hlm. 12
 - 14 Ibid, hlm. 16 dan lihat Aqib Suminto, *Politik Islam*, hlm. 49.

- ¹⁵ Ibid, hlm. 13.
- ¹⁶ Ibid, hlm. 13.
- ¹⁷ Ibid, hlm. 99.
- ¹⁸ Ibid, hlm. 20.
- ¹⁹ Tulisan tersebut secara lengkap dapat dibaca dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 3–7.
- ²⁰ Agussalim Sitompul, “Sejarah Perjuangan HMI”, makalah dipresentasikan pada Latihan Kader I yang diselenggarakan HMI Komisariat Tunas Bangsa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 10 Mei 2008, hlm. 7, lihat Lafran Pane “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam...”, hlm. 3.
- ²¹ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI...*, hlm. 107.
- ²² Pemilu pertama di Indonesia diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara tahun 1951. Para ahli mengatakan, ini adalah pemilu percontohan menjelang Pemilu 1955. Pembuatan UU Pemilu terkatung-katung, dan terhenti ketika muncul peristiwa 17 Oktober 1952 (demonstrasi tentara di depan Istana Presiden). Pada November 1952, Kabinet Wilopo mengajukan rancangan UU Pemilu yang baru. Dalam www.listown.com. Pemilihan umum pertama di Indonesia baru terlaksana pada 1955. Pemilihan umum diadakan selama dua periode. Periode pertama tanggal 29 September 1955 dilaksanakan untuk memilih keanggotaan DPR. Sedangkan periode kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar). Tidak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu yang pertama ini. Pada pemilu ini, anggota TNI-APRI juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku ketika itu (30 Tahun Indonesia Merdeka 1950–1964, 1981:88). Jumlah anggota DPR hasil pemilu pertama (1955) adalah 272 orang dan dilantik pada 20 Maret 1956. Dari jumlah tersebut, 60 anggota merupakan Fraksi Masyumi, 58 anggota Fraksi PNI, 47 anggota Fraksi NU, 32 anggota Fraksi PKI, 11 anggota Fraksi Nasional Progresif, yaitu gabungan partai/organisasi: Baperki, Permai, Acoma, Murba, PRN, Gerindo, PIR. Wongsonegoro, dan anggota perorangan R. Soedjono Prawirosoedardjo, 11 anggota Fraksi Pendukung Proklamasi yang terdiri dari wakil-wakil partai/organisasi: IPKI, Partai Buruh, PRI, dan PRD, 9 anggota Fraksi PARKINDO, 8 anggota Fraksi PSII, 8 anggota Fraksi Katolik yang bergabung dengan wakil Persatuan Daya, 5 wakil PSI, 4 wakil PERTI, 1 wakil PIR, 7 wakil Pembangunan, 2 wakil Gerakan Pembela Pancasila, 2 wakil P3RI, 1 wakil perorangan AKUI, 1 wakil perorangan PPTI, 5 wakil golongan/perwakilan/tak berpartai dan lain-lain (Budiardjo, 1985:194). Lihat www.setneg.go.id.
- ²³ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, hlm. 432.
- ²⁴ *Hasil-hasil Keputusan Kongres IV HMI di Bandung 09–15 Oktober 1955*,

- dapat dibaca dalam Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI...*, hlm. 107–108.
- ²⁵ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI...*, hlm. 125.
- ²⁶ *Ibid*, hlm. 124.
- ²⁷ *Ibid*, hlm. 131.
- ²⁸ *Ibid*, hlm. 125.
- ²⁹ Wawancara penulis dengan Agussalim Sitompul di Yogyakarta (23 Juni 2009).
- ³⁰ Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI di Tengah Dinamika Kehidupan Bangsa Menghadapi Perubahan dan Pergantian Zaman”. Makalah dipresentasikan pada Latihan Kader II HMI Tingkat Nasional yang diselenggarakan HMI Cabang Bulaksumur Provinsi DIY di Puslit PTM Kaliurang, Selasa, 17 April 2007, hlm. 3.
- ³¹ Lihat *Buku III Hasil-hasil Kongres XXI HMI*, hlm. 9, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 3.
- ³² Dari penyelenggaraan Seminar, Lokakarya, Saloka Perkaderan HMI tersebut, telah terbit buku-buku Pedoman Perkaderan, yaitu: 1) *Pedoman Perkaderan HMI*, Keputusan Seminar Kader HMI di Pekalongan tahun 1967; 2) *Pedoman Perkaderan HMI*, hasil Seminar Nasional Perkaderan di Pekalongan tahun 1970; 3) *Pedoman Perkaderan HMI*, kompilasi dari hasil Seminar Kader di Cisarua tahun 1973, dan Lokakarya Perkaderan HMI di Kaliurang tahun 1975, terbitan tahun 1977; 4) *Pedoman Perkaderan HMI*, hasil Lokakarya Perkaderan HMI di Surabaya tahun 1983, terbitan tahun 1984; 5) *Pedoman Perkaderan & Pedoman Lembaga Pengelola Latihan (LPL) HMI*, hasil Sarasehan dan Lokakarya (Saloka) Perkaderan HMI di Surabaya tahun 1988, dan disyahkan pada Kongres XVII HMI di Louksumawe tahun 1988; dan 6) *Buku Pedoman Perkaderan & Pedoman Lembaga Pengelola Latihan (LPL)*, hasil Lokakarya Perkaderan HMI di Jakarta tahun 1997, terbitan tahun 1998, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 4.
- ³³ A.M. Santo Tukimin, Moehadi Zainal, *Administrasi & Organisasi Perjuangan*, Yogyakarta: Penerbit Sinta, 1966, hlm. 18. Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMIi...”, hlm. 4.
- ³⁴ Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 4. Lihat *Hasil Keputusan Kongres VIII HMI*, hlm. 1.
- ³⁵ *Ibid*, hlm. 5. Lihat *Pedoman Perkaderan & Pedoman Lembaga Pengelola Latihan (LPL) HMI*, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1986, hlm. 12.
- ³⁶ *Ibid*, hlm. 5–6. Baca juga *Pedoman Perkaderan HMI*, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1970, hlm. 1.
- ³⁷ *Ibid*, hlm. 6. Lihat *Pedoman Perkaderan HMI*, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1977, hlm. 7.
- ³⁸ *Ibid*, hlm. 6

- ³⁹ Lihat *Pedoman Perkaderan HMI*, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1998, hlm. 7, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 7.
- ⁴⁰ Tentang lima kualitas insan cita HMI lebih rinci lihat “Tafsir Tujuan HMI” dalam *Buku I Hasil-hasil Kongres XXI HMI Yogyakarta 20 sampai 26 Agustus 1997*, Jakarta: Penerbit Pusat Data dan Informasi PB HMI, 1998, hlm. 104, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 7.
- ⁴¹ Lihat *Pedoman Perkaderan HMI*, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1977, hlm. 59, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 8.
- ⁴² Berliana Kartakusumah adalah mantan Ketua Umum PB HMI Badko Jawa Barat. Diwawancarai di kantor HMI Badko Jawa Barat, Jl. Sabang 17 Bandung, 20 November 1997.
- ⁴³ Wawancara Agussalim Sitompul di kantor HMI Badko Jawa Barat, Jl. Sabang 17 Bandung, 20 November 1997, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 10.
- ⁴⁴ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa...*, hlm. 287.
- ⁴⁵ Lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975*, Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1976, hlm. 111. Naskah terakhir *Tafsir Asas HMI*, seperti dirumuskan Kongres VIII HMI di Surabaya, tanggal 10–17 September 1966.
- ⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 119.
- ⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 125.
- ⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 131.
- ⁴⁹ Lihat *Hasil-hasil Kongres IX HMI 3–10 Mei 1969*, di Malang-Jawa Timur, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1969, Lampiran Keputusan Komisi B Sub Komisi Kaderisasi, hlm. 1, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 11.
- ⁵⁰ Lihat *Hasil-hasil Kongres X HMI, Palembang 3–10 Oktober 1971*, Jakarta: Penerbit PB HMI, 1972, hlm. 15, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 7.
- ⁵¹ *Ibid.*, hlm. 10.
- ⁵² Lihat *Hasil-hasil Ketetapan Kongres HMI XVI di Padang, 24–31 Maret 1986*, hlm. 72, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 11.
- ⁵³ *Ibid.*, hlm. 124.
- ⁵⁴ Lihat *Hasil-hasil Kongres XXII di Jambi, tanggal 29 November–5 Desember 1999*, Jakarta: Penerbit Pusat Data dan Informasi PB HMI, 2000, hlm. 44, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 11.

- ⁵⁵ Ibid, hlm. 42.
- ⁵⁶ A. Dahlan Ranuwihardjo, *Menuju Pejuang Paripurna...*, hlm. 9, dalam Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 11.
- ⁵⁷ Majalah *Madina*, No. 06/TH I Juni 2008.
- ⁵⁸ Nanang Tahqiq, “Bye-Bye HMI”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 443.
- ⁵⁹ Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 12. Lihat “Anggaran Dasar HMI” dalam *Hasil-hasil Kongres XXIV HMI*, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, tanggal 23–27 Oktober 2003, Jakarta: Penerbit PB HMI, 2003, hlm. 43.
- ⁶⁰ Agussalim Sitompul, *44 Indikator...*, hlm. 14.
- ⁶¹ Ibid, hlm. 14.
- ⁶² Ibid, hlm. 14–17.
- ⁶³ Ibid, hlm. 26.
- ⁶⁴ Anas Urbaningrum adalah Ketua Umum PB HMI periode 1997–1999, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2004. Saat ini sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2010–2015.
- ⁶⁵ Anas Urbaningrum, “Refleksi Dies Natalis HMI Ke-49: Mempertimbangkan Posisi HMI”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh...*, hlm. 400.
- ⁶⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral menurut Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 157–158, lihat juga Edi Amin, *Posisi Moral Agama dan Kemanusiaan dalam Memandu Masa Depan Bangsa yang Demokratis*, dalam Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 78.
- ⁶⁷ Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 26
- ⁶⁸ Pengurus Besar HMI, *Pedoman Perkaderan HMI Hasil Lokakarya Perkaderan HMI di Surabaya 1983*, (Jakarta, 1984), hlm. 10, dalam Agussalim Sitompul, *Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...*, hlm. 11.
- ⁶⁹ Dhaniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan...*, hlm. 197–199.
- ⁷⁰ Siswanto Masruri, “Intelektual-Ulama dan Kepemimpinan al-Quran di Indonesia”, dalam Abdurrahman, Burhanuddin Daja, Djam’annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali...*, hlm. 433.
- ⁷¹ Deliar Noer, “HMI Tidak Akan Lupa Panggilan Zaman serta Kehendak Masa”, disampaikan dalam pidato Dies Natalis HMI Ke-7 pada 5 Februari 1954. Lihat Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya...*, hlm. 79.
- ⁷² Agussalim Sitompul, “Mendiagnosa Pembentukan Profil Kader HMI...”, hlm. 4.

- ⁷³ Lihat Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 119.
- ⁷⁴ Lihat kembali penjelasan Machasin mengenai intelektual yang mengetahui bahaya buaya sungai pada Bab III dalam buku ini.
- ⁷⁵ Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan....*, hlm. 119–121.
- ⁷⁶ Meredith B.M. Gurie, *Religion the Social Context*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1981, hlm. 11.
- ⁷⁷ Ibid, hlm. 149, 150.
- ⁷⁸ Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan....*, hlm. 119. Lihat juga Agussalim Sitompul, “Pembangunan Kultur Intelektual Kader HMI”, dipresentasikan pada Latihan Kader II HMI Tingkat Nasional, diselenggarakan HMI Cabang Bone, Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Islamic Centre, Jl. Gatot Subroto, Bone Selasa, 20 Juni 2006, hlm. 11–17
- ⁷⁹ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya....*, hlm. 45.
- ⁸⁰ Ibid, hlm. 45, 46.
- ⁸¹ Ibid, hlm. 29.
- ⁸² PB HMI, *Pedoman Perkaderan dan Pedoman LPL HMI* (Jakarta, 1988), hlm. 11.
- ⁸³ Lihat Agussalim Sitompul, “HMI dalam Menghadapi Tantangan Gelombang Kebangkitan Intelektualisme Islam IP”, (Jatinangor: Panitia LK II HMI Cabang Jatinangor, 1998), hlm. 10. Makalah ini disampaikan pada Latihan Kader II Tingkat Nasional HMI Cabang Tasikmalaya tanggal 3 Oktober 1998, di HMI Cabang Jatinangor, Sumedang, tanggal 16 Oktober 1998.
- ⁸⁴ Lihat Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya....*, hlm. 35.
- ⁸⁵ Lihat makalah Nurcholish Madjid, “Proses Perkembangan Intelektual Muslim Indonesia”, hlm. 6. Makalah ini ditulis sebagai pokok-pokok bahasan diskusi dalam Seminar di Pesantren Perenduan Madura, tanggal 27 Desember 1996.
- ⁸⁶ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM angkatan 2005, tulisan belum dipublikasikan. Dalam diskusi dengan penulis, Agung mengatakan, jika tidak 2025, bisa dikatakan harapan itu hampir hilang.

BAB VI

PENUTUP/KESIMPULAN

Sajak Peperangan Abimanyu/Karya: W.S Rendra¹

Ketika maut mencegatnya di delapan penjuru
Sang Kesatria berdiri dengan mata bercahaya
Hatinya damai,
di dalam dadanya yang bedah dan
berdarah karena ia telah lunas
menjalani kewajiban dan kewajarannya.

Setelah ia wafat

Apakah petani-petani akan tetap
menderita dan para wanita kampung
tetap membanjiri rumah pelacuran di kota?
Itulah pertanyaan untuk kita yang hidup.
Tetapi bukan itu yang terlintas di kepalanya
ketika ia tegak dengan tubuh yang penuh luka-luka.
Saat itu ia mendengar,
nyanyian angin dan air yang turun dari gunung.

Perjuangan adalah satu pelaksanaan cita dan rasa.

Perjuangan adalah pelunasan simpul penghayatan.

Di saat badan berlumur darah,
jiwa duduk di atas teratai

Ketika ibu-ibu meratap
Dan mengurap rambut mereka dengan debu,
Roh kesatria bersetubuh dengan cakrawala
Untuk menanam benih
Agar nanti terlahir para pembela rakyat
tertindas —**dari zaman ke zaman**

Jakarta, 2 September 1977

Seseorang mengeluh “pening”, katanya ia punya “segudang” masalah di kepalanya, akhirnya malu tersipu tatkala seorang kawan meminta ia menuliskan di atas kertas putih apa yang ia maksud dengan “segudang” itu. Nyatanya, itu tak penuh, jangankan segudang, sekotak lilin pun tidak. Demikian juga dengan hidup seseorang yang panjang, untuk dituliskan dengan seutuhnya oleh orang lain kadang tidak panjang lagi. Sejarah sering tidak adil, hutan rimbun ditulis hanya dengan beberapa utas rumput. Peristiwa 10 November misalnya, yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, sebagian kita mungkin hanya mengenal Bung Tomo di antara puluhan ribu pejuang yang mati hari itu melawan Sekutu.

Bung Tomo adalah versi resmi sejarah, masih banyak nama-nama lain dalam versi “tidak resmi”. Sebab itu, di negeri ini kita dituntut untuk lebih rajin bertanya. Pernah suatu ketika penulis menonton acara jelang 17 Agustus 2005 bertajuk Pahlawan. Pembawa acara bertanya pada seorang tamu yang kebetulan artis muda, “Siapa pahlawan 10 November?” Ia tersenyum, kemudian menjawab, “Ga tahu, duh lupa.” Kontan saja narasumber lain yang pernah menjadi tahanan Orde Baru di akhir 1990-an lantaran membuat partai “terlarang” nyeletuk, “Yang versi resmi saja ga tahu, gimana yang tidak resmi.” Dalam hati penulis bilang, “Oh, rupanya ada pahlawan resmi dan tidak resmi.”

Ambil hikmahnya saja, yang jelas bangsa ini telah melahirkan banyak nama besar yang layak dijadikan cermin. Bagi militer, ada Panglima Besar Sudirman; bagi ulama, ada sosok KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan; bagi sastrawan, ada Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer, Chairil Anwar, Rendra, Sanusi Pane; bagi politikus, ada Agus Salim, Soekarno, Hatta, Latuharhary; bagi pengusaha, ada Samanhudi; bagi intelektual, ada Tjokroaminoto, Cipto Mangunkusumo, Abdul Rivai, Cak Nur, Gus Dur, Endang Saifuddin Anshori; bagi guru, ada Ki Hajar Dewantoro, Bahder Djohan, dan lain-lain.

Tidak mungkin ditulis semua, pasti ada yang terlewat, guru-guru terlupakan yang kemudian diangkat dalam Laskar Pelangi tentu juga pahlawan. Untuk Indonesia, setiap keluarga ada pahlawan, setiap RT, RW, kelurahan, kecamatan, suku, agama, organisasi punya orang-orang hebat, lantas kenapa sebagian kita bingung seolah kehilangan cermin. Mereka para pahlawan-pahlawan itu seperti kata Rendra di atas telah menanam benih

agar nanti terlahir para pembela rakyat tertindas—dari zaman ke zaman.

* * *

Lafran Pane, terserah saja, akan dikategorikan sebagai pahlawan resmi atau tidak. Lagi pula, ia pun tidak urusan dengan hal itu. Pidatonya di IKIP tahun 1970 yang menyinggung pemilihan presiden bisa dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebelum Pemilu 1971 menunjukkan ia memang terkadang cuek. Saat wafat 24 Januari 1991, orang akhirnya tahu, Lafran ternyata lahir 5 Februari 1922, bukan 12 April 1922 seperti yang kerap ia gunakan dalam catatan resmi. Hanya Lafran yang tahu pastinya mengenai angka-angka ini (*Sejarah tentang Lafran memang harus dituliskan, sebelum orang luar pula yang meneliti*).

Lafran sendiri menolak untuk disebut sebagai satu-satunya pendiri HMI. Istrinya bahkan menyebut “Lafran egois” jika mau dinobatkan sebagai pendiri HMI, meskipun memang ia yang pertama memunculkan gagasan tersebut. Namun faktanya, ia sadar bahwa sebuah gagasan tentu terinspirasi dari banyak hal, dan dalam segala hal, Lafran membutuhkan orang lain. Jangankan bekerja, bahkan untuk melamun sekalipun seseorang butuh orang lain sebagai obyek. Orang hidup bilang, kesuksesan dan kegagalan kita tergantung bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang yang “pernah mati” katakan, kesuksesan dan kegagalan seseorang tergantung

bagaimana kita memperlakukan Tuhan, alam dan makhluk-mahluk-Nya.

Lahir 5 Februari 1922 di Padang Sidempuan, sebuah kota kecil nun jauh dari Jawa. Tahun 1946, ia kuliah. Pengalaman hidup sepanjang 1922–1944 = 22 tahun tidak banyak bisa diungkap dalam buku ini, selain pendidikannya yang tidak beraturan (Pesantren, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan lain-lain), ia bahkan pernah menjadi anggota Geng, jual karcis bioskop dan kerja serabutan. Olahraganya pun tidak lazim, Boxer. Sepertinya, Lafran bukanlah anak manis hingga usia 22 tahun, ia benar-benar menikmati masa-masa itu untuk tahu hitam-putihnya Indonesia yang nyatanya tidak. Indonesia itu warna-warni, dan Lafran tahu itu.

Pentingnya “meng-Indonesia-kan” manusia Indonesia sejak dini tidak bisa diabaikan lagi, guna mencegah agar tidak menjadi manusia yang ingkar terhadap fakta warna-warni Indonesia. Lafran dan generasi yang hidup pada masa-masa revolusi beruntung bisa menikmati ketika warna-warni Indonesia tumbuh. Pergulatannya dengan berbagai kelompok ideologis (Sosialis, Nasionalis, Agamis, Komunis, dan lain-lain) secara langsung menjadikan ia benar-benar Indonesia. Kita pun yang hidup hari ini sejatinya hidup dalam alam yang warna-warni, tinggal sejauh mana kita merefleksikannya. Sempat diancam hukuman mati oleh Jepang, Lafran lari ke Padang Sidempuan, kemudian mengembara lagi.

Pengembaraan Lafran Pane mencari hakikat hidup akhirnya mengingatkan dia akan ajaran-ajaran Malim Mahasan, guru ngajinya di Sipirok saat kanak-kanak. Pelajaran mengenai sifat-sifat Tuhan begitu membekas di benak Lafran. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak, agar manusia berperilaku seperti Tuhan yang adil, pengasih, penyayang, rahmat bagi seluruh alam. Lafran tersadarkan bahwa baik-buruk kualitas hidup seseorang tergantung bagaimana ia mengasah suara kebenaran dari hati kecilnya. Penulis teringat ucapan Guru

Besar Filsafat UGM, Prof. Damarjati, yang mengatakan, “Jika Indonesia punya daerah istimewa, tubuh manusia juga memiliki daerah istimewa, yaitu hati.”

Usia 23 tahun, Lafran menjadi mahasiswa STI, bersama sejumlah kawannya, ia membuat sesuatu yang belum pernah ada, sebuah organisasi mahasiswa Islam. Ia menimbulkan rasa cemas di kalangan kelompok mahasiswa lain. Lafran bahkan dituding pengikut “Ali Jinnah” di Pakistan. Selebarannya tahun 1946 banyak diabaikan. Lafran tidak bergeming. 5 Februari 1947 bersama 14 orang rekannya ia mendeklarasikan berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam dengan dua tujuan: (1) *Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan (2) Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.*

Kecurigaan terhadap Lafran datang dari organisasi Islam maupun organisasi Sosialis, dan lain-lain. Wajar saja, Lafran memang mantan aktivis Sosialis yang tergabung dalam PMY, ia heran dengan PMY yang alergi agama. Lafran bergerak ke sana kemari menjelaskan. Tahun 1949, ketika umurnya 27 tahun, ia menulis artikel berjudul “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia” yang dimuat dalam buku *Pedoman Lengkap Kongres Muslimin Indonesia*, di Yogyakarta 20–21 Desember 1949.

Dalam artikel tersebut, antara lain Lafran menjelaskan bahwa karena tindasan dan pendidikan Belanda, sebagian besar bangsa kita merasa lebih rendah (*minderwaardig*) dari bangsa itu dan bangsa Barat umumnya, padahal kalau orang hendak mencontoh, tidaklah ia akan mencontoh apa yang dianggapnya jelek dan tidak pula ia mencontoh kebiasaan-kebiasaaan atau hal-hal yang dianggapnya lebih rendah daripadanya. Menurut Lafran, manusia memiliki bermacam sifat asasi (dasar), di antaranya tidak dapat lepas dari masyarakat. Karenanya, tidak cukup dengan mulut dan tulisan di atas kertas saja untuk mengembalikan kepercayaan diri bangsa Indonesia, upaya lain

harus dilakukan terutama pendidikan yang teratur dan “keinsyafan”. Selanjutnya, Islam harus ditunjukkan sebagaimana adanya.

Kesadaran (*insyaf*) bahwa bangsa Indonesia tidak lebih rendah derajatnya dibanding bangsa lain dan Islam bukanlah agama rendahan. Inilah bagian utama dari gerakan Lafran dengan kampus menjadi fokus gerakan, sebab menurutnya penindasan dan pendidikan Belanda tidak akan lenyap begitu saja, terutama bagi orang-orang yang melulu mengecap pelajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah Belanda.

Lafran sadar sejarah, karena kemajuan baru tercapai dengan selamat dan bahagia kalau kita lebih dulu menengok ke belakang. Dengan kata lain, depan dan belakang tidak bertentangan, melainkan dua hal yang saling melengkapi-selaras. Dari perjalanan selanjutnya dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang sangat tidak disukai oleh Lafran Pane bukanlah Belanda atau Baratnya, melainkan sikap-sikap individu, kelompok, negara yang gemar merendahkan ke-lompok, kepercayaan dan kebudayaan lain, inilah sesungguhnya dasar-dasar dari penjajahan.

Penjajahan, pemerasan adalah perbuatan terlarang, baik yang dilakukan oleh individu atas individu, kelompok atas kelompok, negara atas negara. Natsir, guru Lafran di STI, mengatakan: “Barat kepunyaan Tuhan, sebagaimana Timur kepunyaan Tuhan, Kedua-duanya mempunyai sifat-sifat yang baik, keduanya mempunyai beberapa kecelaan yang harus disingkirkan. Barat dan Timur tidak menjadi ukuran kita.” Lafran sejatinya sebagaimana pejuang-pejuang terdahulu adalah memperjuangkan kemerdekaan sejati, kesetaraan. dan lain-lain. Rendra berkata:

Aku tidak melihat alasan

Kenapa kita harus diam dan termangu

Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar

Duduk berdebat menyatakan setuju tidak setuju

Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran?
Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan.
Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka

Matahari menyinari airmata yang berderai menjadi api.
Rembulan memberi mimpi pada dendam
Gelombang api menyingkapkan keluh kesah
 Yang teronggok bagaikan sampah
 Kegamangan, Kecurigaan
 Ketakutan.
 Kelesuan.

Aku tulis pamflet ini
karena lawan dan kawan adalah saudara.
Di dalam alam masih ada cahaya.
Matahari yang tenggelam diganti rembulan.
Lalu besok pagi pasti terbit kembali.
Dan di dalam air lumpur kehidupan,
aku melihat bagai terkaca
ternyata kita toh, Manusia.²

Akhirnya, siapa sesungguhnya Lafran Pane adalah pertanyaan yang mestinya memiliki dua jawaban. Sebab, jawaban netral hanyalah bernilai kosong. Minimnya karya tulis Lafran, dan kurang tegasnya Lafran dalam memberikan peringatan akan penyimpangan alumni HMI khususnya di masa Orde Lama dan Orde Baru, serta kurang berminatnya ia pada jabatan strategis yang lebih menunjang pejuangannya adalah bagian dari sisi kelemahannya sebagai manusia.

Agussalim Sitompul pernah juga “resah” pada Lafran yang memintanya untuk tidak menuliskan dulu (*menunda*) keputusan Kongres HMI di Medan pada 24–31 Desember 1957³ dalam bukunya *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975*, alasan Lafran adalah situasi.⁴ Kongres tersebut memutuskan untuk mendukung Islam politik dalam perjuangan menjadikan Islam sebagai Dasar Negara. Menurut Dahlan Ranuwihardjo (Ketum PB HMI 1951–1953), keputusan ini merupakan penyimpangan

terhadap prinsip dasar HMI. Bagi Dahlan, dasar satu-satunya bagi Indonesia adalah Pancasila (Agussalim Sitompul 2002: 159). Di tengah ketegangan antara penganjur Pancasila dan Penganjur Islam, HMI sebagai organisasi cenderung terposisikan sebagai organisasi moderat.

Setidaknya, ada dua kemungkinan kenapa Lafran minta ditunda dulu: (1) Lafran tampaknya terlalu khawatir HMI akan mengalami tuntutan pembubaran seperti oleh PKI di masa Orde Lama. Soekarno, meski didesak PKI, tetap tidak mau membubarkan HMI karena paham sejarah berdirinya HMI dan sepak terjangnya, namun Soeharto belum tentu, apalagi tahun 1975 adalah masa kuat-kuat dan tega-teganya Orde Baru. (2) Lafran sendiri memang tidak setuju dengan hasil kongres tersebut karena bertentangan dengan prinsip dasar HMI (*Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan dan Independensi*). Lafran sebagaimana dijelaskan Dahlan telah mendukung Pancasila sejak HMI berdiri, bahkan dalam Kongres Pendidikan Pancasila 1949, Lafran sudah mendukung Pancasila, kiranya demikian yang ada di benak Lafran.

Namun, bagaimanapun juga, Agussalim Sitompul sebagai penulis sejarah HMI tentu juga dituntut untuk menuliskan sebuah peristiwa sebagaimana adanya. Bukankah menulis dan mengungkapkan apa adanya seringkali lebih bermanfaat. Sejatinya, dicantumkan atau tidak, secara pribadi tidak akan berdampak pada Lafran, karena tahun 1957 ia sudah tidak terlibat lagi dengan HMI. Ia tampaknya terlalu memikirkan masa depan HMI ketimbang dirinya.

Pada masa selanjutnya, di saat peran HMI kurang terlihat, ia balik mengkritik. Gugatannya akan eksistensi HMI tahun 1990 tampaknya adalah akumulasi dari kecintaannya akan organisasi ini. "*Hanya dengan peka terhadap perkembangan zaman, HMI akan tetap bertahan sebagai pencipta intelektual Muslim Indonesia,*" begitu kata Lafran. HMI yang pernah jaya perlahan mundur, khususnya setelah 1986.

Sekarang, menghadapi “Mahasiswa Yes, Organisasi Mahasiswa No”, HMI tampaknya sudah kewalahan, apalagi “Islam Yes, HMI No”. HMI akan bangkit? Semua percaya itu, organisasi ini punya modal sejarah “pernah bangkit dari posisi yang sangat terpuruk”. Pada 19 Desember 1948, saat Ibu Kota Yogyakarta berhasil direbut Belanda, hampir semua organisasi hilang. Mestinya HMI sudah bubar saat itu, namun HMI bertahan di Yogyakarta meski hanya dengan 2 orang, Lafran dan Dahlan (Ketum dan Sekjen). Konsolidasi dari awal lagi.

Lafran boleh jadi terlalu sangat sederhana dan cukup menjauhi politik praktis dalam hidupnya. Ia bahkan tak punya rumah pribadi hingga wafatnya. Mungkin Lafran sadar, dirinya akan selalu disebut dalam setiap perkaderan HMI di seluruh Indonesia. Sebab itu, integritasnya betul-betul ia jaga. Keberanian, kesederhanaan, kejujuran adalah hal yang kian langka di zaman ini. Sebutan sebagai salah seorang arsitek utama di balik kemunculan intelektual-intelektual Muslim Indonesia bisa jadi juga ditolak oleh Lafran Pane jika ia masih hidup.

Akhirnya, sekali lagi, buku ini tidak dimaksudkan untuk “melebih-lebihkan” atau mengkultuskan Lafran Pane (*Ia toh juga manusia*), melainkan hanya untuk kembali menunjukkan bahwa manusia mampu untuk hidup bermasyarakat, ber-manfaat, jujur, sederhana. Dalam konteks ini, Lafran telah sukses menunaikan tugas kesejarahannya... Hidup bermasya-rakat, bermanfaat, jujur, sederhana.

Lafran, sebagaimana kebanyakan aktivis terdahulu, adalah penggemar sastra, salah satu yang paling membekas dalam perasaannya yaitu kalimat Wera Vinger:

Ragaku dapat dipatahkan,
tetapi jiwaku akan terus menyalakan api kemerdekaan

Secara bahasa, istilah “intelektual” lahir menandai peristiwa Dreyfus 1896. Alfred Dreyfus dituduh telah membocorkan jadwal militer Prancis kepada Kedutaan Jerman. Ia kemudian dikenakan sanksi penjara seumur hidup, tuduhan tersebut ternyata palsu. Emile Zola, seorang novelis, menulis surat terbuka berjudul *J'accuse* (aku mendakwa) pada halaman surat kabar terkemuka *L'Aurore* yang terbit di Paris. Surat Emile Zola inilah yang kemudian dikenal sebagai *manifeste des intellectuels* (manifesto para intelektual)—(selengkapnya dapat dilihat pada Bab III dalam buku ini)

Pada tahap-tahap awal kemunculannya, intelektual me-nunjuk pada sebuah kelompok dengan misi yang diproklamirkan sendiri, yaitu membela sebuah nurani bersama atas persoalan-persoalan politik yang mendasar. Namun, dalam perkembangan berikutnya, kata intelektual memiliki definisi-definisi yang berlimpah. Peristiwa Dreyfus kemudian dianggap sebagai peristiwa yang melahirkan istilah intelektual.

Peristiwa Dreyfus juga dianggap sebagai referensi (otoritas) historis politik dan pemikiran di Prancis atas istilah *les intellectuels* (*al-mutsaqqafun*). Sebab, untuk pertama kalinya kata tersebut digunakan sebagai “sebutan” (gelar) dalam sebuah deklarasi *manifeste des intellectuels*. Di Nusantara, telah ada istilah yang sepadan maknanya dengan intelektual, seperti resi, pandito, dan lain-lain.

Di Indonesia (Hindia-Belanda), koran *Pemberita Betawi* (1901–1903) menamai salah satu rubriknya dengan “Dreyfusiana” yang merujuk pada pahlawan intelektual Eropa Barat, Alfred Dreyfus. Tahun 1902, di koran *Bintang Hindia*, seorang pribumi bernama Abdul Rivai menulis sebuah artikel mengenai “bangsawan pikiran”. Abdul Rivai mengidentifikasi dua macam bangsawan yang ada dalam masyarakat Eropa, yaitu “bangsawan oesoel” dan “bangsawan pikiran”. Rivai mengatakan:

Tak perlu memperpanjang perbincangan kita mengenai “bangsawan oesoel” karena kemunculannya memang telah ditakdirkan. Jika nenek moyang kita terlahir sebagai bangsawan bahkan meskipun pengetahuan dan prestasi kita tak ubahnya seperti pepatah “katak dalam tempurung”... Saat ini, prestasi dan pengetahuanlah yang akan memunculkan posisi seseorang. Inilah situasi yang melahirkan munculnya “bangsawan pikiran”.

Munculnya istilah “bangsawan pikiran” harus dilihat dari semangat kemanusiaan yang menginginkan kesamaan hak di dalamnya. Istilah tersebut lahir di atas pengalaman sejarah bangsa Indonesia selama 350 tahun hidup di alam diskriminasi dan struktur feodal. Atas dasar ini, penulis mengambil kesimpulan:

Istilah “intelektual” dan “bangsawan pikiran” secara substansi makna adalah sama, yakni membela keadilan, kejujuran dan persamaan hak. Hal yang membedakan adalah latar belakang kemunculannya, termasuk di dalamnya luasnya kepentingan yang dibela yang terakomodir dalam kedua istilah tersebut. Semangat kemunculan istilah “intelektual” di Eropa dipicu oleh pembelaan terhadap seorang kapten, yakni Alfred Dreyfus. Sedangkan istilah “bangsawan pikiran” yang diperkenalkan oleh Abdul Rifai merupakan akumulasi kesadaran yang sudah beratus-ratus tahun dipendam oleh pribumi Indonesia.

Karena setelah sekian lama penjajah memperlakukan pribumi sebagai manusia kelas dua. Istilah ini tidak ditujukan untuk membela seorang priyayi seperti dalam Tragedi Dreyfus, akan tetapi untuk mengangkat harkat dan martabat jutaan pribumi miskin yang selama 350 tahun tidak mendapatkan hak pendidikan, bahkan dalam politik etis sekalipun.

Semangat inilah sesungguhnya yang jarang atau luput dari kajian banyak pihak. Istilah “bangsawan pikiran” dipersepsikan sebagai sebuah istilah yang melawan struktur sosial masyarakat Indonesia saat itu, padahal ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat itu bukanlah kehendak rakyat Indonesia, melainkan hasil perbuatan penjajah Belanda.

Cipto Mangunkusumo tampaknya seperjuangan dengan Abdul Rivai, sebagaimana dilukiskan Goenawan Mohamad

dalam artikelnya berjudul “C.M”. Di tahun 1907, ketika umurnya 21 tahun, ia menulis buat pertama kalinya sebuah artikel galak di koran *De Locomotief*. Cipto menentang dekrit bahwa jabatan bupati dilanjutkan turun-temurun. Bagi Cipto, seperti laiknya seorang bagi orang modern di masanya, pengetahuan dan kemampuan, bukannya keturunan, itulah yang menentukan.

Dan jadilah ia seorang pembangkang (seperti Emile Zola); seorang yang menyerukan semangat egalitarian di suatu zaman yang mengukuhkan tingkat-tingkat. Dalam kongres pertama Budi Utomo, Agustus 1908, ia sudah menentang bila organisasi itu digunakan hanya untuk mengembangkan kebudayaan Jawa. Ia juga menentang agar orang berpegang pada sejarah di Tanah Jawa. Baik kebudayaan maupun sejarah, kata Cipto, selama berabad-abad menjadi wilayah pribadi para pangeran belaka, dan tak seorang pun mengacuhkan si orang kecil. Tugas Budi Utomo, karenanya, bagi Cipto jelas: menyelamatkan rakyat dari kemiskinan rohani dan materi.

Bicara demikian, bagi seorang pemuda 22 tahun, di depan suatu kongres yang dihadiri para orang tua dan bangsawan tinggi di Yogyakarta (dan ini adalah tahun 1908), memerlukan keberanian luar biasa. Tapi Cipto memang keras. Ia keluar dari Budi Utomo ketika organisasi ini jatuh ke pangkuan para pejabat pemerintahan kolonial yang mulai tua. Kemudian, Cipto pun bergabung dengan Indische Partij, yang hendak membangunkan patriotisme Hindia, dan menyiapkan ke-merdekaan sebuah tanah air yang satu untuk segala suku, segala ras.⁵

Bersama E.F.S Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantoro, Cipto memang pelopor sebuah zaman baru. Hanya orang yang peka, dan terlibat dalam keresahan hati di sekitarnya, yang bisa demikian. Mungkin itulah sebabnya ia tahu, bukan dia yang takut, melainkan penguasa kolonial yang takut. Ketika Pemerintah Kolonial membeslah (*melenyapkan*) karya-karya

Ki Hajar (saat itu masih Suwardi Surjaningrat), dengan apinya yang khas Cipto menulis, bertanya: “Kekuatan atau ketakutankah yang menyebabkan tindakan itu? *Kracht of Vrees?*” demikian Cipto Mangunkusumo.

Atas dasar ini, penulis memberikan kesimpulan “intelektual” adalah setiap manusia yang berjuang mewujudkan persamaan hak demi mengangkat harkat dan derajat seluruh manusia.

Berbagai definisi intelektual yang tercantum pada Bab III sebenarnya tidak lain merupakan usaha demi mengingatkan manusia untuk sekali-kali melihat dan memahami diri kembali (evaluasi-refleksi-aksi). Sedangkan usaha formal seperti peringatan “Hari Sarjana” yang jatuh pada setiap 29 September seperti marak diperingati di zaman Orde Baru semestinya kembali dilaksanakan, tentunya dengan semangat akan peran dan fungsi sosialnya, bukan semangat keseragaman untuk kekuasaan, intinya diberikan roh baru.

Adapun sebab kelahiran istilah pengkhianatan intelektual, intelektual munafik, intelektual durhaka, intelektual palsu, intelektual proposal, intelektual pesanan, intelektual menara gading, intelektual kuburan, intelektual gerobak (yang didorong baru jalan) adalah upaya mengembalikan makna intelektual yang hakiki, sekaligus menunjukkan bahwa model-model intelektual seperti itu pernah ada dan hidup di Indonesia. Istilah tersebut juga semacam cambuk bagi mereka yang penuh ambisi politik, kaya intrik dengan pendirian yang tidak jelas. Buku Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban* menarik sebagai cermin dalam hal ini.

* * *

Istilah intelektual Muslim mulai dikenal luas sejak Sarekat Dagang Islam (SDI) muncul pada 1905 dan SI pada 1911. SDI dan SI menjadikan Islam sebagai dasar untuk mempersatukan segenap rakyat Hindia-Belanda guna mengangkat harkat dan

derajat seluruh rakyat pribumi. Gramsci menyebut: “*Tidak ada organisasi tanpa intelektual*”. sementara Syari’ati “*Intelektual Muslim lahir atas kesadaran terhadap kemunduran masya - rakat*”.

Kelahiran Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1924 dan Studenten Islam Studieclub (SIS) tahun 1934 menjadi upaya awal meng-Islamkan kaum terpelajar. Sedangkan polarisasi intelektual yang terbentuk dalam sidang-sidang BPUPKI-PPKI hanyalah bagian yang tidak mungkin terelakkan, karena saat itulah pertama kali bangsa Indonesia bebas bersidang merumuskan masa depannya. Justru aneh jika tanpa perdebatan.

Kehadiran intelektual Muslim Indonesia semakin hangat pada 1960-an. Saat itu, Indonesia mengalami *booming* para sarjana Muslim yang berasal dari alumni JIB, HMI, PII. Hal ini berdampak pada semakin bergairahnya kehidupan intelektual seperti diskusi, penulisan buku, seminar di Indonesia. Semakin kecilnya keinginan untuk mendirikan “Negara Islam” juga banyak dipengaruhi oleh semakin banyak-nya intelektual Muslim Indonesia yang memiliki wawasan Keislaman-Keindonesiaan-Kemahasiswaan yang salah satunya diproduksi tiada henti oleh Himpunan Mahasiswa Islam.

Pada akhirnya, mengutip Yudi Latif, “manusia selalu lebih kaya daripada suatu kategori”. Muslim terdidik yang kemudian menjadi intelektual pada zamannya masing-masing, kemudian oleh para analisis dikelompokkan ke dalam banyak kategori seperti Islamis, Pancasila, Sosialis, Nasionalis, Komunis, dan lain-lain. Namun, kategori-kategori ini senantiasa terlalu sempit bagi Muslim-Muslim terdidik tersebut. Ketika suatu kategori dipaksakan untuk merepresentasikan seseorang, selalu ada luberan yang tak tertampung oleh kategori itu. Terlebih jika seseorang itu manusia besar, yang selalu lebih besar dari dirinya sendiri.

Seorang Natsir yang dikategorikan sebagai figur “Islamis”, yang secara streatip dihadapkan dengan “Nasionalis”, dalam

momen-momen kritis yang mengancam keberlangsungan bangsa justru lebih mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan ideologi partainya. Natsir saat menjabat perdana menteri juga menentang pemberontakan Darul Islam. Hatta yang dikategorikan sebagai figur “Nasionalis”, yang secara stereotip dihadapkan dengan “Islamis”, ternyata lebih komprehensif pemahaman Keislamannya. Hatta bahkan memelopori pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI) tahun 1946. Demikian juga dengan Soekarno yang senantiasa selalu diposisikan bertentangan dengan Natsir dalam berbagai hal ternyata merupakan sosok yang senantiasa menunjukkan relevansi Islam dengan masyarakat yang selalu bergerak.

* * *

Intelektual Muslim Indonesia menurut Lafran Pane memiliki 6 (enam) karakteristik utama, yakni: 1) Meyakini kesempurnaan ajaran Islam, 2) Memiliki keseimbangan ilmu pengetahuan dan keseimbangan hidup, 3) Sebagai pembaharu dalam segala bidang kehidupan, 4) Menjadikan Keislaman-Keindonesiaan-Keilmuan sebagai titik tolak gerakan, 5) Pemersatu umat Islam dan pemersatu bangsa Indonesia, 6) Senantiasa menghabiskan umurnya untuk berjuang mengangkat harkat dan derajat rakyat Indonesia.

Lafran Pane juga menuliskan, setidaknya ada enam hal yang harus dipertahankan oleh intelektual Muslim Indonesia, yaitu: 1) Dasar (Filsafat) Negara yaitu Pancasila. Dasar Negara ini adalah hasil persetujuan antara semua golongan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan akhirnya dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan Pembukaan UUD dan UUD 1945, 2) Tujuan Negara, yakni seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pembukaan ini juga tidak boleh diubah, 3) Asas Negara, yaitu Asas Hukum. Pada 1945, rakyat mendirikan Negara

Hukum bukan Negara Kekuasaan.

4) Asas Kedaulatan Rakyat. Asas ini tercantum dalam Pembukaan UUD. Negara RI dibentuk di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Pendapat dan keinginan rakyatlah yang harus menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya, 5) Asas Kesatuan. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan dan pada sidang-sidang BPUPKI maupun dalam masyarakat kebanyakan yang dipersoalkan adalah apakah negara yang akan dibentuk adalah Negara Kesatuan atau Negara Federal? Akhirnya, tercapai satu persetujuan bahwa yang diinginkan adalah Negara Kesatuan atau dalam bahasa sekarang NKRI.

6) Asas Republik. Persoalan bahwa Indonesia harus berbentuk kerajaan atau republik sudah selesai dibahas dalam berbagai rapat BPUPKI. Seandainya hari ini atau di masa yang akan datang masih ada sebagian masyarakat yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Kerajaan, maka akan kesulitan untuk mendapatkan seorang raja. Lafran memberikan pandangan bahwa ke depan semua negara akan beralih dari bentuk kerajaan ke bentuk yang lain. Sesuatu yang sudah pasti adalah negara dengan bentuk kerajaan tidak akan bertambah lagi di dunia ini.

* * *

Lafran Pane telah mendirikan HMI, ia juga telah meletakkan dasar-dasar pembentukan intelektual Muslim untuk generasi selanjutnya. Namun, dalam proses pembentukan intelektual Muslim, hal ini dilakukan sepenuhnya oleh HMI melalui sistem perkaderan berjenjang, bukan oleh Lafran Pane. Tapi begitu, Lafran Pane merupakan sosok yang sepanjang hayatnya senantiasa terlibat dalam proses-proses perkaderan dalam rangka pembentukan intelektual Muslim tersebut.

Berdasarkan berbagai keterangan dan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa profil kader HMI sebangun dengan

profil intelektual Muslim Indonesia. Hal ini tertulis dengan baik dalam Tujuan HMI, yakni: *Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdikan yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.*

Sebagai tambahan, bagi penulis dan khusus bagi alumni IAIN/UIN/STAIN yang kemudian syukur “menjadi intelektual”, sadarlah zaman telah lama berubah. Kita tentu tidak mau disebut sebatas “suara masa silam” yang tak mahir matematika dan tak bisa dagang, tak bisa tampil sebagai teknokrat dan tak bisa jadi manager profesional dan tak bisa bicara tentang efisiensi. Kebanyakan kita hanya mampu bicara tentang dua hal yang sudah lama, yakni kemerdekaan dan hati nurani. Sebab itu, kadang solusi yang kita tawarkan susah dicerna massa, karena untuk mencontohkan pada hal yang mikro kita kesulitan. Maka, insan akademis seharusnya memang multi-disiplin ilmu dengan interkoneksinya.

Singkatnya, alumni IAIN/UIN/STAIN juga harus menguasai ilmu sejarah, ekonomi, hukum, ilmu pemerintahan, politik, budaya, dan lain-lain. Bukan sekadar tahu. Ungkapan ini sejatinya sudah usang, namun fakta mengharuskan ini ditulis. Berapa banyak aktivis mahasiswa hari ini yang bicara Reformasi 1998 tampak begitu bersemangat, namun ketika pertanyaan lebih dalam tentang sebab-sebab munculnya krisis moneter 1997, mereka diam seribu bahasa. Bagi seorang intelektual Muslim, Akademis, Pencipta, Pengabdikan, Bernapaskan Islam, Bertanggung jawab atas terjadinya masyarakat Indonesia adil-makmur, adalah satu paket, tidak terpisah.

SARAN-SARAN

Setelah ditelusuri pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indonesia yang kemudian dituangkan dalam karya sederhana ini, maka penulis menyarankan:

1. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang pemikiran Lafran Pane tentang intelektual Muslim Indo-nesia, sebab karya ini adalah penelitian khusus perdana perihal Lafran Pane, tentunya banyak kekurangan.
2. Perlu diadakan penelitian-penelitian lainnya tentang Lafran Pane, penulis menyarankan tentang sistem ketatanegaraan kita. Prof. Drs. Lafran Pane adalah seorang Guru Besar Ilmu Tata Negara. Lafran pernah menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan hal penting yang harus dikedepankan dalam membangun sebuah bangsa, artinya tidak boleh ada UU yang bertentangan dengan UUD 1945.

PENUTUP

Demikianlah karya ini ditulis dalam keadaan sadar, untuk memenuhi kewajiban sebagai pemuda, mahasiswa, hamba Allah. Kami haturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya ini. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi, serta segenap keluarga besar bangsa Indonesia. Kepada Allah Swt, semoga hamba bukan golongan yang mendustakan nikmat-Mu. Amin.

Catatan:

- ¹ Puisi ini ditulis W.S. Rendra untuk putranya, Isaias Sadewa, dalam W.S. Rendra, *Potret Pembangunan dalam Puisi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993, hlm. 97–98. Belum jelas siapa sosok yang wafat dalam puisi ini, apakah dirinya sendiri (Rendra) atau pahlawan terdahulu. Namun dari tahun penulisannya, 1977, bisa jadi berkaitan atau terinspirasi dari peristiwa sekitar tahun 1970-an, di antaranya kecurangan Pemilu 1971 dan Aksi Golput, konfrontasi gerakan sosial dengan militer, bagi mahasiswa dikenal dengan Gerakan Mahasiswa '74. Gerakan perlawanan penggusuran rakyat kecil untuk pembangunan TMI tahun 1972, hingga demonstrasi memrotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, dilanjutkan dengan usaha-usaha Pemerintah tahun 1977 untuk “mengandangkan” gerakan mahasiswa

yang berujung pada pemberlakuan NKK/BKK 1978, dan banyak peristiwa lainnya yang luput dari catatan sejarah. Akhirnya, tentu Rendra yang lebih tahu sebab-sebab turunnya puisi ini.

- ² W.S. Rendra, “Aku Tulis Pamflet Ini”, dalam W.S. Rendra, *Potret Pembangunan dalam Puisi*, hlm. 31–32, bait 1–4 tidak dicantumkan dalam kutipan ini.
- ³ Padahal, jika dilihat dari hasil Kongres terdapat juga poin-poin yang menegaskan peran kebangsaan HMI di antaranya: Menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar bersatu padu dalam menyusun kekuatan untuk merebut Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia. Menegaskan bahwa HMI tetap menjadi milik dan anak kandung umat Islam dan bukan menjadi bawahan (*underbouw*) dari salah satu partai politik Islam mana pun juga, dan lain-lain selengkapnya dalam Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI...*, hlm. 111.
- ⁴ Wawancara penulis dengan Agussalim Sitompul (11/06/2009).
- ⁵ Lihat juga sebab keluarnya Raden Syamsurizal dari Jong Java (sayap organisasi Budi Utomo untuk pemuda) pada bagian akhir Bab III dalam buku ini. Syamsurizal kemudian bergabung dengan Jong Islamieten Bond (JIB).

WAWANCARA IQBAL PANE (Putra Almarhum Lafran Pane)

Sejak kertas ditemukan, usaha untuk mencerdaskan manusia banyak terbantu, demikian juga di Indonesia meski jauh dari merata. Ledakan sarjana Indonesia dimulai tahun 1960-an hingga kini. Mimpi *founding fathers* Indonesia akan bermanfaat bagi dirinya (*kesejahteraan umum*) dan dunia (*perdamaian*) tampaknya semakin terang, sebab ribuan sekolah, tidak pernah berhenti mendidik penerus cita-cita bangsa. Namun, tingginya angka kemiskinan dan samarnya keadilan di negeri ini menyadarkan kita bahwa peran intelektual masih bias.

Mayoritas koruptor ternyata lulusan SMA, bahkan per-guruan tinggi, membuat siapa saja ingin tahu jawabnya, inikah pendidikan Indonesia? Terbalik dengan peringkat sepak bola Indonesia hampir selalu nomor 100-an, Indonesia justru menjadi 5 besar negara terkorup di dunia. Semakin men - cengangkan tatkala kita jalan-jalan di negeri ini, hampir setiap pojok terdapat rumah ibadah, setiap kantor, sekolah. Akhirnya, pintar saja tidak cukup, kejujuran semakin langka.

Untuk konteks HMI, hal ini sudah lama diresahkan, organisasi ini dikenal gudangnya intelektual, markasnya orang pintar, dan lain-lain. Sehingga, jika ada orang luar yang diundang mengisi diskusi di HMI, biasanya dia selalu bilang, “*Saya bukan pembicara, tapi fasilitator saja, kita diskusi saja yah....*” Namun, hal ini menjadi sumir ketika ada sebagian anggota, alumni HMI yang terbukti tidak jujur, meski jumlahnya sangat sedikit dibanding anggota yang dikader, hal ini tetap harus dicarikan obatnya.

Alhamdulillah, Lafran Pane sebagai pendiri HMI menurut

banyak cerita (*oral history*) dapat dijadikan model dalam kejujuran dan kesederhanaan. Banyak sudah diulas dalam buku ini, namun akan lebih lengkap jika kita simak langsung dari Iqbal Pane, putra keduanya. Saya bersyukur bisa mewawancarai Iqbal Pane dalam suasana kebahagiaan Indonesia, Senin 17 Agustus 2009, di rumahnya di Bintaro Jaya, Tangerang.

Assalamu'laikum

Iqbal Pane : *Wa'alaikumussalam*

Ini Pak Iqbal Pane 'kan? Putranya Bapak Prof. Drs. Lafran Pane?

Iqbal Pane : Benar, saya putra kedua beliau, Ayah memiliki 3 anak, 2 putra, satu putri, saya putra kedua, namun sekarang saya putra satu-satunya, abang saya sudah lama wafat.

Bapak juga dulu di HMI?

Iqbal Pane : Iya, namun hanya sampai tingkat komisariat, Bang Toga, abang saya, juga sampai komisariat, Teti juga sama, kami lebih aktif di organisasi kampus.

Pak Lafran tidak usahakan Anda menjadi pimpinan di HMI?

Iqbal Pane : Sama sekali tidak, Bapak malah tidak pernah cerita tentang HMI pada saya, sama sekali tidak. Apalagi cerita-cerita beliau sebagai pendiri HMI. Saya tahu itu malah dari orang lain. Kami diberi kebebasan, saya ber-HMI dengan cara saya, lagi pula HMI itu milik semua, organisasi ini sejak awal egaliter.

Bagaimana pandangan keluarga besar Sutan Pangurabaan Pane terhadap Pak Lafran?

Iqbal Pane : Wah gimana yah..., hal ini sebaiknya ditanyakan kepada anaknya Sanusi Pane, anaknya perempuan semua, Armijn Pane tidak punya anak. Armijn Pane bergerak di bidang sastra, Sanusi Pane sastrawan dan sejarawan, sementara ayah saya, Lafran Pane, di bidang pendidikan. Secara umum, Ayah biasa dimintai tolong dan pendapat oleh keluarga besar, ya sebagaimana keluarga-keluarga lainnya. Dulu yang mengurus keluarga itu Pak Lafran, beliau pernah berkata, dulu saya yang urus keluarga, sekarang tugas kau, itu yang saya belum bisa lakukan sebaik beliau, setelah Bang Toga wafat, saya jadi anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga...

Tentang keluarga Lafran Pane?

Iqbal Pane : Sanusi Pane dan Armijn Pane itu kakak kandungnya, Lafran anak bungsu dari istri pertama Sutan Pangurabaan Pane, dua adiknya Lafran adalah anak dari istri Sutan Pangurabaan yang kedua. Namun, Pak Lafran sangat perhatian pada kedua adiknya, tidak ada perbedaan adik tiri dan adik kandung baginya, meskipun Ayah tidak merasakan kasih sayang ibu kandungnya sejak lahir. Sanusi Pane suka menulis, dua anaknya mengikuti jejaknya sebagai penulis.

Anda sendiri ?

Iqbal Pane : Saya anak kedua dari istri Pak Lafran yang pertama, Ibu Martha Dewi. Dari istri kedua beliau tidak dikaruniai anak.

Bagaimana Pak Lafran mendidik Anda?

Iqbal Pane : Beliau tegas, khususnya dalam hal dasar seperti shalat 5 waktu, saya dan saudara disabet jika tidak shalat. Tiap malam Ayah tidur paling lambat jam 9 atau 10, bangun

pukul 3, Shalat Tahajjud, lalu bangunkan kami, Shalat Subuh, kemudian olahraga, hidupnya teratur.

Saya dengar Pak Lafran itu pendiam, benar demikian?

Iqbal Pane : Saya kira demikian, Ayah tidak banyak bicara, yang penting-penting saja. Termasuk ketika hadir dalam kegiatan kampung, Ayah banyak diam, ia bicara seperlunya saja. Tanggal lahirnya pun dia rahasiakan, baru saya buka ketika beliau sudah wafat. Bang Akbar Tandjung tanya berapa usia Pak Lafran? Setelah kode-kodean dengan adik saya, akhirnya saya dan adik saya sepakat membuka rahasia itu, yang tercantum selama ini 23 April itu bukan tanggal lahir Pak Lafran, Pak Lafran itu lahirnya 5 Februari 1922. Jadi, setiap HMI ulang tahun, di rumah kami juga merayakannya.

Perhatian Pak Lafran terhadap keluarganya?

Iqbal Pane : Sangat perhatian, terutama soal sikap hidup, kejujuran, kesederhanaan. Satu hal lagi, mengenai pendidikan dan kesehatan, walau ekonomi keluarga susah.

Bagaimana Pak Lafran menerapkan Islam dalam keluarga?

Iqbal Pane : Kakek saya dulu pengurus Muhammadiyah, teman Ayah juga banyak orang Muhammadiyah, tapi beliau sampai akhir hayatnya tidak pernah ikut Muhammadiyah. Seingat saya, Pak Lafran tidak pernah absen zakat, kurban, dalam kondisi apa pun. Saya masih antre untuk beli minyak tanah sekitar tahun 1964, 1965. Yang saya ingat, zakat dan kurban tak pernah dia lupa.

Saya dengar Pak Lafran Pane tidak punya rumah, saya dapatkan arsip dari IKIP Yogya. Hal ini cukup aneh mengingat beliau seorang guru besar di kampung, pendiri

HMI, mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI, masak sejak tahun 1946–1991 di Yogya Pak Lafran tidak sanggup beli rumah?

Iqbal Pane : Kami sekeluarga tidak pernah persoalkan itu, ya memang secara ekonomi kami biasa saja, anaknya semua sekolah. Rumah kami pindah-pindah dari Sosrowijayan, Pingit dan Mrican. Sosrowijayan dan Pingit itu sewa, sedang yang di Mrican itu rumah dinas. Pak Lafran tidak punya rumah di Yogya. Saya sudah berusaha meringankan beban keluarga dengan mencari beasiswa, tapi saya kesal Ayah selalu menolak.

Pak Lafran menolak beasiswa Anda? Maksudnya?

Iqbal Pane : Waktu saya kuliah di UGM, ada kolom pengisian daftar gaji orangtua. Ayah mengisi gaji asli, seingat saya sekitar Rp. 20.000. Akhirnya, saya bayar kuliah lebih banyak dari yang lain. Saya waktu itu bilang kenapa tidak ditulis Rp. 19.000 saja. Beliau marah sama saya, katanya, “*Kau mau aku bohong, sudahlah, gaji segitu ya tulis segitu.*” Beliau tidak mau memanipulasi gaji. Padahal, keluarga teman saya yang pendapatan orangtuanya lebih besar justru bayar kuliahnya sedikit, karena yang diisi bukan pendapatan sebenarnya per bulan. Itu baru pertama.

Maksudnya, Pak Lafran menolak beasiswa lagi?

Iqbal Pane : Iya, saya benar-benar ingin meringankan beban orangtua. Sekitar tahun 1973, saya ikut tes beasiswa dari Pertamina di UGM, ada tes tulis dan wawancara. Waktu itu, yang wawancara saya Pak Yusuf Hutagalung. Alhamdulillah, saya lulus semua tes itu, tinggal satu syarat lagi yaitu surat pernyataan tidak mampu dari keluarga. Saya bilang ke Ayah soal itu, beliau malah berkata, “Tidak, aku mampu bayar kuliahmu.” Akhirnya, gagal lagi saya dapat beasiswa.

Padahal, saya paham betul dalam 12 bulan gajinya, dua bulan untuk bayar kuliah saya, belum adik-adik, sumbangan ini dan itu. Keinginan saya untuk meringankan beban orang tua pun gagal. Sementara kawan saya yang ekonomi keluarganya lebih bagus dapat beasiswa.

Wah, keras Pak Lafran tampaknya, menurut Bapak apa sebenarnya prinsip hidup beliau dalam konteks ini?

Iqbal Pane : Intinya, Pak Lafran masih melihat banyak orang yang lebih membutuhkan beasiswa itu ketimbang saya. Bapak juga pernah tolak beasiswa dari perusahaan minyak Amerika.

Bisa anda ceritakan?

Iqbal Pane : Adik kandung ibu saya, namanya Pak Iskandar,¹ kebetulan salah satu Direktur STANFAC, itu perusahaan minyak dari Amerika (termasuk juga *Shell, Caltec*). Dia sengaja ke Yogya untuk mencairkan beasiswa dari STANFAC, menginapnya di Hotel Ambarukmo (sekarang samping Ambarukmo Plaza). Saat ketemu, Om Iskandar bilang, “Iqbal... kau tulis surat permohonan beasiswa yah, nanti kau dapat.”

Saya pulang, ketemu Ayah, lagi-lagi jawabnya, “Tidak usah, saya masih mampu bayar kuliahmu, banyak orang lain yang lebih parah dari kita dan jelas mereka lebih butuh.” Padahal, kalau saya tulis surat pasti saya dapat beasiswa. Lama-lama saya paham prinsipnya.

Prof. Dr. Azyumardi Azra pernah menulis, Lafran Pane cenderung menarik diri dari kesuksesan alumni-alumni HMI, Lafran tidak memanfaatkan HMI untuk dirinya?

Iqbal Pane : Saya kira Anda bisa menilai, Pak Lafran tidak pernah minta fasilitas ini dan itu, jabatan, uang, ini bukan

¹ Cerita tentang Iskandar dapat dilihat di <http://dyhary.wordpress.com/2007/12/04/anak-nomor-lima/>

agar beliau dibilang jujur oleh orang, memang karakter Pak Lafran begitu. Pernah ada wali murid datang ke rumah karena anaknya lulus di UGM karena rekomendasi Ayah, orang itu datang naik andong membawa banyak sekali barang. Pak Lafran bicara agak keras, “Semua barang tinggal di luar, kecuali makanan.” Orang itu sampai berkaca-kaca, dia bilang, “Ini hanya ucapan terima kasih.” Pak Lafran menimpali, “Cukup anak Anda kuliah yang rajin, itu sudah mantap, sekaligus menjaga integritas saya.”

Data-data mengenai Lafran sangat minim, jauh dibanding saudaranya Armijn Pane dan Sanusi Pane, kabarnya Pak Lafran tidak suka publikasi, seperti pendirian HMI yang memang hening?

Iqbal Pane : Saya kira begitu, tapi mengenai ini sebaiknya jangan hanya tanya saya, coba tanya orang lain juga.

Oh ya, ada usaha dari keluarga untuk menuliskan tentang Pak Lafran Pane, biografi atau sejenisnya?

Iqbal Pane : Oh tidak.

Apakah Pak Lafran ikut partai politik?

Iqbal Pane : Ayah tidak ikut partai politik apa pun, ia sudah memilih sebagai pendidik, dunianya di kampus, tapi ia tidak melarang alumni HMI masuk partai politik, ini soal pilihan saja. Dari yang saya lihat, Ayah menikmati statusnya sebagai pendidik, segala masalah seakan hilang ketika di depan kelas, beliau bahagia mengajar.

Bukannya Pak Lafran pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI?

Iqbal Pane : Benar, tapi untuk kolom partai beliau kosongkan, maksud saya tidak ditulis. Padahal beliau itu

dosen, jelas pegawai negeri atau KORPRI. Seingat saya, waktu itu beliau bertanya pada saya, “Iqbal, jika kolom ini tidak aku isi, akan membahayakan kamu?” Maksudnya status saya yang juga saat itu KORPRI. Waktu itu, KORPRI memang identik dengan Golkar. Saya jawab, “Saya sudah dewasa, Ayah, diberhentikan dari pegawai negeri pun tidak masalah.” Akhirnya, formulir DPA itu dikembalikan tanpa ada kejelasan Pak Lafran partainya apa, tentunya dengan konsekuensi tidak jadi anggota DPA, sebab waktu itu yang saya tahu, DPA adalah perwakilan partai politik.

Kenapa Pak Lafran tidak tinggal di Jakarta?

Iqbal Pane : Oh itu, sepertinya beliau betah di Yogya, namun yang pasti beliau pernah katakan, “Istri saya dan anak saya sudah istirahat di Yogya,” dimakamkan maksudnya. Selain itu, juga pertimbangan sekolah anak. Beberapa jabatan banyak yang ditawarkan di luar Yogya, seperti rektor, dan lain-lain juga beliau tolak. Saat ibu saya wafat, saya tawarkan tinggal di Jambi atau di Jakarta, beliau tetap tidak mau.

Tahun 1970, Pak Lafran diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara IKIP Yogyakarta, beliau sampaikan pidato saat itu, menurut Bang Chumaidy penjagaan saat itu sangat ketat mengingat tahun 1971 akan dilaksanakan pemilu?

Iqbal Pane : Seingat saya, tahun 1970 itu pengukuhan guru besarnya, pengangkatannya sebelum itu sekitar tahun 1966 jika tidak keliru. Saya tidak hadir waktu acara itu, Ayah sendiri tidak bilang jika beliau akan dikukuhkan sebagai guru besar, tampaknya peristiwa itu biasa saja baginya. Jadi, saya tidak tahu persisnya seperti apa acara itu.

Biasa saja..., maksudnya? Bukankah pengukuhan guru besar itu sejarah tersendiri?

Iqbal Pane : Itu penilaian saya saja, sebab pernah juga saya

punya pengalaman, saat itu saya bergegas pulang ke rumah, karena telah dinyatakan lulus dari UGM. Tiba di rumah, Ayah lagi baca koran, Ibu masak di dapur. Sontak saya teriak, “Ayah, aku sudah lulus.” Apa responsnya? Ia hanya bilang, “Oh ya, jadi kau sudah lulus, selamat yah.” Setelah itu, ia melanjutkan baca koran, Ibu juga begitu. Tidak ada acara peluk-pelukan, apalagi selamatan, ia dingin saja menanggapi kelulusan saya, padahal saya termasuk lulusan tercepat. Jadi, ia menganggap peristiwa itu biasa saja, tampaknya demikian juga dengan pengukuhannya sebagai guru besar itu.

Anda pernah dapat penghargaan dari Presiden Soeharto?

Iqbal Pane : Bukan saya, saya hanya menerima, tidak lebih dari itu. Itu penghargaan buat Pak Lafran.

Menurut Pak Lukman, Pak Lafran pernah tidak diberi tunjangan saat mengajar di IKIP?

Iqbal Pane : Saya juga dengar dari orang-orang, namun saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Ayah sendiri juga tidak pernah persoalkan itu di rumah, biasa saja.

Sekitar tahun 1964, 1965, 1966 keras disuarakan HMI harus bubar, bagaimana keadaan keluarga Anda?

Iqbal Pane : Biasa saja, hanya jika sore biasanya Ayah keluar rumah, kemudian pulang pagi. Beliau hanya berpesan jika ada yang ketok pintu cari saya, pintunya tidak usah dibuka. Kabarnya, beliau di Karangajen atau di Kauman, kalau tidak salah di rumah temannya, Pak Jarnawi. Pernah suatu saat, kami bangun pagi, rumah sudah dicoret-coret, banyak tulisan tidak keruan tentang Lafran Pane... dan HMI..., intinya hujatan. Besok malamnya tetangga-tetangga tanpa diminta sudah banyak yang tidur di teras rumah, ada juga beberapa mahasiswa. Seingat saya, waktu itu zamannya KAMI, KAPI, Bang Mahadi dan teman-temannya dulu sering ke rumah.

Kami juga bingung, sebab Ayah hanyalah seorang pendidik di kampus, beliau tidak berpolitik.

Siapa saja dulu yang sering main ke rumah?

Iqbal Pane : Banyak, seingat saya, Pak Padamunia Lubis, Bang Chumaidy, Bang Agus, Bang Senopati, Bang Beddu Amang, Bang Mahadi, banyak sebenarnya, hanya kurang hafal, saya sendiri memang di HMI hanya sampai tingkat komisariat. Jika mereka bicara HMI, saya hanya mendengar.

Apa kritik Pak Lafran terhadap Orde Baru?

Iqbal Pane : Yang saya dengar, beliau pernah berpesan pada alumni HMI, “Silakan kalian aktif di PPP, PDI, Golkar, tapi tolong Islam jangan dimusuhi,” sebab pada masa-masa awal Soeharto memang Islam terkesan dimusuhi. Beliau sering ingatkan, jika kader HMI itu bukan hanya kader Islam, tapi juga kader bangsa Indonesia, semua harus dirangkul.

Kabarnya... Pak Beddu Amang pernah memberikan Pak Lafran mobil, namun ditolak, bisa Anda jelaskan?

Iqbal Pane : Wah, saya sama sekali tidak tahu itu, Ayah tidak pernah cerita. Ada memang kabar, jika alumni di Jakarta patungan untuk membelikan rumah, namun pastinya saya tidak tahu. Setahu saya, hingga akhir hayat Pak Lafran, kami tidak punya rumah. Beliau orang yang jujur dan sederhana, sama sekali tak mau ada tanggungan, termasuk ketika sakit, beliau tidak minta-minta tolong orang untuk bayar rumah sakit.

Anda pernah ditawarkan oleh partai politik untuk jabatan tertentu?

Iqbal Pane : Pernah, tapi saya ingat Ayah, malu saya, apalagi saya bukan mantan aktivis yang sangat paham politik. Sekali lagi, saya hanya sampai komisariat di HMI. Sejak itu, tak

pernah ada tawaran lagi, mungkin mereka tahu, karena almarhum ayah saya begitu, anaknya kemungkinan sama.

Ada pesan khusus semacam wasiat Pak Lafran sebelum wafatnya untuk Anda?

Iqbal Pane : Tidak ada, masalah warisan kami selesaikan dengan baik. Alhamdulillah, saya sudah bekerja saat itu.

Wasiat tentang HMI mungkin?

Iqbal Pane : Ha, ha, ya tidaklah, HMI itu bukan milik Lafran Pane, HMI itu milik umat, jadi tidak ada pakai wasiat-wasiat, Pak Lafran bukan sosok yang suka kagum pada dirinya dan merasa ini dan itu.

Selama bekerja di Jambi, ada yang kenal Anda sebagai putranya Pak Lafran?

Iqbal Pane : Awalnya tidak ada, dan saya senang dengan itu. Tapi pernah kejadian Ayah mengunjungi saya. Saat saya kerja, beliau tidur di rumah. Siangnya, Bupati Batanghari menemui saya dan bertanya, “Benar Pak Lafran ayah Anda?” Saya jawab, “benar.” Lalu katanya, “Kenapa tidak lapor, Pak Lafran itu pejabat tinggi negara, anggota DPA, jadi harus dilayani, saya sendiri tahu dari Pak Gubernur.” Saya bingung, sebab setahu saya, Ayah ke Jambi bukan urusan Negara, tapi urusan pribadi, menjenguk saya putranya.

Rupanya Gubernur Jambi periode 1978–1989, saat itu namanya Pak Masjchun Sofwan (lahir di Blitar, 7 September 1927), juga alumni HMI. Beliau sangat mengenal Ayah. Pernah di depan pejabat pemda beliau bertanya pada saya, “Kamu anaknya Pak Lafran yah, yang HMI itu, saya juga HMI.” Saya waktu itu malu. Hubungan Ayah dengan beliau baik sekali. Saat istrinya Pak Masjchun wafat, Ayah ke Jambi menghadiri pemakamannya.

Bagaimana pengalaman Bapak kerja di Pekerjaan Umum (PU), sering dibantu alumni HMI?

Iqbal Pane : Saya profesional, kuliah S-1 di UGM, S-2 di ITB, ikut berbagai pelatihan yang berhubungan dengan kerja saya. Saya mulai dari nol, tidak langsung ke pusat, saya ditempatkan di daerah-daerah. Tidak ada keistimewaan dan saya sangat menikmati itu. Pernah ada tawaran jadi Kakanwil, saya tolak, karena saya tidak mau naik jabatan tidak wajar, itu malah berbahaya. Ayah tidak pernah mengajarkan itu. Saya tak mau terbebani. Ayah sangat keras dalam prinsip ini, jangan sampai mengambil, menggunakan sesuatu yang bukan hak kita. Saya hanya berusaha meneladani beliau. Saya suka dalam komunitas yang tidak ada orang HMI-nya, di PU cukup jarang. Padahal, penting sekali sebenarnya orang HMI masuk PU untuk bisa mengontrol dari dalam.

Apa prinsip hidup Pak Lafran yang Bapak terapkan dalam hidup?

Iqbal Pane : Ya itu, saya tidak pernah meminta-minta jabatan, apalagi memakai embel-embel HMI. Tidak apa-apa jabatan saya lambat naik. Setiap ingat Ayah, saya malu. Pak Lafran sebagai pendiri HMI saja tidak pernah memanfaatkan HMI untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Menurut Anda, apa pernah terpikir oleh Pak Lafran jika HMI akan berkembang seperti ini?

Iqbal Pane : Waktu itu ‘kan masih zaman kemerdekaan tahun 1947, saya rasa pikiran beliau sederhana saja, saat mendirikan HMI beliau berpikir para intelektual yang beragama Islam jangan malu mengaku sebagai Muslim. Islam itu agama besar dan mulia, jadi kenapa harus malu. Tapi sebaiknya silakan Anda tanya Bang Agus, Bang Chumaidy, dan lain-lain. Zaman dulu memang begitu, sebagian orang,

khususnya kaum intelektual, malu mengaku bahwa dirinya Muslim.

Pak Lafran naik haji berapa kali, Pak?

Iqbal Pane : Pak Lafran naik haji sekali saja, itu pun jatah Pak Mintaredja (Menteri Sosial) dikasihkan ke beliau. Sedang Ibu dapat dari Pak Mukti Ali (Menteri Agama). Seingat saya, waktu itu tahun 1977. Jika tidak begitu, mau dapat ongkos haji dari mana? Ayah lebih memprioritaskan pendidikan dan kesehatan keluarga.

Saya masih terheran-heran, Pak Lafran tidak punya rumah itu lho...?

Iqbal Pane : Kita saja yang heran, tapi beliau biasa saja. Dulu waktu resmi menjadi anggota DPA, protokoler tanya, “Pak Lafran, ada yang perlu disiapkan?” Beliau menjawab, “Tidak ada, hanya rumah saya tidak ada telepon.” Semua anggota DPA saat itu tergelak-gelak, termasuk Raden Pangabean yang mantan Menhankam waktu itu, “Aneh, anggota DPA rumah-nya tidak ada telepon.” Memang, di rumah kami tidak ada telepon, termasuk saat Pak Lafran sudah menjadi guru besar. Permintaan itu remeh sekali. Jadi, permintaan yang bagi beliau penting sekali, menurut anggota DPA lainnya remeh sekali, hanya pasang telepon.

Hubungannya dengan istrinya bagaimana yang Anda tahu?

Iqbal Pane : Ia pengagum wanita, ia sangat menghormati wanita, mungkin karena pengalamannya. Pernah saya mengeluh saat makan, “Wah, makanannya kurang enak.” Dia marah dan teriak pada saya, “Makan!! Makan !! Kau habiskan itu.” Dia tidak suka kami mengkritik masakan Ibu, dia sangat menghormati Ibu. Seingat saya, dia tidak pernah makan di luar, makannya selalu di rumah, masakan Ibu.

Tentang uang?

Iqbal Pane : Ayah hati-hati sekali, sering dia ingatkan hati-hati dengan uang, pernah saya bolak-balik Yogya hingga 3 kali, dia tegur, “Kenapa kau bolak-balik, uang dari mana itu?” Saya jawab, karena ada beberapa urusan. Dia bilang, “Sudahlah, kau tabung saja jika lebih uangmu.” Pertanyaan-pertanyaannya “uang dari mana itu?” sudah biasa kami dengar.

Bapak itu susah sekali terima barang apa saja dari orang lain. Jangankan orang lain, saya putra kandungnya untuk membelikan dia TV saja, bukan main susahnyanya. Di rumah waktu itu TV hitam-putih. Akhirnya, saya dan adik saya Teti sepakat membelikan TV warna untuk beliau. Itu pun strateginya TV itu saya beli kemudian diantar ke rumah jam 9 malam saat beliau sudah tidur. Paginya, beliau bertanya pada saya. Untungnya, pagi itu saya harus segera ke luar kota, saya bilang, “Wah, saya tidak tahu. Sudahlah, tak usah dipikirkan, saya pamit dulu, Ayah.”

Sebab, jika tidak begitu, beliau tidak akan mau menerima, pasti itu. Kalau beliau mau sesuatu, beliau akan membeli pakai uang sendiri.

Dampaknya terhadap Anda secara pribadi?

Iqbal Pane : Saya kerja di pekerjaan umum (PU), Anda tentu tahu bagaimana banyaknya proyek di PU? Sampai sekarang, saya tidak mengerti main duit, lobi-lobi saja terus terang saya tidak mengerti. Pernah saya ditawari menjadi Kepala Bina Marga di Lampung, tapi harus menemui Sekda. Saya bilang, “Kalau memang waktunya saya diangkat, silakan. Kalau tidak ya juga tidak apa-apa.” Saya tidak mau menerima jabatan panas, lalu setiap waktu harus memberi upeti pada orang-orang tertentu. Saya mau yang wajar-wajar saja, itu tahun 1982. Prinsip-prinsip orangtua sedikit-sedikit saya praktikkan, meski saya akui saya bukanlah Lafran Pane,

artinya tidak sepenuhnya dapat seperti dia. Pak Lafran itu jujur sekali. Ke mana-mana ia naik sepeda, makannya standar saja, pernah sepedanya hilang, dibelikan alumni pun ia tolak.

Setelah Pak Lafran meninggal, apa yang Anda lakukan?

Iqbal Pane : Saya bertekad harus punya rumah sendiri, sebab Ayah tidak punya rumah. Rumah yang di Mrican pasti akan diambil oleh IKIP, itu ‘kan rumah dinas. Barang-barang di rumah berupa kursi, lemari, meja makan, punya kenangan tersendiri bagi saya, tempat saya pernah ngobrol, makan bersama Ayah dan Ibu. Saya mau membeli rumah, tapi uang tidak cukup, akhirnya saya membeli tanah dulu di Bintaro, waktu itu tahun 1991. Saya juga tidak mau meminta-minta, meski Direktur Pembangunan Jaya yang mengurus perumahan itu adalah adik ibu saya. Akhirnya, rumah itu bertahap saya bangun.

Apa kritik Anda terhadap Pak Lafran Pane?

Iqbal Pane : Saya juga gimana yah, mungkin sudah karakter beliau. Beliau itu sama sekali tidak ada ambisi, apalagi soal uang dan kekuasaan, padahal itu ‘kan manusiawi. Ambisinya hanya bagaimana menyekolahkan anaknya. Itulah yang saya heran, saya tidak tahu ini kritikan atau bukan. Namun yang jelas beliau telah memberikan pendidikan dan kesehatan yang sangat layak untuk istri dan anak-anaknya.

Seperti yang saya katakan, Pak Lafran itu kebangetan jujurnya, terus terang saya malu. Maka, jika ada orang yang kenal dengan ayah saya seperti Bang Chumaidy, dan lain-lain, maka saya harus perlakukan dengan sebaik-baiknya.

Penilaian Anda terhadap kondisi hari ini? Partai politik misalnya?

Iqbal Pane : Wah, ini bukan bidang saya. Saya hanya mengutip pendapat orang, katanya partai politik seperti

gerombolan orang saja, mestinya ‘kan ada pembinaan, perkaderan, pengawasan, dan sebagainya. Sekali lagi, ini kesan saja. Saya juga tidak tahu apakah HMI pikirkan itu. Pemahaman saya tentang politik terbatas.

Terakhir, penilaian Pak Iqbal tentang HMI?

Iqbal Pane : Wah, gimana yah..., itu juga saya tidak tahu terlalu banyak. Anak saya, Amalia Pane, kuliah di Fakultas Kedokteran UI, katanya HMI tidak dikenal, padahal justru seingat saya misi HMI ‘kan terutama di fakultas-fakultas umum seperti itu.

Ada lagi yang hendak disampaikan, Pak?

Iqbal Pane : ya itu, jika ingin mengambil pelajaran dari Pak Lafran, teladani sifat kejujuran dan kesederhanaan beliau. Jujur dan sederhana itu fundamental.

Jakarta 17 Agustus 2009

WAWANCARA MAHADI SINAMBELA

Ada cerita tentang Pak Lafran, Bang?

MS : Sekitar tahun 1970-an, saat jaya-jayanya HMI, kami mengadakan Maperca (Masa Perkenalan Anggota). Pesertanya banyak sekali, maka penjagaan ketat. Kita di Yogya punya korps khusus untuk keamanan, namanya KORBA. Pak Lafran datang naik sepeda, oleh seksi keamanan yang menjaga gerbang, ia dilarang masuk karena tidak ada *Identity Card*. Ia pun menunggu di gerbang itu, sampai ada panitia senior yang kenal, barulah ia masuk. Ia tidak marah, malah senang. “Ini gambaran jika HMI cukup berkembang, anggota barunya makin banyak, wajar tidak kenal saya,” katanya.

Masih ingat Bang, siapa nama-nama dari cerita itu?

MS : Wah, sudah lupa, kejadian itu hampir 40 tahun yang lalu, seingat saya Maperca itu dilaksanakan di Gedung Sono Budoyo Yogyakarta. Yang perlu kita tiru adalah kesabaran dan kesederhanaan Pak Lafran. Dia sama sekali tidak pernah menonjol-nonjolkan dirinya sebagai pendiri HMI.

Waktu asas tunggal?

MS : Supaya kau tahu, Pak Lafran itu latar belakang keluarganya kalau tidak Sosialis, mungkin lebih cenderung ke PKI, tapi kayaknya lebih ke Sosialis. Partainya Partindo, partai ini lebih ekstrem dari PNI, dekat-dekat ke PKI. Atau bisa diposisikan di tengah-tengah antara PKI dan PNI. Bapaknya Sutan Pangurabaan, kakaknya Armijn Pane dan

Sanusi Pane saya kira Sosialis. Nah, justru pendirian HMI itu untuk Pancasila itu.

Motif lain dari pendirian HMI menurut Abang apa?

MS : Dia pernah cerita sama saya, saat itu orang-orang khususnya mahasiswa malu sama Islam. Mengaku saja malu, apalagi mengamalkan Islam. Maka, ia pelopori bikin organisasi Islam. Mungkin cita-citanya tidak terlalu hebat, HMI harus begini dan begitu, harus ada NDP kayak Cak Nur, dan lain-lain. Lafran lebih banyak bicara tentang Nasionalisme, mengangkat harkat Islam di mata mahasiswa, intelektual-ulama, dan lain-lain. Sementara di lain sisi, kelompok kiri terus menggarap kelompok mahasiswa ini, mereka memang suka dengan dansa-densi.

Penilaian Abang terhadap Pak Lafran?

MS : Yang paling berkesan ya kejujuran dan kesederhaannya, dan itu tidak dibuat-buat... ya memang karakternya begitu. Pak Lafran ini sebenarnya orangnya sangat lugu dan ikhlas. Lafran itu seorang intelektual, dia dosen, dia dosen Hukum Tata Negara, Filsafat Pancasila, saya dengar banyak mahasiswa yang tidak lulus mata kuliahnya, tak terkecuali anak HMI.

Bisa diceritakan proses Pak Lafran menjadi anggota DPA?

MS : Akbar Tandjung-lah yang menjustifikasi bahwa Lafran Pane itu tokoh nasional dari Yogya, karena itu Lafran layak menjadi anggota DPA (sekarang seperti Wantimpres). Akbar sendiri tentu sadar bahwa segala macam kepercayaan padanya tidak terlepas karena ia mantan Ketum PB HMI. Dan ia sadar, Lafran ini orang yang mendirikan HMI. Sosok Akbar itu penting bagi Golkar untuk menandingi PPP, di samping kepiawaiannya berorganisasi.

Berapa lama Pak Lafran menjadi anggota DPA?

MS : Pak Lafran menjadi anggota DPA kira-kira hampir 2 tahun. Ketika dia anggota DPA, dia disuruh mengukur Jas Safari. Dia mula-mula menolak, lalu ketemu saya di PB HMI, baru saya jelaskan. Alhamdulillah, masuk akal, akhirnya dia bersedia menggunakan jas itu.

Apa hubungan Pak Lafran dengan Islam?

MS : Pak Lafran itu bukan pejuang Islam yang formal, apalagi dikaitkan dengan simbol-simbol dan lambang-lambang. Namun pemikirannya, jangan sampai menjadikan HMI sebagai batu loncatan untuk karier yang lebih tinggi.

Dengan HMI bagaimana hubungan Pak Lafran, Bang?

MS : Waktu itu, sehari-hari dia suka datang ke Dagen, sering bertanya apa yang kalian kerjakan. Ketika saya debat masalah Pancasila dengan kakeknya Anies Baswedan yaitu Pak A.R. Baswedan, Pak Lafran ada di pihak saya. Kala itu, kita diskusi di Yogya, Chumaidy mengatakan asas HMI itu Universal, dia bertahan, dulu Chumaidy terkenal ahli filsafat, NDP-lah. Hamid Ibrahim mengatakan asas HMI itu Islam, saya sendiri bertahan dengan Pancasila. Karena tiga pendapat ini, pendapat saya dianggap pro-Pemerintah, anteknya Ali Murtopo dan segala macam, padahal saya sendiri juga berseberangan dengan Pemerintah. Tapi orang-orang Masyumi, terutama Pak Baswedan itu, tetap ngotot supaya HMI tetap berasaskan Islam. Ya, kita tidak mau HMI seperti PPP, yang simbolnya Islam, namun praktiknya belum tentu.

Bagaimana kepemimpinan HMI di masa Abang?

MS : Umumnya, HMI Cabang Yogya dipimpin oleh orang-orang yang tingkat Keislamannya bagus, minimal bisa dilihat dari kesehariannya. Kayaknya, baru sejak zaman saya orang memimpin HMI tidak perlu pandai khotbah, saya memang

kurang ilmu Keislamannya, saya terpilih menjadi Ketum HMI lebih karena keaktifan saja. Dulu pimpinan HMI itu sangat berwibawa sekali, apalagi di eranya Tawang Alun.

Hubungan Pak Dahlan dengan Lafran ?

MS : Secara umum baik, hanya Pak Lafran memang begitu, tak ada ambisi politiknya. Kalau Pak Dahlan, ia pernah diangkat Pak Harto menjadi anggota DPR, tapi ia tidak setuju dwi fungsi ABRI, akhirnya dia keluar. Padahal, Pak Dahlan sendiri ‘kan militer, dia pernah ikut Wamil. Sejak itulah, Golkar banyak diduduki orang lain. Intinya, keduanya layak dijadikan contoh bagi generasi sekarang.

Kapan mulai kenal Pak Lafran, Bang?

MS : Saya dekat dengan Pak Lafran sebelum terpilih menjadi Ketua Umum HMI Cabang Yogya. Ketika saya banyak dikritik oleh tokoh Masyumi, Pak Lafran banyak men-*support* saya. Namun, Pak Lafran selalu ingatkan saya, agar sabar menghadapi siapa pun.

Sejak dulu memang posisi Pak Lafran setara saja ya, Bang?

MS : Ya iya lah, konsep HMI itu egaliter. Sejak awal ‘kan begitu, Pak Lafran yang memulai.

Apa yang bisa diambil dari Pak Lafran, Bang?

MS : Kesederhanaan. Pak Lafran itu kadang suka bertanya kalau ketemu alumni, “dapat mobil dari mana?” Lafran itu sederhana, dan itu diikuti oleh anaknya seperti Iqbal Pane, dan lain-lain. Ya, yang kayak Pak Lafran itu ya anaknya Iqbal itu, sifatnya mirip Bapaknya, tidak mau terkenal, tidak pernah bilang, “Bang, saya mau ini, mau itu.”

Jakarta, September 2009

WAWANCARA SENOPATI

Selasa, 18 Agustus 2009, bersama Amin Soros (Lapmi), saya berangkat ke rumah Bang Senopati. Dari Pak Iqbal Pane katanya orang ini dekat dengan Pak Lafran. Susah mencari alamat rumahnya, akhirnya ketemu juga. Dulu, ia adalah Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta 1976–1977, Staf Khusus Menpora waktu Mahadi Sinambela menterinya. Namun begitu, rumahnya sederhana sekali, tapi sambutannya meriah. Kami datangnya juga pas waktu makan siang, jadi makin mantaplah.

Bang Seno asli mana?

Seno : Aku asli Padang. Bahasa Medan, Padang, Aceh bisa, Jawa sedikit-sedikit. Nama saja Senopati, tapi aku bukan orang Jawa.

Hubungan Abang dengan Pak Lafran Pane?

Seno : Beliau itu dosen, senior, sekaligus temanku. Intinya suka disuruh-suruhlah.

Jadi dekat sekali dong dengan Pak Lafran?

Seno : Banyak yang dekat, bukan aku saja, tapi dia tetap kasih nilai aku jelek, untuk pelajaran Filsafat Pancasila aku sampai tiga tahun mengulang. Aku kuliah di Universitas Islam Indonesia (UII), Jurusan Teknik Sipil. Lulus kuliah 18 tahun. Bukan aku saja, yang lain juga pada lama. Mas Chumaidy malah tidak ngurus kuliah, kayaknya HMI saja di kepalanya (kami tertawa...).

Apa yang menarik dari Pak Lafran Pane?

Seno : Orangnya biasa saja, yang bikin kami hormat ya itu, dia jujur, sederhana. Bicaranya sekali-kali saja jika penting. Orangnya tidak pernah menuntut ini-itu. Yang saya tangkap, intinya Pak Lafran ingin kemerdekaan diisi oleh orang-orang yang jujur.

Riwayat Abang di HMI seperti apa?

Seno : Setelah menjadi Ketum HMI Cabang Yogya, aku mau masuk ke PB HMI, niat juga menjadi Ketum PB. Pak Lafran ingatkan, “Seno, kalau kau jadi Ketum Cabang tidak apa-apa, tapi Ketum PB nanti dulu, kuliahmu saja diurus dulu.”

Jadi, saya tidak pernah menjadi pengurus di PB HMI. Kalau tidur di sana, hampir tiap hari. Hanya di sana yang bisa nginap gratis, makan juga ada si mbok. Saya tukang kritik PB HMI dari luar. Pernah Bang Akbar mengirim 2 kardus susu ke PB, lalu disembunyikan di ruang Ketum, aku ambil, kemudian aku bawa ke ruang tamu. Aku suruh saja minum ramai-ramai, ‘kan milik umat, ha..ha..ha...

Kayaknya Abang waktu di HMI banyak musuh nih, sering konflik ya Bang?

Seno : Iya, banyak musuh, banyak teman juga, tapi sekarang sudah saling memaafkan. Tahu sendiri, HMI itu gudangnya intelektual, tukang baca buku, diskusi, semuanya pintar bicara.

Hubungan Pak Dahlan dengan Pak Lafran Pane gimana Bang?

Seno : Keduanya bersama-sama melewati masa-masa sulit HMI dulu. Namun, mereka memang sering berseberangan, Pak Dahlan menganggap pikiran Pak Lafran masih

tradisional. Pak Dahlan sangat dekat dengan Mohammad Roem, Soekarno, dan lain-lain. Sementara Lafran ingin HMI tetap independen. Selain itu, aku dengar tampaknya karena cewek juga, biasalah anak muda. Maklum, istri Pak Lafran, Ibu Marta Dewi, banyak disukai pria waktu itu.

Tentang asas tunggal?

Seno : Pada dasarnya, HMI sejak awal tidak pernah menolak Pancasila. Asas Pancasila sudah ada di HMI. Pancasila itu sama dengan Tujuan HMI, ‘kan lima juga. Pak Lafran paham mengenai sikap politik HMI saat menerima asas tunggal dan itu disampaikan di rumah Pak Lafran.

Kabarnya, Pak Lafran sering dikasih barang oleh alumni?

Seno : Banyak kalau itu. Alumni pada dasarnya ingin berterima kasih karena telah banyak belajar di HMI. Salah satunya Mas Solichin, salah satu Dirjen Perindustrian waktu itu, juga ahli wayang. Dia ngasih mobil, tapi ya begitu, ditolak.

Kenapa sih Pak Lafran selalu menolak ketika diberi uang, barang, dan lain-lain oleh orang?

Seno : Motif Pak Lafran macam-macam menolaknya, tapi yang lebih dominan dia menganggap apa yang dilakukannya wajar-wajar saja, tidak ada yang luar biasa. Satu lagi, tampaknya dia merasa masih banyak orang yang lebih butuh dari dia.

Soal Pak Lafran yang hingga akhir hayatnya tidak punya rumah, Bang?

Seno : Dia ‘kan dosen, gajinya kecil. Guru itu posisinya lemah waktu itu, Pemerintah memang kurang perhatian pada guru. Belum lagi, dia juga harus membiayai kuliah anaknya.

Rumah dinasnya di Mrican itu pun hasil kita demo ke Rektor IKIP. Tapi setahu saya, dia tidak persoalkan itu.

Benar Pak Lafran kecewa dengan alumni HMI di zaman Orde Baru?

Seno : Secara umum dia kecewa dengan Orde Baru. Tentang alumni HMI, dia paling tidak suka sama alumni yang berlebihan sambutannya. Pernah ada jamuan makan cukup mewah waktu itu, dia sering bilang, “duit dari mana pula ini?”

Menurutnya, budaya ini bisa turun-temurun di HMI. Pak Lafran itu ‘kan hidupnya wajar-wajar saja. Bang Mahadi sudah sering ingatkan, “Kalau Pak Lafran tidak usah disuguhin macam-macam, biasa aja.” Kayaknya, kalau dulu ada KPK, mungkin dia mau jadi KPK.

Tapi ‘kan dia mau juga jadi anggota DPA, Bang. Bisa diceritakan?

Seno : Waktu itu, alumni HMI di Jakarta, ada Sulastomo, Supri, Akbar Tandjung, Mahadi, dan banyak yang lainnya ingin menampilkan tokoh independen di DPA, lalu mereka sepakat Pak Lafran adalah orang yang cocok. Tapi mereka yakin, kalau Pak Lafran didatangi khusus, pasti dia menolak. Maka, aku yang di Yogya disuruh lobi, Bang Akbar telepon. Itu pun susahny minta ampun, foto saja suruh saya yang nyuci di jalan Sayyidan. Dia hanya punya klise. Kolom partai ia kosongkan.

Menurut Pak Iqbal Pane, Pak Lafran sangat dekat dengan Anda?

Seno : (Seno sempat menangis) Pak Lafran memang pernah bilang, “Seno, kalau aku sudah tidak ada, tolong Iqbal sama Teti kau lihat-lihat yah.” Saya menyesal sekali tidak bisa melihat saat-saat terakhir Pak Lafran.

Penilaian Anda tentang anak-anaknya Pak Lafran?

Seno : Ya gitu, sama kayak Bapaknya, tidak neko-neko, lurus-lurus saja... tapi pernah juga dia risau sama anaknya, si Teti, kok dia tidak aktif di HMI...

Apa pemikiran Pak Lafran menurut Abang?

Seno : Tidak banyak. Pemikirannya fundamental seperti kejujuran, kesederhanaan, itu yang hilang dari HMI sekarang. Yang pintar dan intelektual ‘kan sudah banyak di negeri ini. Yang jujur, itu yang susah.

Jujur itu berat ya, Bang?

Seno : Wah, berat, berat sekali... ‘kan ada istilah “jujur terbujur, curang cemerlang”. Tidak jujur itu termasuk mengakui pendapat orang lain sebagai pendapat kita. Jujur itu langka sekarang, Pak Lafran itu langka.

Oh ya, tadi gimana, tentang Pak Lafran di DPA?

Seno : Sejak sah menjadi anggota DPA, menurut jadwal, tanggal 5 Agustus dia mau dilantik. Tanggal 27 Juli ketemu saya di kampus, dia bilang, “Seno, kapan kau ke Jakarta?” Kujawab, “Dua atau tiga hari lagi.” Tanggal 30 Juli aku ke Jakarta duluan. Rupanya, kata teman saya, Pak Lafran ngecek di kampus, dia juga ke Dagen, tanya, “Seno udah ke Jakarta yah?” Anak-anak bilang, “Udah berangkat, Pak.” Tanggal 1 Agustus, dia ke Jakarta, menginap di hotel melati kelas 1. Dia main ke Diponegoro (PB HMI), aku lagi tidur, ia bangunkan, “Tidur saja kerja kau.” Kubantah, “Tidak Pak, tadi pagi sudah lari-lari aku... ini istirahat saja.”

Dia bilang, “Kau bantu aku, sore ini ke Yogya yah.” Aku tanya, “Untuk apa, Pak?” Kemudian dia jelaskan, “Kemarin ada orang, tukang jahit DPA mengukur jas aku, katanya mau dibikinkan jas, tapi aku tak mau, masak orang belum kerja

dapat jas.”

Kutimpali saja, “Kenapa rupanya, Pak? Itu ‘kan fasilitas.” Pak Lafran bilang keras, “Ah... tak pantas itu. Sudahlah, aku minta tolong kau ke Yogya, ambilin jas aku.”

Akhirnya, setengah hati kubilang, “Okelah Pak, berangkat aku sore ini.” Padahal, malamnya ada pertemuan alumni HMI di Widya Candra, rumah Bang Akbar. Bang Sulastomo katanya juga mau datang.

Karena tak punya ongkos ke Yogya, saya minta alumni. Pas minta sama Bang Mahadi, dia bilang, “Ada-ada saja Pak Lafran. Sudahlah, kau tak usah berangkat. Biar kita selesaikan malam ini.” Akhirnya, saya tidak jadi berangkat, ada jaminan malam itu perkara jas selesai.

Malamnya, Pak Lafran datang ke pertemuan, saya diminta sembunyi sama Bang Mahadi. Pak Lafran bilang, “Di (Mahadi maksudnya), sudah kusuruh si Seno ke Yogya mengambil jasku.”

Terus Bang Mahadi bilang, “Hah, ke Yogya... Emang sudah Bapak kasih ongkos?” Yang di ruangan tertawa semua, ada Bang Supri juga waktu itu. Pak Lafran berkelit, “Ah, si Seno itu pasti nyampailah dia itu.” Pak Lafran bilang lagi tak mau terima jas. Akhirnya, Bang Akbar bilang, “Sudahlah Pak Lafran, jas itu Bapak pakai saja, setelah itu silakan Bapak kembalikan lagi, jadi dipinjamkan bukan dikasih. Kasihan juga si Seno, bolak-balik Yogya, jauh itu.”

Akhirnya, Pak Lafran mengalah, lalu dia bilang, “Oh, dipinjamkan. Tapi kasihan juga si Seno yah.” Lalu saya keluar dari persembunyian, yang hadir tertawa semua, Pak Lafran bilang, “Hoi Seno, kau bilang mau ke Yogya.” Kujawab, “Iya Pak, tapi tidak ada ongkos. Lagi pula orang-orang ini tidak ada yang mau kasih aku ongkos ke Yogya.” (sambil tergelak lebar).

Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Pak Lafran?

Seno : ya sikap hidup, kejujuran, kesederhanaan. Alumni HMI yang jadi apa pun harus jujur, tidak boleh korupsi, tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, anak-istri, dan lain-lain.

Pak Lafran istrinya dua ya, Bang?

Seno : Iya, tapi ia menikah setelah istri pertamanya wafat. Dia lama juga menduda. Akhirnya, setiap acara DPA dia sering diledek anggota lainnya karena tidak ada pendamping, ia pun menikah lagi. Aku sempat juga jadi timses untuk mencarikan Pak Lafran istri.

Kesan Abang terhadap Lafran Pane?

Seno : Lafran benar-benar menghayati Tujuan HMI, terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian, Bernapaskan Islam, Bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah Swt.

Pejaten Timur, Jakarta, 18 Agustus 2009

WAWANCARA BAHARUDDIN ARITONANG

Assalamu 'alaikum Bang Baharuddin

Wa 'alaikum salam

Boleh diceritakan tentang kampung Pak Lafran yang di Sipirok, Bang. Abang 'kan berasal dari sana juga?

BA : Sipirok itu dulu memang pusat keagamaan, itulah yang sering dipuji oleh Sarwo Edi, mertua Presiden SBY, dia 'kan pernah Pangdam di Sumut, tentang kerukunan umat beragamanya, khas Indonesialah kerukunannya. Masjid sama Gereja berhadapan di situ, mereka bersaudara.

Saya sempat baca juga tentang Sipirok dari bukunya Pak Basyral Hamidi, Bang?

BA : Oh ya... bagus itu, tapi si Basyral itu bukan orang Sipirok, dia orang Sihepeng, Panyabungan. Saya pernah juga pelajari sosiologi daerah situ. Menariknya, daerah Sipirok itu 'kan pertama kali masuknya Zending Kristiani, namun di situ pula awal masuknya Muhammadiyah di Tapanuli, Anda bisa lihat bukunya Salahudi. Di situ ada Pesantren Ahmad Dahlan. Di sana prinsipnya agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, tapi kita juga ada ikatan kekerabatan yang lekat. Ya, toleransi agamanya sangat tinggi, namun pendalaman terhadap agama masing-masing juga begitu kuat.

Kondisi daerahnya sendiri gimana, Bang?

BA : Daerahnya dingin, dekat sibal-buali ada sungai yang indah, pokoknya daerah itu indah sekali. Sekarang, daerah

itu sudah diputuskan jadi ibu kota Tapanuli Selatan. Karena indahnyanya daerah itu, banyaklah lahir seniman. Anda mungkin kenal Mirhadi Siregar, penulis novel *Adab dan Sengsara* yang diterbitkan Balai Pustaka. Ada juga *Salah Asuhan*, kemudian *Siti Nurbaya*, itu ‘kan cerita dari situ. Kebetulan saya banyak buku-buku lama dari Balai Pustaka.

Kemudian hubungannya dengan Pak Lafran Pane, Bang?

BA : Ya, iyalah, makanya abang-abangnya Pak Lafran Pane itu seniman, penyair dan penulis buku. Mereka berdua, Armijn Pane dan Sanusi Pane, sangat terkenal dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Generasi sekarang memang banyak melupakan.

Nah, saya yakin ini memengaruhi kepribadian Pak Lafran Pane, semangat inklusifnya, egaliter dan menganggap semua orang kerabat.

Makanya, kita seperti keluarga saja. Apalagi kita sebagai orang Tapanuli Selatan yang merantau ke Yogya, pastilah main ke rumah Pak Lafran, karena kita merasa saudara, yah saudara satu kampung. Meski orang rantau, Pak Lafran kedaerahannya tetap baik. Ia juga bisa diterima oleh semua orang.

Menurut Abang, apa sebenarnya tujuan Lafran Pane mendirikan HMI?

BA : Saya kira sederhana, untuk mendidik mahasiswa tahu Islam. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Pak Lafran itu *easy going* saja. Nah, ketika sekarang HMI menjadi besar, baru orang bertanya-tanya, siapa sih pendiri HMI.

Tahun 1947, Pak Lafran mendirikan HMI dan langsung menjadi ketuanya. Dalam konteks saat itu, kurang lazim, karena biasanya pimpinan organisasi adalah anak priyayi?

BA : Ya, di HMI, saya rasa syarat menjadi pimpinan yang

penting aktif saja, tak ada syarat lain. Mau Anda anak siapa tidak aktif ya tidak bisa menjadi pimpinan. Waktu zaman saya tahun 1975, saya didorong teman-teman untuk menjadi Ketua Umum, padahal saya baru tingkat II. Waktu pemilihan formatur, saya selisih 5 suara dengan Joko Prabowo. Karena dia lebih senior, saya doronglah dia maju.

HMI itu 'kan egaliter, meski Joko Prabowo anaknya Pak Syaibani, Ketua Dewan Penyantun UGM, tapi dia biasa saja, kita juga tenang saja melihatnya. Rumahnya Joko itu tempat berkumpul tokoh-tokoh, kita juga sering nongkrong di situ. Taufiq Effendi (mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) juga sering nongkrong di situ, makanya dapatlah ia anaknya Pak Syaibani.

Di HMI Yogya, memang banyak orang luar Jawa, khususnya Sumatera, tapi persoalan suku, kita sudah selesai di HMI. Saya dulu Ketua Komisariat, lalu Ketua Kodema, kemudian Ketua I. Nah, setelah itu, saya masuk PB HMI, menjadi Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan, sekretaris saya Ibu Marwah Daud.

Berarti Pak Chumaidy lebih dulu dari Abang ya di HMI?

BA : Ya iya, Bang Chumaidy itu senior saya, jauh sekali, saya masih di Yogya, dia sudah Ketum PB HMI.

Kapan Abang tahu Pak Lafran pendiri HMI?

Ya waktu Maperca tahun 1972 saya sudah tahu. Walaupun ditetapkan tahun 1974, tapi sebelum ketetapan itu kita sudah tahu. Kita pernah baca juga di Dagen tentang Jenderal Sudirman yang bilang HMI itu Harapan Masyarakat Indonesia.

Mengenai Keislaman di HMI, apa yang Abang tangkap?

BA : Setahu saya, yang masuk di HMI itu macam-macam, yang kadar Keislamannya 10 persen masuk, 20 persen

masuk, 30 persen masuk, yang agak keras masuk, yang bagus seperti dari PII juga masuk, yang ekstrem-ekstrem juga masuk, pokoknya Islam model apa saja masuk ke HMI. Lalu, yang pengetahuannya lebih itulah yang mengajari yang kurang... ya belajar bersama. Jadi, interaksi yang ketat itu melahirkan toleransi.

Jadi apa yang bisa kita contoh dari Pak Lafran, Bang?

BA : Pak Lafran itu orangnya ikhlas, itu yang harus kita tiru. Dan itu tidak gampang, butuh perjuangan lahir-batin agar kita bisa ikhlas. Barangkali, ini yang langka. Kalau yang pintar-pintar, banyak sekali orang HMI. Mungkin ini bisa juga pelajaran bagi saya.

Maksudnya, Bang?

BA : Saya ini sekarang 'kan tidak terpilih lagi menjadi anggota BPK, tidak ada obat yang lebih bagus selain ikhlas. Jabatan itu 'kan titipan saja atau sarana mengabdikan, banyak sarana atau alat pengabdian lain...

Ada pesan terakhir, Bang?

BA : Saya pikir tokoh-tokoh HMI seperti Pak Lafran ini harus diangkat untuk menjadi cermin, di samping banyak juga tokoh-tokoh HMI yang lain yang kuat memegang prinsip.

Seperti Bang Abdullah Hehamahua mungkin, Bang?

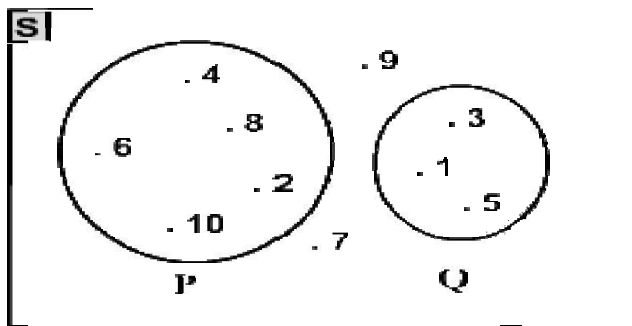
BA : Iya, itu si Hehamahua yang Penasihat KPK? Itu juga bisa dijadikan contoh. Banyak kok tokoh HMI yang kuat prinsip hidupnya. Tapi, jangan dikultuskan orangnya, sikap-sikap hidupnya itu yang mesti kita contoh.

Jakarta, September 2009

MAKNA HIMPUNAN*

Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau obyek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Jerman, yaitu George Cantor (1845–1918). Himpunan dapat juga diartikan sebagai kumpulan benda atau obyek-obyek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan.

Perhatikan obyek yang berada di sekeliling kita, misalnya ada sekelompok mahasiswa yang sedang belajar di kelas A, setumpuk buku yang berada di atas meja belajar, sehimpunan kursi di dalam kelas A, sekawanan itik berbaris menuju sawah, sederetan mobil yang antre karena macet dan sebagainya, semuanya merupakan contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari.



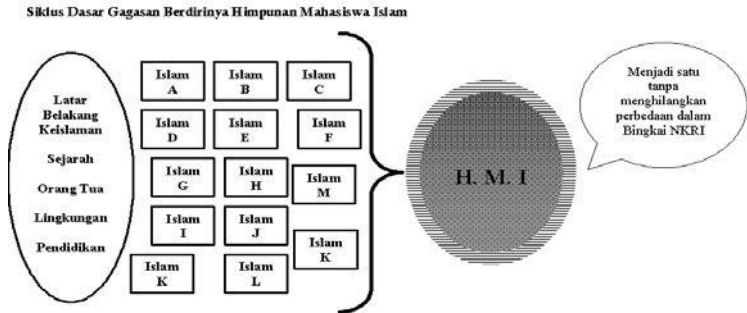
* Menurut Chamad Hojin (Ketum HMI Cabang Yogya 2001–2002), hal ini pernah disampaikan Nurcholish Madjid dalam sebuah forum.

S = himpunan semesta digambarkan dalam bentuk *persegi panjang*. P dan Q merupakan himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta (S), digambarkan dalam bentuk *kurva tertutup sederhana*. Setiap anggota himpunan S, P dan Q ditandai dengan sebuah *noktah* dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya.

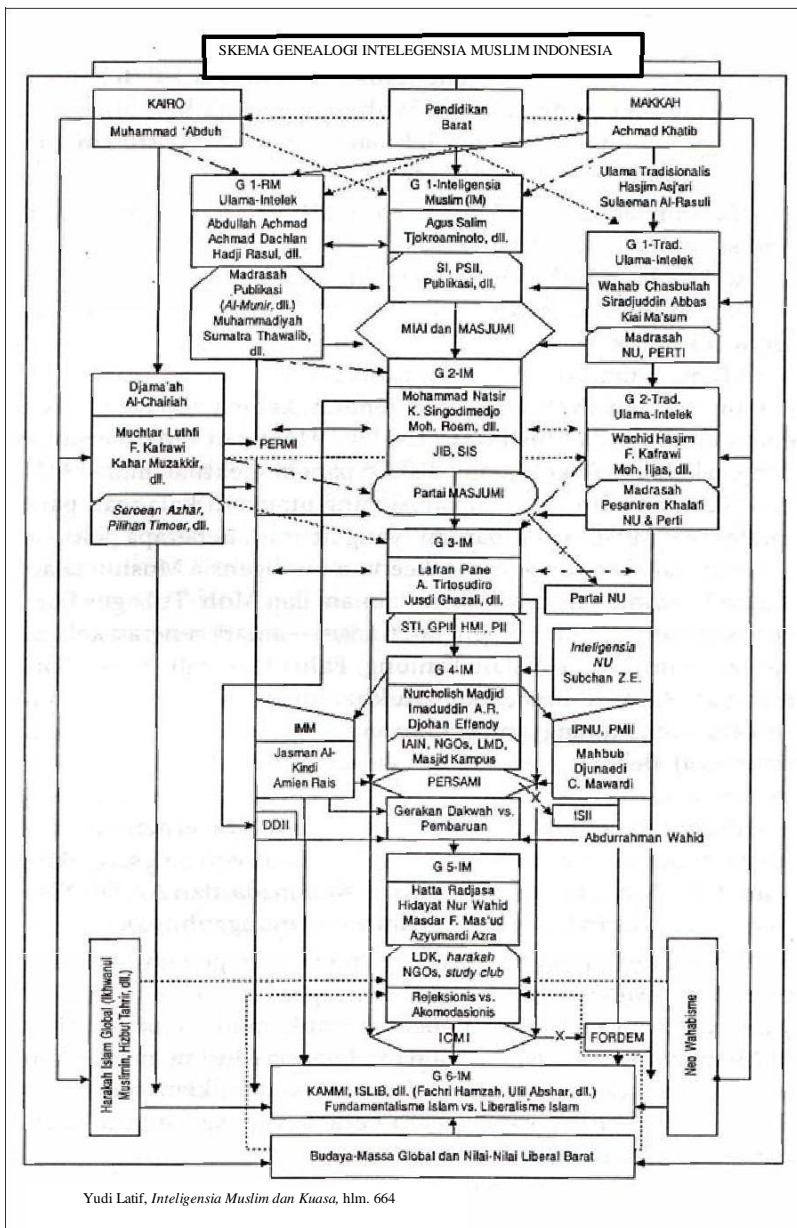
Mengacu kepada konsep tersebut, maka Himpunan Mahasiswa Islam dapat dipahami sebagai kumpulan dari penyebut-penyebut yang berbeda, namun terikat pada pem-bilang yang sama, misalnya 1/2, 1/4 dan seterusnya. Walaupun penyebutnya berbeda, namun pembilangnya tetap angka 1, itulah Islam. Islam itu sebagai pembilang dari kumpulan sebutan-sebutan yang berbeda.

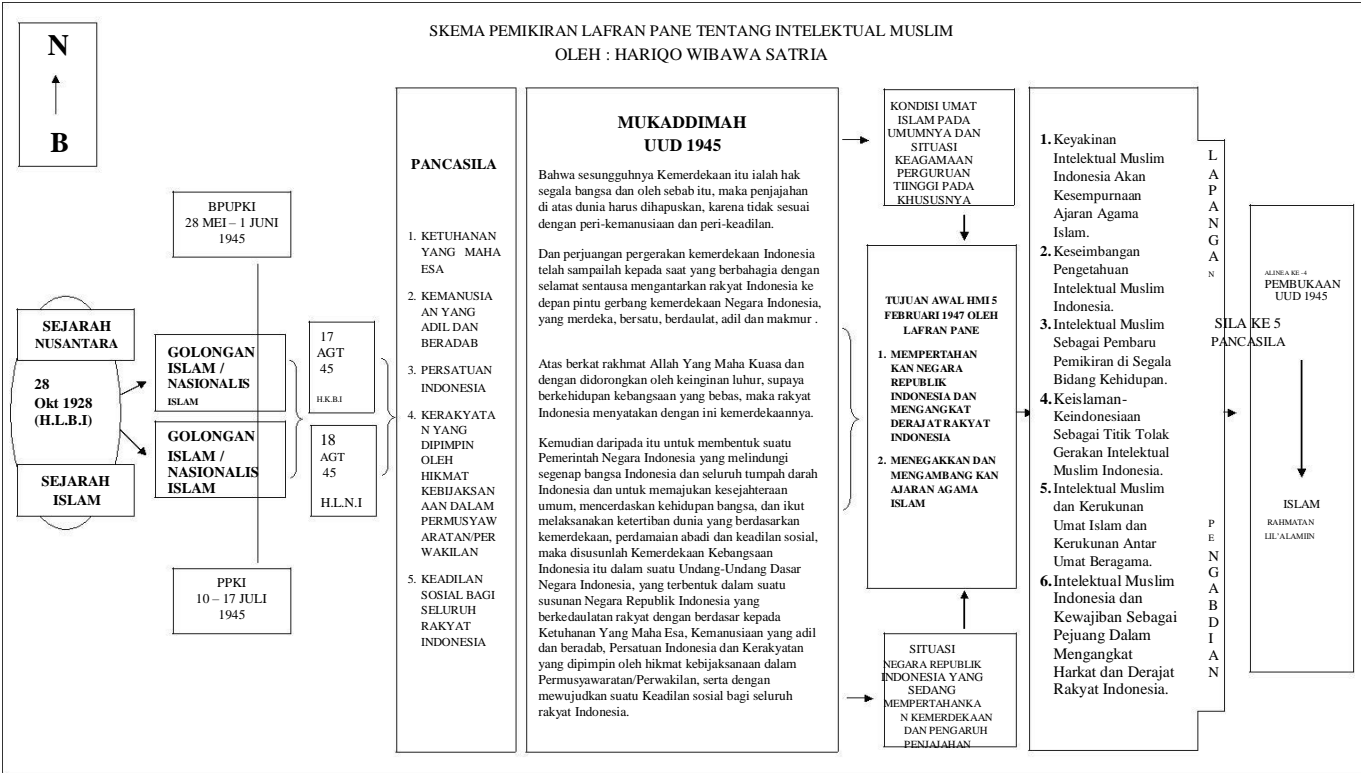
Seperti dikatakan oleh Baharuddin Aritonang: “Setahu saya, yang masuk di HMI itu macam-macam, yang kadar Keislaman-nya 10 persen masuk, 20 persen masuk, 30 persen masuk, yang agak keras masuk, yang bagus seperti dari PII juga masuk, yang ekstrem-ekstrem juga masuk, pokoknya Islam model apa saja masuk ke HMI. Lalu, yang pengetahuannya lebih itulah yang mengajari yang kurang... ya belajar bersama.”

Hal ini juga dapat digambarkan sebagai berikut:



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

MUKADIMMAH

Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wata'ala* telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang *haq* dan sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya.

Menurut iradat Allah *Subhanahu Wata'ala*, kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala*, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan *ukhuwah Islamiyah* sesama Umat Islam sedunia menuju masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat Muslim dan bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Keislaman demi terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah *Subhanahu Wata'ala* serta usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

PERNYATAAN BERSAMA CENDEKIAWAN INDONESIA

Dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Kami mensyukuri kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai momentum kebesaran sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; maka sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kami akan terus-menerus berupaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang terampil dalam bidangnya dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai perwujudan dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, serta berorientasi pada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sepanjang masa

Ditandatangani di Gedung Pancasila Jakarta oleh pimpinan Empat Organisasi Cendekiawan Indonesia bersamaan dengan acara penutupan seminar nasional sumber daya manusia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-49, pada hari Sabtu, 13 Agustus 1994, pukul 18.30

FORUM CENDEKIAWAN HINDU INDONESIA

Ketua Umum
Putu Setia

Sekretaris Umum
Sang Ketut Jaya

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA

Ketua Umum
B.J. Habibie

Lakhar Sekretaris
M. Amin Aziz.

KELUARGA CENDEKIAWAN BUDDHIS INDONESIA

Ketua Umum
Siti Hartati Murdaya

Sekretaris Jenderal
Oka Diputhera

PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA

Ketua Umum
Peter P. Sumbang

Sekretaris Jenderal
Cornelius Ronowidjojo



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002.
 Telp. 581436, 581982, 581466, 581903, 581843, 581805, 581988, 581846, 582481, 582468.

Nomor : 5774/D/1/92

Jakarta, 22 September 1992

Lampiran :

Perihal : Tanggapan penempatan rumah dinas
 a.n Ny. Bisromah Lafran Pane janda
 Almarhum Prof. Drs. H. Lafran Pane.

Kepada Yth
 Saudara Rektor IKIP Yogyakarta
 Karang Malang
 Yogyakarta

Menunjuk surat Saudara tanggal 7 September 1992 Nomor 0983/
 PT27.H/R.03.02/92, perihal tersebut pada pokok surat, dengan
 ini saya sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa penghunian rumah dinas di Jalan Gejayan Merican 1 E Yogyakarta oleh alm. Prof. Drs. H. Lafran Pane dan keluarganya didasarkan atas Keputusan Rektor Nomor 125 Tahun 1988 tanggal 6 Agustus 1988 ;
2. Penunjukan almarhum dan keluarganya sebagai penghuni rumah dinas dimaksud sebelumnya telah diketahui oleh Rektor tentang status kepegawaian negeri almarhum, yakni sebagai Guru Besar IKIP Yogyakarta dan selanjutnya dipelajarakan pada Kopertis Wilayah V Yogyakarta (diktum 1 dan 2 Keputusan Rektor diatas) sehingga masih dalam lingkup Depdikbud ;
3. Rumah dinas IKIP Yogyakarta merupakan asset Depdikbud, oleh karena itu sesuai dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0124/M/1975 pasal 10 ayat 3 jo ayat 4, almarhum dan keluarganya tetap berhak menempati rumah dinas dimaksud, selama sebelum pensiun almarhum masih berstatus pegawai negeri Depdikbud ;
4. Meskipun pernikahan antara almarhum dengan pemohon (Ny. Bisromah Lafran Pane) dilakukan setelah almarhum tidak bertugas di IKIP Yogyakarta, namun tidak akan mengurangi hak pemohon untuk memanfaatkan ketentuan dalam keputusan Mendikbud Nomor 0124/M/1975 jo Nomor 0270/M/1980 ;
5. Selain hal diatas surat permohonan Pemohon tanggal 30 Juni 1992 yang ditujukan kepada Bapak Mendikbud, belum/ tidak pernah Saudara ajukan keberatan meskipun tembusannya disampaikan pula kepada Saudara, dengan demikian mestinya Saudara telah menerima kenyataan pada butir 4 diatas.

Atas ...



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1.Senayan, Tromolpes 190, Jakarta - 10002.
Telp. 581436, 581982, 581466, 581903, 581843, 581805, 581988, 581846, 582481, 582468.

Atas dasar hal-hal diatas saya memperkuat pendirian semula dalam surat Nomor 4819/D/R/92 tanggal 21 Agustus 1992.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Sukadji Hanuwihardjo
Sukadji Hanuwihardjo
NIP. 130 120 324

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Sekretaris Ditjen Dikti u.p Kepala Bagian Perlengkapan ;
5. Yang bersangkutan.

as3/my/wis

HMI yang Menggelisahkan

Alumni HMI

Jejak Alumni Menuju Kursi Menteri (1970-2005)

Membesarnya Jejaring Alumni HMI

Penyebaran Alumni di DPR

DPR 1997-1999

DPR 2004-2009

Sumber: dari berbagai sumber, data HMI yang pernah terbit, HMI dan Wakil DPR/MPR, Lembaga Politik Bangsa.



Tanda Tangan Lafran Pane Ketika Meresmikan Gedung HMI Cabang Medan. Sekarang Gedung ini digunakan sebagai pusat kegiatan Badko HMI Sumatera Utara dan HMI Cabang Medan.



Desa Pangurabaan tempat kelahiran LAFRAN PANE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah, Taufiq dan Surjomihardjo, Abdurrahman (ed.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Abdurrahman (dkk.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masya - rakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Ali, Fahri dan Effendi, Bachtiar, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986.
- Ali, H.A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Al-Mutsaqqafuna fi al-Hadharah al-Arabiyah: Mihnah Ibn Hanbal wa Nahqah wa Naqbah Ibn Rusyd*, terj. Zamzam Afandi Abdillah, *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Anshari, Endang Saifuddin, *The Jakarta Charter of June 1945: A History of Gentlemen's Agreement between the Islamic and the 'Secular' Nationalist In Indonesia*, Kuala Lumpur: Abim, 1979.
- Anwar, M.S., *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Arya Sugiarto, Bima, *Anti Partai*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
- Bahar, Saafroedin (dkk.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-*

- Modernisme, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina – Pustaka Ankara, 1999.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia, an English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Effendi, Djohan dan Nasir, Ismet (ed.), *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Gaus AF, Ahmad, *Api Islam, Nurcholish Madjid, Jalan Hidup Seorang Visioner*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Guillot, Claude (ed.), *Lobu Tua Sejarah Awal Barus, Ecole Francaise d Extreme-Orient Assocation Archipel Pusat Penelitian Arkeologi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Harahap, Basyral Hamidy, *Pemerintah Kota Padang Sidempuan Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Pemerintah Kota Padang Sidempuan, 2003.
- Karim, Rusli, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik Indonesia*. Bandung: Mizan, 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mander Maju, 1996.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Latif, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, 2003.
- Malik, Kholis, *Konflik Ideologi: Kemelut Asas Tunggal di Tubuh HMI*, Yogyakarta: Insani Press, 2002.
- Mandan, A.M., Subhan Z.E., *Sang Maestro: Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2001.
- Moeis, Abdoel, *Salah Asuhan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1935.
- Mudzar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Fanatisme dan Kerukunan Hidup Antar-Umat Beragama*, Jakarta: Kanwil Departemen Agama, 1984.
- Natsir, Mohammad, *Politik melalui Jalur Dakwah*. Jakarta: Majelis Dakwah, 2008.
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- _____, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis*

- Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965*, Bandung: Mizan, 2000.
- _____, *Gerakan Modern Islam 1900–1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- _____, *Pengantar Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Pane, Lafran, *Memurnikan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ilmu Sosial (FKIS) IKIP, 1966.
- _____, *Perubahan Konstitusional*, Yogyakarta: IKIP, 1970.
- Partanto, Pius A. dan Albarry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rais, Amin (ed.), *Islam di Indonesia.*, Jakarta: Rajawali, 1986. Raliby, Osman, *Dokumenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1953.
- Ranuwiharjo, Dahlan A., *Menuju Pejuang Paripurna: Aspek Ideologi dari Islam menuju Terbinanya Insan Pejuang Paripurna Leadership, Strategi dan Taktik Perjuangan*, Ternate: KAHMI Maluku Utara, 2000.
- _____, *Bung Karno dan HMI dalam Pergulatan Sejarah: Mengapa Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?*, Jakarta: Intrans, 2002.
- Saidi, Ridwan, *Kebangkitan Islam Era Orde Baru: Studi Kepeloporan Cendekiawan Islam sejak Zaman Belanda sampai ICMI*, Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1993.
- _____, *Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah*, Jakarta: Direktorat Pers, Publikasi dan Penerbitan LBH-PP-GPI, 2007.
- Sanit, Arbi, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa*, Jakarta: Lingkar Studi Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Shiraisi, Takashi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912–1926*, New York: Cornell University Press, 1990. Terj. Hilmar Farid, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–126*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

- Silalahi, Susi, *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka versi Para Pendiri Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sitompul, Agussalim (dkk.), *Sejarah Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam: Setengah Abad IAIN Sunan Kalijaga 1951–2004 Berkiprah*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004.
- _____, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947–1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- _____, (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____, *Citra HMI*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam 1947–1993*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- _____, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- _____, *44 Indikator Kemunduran HMI: Suatu Kritik untuk Kebangkitan HMI*, Yogyakarta: Misaka Galiza, 2005.
- _____, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 1947–1975*. Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1976.
- Subardjo, *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Supardi (dkk.), *Setengah Abad UII: Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1994.
- Supriadi, Eko, *Sosialisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suratman, *Kamus Jerman-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Syari'ati, Ali, *Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam*, terj. Syafiq Bashri dan Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Islam Agama Protes*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- _____, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1998.
- Toer, Pramoedya Ananta, *Sang Pemuda*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- Yusuf, Ramli HM (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 1997.

B. Jurnal, Majalah, Koran, Internet, dan lain-lain

Adam, Asvi Warman, “Heboh Lagu Indonesia Raya”, dalam www.mediaIndonesia.com.

Anam, Syafi’il, “Independensi HMI”, *Panji Masyarakat* No. 324 dan diedit seperlunya, dalam www.hmistainkdr.blogspot.com

Arif, Syamsuddin, “Intelektual dan Intelektualisme: Perspektif Barat dan Islam”, seminar di Kuala Lumpur, 23 September 2007, dalam www.eramuslim.com, diakses Selasa, 25 Maret 2008, jam 14.00 WIB.

Azra, Azyumardi, “Intelektual Muslim di Dunia Islam”, dalam *Republika*, 19 Oktober 2006, dalam www.cmm.or.id, diakses tanggal 12 Januari 2009.

_____, “Mengabdikan Republik, Memberdayakan Umat”, dalam Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

_____, “Sejarah Hendaklah Ditulis dengan Semangat Intelektual”, *Kompas*, 2 Maret 2000.

Dahlan Thaib (Guru Besar Ilmu Tata Negara UII) mengatakan, “*Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, diamandemen, tapi batang tubuh boleh.*” Dalam diskusi bertajuk “Capres Independen” 20 Januari 2009 di Aula Kahar Muzakki, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pernyataan ini sudah dinyatakan oleh Lafran Pane 39 tahun silam.

Haesy, Qomaruddin Ch, “Tugas HMI dalam Mengamankan Pancasila”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

Hakiem, Lukman, “Lafran Pane Pahlawan Nasional, Mengapa Tidak?”, dalam Agussalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Meng - ayuh di antara Cita dan Kritik*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

<http://hoedjen74.multiply.com>.

Imam, Rijalul, “Profil Intelektual Profetik (1)”, dalam www.kammi.-or.id, diakses tanggal 28 November 2008, jam 22.00.

Lapmi HMI Denpasar, “Memoar Seorang Mantan Ketua Umum PB HMI”, dalam www.lapmidenpasar.s5.com, diakses hari Kamis 17 Juni 2008, jam 19.00.

Ma’arif, Syafii, “Wawasan Keindonesiaan HMI”, harian *Pelita*, Jakarta 9 April 1990.

Machasin, “Perjuangan Intelektual demi Keyakinan yang Mencerah-

- kan”, dalam Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Al-Mutsaqqafuna fi al-Hadharah al-Arabiyah: Mihnah Ibn Hanbal wa Nahqah wa Naqbah Ibn Rusyd*, terj. Zamzam Afandi Abdillah, *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Madjid, Nurcholish. “HMI: Dari Anak Umat ke Anak Bangsa”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 1997.
- Majalah *Forum Keadilan*, Nomor 10, Tahun III, 1 September 1994, hal. 84.
- Majalah *Media*, No. 4 Tahun II, Yogyakarta: Penerbit PB HMI, 1956, hal.11.
- Majalah *Panji Masyarakat*, Nomor 289 Th. XXIV, 11 Maret 1983.
- Mas’ud, Abdurrahman, “Umat Islam dan Permasalahannya”, dalam www.mentaritimur.com, diakses 25 Desember 2008.
- Masruri, Siswanto, “Intelektual-Ulama dan Kepemimpinan al-Quran di Indonesia”, dalam Abdurrahman, Burhanuddin Daja, Djam’annuri (editor), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Muhammad, Mar’ie, “HMI di Tengah-tengah Arus Globalisasi Abad XXI”, dalam Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*.
- Pane, Lafran, “Menggugat Eksistensi HMI”, *Jawa Pos*, 18 September 1990, dalam Agusssalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____, “Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia”, dalam Pedoman Lengkap Kongres Muslimin Indonesia 20–25 Desember 1949 di Yogyakarta, Yogyakarta: Panitia Pusat KMI Bagian Penerangan, 1949), hal. 56, dalam Agusssalim Sitompul (ed.), *50 Tahun HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- PB HMI, “Hasil-hasil Kongres XXVI HMI, Makassar 20–26 Februari 2006”, PB HMI, Bab ART, 2006, diakses dari situs www.pbhmi.com, tanggal 13 Februari 2007, jam 19.00 WIB.
- Rab, Tabrani, “HMI dari Masa ke Masa”, harian *Riau Pos* Pekanbaru, 1 dan 2 Desember 1992.
- Raharjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1999.
- Ridwan, M. Deden, “Mempertegas Visi Keislaman HMI”, harian

- Republika*, 19 Januari 1995.
- Saidi, Ridwan, “Akar Sejarah Cendekiawan Muslim”, harian *Suara Pembaruan*, Jakarta, Jumat, 24 Juni 1988.
- Sulastomo, “HMI, Dulu, Kini, dan Masa Datang”, *Kompas*, 22 Februari 2006, dalam www.kompas.com.
- _____, “Mengenang Mas Lafran, Mahmud Yunus dan Soleh Widodo”, dalam harian *Pelita*, Jakarta, 4 Februari 1991.
- Supriyadi, Eko, “Memahami Islam sebagai Sebuah Gerakan Ideologis yang Mencerahkan dan Membebaskan”, *Book Review Digital Journal Al-Manâr* Edisi I/2004, dari buku Ali Syari’ati, *Ideologi Kaum Intelektual*, Cet V, Dzulhijjah 1413, Bandung: Mizan, 1993.
- Tandja, Victor Immanuel, “HMI dalam Dialog Antar-Umat Beragama”, *Republika*, 6 Februari 1997.
- Tarigan, Azhari Akmal, “HMI: Harapan Masyarakat Indonesia? Catatan 60 Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (1947–2007)”, *WASPADA Online*, ditulis pada 8 Juni 2007 oleh hmibecak.
- Tirtosudiro, Ahmad, “HMI dalam Pergerakan Mempertahankan Kemerdekaan”, Ramli HM Yusuf (ed.), *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 1997.
- Universitas Islam Indonesia, “Sejarah UII”, dalam www.uui.co.id, diakses tanggal 19 Januari 2009.
- Van Bruinessen, Martin, “Suara Baru tentang Islam”, dalam Dick Van Der Meij (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: INIS, 2003.
- www.uui.co.id, diakses tanggal 19 Desember 2008.
- www.wikipedia.org, diakses tanggal 19 Januari 2009.
- www.jakarta.go.id diakses tanggal 10 Desember 2008.

C. Wawancara Langsung

- Yudi Latif**, Alumni S-3 Australian National University, di Hotel Santika, Yogyakarta, 16 Mei 2008, jam 15.00–16.00
- Syafri Syairin**, Mantan Dekan FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM), di Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Selasa 23 September 2008.
- Abdul Gafur**, Guru Besar UNY, di ruang dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 23 September 2008, jam 11.00–12.00,
- Chumaidy Syarif Romas**, Ketum PB HMI 1976–1978, di ruang

dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 Juni 2008, jam 09.30–11.00 WIB.

Ekram Prawiroputro, Guru Besar UNY, Mantan Asisten Pribadi Lafran Pane, di ruang dosen Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta, 24 September 2008.

Lukman Hakiem, Anggota DPR RI periode 2004–2009 dari Fraksi PPP, 24 Maret 2008, *via email*, 09 Maret 2008.

Suyata, Direktur Pascasarjana UNY, *via telepon*, Rabu 24 September 2008 .

Dochak Latief, Mantan Rektor UMY Solo, di Rumah Deresan Yogyakarta, 29 September 2008.

Daris Purba, Pengacara, di Kantor Pengacara, Yogyakarta, Kamis 25 September 2008.

Iqbal Pane (Putra Lafran Pane, Inspektur Wilayah II, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia) di Bintaro, Jakarta, 17 Agustus 2009).

Senopati, Mantan Staf Menpora Era Gus Dur, di Pejaten, Jakarta Selatan, 18 Agustus 2009.

Mahadi Sinambela (Menpora Era Gus Dur), di Kantor Redaksi majalah *Medium*, Lenteng Agung, Jakarta, Agustus 2009.

Baharuddin Aritonang (Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan–BPK RI), di kediaman, Pejompongan, Jakarta, Agustus 2009.

TENTANG PENULIS

Hariqo itu singkatan dari Hari Raya Qorban. Saya lahir pas Hari Raya Idul Adha, di Bukittinggi, Sumatera Barat, tanggal 8 Oktober 1981. Papa dan mama saya, Syahrial dan Khaermenawati sepakat memberi nama Hariqo, lengkapnya Hariqo Wibawa Satria.

Saya alumnus Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Agama, Pascasarjana Universitas Paramadina Jurusan Hubungan Internasional.

Saat mahasiswa, saya menulis berbagai tema di media daerah dan nasional. Artikel pertama saya dimuat Koran *Padang Expres* tahun 2003 tentang pentingnya dialog antarumat bergama. Lulus kuliah, saya mulai fokus menulis, menyampaikan pendapat terkait sejarah, diplomasi, dan media sosial di banyak forum, media *online*, media cetak, radio dan televisi nasional.

Tahun 2008, saya terpilih menjadi tiga besar dari 313 pemuda dalam program *The Next Leader* yang diselenggarakan The Leads Institute Universitas Paramadina dan Metro TV.

Karena krisis ekonomi global tahun 2008, sebelum babak final kegiatan tersebut, pihak sponsor mengabarkan bahwa beasiswa pendidikan S-2 di Amerika bagi pemenang nantinya, diganti dengan kuliah di pascasarjana Universitas Paramadina. Saya beruntung dapat beasiswa, sebab IPK saya rendah sekali saat lulus S-1.

Tahun 2010 saya pindah dari Yogya ke Jakarta, kos di belakang Pasar Rumput Jakarta.

Saya bekerja di Charta Politika (2009-2010), Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (2010-2013), Humas Pemkot Bogor, Kwarnas

Gerakan Pramuka (Andalan Nasional Bidang Kominfo). Pada 18 Agustus 2015, saya mendirikan Komunitas, Institut Media Sosial dan Diplomasi.

PASSION DAN KEKUATAN MEDIA SOSIAL

Tahun 2012, saya membuat akun Twitter @ASEANcom2015 (sekarang berubah @DiplomasiTotal), untuk mengingatkan tentang peluang dan tantangan pasar bebas ASEAN tahun 2015.

Isu Komunitas ASEAN ini tidak *beken*. Kemenlu RI mengatakan saat itu: 80 persen orang Indonesia hanya sekadar tahu ASEAN lewat nama. Sementara 19 persen lainnya, bahkan belum pernah mendengar tentang ASEAN. Nama para dubes Indonesia di negara ASEAN saja banyak masyarakat tidak tahu.

Tapi saya suka isu ini. Pagi, siang, malam saya kelola akun Twitter @ASEANcom2015. Banyak yang mengira, ini akun resmi ASEAN. Padahal akun ini saya kelola dari kos-kosan, sepeser pun tak ada anggaran, empat jam setiap hari saya gunakan untuk mengelola akun ini. Saya bahagia mengelola akun dengan isu yang saya sukai.

Akun ini menarik perhatian. Saya diundang menjadi narasumber tentang pasar bebas ASEAN di FISIPOL UGM Yogyakarta, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pancasila, Universitas Jaya Baya, STT PLN, Politeknik Negeri Semarang, Polban Bandung. Berbagai kampus, pesantren, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, bahkan Kementerian Luar Negeri hingga empat kali mengundang saya sebagai narasumber. Dalam setiap forum, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi pengguna medsos untuk kemenangan Indonesia.

Dengan modal sosial keliling mengisi materi itu, saya mendirikan Komunitas Peduli ASEAN (KAPAS). Komunitas ini mengadakan berbagai aksi di Hari Bebas Kendaraan dan seminar. Saya kemudian diajak menghadiri ASEAN Roundtable Forum pada 14 Oktober 2015 di Kementerian Luar Negeri Malaysia.¹ Puncaknya, KAPAS mengadakan pertemuan pada tahun 2016 di Kementerian Luar Negeri, dihadiri 320 orang.

Untuk pertama kalinya tagar #IndonesiaJuaraASEAN menjadi trending topik di media sosial.

Saya serta teman-teman semakin semangat menyelenggarakan berbagai diskusi dan aksi guna mendorong kolaborasi pengguna medsos untuk kepentingan nasional. Dari perjalanan ini saya menyadari, sebelum melakukan pengorganisasian menggunakan media sosial, seseorang haruslah terlebih dahulu terbiasa melakukan berbagai pengorganisasian di darat.

Terima kasih kepada seluruh relawan atas keikhlasannya. Terima kasih kepada seluruh media yang telah menyosialisasikan berbagai kegiatan Komunitas Peduli ASEAN dan Komunikonten. Salam Diplomasi.

Kepada teman-teman di mana pun berada, jangan ragu menghubungi saya di nomor hp: 081289001636, Fanpage Facebook: Hariqo Wibawa Satria, Twitter: @hariqo, Instagram: @hariqo81, email: hariqo81@gmail.com



“

Usia kita pendek, usia organisasi dan konten yang dilahirkannya panjang. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan konten. Buku #SMTMedsos ini menghadirkan Anda dan organisasi Anda di telepon genggam setiap orang, dengan lebih bermakna dan menyenangkan.”

”

308 halaman, *full colour*, 15 cm x 23 cm
International standard book number:
978-623-91210-06

Stok terbatas

☎ 0823-3050-1337 (Nova), 0838-7462-8589 (Nurul)

Pelajari 10 manfaat buku ini di www.komunikonten.com

Buku terbaru Hariqo Wibawa Satria



Stok buku ini terbatas. Sebelum membeli, mari pelajari 10 manfaat buku SENI MENGELOLA TIM MEDIA SOSIAL; 200 Tips Ampuh Meningkatkan Performa Organisasi di Internet dengan Anggaran Terbatas

1. **Meningkatkan jumlah konten yang diproduksi masyarakat tentang organisasi Anda.** Mengelola medsos adalah mengelola pikiran. **Pelajari daftar isi buku ini sebelum membaca halaman lain.**
2. **Menghemat biaya organisasi.** Medsos, website adalah properti, semakin dikelola, semakin ramai dikunjungi, semakin berkurang biaya iklan. **Mahal bayar *influencer*?, mari berpikir melahirkan *influencer* dari dalam organisasi Anda.**
3. **Menghadirkan Anda dan organisasi Anda** di telepon genggam setiap orang, dengan lebih bermakna dan menyenangkan.
4. **Mencengah korupsi dan merawat kesetaraan.** Pimpinan organisasi Anda diawasi sejak perencanaan. Banyak pemimpin, kepala daerah tidak korupsi dan menolak jadi '**Raja**' karena '**Kecerewetan**' pengguna medsos. Buku ini menjelaskan cara mengelolanya.
5. **Menumbuhkan budaya digital**, kesadaran perlindungan data pribadi dan organisasi, semangat membara untuk membuat medsos sendiri, mesin pencari dan berbagai aplikasi. Budaya digital mendorong organisasi Anda untuk berpikir global demi **kejayaan NKRI.**
6. **Sebagai rujukan dalam pembentukan tim medsos** bagi organisasi bisnis, pemerintah, pendidikan, yayasan, koperasi dan organisasi nirlaba lainnya. Buku ini menjelaskan tahapan pembentukan tim medsos, rekrutmen, pembagian tugas dan berbagai model tim medsos. 126 Konten dan aktivitas pelibatan publik, pengelolaan medsos tokoh, kepemimpinan digital, penyelesaian krisis komunikasi, pengelolaan grup percakapan online, anggaran tim medsos, penyusunan

strategi komunikasi, kalender medsos, 60 catatan terkait literasi dan banyak tips lainnya.

7. **Menghidupkan kesadaran publikasi dan dokumentasi di organisasi Anda.** Dalam menyelenggarakan kegiatan, banyak organisasi lebih fokus pada **partisipasi** (jumlah peserta, siapa yang hadir) dan **pengorganisasian** kegiatan, namun mengesampingkan **publikasi dan dokumentasi**. Padahal aspek ini diperlukan generasi yang hidup setelah kita. Publikasi dan dokumentasi adalah bagian dari kesadaran sejarah.
8. **Mengubah struktur organisasi.** Internet sudah ada sejak 1969, dan masuk Indonesia sekitar tahun 1990-an. Sedangkan medsos hadir di Indonesia tahun 1997. **Sayangnya banyak struktur organisasi lambat beradaptasi.** Tim medsos belum dianggap penting. Buku ini meminta agar tim medsos tidak sekadar dibentuk, tapi dimasukkan dalam struktur resmi organisasi.
9. **Sebagai bekal hidup.** Belajar tentang internet, medsos, konten, pemasaran, pelibatan publik menjadikan Anda sebagai sosok yang sangat diperlukan di era digital ini. *Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu.*
10. **Menambah jumlah produsen konten.** Coba hitung berapa jumlah organisasi di Indonesia. Jika seluruhnya produsen, maka Indonesia akan memengaruhi dunia dengan konten. **Sumber utama konten adalah kegiatan organisasi.** Kegiatan adalah konten, membuat konten adalah kegiatan. Usia kita pendek, usia organisasi dan konten yang dilahirkannya panjang. **Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan konten.**

Stok buku terbatas, pesan sekarang juga, hubungi 0823-3050-1337 (Nova) atau 0838-7462-8589 (Nurul). Buku Full Colour, jumlah halaman 308.



HARIQO WIBAWA SATRIA, adalah seorang yang berpengalaman melakukan pengorganisasian di darat dan media sosial. Lahir 8 Oktober 1981 di Bukittinggi, Sumatera Barat, dari pasangan Syahril dan Khaermenawati. Alumnus Pondok Modern Gontor ini sering menjadi narasumber di stasiun televisi nasional, media, kampus, kementerian, penda dan berbagai organisasi bisnis serta nirlaba. Instagram: @hariqo81. WA: 081289001636

BEBERAPA MANFAAT BUKU INI

1. **Meningkatkan jumlah konten yang diproduksi masyarakat terkait organisasi Anda.** Mengelola medsos adalah mengelola pikiran. Pelajari daftar isi buku ini sebelum membaca halaman lain.
2. **Menghemat biaya organisasi.** Medsos, website adalah properti, semakin dikelola, semakin ramai dikunjungi, semakin berkurang biaya iklan. Mahal bayar influencer? Mari berpikir untuk melahirkan influencer dari dalam organisasi Anda.
3. **Menghadirkan Anda dan organisasi Anda di telepon genggam setiap orang dengan lebih bermakna dan menyenangkan.**
4. **Mencegah korupsi dan merawat kesetaraan.** Pimpinan organisasi Anda diawasi sejak perencanaan. Banyak pemimpin, kepala daerah tidak korupsi dan menolak jadi 'Raja' karena 'kecerewetan' pengguna medsos. Buku ini menjelaskan cara mengelolanya.
5. **Menumbuhkan budaya digital,** kesadaran perlindungan data pribadi, semangat membara untuk membuat medsos sendiri, mesin pencari dan berbagai aplikasi. Budaya digital mendorong organisasi Anda berpikir global untuk kejayaan NKRI.
6. **Sebagai rujukan dalam pembentukan tim medsos** bagi organisasi bisnis, pemerintah, pendidikan dan organisasi nirlaba lainnya. Buku ini menjelaskan tahapan pembentukan tim medsos, rekrutmen, pembagian tugas dan berbagai model tim medsos. 126 konten dan aktivitas yang melibatkan publik, pengelolaan medsos tokoh, kepemimpinan digital, penyelesaian krisis komunikasi, pengelolaan grup percakapan online, anggaran tim medsos, penyusunan strategi komunikasi, kalender medsos, 59 catatan terkait literasi dan banyak tips lainnya.
7. **Menambah jumlah produsen konten.** Coba hitung berapa jumlah organisasi di Indonesia. Jika seluruhnya produsen, maka Indonesia akan memengaruhi dunia dengan konten. Sumber utama konten adalah kegiatan organisasi. Kegiatan adalah konten, membuat konten adalah kegiatan. Usia kita pendek, usia organisasi dan konten yang dilahirkannya panjang.

Mohon maaf, buku ini bukan untuk Anda yang berharap hasil instan.

WWW.KOMUNIKONTEN.COM

komunikonten **commAF**
.com

INTERNET
ISBN 978-623-11210-0-6



9 786239 121006

Harga Rp 165.000